



LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI

2025

TAHUN
2026



**LPPD
2025**

KATA PENGANTAR



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala rahmat dan karunia-Nya, penyusunan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 akhirnya dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Bekasi Tahun 2025 merupakan laporan mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran yang berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Laporan ini disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri, Gubernur Jawa Barat, serta kepada masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bagian Otonomi Daerah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Barat serta Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri atas arahan, bimbingan, serta berbagai masukan yang diberikan kepada kami. Dukungan tersebut sangat membantu dalam proses penyusunan hingga penyempurnaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bekasi Tahun 2025, sehingga dokumen ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan masukan bagi Kementerian/Lembaga terkait dalam

melaksanakan pembinaan dan pengawasan lebih lanjut. Selain itu, laporan ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam upaya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah, khususnya melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia aparatur serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Akhirnya kami berharap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bahan evaluasi dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan daerah. Selain itu, laporan ini juga diharapkan dapat menjadi acuan dalam penataan serta peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di Kota Bekasi pada masa yang akan datang., pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kota Bekasi.

Bekasi, 13 Maret 2026
Wali Kota Bekasi



Tri Adhianto Tjahyono



**LPPD
2025**

DAFTAR ISI



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....iii

DAFTAR TABEL.....vii

DAFTAR GAMBAR.....xxvi

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang 1

1.1.1 Penjelasan Umum.....1

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah 173

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal..... 286

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....299

2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO 299

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia.....300

2.1.2 Angka Kemiskinan.....303

2.1.3 Angka Pengangguran.....307

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi.....310

2.1.5 Pendapatan Perkapita.....312

2.1.6 Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio).....314

2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 314

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil.....314

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....364

2.2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.....371

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN...590

3.1 DASAR HUKUM..... 590

3.2 GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN..591

3.3 CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN...592

3.3.1 Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Daerah.....612

3.3.1.1 Target Kinerja.....	596
3.3.1.2 Realisasi.....	582
3.3.2 Tugas Pembantuan Provinsi Yang Dilaksanakan Oleh Daerah.....	616
3.3.2.1 Target Kinerja.....	616
3.3.2.2 Realisasi.....	618
3.4 PERMASALAHAN DAN KENDALA.....	616
3.5 SARAN DAN TINDAK LANJUT.....	616
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.....	619
4.1 URUSAN PENDIDIKAN.....	619
4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar SPM Urusan Pendidikan.....	619
4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan oleh Daerah.....	626
4.1.3 Hasil Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan.....	632
4.1.4 Alokasi Anggaran untuk Pemenuhan SPM Urusan Pendidikan.....	633
4.1.5 Dukungan Personil untuk Pemenuhan SPM Urusan Pendidikan.....	633
4.1.6 Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Urusan Pendidikan.....	635
4.2 URUSAN KESEHATAN.....	639
4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar SPM Urusan Kesehatan.....	639
4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal SPM Urusan Kesehatan oleh Daerah.....	641
4.2.3 Hasil Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan.....	643
4.2.4 Alokasi Anggaran untuk Pemenuhan SPM Urusan Kesehatan.....	678
4.2.5 Dukungan Personil untuk Pemenuhan SPM Urusan Kesehatan.....	679
4.2.6 Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Urusan	

	Kesehatan.....	680
4. 3	URUSAN PEKERJAAN UMUM.....	685
4.3.1	Jenis Pelayanan Dasar SPM Urusan Pekerjaan Umum	685
4.3.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum oleh Daerah.....	686
4.3.3	Hasil Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum.....	689
4.3.4	Alokasi Anggaran untuk SPM Urusan Pekerjaan Umum	697
4.3.5	Dukungan Personil untuk Pemenuhan SPM Urusan Pekerjaan Umum.....	698
4.3.6	Kendala, Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum.....	700
4. 4	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT.....	705
4.4.1	Jenis Pelayanan Dasar SPM Urusan Perumahan Rakyat.....	705
4.4.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat	706
4.4.3	Hasil Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat.....	710
4.4.4	Alokasi Anggaran untuk Pemenuhan SPM Urusan Perumahan Rakyat.....	713
4.4.5	Dukungan Personil untuk Pemenuhan SPM Urusan Perumahan Rakyat.....	714
4.4.6	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat.....	715
4. 5	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.....	718
4.5.1	SUB URUSAN KETENTERAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	720
4.5.2	SUB URUSAN BENCANA.....	734
4.5.3	SUB URUSAN KEBAKARAN.....	759

4. 6	URUSAN SOSIAL	773
4.6.1	Jenis Pelayanan Dasar SPM Urusan Sosial.....	773
4.6.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial oleh Daerah.....	774
4.6.3	Hasil Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial.....	775
4.6.4	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Urusan Sosial.....	793
4.6.5	Dukungan Personil untuk Pemenuhan SPM Urusan Sosial.....	794
4.6.6	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Urusan Sosial.....	797
4. 7	PROGRAM DAN KEGIATAN.....	802
4.7.1	Urusan Pendidikan.....	803
4 7.2	Urusan Kesehatan.....	806
4.7.3	Urusan Pekerjaan Umum.....	828
4.7.4	Urusan Perumahan Rakyat.....	837
4.7.5	Sub Urusan Trantibumlinmas.....	840
4.7.6	Urusan Sosial.....	854
BAB V PENUTUP.....		855
LAMPIRAN		



**LPPD
2025**

DAFTAR TABEL



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelurahan dan Kecamatan Semester II Tahun 2025.....	8
Tabel 1.2	Rekapitulasi Luas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan, Jumlah RW dan Jumlah RT se-Kota Bekasi.....	18
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai pada Unit Kerja Perangkat Daerah.....	21
Tabel 1.4	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2026..	26
Tabel 1.5	Realisasi Belanja Daerah Urusan Pendidikan	35
Tabel 1.6	Realisasi Belanja Daerah Urusan Kesehatan	41
Tabel 1.7	Realisasi Belanja Daerah Urusan Pekerjaan Umum.....	49
Tabel 1.8	Realisasi Belanja Daerah Urusan Perumahan Rakyat..	57
Tabel 1.9	Realisasi Belanja Daerah Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum.....	60
Tabel 1.10	Realisasi Belanja Daerah Urusan Sosial.....	68
Tabel 1.11	Realisasi Belanja Daerah Urusan Tenaga Kerja.....	72
Tabel 1.12	Realisasi Belanja Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	74
Tabel 1.13	Realisasi Belanja Daerah Urusan Ketahanan Pangan...	78
Tabel 1.14	Realisasi Belanja Daerah Urusan Pertanahan.....	81
Tabel 1.15	Realisasi Belanja Daerah Urusan Lingkungan Hidup	82
Tabel 1.16	Realisasi Belanja Daerah Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	86
Tabel 1.17	Realisasi Belanja Daerah Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	89
Tabel 1.18	Realisasi Belanja Daerah Urusan Perhubungan	93
Tabel 1.19	Realisasi Belanja Daerah Urusan Komunikasi.....	97
Tabel 1.20	Realisasi Belanja Daerah Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	99
Tabel 1.21	Realisasi Belanja Daerah Urusan Penanaman Modal	102

Tabel 1.22	Realisasi Belanja Daerah Urusan Kepemudaan dan Olah Raga.....	105
Tabel 1.23	Realisasi Belanja Daerah Urusan Statistik	108
Tabel 1.24	Realisasi Belanja Daerah Urusan Persandian.....	108
Tabel 1.25	Realisasi Belanja Daerah Urusan Kebudayaan.....	109
Tabel 1.26	Realisasi Belanja Daerah Urusan Perpustakaan.....	110
Tabel 1.27	Realisasi Belanja Daerah Urusan Kearsipan.....	127
Tabel 1.28	Realisasi Belanja Daerah Urusan Pariwisata	114
Tabel 1.29	Realisasi Belanja Daerah Urusan Pertanian	115
Tabel 1.30	Realisasi Belanja Daerah Urusan Perdagangan	117
Tabel 1.31	Realisasi Belanja Daerah Urusan Perindustrian	119
Tabel 1.32	Realisasi Belanja Daerah Urusan Pemerintahan.....	120
Tabel 1.33	Realisasi Belanja Daerah Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perngawasan)	123
Tabel 1.34	Realisasi Belanja Daerah Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan).....	125
Tabel 1.35	Realisasi Belanja Daerah Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan)	129
Tabel 1.36	Realisasi Belanja Daerah Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian).....	136
Tabel 1.37	Realisasi Belanja Daerah Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Penelitian dan Pengembangan)	138
Tabel 1.38	Realisasi Belanja Daerah Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (SEKRETARIAT DPRD).....	139
Tabel 1.39	Realisasi Belanja Daerah Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (KECAMATAN)	142
Tabel 1.40	Realisasi Belanja Daerah Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (KESATUAN BANGSA DAN POLITIK).....	170
Tabel 1.41	Visi, Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran beserta Target Capaian Pembangunan Kota Bekasi 2025-2029.....	208
Tabel 1.42	Indikator dan Target dari Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bekasi 2024-	

	2026.....	211
Tabel 1.43	Program Perangkat Daerah Kota Bekasi tahun 2025-2029.....	214
Tabel 1.44	Indikator dan target dari Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bekasi 2024-2026.....	211
Tabel 1.45	Program Pembangunan Daerah	214
Tabel 1.46	Proyeksi APBD Kota Bekasi 2026-2030.....	276
Tabel 1.47	Program Prioritas Pembangunan.....	279
Tabel 1.48	Penjelasan Standar Pelayanan Minimal Dasar Menurut Urusan	290
Tabel 1.49	Jenis Tindakan Menurut Tingkatan Pemerintah.....	293
Tabel 2.1	Capaian Kinerja Makro Tahun 2025.....	299
Tabel 2.2	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Hasil	315
Tabel 2.3	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....	365
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2025 (sesuai RPD)	372
Tabel 2.5	Tujuan/Sasaran Strategis Pembangunan dan Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 (sesuai RPJMD) ..	375
Tabel 2.6	Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 (sesuai RPD)	377
Tabel 2.7	Capaian Kinerja Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2025 (sesuai RPJMD).....	380
Tabel 2.8	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur.....	383
Tabel 2.9	Penurunan Intensitas Emisi GRK.....	387
Tabel 2.10	Indeks Ketimpangan Gender.....	406
Tabel 2.11	Nilai Kota Layak Anak	411
Tabel 2.12	PDRB Per Kapita	416
Tabel 2.13	Indeks Ketahanan Pangan.....	418
Tabel 2.14	Tingkat Pengangguran terbuka	424
Tabel 2.15	Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial.....	438

Tabel 2.16	Tingkat Kemiskinan.....	426
Tabel 2.17	Laju Pertumbuhan Ekonomi	430
Tabel 2.18	RasioGini.....	435
Tabel 2.19	Indeks Daya Saing Daerah.....	438
Tabel 2.20	Indeks Harmoni.....	441
Tabel 2.21	Indeks Reformasi Birokrasi.....	441
Tabel 2.22	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik.....	455
Tabel 2.23	Daftar Nilai Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025.....	447
Tabel 2.24	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	452
Tabel 2.25	Daftar Perangkat Daerah Dengan Nilai Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025.....	453
Tabel 2.26	Pencapaian Indeks Pengelolaan keuangan Daerah.....	456
Tabel 2.27	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	459
Tabel 2.28	Nilai Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah Terintegrasi Kota Bekasi.....	462
Tabel 2.29	Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur tahun ini dengan tahun sebelumnya.....	466
Tabel 2.30	Perbandingan capaian Penurunan Intensitas Emisi GRK tahun ini dengan tahun sebelumnya.....	466
Tabel 2.31	Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Manusia tahun ini dengan tahun sebelumnya.....	467
Tabel 2.32	Perbandingan Capaian Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita tahun ini dengan tahun sebelumnya.....	468
Tabel 2.33	Perbandingan Indeks Pembangunan Keluarga tahun ini dengan tahun sebelumnya.....	469

Tabel 2.34	Perbandingan capaian Indeks Ketimpangan Gender tahun ini dengan tahun sebelumnya.....	470
Tabel 2.35	Perbandingan capaian Nilai Kota Layak Anak tahun ini dengan tahun sebelumnya.....	471
Tabel 2.36	Tren Nilai Kota Layak Anak Kota Bekasi.....	472
Tabel 2.37	Perbandingan capaian PDRB Per Kapita tahun ini dengan tahun sebelumnya.....	472
Tabel 2.38	Perbandingan capaian Indeks Ketahanan Pangan tahun ini dengan tahun sebelumnya.....	473
Tabel 2.39	Perbandingan capaian Tingkat Pengangguran Terbuka tahun ini dengan tahun sebelumnya.....	474
Tabel 2.40	Perbandingan capaian Tingkat Kemiskinan tahun ini dengan tahun sebelumnya.....	475
Tabel 2.41	Perbandingan capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun ini dengan tahun sebelumnya.....	476
Tabel 2.42	Tren Nilai Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021–2025.....	477
Tabel 2.43	Perbandingan capaian Rasio Gini tahun ini dengan tahun sebelumnya.....	477
Tabel 2.44	Perbandingan capaian Indeks Daya Saing Daerah tahun ini dengan tahun sebelumnya.....	478
Tabel 2.45	Perbandingan capaian Indeks Harmoni tahun ini dengan tahun sebelumnya.....	479
Tabel 2.46	Perbandingan capaian Indeks Reformasi Birokrasi tahun ini dengan tahun sebelumnya.....	480
Tabel 2.47	Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik tahun ini dengan tahun sebelumnya.....	481
Tabel 2.48	Perbandingan capaian Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun ini dengan tahun	

	sebelumnya.....	482
Tabel 2.49	Perbandingan Nilai AKIP Tahun 2023, 2024 dan Tahun 2025.....	482
Tabel 2.50	Perbandingan capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah tahun ini dengan tahun sebelumnya.....	483
Tabel 2.51	Perbandingan capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah tahun ini dengan tahun sebelumnya.....	483
Tabel 2.52	Perbandingan capaian Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun ini dengan tahun sebelumnya.....	484
Tabel 2.53	Perbandingan capaian Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Kota Bekasi tahun ini dengan tahun sebelumnya.....	486
Tabel 2.54	Perbandingan capaian Indeks Kota Cerdas tahun ini dengan tahun sebelumnya.....	487
Tabel 2.55	Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur tahun ini dengan tahun akhir RPJMD....	488
Tabel 2.56	Perbandingan capaian Penurunan Intensitas Emisi GRK tahun ini dengan tahun akhir RPJMD.....	489
Tabel 2.57	Perbandingan capaian Indeks Pembangunan Manusia tahun ini dengan tahun akhir RPJMD.....	489
Tabel 2.58	Perbandingan capaian Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita tahun ini dengan tahun akhir RPJMD.....	493
Tabel 2.59	Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga tahun ini dengan Tahun Akhir RPJMD.....	494
Tabel 2.60	Perbandingan capaian Indeks Ketimpangan Gender tahun ini dengan tahun akhir RPJMD.....	495
Tabel 2.61	Perbandingan capaian Nilai Kota Layak Anak tahun ini dengan tahun akhir RPJMD.....	496
Tabel 2.62	Perbandingan capaian PDRB Per Kapita tahun ini dengan tahun akhir RPJMD.....	497

Tabel 2.63	Perbandingan capaian Indeks Ketahanan Pangan tahun ini dengan tahun akhir RPJMD.....	498
Tabel 2.64	Perbandingan capaian Tingkat Pengangguran Terbuka tahun ini dengan tahun akhir RPJMD.....	499
Tabel 2.65	Perbandingan capaian Tingkat Kemiskinan tahun ini dengan tahun akhir RPJMD.....	499
Tabel 2.66	Perbandingan capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun ini dengan tahun akhir RPJMD.....	500
Tabel 2.67	Perbandingan capaian Rasio Gini tahun ini dengan tahun akhir RPJMD.....	502
Tabel 2.68	Perbandingan capaian Indeks Daya Saing Daerah tahun ini dengan tahun akhir RPJMD.....	504
Tabel 2.69	Perbandingan capaian Indeks Harmoni tahun ini dengan tahun akhir RPJMD.....	505
Tabel 2.70	Perbandingan capaian Indeks Reformasi Birokrasi tahun ini dengan tahun akhir RPJMD.....	532
Tabel 2.71	Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik tahun ini dengan tahun akhir RPJMD.....	506
Tabel 2.72	Perbandingan capaian Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun ini dengan tahun akhir RPJMD.....	507
Tabel 2.73	Perbandingan capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah tahun ini dengan tahun akhir RPJMD.....	507
Tabel 2.74	Perbandingan capaian Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun ini dengan tahun akhir RPJMD.....	508
Tabel 2.75	Perbandingan capaian Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Kota Bekasi tahun ini Dengan tahun akhir RPJMD.....	509
Tabel 2.76	Perbandingan capaian Indeks Kota Cerdas tahun ini dengan tahun akhir RPJMD.....	510

Tabel 2.77	Perbandingan Capaian Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur terhadap Capaian Nasional	511
Tabel 2.78	Perbandingan Capaian Penurunan Intensitas Emisi GRK terhadap Capaian Nasional.....	512
Tabel 2.79	Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Manusia terhadap Capaian Nasional.....	513
Tabel 2.80	Analisis Perbandingan Capaian Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita terhadap Capaian Nasional.....	513
Tabel 2.81	Analisis Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga terhadap Capaian Nasional.....	514
Tabel 2.82	Analisis Perbandingan Capaian Indeks Ketimpangan Gender terhadap Capaian Nasional.....	514
Tabel 2.83	Analisis Perbandingan Capaian Nilai Kota Layak Anak terhadap Capaian Nasional.....	515
Tabel 2.84	Analisis Perbandingan Capaian PDRB Per Kapita terhadap Capaian Nasional.....	516
Tabel 2.85	Analisis Perbandingan Capaian Indeks Ketahanan Pangan terhadap Capaian Nasional.....	516
Tabel 2.86	Analisis Perbandingan Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Capaian Nasional.....	517
Tabel 2.87	Analisis Perbandingan Capaian Tingkat Kemiskinan terhadap Capaian Nasional.....	517
Tabel 2.88	Analisis Perbandingan Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Capaian Nasional.....	518
Tabel 2.89	Analisis Perbandingan Capaian Rasio Gini terhadap Capaian Nasional.....	519
Tabel 2.90	Analisis Perbandingan Capaian Indeks Daya Saing Daerah dengan terhadap Capaian Nasional.....	519
Tabel 2.91	Analisis Perbandingan Capaian Indeks Harmoni terhadap Capaian Nasional.....	520
Tabel 2.92	Analisis Perbandingan Capaian Indeks Reformasi Birokrasi terhadap Capaian Nasional.....	521

Tabel 2.93	Analisis Perbandingan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik terhadap Capaian Nasional.....	521
Tabel 2.94	Analisis Perbandingan Capaian Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terhadap Capaian Nasional.....	523
Tabel 2.95	Analisis Perbandingan Capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Capaian Nasional.....	522
Tabel 2.96	Analisis Perbandingan Capaian Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terhadap Capaian Nasional.....	523
Tabel 2.97	Analisis Perbandingan Capaian Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Kota Bekasi terhadap Capaian Nasional.....	524
Tabel 2.98	Analisis Perbandingan Capaian Indeks Kota Cerdas terhadap Capaian Nasional.....	524
Tabel 2.99	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan (IPG)	
Tabel 2.100	Pagu Anggaran Program Penunjang Indikator Kinerja Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Tahun 2024 Dan Tahun 2025.....	525
Tabel 2.101	Jumlah Pagu Anggaran dan Realisasi Program Pendukung Indikator Kinerja Utama.....	552
Tabel 3.1	Target Kinerja Tugas Pembantuan Tahun 2025.....	597
Tabel 3.2	Realisasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat Tahun 2025.....	603
Tabel 3.3	Target Kinerja Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.....	617
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.....	519
Tabel 4.1	Jenis Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan	625
Tabel 4.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan.....	626
Tabel 4.3	Realisai Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan	

	Pendidikan Tahun 2025	626
Tabel 4.4	Pemenuhan Barang/Jasa dan Personil Indikator Pendidikan Dasar.....	629
Tabel 4.5	Pemenuhan Barang/Jasa dan Personil Indikator Pendidikan Kesetaraan.....	631
Tabel 4.6	Pemenuhan Barang/Jasa dan Personil Indikator Pendidikan Anak Usia Dini.....	632
Tabel 4.7	Kebutuhan Diklat Teknis Penunjang SPM Urusan Pendidikan.....	633
Tabel 4.8	Permasalahan dan Strategi Pemenuhan SPM Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).....	634
Tabel 4.9	Rekapitulasi Hasil Focus Group Discussion Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (Spm) Pendidikan Kota Bekasi Bidang Pendidikan Kesetaraan.....	615
Tabel 4.10	Permasalahan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan.....	618
Tabel 4.9	Jenis Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan..	640
Tabel 4.10	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan.....	642
Tabel 4.11	Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan.....	654
Tabel 4.12	Pemenuhan Barang/Jasa Indikator Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil.....	654
Tabel 4.13	Pemenuhan Barang/Jasa Indikator Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin.....	656
Tabel 4.14	Pemenuhan Barang/Jasa Indikator Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir.....	658
Tabel 4.15	Pemenuhan Barang/Jasa Indikator Pelayanan Kesehatan Balita	660
Tabel 4.16	Pemenuhan Barang/Jasa Indikator Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	662
Tabel 4.17	Pemenuhan Barang/Jasa Indikator Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	665

Tabel 4.18	Pemenuhan Barang/Jasa Indikator Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut.....	667
Tabel 4.19	Pemenuhan Barang/Jasa Indikator Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi.....	669
Tabel 4.20	Pemenuhan Barang/Jasa Indikator Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus.....	671
Tabel 4.21	Pemenuhan Barang/Jasa Indikator Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat.....	672
Tabel 4.22	Pemenuhan Barang/Jasa Indikator Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis.....	674
Tabel 4.23	Pemenuhan Barang/Jasa Indikator Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human immunodeficiency Virus).....	676
Tabel 4.24	Alokasi Anggaran Untuk Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kota Bekasi Tahun 2025.....	678
Tabel 4.25	Rekapitulasi Tenaga Fungsional Kesehatan di Kota Bekasi.....	679
Tabel 4.26	Pengadaan Tenaga Kesehatan Tahun 2025.....	680
Tabel 4.26	Kendala, Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Urusan Kesehatan Tahun 2025.....	655
Tabel 4.27	Jenis Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum.....	685
Tabel 4.28	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum.....	687
Tabel 4.29	Pemenuhan Barang/Jasa Indikator Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari Hari	690
Tabel 4.30	Pemenuhan Barang/Jasa Indikator Pelayanan Air Limbah Domestik	694
Tabel 4.31	Alokasi Anggaran SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2025.....	697

Tabel 4.32	Kebutuhan Personil Penunjang Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum.....	698
Tabel 4.33	Kebutuhan Diklat Teknis Penunjang SPM Urusan Pekerjaan Umum.....	698
Tabel 4.34	Kendala, Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025	699
Tabel 4.35	Permasalahan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum.....	702
Tabel 4.36	Jenis Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat.....	705
Tabel 4.37	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat	706
Tabel 4.38	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana.....	710
Tabel 4.39	Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah.....	712
Tabel 4.40	Anggaran Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2025.....	713
Tabel 4.41	Kebutuhan Personil Penunjang Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat.....	714
Tabel 4.42	Kebutuhan Diklat Teknis Penunjang SPM Urusan Perumahan Rakyat.....	714
Tabel 4.43	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2025.....	715
Tabel 4.44	Permasalahan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat	716
Tabel 4.45	Jenis Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	718
Tabel 4.46	Jenis Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan	

	Masyarakat.....	720
Tabel 4.47	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urutan Ketentraman Dan Ketertiban Umum.....	721
Tabel 4.48	Hasil Capaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urutan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2025.....	722
Tabel 4.49	Kegiatan Penegakkan Peraturan Daerah danPeraturan Kepala Daerah Tahun 2025.....	723
Tabel 4.50	Pemenuhan Barang/Jasa Indikator Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum.....	724
Tabel 4.51	Pemenuhan Seragam Satuan Polisi Pamong Praja.....	729
Tabel 4.52	Pemenuhan Prasarana Gedung Satuan Polisi Pamong Praja.....	729
Tabel 4.53	Pemenuhan Kebutuhan Kendaraan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.....	729
Tabel 4.54	Alokasi Anggaran Bidang Trantibumlinmas Tahun 2025.....	731
Tabel 4.55	Rekapitulasi Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2025.....	731
Tabel 4.56	Permasalahan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Urutan Kententraman dan Ketertiban Umum.....	733
Tabel 4.57	Jenis Standar Pelayanan Minimal Urutan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Sub Urutan Bencana.....	734
Tabel 4.58	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urutan Bencana.....	735
Tabel 4.59	Hasil Capaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urutan Bencana Tahun 2025	736
Tabel 4.60	Pemenuhan Barang/Jasa Indikator Pelayanan Informasi Rawan Bencana.....	738
Tabel 4.61	Pemenuhan Barang/Jasa Indikator Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap	

	Bencana.....	742
Tabel 4.62	Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	749
Tabel 4.63	Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang	750
Tabel 4.64	Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	750
Tabel 4.65	Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM).....	751
Tabel 4.66	Kebutuhan Diklat Teknis Penunjang SPM Urusan Bencana.....	752
Tabel 4.67	Peralatan Gedung Kantor	753
Tabel 4.68	Peralatan Kendaraan R-4 & R-2	753
Tabel 4.69	Peralatan Komunikasi	754
Tabel 4.70	Peralatan Lainnya (Perahu/Mesin, DLL)	754
Tabel 4.71	Kendala dan Solusi Penerapan SPM Sub Urusan Bencana Tahun 2025	758
Tabel 4.72	Jenis Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran.....	760
Tabel 4.73	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran	761
Tabel 4.74	Realisasi Capaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Tahun 2024	763
Tabel 4.75	Jumlah Warga Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.....	764
Tabel 4.76	Data Kejadian Kebakaran Selama Tahun 2025	768
Tabel 4.77	Kualifikasi Sumber Daya Manusia Pemadam Kebakaran.....	769
Tabel 4.78	Permasalahan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran	771
Tabel 4.79	Jenis Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial.....	773
Tabel 4.80	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial.....	775
Tabel 4.81	Capaian Target SPM Sosial.....	776

Tabel 4.82	Realisasi Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial Tahun 2025	776
Tabel 4.83	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	778
Tabel 4.84	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti.....	781
Tabel 4.85	Jumlah Warga Kota Bekasi lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti.....	784
Tabel 4.86	Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	787
Tabel 4.87	Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota.....	790
Tabel 4.88	Rekapitulasi jumlah Warga Kota Bekasi yang berhak mendapatkan pelayanan dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana.....	791
Tabel 4.89	Anggaran SPM Bidang Sosial Tahun 2025.....	793
Tabel 4.90	Kebutuhan Personil Penunjang Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial.....	795
Tabel 4.91	Kebutuhan Diklat Teknis Penunjang SPM Urusan Sosial.....	797
Tabel 4.92	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Urusan Sosial Tahun 2025	798
Tabel 4.93	Permasalahan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial.....	799
Tabel 4.94	Program, Kegiatan dan Anggaran Urusan Pendidikan..	802
Tabel 4.95	Program, Kegiatan dan Anggaran Urusan Kesehatan...	825
Tabel 4.96	Program, Kegiatan dan Anggaran Urusan Pekerjaan Umum.....	827
Tabel 4.97	Program, Kegiatan dan Anggaran Urusan Perumahan Rakyat.....	836
Tabel 4.98	Program, Kegiatan dan Anggaran Sub Urusan	

	Ketentraman dan Ketertiban Umum.....	839
Tabel 4.99	Program, Kegiatan dan Anggaran Sub Urusan Sosial..	853
Tabel 5.1	Capaian Kinerja Makro Tahun 2025.....	858
Tabel 5.2	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2025 (sesuai RPD).....	861
Tabel 5.3	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2025.....	864



**LPPD
2025**

DAFTAR GAMBAR



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Batas Daerah Kota Bekasi.....	6
Gambar 1.2	Misi Kota Bekasi Tahun 2025 – 2029.....	203
Gambar 1.3	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bekasi (2025-2029).....	206
Gambar 2.1	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kota Bekasi.....	303
Gambar 2.2	Perkembangan Angka Kemiskinan Kota Bekasi.....	307
Gambar 2.3	Perkembangan Angka Pengangguran di Kota Bekasi.....	309
Gambar 2.4	Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bekasi.....	312
Gambar 2.5	Tren Harapan Lama Sekolah (HLS).....	390
Gambar 2.6	Pemberian Beasiswa Tidak Mampu Jenjang SMP Tahun	393
Gambar 2.7	Penyediaan pojok baca, perpustakaan mini, dan perpustakaan keliling di berbagai tempat.....	401
Gambar 2.8	Dokumentasi Program Penurunan Stunting Kegiatan Intervensi Spesifik dan Non Spesifik Penanganan Stunting.....	402
Gambar 2.9	Kegiatan pendampingan dan pemeriksaan Pelayanan KB.....	404
Gambar 2.10	Zoom meeting dengan Penyedia terkait Pengembangan aplikasi Sistem Survei Kepuasan Masyarakat (SISUKMA ..	451
Gambar 2.11	Pelaksanaan Workshop Penguatan Tim SAKIP Kota Bekasi dan Perangkat Daerah oleh Kemenpan RB.....	453
Gambar 2.12	Pelaksanaan Workshop Penguatan Tim SAKIP Kota Bekasi dan Perangkat Daerah oleh Kemenpan RB.....	453

Gambar 2.13	Persentase Stunting Tahun 2022-2025 (Berdasarkan Data Sigizi Kesga).....	468
Gambar 2.14	Tren Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2021-2025 (Kota Bekasi, Prov. Jabar, Nasional).....	475
Gambar 2.15	Tren Perkembangan Angka Kemiskinan.....	476



**LPPD
2025**

BAB I PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Kota Bekasi pada awalnya berstatus Kota Administratif sejak 20 April 1982 yang merupakan Ibukota dari Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Pusat Kota Bekasi. Pesatnya pertumbuhan penduduk dan pembangunan di Kota Administratif Bekasi memiliki konsekuensi terhadap



peningkatan status Kota Administratif Bekasi menjadi Daerah Otonom, dan secara resmi ditetapkan oleh Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tanggal 16 Desember 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi dan perubahan status tersebut diresmikan pada tanggal 10 Maret 1997.

Pembentukan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi ini diikuti dengan Pembentukan DPRD dengan 45 anggota yang terpilih melalui Pemilihan Umum pada tanggal 11 Juli 1997. Berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 02 tahun 1998 tanggal 14 Februari 1998, diputuskan tanggal 10 maret 1997 sebagai Hari Jadi Kota Bekasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 19 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Bupati/Walikota menyampaikan LPPD kabupaten/kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Bekasi Tahun 2024 disampaikan kepada Menteri

Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Barat sebagai bahan evaluasi bagi penyelenggaraan Otonomi Daerah yang terjabarkan dalam pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan. Dasar hukum pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diantaranya meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPN tahun 2005-2025 serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

- Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi;
 17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi;
 18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 20. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 21. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 22. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 23. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 24. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 25. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58

Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

26. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

27. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

b. Data Geografis Wilayah

Secara astronomis, Kota Bekasi terletak antara $106^{\circ}48'28''$ – $107^{\circ}27'29''$ Bujur Timur dan $6^{\circ}10'6''$ – $6^{\circ}30'6''$ Lintang Selatan. Kota Bekasi merupakan daerah dataran dengan kemiringan antara 0 – 2% dan ketinggian antara 28 m – 110 m di atas permukaan air laut. Ketinggian kurang dari 25 m berada pada Kecamatan Medan Satria, Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, dan Pondokgede. Sedangkan ketinggian antara 25 – 100 m di atas permukaan air laut berada di Kecamatan Bantargebang, Pondokmelati, dan Jatiasih. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan, wilayah administrasi Pemerintahan Kota Bekasi terbagi menjadi 12 kecamatan dengan 56 kelurahan.

Sebagai salah satu Kota Metropolitan di Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi memiliki luas wilayah sekitar 21.311,74 Ha atau 213,1174 km², luas Kota Bekasi ini berbeda dengan hasil rilis dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu 210,49 km², karena pada tahun 2020 Pemerintah Kota Bekasi bersama Badan Informasi Geospasial telah menyelesaikan Penegasan Batas Kelurahan pada 56 kelurahan dengan menggunakan Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi Akuisisi Tahun 2003-2015 dan diperoleh rekapitulasi hasil luas wilayah Kota Bekasi seluas 213,1174 km². Batas-batas wilayah administrasi yang mengelilingi wilayah Kota Bekasi adalah:

Sebelah Utara : Kabupaten Bekasi

Sebelah Selatan : Kabupaten Bogor dan Kota Depok

Sebelah Barat : Provinsi DKI Jakarta

Sebelah Timur : Kabupaten Bekasi

Batas-batas Daerah Kota Bekasi dengan Kabupaten/Kota lainnya telah diselesaikan oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayah Kementerian Dalam Negeri bersama Biro Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Penegasan Batas Daerah dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan 2017 dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta dengan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat dan Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta dengan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Bogor dengan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Bekasi dengan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Bekasi dengan Kota Depok Provinsi Jawa Barat.

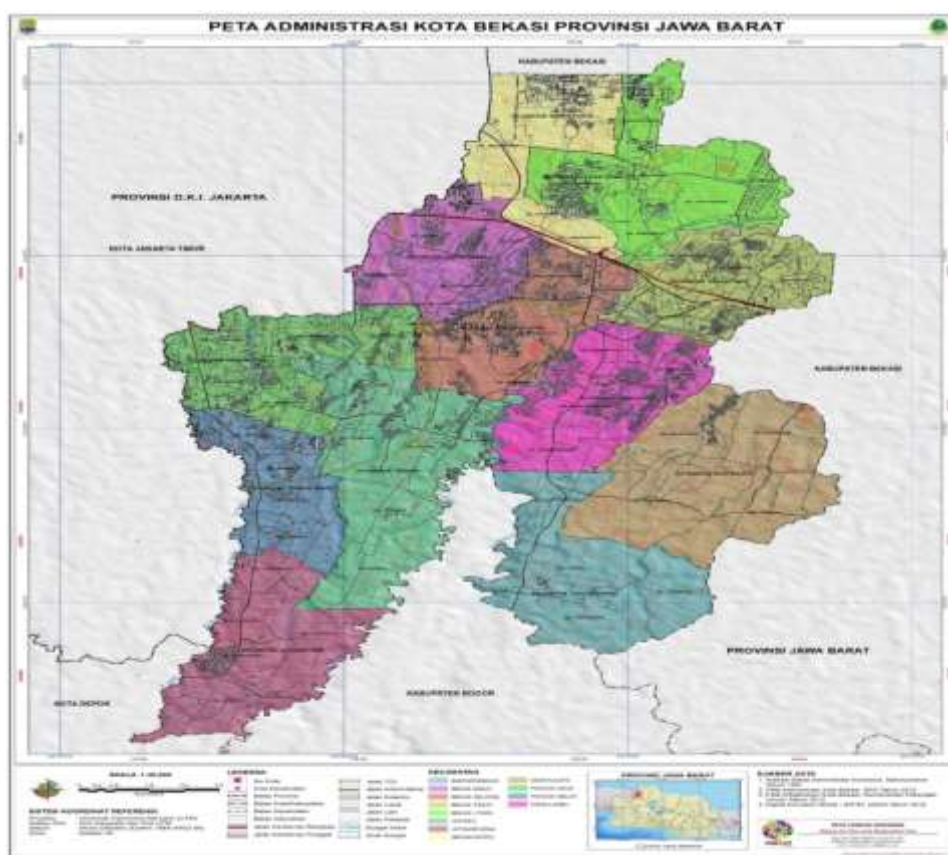
Keempat Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah tersebut dijadikan acuan Pemerintah Kota Bekasi untuk melakukan penegasan batas Kelurahan, maka pada tahun 2017 Pemerintah Kota Bekasi telah melakukan penegasan batas Kelurahan

dengan diterbitkannya 10 Peraturan Wali Kota tentang Batas Kelurahan dan dilanjutkan pada tahun 2020 sebanyak 46 Peraturan Wali Kota tentang Batas Kelurahan dan 4 Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Batas Kelurahan.

Adapun Peta Batas Daerah Kota Bekasi yang hingga saat ini dipergunakan oleh Pemerintah Kota Bekasi dengan Peta Skala 1 : 40.000 yang dibuat dengan menggunakan sumber data sebagai berikut:

1. Indikasi Batas Administrasi Indonesia, Bakosurtanal Tahun 1991;
2. Peta Administrasi Batas Kota Bekasi, BPS 2010;
3. Peta Infrastruktur Kota Bekasi, Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2012;
4. Digital Elevation Model SRTM USGS 2010;

Gambar 1.1
Peta Batas Daerah Kota Bekasi



Sumber : BPS Kota Bekasi Tahun 2025

Rendahnya ketinggian dan kemiringan wilayah di Kota Bekasi membuat beberapa kawasan sulit membuang air limpasan hujan dengan cepat. Hal ini memicu tingginya potensi genangan di beberapa

Kecamatan khususnya ketika terjadi hujan lebat di Kota Bekasi. Wilayah yang berpotensi terjadi genangan air diantaranya meliputi, Kecamatan Jatiasih (Kelurahan Jatirasa, Jatimekar dan Jatikramat), Kecamatan Bekasi Timur (Kelurahan Duren Jaya, Aren Jaya), Kecamatan Rawalumbu (Kelurahan Bojong Menteng, Pengasinan), Kecamatan Bekasi Selatan (Kelurahan Jakasetia, Pekayon Jaya, Marga Jaya), Kecamatan Bekasi Barat (Kelurahan Bintara Jaya, Kota Baru), dan Kecamatan Pondok Melati (Kelurahan Jatirahayu).

Kondisi fisik dasar Kota Bekasi secara umum tergolong ideal untuk pengembangan berbagai kegiatan perkotaan. Parameter yang dijadikan acuan adalah:

1. Kondisi topografi kawasan yang relatif datar sehingga memungkinkan pemanfaatan lahan kawasan secara optimal.
2. Kondisi geologi, memungkinkan optimalisasi daya dukung lahan, sehingga memberikan peluang untuk pengembangan berbagai kegiatan pembangunan fisik.
3. Kondisi hidrologi, ditunjang oleh keberadaan sungai/kali dan beberapa saluran irigasi sehingga memungkinkan aliran air permukaan (*run off*) diintegrasikan dengan jaringan drainase.
4. Kondisi iklim relatif tidak berpengaruh negatif terhadap pengembangan berbagai kegiatan perkotaan.

c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kota Bekasi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, sebagaimana data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi Tahun 2025 semester II, diketahui bahwa jumlah penduduk Kota Bekasi sebanyak 2.595.927 (*Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh*) jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 1.295.623 (*Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tiga*) jiwa dan perempuan sebanyak 1.300.304 (*Satu Juta Tiga Ratus Ribu Tiga Ratus Empat*) jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 828.060 (*Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam*

Puluh) kepala keluarga. Jumlah penduduk tahun 2025 ini meningkat sebesar 0,92 persen, yaitu dari 2.572.209 (*Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Sembilan*) jiwa di tahun 2024 2.595.927 (*Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh*) jiwa di Tahun 2025.

Kelurahan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara dengan jumlah penduduk sebanyak 97.382 (*Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Dua*) jiwa, sementara kelurahan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna dengan jumlah penduduk sebanyak 16.995 (*Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima*) Jiwa. Perbedaan jumlah penduduk tersebut dikarenakan adanya perbedaan luas wilayah kelurahan dan tingkat perkembangan kelurahan yang berdampak pada besaran jumlah RW, RT serta jumlah kepadatan penduduk. Adapun jumlah penduduk di Kota Bekasi yang dibagi berdasarkan jenis kelamin per kelurahan dan kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelurahan dan Kecamatan
Semester II Tahun 2025

NO	KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH KK
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6
I	BEKASI TIMUR	137.154	138.752	275.906	89.800
1	BEKASIJAYA	32.976	33.325	66.301	21.341
2	MARGAHAYU	33.382	33.332	66.714	21.948
3	DURENJAYA	37.817	38.441	76.258	24.505
4	ARENJAYA	32.979	33.654	66.633	21.706
II	BEKASI BARAT	135.700	136.325	272.025	88.574
1	BINTARA	32.834	32.620	65.454	21.181
2	KRANJI	24.950	25.061	50.011	16.227
3	KOTABARU	22.679	22.761	45.440	14.897
4	BINTARAJAYA	17.643	17.926	35.569	11.609
5	JAKASAMPURNA	37.594	37.957	75.551	24.660
III	BEKASI UTARA	174.166	173.521	347.687	108.542
1	KALIABANG TENGAH	48.928	48.454	97.382	30.378
2	PERWIRA	20.358	20.240	40.598	12.408

NO	KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH KK
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6
3	HARAPANBARU	14.564	14.237	28.801	8.654
4	TELUK PUCUNG	35.993	35.711	71.704	22.574
5	MARGAMULYA	12.535	12.381	24.916	8.004
6	HARAPANJAYA	41.788	42.498	84.286	26.524
IV	BEKASI SELATAN	108.593	111.378	219.971	70.925
1	PEKAYONJAYA	29.764	30.850	60.614	19.441
2	MARGAJAYA	8.807	8.903	17.710	5.814
3	JAKAMULYA	18.754	18.982	37.736	11.963
4	JAKASETIA	22.194	22.847	45.041	14.422
5	KAYURINGINJAYA	29.074	29.796	58.870	19.285
V	RAWALUMBU	113.438	113.684	227.122	73.635
1	BOJONG RAWALUMBU	40.369	40.136	80.505	26.174
2	PENGASINAN	31.416	32.009	63.425	20.193
3	SEPANJANGJAYA	18.773	18.877	37.650	12.365
4	BOJONGMENTENG	22.880	22.662	45.542	14.903
VI	MEDAN SATRIA	81.614	80.665	162.279	51.728
1	MEDANSATRIA	14.431	13.921	28.352	9.113
2	HARAPANMULYA	12.820	12.478	25.298	8.042
3	PEJUANG	38.675	38.974	77.649	24.525
4	KALIBARU	15.688	15.292	30.980	10.048
VII	BANTARGEBAK	60.950	58.982	119.932	39.232
1	BANTARGEBAK	17.883	17.262	35.145	11.137
2	CIKIWUL	15.212	14.514	29.726	10.101
3	CIKETINGUDIK	13.691	13.242	26.933	9.296
4	SUMURBATU	14.164	13.964	28.128	8.698
VIII	PONDOKGEDE	116.662	117.860	234.522	76.452
2	JATIWARINGIN	23.898	24.157	48.055	15.763
3	JATIBENING	19.105	19.155	38.260	12.654
4	JATIMAKMUR	31.196	31.417	62.613	19.888
5	JATIBENING BARU	19.566	19.917	39.483	12.940
6	JATICEMPAKA	22.897	23.214	46.111	15.207
IX	JATIASIH	125.102	126.039	251.141	78.061
1	JATIMEKAR	20.933	21.004	41.937	13.226
2	JATIASIH	19.286	19.353	38.639	12.199
3	JATIKRAMAT	23.574	23.849	47.423	14.953
4	JATIRASA	20.966	21.028	41.994	13.281
5	JATILUHUR	18.449	18.732	37.181	11.105
6	JATISARI	21.894	22.073	43.967	13.297
X	JATISAMPURNA	60.979	61.752	122.731	38.963
1	JATISAMPURNA	15.864	16.183	32.047	10.403
2	JATIKARYA	8.220	8.775	16.995	5.482
3	JATIRANGGON	15.054	15.123	30.177	9.418

NO	KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH KK
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6
4	JATIRANGGA	10.096	10.050	20.146	6.456
5	JATIRADEN	11.745	11.621	23.366	7.204
XI	MUSTIKA JAYA	114.767	114.416	229.183	68.898
1	PADURENAN	30.318	29.809	60.127	18.077
2	CIMUNING	23.364	23.591	46.955	13.856
3	MUSTIKAJAYA	40.515	40.766	81.281	24.387
4	MUSTIKASARI	20.570	20.250	40.820	12.578
XII	PONDOK MELATI	66.498	66.930	133.428	43.550
1	JATIRAHAYU	29.253	29.553	58.806	19.586
2	JATIWARNA	11.760	11.962	23.722	7.717
3	JATIMELATI	11.261	11.226	22.487	7.069
4	JATIMURNI	14.224	14.189	28.413	9.178
JUMLAH		1.295.623	1.300.304	2.595.927	828.360

Sumber: Disdukcapil Kota Bekasi, 2025.

d. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi, wilayah administrasi Pemerintahan Kota Bekasi terbagi menjadi 12 kecamatan dengan 56 kelurahan, 1.020 RW dan 7.174 RT. Dengan telah ditetapkan (4) empat Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas, maka pada tahun 2017 Pemerintah Kota Bekasi telah melakukan penegasan batas Kelurahan dengan diterbitkannya 10 Peraturan Wali Kota tentang Batas Kelurahan dan dilanjutkan pada tahun 2020 sebanyak 46 Peraturan Wali Kota tentang Batas Kelurahan dan 4 Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Batas Kelurahan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah.

Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui batas dan luas definitif kelurahan secara Kartometrik dan mendukung Program Strategis Nasional Kebijakan Satu Peta sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 146.3/I/457/SJ tanggal 18 Oktober 2019 tentang Percepatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Adapun

Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Batas Wilayah Kelurahan yang ditetapkan terlebih dahulu pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 87 Tahun 2017 tentang Batas Wilayah Kelurahan Bekasijaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
2. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 88 Tahun 2017 tentang Batas Wilayah Kelurahan Arenjaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
3. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 89 Tahun 2017 tentang Batas Wilayah Kelurahan Durenjaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
4. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 90 Tahun 2017 tentang Batas Wilayah Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
5. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor. 91 Tahun 2017 tentang Batas Wilayah Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;
6. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2017 tentang Batas Wilayah Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;
7. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 93 Tahun 2017 tentang Batas Wilayah Kelurahan Bojongrawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
8. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 94 Tahun 2017 tentang Batas Wilayah Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
9. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 95 Tahun 2017 tentang Batas Wilayah Kelurahan Sepanjangjaya Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 96 Tahun 2017 tentang Batas Wilayah Kelurahan Bojongmenteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi.

Perwal tersebut telah dilaporkan ke Kemenko Kemaritiman pada Tahun 2018 dan ke Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam kegiatan sinkronisasi data batas desa/kelurahan di hotel Aryaduta Jakarta pada Tanggal 25-26 Juli 2019, selanjutnya berdasarkan surat Kepala BIG nomor B-22.43/PBW-BIG/IGD.04.04/7/2019 tanggal 22 Juli 2019 bahwa pada tanggal 10 dan 11 Desember 2019 Pemerintah Kota Bekasi memperoleh bantuan kegiatan deliniasi batas desa/kelurahan tahun 2019 melalui citra 4 meter tanpa berita acara kesepakatan dan seluruh kelurahan dilakukan penegasan batas yang ditunjukkan langsung oleh lurah masing-masing yang berbatasan. Pada tahun 2020 karena belum adanya alokasi anggaran untuk penegasan 46 batas kelurahan di Kota Bekasi, Bagian Tata Pemerintahan telah menyampaikan surat kepada Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 100/4106/SETDA.Tapem tanggal 16 Juli 2019 hal Permohonan Bantuan Penetapan Batas Kelurahan dimana didalamnya Pemerintah Kota Bekasi memohon diselenggarakannya kegiatan deliniasi secara kartometrik disertai berita acara kesepakatan dan draft perwal pada kegiatan pusat pemetaan batas wilayah Badan Informasi Geospasial tahun 2020.

Permohonan tersebut disetujui oleh Badan Informasi Geospasial dan terealisasi pada Tahun 2020, sesuai dengan Surat Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah pada Badan Informasi Geospasial Nomor B-24.15/PBW-BIG/IGD.04.05/7/2020 tanggal 24 Juli 2020 hal Rapat Koordinasi Pelaksanaan Temu Kerja Kegiatan Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan Secara Daring dan dilakukan proses penagasan antar kelurahan dan kesepakatan teknis pada bulan September sampai dengan Oktober 2020. Selanjutnya hasil kesepakatan teknis tersebut diserahkan kepada Pemerintah Kota Bekasi dengan Perjanjian Pemberian Ijin Penggunaan Data dengan surat perjanjian Nomor 11.01/PPKS/LP-Digital/12/2020 tanggal 11 Desember 2020 yang berisi tentang Penyerahan rekaman data digital kesepakatan batas wilayah administrasi desa/kelurahan dalam format GDB 94 segmen batas

Desa/Kelurahan dan Titik Kartometris, scan Berita Acara Kesepakatan dalam format PDF, Peta Digital Batas Desa/Kelurahan dalam format PDF Wilayah Administrasi Kota Bekasi.

Adapun hasilnya telah ditetapkan melalui 50 Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Batas Wilayah Kelurahan, yang terdiri dari 46 Peraturan Wali Kota baru dan 4 Peraturan Wali Kota perubahan, sebagai berikut:

1. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 96 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Padurenan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;
2. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 97 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;
3. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 98 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Ciketingudik Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi;
4. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 99 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Sumurbatu Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi;
5. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 100 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Cikiwul Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi;
6. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 101 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Bantargebang Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi;
7. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 102 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Jatisampurna Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi;
8. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 103 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi;

9. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 104 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi;
10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 105 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Jatiranggon Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi;
11. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 106 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Jatiraden Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi;
12. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 107 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Jatirahayu Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi;
13. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 108 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Jatiwarna Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi;
14. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 109 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Jatimelati Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi;
15. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 110 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Jatimurni Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi;
16. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 111 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Jatiasih Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;
17. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 112 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;
18. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 113 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;
19. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 114 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;

20. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 115 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;
21. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 116 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Jatimekar Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;
22. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 117 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;
23. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 118 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Jakamulya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;
24. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 119 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Pekayonjaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;
25. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 120 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Kayuringinjaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;
26. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 121 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Jakasetia Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;
27. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 122 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi;
28. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 123 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Harapanbaru Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi;
29. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 124 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi;
30. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 125 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi;

31. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 126 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi;
32. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 127 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Harapanjaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi;
33. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 128 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Medansatria Kecamatan Medansatria Kota Bekasi;
34. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 129 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Harapanmulya Kecamatan Medansatria Kota Bekasi;
35. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 130 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Pejuang Kecamatan Medansatria Kota Bekasi;
36. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 131 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medansatria Kota Bekasi;
37. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 132 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi;
38. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 133 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi;
39. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 134 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Kotabaru Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi;
40. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 135 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Bintarajaya Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi;
41. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 136 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi;

42. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 137 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi;
43. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 138 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi;
44. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 139 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Jatimakmur Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi;
45. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 140 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Jatibening Baru Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi;
46. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 141 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Jaticempaka Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi;
47. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 142 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 96 Tahun 2017 tentang Batas Wilayah Kelurahan Bojongmenteng Kecamatan Rawalumbu di Kota Bekasi;
48. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 143 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2017 tentang Batas Wilayah Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustikajaya di Kota Bekasi;
49. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 144 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 88 Tahun 2017 Batas Wilayah Kelurahan Arenjaya Kecamatan Bekasi Timur di Kota Bekasi;
50. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 145 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 90 Tahun 2017 Batas Wilayah Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur di Kota Bekasi;

Dengan demikian, Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Batas Wilayah Kelurahan sudah diselesaikan dalam rangka mendukung

program strategis nasional kebijakan satu peta. Adapun rekapitulasi data luas wilayah, jumlah Rukun Warga (RW), jumlah Rukun Tetangga (RT) sebagai berikut:

Tabel 1.2
Rekapitulasi Luas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan, Jumlah RW dan Jumlah RT se-Kota Bekasi

No	Kecamatan dan Kelurahan	Luas Wilayah	Jumlah RW	Jumlah RT
I	Bekasi Timur	1.463.53	83	709
1	Kelurahan Margahayu	465.72	26	166
2	Kelurahan Arenjaya	285.71	22	180
3	Kelurahan Durenjaya	363.88	19	201
4	Kelurahan Bekasijaya	348.22	16	162
II	Bekasi Utara	2.080.52	145	1.118
1	Kelurahan Harapanbaru	253.51	19	122
2	Kelurahan Harapanjaya	489.31	30	269
3	Kelurahan Teluk Pucung	353.95	37	270
4	Kelurahan Perwira	229.03	18	114
5	Kelurahan Margamulya	288.73	11	65
6	Kelurahan Kaliabang Tengah	465.99	30	278
III	Bekasi Barat	1.489.95	92	749
1	Kelurahan Jakasampurna	500.63	23	192
2	Kelurahan Bintarajaya	268.66	14	119
3	Kelurahan Kranji	179.60	16	99
4	Kelurahan Bintara	339.82	17	160
5	Kelurahan Kotabaru	201.24	22	179
IV	Bekasi Selatan	1.580.65	94	628
1	Kelurahan Jakasetia	385.70	20	123
2	Kelurahan Pekayonjaya	434.06	26	169
3	Kelurahan Margajaya	167.07	6	31
4	Kelurahan Kayuringinjaya	285.99	26	193
5	Kelurahan Jakamulya	307.83	16	112
V	Jatiasih	2.426.19	100	672
1	Kelurahan Jatiasih	362.90	17	85
2	Kelurahan Jatisari	545.61	20	157
3	Kelurahan Jatimekar	453.25	17	105
4	Kelurahan Jatirasa	297.27	15	125
5	Kelurahan Jatikramat	354.25	19	127
6	Kelurahan Jatiluhur	412.91	12	73
VI	Bantargebang	1.924.34	38	191
1	Kelurahan Bantargebang	438.83	10	31
2	Kelurahan Ciketingudik	435.92	9	46
3	Kelurahan Sumurbatu	503.16	12	81

No	Kecamatan dan Kelurahan	Luas Wilayah	Jumlah RW	Jumlah RT
4	Kelurahan Cikiwul	546.43	7	33
VII	Pondokgede	1.743.25	78	577
1	Kelurahan Jatimakmur	432.02	25	159
2	Kelurahan Jatiwaringin	290.40	15	115
3	Kelurahan Jatibeningbaru	340.69	11	76
4	Kelurahan Jaticempaka	362.08	13	113
5	Kelurahan Jatibening	318.06	14	114
VIII	Rawalumbu	1.685.31	98	648
1	Kelurahan Bojongrawalumbu	638.56	42	301
2	Kelurahan Pengasinan	349.34	30	185
3	Kelurahan Sepanjangjaya	302.14	13	81
4	Kelurahan Bojongmenteng	395.27	13	81
IX	Medansatria	1.321.45	72	488
1	Kelurahan Harapanmulya	205.63	16	85
2	Kelurahan Kalibaru	140.95	12	69
3	Kelurahan Medansatria	385.37	11	63
4	Kelurahan Pejuang	589.50	33	271
X	Jatisampurna	2.019.32	68	347
1	Kelurahan Jatikarya	515.26	14	62
2	Kelurahan Jatisampurna	419.36	19	113
3	Kelurahan Jatirangga	454.46	16	48
4	Kelurahan Jatiraden	307.74	11	51
5	Kelurahan Jatiranggon	322.50	8	73
XI	Pondokmelati	1.101.57	57	390
1	Kelurahan Jatimurni	283.17	8	61
2	Kelurahan Jatimelati	276.17	15	91
3	Kelurahan Jatiwarna	182.20	11	67
4	Kelurahan Jatirahayu	360.03	23	171
XII	Mustikajaya	2.475.67	95	664
1	Kelurahan Mustikajaya	680.18	33	210
2	Kelurahan Cimuning	548.22	26	188
3	Kelurahan Mustikasari	484.26	11	82
4	Kelurahan Padurenan	763.01	25	184
JUMLAH		21.311.74	1020	7.181

Sumber: Bag. Tata Pemerintahan, 2025.

d. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Pada tahun 2025 Perangkat Daerah Kota Bekasi berjumlah 44 (empat puluh empat) Perangkat Daerah, terdiri dari Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Dinas Daerah dan Kecamatan.

Perangkat Daerah Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi. Adapun Perangkat Daerah yang ada di Kota Bekasi pada tahun 2025 terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat Daerah;
4. Badan Perencanaan, Penelitian, Riset dan Inovasi Daerah;
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
8. Badan Pendapatan Daerah;
9. Dinas Pendidikan;
10. Dinas Kesehatan;
11. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;
12. Dinas Tata Ruang;
13. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
14. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
15. Satuan Polisi Pamong Praja;
16. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
17. Dinas Sosial;
18. Dinas Perhubungan;
19. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
20. Dinas Tenaga Kerja;
21. Dinas Lingkungan Hidup;
22. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
23. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
24. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
25. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga;
26. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
27. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

- 28. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- 29. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 30. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- 31. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah;
- 32. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasbullah Abdulmadjid;
- 33. Kecamatan Bekasi Timur;
- 34. Kecamatan Bekasi Barat;
- 35. Kecamatan Bekasi Utara;
- 36. Kecamatan Bekasi Selatan;
- 37. Kecamatan Bantargebang;
- 38. Kecamatan Jatiasih;
- 39. Kecamatan Pondokgede;
- 40. Kecamatan Rawalumbu;
- 41. Kecamatan Medansatria;
- 42. Kecamatan Jatisampurna;
- 43. Kecamatan Mustikajaya;
- 44. Kecamatan Pondokmelati.

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Pemerintah pada Unit Kerja Perangkat Daerah

No	Unit Organisasi	ASN						Jumlah
		PNS		PPPK		PPPK PARUH WAKTU		
		L	P	L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi	16	37	4	3	-	-	60
2	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi	23	14	5	5	-	-	47
3	Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi	114	77	141	100	7	2	441
4	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Bekasi	27	10	31	7	28	9	112
5	Dinas Kesehatan Kota Bekasi	111	916	340	686	238	279	2570
6	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Bekasi	27	17	35	10	2	-	91

No	Unit Organisasi	ASN						Jumlah
		PNS		PPPK		PPPK PARUH WAKTU		
		L	P	L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota Bekasi	15	9	5	14	-	-	43
8	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi	269	40	364	59	1051	68	1851
9	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Bekasi	16	7	10	18	1	-	52
10	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi	67	6	426	142	11	-	652
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi	4	20	5	8	-	-	37
12	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi	36	18	83	74	2	3	216
13	Dinas Pendidikan Kota Bekasi	945	2212	1923	3208	716	363	9367
14	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bekasi	12	26	8	12	2	1	61
15	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bekasi	86	19	63	30	112	4	314
16	Dinas Perhubungan Kota Bekasi	106	20	756	167	27	4	1080
17	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Bekasi	47	25	32	13	3	-	120
18	Dinas Sosial Kota Bekasi	19	12	21	13	7	5	77
19	Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi	19	19	19	13	-	-	70
20	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi	181	8	395	87	-	-	671
21	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bekasi	45	45	42	30	1	-	163
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kota Bekasi	29	31	19	15	3	-	97
23	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota	10	30	2	8	2	1	53

No	Unit Organisasi	ASN						Jumlah
		PNS		PPPK		PPPK PARUH WAKTU		
		L	P	L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bekasi							
24	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi	71	26	122	39	120	5	383
25	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi	32	26	73	62	1	-	194
26	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi	21	22	13	17	1	1	75
27	Dinas Tata Ruang Kota Bekasi	55	22	62	22	1	-	162
28	Inspektorat Daerah Kota Bekasi	54	45	4	3	-	-	106
29	Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi	35	13	47	23	12	8	138
30	Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi	32	21	65	65	9	12	204
31	Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi	29	20	84	55	23	15	226
32	Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi	30	19	49	65	28	12	203
33	Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi	49	23	107	91	24	10	304
34	Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi	47	18	69	54	15	10	213
35	Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi	39	14	76	26	8	4	167
36	Kecamatan Medansatria Kota Bekasi	21	17	71	42	8	6	165
37	Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi	29	13	66	48	10	11	177
38	Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi	34	6	55	28	6	5	134
39	Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi	37	14	68	42	14	12	187
40	Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi	25	15	68	59	25	12	202
41	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi	8	3	34	7	27		79

No	Unit Organisasi	ASN						Jumlah
		PNS		PPPK		PPPK PARUH WAKTU		
		L	P	L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	160	371	-	-	-	-	531
43	Sekretariat Daerah Kota Bekasi	92	92	85	74	29	4	376
44	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi	27	22	47	49	1	1	147
JUMLAH		3151	4440	5993	5592	2575	867	22618

Sumber : BKPSDM Tahun 2025

Pegawai Pemerintah Kota Bekasi berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi Tahun 2025 berjumlah 22.618 aparatur yang terdiri dari 3.151 PNS Laki-Laki dan 4.440 PNS Perempuan, 5.993 PPPK Laki-Laki dan 5.592 PPPK Perempuan serta 2.575 PPPK Paruh Waktu dan 867 PPPK Paruh Waktu.

e. Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi tahun 2025 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan tanggal 31 Desember 2024 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang kemudian mengalami beberapa perubahan yang diatur melalui:

1. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
2. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

3. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
4. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
5. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pemerintah Kota Bekasi melakukan Perubahan APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, Pemerintah Kota Bekasi melakukan perubahan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 26 Tahun 2025 tanggal 15 Desember 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 .

I. Pendapatan Daerah

Anggaran pendapatan Pemerintah Kota Bekasi pada tahun 2024 memiliki target sebesar **Rp. 7.254.298.657.516,00** (*Tujuh Triliun Dua Ratus Lima Puluh Empat Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah*) dengan realisasi sebesar **Rp. 6.620.939.660.370,00** (*Enam Triliun Enam Ratus Dua Puluh Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah*) dengan persentase realisasi 91,26 persen. Adapun rincian pendapatan Pemerintah Kota Bekasi pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025

NO	URAIAN				ANGGARAN	REALISASI	%
1	2				3	4	5
PENDAPATAN DAERAH					7.254.298.657.516,00	6.620.939.660.370,00	91,26
I	Dinas Kesehatan				131.514.217.499,00	0	0
	PENDAPATAN DAERAH				131.514.217.499,00	0	0
	A	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			114.720.283.427,00	0	0
		1	Retribusi Jasa Umum		114.720.283.427,00	0	0
			a	Retribusi Pelayanan Kesehatan	114.720.283.427,00	0	0
				1Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	72.784.332.227,00	0	0
				2Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	41.935.951.200,00	0	0
	B	PENDAPATAN TRANSFER			16.793.934.072,00	0	0
		1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		16.793.934.072,00	0	0
			a	Dana Perimbangan	16.793.934.072,00	0	0
				1Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	16.793.934.072,00	0	0
II	Rumah Sakit Umum Daerah				360.000.000.000,00	0,00	0
	PENDAPATAN DAERAH				360.000.000.000,00	0,00	0
	A	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			360.000.000.000,00	0,00	0
		1	Retribusi Daerah		360.000.000.000,00	0,00	0
			a	Retribusi Jasa Umum	360.000.000.000,00	0,00	0
				1Retribusi Pelayanan	360.000.000.000,00	0,00	0

NO	URAIAN				ANGGARAN	REALISASI	%
1	2				3	4	5
				Kesehatan			
III	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan				3.919.500.000,00	0	0
	PENDAPATAN DAERAH				3.919.500.000,00	0	0
	A	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3.919.500.000,00	0	0
	1	Retribusi Daerah			3.919.500.000,00	0	0
		a	Retribusi Jasa Umum		3.919.500.000,00	0	0
			1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0,00	0	0
IV	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian				13.070.127.000,00	0	0
	PENDAPATAN DAERAH				13.070.127.000,00	0	0
	A	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			13.070.127.000,00	0	0
	1	Retribusi Daerah			13.070.127.000,00	0	0
		a	Retribusi Jasa Usaha		13.070.127.000,00	0	0
			1	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	13.070.127.000,00	0	0
V	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah				461.110.386.112,00	0	0,00
	PENDAPATAN DAERAH				449.269.281.610,00	420.824.289.802,00	93,67
	A	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			97.803.906.577,00	0	0,00
	1	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			14.946.358.920,00	0	0,00
		a	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Pernyataan Modal pada BUMD		14.946.358.920,00	0	0,00
			1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Pernyataan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	11.753.133.109,00	0	0,00
			2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Pernyataan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	1.618.208.000,00	0	0,00
			3	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Pernyataan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	1.575.017.811,00	0	0,00
	2	Lain-lain PAD yang Sah			82.857.547.657,00	0	0,00

NO	URAIAN				ANGGARAN	REALISASI	%
1	2				3	4	5
			a	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	450.000.000,00	0	0,00
			1	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0	0	0
			2	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	150.000.000,00	0	0,00
			3	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	150.000.000,00	0	0,00
			b	Jasa Giro	15.050.000.000,00	0	0,00
			1	Jasa Giro pada Kas Daerah	15.050.000.000,00	0	0,00
			d	Pendapatan Bunga	25.000.000.000,00	0	- 25.000.000.000,00
			1	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	25.000.000.000,00	0	0,00
			e	Pendapatan dari Pengembalian	42.357.547.657,00	0	0,00
			1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	39.921.554.630,00	0	0,00
			f	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	2.435.993.027,00	0	0,00
	B PENDAPATAN TRANSFER				363.306.479.535,00	0	0,00
	1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat			361.110.032.329,00	359.175.698.830,00	99,46
			a	Dana Perimbangan	361.110.032.329,00	359.175.698.830,00	99,46
			1	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	363.306.479.535,00	0	- 363.306.479.535,00
VI	BAPENDA				6.284.684.426.905,00	5.603.843.190.731,00	89,17
	PENDAPATAN DAERAH				6.284.684.426.905,00	5.603.843.190.731,00	89,17
	A	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3.533.108.902.652,00	2.869.863.296.939,00	81,23
		I	Pajak Daerah		3.470.971.273.552,00	2.795.585.884.910,00	80,54
			1	Pajak Reklame	82.294.972.000,00	85.708.428.382,00	104,15
			2	Pajak Reklame Papan/Billboard /Videotron/Megatron	74.466.131.000,00	77.746.883.582,00	104,41

NO					URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1					2	3	4	5
				3	Pajak Reklame Papan/Billboard /Videotron/Megatron	74.466.131.000,00	77.746.883.582,00	104,41
				4	Pajak Reklame Kain	5.476.170.000,00	3.131.112.300,00	57,18
				5	Pajak Reklame Berjalan	2.175.175.000,00	4.260.168.500,00	195,85
				6	Pajak Reklame Udara	2.000.000,00	600.000,00	30
				7	Pajak Reklame Film/Slide	175.496.000,00	569.664.000,00	324,6
			II		Pajak Air Tanah	4.469.182.000,00	4.749.778.286,00	106,28
				1	Pajak Air Tanah	4.469.182.000,00	4.749.778.286,00	106,28
			III		Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	612.080.719.000,00	489.315.078.422,00	79,94
				1	PBBP2	612.080.719.000,00	489.315.078.422,00	79,94
			IV		Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	785.000.000.000,00	493.063.485.571,00	62,81
				1	BPHTB-Pemindahan Hak	785.000.000.000,00	493.063.485.571,00	62,81
			V		Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	1.108.897.891.000,00	977.720.343.239,00	88,17
				1	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	529.897.348.000,00	449.453.976.467,00	84,82
				2	PBJT-Restoran	529.897.348.000,00	449.453.976.467,00	84,82
				3	PBJT-Tenaga Listrik	435.975.201.000,00	424.302.493.629,00	97,32
				4	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	435.975.201.000,00	424.302.055.178,00	97,32
				5	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	0	438.451,00	0
			VI		PBJT-Jasa Perhotelan	46.626.530.000,00	35.421.634.461,00	75,97
				1	PBJT-Hotel	45.931.394.000,00	34.705.268.934,00	75,56
				2	PBJT-Motel	1.600.000,00	13.275.000,00	829,69
				3	PBJT-Losmen	200.000.000,00	220.233.295,00	110,12
				4	PBJT-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage	202.792.000,00	220.122.816,00	108,55
				5	PBJT-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel	290.744.000,00	262.734.416,00	90,37
			VII		PBJT-Jasa Parkir	30.615.865.000,00	22.545.056.223,00	73,64
				1	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	30.615.865.000,00	22.545.056.223,00	73,64
			VIII		PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	65.782.947.000,00	45.997.182.459,00	69,92
				1	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	26.887.903.644,00	17.941.381.909,00	66,73
				2	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari,	980.000.000,00	619.661.540,00	63,23

NO					URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1					2	3	4	5
					dan/atau Busana			
				3	PBJT-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap	0	2.625.227,00	0
				4	PBJT-Permainan Ketangkasan	20.000.000.000,00	14.554.829.415,00	72,77
				5	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	7.028.610.787,00	7.768.232.508,00	110,52
				6	PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang	200.000.000,00	269.845.461,00	134,92
				7	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	5.486.379.000,00	1.586.469.486,00	28,92
				8	PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	5.200.053.569,00	3.254.136.913,00	62,58
			IX		Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	557.689.871.908,00	480.766.346.010,00	86,21
				1	Opsen PKB	557.689.871.908,00	480.766.346.010,00	86,21
			X		Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	320.538.637.644,00	264.262.425.000,00	82,44
				1	Opsen BBNKB	320.538.637.644,00	264.262.425.000,00	82,44
			XI		Retribusi Daerah	59.131.635.000,00	67.173.129.182,00	113,6
				1	Retribusi Jasa Umum	34.299.435.000,00	37.665.069.516,00	109,81
				2	Retribusi Pelayanan Kesehatan	22.760.000,00	52.335.000,00	229,94
			XII		Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.403.478.000,00	1.155.392.500,00	82,32
				1	Retribusi Penyediaan pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.403.478.000,00	1.155.392.500,00	82,32
			XIII		Retribusi Pelayanan Pasar	1.213.428.000,00	2.637.021.800,00	217,32
				1	Retribusi Kios	1.213.428.000,00	2.637.021.800,00	217,32
			XIV		Retribusi Pelayanan Kebersihan	31.659.769.000,00	33.820.320.216,00	106,82
				1	Retribusi pelayanan Persampahan	31.466.281.000,00	33.611.300.216,00	106,82
				2	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	193.488.000,00	209.020.000,00	108,03
			XV		Retribusi Jasa Usaha	11.659.143.000,00	14.297.668.083,00	122,63
				1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.739.727.000,00	9.274.252.723,00	161,58
				2	Retribusi Penyewaan Tanah	4.551.927.000,00	6.519.244.723,00	143,22

NO					URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1					2	3	4	5
				3	Retribusi Penyewaan Bangunan	350.000.000,00	1.125.330.000,00	321,52
				4	Retribusi Pemakaian Laboratorium	800.000.000,00	1.594.678.000,00	199,33
				5	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	37.800.000,00	35.000.000,00	92,59
			xvi		Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	428.320.000,00	709.037.600,00	165,54
				1	Retribusi pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	428.320.000,00	709.037.600,00	165,54
				2	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	0	50.922.432,00	0
				3	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	0	50.922.432,00	0
			xvii		Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	1.009.687.000,00	1.944.741.000,00	192,61
				1	Retribusi Penyediaan Tempat khusus Parkir Diluar Badan Jalan	1.009.687.000,00	1.944.741.000,00	192,61
			xviii		Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak	155.000.000,00	158.005.000,00	101,94
				1	Retribusi pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak	155.000.000,00	158.005.000,00	101,94
			xix		Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	2.426.409.000,00	1.427.980.000,00	58,85
				1	Retribusi pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	2.426.409.000,00	1.427.980.000,00	58,85
			xx		Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1.900.000.000,00	732.729.328,00	38,56
				1	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1.900.000.000,00	732.729.328,00	38,56
			xxi		Retribusi Perizinan Tertentu	13.173.057.000,00	15.210.391.583,00	115,47
				1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	11.973.057.000,00	13.398.169.083,00	111,9
			xxii		Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	1.200.000.000,00	1.812.222.500,00	151,02
				1	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	1.200.000.000,00	1.812.222.500,00	151,02
			xxiii		Lain-lain PAD yang Sah	3.005.994.100,00	7.104.282.847,00	236,34
				1	Pendapatan Denda Pajak Daerah	3.005.994.100,00	7.093.695.242,00	235,99
				2	Pendapatan Denda Pajak Reklame	0	117.642.270,00	0
				3	Pendapatan Denda	0	117.642.270,00	0

NO					URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1					2	3	4	5
					Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/M egatron			
				4	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	0	2.770.466,00	0
			xxiv		Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	3.005.994.100,00	5.614.657.797,00	186,78
				1	Pendapatan Denda PBBP2	3.005.994.100,00	5.614.657.797,00	186,78
				2	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0	76.000.000,00	0
				3	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak	0	76.000.000,00	0
				4	Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	0	1.282.624.709,00	0
				5	Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman- Restoran	0	987.467.995,00	0
				6	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan- Hotel	0	94.649.958,00	0
				7	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir- Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	0	120.923.434,00	0
				8	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	0	1.255.087,00	0
				9	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan- Permainan Ketangkasan	0	9.964.174,00	0
				10	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	0	30.958.709,00	0
				11	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana	0	308.087,00	0

NO					URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1					2	3	4	5
					Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang			
				12	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	0	8.486.426,00	0
				13	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	0	28.610.839,00	0
			xxv		Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0	10.587.605,00	0
				1	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	0	10.587.605,00	0
				2	Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	0	10.587.605,00	0
			xxvi		PENDAPATAN TRANSFER	2.751.575.524.253,00	2.733.979.893.792,00	99,36
				1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.982.196.402.248,00	1.974.619.560.395,00	99,62
				2	Dana Bagi Hasil (DBH)	212.150.839.000,00	209.638.253.600,00	98,82
				3	DBH Pajak	186.238.430.000,00	185.720.425.600,00	99,72
				4	DBH PBB	13.209.691.000,00	13.296.432.900,00	100,66
				5	DBH PPh Pasal 21	164.955.573.000,00	148.866.981.900,00	90,25
				6	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0	15.241.441.800,00	0
				7	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	8.073.166.000,00	8.315.569.000,00	103
			xxvi I		DBH Sumber Daya Alam (SDA)	25.412.409.000,00	23.917.828.000,00	94,12
				1	DBH SDA Minyak Bumi	13.565.561.000,00	3.471.354.000,00	25,59
				2	DBH SDA Gas Bumi	0	1.930.409.000,00	0
				3	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	9.578.129.000,00	15.388.328.000,00	160,66
				4	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	1.425.461.000,00	2.278.495.000,00	159,84
				5	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	26.823.000,00	32.807.000,00	122,31
				6	DBH SDA Perikanan	816.435.000,00	816.435.000,00	100
			xxvi II		DBH Lainnya	500.000.000,00	0	0
				1	DBH Sawit	500.000.000,00	0	0
			xxi X		Dana Alokasi Umum (DAU)	1.477.177.456.000,00	1.477.098.004.700,00	99,99
				1	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	1.258.994.483.000,00	1.258.915.031.700,00	99,99
				2	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	218.182.973.000,00	218.182.973.000,00	100

NO					URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1					2	3	4	5
				3	DAU Tambahan Dukungn Pendanaan Kelurahan	11.200.000.000,00	5.600.000.000,00	50
				4	DAU Tambahan Dukungn Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	156.486.549.000,00	156.486.549.000,00	100
				5	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	50.496.424.000,00	50.496.424.000,00	100
				6	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0	5.600.000.000,00	0
			xxx		Dana Alokasi Khusus (DAK)	292.868.107.248,00	287.883.302.095,00	98,3
				1	DAK Fisik	8.075.266.000,00	7.889.122.324,00	97,69
				2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	379.967.000,00	348.771.324,00	91,79
				3	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	2.409.750.000,00	2.313.388.000,00	96
				4	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	2.810.549.000,00	2.763.900.000,00	98,34
				5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	2.475.000.000,00	2.463.063.000,00	99,52
			xxx I		DAK Non Fisik	284.792.841.248,00	279.994.179.771,00	98,32
				1	DAK Non Fisik-TPG PNSD	238.353.673.000,00	237.349.804.100,00	99,58
				2	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.973.500.000,00	227.000.000,00	11,5
				3	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	14.000.000.000,00	13.140.070.350,00	93,86
				4	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	30.442.868.248,00	29.254.505.321,00	96,1
				5	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	22.800.000,00	22.800.000,00	100
			xxxII		Pendapatan Transfer Antar Daerah	769.379.122.005,00	759.360.333.397,00	98,7
				1	Pendapatan Bagi Hasil	404.238.506.333,00	394.499.718.397,00	97,59
				2	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	404.238.506.333,00	394.499.718.397,00	97,59
				3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	18.901.796.250,00	18.901.796.250,00	100
				4	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	17.684.220.330,00	17.684.220.330,00	100
				5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	219.578.948.918,00	214.633.571.177,00	97,75
				6	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	663.473.367,00	663.473.367,00	100
				7	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	147.410.067.468,00	142.616.657.273,00	96,75
			xxxIII		Bantuan Keuangan	365.140.615.672,00	364.860.615.000,00	99,92

NO	URAIAN				ANGGARAN	REALISASI	%
1	2				3	4	5
			1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	365.140.615.672,00	364.860.615.000,00	99,92

Sumber : BPKAD Kota Bekasi Tahun 2025.

II. Belanja Daerah

Anggaran belanja Pemerintah Kota Bekasi pada tahun 2025 dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 7.555.652.396.242,00** (*Tujuh Triliun Lima Ratus Lima Puluh Lima Miliar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*) dengan realisasi belanja sebesar **Rp. 6.451.429.852.145,00** (*Enam Triliyun Empar Ratus Lima Puluh Satu Miliar Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah*) dengan persentase realisasi 85,39 persen. Adapun rincian belanja Pemerintah Kota Bekasi per urusan pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

A. Urusan Pendidikan

Tabel 1.5
Realisasi Belanja Daerah Urusan Pendidikan

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)	
1	2				3	4	5	
URUSAN PENDIDIKAN					1.941.046.731.941,00	1.757.995.002.935,00	90,56	
I	DINAS PENDIDIKAN				1.832.828.171.133,00	1.677.130.153.615,00	91,51	
	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.280.678.879.450,00	1.161.358.678.019,00	90,68	
		I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			415.139.000,00	282.862.775,00	68,14
			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	391.630.000,00	273.538.775,00	69,85	
			2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.509.000,00	9.324.000,00	39,66	
		II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.165.260.218.419,00	1.052.525.712.748,00	90,33
			1	Penyediaan Gaji dan	1.165.215.218.419,00	1.052.495.712.748,00	90,33	

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)
1	2				3	4	5
				Tunjangan ASN			
			2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000,00	15.000.000,00	100
			3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	30.000.000,00	15.000.000,00	50
		III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		178.837.500,00	86.049.420,00	48,12
			1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100.000.000,00	86.049.420,00	86,05
			2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	78.837.500,00	0	0
		IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.140.699.081,00	900.602.564,00	78,95
			1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.981.000,00	20.230.860,00	80,98
			2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	536.374.000,00	440.209.857,00	82,07
			3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	136.173.750,00	112.879.500,00	82,89
			4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000,00	50.000.000,00	100
			5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000,00	17.998.000,00	89,99
			6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	248.545.000,00	137.785.412,00	55,44
			7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	124.625.331,00	121.498.935,00	97,49
		V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		425.078.220,00	359.704.496,00	84,62
			1	Pengadaan Mebel	221.051.920,00	191.586.000,00	86,67
			2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	204.026.300,00	168.118.496,00	82,4
			3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	111.690.224.065,00	106.472.361.105,00	95,33
			4	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	900.000.000,00	654.596.536,00	72,73
			5	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	110.790.224.065,00	105.817.764.569,00	95,51
		VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.568.683.165,00	731.384.911,00	46,62
			1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	300.000.000,00	224.688.865,00	74,9

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)
1	2				3	4	5
				Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
			2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000,00	68.958.506,00	68,96
			3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	299.120.000,00	116.176.360,00	38,84
			4	Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	869.563.165,00	321.561.180,00	36,98
	B	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			549.489.710.765,00	514.100.507.512,00	93,56
		I	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		301.520.936.934,00	284.365.536.907,00	94,31
			1	Pengadaan Mebel Sekolah	23.315.162.250,00	20.759.441.731,00	89,04
			2	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.000.000.000,00	0	0
			3	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	21.411.366.400,00	21.079.368.728,00	98,45
			4	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	2.517.706.000,00	937.024.217,00	37,22
			5	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	513.143.108,00	385.128.287,00	75,05
			6	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	16.882.660.000,00	11.619.780.000,00	68,83
			7	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	216.156.866.888,00	215.752.380.182,00	99,81
			8	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	138.892.481,00	81.148.835,00	58,43
			9	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	250.000.000,00	160.946.214,00	64,38
			10	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	0	0	0
			11	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	0	0	0
			12	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	306.974.288,00	0	0
			13	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	0	0	0
			14	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	14.030.511.519,00	8.790.609.216,00	62,65
			15	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	4.997.654.000,00	4.799.709.497,00	96,04

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)
1	2				3	4	5
				Sekolah Dasar			
		II	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		189.995.580.860,00	174.011.447.492,00	91,59
			1	Pengadaan Mebel Sekolah	12.031.408.750,00	10.523.367.321,00	87,47
			2	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	594.270.357,00	525.734.800,00	88,47
			3	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	19.848.167.680,00	18.946.587.700,00	95,46
		III	Pengediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		12.550.240.000,00	8.825.150.382,00	70,32
			1	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.093.776.667,00	980.672.235,00	89,66
			2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	467.816.250,00	457.719.215,00	97,84
			3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	14.322.445.200,00	9.854.400.000,00	68,8
			4	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	113.676.407.042,00	113.018.875.062,00	99,42
			5	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	135.922.000,00	0	0
			6	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama	0	0	0
			7	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	88.290.000,00	0	0
			8	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	0	0	0
			9	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	0	0	0
			10	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0	0	0
			11	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	100.758.750,00	87.000.000,00	86,34
			12	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	14.811.841.404,00	10.557.940.777,00	71,28
			13	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	274.236.760,00	234.000.000,00	85,33
		IV	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		44.498.380.213,00	42.683.092.985,00	95,92
			1	Pengadaan Mebel PAUD	167.238.900,00	137.584.500,00	82,27

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)
1	2				3	4	5
			2	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	3.640.066.225,00	3.466.798.095,00	95,24
			3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	13.661.991.171,00	12.628.271.688,00	92,43
			4	Pengelolaan Dana BOP PAUD	25.067.560.000,00	24.752.887.937,00	98,74
			5	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	79.365.825,00	5.700.000,00	7,18
			6	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	0	0	0
			7	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	0	0	0
			8	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	0	0	0
			9	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	0	0	0
			10	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0	0	0
			11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	395.167.000,00	348.771.324,00	88,26
			12	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	1.486.991.092,00	1.343.079.441,00	90,32
		V	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		13.474.812.758,00	13.040.430.128,00	96,78
			1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	785.127.250,00	777.641.250,00	99,05
			2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	99.798.037,00	96.661.552,00	96,86
			3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2.764.257.370,00	2.580.241.522,00	93,34
			4	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	8.901.080.000,00	8.883.759.963,00	99,81
			5	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	327.369.560,00	299.400.000,00	91,46
			6	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0	0	0
			7	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	405.148.721,00	266.912.398,00	65,88
			8	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	192.031.820,00	135.813.443,00	70,72

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)
1	2			3	4	5
	C	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		2.508.282.300,00	1.537.925.302,00	61,31
	I	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		2.508.282.300,00	1.537.925.302,00	61,31
		1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.770.518.300,00	890.484.394,00	50,3
		2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	737.764.000,00	647.440.908,00	87,76
	D	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN		151.298.618,00	133.042.782,00	87,93
	I	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		100.401.755,00	84.532.782,00	84,19
		1	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100.401.755,00	84.532.782,00	84,19
	II	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		50.896.863,00	48.510.000,00	95,31
		1	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	50.896.863,00	48.510.000,00	95,31
II	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN			108.218.560.808,00	80.864.849.320,00	74,72
	A	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		108.218.560.808,00	80.864.849.320,00	74,72
	I	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		66.102.065.412,00	46.443.013.820,00	70,26
		1	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.099.759.200,00	984.983.000,00	89,56
		2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.394.800.000,00	1.063.708.900,00	76,26
		3	Pembangunan Ruang Kelas Baru	29.601.475.082,00	17.875.631.000,00	60,39
		4	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	34.006.031.130,00	26.518.690.920,00	77,98
	II	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		40.844.495.396,00	33.299.162.500,00	81,53
		1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas	778.300.000,00	627.071.000,00	80,57

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)
1	2				3	4	5
				Sekolah			
			2	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	33.770.705.500,00	26.981.777.500,00	79,9
			3	Pembangunan Ruang Kelas Baru	6.295.489.896,00	5.690.314.000,00	90,39
		III	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		1.272.000.000,00	1.122.673.000,00	88,26
			1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.272.000.000,00	1.122.673.000,00	88,26

Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2025.

B. Urusan Kesehatan

Tabel 1.6
Realisasi Belanja Daerah Urusan Kesehatan

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)
1	2			3	4	5
URUSAN KESEHATAN				1.457.294.326.006,00	1.304.983.042.138,00	89,54
I	DINAS KESEHATAN			925.142.876.917,00	802.862.200.357,00	86,78
	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		270.586.476.900,00	243.975.530.921,00	90,17
		I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.567.000,00	31.533.000,00	96,83
			1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.567.000,00	12.213.000,00	97,18
			2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000,00	19.320.000,00	96,6
			3 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	260.751.145.000,00	235.945.527.608,00	90,49
		II	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	260.731.145.000,00	235.927.174.358,00	90,49
			1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000,00	9.162.000,00	91,62
			2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.000.000,00	9.191.250,00	91,91
		III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)
1	2		3	4	5
		1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0
		2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0
		IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	802.194.564,00	704.333.522,00
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	28.867.000,00	28.332.000,00
		2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	253.660.000,00	236.715.495,00
		3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	94.593.300,00	71.972.400,00
		4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000,00	26.300.000,00
		5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000,00	29.196.000,00
		6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	288.083.264,00	236.541.811,00
		7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	76.991.000,00	75.275.816,00
		V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.100.000.000,00	618.360.980,00
		1	Pengadaan Mebel	100.000.000,00	92.130.000,00
		2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.000.000.000,00	526.230.980,00
		VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.988.012.336,00	5.691.959.538,00
		1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	789.350.200,00	680.426.675,00
		2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.198.662.136,00	5.011.532.863,00
		VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.912.558.000,00	983.816.273,00
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	288.080.000,00	171.448.194,00
		2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	317.950.000,00	295.802.584,00

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)
1	2				3	4	5
				Operasional atau Lapangan			
			3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.000.000,00	64.000.000,00	100
			4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.242.528.000,00	452.565.495,00	36,42
	B	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			612.232.353.068,00	518.488.141.175,00	84,69
		I	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		140.473.954.506,00	101.675.112.690,00	72,38
			1	Pembangunan Puskesmas	360.000.000,00	0	0
			2	Pengembangan Puskesmas	8.195.126.250,00	4.385.049.700,00	53,51
			3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	2.759.680.334,00	2.649.676.604,00	96,01
			4	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	54.212.432.456,00	44.109.741.157,00	81,36
			5	Pengembangan Rumah Sakit	14.284.770.354,00	7.655.706.845,00	53,59
			6	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	60.593.225.112,00	42.816.996.884,00	70,66
			7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	68.720.000,00	57.941.500,00	84,32
		II	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		471.502.113.762,00	416.576.906.485,00	88,35
			1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.131.150.688,00	1.086.549.334,00	96,06
			2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	102.405.000,00	102.000.000,00	99,6
			3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	229.800.000,00	229.150.000,00	99,72
			4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	171.082.600,00	170.000.000,00	99,37
			5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1.569.039.400,00	1.545.096.312,00	98,47
			6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	45.911.800,00	42.797.710,00	93,22

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)
1	2				3	4	5
			7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	184.317.000,00	157.949.842,00	85,69
			8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	48.760.000,00	47.651.038,00	97,73
			9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100.000.000,00	98.408.200,00	98,41
			10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	437.877.000,00	407.371.500,00	93,03
			11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	744.600.000,00	667.430.250,00	89,64
			12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	114.822.200,00	111.638.150,00	97,23
			13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	318.075.000,00	313.514.500,00	98,57
			14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	7.955.328.647,00	6.913.132.369,00	86,9
			15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	436.574.314,00	417.749.900,00	95,69
			16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	533.445.669,00	517.484.930,00	97,01
			17	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	398.027.000,00	361.523.628,00	90,83
			18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	43.170.000,00	36.716.000,00	85,05
			19	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	807.792.571,00	716.406.150,00	88,69
			20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	372.140.631,00	347.535.000,00	93,39
			21	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3.465.936.024,00	3.311.143.997,00	95,53
		II	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		218.294.386.933,00	190.497.810.379,00	87,27
			1	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	25.812.000,00	24.788.600,00	96,04
			2	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB	761.852.000,00	471.005.000,00	61,82

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)
1	2				3	4	5
				ke Laboratorium Rujukan/Nasional			
			3	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	293.071.000,00	211.458.524,00	72,15
			4	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	116.332.601.396,00	104.064.705.413,00	89,45
			5	Operasional Pelayanan Puskesmas	108.483.466.940,00	96.149.350.639,00	88,63
			6	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3.629.694.402,00	3.162.297.046,00	87,12
			7	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	25.736.000,00	24.874.000,00	96,65
			8	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	788.449.000,00	786.335.074,00	99,73
			9	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	56.717.711,00	54.912.000,00	96,82
			10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	540.165.084,00	521.831.000,00	96,61
			11	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	57.585.808,00	42.250.000,00	73,37
			12	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	577.419.944,00	568.940.000,00	98,53
			13	Pengelolaan Layanan Imunisasi	2.424.900.000,00	2.395.100.000,00	98,77
			14	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	63.566.000,00	63.566.000,00	100
			15	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	63.566.000,00	63.566.000,00	100
		III	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		192.718.800,00	172.556.000,00	89,54
			1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	64.750.000,00	45.968.000,00	70,99
			2	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	51.868.800,00	51.359.000,00	99,02
			3	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	76.100.000,00	75.229.000,00	98,86
	C	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan			33.767.596.742,00	32.578.806.707,00	96,48
		I	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia		31.759.074.742,00	30.740.503.707,00	96,79

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)
1	2			3	4	5
			Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			
		1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	31.744.259.742,00	30.725.973.207,00	96,79
		2	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	14.815.000,00	14.530.500,00	98,08
		3	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.008.522.000,00	1.838.303.000,00	91,53
		4	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.008.522.000,00	1.838.303.000,00	91,53
	D	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		215.572.200,00	177.398.034,00	82,29
		I	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	66.400.000,00	65.695.000,00	98,94
		1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	66.400.000,00	65.695.000,00	98,94
		2	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	67.772.200,00	58.470.000,00	86,27
		3	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk	67.772.200,00	58.470.000,00	86,27

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)
1	2				3	4	5
				Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			
			4	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	81.400.000,00	53.233.034,00	65,4
			5	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	81.400.000,00	53.233.034,00	65,4
	E	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			8.340.878.007,00	7.642.323.520,00	91,62
		I	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		7.645.938.000,00	7.032.000.004,00	91,97
			1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	7.645.938.000,00	7.032.000.004,00	91,97
			2	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	350.000.000,00	287.719.618,00	82,21
			3	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	350.000.000,00	287.719.618,00	82,21
		II	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		344.940.007,00	322.603.898,00	93,52
			1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	344.940.007,00	322.603.898,00	93,52
II	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH				521.917.261.346,00	497.966.513.470,00	95,41
	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			96.693.568.000,00	91.161.129.162,00	94,28
		I	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		96.693.568.000,00	91.161.129.162,00	94,28

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)
1	2				3	4	5
			1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	96.693.568.000,00	91.161.129.162,00	94,28
	B	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			425.223.693.346,00	406.805.384.308,00	95,67
		I	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		30.836.750.000,00	30.637.186.850,00	99,35
			1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	26.798.750.000,00	26.737.773.990,00	99,77
			2	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4.038.000.000,00	3.899.412.860,00	96,57
		II	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		394.386.943.346,00	376.168.197.458,00	95,38
			1	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	394.386.943.346,00	376.168.197.458,00	95,38
III	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN				10.234.187.743,00	4.154.328.311,00	40,59
	A	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			10.234.187.743,00	4.154.328.311,00	40,59
		I	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		10.234.187.743,00	4.154.328.311,00	40,59
			1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	8.008.901.511,00	3.984.926.311,00	49,76
			2	Pembangunan Puskesmas	93.350.000,00	91.819.000,00	98,36
			3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	2.131.936.232,00	77.583.000,00	3,64

Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2025.

C. Urusan Pekerjaan Umum

Tabel 1.7
Realisasi Belanja Daerah Urusan Pekerjaan Umum

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)
1	2			3	4	5
URUSAN PEKERJAAN UMUM				972.110.759.511,00	804.851.803.718,00	82,79
I	DINAS TATA RUANG			27.176.159.876,00	24.022.699.260,00	88,4
	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		22.979.094.876,00	20.762.006.217,00	90,4
		I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	190.800.000,00	16.686.600,00	8,75
			1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	180.800.000,00	8.302.000,00	4,59
			2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000,00	8.384.600,00	83,85
		II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.633.103.000,00	17.790.247.323,00	90,6
			1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.628.103.000,00	17.788.298.623,00	90,63
			2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000,00	1.948.700,00	38,97
		III	Administrasi Umum Perangkat Daerah	393.103.158,00	346.057.070,00	88
			1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	312.603.158,00	291.801.520,00	93,35
			2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.500.000,00	29.655.550,00	83,54
			3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	25.000.000,00	24.600.000,00	98,4
			4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.000.000,00	0	0
		IV	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	68.416.662,00	67.143.900,00	98,1
			1 Pengadaan Mebel	51.404.662,00	50.569.380,00	98,38
			2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.012.000,00	16.574.520,00	97,43
			3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.324.363.656,00	2.204.224.414,00	94,83

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)
1	2				3	4	5
			4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.324.363.656,00	2.204.224.414,00	94,83
		V	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		369.308.400,00	337.646.910,00	91,4
			1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200.000.000,00	182.946.500,00	91,47
			2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.000.000,00	135.480.410,00	90,32
			3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.308.400,00	19.220.000,00	99,54
	B	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			931.825.000,00	916.338.100,00	98,3
		I	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		931.825.000,00	916.338.100,00	98,3
			1	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	100.000.000,00	98.859.000,00	98,86
			2	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	831.825.000,00	817.479.100,00	98,28
	C	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			3.265.240.000,00	2.344.354.943,00	71,8

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)
1	2			3	4	5
		I	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	773.066.000,00	727.816.516,00	94,2
			1 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	726.000.000,00	710.657.520,00	97,89
			2 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- Undangan Bidang Penataan Ruang	47.066.000,00	17.158.996,00	36,46
		III	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	158.000.000,00	157.614.324,00	99,8
			1 Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	88.000.000,00	87.976.824,00	99,97
			2 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	70.000.000,00	69.637.500,00	99,48
		IV	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.377.521.500,00	1.223.211.466,00	88,8
			1 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	138.650.000,00	63.216.000,00	45,59
			2 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	104.334.000,00	51.125.000,00	49
			3 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	700.000.000,00	688.836.750,00	98,41
			4 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	434.537.500,00	420.033.716,00	96,66
		V	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	956.652.500,00	235.712.637,00	24,6
			1 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	0	0	0
			2 Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	950.126.600,00	235.145.737,00	24,75
			3 Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	6.525.900,00	566.900,00	8,69

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)
1	2		3	4	5
II	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR		693.460.351.618,00	601.881.916.271,00	86,79
	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	39.429.955.018,00	34.255.127.760,00	86,88
		I Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	317.420.000,00	262.338.000,00	82,65
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	310.420.000,00	255.693.000,00	82,37
		2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.000.000,00	6.645.000,00	94,93
		II Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	32.080.790.000,00	27.772.708.126,00	86,57
		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	32.078.790.000,00	27.770.741.656,00	86,57
		2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000,00	1.966.470,00	98,32
		III Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	736.390.000,00	656.265.250,00	89,12
		1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	568.710.000,00	520.895.250,00	91,59
		2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	167.680.000,00	135.370.000,00	80,73
		IV Administrasi Umum Perangkat Daerah	944.000.000,00	863.060.850,00	91,43
		1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	423.338.000,00	408.982.450,00	96,61
		2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	173.000.000,00	167.081.500,00	96,58
		3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100.000.000,00	89.497.900,00	89,5
		4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000,00	27.359.000,00	36,48
		5 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	172.662.000,00	170.140.000,00	98,54
		V Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	494.795.000,00	459.924.487,00	92,95
		1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	0
		2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	494.795.000,00	459.924.487,00	92,95
		3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.653.910.018,00	2.493.018.902,00	93,94
		4 Penyediaan Jasa	1.350.000.000,00	1.227.704.770,00	90,94

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)
1	2				3	4	5
				Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
			5	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.303.910.018,00	1.265.314.132,00	97,04
		VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.202.650.000,00	1.747.812.145,00	79,35
			1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	327.000.000,00	282.650.883,00	86,44
			2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.525.500.000,00	1.404.246.462,00	92,05
			3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.150.000,00	60.914.800,00	86,84
			4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	280.000.000,00	0	0
	B	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			38.205.531.714,00	26.731.105.360,00	69,97
		I	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		38.205.531.714,00	26.731.105.360,00	69,97
			1	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	8.733.709.514,00	7.611.037.348,00	87,15
			2	Pembangunan Tanggul Sungai	2.979.650.000,00	1.692.430.703,00	56,8
			3	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	17.109.127.000,00	11.874.783.328,00	69,41
			4	Rehabilitasi Tanggul Sungai	7.879.295.200,00	4.397.532.681,00	55,81
			5	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	1.503.750.000,00	1.155.321.300,00	76,83
	C	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			228.945.558.373,00	203.089.254.707,00	88,71
		I	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		228.945.558.373,00	203.089.254.707,00	88,71
			1	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	31.052.679.192,00	27.615.467.373,00	88,93
			2	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	33.729.850.195,00	30.370.970.341,00	90,04
			3	Rehabilitasi Sistem	53.017.505.530,00	44.202.535.395,00	83,37

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)
1	2				3	4	5
				Drainase Perkotaan			
			4	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	28.502.302.200,00	25.502.978.577,00	89,48
			5	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	9.837.150.000,00	9.389.500.673,00	95,45
			6	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	72.806.071.256,00	66.007.802.348,00	90,66
	D	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			355.139.579.791,00	311.892.593.502,00	87,82
		I	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		355.139.579.791,00	311.892.593.502,00	87,82
			1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	9.718.150.000,00	9.182.556.789,00	94,49
			2	Pembangunan Jalan	826.308.628,00	772.832.800,00	93,53
			3	Rekonstruksi Jalan	141.647.559.523,00	125.658.475.749,00	88,71
			4	Pemeliharaan Berkala Jalan	63.414.286.392,00	56.939.335.818,00	89,79
		II	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa		605.200.000,00	397.568.700,00	65,69
			1	Rehabilitasi Jembatan	7.063.432.080,00	2.556.317.477,00	36,19
			2	Pembangunan Jembatan	6.186.550.000,00	5.907.480.874,00	95,49
			3	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	1.439.447.350,00	0	0
			4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1.291.189.114,00	1.167.622.407,00	90,43
			5	Rehabilitasi Jalan	47.838.847.200,00	43.630.055.895,00	91,2
			6	Pemeliharaan Rutin Jalan	75.108.609.504,00	65.680.346.993,00	87,45
	E	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			1.573.741.000,00	1.028.316.630,00	65,34
		I	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		893.000.000,00	586.627.630,00	65,69
			1	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	458.000.000,00	193.567.350,00	42,26
			2	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	435.000.000,00	393.060.280,00	90,36
			3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	356.340.000,00	214.303.000,00	60,14
			4	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	303.940.000,00	196.803.000,00	64,75

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)
1	2		3	4	5
	II	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	52.400.000,00	17.500.000,00	33,4
		1 Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	0	0	0
	III	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	160.400.000,00	123.716.000,00	77,13
		1 Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi	60.400.000,00	27.046.000,00	44,78
		2 Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	100.000.000,00	96.670.000,00	96,67
	IV	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	164.001.000,00	103.670.000,00	63,21
		1 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	16.601.000,00	0	0
		2 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	47.400.000,00	7.000.000,00	14,77
		3 Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	100.000.000,00	96.670.000,00	96,67
	F	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.432.550.430,00	1.415.637.363,00	58,2
	I	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	2.432.550.430,00	1.415.637.363,00	58,2
		1 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	2.432.550.430,00	1.415.637.363,00	58,2
	G	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	27.733.435.292,00	23.469.880.949,00	84,63
	I	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	27.733.435.292,00	23.469.880.949,00	84,63
		1 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0	0	0
		2 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	9.693.978.066,00	7.268.319.742,00	74,98
		3 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	18.039.457.226,00	16.201.561.207,00	89,81
III	DINAS	PERUMAHAN, KAWASAN	251.474.248.017,00	178.947.188.187,00	71,15

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)
1	2		3	4	5
	PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN				
	A	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	27.620.894.600,00	9.905.047.180,00	35,86
	I	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	27.620.894.600,00	9.905.047.180,00	35,86
		1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	93.743.600,00	56.768.600,00	60,56
		2 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	530.700.000,00	420.783.437,00	79,29
		3 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	14.095.535.000,00	3.899.693.504,00	27,67
		4 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.989.400.000,00	6.828.076,00	0,34
		5 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	5.347.366.000,00	3.090.375.214,00	57,79
		6 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	5.564.150.000,00	2.430.598.349,00	43,68
	B	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	29.133.200.930,00	22.797.309.100,00	78,25
	I	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	29.133.200.930,00	22.797.309.100,00	78,25
		1 Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	0	0	0
		2 Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	2.100.000.000,00	65.401.493,00	3,11
		3 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	19.075.050.930,00	15.549.691.422,00	81,52
	II	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	7.557.050.000,00	6.795.103.747,00	89,92
		1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	401.100.000,00	387.112.438,00	96,51
	C	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	194.720.152.487,00	146.244.831.907,00	75,11
	I	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah	194.720.152.487,00	146.244.831.907,00	75,11

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)
1	2			3	4	5
			Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			
		1	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	194.720.152.487,00	146.244.831.907,00	75,11

Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2025.

D. Urusan Perumahan Rakyat

Tabel 1.8
Realisasi Belanja Daerah Urusan Perumahan Rakyat

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)
1	2			3	4	5
URUSAN PERUMAHAN RAKYAT						
I	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN			401.744.573.485,00	248.239.806.850,00	61,79
	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		21.583.694.908,00	19.319.089.404,00	89,51
		I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65.930.000,00	54.810.000,00	83,13
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.930.000,00	39.810.000,00	78,17
		2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000,00	15.000.000,00	100
		II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.213.972.000,00	16.492.718.285,00	90,55
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.198.972.000,00	16.477.718.285,00	90,54
		2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000,00	15.000.000,00	100
		III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	395.000.000,00	90.728.693,00	22,97
		1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	350.000.000,00	81.222.893,00	23,21
		2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	45.000.000,00	9.505.800,00	21,12

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)
			3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0
		IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah		895.225.000,00	826.916.958,00
			1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	510.225.000,00	502.221.290,00
			2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	200.000.000,00	197.517.550,00
			3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	75.000.000,00	18.205.800,00
			4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000,00	59.580.000,00
			5	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50.000.000,00	49.392.318,00
			6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	187.743.360,00	180.066.730,00
			7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	187.743.360,00	180.066.730,00
			8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.427.824.548,00	1.338.430.638,00
			9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.427.824.548,00	1.338.430.638,00
		V	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		398.000.000,00	335.418.100,00
			1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	298.000.000,00	246.628.500,00
			2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000,00	43.944.600,00
			3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	44.845.000,00
	B	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		2.805.019.173,00	975.090.915,00	34,76
		I	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		555.000.000,00	110.168.400,00
			1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	555.000.000,00	110.168.400,00
			2	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	2.250.019.173,00	864.922.515,00
			3	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau	2.250.019.173,00	864.922.515,00

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)
			Rumah Khusus			
	C	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		16.965.100.000,00	14.205.331.993,00	83,73
		I	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	16.965.100.000,00	14.205.331.993,00	83,73
			1 Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	16.965.100.000,00	14.205.331.993,00	83,73
	D	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		3.256.350.640,00	3.089.410.200,00	94,87
		I	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	3.256.350.640,00	3.089.410.200,00	94,87
			1 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	3.256.350.640,00	3.089.410.200,00	94,87
	E	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		91.346.328.878,00	73.144.986.107,00	80,07
		I	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	91.346.328.878,00	73.144.986.107,00	80,07
			1 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	2.103.300.000,00	1.464.721.984,00	69,64
			2 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	89.243.028.878,00	71.680.264.123,00	80,32
	F	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		265.788.079.886,00	137.505.898.231,00	51,74
		I	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	265.788.079.886,00	137.505.898.231,00	51,74
			1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	265.788.079.886,00	137.505.898.231,00	51,74

Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2025.

E. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tabel 1.9
Realisasi Belanja Daerah Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN Rp)	REALISASI (Rp)	%	
1	2				3	4	5	
URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					200.979.184.989,00	180.139.455.793,00	89,63	
I	DINAS PEMADAM KEBAKAN DAN PENYELAMATAN				89.879.800.582,00	81.108.758.232,00	90,24	
	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			65.910.490.956,00	58.790.711.225,00	89,2	
		I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			90.650.000,00	87.777.678,00	96,83
			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	57.000.000,00	55.663.020,00	97,65	
			2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.650.000,00	17.753.658,00	95,19	
			3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000,00	14.361.000,00	95,74	
		II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			52.420.459.000,00	46.484.786.763,00	88,68
			1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	52.395.459.000,00	46.461.657.083,00	88,67	
			2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000,00	9.154.680,00	91,55	
			3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	15.000.000,00	13.975.000,00	93,17	
		III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			541.080.000,00	475.538.150,00	87,89
			1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	541.080.000,00	475.538.150,00	87,89	
			2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0	0	
		IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah			710.994.000,00	560.737.091,00	78,87
			1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	28.959.000,00	28.218.500,00	97,44	
			2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.475.000,00	17.647.000,00	95,52	
			3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	385.250.000,00	352.540.040,00	91,51	
			4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.000.000,00	21.120.000,00	70,4	

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2				3	4	5
			5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000,00	24.428.000,00	97,71
			6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	160.730.000,00	60.730.015,00	37,78
			7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62.580.000,00	56.053.536,00	89,57
			8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	0	0
		V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		426.600.000,00	397.950.099,00	93,28
			1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	426.600.000,00	397.950.099,00	93,28
			2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.138.511.956,00	5.344.087.443,00	87,06
			3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.670.200.000,00	947.452.036,00	56,73
			4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.468.311.956,00	4.396.635.407,00	98,4
		VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		5.582.196.000,00	5.439.834.001,00	97,45
			1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	395.000.000,00	335.796.271,00	85,01
			2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	122.500.000,00	69.069.000,00	56,38
			3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	116.196.000,00	95.594.580,00	82,27
			4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.948.500.000,00	4.939.374.150,00	99,82
	B	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			23.969.309.626,00	22.318.047.007,00	93,11
		I	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		18.635.569.626,00	17.646.266.933,00	94,69
			1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
			2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.001.489.926,00	4.943.963.536,00	98,85

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2			3	4	5
		3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	923.005.160,00	883.655.766,00	95,74
		4	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
		5	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	3.484.454.000,00	3.280.390.051,00	94,14
		6	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	1.390.500.000,00	1.390.408.740,00	99,99
		7	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	204.200.000,00	203.148.169,00	99,48
		8	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	0	0	0
		9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	7.009.120.540,00	6.381.786.259,00	91,05
		10	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	529.850.000,00	474.879.141,00	89,63
		11	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	92.950.000,00	88.035.271,00	94,71
		11	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	81.615.000,00	80.983.500,00	99,23
		12	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	81.615.000,00	80.983.500,00	99,23
		13	Investigasi Kejadian Kebakaran	0	0	0
		14	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	0	0	0
	II	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		146.508.000,00	123.271.025,00	84,14
		1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan	0	0	0

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2				3	4	5
				Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat			
			2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	0	0	0
			3	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	146.508.000,00	123.271.025,00	84,14
		III	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia		5.105.617.000,00	4.467.525.549,00	87,5
			1	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	517.416.000,00	512.668.100,00	99,08
			2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	4.588.201.000,00	3.954.857.449,00	86,2
II	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				99.207.385.211,00	88.734.999.786,00	89,44
	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			75.715.995.731,00	68.895.642.636,00	90,99
		I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		102.640.000,00	70.686.800,00	68,87
			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	92.640.000,00	60.688.000,00	65,51
			2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000,00	9.998.800,00	99,99
		II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		51.747.542.000,00	48.125.743.532,00	93
			1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	51.737.542.000,00	48.122.768.532,00	93,01
			2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000,00	2.975.000,00	29,75
		III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		2.876.724.000,00	1.788.369.200,00	62,17
			1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2.620.224.000,00	1.547.049.200,00	59,04
			2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	256.500.000,00	241.320.000,00	94,08
		IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.754.786.800,00	1.323.721.189,00	75,43

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2			3	4	5
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	44.348.030,00	42.526.750,00	95,89
		2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	325.723.000,00	296.428.000,00	91,01
		3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	565.656.000,00	450.401.904,00	79,62
		4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	132.963.770,00	85.368.317,00	64,2
		5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000,00	26.320.000,00	87,73
		6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.000.000,00	49.007.500,00	49,01
		7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	256.096.000,00	138.622.000,00	54,13
		8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	300.000.000,00	235.046.718,00	78,35
	V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.621.130.281,00	1.492.854.700,00	92,09
		1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.519.840.281,00	1.425.255.700,00	93,78
		2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	101.290.000,00	67.599.000,00	66,74
		3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.447.852.350,00	13.751.095.803,00	95,18
		4	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.240.200.000,00	960.723.359,00	77,47
		5	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13.207.652.350,00	12.790.372.444,00	96,84
	VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3.165.320.300,00	2.343.171.412,00	74,03
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	281.004.300,00	231.015.700,00	82,21
		2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.700.000.000,00	1.434.155.912,00	84,36
		3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	699.000.000,00	199.267.250,00	28,51
		4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	485.316.000,00	478.732.550,00	98,64
	B	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		23.491.389.480,00	19.839.357.150,00	84,45

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2			3	4	5
		I	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	23.078.834.480,00	19.434.340.450,00	84,21
			1 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	70.770.000,00	50.995.000,00	72,06
			2 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	20.139.960.000,00	17.117.169.350,00	84,99
			3 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	534.450.000,00	524.644.500,00	98,17
			4 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	654.791.300,00	446.931.600,00	68,26
			5 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	673.952.000,00	484.800.000,00	71,93
			6 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	928.318.080,00	809.800.000,00	87,23
			7 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	76.593.100,00	0	0
			8 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	0	0
			9 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	412.555.000,00	405.016.700,00	98,17
			10 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan	147.370.000,00	143.345.600,00	97,27

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2			3	4	5
			Peraturan Kepala Daerah			
	II	Penanganan <i>Atas</i> Pelanggaran <i>Peraturan</i> Daerah dan <i>Peraturan</i> Kepala daerah		153.300.000,00	151.666.900,00	98,93
		1	Pengawasan <i>Atas</i> Kepatuhan <i>Terhadap</i> Pelaksanaan <i>Peraturan</i> Daerah dan <i>Peraturan</i> Kepala Daerah	111.885.000,00	110.004.200,00	98,32
III	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			11.891.999.196,00	10.295.697.775,00	86,58
	A	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		5.174.156.120,00	4.945.639.406,00	95,58
	I	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		537.386.600,00	530.330.670,00	98,69
		1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	316.676.000,00	314.974.250,00	99,46
		2	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	220.710.600,00	215.356.420,00	97,57
	II	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		4.220.236.520,00	4.023.368.101,00	95,34
		1	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	0	0	0
		2	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	291.172.000,00	283.320.240,00	97,3
		3	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	30.000.000,00	26.400.000,00	88
		4	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	3.447.067.520,00	3.274.850.111,00	95
		5	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	230.115.000,00	219.859.750,00	95,54
		6	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	221.882.000,00	218.938.000,00	98,67
		7	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	291.533.000,00	271.940.635,00	93,28
		8	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	26.133.000,00	9.625.000,00	36,83
		9	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	265.400.000,00	262.315.635,00	98,84
		10	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	125.000.000,00	120.000.000,00	96
		11	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	125.000.000,00	120.000.000,00	96

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU ANGGARAN Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2		3	4	5
	B	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.717.843.076,00	5.350.058.369,00	79,64
		I Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.905.000,00	11.789.650,00	49,32
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.505.000,00	7.000.000,00	37,83
		2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.400.000,00	4.789.650,00	88,7
		II Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.791.642.000,00	3.614.882.485,00	75,44
		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.786.542.000,00	3.610.259.335,00	75,43
		2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.100.000,00	4.623.150,00	90,65
		III Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	253.792.720,00	219.758.355,00	86,59
		1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	253.792.720,00	219.758.355,00	86,59
		IV Administrasi Umum Perangkat Daerah	381.959.700,00	345.249.280,00	90,39
		1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	152.545.000,00	150.757.600,00	98,83
		2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	62.730.200,00	56.501.000,00	90,07
		3 Fasilitasi Kunjungan Tamu	55.920.000,00	48.073.000,00	85,97
		4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	101.140.000,00	80.835.680,00	79,92
		5 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9.624.500,00	9.082.000,00	94,36
		V Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	55.029.000,00	47.685.000,00	86,65
		1 Pengadaan Mebel	55.029.000,00	47.685.000,00	86,65
		2 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	563.662.356,00	492.486.539,00	87,37
		3 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69.600.000,00	39.396.298,00	56,6
		4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	494.062.356,00	453.090.241,00	91,71
		VI Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	647.852.300,00	618.207.060,00	95,42

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2			3	4	5
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75.500.000,00	59.100.410,00	78,28
		2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	468.800.000,00	458.035.600,00	97,7
		3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	103.552.300,00	101.071.050,00	97,6

Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2025.

F. Urusan Sosial

Tabel 1.10
Realisasi Belanja Daerah Urusan Sosial

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2			3	4	5
URUSAN SOSIAL				29.226.552.145,00	25.081.142.712,00	85,82
I	DINAS SOSIAL			29.226.552.145,00	25.081.142.712,00	85,82
	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		14.171.420.836,00	12.762.370.465,00	90,06
		I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.727.000,00	27.532.000,00	99,3
		1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27.727.000,00	27.532.000,00	99,3
		II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.570.387.000,00	9.458.842.289,00	89,48
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.565.637.000,00	9.454.092.289,00	89,48
		2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.750.000,00	4.750.000,00	100
		III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	53.900.000,00	50.519.028,00	93,73
		1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	53.900.000,00	50.519.028,00	93,73
		2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0	0
		3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0
		IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	620.988.250,00	571.964.362,00	92,11
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	9.125.191,00	91,25

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2			3	4	5
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00	48.373.800,00	96,75
		3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	70.000.000,00	66.266.230,00	94,67
		4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	195.988.250,00	175.353.637,00	89,47
		5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60.000.000,00	46.822.198,00	78,04
		6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000,00	21.546.000,00	86,18
		7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000,00	28.200.000,00	94
		8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.000.000,00	77.711.000,00	97,14
		9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100.000.000,00	98.566.306,00	98,57
		V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	153.250.000,00	139.913.446,00	91,3
		1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	53.250.000,00	50.714.448,00	95,24
		2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.741.089.586,00	1.592.263.240,00	91,45
		3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	468.000.000,00	355.238.591,00	75,91
		4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.273.089.586,00	1.237.024.649,00	97,17
		VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.004.079.000,00	921.336.100,00	91,76
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	230.080.000,00	204.420.700,00	88,85
		2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	249.769.000,00	199.326.200,00	79,8
		3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	124.230.000,00	121.375.100,00	97,7
		4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	400.000.000,00	396.214.100,00	99,05
	B	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		3.341.258.639,00	2.427.542.487,00	72,65
		I	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
		1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	0	0	0
		2	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	3.341.258.639,00	2.427.542.487,00	72,65
		II	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.160.895.223,00	1.086.086.129,00	93,56

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2				3	4	5
			1	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	182.567.701,00	145.289.996,00	79,58
			2	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.997.795.715,00	1.196.166.362,00	59,87
	C	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			4.645.554.625,00	4.005.923.311,00	86,23
		I	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		4.645.554.625,00	4.005.923.311,00	86,23
			1	Penyediaan Permakanan	743.400.000,00	607.430.000,00	81,71
			2	Penyediaan Sandang	100.000.000,00	98.534.022,00	98,53
			3	Penyediaan Alat Bantu	629.840.000,00	538.668.800,00	85,52
			4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	589.000.000,00	406.917.797,00	69,09
			5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	358.380.000,00	266.649.866,00	74,4
			6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	1.380.000.000,00	1.306.664.516,00	94,69
			7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	32.633.625,00	25.965.000,00	79,57
			8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	50.000.000,00	49.476.719,00	98,95
			9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	51.081.000,00	50.131.000,00	98,14
			10	Pemberian Layanan Kedaruratan	199.190.000,00	170.800.000,00	85,75
			11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	12.030.000,00	10.884.000,00	90,47
			12	Pemberian Layanan Rujukan	500.000.000,00	473.801.591,00	94,76
			13	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	0	0	0
			14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	0	0	0
	D	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			4.572.316.800,00	3.717.696.432,00	81,31
		I	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		4.572.316.800,00	3.717.696.432,00	81,31
			1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	336.840.000,00	303.000.000,00	89,95

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2				3	4	5
			2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	745.770.000,00	466.078.700,00	62,5
			3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	3.248.486.800,00	2.727.545.020,00	83,96
			4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	241.220.000,00	221.072.712,00	91,65
	E	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			1.876.244.335,00	1.578.973.331,00	84,16
		I	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		1.381.879.910,00	1.160.398.691,00	83,97
			1	Penyediaan Makanan	588.240.000,00	491.669.672,00	83,58
			2	Penyediaan Sandang	250.000.000,00	202.960.170,00	81,18
			3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	241.253.910,00	191.139.598,00	79,23
			4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	150.000.000,00	127.939.051,00	85,29
			5	Pelayanan Dukungan Psikososial	152.386.000,00	146.690.200,00	96,26
		II	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		494.364.425,00	418.574.640,00	84,67
			1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	356.572.000,00	296.104.635,00	83,04
			2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	137.792.425,00	122.470.005,00	88,88
	F	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			619.756.910,00	588.636.686,00	94,98
		I	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		619.756.910,00	588.636.686,00	94,98
			1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	244.406.910,00	236.703.836,00	96,85
			2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	375.350.000,00	351.932.850,00	93,76
			3	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	0	0	0

Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2025.

G. Urusan Tenaga Kerja

Tabel 1.11
Realisasi Belanja Daerah Urusan Tenaga Kerja

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2			3	4	5
URUSAN TENAGA KERJA				18.113.302.758,00	16.127.595.079,00	89,04
I	DINAS TENAGA KERJA			18.113.302.758,00	16.127.595.079,00	89,04
	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		15.534.119.758,00	13.877.748.171,00	89,34
		I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.349.200,00	9.683.873,00	85,33
			1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	0
			2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.349.200,00	9.683.873,00	85,33
		II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.918.353.000,00	10.647.094.965,00	89,33
			1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.913.353.000,00	10.642.247.317,00	89,33
			2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.000.000,00	4.847.648,00	96,95
		III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	101.300.000,00	77.069.550,00	76,08
			1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	50.300.000,00	47.069.550,00	93,58
			2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	51.000.000,00	30.000.000,00	58,82
			3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0
		IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	597.330.000,00	554.994.564,00	92,91
			1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	9.960.695,00	99,61
			2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	390.300.000,00	375.916.316,00	96,31
			3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.000.000,00	36.548.222,00	73,1
			4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000,00	2.550.000,00	17
			5 Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000,00	19.410.000,00	97,05
			6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.030.000,00	11.427.501,00	94,99
			7 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100.000.000,00	99.181.830,00	99,18
		V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	436.699.000,00	428.220.854,00	98,06
			1 Pengadaan Mebel	131.524.000,00	126.055.000,00	95,84
			2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	305.175.000,00	302.165.854,00	99,01
			3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.757.508.558,00	1.603.269.416,00	91,22
			4 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	11.444.000,00	76,29

NO					PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1					2	3	4	5
			5	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	400.000.000,00	260.294.327,00	65,07	
			6	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.342.508.558,00	1.331.531.089,00	99,18	
		VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		711.580.000,00	557.414.949,00	78,33	
			1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	350.000.000,00	246.955.119,00	70,56	
			2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.000.000,00	13.352.620,00	53,41	
			3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	136.580.000,00	97.393.210,00	71,31	
			4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000,00	199.714.000,00	99,86	
	B	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			1.260.750.000,00	1.247.970.582,00	98,99	
		I	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		1.170.250.000,00	1.158.360.000,00	98,98	
			1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.170.250.000,00	1.158.360.000,00	98,98	
			2	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	0	0	0	
			3	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	0	0	0	
			4	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	0	0	0	
			5	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	0	0	0	
		II	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		90.500.000,00	89.610.582,00	99,02	
			1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	90.500.000,00	89.610.582,00	99,02	
	C	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			257.726.000,00	245.169.230,00	95,13	
		I	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		80.630.900,00	79.598.230,00	98,72	
			1	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	80.630.900,00	79.598.230,00	98,72	
			2	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	150.000.000,00	144.559.000,00	96,37	
			3	Job Fair/Bursa Kerja	150.000.000,00	144.559.000,00	96,37	
			4	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	27.095.100,00	21.012.000,00	77,55	
			5	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	27.095.100,00	21.012.000,00	77,55	
	D	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			1.060.707.000,00	756.707.096,00	71,34	

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2		3	4	5
	I	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	1.060.707.000,00	756.707.096,00	71,34
		1 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	334.757.000,00	269.276.000,00	80,44
		2 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
		3 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	137.950.000,00	95.453.496,00	69,19
		4 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	588.000.000,00	391.977.600,00	66,66

Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2025.

H. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Tabel 1.12
Realisasi Belanja Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2		3	4	5
	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		18.137.590.747,00	16.100.989.200,00	88,77
	I	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	18.137.590.747,00	16.100.989.200,00	88,77
	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.048.727.168,00	7.839.465.239,00	86,64
		I Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54.000.000,00	36.831.575,00	68,21
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000,00	33.070.000,00	66,14
		2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.000.000,00	3.761.575,00	94,04
		II Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.944.866.000,00	6.110.913.798,00	87,99
		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.942.866.000,00	6.109.048.798,00	87,99

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2				3	4	5
			2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000,00	1.865.000,00	93,25
		IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		53.850.000,00	45.500.000,00	84,49
			1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	53.850.000,00	45.500.000,00	84,49
		V	Administrasi Umum Perangkat Daerah		712.275.870,00	597.618.040,00	83,9
			1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	100
			2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	253.000.600,00	202.140.635,00	79,9
			3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	125.000.000,00	119.470.894,00	95,58
			4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000,00	19.992.000,00	99,96
			5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000,00	14.405.000,00	96,03
			6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	145.275.270,00	106.447.936,00	73,27
			7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	54.000.000,00	53.835.000,00	99,69
			8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	75.000.000,00	56.326.575,00	75,1
		VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		83.612.000,00	79.763.114,00	95,4
			1	Pengadaan Mebel	50.412.000,00	49.709.864,00	98,61
			2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.200.000,00	30.053.250,00	90,52
		VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		661.123.298,00	583.848.395,00	88,31
			1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.000.000,00	13.071.810,00	32,68
			2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	621.123.298,00	570.776.585,00	91,89
		VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		539.000.000,00	384.990.317,00	71,43
			1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	300.000.000,00	238.750.463,00	79,58
			2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	204.000.000,00	114.814.854,00	56,28
			3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000,00	31.425.000,00	89,79
	B	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			4.868.229.501,00	4.428.465.883,00	90,97
		I	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan		220.750.000,00	192.610.250,00	87,25

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2			3	4	5
			Kabupaten/Kota			
		1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	220.750.000,00	192.610.250,00	87,25
		2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	281.590.000,00	278.448.348,00	98,88
		3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	281.590.000,00	278.448.348,00	98,88
		4	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4.365.889.501,00	3.957.407.285,00	90,64
		5	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.758.183.000,00	2.576.184.788,00	93,4
		6	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.488.351.501,00	1.271.397.747,00	85,42
		7	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	119.355.000,00	109.824.750,00	92,02
	C	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		1.116.676.564,00	970.790.519,00	86,94
		I	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000,00	54.039.000,00	72,05
		1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	75.000.000,00	54.039.000,00	72,05
		2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	482.285.164,00	447.004.734,00	92,68
		3	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	482.285.164,00	447.004.734,00	92,68
		4	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	559.391.400,00	469.746.785,00	83,97
		5	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	559.391.400,00	469.746.785,00	83,97

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2		3	4	5
	D	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1.451.848.000,00	1.319.746.380,00	90,9
		I Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1.022.608.000,00	903.399.480,00	88,34
		1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1.022.608.000,00	903.399.480,00	88,34
		2 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	429.240.000,00	416.346.900,00	97
		3 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	275.600.000,00	265.472.300,00	96,33
		4 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	153.640.000,00	150.874.600,00	98,2
	E	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1.652.109.514,00	1.542.521.179,00	93,37
		I Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	184.908.000,00	145.028.600,00	78,43
		1 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	184.908.000,00	145.028.600,00	78,43
		II Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	992.101.514,00	924.022.579,00	93,14
		1 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	992.101.514,00	924.022.579,00	93,14
		III Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	475.100.000,00	473.470.000,00	99,66
		1 Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	475.100.000,00	473.470.000,00	99,66

Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2025.

I. Urusan Ketahanan Pangan

Tabel 1.13
Realisasi Belanja Daerah Urusan Ketahanan Pangan

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2		3	4	5
URUSAN KETAHANAN PANGAN			24.674.150.310,00	20.866.647.450,00	84,57
I	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		24.674.150.310,00	20.866.647.450,00	84,57
	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.426.486.310,00	14.477.448.074,00	88,13
		I Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.390.000,00	21.939.000,00	97,99
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.920.000,00	15.685.000,00	98,52
		2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.470.000,00	6.254.000,00	96,66
		II Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.600.530.000,00	11.163.709.097,00	88,6
		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.595.530.000,00	11.158.770.597,00	88,59
		2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000,00	4.938.500,00	98,77
		III Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	195.900.000,00	78.811.886,00	40,23
		1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	80.000.000,00	7.690.886,00	9,61
		2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	115.900.000,00	71.121.000,00	61,36
		IV Administrasi Umum Perangkat Daerah	558.303.750,00	497.155.564,00	89,05
		1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	65.000.000,00	60.523.999,00	93,11
		2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	343.532.750,00	324.736.840,00	94,53
		3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.530.000,00	21.423.000,00	99,5
		4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000,00	13.800.000,00	92
		5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	77.441.000,00	41.803.000,00	53,98
		6 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	35.800.000,00	34.868.725,00	97,4
		V Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	77.241.000,00	69.040.000,00	89,38
		1 Pengadaan Mebel	57.000.000,00	53.500.000,00	93,86
		2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.241.000,00	15.540.000,00	76,77
		VI Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.794.806.060,00	1.597.591.648,00	89,01

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2			3	4	5
			1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200.000.000,00	102.005.237,00	51
			2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.594.806.060,00	1.495.586.411,00	93,78
		VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.177.315.500,00	1.049.200.879,00	89,12
			1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	230.000.000,00	215.970.538,00	93,9
			2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	328.915.500,00	224.387.277,00	68,22
			3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.000.000,00	53.708.500,00	95,91
			4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	562.400.000,00	555.134.564,00	98,71
	B	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		278.845.000,00	232.164.100,00	83,26
		I	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	100.000.000,00	100.000.000,00	100
			1 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	100.000.000,00	100.000.000,00	100
			2 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	178.845.000,00	132.164.100,00	73,9
			3 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	178.845.000,00	132.164.100,00	73,9
	C	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		2.427.380.000,00	2.189.909.380,00	90,22
		I	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	21.400.000,00	20.442.000,00	95,52
			1 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	21.400.000,00	20.442.000,00	95,52
			2 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.405.980.000,00	2.169.467.380,00	90,17
			3 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.405.980.000,00	2.169.467.380,00	90,17
	D	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		328.800.000,00	305.744.856,00	92,99
		I	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	328.800.000,00	305.744.856,00	92,99

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2			3	4	5
		1	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	328.800.000,00	305.744.856,00	92,99
	E	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		732.222.100,00	551.303.970,00	75,29
		I	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	272.129.000,00	168.951.100,00	62,08
		1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	272.129.000,00	168.951.100,00	62,08
		2	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	460.093.100,00	382.352.870,00	83,1
		3	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	460.093.100,00	382.352.870,00	83,1
	F	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		393.707.500,00	383.366.700,00	97,37
		I	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	43.820.000,00	40.841.700,00	93,2
		1	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	43.820.000,00	40.841.700,00	93,2
		2	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	349.887.500,00	342.525.000,00	97,9
		3	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	349.887.500,00	342.525.000,00	97,9
	G	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		3.201.884.400,00	1.926.798.990,00	60,18
		I	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.442.700.400,00	288.993.554,00	20,03
		1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	305.777.400,00	288.993.554,00	94,51
		2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.136.923.000,00	0	0
		II	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	955.184.000,00	884.194.550,00	92,57
		1	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	955.184.000,00	884.194.550,00	92,57
		III	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	94.000.000,00	92.051.016,00	97,93
		1	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	94.000.000,00	92.051.016,00	97,93
		III	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	85.000.000,00	67.756.420,00	79,71
		I	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan	85.000.000,00	67.756.420,00	79,71

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2			3	4	5
			Keamanan Peredaran Obat Hewan			
		IV	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	625.000.000,00	593.803.450,00	95,01
		1	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	625.000.000,00	593.803.450,00	95,01
	H	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		862.025.000,00	777.871.380,00	90,24
		I	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	327.140.000,00	309.716.935,00	94,67
		1	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	327.140.000,00	309.716.935,00	94,67
		2	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	397.035.000,00	339.639.165,00	85,54
		3	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	168.920.000,00	132.882.669,00	78,67
		4	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	228.115.000,00	206.756.496,00	90,64
		5	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	137.850.000,00	128.515.280,00	93,23
		6	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	137.850.000,00	128.515.280,00	93,23
	I	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		22.800.000,00	22.040.000,00	96,67
		I	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	22.800.000,00	22.040.000,00	96,67
		1	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	22.800.000,00	22.040.000,00	96,67

Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2025.

J. Urusan Pertanahan

Tabel 1.14
Realisasi Belanja Daerah Urusan Pertanahan

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)
1	2		3	4	5
URUSAN PERUMAHAN RAKYAT					
I	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		265.788.079.886,00	137.505.898.231,00	51,74
	A	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	265.788.079.886,00	137.505.898.231,00	51,74

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)
1	2				3	4	5
		I	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		265.788.079.886,00	137.505.898.231,00	51,74
			1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	265.788.079.886,00	137.505.898.231,00	51,74

Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2025.

K. Urusan Lingkungan Hidup

Tabel 1.15
Realisasi Belanja Daerah Urusan Lingkungan Hidup

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2				3	4	5
	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP				540.264.823.959,00	433.394.250.798,00	80,22
	I DINAS LIINGKUNGAN HIDUP				540.264.823.959,00	433.394.250.798,00	80,22
	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			88.385.077.824,00	80.031.990.871,00	90,55
		I	Perencanaan, Penga nggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		60.559.900,00	30.329.600,00	50,1
			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.059.900,00	3.879.600,00	11,39
			2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26.500.000,00	26.450.000,00	99,81
		II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		70.348.546.000,00	66.322.711.840,00	94,3
			1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	70.326.046.000,00	66.305.380.840,00	94,28
			2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	22.500.000,00	17.331.000,00	77,03
		III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		689.930.000,00	609.673.977,00	88,4
			1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	68.130.000,00	58.499.997,00	85,87
			2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	420.000.000,00	385.134.480,00	91,7
			3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	51.800.000,00	30.507.750,00	58,9
			4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150.000.000,00	135.531.750,00	90,35
		IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah		650.258.600,00	630.143.299,00	96,9

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2				3	4	5
			1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	9.449.944,00	94,5
			2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	510.099.800,00	494.382.005,00	96,92
			3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.158.800,00	38.900.179,00	96,87
			4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000,00	25.000.000,00	100
			5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000,00	14.634.000,00	97,56
			6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000,00	47.777.171,00	95,55
		V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		258.174.000,00	233.056.004,00	90,3
			1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58.174.000,00	55.712.003,00	95,77
			2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000,00	177.344.001,00	88,67
		VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		7.159.727.430,00	3.882.308.132,00	54,2
			1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.383.336.800,00	2.176.457.422,00	40,43
			2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.776.390.630,00	1.705.850.710,00	96,03
		VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		9.217.881.894,00	8.323.768.019,00	90,3
			1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	135.000.000,00	101.571.335,00	75,24
			2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	250.000.000,00	169.760.791,00	67,9
			3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000,00	93.825.000,00	93,83
			4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.732.881.894,00	7.958.610.893,00	91,13
	B	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			11.993.230.442,00	10.439.933.416,00	87,05
		I	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		2.019.971.324,00	1.942.930.420,00	96,2
			1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	407.755.000,00	401.218.965,00	98,4
			2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	209.580.000,00	156.870.000,00	74,85

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2			3	4	5
		3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	1.402.636.324,00	1.384.841.455,00	98,73
		II	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.998.211.000,00	2.687.232.063,00	89,6
		1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	2.998.211.000,00	2.687.232.063,00	89,63
		III	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	6.975.048.118,00	5.809.770.933,00	83,3
		1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	6.975.048.118,00	5.809.770.933,00	83,29
	C	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		326.030.000,00	253.190.046,00	77,66
		I	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	326.030.000,00	253.190.046,00	77,7
		1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	326.030.000,00	253.190.046,00	77,66
	D	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		254.175.000,00	246.077.500,00	96,81
		I	Penyimpanan sementara Limbah B3	22.255.000,00	21.750.000,00	97,7
		1	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	22.255.000,00	21.750.000,00	97,73
		II	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	231.920.000,00	224.327.500,00	96,7
		1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	231.920.000,00	224.327.500,00	96,73
	E	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		13.020.430.000,00	9.352.929.769,00	71,83
		I	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	13.020.430.000,00	9.352.929.769,00	71,8
		1	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	13.020.430.000,00	9.352.929.769,00	71,83

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2		3	4	5
	F	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	415.375.000,00	374.832.000,00	90,24
	I	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	415.375.000,00	374.832.000,00	90,2
		1 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	15.375.000,00	10.692.000,00	69,54
		2 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	250.000.000,00	232.495.000,00	93
		3 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	150.000.000,00	131.645.000,00	87,76
	G	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	255.198.000,00	251.320.000,00	98,48
	I	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	255.198.000,00	251.320.000,00	98,5
		1 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	255.198.000,00	251.320.000,00	98,48
	H	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	77.990.000,00	41.710.500,00	53,48
	I	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	77.990.000,00	41.710.500,00	53,5
		1 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	77.990.000,00	41.710.500,00	53,48
	I	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	425.537.317.693,00	332.402.266.696,00	78,11
	I	Pengelolaan Sampah	425.537.317.693,00	332.402.266.696,00	78,1
		1 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	190.650.437.200,00	161.341.457.955,00	84,63
		2 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	91.580.447.058,00	48.348.783.471,00	52,79
		3 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	2.675.150.000,00	407.853.960,00	15,25

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2				3	4	5
			3	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	134.324.214.799,00	119.080.605.255,00	88,65
			4	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	6.307.068.636,00	3.223.566.055,00	51,11

Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2025.

L. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 1.16
Realisasi Belanja Daerah Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	
1	2				3	4	5	
URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					36.767.586.434,00	32.470.354.721,00	88,31	
I	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				36.767.586.434,00	32.470.354.721,00	88,31	
	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			28.604.861.250,00	25.327.944.453,00	88,54	
		I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			54.592.000,00	52.081.800,00	95,4
			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4.592.000,00	2.432.000,00	52,96
			2	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD		25.000.000,00	24.899.900,00	99,6
			3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		25.000.000,00	24.749.900,00	99
		II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			19.689.509.000,00	17.640.727.028,00	89,59
			1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		19.664.509.000,00	17.615.727.128,00	89,58
			2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		25.000.000,00	24.999.900,00	100
		III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			726.333.000,00	589.931.552,00	81,22
			1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		510.000.000,00	474.021.552,00	92,95
			2	Pendidikan dan Pelatihan		159.375.000,00	70.000.000,00	43,92

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2				3	4	5
				Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
			3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	56.958.000,00	45.910.000,00	80,6
		IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.238.537.950,00	934.902.542,00	75,48
			1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00	13.866.120,00	92,44
			2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	676.478.000,00	473.668.977,00	70,02
			3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	70.000.000,00	69.699.800,00	99,57
			4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000,00	23.783.000,00	95,13
			5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000,00	24.708.000,00	82,36
			6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190.809.950,00	190.002.645,00	99,58
			7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	231.250.000,00	139.174.000,00	60,18
		V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.439.268.000,00	1.041.461.746,00	72,36
			1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	768.000.000,00	566.100.000,00	73,71
			2	Pengadaan Mebel	448.000.000,00	280.100.186,00	62,52
			3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	223.268.000,00	195.261.560,00	87,46
		VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4.521.861.300,00	4.237.475.292,00	93,71
			1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	550.000.000,00	355.111.424,00	64,57
			2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.971.861.300,00	3.882.363.868,00	97,75
		VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		795.890.000,00	761.168.515,00	95,64
			1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	225.430.000,00	210.603.877,00	93,42
			2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	170.460.000,00	154.395.314,00	90,58
			3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	48.644.500,00	97,29
			4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	350.000.000,00	347.524.824,00	99,29
			5	Penataan Organisasi	138.870.000,00	70.195.978,00	50,55
			6	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	68.888.000,00	31.551.220,00	45,8

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2				3	4	5
			7	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	69.982.000,00	38.644.758,00	55,22
	B	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			3.439.625.000,00	3.192.787.745,00	92,82
		I	Pelayanan Pendaftaran Penduduk		213.987.000,00	152.786.578,00	71,4
			1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	104.329.000,00	63.731.327,00	61,09
			2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	109.658.000,00	89.055.251,00	81,21
		II	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		3.225.638.000,00	3.040.001.167,00	94,24
			1	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	3.000.000.000,00	2.852.329.929,00	95,08
			2	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	225.638.000,00	187.671.238,00	83,17
	B	PROGRAM PENCATATAN SIPIL			1.439.943.000,00	1.370.009.399,00	95,14
		I	Pelayanan Pencatatan Sipil		1.140.330.000,00	1.085.652.599,00	95,21
			1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	148.750.000,00	147.144.800,00	98,92
			2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	991.580.000,00	938.507.799,00	94,65
			3	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	248.223.000,00	235.328.800,00	94,81
			4	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	200.000.000,00	189.502.000,00	94,75
			5	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil	48.223.000,00	45.826.800,00	95,03
		II	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		51.390.000,00	49.028.000,00	95,4
			1	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	51.390.000,00	49.028.000,00	95,4
	C	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			3.173.717.184,00	2.485.939.847,00	78,33
		I	Pengumpulan Data dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		131.530.000,00	115.819.804,00	88,06
			1	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	131.530.000,00	115.819.804,00	88,06
		II	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		2.819.520.184,00	2.192.248.543,00	77,75
			1	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.563.360.184,00	2.031.980.523,00	79,27
			2	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	156.160.000,00	79.589.784,00	50,97
			3	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat	100.000.000,00	80.678.236,00	80,68

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2				3	4	5
				Dipertanggungjawabkan			
		III	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		222.667.000,00	177.871.500,00	79,88
			1	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	222.667.000,00	177.871.500,00	79,88
	D	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			109.440.000,00	93.673.277,00	85,59
		I	Penyusunan Profil Kependudukan		109.440.000,00	93.673.277,00	85,59
			1	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	109.440.000,00	93.673.277,00	85,59

Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2025.

M. Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Tabel 1.17
Realisasi Belanja Daerah Urusan Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2				3	4	5
	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				31.443.574.005,00	27.078.849.414,00	86,12
	I	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			31.443.574.005,00	27.078.849.414,00	86,12
	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			13.980.790.037,00	11.546.653.598,00	82,59
		I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5.000.000,00	4.871.235,00	97,42
			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	0
			2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000,00	4.871.235,00	97,42
		II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		11.795.343.000,00	9.680.233.143,00	82,07
			1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.790.343.000,00	9.675.324.612,00	82,06
			2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000,00	4.908.531,00	98,17
		III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		59.500.000,00	59.500.000,00	100
			1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas	59.500.000,00	59.500.000,00	100

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2				3	4	5
				dan Fungsi			
			2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0
		IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah		560.594.875,00	475.320.878,00	84,79
			1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	400.000.000,00	386.338.135,00	96,58
			2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.592.875,00	20.156.353,00	97,88
			3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	60.000.000,00	13.800.000,00	23
			4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43.820.000,00	19.896.000,00	45,4
			5	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	36.182.000,00	35.130.390,00	97,09
		V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		45.932.500,00	42.602.910,00	92,75
			1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.932.500,00	42.602.910,00	92,75
		VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		761.949.662,00	691.278.352,00	90,72
			1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.000.000,00	50.783.454,00	92,33
			2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	706.949.662,00	640.494.898,00	90,6
		VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		752.470.000,00	592.847.080,00	78,79
			1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	392.730.000,00	282.463.855,00	71,92
			2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	222.000.000,00	178.371.206,00	80,35
			3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.740.000,00	43.527.000,00	93,13
			4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	91.000.000,00	88.485.019,00	97,24
	B	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			464.310.000,00	198.664.693,00	42,79
		I	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		97.000.000,00	0	0
			1	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	97.000.000,00	0	0
		II	Pemetaan Perkiraan		367.310.000,00	198.664.693,00	54,09

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2		3	4	5
		Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
	1	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	191.750.000,00	124.854.320,00	65,11
	2	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	0	0	0
	3	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	175.560.000,00	73.810.373,00	42,04
	C	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	4.934.628.968,00	4.106.416.622,00	83,22
	I	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.291.948.968,00	1.197.936.858,00	92,72
	1	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	387.845.000,00	382.708.500,00	98,68
	2	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	240.000.000,00	235.320.000,00	98,05
	3	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	184.024.968,00	180.015.510,00	97,82
	4	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	480.079.000,00	399.892.848,00	83,3
	II	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	251.770.000,00	217.048.616,00	86,21
	1	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	251.770.000,00	217.048.616,00	86,21
	2	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	0	0	0
	III	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.789.660.000,00	2.124.361.984,00	76,15
	1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	123.750.000,00	48.708.000,00	39,36
	2	Peningkatan Kesertaan	2.200.710.000,00	1.694.163.984,00	76,98

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2				3	4	5
				Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			
			3	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	245.000.000,00	243.700.000,00	99,47
			4	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	145.200.000,00	94.800.000,00	65,29
			5	Peningkatan Kesertaan KB Pria	0	0	0
			6	Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	0	0	0
			7	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	75.000.000,00	42.990.000,00	57,32
		IV	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		601.250.000,00	567.069.164,00	94,32
			1	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	265.250.000,00	234.004.164,00	88,22
			2	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	336.000.000,00	333.065.000,00	99,13
	D	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			12.063.845.000,00	11.227.114.501,00	93,06
		I	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		12.063.845.000,00	11.227.114.501,00	93,06
			1	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	417.192.000,00	352.782.291,00	84,56
			2	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	782.730.000,00	513.100.440,00	65,55
			3	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan	10.863.923.000,00	10.361.231.770,00	95,37

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2				3	4	5
				Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK- R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)			

Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2025.

N. Urusan Perhubungan

Tabel 1.18
Realisasi Belanja Daerah Urusan Perhubungan

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2			3	4	5
URUSAN PERHUBUNGAN				189.449.069.816,00	164.101.634.812,00	86,62
I	DINAS PERHUBUNGAN			189.449.069.816,00	164.101.634.812,00	86,62
	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		88.821.285.486,00	85.223.896.622,00	95,95
		I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	73.000.000,00	57.058.000,00	78,16
			1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	70.000.000,00	54.438.000,00	77,77
			2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000,00	2.620.000,00	87,33
		II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	54.443.724.000,00	52.306.910.814,00	96,08
			1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	54.440.724.000,00	52.304.270.814,00	96,08
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000,00	2.640.000,00	88
		III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	964.007.466,00	956.200.325,00	99,19
			1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	610.301.966,00	607.400.325,00	99,52
			2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	53.705.500,00	49.250.000,00	91,7
			3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	300.000.000,00	299.550.000,00	99,85
		IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.585.408.802,00	1.530.777.055,00	96,55
			1 Penyediaan Komponen	20.000.000,00	19.790.000,00	98,95

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2				3	4	5
				Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
			2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0
			3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	253.589.000,00	248.532.500,00	98,01
			4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	923.227.500,00	890.904.975,00	96,5
			5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	111.732.000,00	108.419.700,00	97,04
			6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000,00	49.500.000,00	99
			7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	154.645.302,00	151.964.000,00	98,27
			8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67.333.000,00	57.265.880,00	85,05
			9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.882.000,00	4.400.000,00	90,13
		V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2.386.945.034,00	2.355.982.380,00	98,7
			1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	700.000.000,00	675.600.000,00	96,51
			2	Pengadaan Mebel	702.008.034,00	700.674.180,00	99,81
			3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	984.937.000,00	979.708.200,00	99,47
		VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		27.359.431.034,00	26.359.287.450,00	96,34
			1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.256.600.000,00	1.102.342.018,00	87,72
			2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	26.102.831.034,00	25.256.945.432,00	96,76
		VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.008.769.150,00	1.657.680.598,00	82,52
			1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	180.000.000,00	103.354.700,00	57,42
			2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.104.459.150,00	868.660.028,00	78,65
			3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	87.864.000,00	86.770.000,00	98,75
			4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	636.446.000,00	598.895.870,00	94,1

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2		3	4	5
	B	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	100.627.784.330,00	78.877.738.190,00	78,39
		I Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	92.262.070.690,00	73.193.794.866,00	79,33
		1 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	200.000.000,00	198.935.600,00	99,47
		2 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	15.390.805.900,00	14.400.530.568,00	93,57
		3 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	0	0	0
		4 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	76.671.264.790,00	58.594.328.698,00	76,42
		II Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	550.000.000,00	547.060.479,00	99,47
		1 Penyediaan sistem informasi manajemen terminal Penumpang Tipe C	0	0	0
		2 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	550.000.000,00	547.060.479,00	99,47
		III Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	793.143.200,00	782.582.850,00	98,67
		1 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0	0	0
		2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	793.143.200,00	782.582.850,00	98,67
		IV Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.436.223.953,00	1.347.865.609,00	93,85
		1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	156.601.953,00	135.138.000,00	86,29
		2 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	714.572.000,00	653.070.609,00	91,39
		3 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala	100.000.000,00	100.000.000,00	100

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2				3	4	5
				Kendaraan Bermotor			
			4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	465.050.000,00	459.657.000,00	98,84
		V	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		2.734.146.487,00	2.518.997.324,00	92,13
			1	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	599.104.000,00	569.758.554,00	95,1
			2	Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	160.716.800,00	131.994.400,00	82,13
			3	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	177.787.440,00	143.245.360,00	80,57
			4	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	746.538.247,00	650.684.410,00	87,16
			5	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1.050.000.000,00	1.023.314.600,00	97,46
			6	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	0	0	0
			7	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	0	0	0
		VI	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		2.752.200.000,00	389.437.062,00	14,15
			1	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	50.700.000,00	0	0
			2	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.701.500.000,00	389.437.062,00	14,42
		VII	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		100.000.000,00	98.000.000,00	98

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2				3	4	5
			1	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	98.000.000,00	98
			2	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
			3	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0

Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2025.

O. Urusan Komunikasi

Tabel 1.19
Realisasi Belanja Daerah Urusan Komunikasi

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2			3	4	5
URUSAN KOMUNIKASI				40.622.250.570,00	38.117.164.483,00	93,83
I	DINAS KOMUNIKASI INFORMASI STATISTIK DAN PERSANDIAN			40.622.250.570,00	38.117.164.483,00	93,83
	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		18.178.622.020,00	16.810.950.244,00	92,48
		I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	100
			1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	100
			2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000,00	15.000.000,00	100
		II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.678.813.000,00	12.858.021.760,00	94
			1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.668.813.000,00	12.848.021.760,00	94
			2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	100
		IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	105.000.000,00	91.764.000,00	87,39
			1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	105.000.000,00	91.764.000,00	87,39
		V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	768.938.730,00	691.223.270,00	89,89

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2				3	4	5
			1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	96.002.000,00	85.238.010,00	88,79
			2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	391.470.000,00	373.248.388,00	95,35
			3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	89.760.000,00	78.092.200,00	87
			4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000,00	39.652.000,00	79,3
			5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000,00	12.415.000,00	62,08
			6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	111.706.730,00	92.636.234,00	82,93
			7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.000.000,00	9.941.438,00	99,41
		VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		611.827.000,00	588.263.251,00	96,15
			1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	350.000.000,00	345.498.600,00	98,71
			2	Pengadaan Mebel	100.055.000,00	83.294.654,00	83,25
			3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	161.772.000,00	159.469.997,00	98,58
		VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.889.043.290,00	1.650.037.023,00	87,35
			1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	450.000.000,00	249.026.957,00	55,34
			2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.439.043.290,00	1.401.010.066,00	97,36
		IX	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.100.000.000,00	906.640.940,00	82,42
			1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	500.000.000,00	442.108.282,00	88,42
			2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.000.000,00	67.170.360,00	33,59
			3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	400.000.000,00	397.362.298,00	99,34
	B	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			5.509.268.850,00	5.207.001.746,00	94,51
		IX	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		5.509.268.850,00	5.207.001.746,00	94,51
			1	Relasi Media	3.781.670.850,00	3.726.273.416,00	98,54
			2	Pelayanan Informasi Publik	911.349.000,00	808.480.240,00	88,71
			3	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	200.000.000,00	162.448.500,00	81,22
			4	Diseminasi Informasi	331.585.000,00	303.369.590,00	91,49
			5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	109.664.000,00	81.530.000,00	74,35

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2				3	4	5
			6	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	175.000.000,00	124.900.000,00	71,37
	C	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			16.934.359.700,00	16.099.212.493,00	95,07
		I	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		16.934.359.700,00	16.099.212.493,00	95,07
			1	Koordinasi penyusunan proses bisnis	157.205.000,00	81.219.200,00	51,66
			2	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	205.530.000,00	179.080.000,00	87,13
			3	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	268.480.000,00	250.998.552,00	93,49
			4	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	42.721.000,00	41.725.500,00	97,67
			5	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	15.698.910.000,00	15.171.212.777,00	96,64
			6	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	363.044.000,00	198.113.464,00	54,57
			7	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEDan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	198.469.700,00	176.863.000,00	89,11

Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2025.

P. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Tabel 1.20

Realisasi Belanja Daerah Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2				3	4	5
	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				12.545.556.074,00	10.418.539.476,00	83,05
	I	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			12.545.556.074,00	10.418.539.476,00	83,05
		A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		8.448.363.274,00	6.900.097.751,00	81,67
			I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.998.000,00	7.549.550,00	83,9
			1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.998.000,00	7.549.550,00	83,9

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2		3	4	5
	II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.112.548.000,00	5.713.905.353,00	80,34
		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.106.548.000,00	5.709.510.353,00	80,34
		2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.000.000,00	4.395.000,00	73,25
	IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75.250.000,00	59.046.500,00	78,47
		1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	51.250.000,00	39.046.500,00	76,19
		2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	24.000.000,00	20.000.000,00	83,33
	V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	346.401.000,00	256.124.062,00	73,94
		1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	264.220.000,00	208.794.092,00	79,02
		2 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.381.000,00	9.486.600,00	40,57
		3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.800.000,00	12.792.000,00	92,7
		4 Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000,00	19.856.000,00	99,28
		5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.000.000,00	5.195.370,00	20,78
		6 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	0	0
	VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0
		1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0
	VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	518.166.274,00	514.466.182,00	99,29
		1 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	518.166.274,00	514.466.182,00	99,29
	VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	387.000.000,00	349.006.104,00	90,18
		1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	197.000.000,00	189.758.465,00	96,32
		2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	140.000.000,00	118.006.639,00	84,29
		3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	41.241.000,00	82,48
	B	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	60.121.800,00	41.125.500,00	68,4
	I	Penerbitan Izin Usaha Simpan	60.121.800,00	41.125.500,00	68,4

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2			3	4	5
			<i>Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>			
		1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	60.121.800,00	41.125.500,00	68,4
	C	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		52.900.000,00	46.419.000,00	87,75
		I	<i>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	52.900.000,00	46.419.000,00	87,75
		1	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	52.900.000,00	46.419.000,00	87,75
	D	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		70.262.000,00	63.129.000,00	89,85
		I	<i>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	70.262.000,00	63.129.000,00	89,85
		1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	70.262.000,00	63.129.000,00	89,85
	E	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		371.820.000,00	333.603.030,00	89,72
		I	<i>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	371.820.000,00	333.603.030,00	89,72
		1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	371.820.000,00	333.603.030,00	89,72
	F	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		650.805.000,00	492.880.500,00	75,73
		I	<i>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	650.805.000,00	492.880.500,00	75,73
		1	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	650.805.000,00	492.880.500,00	75,73

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2		3	4	5
	G	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	702.103.900,00	561.491.250,00	79,97
		I Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	702.103.900,00	561.491.250,00	79,97
		1 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	102.533.000,00	88.383.750,00	86,2
		2 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	141.650.900,00	72.111.000,00	50,91
		3 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	0	0	0
		4 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	457.920.000,00	400.996.500,00	87,57
	H	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.189.180.100,00	1.979.793.445,00	90,44
		I Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	2.189.180.100,00	1.979.793.445,00	90,44
		1 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	2.189.180.100,00	1.979.793.445,00	90,44

Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2025.

Q. Urusan Penanaman Modal

Tabel 1.21
Realisasi Belanja Daerah Urusan Penanaman Modal

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	
1	2				3	4	5	
URUSAN PENANAMAN MODAL					32.910.285.846,00	28.631.909.228,00	87	
I	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				32.910.285.846,00	28.631.909.228,00	87	
	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			27.922.544.416,00	24.578.732.800,00	88,02	
		I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			37.172.000,00	27.392.440,00	73,69
			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		28.379.000,00	19.343.200,00	68,16
			2	Koordinasi dan Penyusunan		8.793.000,00	8.049.240,00	91,54

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2				3	4	5
				Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
		II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		20.377.044.000,00	18.199.034.738,00	89,31
			1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.366.944.000,00	18.189.643.150,00	89,31
			2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.100.000,00	9.391.588,00	92,99
		III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		35.500.000,00	25.000.000,00	70,42
			1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	0
			2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35.500.000,00	25.000.000,00	70,42
		IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah		929.863.000,00	705.741.182,00	75,9
			1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	9.853.034,00	98,53
			2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.653.000,00	12.951.000,00	77,77
			3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	480.000.000,00	371.986.725,00	77,5
			4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	155.400.000,00	120.206.754,00	77,35
			5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000,00	28.238.760,00	94,13
			6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000,00	20.334.206,00	40,67
			7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	137.750.000,00	92.793.634,00	67,36
			8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50.060.000,00	49.377.069,00	98,64
		V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		10.706.000,00	9.300.000,00	86,87
			1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.706.000,00	9.300.000,00	86,87
		VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		5.890.599.416,00	5.105.617.825,00	86,67
			1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	686.000.000,00	404.366.912,00	58,95
			2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.204.599.416,00	4.701.250.913,00	90,33
		VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		641.660.000,00	506.646.615,00	78,96
			1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	86.660.000,00	63.499.357,00	73,27
			2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	240.000.000,00	161.507.681,00	67,29
			3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000,00	69.544.961,00	69,54
			4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	215.000.000,00	212.094.616,00	98,65
	B	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM			205.049.000,00	15.939.800,00	7,77

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	
1	2			3	4	5	
		PENANAMAN MODAL					
		I	Penetapan Fasilitas/Insentif Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Dibidang Daerah	14.006.000,00	13.789.800,00	98,46
			1	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	14.006.000,00	13.789.800,00	98,46
			2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	191.043.000,00	2.150.000,00	1,13
			3	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	191.043.000,00	2.150.000,00	1,13
	C	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			631.978.000,00	626.299.800,00	99,1
		I	Penyelenggaraan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Promosi Daerah	631.978.000,00	626.299.800,00	99,1
			1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	631.978.000,00	626.299.800,00	99,1
	D	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			3.667.686.130,00	2.954.193.878,00	80,55
		I	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		3.667.686.130,00	2.954.193.878,00	80,55
			1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	218.892.620,00	191.655.800,00	87,56
			2	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	3.373.109.510,00	2.688.529.828,00	79,7
			3	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	75.684.000,00	74.008.250,00	97,79
	E	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			115.572.000,00	115.071.800,00	99,57
		I	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		115.572.000,00	115.071.800,00	99,57
			1	Pengawasan Penanaman Modal	115.572.000,00	115.071.800,00	99,57
	F	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			367.456.300,00	341.671.150,00	92,98
		I	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		367.456.300,00	341.671.150,00	92,98
			1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	367.456.300,00	341.671.150,00	92,98

Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2025.

R. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Tabel 1.22
Realisasi Belanja Daerah Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2			3	4	5
URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				67.800.587.121,00	60.949.343.600,00	89,9
I	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			67.800.587.121,00	60.949.343.600,00	89,9
	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		16.435.848.486,00	14.146.065.445,00	86,07
		I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	104.156.000,00	30.795.400,00	29,57
			1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	84.156.000,00	13.958.000,00	16,59
			2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000,00	16.837.400,00	84,19
		II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.636.065.000,00	8.453.724.955,00	87,73
			1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.616.065.000,00	8.439.765.055,00	87,77
			2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000,00	2.550.000,00	51
			3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	15.000.000,00	11.409.900,00	76,07
		III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0
			1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0	0
			2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0
		IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	617.262.000,00	554.290.304,00	89,8
			1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000,00	29.217.992,00	97,39
			2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	408.872.000,00	396.202.712,00	96,9
			3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100.000.000,00	87.310.000,00	87,31
			4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	23.600.000,00	21.480.000,00	91,02
			5 Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	6.429.000,00	64,29
			6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.790.000,00	4.300.000,00	12,36
			7 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.000.000,00	9.350.600,00	93,51
		V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	329.186.000,00	320.529.600,00	97,37
			1 Pengadaan Mebel	198.186.000,00	195.543.500,00	98,67
			2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	131.000.000,00	124.986.100,00	95,41
		VI	Penyediaan Jasa Penunjang	5.269.179.486,00	4.368.406.893,00	82,9

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2			3	4	5
			Urusan Pemerintahan Daerah			
		1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.946.000.000,00	1.207.683.404,00	62,06
		2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.323.179.486,00	3.160.723.489,00	95,11
		VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	480.000.000,00	418.318.293,00	87,15
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	230.000.000,00	170.603.393,00	74,18
		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	100
		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000,00	197.714.900,00	98,86
	B	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		1.328.658.000,00	500.000.000,00	37,63
		I	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	828.658.000,00	0	0
		1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	691.058.000,00	0	0
		2	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	137.600.000,00	0	0
		3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	0	0	0
		II	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000,00	500.000.000,00	100
		1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	500.000.000,00	500.000.000,00	100
	C	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		49.184.080.635,00	45.903.278.155,00	93,33
		I	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	7.415.956.490,00	5.845.960.037,00	78,83
		1	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan,	7.415.956.490,00	5.845.960.037,00	78,83

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2				3	4	5
				pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota			
		II	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		5.246.411.500,00	3.722.497.473,00	70,95
			1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2.193.964.500,00	1.827.322.173,00	83,29
			2	Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota	904.185.000,00	770.544.300,00	85,22
			3	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	2.148.262.000,00	1.124.631.000,00	52,35
		III	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		1.397.714.000,00	1.210.822.000,00	86,63
			1	Seleksi Atlet Daerah	500.000.000,00	475.000.000,00	95
			2	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	897.714.000,00	735.822.000,00	81,97
			3	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	0	0	0
		IV	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		35.123.998.645,00	35.123.998.645,00	100
			1	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	35.123.998.645,00	35.123.998.645,00	100
	D	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			852.000.000,00	400.000.000,00	46,95
		I	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		852.000.000,00	400.000.000,00	46,95
			1	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	626.000.000,00	400.000.000,00	63,9
			2	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	226.000.000,00	0	0

Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2025.

S. Urusan Statistik

Tabel 1.23
Realisasi Belanja Daerah Urusan Statistik

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2			3	4	5
URUSAN KOMUNIKASI				1.070.188.000,00	1.043.100.892,00	97,47
I	DINAS KOMUNIKASI INFORMASI STATISTIK DAN PERSANDIAN			1.070.188.000,00	1.043.100.892,00	97,47
	A	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		1.070.188.000,00	1.043.100.892,00	97,47
		I	<i>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	1.007.098.000,00	981.338.610,00	97,44
			1 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	59.152.000,00	58.961.295,00	99,68
			2 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	947.946.000,00	922.377.315,00	97,3
			3 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	63.090.000,00	61.762.282,00	97,9
			4 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	63.090.000,00	61.762.282,00	97,9

Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2025.

T. Urusan Persandian

Tabel 1.24
Realisasi Belanja Daerah Urusan Persandian

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2			3	4	5
URUSAN KOMUNIKASI				238.926.000,00	219.596.630,00	91,91
I	DINAS KOMUNIKASI INFORMASI STATISTIK DAN PERSANDIAN			238.926.000,00	219.596.630,00	91,91
	A	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		238.926.000,00	219.596.630,00	91,91
		I	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	238.926.000,00	219.596.630,00	91,91
		1	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	148.710.000,00	142.227.880,00	95,64
		2	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	90.216.000,00	77.368.750,00	85,76

Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2025.

U. Urusan Kebudayaan

Tabel 1.25
Realisasi Belanja Daerah Urusan Kebudayaan

N	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2			3	4	5
URUSAN KEBUDAYAAN				11.519.554.620,00	9.986.074.447,00	86,68
I	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			11.519.554.620,00	9.986.074.447,00	86,68
	A	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		625.310.000,00	621.210.081,00	99,34
		I	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	625.310.000,00	621.210.081,00	99,34
			1 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	109.650.000,00	107.730.045,00	98,25
			2 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	90.860.000,00	88.860.036,00	97,8
			3 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	424.800.000,00	424.620.000,00	99,96
	B	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		481.030.500,00	460.401.787,00	95,71
		I	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	89.093.000,00	74.492.750,00	83,61
			1 Penetapan Cagar Budaya	89.093.000,00	74.492.750,00	83,61
			2 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	391.937.500,00	385.909.037,00	98,46
			3 Pelindungan Cagar Budaya	254.800.000,00	250.301.913,00	98,23
			4 Pengembangan Cagar Budaya	137.137.500,00	135.607.124,00	98,88
	C	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		10.413.214.120,00	8.904.462.579,00	85,51
		I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.000.000,00	32.453.800,00	81,13
			1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000,00	25.478.000,00	84,93
			2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000,00	6.975.800,00	69,76
		II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.211.938.000,00	6.839.185.804,00	83,28
			1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.197.338.000,00	6.824.586.004,00	83,25
			2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.600.000,00	14.599.800,00	100
		III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	195.561.900,00	189.363.800,00	96,83
			1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	68.750.000,00	64.479.900,00	93,79
			2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas	46.000.000,00	46.000.000,00	100

N	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2				3	4	5
				dan Fungsi			
			3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80.811.900,00	78.883.900,00	97,61
		IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah		193.536.500,00	177.579.065,00	91,75
			1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000,00	43.705.264,00	87,41
			2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0
			3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	48.649.000,00	45.079.001,00	92,66
			4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000,00	24.984.000,00	99,94
			5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	23.750.000,00	21.136.000,00	88,99
			6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46.137.500,00	42.674.800,00	92,49
		V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		103.190.000,00	79.885.002,00	77,42
			1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	103.190.000,00	79.885.002,00	77,42
		VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.668.987.720,00	1.585.995.108,00	95,03
			1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.000.000,00	76.401.126,00	63,67
			2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.548.987.720,00	1.509.593.982,00	97,46

Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2025.

V. Urusan Perpustakaan

Tabel 1.26
Realisasi Belanja Daerah Urusan Perpustakaan

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI(Rp)	%
1	2				3	4	5
URUSAN PERPUSTAKAAN					14.864.697.070,00	13.060.890.289,00	87,86
I	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DERAH				14.864.697.070,00	13.060.890.289,00	87,86
	A	PROGRAM PERPUSTAKAAN			1.052.116.160,00	974.805.702,00	92,65
		I	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		480.758.000,00	416.688.272,00	86,7
			1	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai	39.512.000,00	32.608.200,00	82,53

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI(Rp)	%
1	2			3	4	5
			dengan Standar Nasional Perpustakaan			
		2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	96.496.000,00	93.337.022,00	96,73
		3	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
		4	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	250.000.000,00	234.231.450,00	93,69
		5	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	35.250.000,00	33.423.600,00	94,82
		6	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	59.500.000,00	23.088.000,00	38,8
		II	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	571.358.160,00	558.117.430,00	97,7
		1	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	106.724.000,00	105.697.792,00	99,04
		2	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	188.026.160,00	182.652.500,00	97,14
		3	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	276.608.000,00	269.767.138,00	97,53
	B	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		13.812.580.910,00	12.086.084.587,00	87,5
		I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.745.000,00	69.058.420,00	99
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	69.745.000,00	69.058.420,00	99,02
		2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	0	0
		II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.210.930.000,00	9.758.604.883,00	87,1
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.195.930.000,00	9.744.134.783,00	87,03
		2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000,00	4.855.000,00	97,1
		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	10.000.000,00	9.615.100,00	96,15

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI(Rp)	%
1	2			3	4	5
			Triwulanan/ Semesteran SKPD			
		III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	62.500.000,00	52.000.000,00	83,2
			1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	62.500.000,00	52.000.000,00	83,2
		IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	521.377.000,00	503.013.756,00	96,5
			1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.000.000,00	39.618.296,00	99,05
			2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.000.000,00	28.559.500,00	95,2
			3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	247.837.000,00	234.969.540,00	94,81
			4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	42.560.000,00	41.073.500,00	96,51
			5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	30.000.000,00	29.420.000,00	98,07
			6 Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.000.000,00	6.900.000,00	98,57
			7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98.130.000,00	97.425.920,00	99,28
			8 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25.850.000,00	25.047.000,00	96,89
		V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	113.276.000,00	110.556.000,00	97,6
			1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	113.276.000,00	110.556.000,00	97,6
		VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.066.637.910,00	881.595.628,00	82,7
			1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	279.000.000,00	157.475.929,00	56,44
			2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	787.637.910,00	724.119.699,00	91,94
		VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	768.115.000,00	711.255.900,00	92,6
			1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	230.000.000,00	207.843.750,00	90,37
			2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	232.140.000,00	207.749.900,00	89,49
			3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	120.000.000,00	112.250.000,00	93,54

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI(Rp)	%
1	2				3	4	5
			4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	185.975.000,00	183.412.250,00	98,62

Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2025.

W. Urusan Kearsipan

Tabel 1.27
Realisasi Belanja Daerah Urusan Kearsipan

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI(Rp)	%	
1	2			3	4	5	
URUSAN PERPUSTAKAAN				792.839.750,00	770.073.457,00	97,12	
I	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DERAH			792.839.750,00	770.073.457,00	97,12	
	A	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			645.826.000,00	629.184.901,00	97,42
		I	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		427.779.000,00	413.325.082,00	96,6
			1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	119.151.000,00	116.711.892,00	97,95
			2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	274.948.000,00	267.639.730,00	97,34
			3	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	33.680.000,00	28.973.460,00	86,03
		II	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota		197.820.000,00	196.014.936,00	99,1
			1	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	197.820.000,00	196.014.936,00	99,09
		III	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota		20.227.000,00	19.844.883,00	98,1
			1	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	20.227.000,00	19.844.883,00	98,11
			2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
	B	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			147.013.750,00	140.888.556,00	95,83
		I	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun		117.013.750,00	112.522.950,00	96,2
			1	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	117.013.750,00	112.522.950,00	96,16
		II	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota		30.000.000,00	28.365.606,00	94,6
			1	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	30.000.000,00	28.365.606,00	94,55

Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2024.

X. Urusan Pariwisata

Tabel 1.28
Realisasi Belanja Daerah Urusan Pariwisata

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2			3	4	5
URUSAN PARIWISATA				4.336.593.105,00	3.596.328.510,00	82,92
I	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			4.336.593.105,00	3.596.328.510,00	82,92
	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		936.909.500,00	641.964.213,00	68,52
		I	Administrasi Umum Perangkat Daerah	278.000.000,00	225.650.227,00	81,17
		1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	237.000.000,00	185.333.527,00	78,2
		2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	41.000.000,00	40.316.700,00	98,33
		II	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0
		1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	0
		III	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	658.909.500,00	416.313.986,00	63,18
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	250.000.000,00	147.182.390,00	58,87
		2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.000.000,00	41.657.800,00	27,77
		3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.000.000,00	47.095.000,00	62,79
		4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	183.909.500,00	180.378.796,00	98,08
	B	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		1.670.339.605,00	1.440.393.989,00	86,23
		I	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	942.670.250,00	817.641.189,00	86,74
		1	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	942.670.250,00	817.641.189,00	86,74
		II	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	350.000.000,00	321.512.900,00	91,86
		1	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	350.000.000,00	321.512.900,00	91,86
		III	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	221.135.625,00	188.528.400,00	85,25
		1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	221.135.625,00	188.528.400,00	85,25
		IV	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	156.533.730,00	112.711.500,00	72

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2			3	4	5
		1	Pengawasan dan Pembinaan Ketaatan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE di Kab./Kota	82.533.730,00	39.661.600,00	48,06
		2	Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota	74.000.000,00	73.049.900,00	98,72
	C	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		1.139.499.000,00	955.499.066,00	83,85
	I	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		1.139.499.000,00	955.499.066,00	83,85
		1	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	655.971.000,00	547.837.700,00	83,52
		2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	200.000.000,00	128.613.566,00	64,31
		3	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	283.528.000,00	279.047.800,00	98,42
	D	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		589.845.000,00	558.471.242,00	94,68
	I	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		589.845.000,00	558.471.242,00	94,68
		1	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	589.845.000,00	558.471.242,00	94,68

Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2025.

Y. Urusan Pertanian

Tabel 1.29
Realisasi Belanja Daerah Urusan Pertanian

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2			3	4	5
	URUSAN KETAHANAN PANGAN			3.595.591.900,00	2.310.165.690,00	64,24
	I	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		3.595.591.900,00	2.310.165.690,00	64,24
	A	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		393.707.500,00	383.366.700,00	97,37
	I	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		43.820.000,00	40.841.700,00	93,2
		1	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	43.820.000,00	40.841.700,00	93,2

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2				3	4	5
				sesuai Skala Usaha dan Risiko			
			2	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	349.887.500,00	342.525.000,00	97,9
			3	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	349.887.500,00	342.525.000,00	97,9
	B	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			3.201.884.400,00	1.926.798.990,00	60,18
		I	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		1.442.700.400,00	288.993.554,00	20,03
			1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	305.777.400,00	288.993.554,00	94,51
			2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.136.923.000,00	0	0
		II	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		955.184.000,00	884.194.550,00	92,57
			1	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	955.184.000,00	884.194.550,00	92,57
		III	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota		94.000.000,00	92.051.016,00	97,93
			1	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	94.000.000,00	92.051.016,00	97,93
		III	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer		85.000.000,00	67.756.420,00	79,71
			I	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	85.000.000,00	67.756.420,00	79,71
		IV	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		625.000.000,00	593.803.450,00	95,01
			1	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	625.000.000,00	593.803.450,00	95,01
	H	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			862.025.000,00	777.871.380,00	90,24
		I	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota		327.140.000,00	309.716.935,00	94,67
			1	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	327.140.000,00	309.716.935,00	94,67
			2	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	397.035.000,00	339.639.165,00	85,54

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2				3	4	5
			3	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	168.920.000,00	132.882.669,00	78,67
			4	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	228.115.000,00	206.756.496,00	90,64
			5	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	137.850.000,00	128.515.280,00	93,23
			6	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	137.850.000,00	128.515.280,00	93,23
	I	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			22.800.000,00	22.040.000,00	96,67
		I	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		22.800.000,00	22.040.000,00	96,67
			1	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	22.800.000,00	22.040.000,00	96,67

Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2025

Z. Urusan Perdagangan

Tabel 1.30
Realisasi Belanja Daerah Urusan Perdagangan

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2				3	4	5
I	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN				34.231.088.142,00	30.247.736.156,00	88,36
	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			34.231.088.142,00	30.247.736.156,00	88,36
		I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		14.999.000,00	14.057.835,00	93,73
			1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.999.000,00	14.057.835,00	93,73
		II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		23.865.369.000,00	20.923.649.098,00	87,67
			1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.850.369.000,00	20.910.556.699,00	87,67
			2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000,00	13.092.399,00	87,28
		III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		473.500.000,00	420.318.560,00	88,77
			1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	260.000.000,00	230.986.560,00	88,84
			2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	13.500.000,00	10.000.000,00	74,07
			3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	200.000.000,00	179.332.000,00	89,67
		IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah		544.172.900,00	443.938.446,00	81,58
			1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	375.567.000,00	312.011.442,00	83,08
			2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.999.900,00	8.980.000,00	89,8

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2			3	4	5
		3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	45.000.000,00	22.175.000,00	49,28
		4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000,00	50.544.804,00	84,24
		5	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	53.606.000,00	50.227.200,00	93,7
		V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	41.000.000,00	0	0
		1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.000.000,00	0	0
		VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.964.082.492,00	1.896.286.797,00	96,55
		1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.000.000,00	77.586.072,00	77,59
		2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.864.082.492,00	1.818.700.725,00	97,57
		VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	483.000.000,00	338.446.556,00	70,07
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	250.000.000,00	158.945.285,00	63,58
		2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	110.000.000,00	64.202.270,00	58,37
		3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000,00	24.560.001,00	81,87
		4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	93.000.000,00	90.739.000,00	97,57
	B	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		3.142.170.000,00	2.864.557.430,00	91,16
		I	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	312.220.000,00	209.557.430,00	67,12
		1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	104.220.000,00	102.539.580,00	98,39
		2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	208.000.000,00	107.017.850,00	51,45
		3	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	2.829.950.000,00	2.655.000.000,00	93,82
		4	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2.829.950.000,00	2.655.000.000,00	93,82
	C	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		2.683.000.000,00	2.481.837.998,00	92,5
		I	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	2.683.000.000,00	2.481.837.998,00	92,5
		1	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar	2.683.000.000,00	2.481.837.998,00	92,5

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	
1	2				3	4	5	
				Rakyat				
	D	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			1.019.794.750,00	864.643.436,00	84,79	
		I	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1.019.794.750,00	864.643.436,00	84,79
			1	Pameran Dagang Nasional		420.159.000,00	388.901.045,00	92,56
			2	Pameran Dagang Lokal		186.650.000,00	185.619.000,00	99,45
			3	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan		412.985.750,00	290.123.391,00	70,25
	E	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			219.907.500,00	209.118.850,00	95,09	
		I	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			219.907.500,00	209.118.850,00	95,09
			1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		149.009.500,00	142.326.949,00	95,52
			2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal		70.898.000,00	66.791.901,00	94,21

Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2025

AA. Perindustrian

Tabel 1.31
Realisasi Belanja Daerah Urusan Perindustrian

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	
1	2				3	4	5	
URUSAN PERINDUSTRIAN					910.608.000,00	101.461.770,00	11,14	
I	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN				910.608.000,00	101.461.770,00	11,14	
	A	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			910.608.000,00	101.461.770,00	11,14	
		I	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			910.608.000,00	101.461.770,00	11,14
			1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	910.608.000,00	101.461.770,00	11,14	

Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2025.

BB. Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Tabel 1.32
Realisasi Belanja Daerah Urusan Pemerintahan

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2			3	4	5
URUSAN PEMERINTAHAN				218.825.203.834,00	182.567.505.885,00	83,43
I	SEKRETARIAT DAERAH			218.825.203.834,00	182.567.505.885,00	83,43
	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		168.868.642.809,00	139.562.630.626,00	82,65
		I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	272.800.000,00	270.493.800,00	99,15
			1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	272.800.000,00	270.493.800,00	99,15
		II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	64.794.462.000,00	61.408.396.571,00	94,77
			1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	64.744.462.000,00	61.360.045.571,00	94,77
			2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	50.000.000,00	48.351.000,00	96,7
		III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	973.054.965,00	474.755.800,00	48,79
			1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	557.000.000,00	410.455.800,00	73,69
			2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	416.054.965,00	64.300.000,00	15,45
		IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.105.625.000,00	5.576.769.027,00	78,48
			1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	200.000.000,00	192.077.780,00	96,04
			2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.227.500.000,00	3.524.532.003,00	83,37
			3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	458.000.000,00	402.676.225,00	87,92
			4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
			5 Fasilitasi Kunjungan Tamu	544.800.000,00	392.707.000,00	72,08
			6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.520.225.000,00	921.826.223,00	60,64
			7 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	155.100.000,00	142.949.796,00	92,17
		V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18.561.657.115,00	7.732.394.780,00	41,66
			1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.970.000.000,00	1.387.761.750,00	34,96
			2 Pengadaan Mebel	2.325.000.000,00	1.835.555.230,00	78,95
			3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	12.266.657.115,00	4.509.077.800,00	36,76

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2				3	4	5
				Bangunan Lainnya			
		VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		15.457.431.298,00	12.706.934.974,00	82,21
			1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.600.000.000,00	5.970.408.531,00	78,56
			2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.246.015.000,00	372.953.592,00	29,93
			3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.611.416.298,00	6.363.572.851,00	96,25
		VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		39.593.267.174,00	37.037.336.529,00	93,54
			1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.125.280.000,00	1.032.884.258,00	91,79
			2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.057.712.000,00	1.564.412.352,00	76,03
			3	Pemeliharaan Mebel	150.000.000,00	110.583.750,00	73,72
			4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	31.897.421.174,00	30.150.596.012,00	94,52
			5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.362.854.000,00	4.178.860.157,00	95,78
		VIII	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		8.398.614.000,00	6.459.065.821,00	76,91
			1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.556.485.000,00	854.099.283,00	54,87
			2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000,00	374.547.300,00	62,42
			3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	80.000.000,00	51.440.899,00	64,3
			4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6.162.129.000,00	5.178.978.339,00	84,05
		IX	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		5.190.800.000,00	2.887.480.890,00	55,63
			1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.500.000.000,00	740.940.089,00	49,4
			2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1.250.000.000,00	584.272.301,00	46,74
			3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	2.440.800.000,00	1.562.268.500,00	64,01

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2			3	4	5
		X	Penataan Organisasi	1.029.968.000,00	677.543.465,00	65,78
			1Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	194.050.000,00	105.178.706,00	54,2
			2Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	400.590.000,00	235.111.475,00	58,69
			3Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	240.220.000,00	180.973.315,00	75,34
			4Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	195.108.000,00	156.279.969,00	80,1
		XI	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	7.490.963.257,00	4.331.458.969,00	57,82
			1Fasilitasi Keprotokolan	5.619.178.257,00	2.918.493.119,00	51,94
			2Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1.528.105.000,00	1.129.865.850,00	73,94
			3Pendokumentasian Tugas Pimpinan	343.680.000,00	283.100.000,00	82,37
	B	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		43.971.301.150,00	38.840.948.633,00	88,33
		I	Administrasi Tata Pemerintahan	2.118.833.250,00	734.915.869,00	34,68
			1Penataan Administrasi Pemerintahan	464.777.000,00	148.133.392,00	31,87
			2Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	991.070.250,00	297.382.313,00	30,01
			3Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	662.986.000,00	289.400.164,00	43,65
		II	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	37.633.460.000,00	36.060.652.584,00	95,82
			1Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	6.443.460.000,00	5.032.004.283,00	78,09
			2Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	23.700.000.000,00	23.565.719.911,00	99,43
			3Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	7.490.000.000,00	7.462.928.390,00	99,64
		III	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	795.680.400,00	492.218.489,00	61,86
			1Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	160.105.000,00	38.985.256,00	24,35
			2Fasilitasi Bantuan Hukum	551.811.000,00	373.003.733,00	67,6
			3Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	83.764.400,00	80.229.500,00	95,78
		IV	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	3.423.327.500,00	1.553.161.691,00	45,37
			1Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1.201.797.500,00	1.001.103.432,00	83,3
			2Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1.672.150.000,00	38.162.370,00	2,28
			3Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	549.380.000,00	513.895.889,00	93,54
	C	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		5.985.259.875,00	4.163.926.626,00	69,57
		I	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	1.813.960.862,00	1.111.411.030,00	61,27

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2			3	4	5
		1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	990.499.650,00	445.802.436,00	45,01
		2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	260.580.212,00	206.042.094,00	79,07
		3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	562.881.000,00	459.566.500,00	81,65
		II	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	2.162.669.240,00	1.818.002.670,00	84,06
		1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	218.865.720,00	199.147.690,00	90,99
		2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1.748.027.520,00	1.456.707.780,00	83,33
		3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	195.776.000,00	162.147.200,00	82,82
		III	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2.008.629.773,00	1.234.512.926,00	61,46
		1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	596.257.538,00	349.867.740,00	58,68
		2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	773.085.500,00	597.337.186,00	77,27
		3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	639.286.735,00	287.308.000,00	44,94

Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2025.

CC. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengawasan)

Tabel 1.33
Realisasi Belanja Daerah Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengawasan)

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2			3	4	5
URUSAN PEMERINTAHAN (PENGAWASAN)				54.040.384.586,00	44.460.716.054,00	82,27
I	INSPEKTORAT			54.040.384.586,00	44.460.716.054,00	82,27
	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		50.671.402.586,00	43.938.871.454,00	86,71
		I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	102.351.000,00	14.500.000,00	14,17
		1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	102.351.000,00	14.500.000,00	14,17
		II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	41.256.514.000,00	38.867.904.120,00	94,21
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	41.246.414.000,00	38.857.804.120,00	94,21
		2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	10.100.000,00	10.100.000,00	100

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2				3	4	5
				Tahun SKPD			
		III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		3.018.546.026,00	1.655.716.300,00	54,85
			1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	381.500.000,00	321.481.300,00	84,27
			2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.637.046.026,00	1.334.235.000,00	50,6
		IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah		3.355.383.030,00	1.849.002.985,00	55,11
			1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.949.000,00	6.300.000,00	52,72
			2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	400.000.000,00	353.940.702,00	88,49
			3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	380.369.030,00	268.714.610,00	70,65
			4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	55.000.000,00	10.234.000,00	18,61
			5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	300.000.000,00	187.801.500,00	62,6
			6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.208.065.000,00	1.022.012.173,00	46,29
		V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.619.278.000,00	508.436.408,00	31,4
			1	Pengadaan Mebel	620.979.000,00	312.646.408,00	50,35
			2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	998.299.000,00	195.790.000,00	19,61
		VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		285.553.440,00	249.210.271,00	87,27
			1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.600.000,00	210.000,00	3,75
			2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	279.953.440,00	249.000.271,00	88,94
		VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.033.777.090,00	794.101.370,00	76,82
			1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	361.650.000,00	293.416.757,00	81,13
			2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	571.288.000,00	409.509.613,00	71,68
			3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.839.090,00	91.175.000,00	90,42
	B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			1.907.429.000,00	106.576.600,00	5,59
		I	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		1.278.207.000,00	72.076.600,00	5,64
			1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	129.852.000,00	9.600.000,00	7,39
			2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	617.518.000,00	50.326.600,00	8,15

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2			3	4	5
		3	Reviu Laporan Kinerja	200.000.000,00	0	0
		4	Reviu Laporan Keuangan	198.045.000,00	12.150.000,00	6,13
		5	Kerja Sama Pengawasan Internal	119.792.000,00	0	0
		6	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	13.000.000,00	0	0
		II	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	629.222.000,00	34.500.000,00	5,48
		1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	153.550.000,00	0	0
		2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	475.672.000,00	34.500.000,00	7,25
	C	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		1.461.553.000,00	415.268.000,00	28,41
		I	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	363.148.000,00	135.160.000,00	37,22
		1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	35.748.000,00	26.360.000,00	73,74
		2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	327.400.000,00	108.800.000,00	33,23
		II	Pendampingan dan Asistensi	1.098.405.000,00	280.108.000,00	25,5
		1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	207.944.000,00	21.000.000,00	10,1
		2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	121.464.000,00	0	0
		3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	608.275.000,00	259.108.000,00	42,6
		4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	160.722.000,00	0	0

Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2025.

DD. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)

Tabel 1.34
Realisasi Belanja Daerah Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2			3	4	5
	URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN)			32.182.686.760,00	28.374.554.335,00	88,17
	I	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		32.182.686.760,00	28.374.554.335,00	88,17
	A	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN	URUSAN DAERAH	25.839.644.760,00	23.790.523.471,00	92,07

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2		3	4	5
	KABUPATEN/KOTA				
	I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.779.000,00	36.516.285,00	94,17
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.779.000,00	13.521.000,00	98,13
		2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000,00	22.995.285,00	91,98
	II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.418.953.000,00	20.782.150.375,00	92,7
		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.403.953.000,00	20.769.151.925,00	92,7
		2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	15.000.000,00	12.998.450,00	86,66
	III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	434.002.800,00	428.274.457,00	98,68
		1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	379.988.000,00	379.372.080,00	99,84
		2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0	0
		3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	54.014.800,00	48.902.377,00	90,54
	IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	941.323.740,00	838.773.036,00	89,11
		1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	440.181.000,00	436.109.458,00	99,08
		2 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	98.729.740,00	92.449.014,00	93,64
		3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	25.000.000,00	23.190.120,00	92,76
		4 Fasilitas Kunjungan Tamu	30.000.000,00	27.531.000,00	91,77
		5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	337.973.000,00	250.979.744,00	74,26
		6 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9.440.000,00	8.513.700,00	90,19
	V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	200.915.000,00	130.000.002,00	64,7
		1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.915.000,00	130.000.002,00	64,7
		2 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.077.859.220,00	1.057.607.687,00	98,12
		3 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000,00	2.753.937,00	27,54
		4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.067.859.220,00	1.054.853.750,00	98,78
	VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	727.812.000,00	517.201.629,00	71,06
		1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	345.812.000,00	257.658.151,00	74,51

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2				3	4	5
			2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	225.000.000,00	182.502.497,00	81,11
			3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	157.000.000,00	77.040.981,00	49,07
			4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	0
	B	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			3.570.484.000,00	2.147.375.444,00	60,14
		I	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		1.622.833.000,00	1.112.181.883,00	68,53
			1	Pelaksanaan Konsultasi Publik	61.212.000,00	60.902.000,00	99,49
			2	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	192.865.000,00	148.288.000,00	76,89
			3	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.368.756.000,00	902.991.883,00	65,97
			4	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	121.680.000,00	46.907.117,00	38,55
			5	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	121.680.000,00	46.907.117,00	38,55
		II	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		1.698.229.000,00	930.228.444,00	54,78
			1	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1.698.229.000,00	930.228.444,00	54,78
			2	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	127.742.000,00	58.058.000,00	45,45
			3	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	127.742.000,00	58.058.000,00	45,45
	C	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			437.227.000,00	290.694.446,00	66,49
		I	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		133.170.000,00	55.553.470,00	41,72
			1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	82.807.000,00	27.411.000,00	33,1
			2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	50.363.000,00	28.142.470,00	55,88

NO				PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1				2	3	4	5
			3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	0	0	0
			4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	0	0	0
		II	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		53.573.000,00	43.090.980,00	80,43
			1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0	0	0
			2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	53.573.000,00	43.090.980,00	80,43
			3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	0	0	0
		III	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		0	0	0
			1	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	250.484.000,00	192.049.996,00	76,67
			2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	60.740.000,00	42.838.676,00	70,53
			3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	40.076.000,00	29.680.000,00	74,06
			4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	149.668.000,00	119.531.320,00	79,86
	D	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH			2.335.331.000,00	2.145.960.974,00	91,89
		I	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan		390.060.000,00	373.347.970,00	95,72
			1	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	200.258.000,00	195.224.000,00	97,49
			2	Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	189.802.000,00	178.123.970,00	93,85
		II	Invensi dan Inovasi		1.945.271.000,00	1.772.613.004,00	91,12
			1	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset	199.276.000,00	191.317.253,00	96,01

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2				3	4	5
				dan Inovasi di daerah			
			2	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	199.452.000,00	196.821.650,00	98,68
			3	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	178.463.000,00	177.330.000,00	99,37
			4	Fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	392.780.000,00	274.012.100,00	69,76
			5	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	393.380.000,00	363.395.101,00	92,38
			6	Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	295.860.000,00	290.231.875,00	98,1
			7	Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	286.060.000,00	279.505.025,00	97,71

Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2025.

EE. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan)

Tabel 1.35
Realisasi Belanja Daerah Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan)

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2				3	4	5
URUSAN PEMERINTAHAN (KEUANGAN)					380.096.535.006,00	266.531.254.349,00	70,12
I	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				171.851.603.728,00	128.421.347.400,00	74,73
	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			123.233.659.660,00	105.785.250.392,00	85,84
		I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		58.700.000,00	23.922.880,00	40,75
			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	46.510.000,00	13.558.880,00	29,15
			2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.190.000,00	10.364.000,00	85,02
		II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		117.948.839.000,00	100.970.907.636,00	85,61
			1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	117.928.839.000,00	100.951.066.232,00	85,6

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2				3	4	5
			2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.000.000,00	19.841.404,00	99,21
		III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		50.000.000,00	49.758.000,00	99,52
			1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	0
			2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000,00	49.758.000,00	99,52
			2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0
		IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah		2.189.534.500,00	1.960.420.362,00	89,54
			1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.245.815.500,00	1.179.995.210,00	94,72
			2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	200.000.000,00	194.092.300,00	97,05
			3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000,00	31.215.000,00	62,43
			4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000,00	14.682.000,00	97,88
			5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	345.099.000,00	229.952.852,00	66,63
			6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	333.620.000,00	310.483.000,00	93,06
		V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		83.356.800,00	82.746.199,00	99,27
			1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	83.356.800,00	82.746.199,00	99,27
		VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.900.441.860,00	1.854.361.600,00	97,58
			1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.900.441.860,00	1.854.361.600,00	97,58
		VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.002.787.500,00	843.133.715,00	84,08
			1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	550.000.000,00	490.156.570,00	89,12
			2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	250.000.000,00	202.612.145,00	81,04
			3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	202.787.500,00	150.365.000,00	74,15

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2				3	4	5
	B	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			45.596.827.468,00	21.183.871.134,00	46,46
		I	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		1.663.598.000,00	1.048.540.286,00	63,03
			1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	111.226.000,00	80.668.999,00	72,53
			2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	111.226.000,00	96.669.837,00	86,91
			3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	56.970.000,00	44.094.810,00	77,4
			4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	56.970.000,00	27.412.000,00	48,12
			5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	44.750.000,00	37.913.500,00	84,72
			6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	62.900.000,00	39.674.446,00	63,08
			7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	184.740.000,00	117.042.214,00	63,36
			8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	395.075.000,00	194.132.218,00	49,14
			9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	143.677.000,00	88.414.545,00	61,54
			10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	158.736.000,00	114.916.500,00	72,39
			11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	0	0	0
			12	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	337.328.000,00	207.601.217,00	61,54
		II	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		425.145.000,00	319.976.937,00	75,26
			1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	85.000.000,00	64.300.000,00	75,65
			2	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	23.570.000,00	12.025.430,00	51,02

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2				3	4	5
			3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	53.700.000,00	38.382.231,00	71,48
			4	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	124.855.000,00	91.050.276,00	72,92
			5	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	0	0	0
			6	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	138.020.000,00	114.219.000,00	82,76
		III	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		1.786.695.000,00	1.431.397.399,00	80,11
			1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	174.638.000,00	169.782.000,00	97,22
			2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban	51.854.000,00	50.130.000,00	96,68
			3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	127.845.000,00	95.280.000,00	74,53
			4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	175.000.000,00	113.141.439,00	64,65
			5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	175.000.000,00	124.029.622,00	70,87

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2				3	4	5
				Kabupaten/Kota			
			6	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	118.723.000,00	77.722.338,00	65,47
			7	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	448.266.000,00	395.095.000,00	88,14
			8	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	447.139.000,00	364.397.000,00	81,5
			9	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	68.230.000,00	41.820.000,00	61,29
		II	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		41.721.389.468,00	18.383.956.512,00	44,06
			1	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	41.721.389.468,00	18.383.956.512,00	44,06
	C	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			3.021.116.600,00	1.452.225.874,00	48,07
		I	Pengelolaan Barang Milik Daerah		3.021.116.600,00	1.452.225.874,00	48,07
			1	Penyusunan Standar Harga	197.500.000,00	115.315.000,00	58,39
			2	Penatausahaan Barang Milik Daerah	376.710.000,00	292.680.500,00	77,69
			3	Inventarisasi Barang Milik Daerah	422.940.000,00	122.568.500,00	28,98
			4	Pengamanan Barang Milik Daerah	672.371.600,00	368.705.274,00	54,84
			5	Penilaian Barang Milik Daerah	770.790.000,00	324.996.900,00	42,16
			6	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	38.900.000,00	9.211.000,00	23,68
			7	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	475.400.000,00	218.748.700,00	46,01
			8	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	66.505.000,00	0	0
	II	BADAN PENDAPATAN DAERAH			208.244.931.278,00	138.109.906.949,00	66,32
	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			194.435.695.178,00	126.141.518.704,00	64,88
		I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		110.000.000,00	8.390.500,00	7,63

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2				3	4	5
			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.000.000,00	0	0
			2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000,00	8.390.500,00	83,91
		II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		181.528.070.670,00	114.340.593.847,00	62,99
			1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	181.518.070.670,00	114.335.593.847,00	62,99
			2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000,00	5.000.000,00	50
		III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		80.063.350,00	59.625.000,00	74,47
			1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	80.063.350,00	59.625.000,00	74,47
		IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.985.169.000,00	1.728.471.750,00	87,07
			1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.000.000,00	94.457.975,00	94,46
			2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.006.430.800,00	900.661.178,00	89,49
			3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	432.956.950,00	340.805.320,00	78,72
			6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100.000.000,00	98.942.800,00	98,94
			7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	196.700.000,00	187.493.300,00	95,32
			8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	149.081.250,00	106.111.177,00	71,18
		V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		559.958.498,00	536.407.500,00	95,79
			1	Pengadaan Mebel	500.000.000,00	479.797.500,00	95,96
			2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.958.498,00	56.610.000,00	94,42
		VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		8.580.833.660,00	8.070.311.125,00	94,05
			1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	0
			2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.150.000.000,00	765.177.500,00	66,54
			3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.430.833.660,00	7.305.133.625,00	98,31
		VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.591.600.000,00	1.397.718.982,00	87,82

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2				3	4	5
			1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	225.000.000,00	142.600.616,00	63,38
			2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	410.000.000,00	334.667.999,00	81,63
			3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	491.600.000,00	475.300.000,00	96,68
			4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	465.000.000,00	445.150.367,00	95,73
	B	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			13.809.236.100,00	11.968.388.245,00	86,67
		I	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		13.809.236.100,00	11.968.388.245,00	86,67
			1	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	250.000.000,00	190.715.000,00	76,29
			2	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	562.000.000,00	253.702.550,00	45,14
			3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2.296.500.000,00	2.126.271.600,00	92,59
			4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	604.955.000,00	2.550.000,00	0,42
			5	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	724.245.150,00	713.300.174,00	98,49
			6	Penetapan Wajib Pajak Daerah	150.732.500,00	124.500.000,00	82,6
			7	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	297.000.000,00	265.344.048,00	89,34
			8	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	45.989.500,00	21.750.000,00	47,29
			9	Penagihan Pajak Daerah	7.618.897.950,00	7.354.201.269,00	96,53
			10	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	0	0	0
			11	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	26.350.000,00	16.760.100,00	63,61
			12	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	21.966.000,00	9.000.000,00	40,97
			13	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1.210.600.000,00	890.293.504,00	73,54

Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2025.

FF. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)

Tabel 1.36
Realisasi Belanja Daerah Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2			3	4	5
URUSAN PEMERINTAHAN (KEPEGAWAIAN)				26.208.892.096,00	22.587.539.862,00	86,18
I	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			26.208.892.096,00	22.587.539.862,00	86,18
	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		19.499.681.596,00	17.678.542.708,00	90,66
		I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	8.400.000,00	84
			1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	0
			2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000,00	8.400.000,00	84
		II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.740.307.000,00	16.188.455.560,00	91,25
			1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.730.307.000,00	16.180.055.560,00	91,26
			2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000,00	4.250.000,00	85
			3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.000.000,00	4.150.000,00	83
		III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24.000.000,00	22.000.000,00	91,67
			1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	24.000.000,00	22.000.000,00	91,67
			2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0
		IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	957.949.000,00	751.874.859,00	78,49
			1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	468.310.000,00	353.529.946,00	75,49
			2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	267.898.000,00	233.290.000,00	87,08
			3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	20.000.000,00	14.254.000,00	71,27
			4 Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.990.000,00	18.643.000,00	71,73
			5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.450.000,00	84.997.913,00	67,75

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2				3	4	5
			6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50.301.000,00	47.160.000,00	93,76
		V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		157.323.000,00	136.538.000,00	86,79
			1	Pengadaan Mebel	54.379.000,00	52.400.000,00	96,36
			2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	102.944.000,00	84.138.000,00	81,73
		VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		203.012.596,00	202.257.488,00	99,63
			1	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	100
			2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	163.012.596,00	162.257.488,00	99,54
		VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		407.090.000,00	369.016.801,00	90,65
			1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	156.250.000,00	142.208.475,00	91,01
			2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	173.500.000,00	155.443.326,00	89,59
			3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	77.340.000,00	71.365.000,00	92,27
	B	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			6.709.210.500,00	4.908.997.154,00	73,17
		I	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		575.583.400,00	504.229.762,00	87,6
			1	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	355.954.600,00	310.424.922,00	87,21
			2	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	219.628.800,00	193.804.840,00	88,24
		II	Mutasi dan Promosi ASN		862.997.100,00	466.860.640,00	54,1
			1	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	125.975.700,00	81.843.010,00	64,97
			2	Pengelolaan Promosi ASN	737.021.400,00	385.017.630,00	52,24
		III	Pengembangan Kompetensi ASN		5.120.562.000,00	3.802.292.120,00	74,26
			1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	0	0	0
			2	Pengelolaan Assessment Center	250.520.000,00	225.248.500,00	89,91
			3	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	482.050.000,00	423.436.370,00	87,84
			4	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	3.021.912.000,00	2.546.365.100,00	84,26
			5	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	1.366.080.000,00	607.242.150,00	44,45
			6	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	150.068.000,00	135.614.632,00	90,37
			7	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	42.615.000,00	39.036.002,00	91,6

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2				3	4	5
			8	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	74.531.000,00	68.029.700,00	91,28
			9	Pembinaan Disiplin ASN	32.922.000,00	28.548.930,00	86,72

Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2025.

GG. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Penelitian dan Pengembangan)

Tabel 1.37
Realisasi Belanja Daerah Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
(Penelitian dan Pengembangan)

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2				3	4	5
	URUSAN PEMERINTAHAN (PENGEMBANGAN, RISET DAN INOVASI)				2.335.331.000,00	2.145.960.974,00	91,89
I	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH				2.335.331.000,00	2.145.960.974,00	91,89
	A	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH			2.335.331.000,00	2.145.960.974,00	91,89
		I	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan		390.060.000,00	373.347.970,00	95,72
			1	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	200.258.000,00	195.224.000,00	97,49
			2	Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	189.802.000,00	178.123.970,00	93,85
		II	Invensi dan Inovasi		1.945.271.000,00	1.772.613.004,00	91,12
			1	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	199.276.000,00	191.317.253,00	96,01
			2	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	199.452.000,00	196.821.650,00	98,68
			3	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	178.463.000,00	177.330.000,00	99,37
			4	Fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	392.780.000,00	274.012.100,00	69,76
			5	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	393.380.000,00	363.395.101,00	92,38
			6	Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	295.860.000,00	290.231.875,00	98,1
			7	Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta	286.060.000,00	279.505.025,00	97,71

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2				3	4	5
				kemitraan invensi dan inovasi			

Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2025.

HH. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (SEKRETARIAT DPRD)

Tabel 1.38
Realisasi Belanja Daerah Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (SEKRETARIAT DPRD)

NO	PERANGKAT DAERAH/ PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2				3	4	5
	URUSAN PEMERINTAHAN (SEKRETARIAT DPRD)				207.938.555.463,00	160.298.078.392,00	77,09
	I	SEKRETARIAT DPRD			207.938.555.463,00	160.298.078.392,00	77,09
	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			110.431.300.324,00	91.679.345.614,00	83,02
		I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		80.000.000,00	28.137.500,00	35,2
			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.000.000,00	20.017.500,00	50,04
			2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.000.000,00	8.120.000,00	20,3
		II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		15.675.969.554,00	14.216.888.259,00	90,7
			1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.611.969.554,00	14.169.887.759,00	90,76
			2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	40.000.000,00	32.135.500,00	80,34
			3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	24.000.000,00	14.865.000,00	61,94
		III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		951.170.000,00	606.820.830,00	63,8
			1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	379.170.000,00	291.190.480,00	76,8
			2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	572.000.000,00	315.630.350,00	55,18
		IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah		7.329.329.562,00	6.938.738.321,00	94,7
			1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	150.000.000,00	149.461.671,00	99,64
			2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.237.763.000,00	3.218.921.650,00	99,42
			3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	459.116.562,00	354.523.000,00	77,22
			4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	580.000.000,00	530.072.000,00	91,39

NO	PERANGKAT DAERAH/ PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2				3	4	5
			5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.902.450.000,00	1.691.625.000,00	88,92
			6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.000.000.000,00	994.135.000,00	99,41
		V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.678.596.000,00	1.581.527.246,00	94,2
			1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.678.596.000,00	1.581.527.246,00	94,22
		VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3.955.043.826,00	3.762.102.260,00	95,1
			1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.000.000,00	4.124.000,00	16,5
			2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.200.000.000,00	1.087.454.663,00	90,62
			3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.730.043.826,00	2.670.523.597,00	97,82
		VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		8.442.000.000,00	7.834.398.702,00	92,8
			1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	0
			2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	510.000.000,00	326.996.307,00	64,12
			3	Pemeliharaan Mebel	100.000.000,00	99.960.000,00	99,96
			4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	832.000.000,00	616.698.437,00	74,12
			5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.000.000.000,00	6.790.743.958,00	97,01
		VIII	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		71.579.191.382,00	56.307.620.043,00	78,7
			1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	70.644.191.382,00	55.428.968.034,00	78,46
			2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	770.000.000,00	736.377.009,00	95,63
			3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	165.000.000,00	142.275.000,00	86,23
		IX	Layanan Administrasi DPRD		740.000.000,00	403.112.453,00	54,5
			1	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	40.000.000,00	40.000.000,00	100
			2	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	700.000.000,00	363.112.453,00	51,87
	B	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			97.507.255.139,00	68.618.732.778,00	70,37
		I	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		17.780.418.000,00	6.561.563.854,00	36,9
			1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.450.000.000,00	1.302.371.649,00	89,82
			2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6.682.250.000,00	3.198.064.308,00	47,86
			3	Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan	4.135.068.000,00	1.954.337.151,00	47,26

NO	PERANGKAT DAERAH/ PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2				3	4	5
			4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	5.122.010.000,00	0	0
			5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	391.090.000,00	106.790.746,00	27,31
		II	Pembahasan Kebijakan Anggaran		4.100.000.000,00	3.418.262.518,00	83,4
			1	Pembahasan KUA dan PPAS	1.000.000.000,00	884.549.846,00	88,45
			2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	500.000.000,00	422.151.700,00	84,43
			3	Pembahasan APBD	1.000.000.000,00	798.533.855,00	79,85
			4	Pembahasan APBD Perubahan	750.000.000,00	544.365.226,00	72,58
			5	Pembahasan Laporan Semester	350.000.000,00	311.355.267,00	88,96
			6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	500.000.000,00	457.306.624,00	91,46
		III	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		21.523.514.928,00	15.962.229.592,00	74,2
			1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	3.760.670.264,00	2.846.626.831,00	75,7
			2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	3.760.670.264,00	2.824.227.885,00	75,1
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3.760.670.264,00	2.719.633.692,00	72,3
			3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	3.760.670.264,00	2.350.859.104,00	62,51
			4	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1.000.000.000,00	645.681.358,00	64,57
			5	Pengawasan Penggunaan Anggaran	4.500.000.000,00	3.979.951.627,00	88,44
			6	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	980.833.872,00	595.249.095,00	60,69
		III	Peningkatan Kapasitas DPRD		22.075.052.000,00	17.086.926.553,00	77,4
			1	Orientasi DPRD	27.440.000,00	0	0
			2	Pendalaman Tugas DPRD	4.750.000.000,00	2.438.315.146,00	51,33
			3	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	2.341.612.000,00	1.363.700.000,00	58,24
			4	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	756.000.000,00	724.500.000,00	95,83
			5	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12.500.000.000,00	11.843.071.484,00	94,74
			6	Penyusunan Program Kerja DPRD	1.700.000.000,00	717.339.923,00	42,2
		IV	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		17.980.007.500,00	16.215.207.500,00	90,2
			1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	284.182.500,00	230.570.000,00	81,13
			2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	925.000.000,00	214.780.500,00	23,22
			3	Pelaksanaan Reses	14.970.825.000,00	14.563.277.000,00	97,28
			4	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	1.800.000.000,00	1.206.580.000,00	67,03
		V	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		2.089.068.000,00	1.394.737.519,00	66,8

NO	PERANGKAT DAERAH/ PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2				3	4	5
			1	Pengawasan Kode Etik DPRD	2.089.068.000,00	1.394.737.519,00	66,76
		VI	Fasilitasi Tugas DPRD		11.959.194.711,00	7.979.805.242,00	66,7
			1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	0	0	0
			2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	659.194.711,00	427.790.509,00	64,9
			3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	10.000.000.000,00	6.438.957.524,00	64,39
			4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1.300.000.000,00	1.113.057.209,00	85,62

Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2025.

I.I Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (KECAMATAN)

Tabel 1.39
Realisasi Belanja Daerah Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (KECAMATAN)

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2			3	4	5
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KECAMATAN)				514.494.466.543,00	484.435.235.587,00	94,15
UNSUR KEWILAYAHAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (KECAMATAN)						
I	KECAMATAN BEKASI TIMUR			43.838.430.182,00	42.588.201.296,00	97,15
	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		22.481.672.182,00	21.345.590.082,00	94,95
		I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000,00	23.210.000,00	77,37
			1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000,00	12.600.000,00	84
			2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000,00	10.610.000,00	70,73
		II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.921.644.000,00	14.338.931.369,00	96,09
			1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.911.644.000,00	14.328.932.469,00	96,09
		III	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000,00	4.999.900,00	100
			1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.000.000,00	4.999.000,00	99,98
		III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16.300.000,00	15.000.000,00	92,02
			1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	16.300.000,00	15.000.000,00	92,02
			2 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	0	0	0
		IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	812.744.000,00	778.966.782,00	95,84

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2				3	4	5
			1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	19.475.727,00	97,38
			2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	398.236.000,00	386.924.831,00	97,16
			3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	121.760.000,00	114.036.780,00	93,66
			4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	35.000.000,00	34.600.000,00	98,86
			5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	29.822.000,00	29.734.444,00	99,71
			6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	185.366.000,00	173.120.000,00	93,39
			7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	22.560.000,00	21.075.000,00	93,42
		V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		86.724.000,00	83.261.100,00	96,01
			1	Pengadaan Mebel	86.724.000,00	83.261.100,00	96,01
			2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0
		VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		6.029.549.982,00	5.605.538.879,00	92,97
			1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	508.683.000,00	394.360.313,00	77,53
			2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.520.866.982,00	5.211.178.566,00	94,39
		VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		584.710.200,00	500.681.952,00	85,63
			1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.000.000,00	87.927.091,00	87,93
			2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	184.710.200,00	115.651.861,00	62,61
			3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000,00	99.600.000,00	99,6
			4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000,00	197.503.000,00	98,75
	B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			216.312.000,00	209.510.264,00	96,86
		I	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		190.000.000,00	183.576.224,00	96,62
			1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	190.000.000,00	183.576.224,00	96,62
			2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	26.312.000,00	25.934.040,00	98,56
			3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait	26.312.000,00	25.934.040,00	98,56

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2				3	4	5
				dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
	C	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			20.895.296.000,00	20.791.739.950,00	99,5
		I	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		20.635.296.000,00	20.568.749.950,00	99,68
			1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	120.000.000,00	114.380.000,00	95,32
			2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	800.000.000,00	800.000.000,00	100
			3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	19.715.296.000,00	19.654.369.950,00	99,69
			4	Evaluasi Kelurahan	0	0	0
		I	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		260.000.000,00	222.990.000,00	85,77
			1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	160.000.000,00	150.000.000,00	93,75
			2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	100.000.000,00	72.990.000,00	72,99
	D	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			145.150.000,00	143.512.000,00	98,87
		I	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		145.150.000,00	143.512.000,00	98,87
			1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	145.150.000,00	143.512.000,00	98,87
	E	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			100.000.000,00	97.849.000,00	97,85
		I	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		100.000.000,00	97.849.000,00	97,85
			1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100.000.000,00	97.849.000,00	97,85
II	KECAMATAN BEKASI BARAT				46.409.948.856,00	44.491.260.297,00	95,87
	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			23.860.723.056,00	22.218.366.301,00	93,12
		I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		8.530.000,00	8.530.000,00	100
			1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.530.000,00	8.530.000,00	100
		II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		17.135.649.000,00	15.716.174.938,00	91,72
			1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.126.999.000,00	15.707.524.938,00	91,71
			2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.650.000,00	8.650.000,00	100
		III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		0	0	0

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2				3	4	5
			1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0	0
		IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah		485.540.000,00	466.820.549,00	96,14
			1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	19.636.649,00	98,18
			2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	240.000.000,00	236.617.900,00	98,59
			3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000,00	49.166.000,00	98,33
			4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000,00	15.600.000,00	78
			5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105.540.000,00	96.080.000,00	91,04
			6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50.000.000,00	49.720.000,00	99,44
		V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		54.845.000,00	53.708.000,00	97,93
			1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.845.000,00	53.708.000,00	97,93
		VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		5.397.365.056,00	5.255.715.730,00	97,38
			1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	438.875.000,00	426.909.079,00	97,27
			2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.958.490.056,00	4.828.806.651,00	97,38
		VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		778.794.000,00	717.417.084,00	92,12
			1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	98.200.000,00	72.894.909,00	74,23
			2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	167.800.000,00	134.898.675,00	80,39
			3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	112.794.000,00	112.426.500,00	99,67
			4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	400.000.000,00	397.197.000,00	99,3
	B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			387.735.000,00	362.320.650,00	93,45
		I	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		0	0	0
			1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0	0	0
			2	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	236.075.000,00	231.510.650,00	98,07

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2			3	4	5
		3	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	236.075.000,00	231.510.650,00	98,07
		II	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	151.660.000,00	130.810.000,00	86,25
		1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	151.660.000,00	130.810.000,00	86,25
	C	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		20.711.403.800,00	20.469.858.346,00	98,83
		I	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	20.511.403.800,00	20.269.858.346,00	98,82
		1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	120.000.000,00	114.632.500,00	95,53
		2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100
		3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	19.391.403.800,00	19.155.225.846,00	98,78
		4	Evaluasi Kelurahan	0	0	0
		II	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	200.000.000,00	200.000.000,00	100
		1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	200.000.000,00	200.000.000,00	100
	D	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		1.411.775.000,00	1.402.403.000,00	99,34
		I	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.411.775.000,00	1.402.403.000,00	99,34
		1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	50.250.000,00	46.200.000,00	91,94
		2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1.361.525.000,00	1.356.203.000,00	99,61
	E	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		38.312.000,00	38.312.000,00	100
		I	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	38.312.000,00	38.312.000,00	100
		1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	38.312.000,00	38.312.000,00	100
III	KECAMATAN BEKASI UTARA			63.931.939.438,00	61.113.074.881,00	95,59
	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		31.760.170.724,00	29.353.884.081,00	92,42
		I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.358.013,00	0	0

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2			3	4	5
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.858.013,00	0	0
			BELANJA OPERASI	7.858.013,00	0	0
			Belanja Barang dan Jasa	7.858.013,00	0	0
		2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.500.000,00	0	0
			BELANJA OPERASI	7.500.000,00	0	0
			Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	0	0
	II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		22.490.308.000,00	20.764.517.232,00	92,33
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.485.908.000,00	20.760.172.625,00	92,33
			BELANJA OPERASI	22.485.908.000,00	20.760.172.625,00	92,33
			Belanja Pegawai	22.383.148.000,00	20.658.418.795,00	92,29
			Belanja Barang dan Jasa	102.760.000,00	101.753.830,00	99,02
		2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.400.000,00	4.344.607,00	98,74
			BELANJA OPERASI	4.400.000,00	4.344.607,00	98,74
			Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	4.344.607,00	98,74
	III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		12.750.000,00	0	0
		1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12.750.000,00	0	0
			BELANJA OPERASI	12.750.000,00	0	0
			Belanja Barang dan Jasa	12.750.000,00	0	0
	III	Administrasi Umum Perangkat Daerah		748.174.175,00	543.038.521,00	72,58
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	19.153.000,00	95,77
			BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.153.000,00	95,77
			Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.153.000,00	95,77
		2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	338.861.500,00	257.711.500,00	76,05
			BELANJA OPERASI	338.861.500,00	257.711.500,00	76,05
			Belanja Barang dan Jasa	338.861.500,00	257.711.500,00	76,05
		3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.000.000,00	54.232.595,00	54,23
			BELANJA OPERASI	100.000.000,00	54.232.595,00	54,23
			Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	54.232.595,00	54,23
		4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000,00	19.789.990,00	98,95
			BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.789.990,00	98,95
			Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.789.990,00	98,95
		5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.572.675,00	0	0
			BELANJA OPERASI	14.572.675,00	0	0
			Belanja Barang dan Jasa	14.572.675,00	0	0
		6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	204.740.000,00	142.604.000,00	69,65
			BELANJA OPERASI	204.740.000,00	142.604.000,00	69,65
			Belanja Barang dan Jasa	204.740.000,00	142.604.000,00	69,65
		7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50.000.000,00	49.547.436,00	99,09

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2				3	4	5
				BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.547.436,00	99,09
				Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.547.436,00	99,09
				BELANJA MODAL	0	0	0
				Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0
		IV	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		49.796.000,00	27.361.500,00	54,95
			1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.796.000,00	27.361.500,00	54,95
				BELANJA OPERASI	2.495.000,00	1.831.500,00	73,41
				Belanja Barang dan Jasa	2.495.000,00	1.831.500,00	73,41
				BELANJA MODAL	47.301.000,00	25.530.000,00	53,97
				Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.301.000,00	25.530.000,00	53,97
		V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		7.962.784.536,00	7.583.211.284,00	95,23
			1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	624.321.000,00	521.619.195,00	83,55
				BELANJA OPERASI	624.321.000,00	521.619.195,00	83,55
				Belanja Barang dan Jasa	624.321.000,00	521.619.195,00	83,55
			2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.338.463.536,00	7.061.592.089,00	96,23
				BELANJA OPERASI	7.338.463.536,00	7.061.592.089,00	96,23
				Belanja Barang dan Jasa	7.338.463.536,00	7.061.592.089,00	96,23
		VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		481.000.000,00	435.755.544,00	90,59
			1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51.000.000,00	48.707.150,00	95,5
				BELANJA OPERASI	51.000.000,00	48.707.150,00	95,5
				Belanja Barang dan Jasa	51.000.000,00	48.707.150,00	95,5
			2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	170.000.000,00	135.963.877,00	79,98
				BELANJA OPERASI	170.000.000,00	135.963.877,00	79,98
				Belanja Barang dan Jasa	170.000.000,00	135.963.877,00	79,98
			3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000,00	52.530.417,00	87,55
				BELANJA OPERASI	60.000.000,00	52.530.417,00	87,55
				Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	52.530.417,00	87,55
			4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000,00	198.554.100,00	99,28
				BELANJA OPERASI	200.000.000,00	198.554.100,00	99,28
				Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	198.554.100,00	99,28
	B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			357.960.000,00	333.802.245,00	93,25
		I	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		0	0	0
			1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	0	0	0

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2				3	4	5
				Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
				BELANJA OPERASI	0	0	0
				Belanja Barang dan Jasa	0	0	0
			2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	0	0	0
			3	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	0	0	0
				BELANJA OPERASI	0	0	0
				Belanja Barang dan Jasa	0	0	0
		II	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		307.960.000,00	291.318.238,00	
			1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	307.960.000,00	291.318.238,00	94,6
				BELANJA OPERASI	307.960.000,00	291.318.238,00	94,6
				Belanja Barang dan Jasa	307.960.000,00	291.318.238,00	94,6
			2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	50.000.000,00	42.484.007,00	84,97
			3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	50.000.000,00	42.484.007,00	84,97
				BELANJA OPERASI	50.000.000,00	42.484.007,00	84,97
				Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	42.484.007,00	84,97
	C	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			31.723.508.714,00	31.339.572.150,00	98,79
		I	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		0	0	0
			1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0	0	0
				BELANJA OPERASI	0	0	0
				Belanja Barang dan Jasa	0	0	0
			2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	31.395.318.307,00	31.013.614.517,00	98,78
			3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.200.000.000,00	1.000.000.000,00	83,33
				BELANJA OPERASI	0	0	0
				Belanja Barang dan Jasa	0	0	0
				BELANJA MODAL	1.200.000.000,00	1.000.000.000,00	83,33
				Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.200.000.000,00	1.000.000.000,00	83,33
			4	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	30.195.318.307,00	30.013.614.517,00	99,4
				BELANJA OPERASI	30.195.318.307,00	30.013.614.517,00	99,4
				Belanja Barang dan Jasa	30.195.318.307,00	30.013.614.517,00	99,4
			5	Evaluasi Kelurahan	0	0	0

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2			3	4	5
			BELANJA OPERASI	0	0	0
			Belanja Barang dan Jasa	0	0	0
		II	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	328.190.407,00	325.957.633,00	99,32
		1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	240.000.000,00	240.000.000,00	100
			BELANJA OPERASI	240.000.000,00	240.000.000,00	100
			Belanja Barang dan Jasa	240.000.000,00	240.000.000,00	100
		2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	88.190.407,00	85.957.633,00	97,47
			BELANJA OPERASI	88.190.407,00	85.957.633,00	97,47
			Belanja Barang dan Jasa	88.190.407,00	85.957.633,00	97,47
	D	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		60.445.000,00	58.685.350,00	97,09
		I	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	60.445.000,00	58.685.350,00	97,09
		1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	60.445.000,00	58.685.350,00	97,09
			BELANJA OPERASI	60.445.000,00	58.685.350,00	97,09
			Belanja Barang dan Jasa	60.445.000,00	58.685.350,00	97,09
	E	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		29.855.000,00	27.131.055,00	90,88
		I	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	29.855.000,00	27.131.055,00	90,88
		1	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	29.855.000,00	27.131.055,00	90,88
IV	KECAMATAN BEKASI SELATAN			49.629.627.658,00	43.392.478.358,00	87,43
	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah KABUPATEN/KOTA		28.125.115.658,00	22.056.297.070,00	78,42
		I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	4.751.850,00	95,04
		1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000,00	4.751.850,00	95,04
		II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.543.224.000,00	14.845.556.584,00	72,26
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.538.224.000,00	14.840.929.144,00	72,26
		2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.000.000,00	4.627.440,00	92,55
		III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	54.118.000,00	10.000.000,00	18,48
		1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	13.750.000,00	10.000.000,00	72,73
		2	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	40.368.000,00	0	0
	IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah		583.769.200,00	504.248.029,00	86,38

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2				3	4	5
			1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	19.883.400,00	99,42
			2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	300.000.000,00	287.613.568,00	95,87
			3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	91.604.200,00	78.585.025,00	85,79
			4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000,00	33.333.000,00	66,67
			5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	117.165.000,00	79.940.536,00	68,23
			6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000,00	4.892.500,00	97,85
		V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		24.257.500,00	23.862.000,00	98,37
			1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.257.500,00	23.862.000,00	98,37
			2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.336.746.958,00	6.147.527.446,00	97,01
		VI	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		393.000.000,00	297.364.826,00	75,67
			1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.943.746.958,00	5.850.162.620,00	98,43
		VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		578.000.000,00	520.351.161,00	90,03
			1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	90.000.000,00	77.369.773,00	85,97
			2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	250.000.000,00	212.997.000,00	85,2
			3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	88.000.000,00	80.300.000,00	91,25
			4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000,00	149.684.388,00	99,79
	B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			282.500.000,00	272.915.100,00	96,61
		I	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		242.500.000,00	238.495.100,00	98,35
			1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	242.500.000,00	238.495.100,00	98,35
			2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	40.000.000,00	34.420.000,00	86,05
			3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang	40.000.000,00	34.420.000,00	86,05

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2			3	4	5
			Dilimpahkan			
	C	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		21.119.162.000,00	20.984.935.188,00	99,36
		I	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	20.844.162.000,00	20.713.985.188,00	99,38
			1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	120.000.000,00	116.175.000,00	96,81
			2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.000.000.000,00	980.000.000,00	98
			3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	19.674.162.000,00	19.617.810.188,00	99,71
			4 Evaluasi Kelurahan	50.000.000,00	0	0
		II	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	275.000.000,00	270.950.000,00	98,53
			1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	200.000.000,00	200.000.000,00	100
			2 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	75.000.000,00	70.950.000,00	94,6
	D	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		60.800.000,00	43.645.000,00	71,78
		I	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	60.800.000,00	43.645.000,00	71,78
			1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	60.800.000,00	43.645.000,00	71,78
	E	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		42.050.000,00	34.686.000,00	82,49
		I	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	42.050.000,00	34.686.000,00	82,49
			1 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	42.050.000,00	34.686.000,00	82,49
V	KECAMATAN MEDANSATRIA			37.076.152.366,00	34.872.903.243,00	94,06
	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		20.364.262.104,00	18.304.978.403,00	89,89
		I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	8.670.000,00	86,7
			1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000,00	8.670.000,00	86,7
		II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.044.346.000,00	12.671.570.205,00	90,23
			1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.041.346.000,00	12.668.580.705,00	90,22
			2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000,00	2.989.500,00	99,65

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2		3	4	5
	III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0
		1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0	0
		2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0
	IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	498.047.750,00	447.192.650,00	89,79
		1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	19.382.450,00	96,91
		2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	280.200.050,00	251.869.200,00	89,89
		3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	65.000.000,00	62.742.000,00	96,53
		4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000,00	19.200.000,00	96
		5 Fasilitas Kunjungan Tamu	15.000.000,00	0	0
		6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	92.847.700,00	89.204.000,00	96,08
		7 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000,00	4.795.000,00	95,9
	V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	113.012.660,00	46.486.800,00	41,13
		1 Pengadaan Mebel	50.000.000,00	46.486.800,00	92,97
		2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.012.660,00	0	0
		3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.000.000,00	0	0
	VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.046.309.694,00	4.550.337.610,00	90,17
		1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	450.000.000,00	363.509.078,00	80,78
		2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.596.309.694,00	4.186.828.532,00	91,09
	VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	652.546.000,00	580.721.138,00	88,99
		1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72.000.000,00	56.526.188,00	78,51
		2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	154.000.000,00	114.567.050,00	74,39
		3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.000.000,00	62.845.000,00	83,79
		4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	351.546.000,00	346.782.900,00	98,65
	B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	285.954.000,00	281.365.700,00	98,4

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2		3	4	5
	I	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	280.000.000,00	275.411.700,00	98,36
		1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	280.000.000,00	275.411.700,00	98,36
		2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	5.954.000,00	5.954.000,00	100
		3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5.954.000,00	5.954.000,00	100
	C	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15.344.757.100,00	15.280.684.640,00	99,58
	I	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	15.106.257.100,00	15.045.559.510,00	99,6
		1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	120.000.000,00	115.310.800,00	96,09
		2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	800.000.000,00	800.000.000,00	100
		3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14.175.568.100,00	14.120.999.710,00	99,62
		4 Evaluasi Kelurahan	10.689.000,00	9.249.000,00	86,53
	II	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	238.500.000,00	235.125.130,00	98,58
		1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	160.000.000,00	160.000.000,00	100
		2 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	78.500.000,00	75.125.130,00	95,7
	D	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	965.676.162,00	904.513.500,00	93,67
	I	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	965.676.162,00	904.513.500,00	93,67
		1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	91.060.850,00	42.024.000,00	46,15
		2 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	874.615.312,00	862.489.500,00	98,61
	E	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	115.503.000,00	101.361.000,00	87,76
	I	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	115.503.000,00	101.361.000,00	87,76
		1 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	115.503.000,00	101.361.000,00	87,76
VI	KECAMATAN RAWALUMBU		43.308.758.065,00	40.843.708.767,00	94,31
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN		22.210.924.390,00	19.893.332.530,00	89,57

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2		3	4	5
		PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
		I Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.745.000,00	26.509.000,00	95,55
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000,00	14.308.000,00	95,39
		2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.745.000,00	12.201.000,00	95,73
		II Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.062.948.000,00	13.249.768.196,00	87,96
		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.057.948.000,00	13.245.038.196,00	87,96
		2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000,00	4.730.000,00	94,6
		III Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.375.000,00	5.000.000,00	78,43
		1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6.375.000,00	5.000.000,00	78,43
		IV Administrasi Umum Perangkat Daerah	516.450.000,00	474.362.609,00	91,85
		1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000,00	29.004.189,00	96,68
		2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	244.275.000,00	224.329.597,00	91,83
		3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	25.673.215,00	85,58
		4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000,00	17.632.500,00	88,16
		5 Fasilitas Kunjungan Tamu	0	0	0
		6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	167.175.000,00	153.303.108,00	91,7
		7 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25.000.000,00	24.420.000,00	97,68
		V Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37.536.000,00	36.963.000,00	98,47
		1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.536.000,00	36.963.000,00	98,47
		VI Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.060.020.390,00	5.732.166.348,00	94,59
		1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	350.000.000,00	238.250.972,00	68,07
		2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.710.020.390,00	5.493.915.376,00	96,22
		VII Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	499.850.000,00	368.563.377,00	73,73
		1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	92.245.000,00	49.633.149,00	53,81

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2			3	4	5
		2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	165.000.000,00	80.029.400,00	48,5
		3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.605.000,00	40.159.800,00	94,26
		4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000,00	198.741.028,00	99,37
	B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		151.432.000,00	134.096.388,00	88,55
		I	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	126.432.000,00	112.147.683,00	88,7
		1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	126.432.000,00	112.147.683,00	88,7
		2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	25.000.000,00	21.948.705,00	87,79
		3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	25.000.000,00	21.948.705,00	87,79
	C	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		19.567.231.400,00	19.452.363.728,00	99,41
		I	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	19.357.231.400,00	19.245.964.301,00	99,43
		1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100.000.000,00	97.779.326,00	97,78
		2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	800.000.000,00	800.000.000,00	100
		3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18.422.968.400,00	18.348.184.975,00	99,59
		4	Evaluasi Kelurahan	34.263.000,00	0	0
		II	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	210.000.000,00	206.399.427,00	98,29
		1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	160.000.000,00	160.000.000,00	100
		2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	50.000.000,00	46.399.427,00	92,8
	D	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		1.329.170.275,00	1.316.418.121,00	99,04
		I	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.329.170.275,00	1.316.418.121,00	99,04
		1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	50.000.000,00	48.310.000,00	96,62

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2				3	4	5
			2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1.279.170.275,00	1.268.108.121,00	99,14
	E	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			50.000.000,00	47.498.000,00	95
		I	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		50.000.000,00	47.498.000,00	95
			1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	50.000.000,00	47.498.000,00	95
VII	KECAMATAN BANTARGEBAH				28.399.053.574,00	26.634.044.949,00	93,78
	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			18.723.118.374,00	17.080.284.123,00	91,23
		I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		10.000.000,00	6.546.187,00	65,46
			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00	4.611.168,00	92,22
			2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000,00	1.935.019,00	38,7
		II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		13.748.575.000,00	12.573.335.715,00	91,45
			1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.743.575.000,00	12.568.723.665,00	91,45
			2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.000.000,00	4.612.050,00	92,24
		III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		6.375.000,00	5.000.000,00	78,43
			1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6.375.000,00	5.000.000,00	78,43
		IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah		526.564.000,00	445.533.870,00	84,61
			1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.000.000,00	39.515.528,00	98,79
			2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	307.564.000,00	260.571.992,00	84,72
			3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	87.900.000,00	84.590.250,00	96,23
			4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000,00	11.220.000,00	56,1
			5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.100.000,00	34.786.090,00	62,01
			6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15.000.000,00	14.850.010,00	99
		V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		58.500.000,00	55.755.300,00	95,31
			1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58.500.000,00	55.755.300,00	95,31
		VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3.802.654.374,00	3.561.303.203,00	93,65
			1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	350.000.000,00	267.602.282,00	76,46

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	
1	2			3	4	5	
			2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.452.654.374,00	3.293.700.921,00	95,4
		VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		570.450.000,00	432.809.848,00	75,87
			1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	120.000.000,00	87.624.751,00	73,02
			2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.000.000,00	118.536.717,00	59,27
			3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	98.000.000,00	76.599.380,00	78,16
			4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	152.450.000,00	150.049.000,00	98,43
	B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			204.562.000,00	175.841.907,00	85,96
		I	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		180.000.000,00	154.766.737,00	85,98
			1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	180.000.000,00	154.766.737,00	85,98
		II	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		24.562.000,00	21.075.170,00	85,8
			1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	24.562.000,00	21.075.170,00	85,8
	C	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			8.643.723.200,00	8.601.175.014,00	99,51
		I	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		8.383.723.200,00	8.342.524.236,00	99,51
			1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100.000.000,00	93.225.070,00	93,23
			2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	800.000.000,00	800.000.000,00	100
			3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.469.411.200,00	7.449.299.166,00	99,73
			4	Evaluasi Kelurahan	14.312.000,00	0	0
		II	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		260.000.000,00	258.650.778,00	99,48
			1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	160.000.000,00	160.000.000,00	100
			2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	100.000.000,00	98.650.778,00	98,65
	D	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			790.625.000,00	749.107.905,00	94,75

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2		3	4	5
	I	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	790.625.000,00	749.107.905,00	94,75
		1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	47.675.000,00	40.332.350,00	84,6
		2 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	742.950.000,00	708.775.555,00	95,4
	E	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	37.025.000,00	27.636.000,00	74,64
	I	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	37.025.000,00	27.636.000,00	74,64
		1 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	37.025.000,00	27.636.000,00	74,64
VIII	KECAMATAN MUSTIKAJAYA		40.741.496.834,00	38.734.948.605,00	95,07
	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.157.617.234,00	18.263.533.546,00	90,6
	I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	9.684.000,00	96,84
		1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000,00	9.684.000,00	96,84
	II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.374.070.000,00	12.720.437.625,00	88,5
		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.371.070.000,00	12.717.559.625,00	88,49
		2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000,00	2.878.000,00	95,93
	III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45.500.000,00	41.262.400,00	90,69
		1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	13.050.000,00	10.000.000,00	76,63
		2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	32.450.000,00	31.262.400,00	96,34
	IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	459.481.500,00	424.137.777,00	92,31
		1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000,00	29.806.247,00	99,35
		2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	244.481.500,00	235.335.604,00	96,26
		3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000,00	44.904.070,00	89,81
		4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000,00	24.000.000,00	96
		5 Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000,00	25.040.000,00	83,47
		6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.000.000,00	55.140.000,00	78,77
		7 Penatausahaan Arsip Dinamis	10.000.000,00	9.911.856,00	99,12

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2			3	4	5
			pada SKPD			
		V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	73.880.000,00	73.515.300,00	99,51
		1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	73.880.000,00	73.515.300,00	99,51
		VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.681.803.734,00	4.534.746.478,00	96,86
		1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250.000.000,00	229.873.112,00	91,95
		2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.431.803.734,00	4.304.873.366,00	97,14
		VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	512.882.000,00	459.749.966,00	89,64
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	70.000.000,00	63.283.322,00	90,4
		2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.000.000,00	157.108.895,00	78,55
		3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.000.000,00	51.610.749,00	95,58
		4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	188.882.000,00	187.747.000,00	99,4
	B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		180.000.000,00	157.831.466,00	87,68
		I	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	120.000.000,00	98.700.000,00	82,25
		1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	120.000.000,00	98.700.000,00	82,25
		2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	60.000.000,00	59.131.466,00	98,55
		3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	60.000.000,00	59.131.466,00	98,55
	C	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		19.955.394.600,00	19.889.224.070,00	99,67
		I	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	19.795.394.600,00	19.729.224.070,00	99,67
		1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100.000.000,00	87.874.880,00	87,87
		2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	800.000.000,00	800.000.000,00	100
		3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18.877.469.600,00	18.827.842.940,00	99,74
		4	Evaluasi Kelurahan	17.925.000,00	13.506.250,00	75,35

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2			3	4	5
		II	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	160.000.000,00	160.000.000,00	100
			1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	160.000.000,00	160.000.000,00	100
	D	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		427.285.000,00	407.509.523,00	95,37
		I	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	427.285.000,00	407.509.523,00	95,37
			1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	50.000.000,00	38.951.500,00	77,9
			2 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	377.285.000,00	368.558.023,00	97,69
	E	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		21.200.000,00	16.850.000,00	79,48
		I	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	21.200.000,00	16.850.000,00	79,48
			1 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	21.200.000,00	16.850.000,00	79,48
IX	KECAMATAN JATIASIH			49.023.872.164,00	46.712.964.170,00	95,29
	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		25.993.962.764,00	23.879.470.735,00	91,87
		I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000,00	18.529.000,00	61,76
			1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.000.000,00	10.814.000,00	54,07
			2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000,00	7.715.000,00	77,15
		II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.441.957.000,00	17.682.246.530,00	90,95
			1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.421.957.000,00	17.662.507.030,00	90,94
			2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000,00	9.950.000,00	99,5
			3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.000.000,00	9.789.500,00	97,9
		III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.375.000,00	5.000.000,00	78,43
			1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6.375.000,00	5.000.000,00	78,43
		IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	568.594.700,00	555.680.180,00	97,73
			1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	18.524.180,00	92,62
			2 Penyediaan Bahan Logistik	349.261.700,00	344.749.000,00	98,71

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2			3	4	5
			Kantor			
		3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	72.270.000,00	72.066.000,00	99,72
		4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000,00	15.975.000,00	79,88
		5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	49.500.000,00	47.983.000,00	96,94
		6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52.563.000,00	51.470.000,00	97,92
		7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000,00	4.913.000,00	98,26
		V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	158.728.800,00	133.347.900,00	84,01
		1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	158.728.800,00	133.347.900,00	84,01
		VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.312.228.144,00	5.077.298.493,00	95,58
		1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	350.000.000,00	316.898.588,00	90,54
		2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.962.228.144,00	4.760.399.905,00	95,93
		VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	476.079.120,00	407.368.632,00	85,57
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	82.850.000,00	65.233.532,00	78,74
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	171.279.120,00	121.345.100,00	70,85
		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.950.000,00	21.500.000,00	97,95
		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000,00	199.290.000,00	99,65
	B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		221.732.000,00	205.765.981,00	92,8
		I	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	157.382.000,00	143.265.781,00	91,03
		1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	157.382.000,00	143.265.781,00	91,03
		2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	64.350.000,00	62.500.200,00	97,13
		3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.350.000,00	62.500.200,00	97,13
	C	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		22.502.725.400,00	22.330.391.429,00	99,23
		I	Kegiatan Pemberdayaan	22.262.725.400,00	22.090.391.429,00	99,23

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2			3	4	5
			Kelurahan			
		1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	120.000.000,00	119.100.000,00	99,25
		2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	100
		3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20.894.442.400,00	20.771.291.429,00	99,41
		4	Evaluasi Kelurahan	48.283.000,00	0	0
		II	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	240.000.000,00	240.000.000,00	100
		1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	240.000.000,00	240.000.000,00	100
		2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	0	0	0
	D	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		267.014.000,00	259.954.025,00	97,36
		I	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	267.014.000,00	259.954.025,00	97,36
		1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	38.438.000,00	37.472.000,00	97,49
		2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	228.576.000,00	222.482.025,00	97,33
	E	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		38.438.000,00	37.382.000,00	97,25
		I	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	38.438.000,00	37.382.000,00	97,25
		1	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	38.438.000,00	37.382.000,00	97,25
X	KECAMATAN PONDOKGEDE			41.847.553.326,00	40.027.649.016,00	95,65
	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		22.665.058.526,00	21.031.132.809,00	92,79
		I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.800.000,00	7.650.000,00	98,08
		1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.800.000,00	7.650.000,00	98,08
		II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.223.751.000,00	14.994.552.580,00	92,42
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.219.751.000,00	14.990.592.180,00	92,42
		2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.000.000,00	3.960.400,00	99,01
		III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	102.338.800,00	49.731.900,00	48,6
		1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	41.239.800,00	34.731.900,00	84,22

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2			3	4	5
		2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	19.125.000,00	15.000.000,00	78,43
		3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	41.974.000,00	0	0
		IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	464.092.000,00	388.321.896,00	83,67
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	18.217.232,00	91,09
		2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	262.092.000,00	222.483.534,00	84,89
		3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	75.000.000,00	64.716.135,00	86,29
		4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000,00	38.240.000,00	76,48
		5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000,00	11.832.495,00	98,6
		6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.000.000,00	15.905.000,00	63,62
		7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20.000.000,00	16.927.500,00	84,64
		V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	72.205.000,00	66.300.001,00	91,82
		1	Pengadaan Mebel	28.756.000,00	27.765.001,00	96,55
		2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.449.000,00	38.535.000,00	88,69
		VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.278.058.226,00	5.080.817.273,00	96,26
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	0	0
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	430.000.000,00	329.643.144,00	76,66
		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.843.058.226,00	4.751.174.129,00	98,1
		VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	516.813.500,00	443.759.159,00	85,86
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	108.000.000,00	88.619.300,00	82,05
		2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	165.000.000,00	115.271.000,00	69,86
		3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.813.500,00	41.300.000,00	94,26
		4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000,00	198.568.859,00	99,28
	B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		240.000.000,00	212.782.762,00	88,66
		I	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	210.000.000,00	188.714.012,00	89,86

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2				3	4	5
			1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	210.000.000,00	188.714.012,00	89,86
			2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	30.000.000,00	24.068.750,00	80,23
			3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	30.000.000,00	24.068.750,00	80,23
	C	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			17.650.469.800,00	17.541.385.350,00	99,38
		I	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		17.330.469.800,00	17.231.920.800,00	99,43
			1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	150.000.000,00	148.529.100,00	99,02
			2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100
			3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16.130.469.800,00	16.083.391.700,00	99,71
			4	Evaluasi Kelurahan	50.000.000,00	0	0
		II	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		320.000.000,00	309.464.550,00	96,71
			1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	200.000.000,00	200.000.000,00	100
			2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	120.000.000,00	109.464.550,00	91,22
	D	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			1.252.675.000,00	1.205.223.095,00	96,21
		I	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		1.252.675.000,00	1.205.223.095,00	96,21
			1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	64.500.000,00	56.459.490,00	87,53
			2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1.188.175.000,00	1.148.763.605,00	96,68
	E	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			39.350.000,00	37.125.000,00	94,35
		I	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		39.350.000,00	37.125.000,00	94,35
			1	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	39.350.000,00	37.125.000,00	94,35
XI	KECAMATAN PONDOKMELATI				32.519.540.866,00	29.753.656.119,00	91,49
	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			17.726.639.466,00	15.611.636.807,00	88,07
		I	Perencanaan, Penganggaran,		1.000.000,00	0	0

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2		3	4	5
		dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.000.000,00	0	0
	II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.520.241.000,00	11.727.194.655,00	86,74
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.515.241.000,00	11.727.194.655,00	86,77
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000,00	0	0
	III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.400.000,00	20.000.000,00	78,74
	1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.400.000,00	20.000.000,00	78,74
	IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	374.487.650,00	293.706.202,00	78,43
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	0	0
	2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	189.568.000,00	164.811.960,00	86,94
	3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	53.384.650,00	48.123.884,00	90,15
	4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40.000.000,00	25.215.000,00	63,04
	5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	71.535.000,00	55.555.358,00	77,66
	V	Pengediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.368.610.816,00	3.183.080.322,00	94,49
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200.000.000,00	170.646.481,00	85,32
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.168.610.816,00	3.012.433.841,00	95,07
	VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	436.900.000,00	387.655.628,00	88,73
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	70.000.000,00	58.059.104,00	82,94
	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	147.000.000,00	117.633.829,00	80,02
	3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000,00	31.302.000,00	89,43
	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	184.900.000,00	180.660.695,00	97,71
	B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	232.309.000,00	198.497.350,00	85,45
	I	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	217.509.000,00	197.097.350,00	90,62

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2				3	4	5
			1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	217.509.000,00	197.097.350,00	90,62
			2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	14.800.000,00	1.400.000,00	9,46
			3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	14.800.000,00	1.400.000,00	9,46
	C	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			14.023.620.400,00	13.440.845.750,00	95,84
		I	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		13.736.613.400,00	13.168.909.760,00	95,87
			1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	166.700.000,00	158.730.000,00	95,22
			2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	800.000.000,00	800.000.000,00	100
			3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12.744.413.400,00	12.210.179.760,00	95,81
			4	Evaluasi Kelurahan	25.500.000,00	0	0
		II	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		287.007.000,00	271.935.990,00	94,75
			1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	160.000.000,00	160.000.000,00	100
			2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	127.007.000,00	111.935.990,00	88,13
	D	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			496.972.000,00	470.897.712,00	94,75
		I	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		496.972.000,00	470.897.712,00	94,75
			1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	60.000.000,00	44.612.500,00	74,35
			2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	436.972.000,00	426.285.212,00	97,55
	E	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			40.000.000,00	31.778.500,00	79,45
		II	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		40.000.000,00	31.778.500,00	79,45
			1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	40.000.000,00	31.778.500,00	79,45
XII	KECAMATAN JATISAMPURNA				37.768.093.214,00	35.270.345.886,00	93,39
	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			21.703.742.814,00	19.617.092.567,00	90,39
		I	Perencanaan, Penganggaran,		3.000.000,00	3.000.000,00	100

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2		3	4	5
		dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	100
	II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.750.806.000,00	14.991.823.863,00	89,5
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.747.806.000,00	14.988.823.863,00	89,5
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	100
	III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	53.900.000,00	0	0
	1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0	0
	2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	53.900.000,00	0	0
	III	Administrasi Umum Perangkat Daerah	487.991.900,00	397.141.748,00	81,38
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	16.983.555,00	84,92
	2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	273.864.672,00	267.159.470,00	97,55
	3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	52.677.228,00	51.844.223,00	98,42
	4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000,00	18.084.000,00	90,42
	5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000,00	0	0
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66.450.000,00	38.630.500,00	58,13
	7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000,00	4.440.000,00	88,8
	IV	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22.576.000,00	20.912.400,00	92,63
	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.576.000,00	20.912.400,00	92,63
	V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.718.768.914,00	3.628.876.948,00	97,58
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200.000.000,00	199.802.222,00	99,9
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.518.768.914,00	3.429.074.726,00	97,45
	VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	666.700.000,00	575.337.608,00	86,3
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	95.000.000,00	83.850.350,00	88,26
	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	250.000.000,00	172.967.038,00	69,19
	3	Pemeliharaan Peralatan dan	43.000.000,00	42.221.040,00	98,19

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2			3	4	5
			Mesin Lainnya			
		4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	278.700.000,00	276.299.180,00	99,14
	B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		159.755.000,00	155.325.494,00	97,23
		I	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0	0	0
		1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0	0	0
		II	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	148.415.000,00	144.098.901,00	97,09
		1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	148.415.000,00	144.098.901,00	97,09
		III	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	11.340.000,00	11.226.593,00	99
		1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	11.340.000,00	11.226.593,00	99
	C	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		14.727.381.400,00	14.380.467.031,00	97,64
		I	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	14.477.381.400,00	14.130.996.755,00	97,61
		1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	120.000.000,00	110.936.000,00	92,45
		2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	100
		3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	13.207.381.400,00	12.920.060.755,00	97,82
		4	Evaluasi Kelurahan	50.000.000,00	0	0
		II	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	250.000.000,00	249.470.276,00	99,79
		1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	200.000.000,00	200.000.000,00	100
		2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	50.000.000,00	49.470.276,00	98,94
	D	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		1.127.214.000,00	1.099.035.794,00	97,5
		I	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.127.214.000,00	1.099.035.794,00	97,5
		1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	64.814.000,00	48.140.000,00	74,27

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2				3	4	5
				Kecamatan			
			2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1.062.400.000,00	1.050.895.794,00	98,92
	E	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			50.000.000,00	18.425.000,00	36,85
		I	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		50.000.000,00	18.425.000,00	36,85
			1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	50.000.000,00	18.425.000,00	36,85

Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2025.

J.J Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (KESATUAN BANGSA DAN POLITIK)

Tabel 1.40
Realisasi Belanja Daerah Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (KESATUAN BANGSA DAN POLITIK)

N	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				ANGGARAN	REALISASI	%
1	2				3	4	5
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KESATUAN BANGSA DAN POLITIK)				38.550.364.050,00	33.393.054.273,00	86,62
	I	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			38.550.364.050,00	33.393.054.273,00	86,62
	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			12.765.800.250,00	11.171.327.426,00	87,51
		I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		136.640.000,00	62.546.000,00	45,77
			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	111.640.000,00	55.678.000,00	49,87
			2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000,00	6.868.000,00	27,47
		II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		10.596.517.000,00	9.641.432.870,00	90,99
			1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.581.517.000,00	9.629.437.870,00	91
			2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	15.000.000,00	11.995.000,00	79,97
		III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		230.000.000,00	189.000.039,00	82,17
			1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	200.000.000,00	184.000.039,00	92
			2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000,00	5.000.000,00	16,67
			3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0

N	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	%
1	2		3	4	5
	IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.038.700.000,00	589.720.012,00	56,77
		1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	350.000.000,00	345.193.842,00	98,63
		2 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.700.000,00	38.278.750,00	98,91
		3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000,00	26.740.000,00	53,48
		4 Fasilitas Kunjungan Tamu	150.000.000,00	10.695.000,00	7,13
		5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.000.000,00	72.029.900,00	20,58
		6 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100.000.000,00	96.782.520,00	96,78
	V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0
		1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0
	VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	268.543.250,00	267.249.125,00	99,52
		1 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	268.543.250,00	267.249.125,00	99,52
	VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	495.400.000,00	421.379.380,00	85,06
		1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	400.000.000,00	375.709.380,00	93,93
		2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	95.400.000,00	45.670.000,00	47,87
	B	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.653.737.300,00	1.371.461.000,00	82,93
	I	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.653.737.300,00	1.371.461.000,00	82,93
		1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	500.000.000,00	365.547.500,00	73,11
		2 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0	0	0
		3 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	0	0	0
		4 Pembentukan Paskibraka	1.153.737.300,00	1.005.913.500,00	87,19
	C	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	9.957.582.000,00	9.565.224.044,00	96,06

N	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	%
1	2		3	4	5
	I	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	9.957.582.000,00	9.565.224.044,00	96,06
		1 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	9.868.672.000,00	9.565.224.044,00	96,93
		2 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	88.910.000,00	0	0
	D	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	9.779.956.500,00	8.565.000.000,00	87,58
	I	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	9.779.956.500,00	8.565.000.000,00	87,58
		1 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	9.300.000.000,00	8.565.000.000,00	92,1
		2 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	479.956.500,00	0	0
	E	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1.066.848.000,00	631.650.000,00	59,21
	I	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1.066.848.000,00	631.650.000,00	59,21
		1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	1.066.848.000,00	631.650.000,00	59,21

N	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				ANGGARAN	REALISASI	%
1	2				3	4	5
				Kepercayaan di Daerah			
	F	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			3.326.440.000,00	2.088.391.803,00	62,78
		I	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		3.326.440.000,00	2.088.391.803,00	62,78
			1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	334.240.000,00	103.500.000,00	30,97
			2	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	537.200.000,00	521.719.800,00	97,12
			3	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	2.455.000.000,00	1.463.172.003,00	59,6

Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2025.

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 Bab IV Halaman IV-1 sampai dengan IV-24. Permasalahan dan isu-isu strategis merupakan salah satu bagian penting dari dokumen perencanaan karena akan menjadi salah satu pertimbangan dalam perumusan Tujuan dan Sasaran pembangunan jangka menengah Kota Bekasi. Penyajian permasalahan dan isu-isu strategis diharapkan dapat menjelaskan butir-butir penting yang akan menentukan kinerja pembangunan Kota Bekasi mendatang.

1) Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang telah dicapai saat ini dan yang telah

direncanakan sebelumnya, serta antara kesenjangan antara kondisi yang ingin dicapai pada masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Tujuan perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah mengidentifikasi berbagai factor yang mempengaruhi kegagalan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja pembangunan daerah pada masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan untuk memetakan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terdapat 2 (dua) kategori permasalahan yang perlu diidentifikasi yakni permasalahan pembangunan daerah dan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, yang keduanya saling terkait satu dengan lainnya.

a) Permasalahan Terkait Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Sesuai amanah Undang-Undang Pemerintahan Daerah, salah satu indikator pembangunan daerah adalah kinerja kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 menjabarkan indikator-indikator kesejahteraan masyarakat secara lebih rinci sebagaimana telah dibahas pada Bab 2 dokumen ini. Permasalahan aspek kesejahteraan masyarakat pada bagian ini merupakan hasil identifikasi terhadap indikator kesejahteraan masyarakat skala kota yang mencerminkan outcome serta dampak (impact) dari pembangunan daerah yang telah dilakukan selama ini. Beberapa indikator kesejahteraan yang telah diidentifikasinya adalah sebagai berikut:

- Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro yang

digunakan untuk menggambarkan perkembangan aktivitas perekonomian suatu wilayah dari tahun ke tahun yang diukur melalui perubahan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Indikator ini menunjukkan sejauh mana kegiatan produksi barang dan jasa di suatu daerah mengalami peningkatan atau perlambatan dalam periode tertentu.

Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi menunjukkan dinamika yang cukup beragam dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 2,55 persen. Selanjutnya pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 4,96 persen, kemudian kembali meningkat pada tahun 2023 dengan capaian 5,43 persen. Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi sedikit menurun menjadi 5,19 persen, dan pada tahun 2025 kembali meningkat hingga mencapai 5,39 persen. Perekonomian Kota Bekasi secara umum menunjukkan kecenderungan pertumbuhan yang positif dan relatif stabil dalam beberapa tahun terakhir, meskipun terdapat sedikit fluktuasi antar tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di Kota Bekasi terus berkembang dan menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan kinerja pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat.

- Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kota Bekasi dalam tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi, hingga tahun 2025 mencapai 3,96 persen dari total penduduk Kota Bekasi. Tingkat kemiskinan tersebut tergolong rendah dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat maupun nasional. Namun upaya untuk mengurangi kemiskinan masih perlu dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Bekasi yang lebih merata. Salah satu aspek penting dari tingkat kemiskinan adalah indeks kedalaman kemiskinan yang mencerminkan seberapa dalam perbedaan pendapatan penduduk miskin terhadap garis kemiskinannya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa permasalahan kemiskinan merupakan

masalah laten yang perlu terus diantisipasi oleh pemerintah Kota Bekasi pada masa mendatang.

- Pengangguran

Perkembangan jumlah pengangguran di Kota Bekasi menunjukkan dinamika yang berfluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2021 jumlah pengangguran tercatat sebanyak 161.311 jiwa, kemudian meningkat pada tahun 2022 menjadi 167.974 jiwa. Selanjutnya pada tahun 2023 terjadi penurunan yang cukup signifikan menjadi 104.170 jiwa, dan pada tahun 2024 mengalami sedikit peningkatan menjadi 105.565 jiwa. Pada tahun 2025 jumlah pengangguran kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga mencapai 98.963 jiwa. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum upaya penanganan pengangguran di Kota Bekasi mulai menunjukkan perbaikan, seiring dengan meningkatnya kesempatan kerja serta penguatan berbagai program ketenagakerjaan di daerah. Jumlah pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka terdiri dari mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

- Prevelensi Kekurangan Gizi pada Balita

Persentase balita stunting di Kota Bekasi tercatat sebesar 13,8% meskipun sudah dibawah standar WFO sebesar 20% dan dibawah nasional yaitu 24,4% serta dibawah Provinsi Jawa Barat yaitu 24,5%, namun angka ini masih perlu didorong untuk dikurangi. Faktor penyebabnya antara lain, terdapat ketimpangan ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial, ketahanan pangan, sistem kesehatan, perlindungan sosial, lingkungan permukiman dan urbanisasi yang mempengaruhi tumbuh kembang balita serta kecukupan gizi dan kesehatan di semua siklus kehidupan.

- Keluarga Pra-Sejahtera

Menurut informasi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), tingkat kesejahteraan sebuah keluarga dapat dibagi ke dalam 5 (lima) tahap, yaitu: Pra-Sejahtera (sangat miskin), Sejahtera Tahap I (miskin), Sejahtera Tahap II (hampir miskin), Sejahtera Tahap III (tidak miskin), dan Sejahtera Tahap III Plus. Selama kurun waktu tahun 2013-2017, persentase Keluarga Pra-Sejahtera ditambah Keluarga Sejahtera I dibandingkan jumlah seluruh keluarga di Kota Bekasi, memperlihatkan penurunan, yakni dari 21,88 persen (120.300 keluarga) menjadi 20,47 persen (116.233 keluarga) pada tahun 2015 dan pada tahun 2017 jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I menjadi 267.071 keluarga. Penurunan ini mengindikasikan secara eksplisit kesejahteraan keluarga di Kota Bekasi mulai meningkat menuju tahapan Keluarga Sejahtera II dan seterusnya. Dengan kata lain, ekonomi masyarakat di Kota Bekasi membaik, namun proporsi Keluarga Pra-Sejahtera yang masih di atas 20 persen merupakan masalah yang perlu diantisipasi Pemerintah Kota pada masa mendatang.

b) Permasalahan Terkait Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan daerah. Daya saing daerah merupakan salah satu tinjauan tingkat keberhasilan pembangunan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk bertahan dalam menghadapi tantangan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan analisis terhadap 10 (sepuluh) indikator daya saing daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, terdapat 1(satu) indikator di lingkungan pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja belum optimal, yakni Produktivitas Total Daerah.

Dalam pembahasan ini selain permasalahan terkait indikator daya saing sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tersebut, pembahasan dilengkapi

dengan indikator daya saing daerah berdasarkan referensi lainnya. Berikut pembahasan permasalahan terkait aspek daya saing daerah di kota Bekasi:

- Keamanan

Perkembangan kriminalitas di Kota Bekasi menunjukkan dinamika yang berfluktuasi dari waktu ke waktu. Pada periode tahun 2012 hingga 2015, angka penanganan kriminalitas relatif stabil dengan capaian sekitar 1,87 hingga 1,92. Pada tahun 2016 terjadi peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 6,54, seiring meningkatnya jumlah perkara yang berhasil ditangani oleh aparat penegak hukum. Dalam beberapa tahun berikutnya jumlah kasus kriminalitas di Kota Bekasi menunjukkan kecenderungan menurun, seperti pada tahun 2018 yang mencatat 999 kasus kriminalitas, dengan 983 kasus berhasil ditangani atau tingkat penanganan sebesar 1,60. Pada periode yang lebih mutakhir, dinamika keamanan masih terjadi namun relatif terkendali, meskipun pada beberapa jenis kasus tertentu masih ditemukan peningkatan. Sebagai contoh, pada tahun 2024 tercatat sekitar 313 kasus kekerasan terhadap anak di Kota Bekasi, meningkat dibandingkan 220 kasus pada tahun 2023, sehingga menunjukkan perlunya penguatan upaya pencegahan dan perlindungan masyarakat di wilayah tersebut.

- Ketergantungan penduduk

Rasio ketergantungan menunjukkan rasio antara penduduk yang tidak produktif terhadap penduduk produktif dalam satu tahun tertentu. Kategori penduduk produktif adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun sedangkan penduduk di luar usia tersebut dikategorikan sebagai penduduk tidak produktif. Data jumlah penduduk berdasarkan usia tersedia di dokumen Kota Bekasi Dalam Angka.

Pada tahun 2017, dengan jumlah penduduk sebesar 2.873.484 jiwa rasio ketergantungan penduduk di Kota Bekasi sebesar 38,39 persen. Tahun 2018, dengan jumlah penduduk sebanyak 2.943.859 jiwa rasio ketergantungan penduduk tercatat sebesar 37,95 persen,

pada tahun 2019, dengan jumlah penduduk 3.003.920 jiwa rasio ketergantungan penduduk tercatat sebesar 37,43 persen.

Sedangkan pada tahun 2020 jumlah penduduk di bekasi menurun hanya sebanyak 2.543.676 jiwa dengan rasio ketergantungan sebesar 38,92 persen. Penurunan jumlah penduduk ini antara lain karena sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik dilakukan hanya 10 tahun sekali, untuk tahun-tahun di antara sensus digunakan data estimasi penduduk. Sensus penduduk dilaksanakan pada tahun 2010 dan 2020, maka jumlah penduduk tahun 2019 digunakan data estimasi, sehingga diperoleh jumlah yang lebih tinggi.

- Aksesibilitas dan sistem logistic

Aksesibilitas dan sistem logistik kota merupakan salah satu komponen yang mendukung daya saing daerah. Berdasarkan gambaran terkait system transportasi kota, maka secara struktural Kota Bekasi berpotensi memiliki aksesibilitas yang baik untuk mendukung pergerakan dalam dan luar kota.

Namun permasalahan muncul dari ketidakseimbangan antara penggunaan kendaraan pribadi dengan angkutan umum yang mengakibatkan kapasitas jaringan jalan terlampaui. Sebagai akibatnya tingkat pelayanan jaringan jalan di Kota Bekasi menjadi rendah dan pada akhirnya mengakibatkan pergerakan menjadi terhambat. Tingkat pelayanan jalan yang semakin menurun juga dipengaruhi oleh sistem logistik (pergerakan angkutan barang) yang belum terencana dengan baik. Pemisahan sistem angkutan orang dan barang belum dilakukan secara optimal sehingga percampuran sistem pergerakan mengakibatkan sistem logistik kota belum optimal kinerjanya.

- Kapasitas Keuangan Daerah

Salah satu aspek penting dalam daya saing daerah adalah kemampuan keuangan daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kondisi keuangan daerah sangat mempengaruhi kapasitas Pemerintah Kota Bekasi dalam

menyediakan layanan publik, pembangunan infrastruktur, serta pelayanan kepada masyarakat. Pada tahun 2025, pengelolaan keuangan daerah Kota Bekasi menunjukkan dinamika yang cukup berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah. Berdasarkan data APBD, pendapatan daerah pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai sekitar Rp7,244 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp6,798 triliun. Namun demikian, optimalisasi pendapatan daerah masih menjadi tantangan, terutama dalam meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bekasi terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penguatan sistem pemungutan pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta optimalisasi potensi sumber-sumber pendapatan daerah guna mendukung keberlanjutan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Bekasi.

- **Kinerja BUMD**

Salah satu komponen penting pada aspek daya saing daerah yang terkait keuangan daerah adalah kinerja BUMD. Berdasarkan catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kinerja laporan keuangan 4 (empat) BUMD Kota Bekasi, yakni PDAM "Tirta Patriot", PD Migas, BPR Syariah, dan Mitra Patriot, teridentifikasi kontribusi keempat BUMD terhadap pendapatan Kota Bekasi masih kurang optimal. Permasalahan lain dari kinerja BUMD Kota Bekasi adalah menyangkut penatausahaan dan pengelolaan aset tetap yang belum memadai.

c) Permasalahan Terkait Aspek Pelayanan Umum

Permasalahan pada aspek ini merupakan permasalahan pembangunan sesuai urusan pemerintah, yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun

2019 tentang Penyusunan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Permasalahan yang disajikan pada bagian ini merupakan hasil dari kajian masing-masing bidang/urusan yang ada di Pemerintahan Kota Bekasi terhadap kinerja capaian masing-masing urusan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019, penyajian permasalahan dilakukan dengan memadukan dan mempertimbangkan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja dan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi.

a) Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Urusan pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang telah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018. Permasalahan yang masih terdapat dalam penyelenggaraan urusan pendidikan diantaranya:

- a. Masih terdapatnya penduduk usia sekolah tidak bersekolah dan anak putus sekolah, hal ini disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya faktor ekonomi yaitu masih banyak penduduk usia sekolah dari keluarga tidak mampu sehingga tidak dapat masuk ke sekolah milik pemerintah, selain itu biaya transportasi melebihi biasa sekolah, Adapun faktor lingkungan atau pergaulan, semakin banyaknya kenalan remaja yang diakibatkan dari maraknya permainan game online. Berdasarkan data yang ada pada tahun 2021 di dinas Pendidikan terdapat 1.349 anak yang mengalami putus sekolah. Permasalahan-permasalahan ini menjadi perhatian pemerintah untuk dapat mengurangi angka putus sekolah melalui pemberian beasiswa maupun penyediaan biaya operasional sekolah untuk setiap jenjang Pendidikan.

- b. Sebaran lokasi sekolah tidak berdasarkan kepadatan penduduk, bisa dilihat pada jumlah rombongan di sekolah milik pemerintah melebihi daya tampung (tidak sesuai dengan SPM bidang Pendidikan), selain itu juga sebaran pendidik/kependidikan tidak sesuai kebutuhan.
- c. Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana sekolah, capaian pada kondisi ruang kelas dalam kondisi baik masih belum 100%.
- d. Kurangnya Pengendalian Lembaga Pendidikan yang dikelola oleh Masyarakat dan Pelayanan Pendidikan berbasis IT belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam " Smart School", dapat dilihat pada jumlah sekolah dengan akreditasi di kota Bekasi.

2. Urusan Kesehatan

Urusan bidang Kesehatan, permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan (DINKES) Kota Bekasi yaitu:

- Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas dan rumah sakit tidak merata
- Belum tercapainya Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap
- Masih tingginya kasus anemia baik pada remaja putri maupun ibu hamil,
- Masih kurangnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan seperti Puskesmas dan RSUD Kelas D
- belum seluruh lembaga kesehatan terakreditasi;
- angka harapan hidup rata-rata masih di bawah kota-kota besar di Indonesia;
- rendahnya persentase pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif; dan
- gaya hidup dan lingkungan di Kota Bekasi menyebabkan berkembangnya penyakit akibat gaya hidup, tidak lagi penyakit menular.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar indicator kinerja untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sudah melampaui targetnya. Hanya terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang realisasinya belum melampaui target capaian. Permasalahan yang menjadi penentu dalam ketercapaian kinerja bidang pekerjaan umum dan penataan ruang antara lain:

- Masih tingginya/luas sebaran titik banjir diakibatkan karena system drainase yang belum terintegrasi dengan baik sehingga fungsinya belum optimal serta masih terjadinya sumbatan sampah pada saluran.
- adanya pendangkalan sungai;
- belum terpenuhinya proporsi ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Bekasi;
- banyaknya hambatan samping dan persimpangan;
- adanya alih fungsi lahan;
- sulitnya pengadaan lahan untuk pembangunan fisik Kota Bekasi;

Beberapa permasalahan umum yang terjadi lainnya adalah adanya irisan kewenangan antar instansi di Kota Bekasi dalam menjalankan indicator kinerja terkait penataan ruang.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DISPERKIMTAN) dalam urusan perumahan dan kawasan permukiman adalah:

- Belum tercapainya layanan air minum
- Belum tercapainya layanan sanitasi
- Belum optimalnya penanganan pengembangan jaringan air dan sanitasi
- Masih ada lokasi kumuh
- Masih adanya kebiasaan buruk masyarakat, yang tidak menghargailingkungan tempat tinggalnya

- Kurang tersosialisasikannya program-program pemerintah terkait kekumuhan

5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Stabilitas keamanan dan ketertiban mutlak harus dapat dijaga Kota Bekasi agar tetap berkembang sektor industri pengolahan dan salah satu tempat untuk berinvestasi. Permasalahan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yang ada di Kota Bekasi menurut perspektif Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) adalah:

- Masih lemahnya penyelesaian pelanggaran perda
- Masih kurang dan belum optimalnya personil Linmas yang terlibat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
- Masih adanya unjuk rasa dan kejadian insidentil yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada

Pada urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat juga memiliki permasalahan terkait Kebakaran yang mengganggu perlindungan masyarakat menurut Dinas Pemadam Kebakaran (DISDAMKAR), adalah:

- Belum tersedian pos sektor diseluruh kecamatan
- Belum tersedia mobil pemadam kebakaran sesuai dengan SPM
- Masih kurangnya kompetensi SDM dalam penanggulangan kebakaran
- Masih rendahnya jumlah bangunan publik yang memenuhi standar penanganan kebakaran
- Belum optimalnya SOP dan kebijakan penanganan bencana tingkat Kabupaten (SOP, RPB, RAD mitigasi, Renkon, Renoperasi, perda PB,Perbup status darurat)
- Masih kurangnya kompetensi SDM dalam penanggulangan bencana
- Kurangnya prasarana dan sarana penanggulangan bencana

6. Urusan Sosial

Berdasarkan hasil evaluasi dalam studi pendahuluan menunjukkan bahwa seluruh indikator sudah mencapai target RPJMD kecuali penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Namun demikian, Pemerintah Kota Bekasi masih memiliki permasalahan yang dihadapi, khususnya oleh Dinas Sosial (DINSOS) terkait dengan urusan Sosial, yaitu:

- Belum optimalnya pendataan dan penanganan PPKS
- Minimnya jumlah PSKS yang tersertifikasi
- Minimnya luas area TMP

b) Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

Permasalahan yang dihadapi oleh Kota Bekasi dalam urusan Ketenagakerjaan menurut persepsi Dinas Tenaga Kerja DISNAKER) adalah:

- Rendahnya permintaan pasar
- Jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia
- Belum optimalnya proses penempatan pencari kerja
- Kurangnya keterampilan dan keahlian pencari kerja

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Beberapa permasalahan terkait dengan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dihadapi oleh Kota Bekasi berdasarkan tinjauan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) yaitu:

- Kurangnya pemahaman terkait pengarusutamaan gender
- Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap permasalahan perempuan (KDRT)
- Pemenuhan hak-hak anak masih belum menjadi agenda utama para pihak khususnya dalam bidang pendidikan perlunya Sekolah Ramah Anak dan pemenuhan Hak Anak Disabilitas, bidang

kesehatan perlunya Puskesmas Ramah Anak serta pemenuhan ruang bermain ramah anak dan aksesibilitas bagi anak disabilitas

- Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap permasalahan anak

3. Urusan Pangan

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan Pangan di Kota Bekasi menurut kacamata Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) adalah:

- Masih kurangnya stok cadangan pangan pemerintah daerah
- Kenaikan harga komoditas pangan strategis (stabilisasi harga pangan strategis)
- Masih adanya lahan kosong Milik Pemerintah Kabupaten Bekasi (Fasos/Fasum) dan lahan pekarangan milik Swasta di wilayah RW/Kel/Kec/di Kota Bekasi yang belum di fungsikan keanekaragaman pangan (P2L) dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kebutuhan pokok serta mencegah terjadinya Stunting.
- Tidak tersedianya ruangan pemeriksaan (Laboratorium) Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)

4. Urusan Pertanahan

Permasalahan yang dihadapi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DISPERKIMTAN) adalah:

- tidak semua kegiatan memiliki dokumen perencanaan pengadaan tanah yang memadai;
- masalah sengketa tanah;
- administrasi tidak lengkap;
- tidak ada kesepakatan antar pihak yang bersengketa; dan
- proses pembebasan tanah yang belum efisien.

5. Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan Lingkungan Hidup di Kota Bekasi berdasarkan rangkuman dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yaitu:

- Masih Kurangnya Excavator
- Masih Kurangnya Dump truck
- Masih Kurangnya TPS3R
- Proyek PSEL dengan
- Mekanisme KSDPK

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan identifikasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) adalah terkait masih rendahnya kesadaran sebagian penduduk atas kepemilikan dokumen kependudukan dan dokumen catatan sipil terutama untuk penduduk miskin, serta akurasi data kependudukan, pemanfaatan data kependudukan, dan permasalahan terkait administrasi kependudukan lainnya.

7. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Bekasi berdasarkan kajian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) adalah:

- Masih sedikitnya penganggaran untuk menunjang kegiatan pemasaran produk uppka
- Ketidaksiapan pasangan untuk menikah menimbulkan banyak risiko kesehatan terhadap ibu dan bayi yang dilahirkan
- Masih banyak yang menikah di usia muda. Satu dari sembilan anak perempuan berusia 20-24 tahun sudah menikah sebelum mencapai usia 18 tahun.

- Kurangnya dukungan Sumber Daya Manusia dan Pemerintah Pusat dan Daerah
- Setiap tahunnya, banyak sekali bayi yang dilahirkan oleh orang-orang yang masih berusia sekitar 15 hingga 19 tahun.
- Kurangnya Perencanaan Keluarga.
- Masih rendahnya partisipasi fasilitasi layanan kesehatan dalam layanan KB terutama dari Sektor Swasta
- Rendahnya SDM yang mampu melayani vasektomi
- Peserta KB Aktif (PA) dengan MKJP masih rendah

8. Urusan Perhubungan

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan Perhubungan di Kota Bekasi menurut inventarisasi Dinas Perhubungan (DISHUB) adalah:

- Tidak seimbangnya pertumbuhan jumlah kendaraan dengan penambahan jaringan jalan
- Belum Mencukupi Sumber Daya Manusia (SDM) Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRL) yang berkompeten.
- Belum terbangunnya koordinasi lintas sektor yang efektif dalam penerapan dan pengendalian Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
- Fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, traffic light) memerlukan perbaikan / penggantian secara berkala
- Banyaknya titik parkir liar yang mengambil bahu badan jalan
- Kurangnya Sosialisasi keselamatan berkendara di jalan
- Fasilitas pendukung transportasi (terminal, halte) belum memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi
- Rendahnya aksesibilitas ke angkutan umum (pola jaringan trayek angkutan umum belum tertata membentuk spiral jalur utama memusat ke terminal utama)
- Kurangnya sosialisasi keberadaan angkutan umum massal
- Kurangnya koordinasi stakeholder berkaitan dengan pengelolaan angkutan umum massal

- Belum adanya evaluasi tata kelola angkutan umum massal
- Kurangnya Sosialisasi keselamatan berkendara di jalan
- Masih banyak kendaraan yang tidak laik jalan beroperasi
- Kurangnya kesadaran pemilik kendaraan untuk melakukan pengujian berkala
- Kurangnya fasilitas perlengkapan jalan

9. Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan Komunikasi dan Informatika di Kota Bekasi menurut Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian (DISKOMINFOSTANDI) adalah:

- Rendahnya pengetahuan tentang teknologi informasi dan komunikasi
- Rendahnya tingkat literasi digital mengenai penanganan pandemi
- Belum optimalnya kapasitas sumber daya komunikasi
- Kurangnya sarana dan prasarana pendukung sumber daya komunikasi
- Belum optimalnya pemanfaatan layanan pengaduan masyarakat
- Terbatasnya ketersediaan jaringan fiber optik untuk mendukung kelancaran akses data dan informasi di Kota Bekasi (Existing Infrastruktur FO terbangun $\pm 22,6$ km)
- Terbatasnya ketersediaan akses jaringan internet berkecepatan tinggi
- Terbatasnya kemudahan masyarakat Kota Bekasi dalam mengakses layanan dan informasi mengenai pemerintah Kota Bekasi melalui terkoneksi jaringan internet wifi gratis di kantor pemerintahan, ruang publik dan fasilitas publik di Kota Bekasi (existing ± 1000 titik wifi gratis)
- Terbatasnya ketersediaan jaringan fiber optik untuk mendukung kelancaran akses data dan informasi di Kota Bekasi (Existing Infrastruktur FO terbangun $\pm 22,6$ km)
- Terbatasnya ketersediaan akses jaringan internet berkecepatan tinggi

- Rendahnya kesadaran untuk menjaga dan mengintegrasikan aset data dan pengelolaan sistem informasi layanan digital Perangkat Daerah

10. Urusan Koperasi Usaha Kecil, dan Menengah

Permasalahan yang dihadapi urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah di Kota Bekasi menurut Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DKUKM) adalah:

- adanya produk UMKM yang belum tersertifikasi
- Kurangnya pembinaan bagi pelaku UMKM
- Belum adanya sentra UMKM di Kota Bekasi
- PKL blm tertata dengan baik
- kurangnya pemasaran produk umkm
- Kurangnya modal bagi UMKM
- rendahnya kapasitas sdm pengurus koperasi
- Pengetahuan tentang Perkoperasian di masyarakat masih relatif rendah
- Kurangnya modal bagi Koperasi
- Masih banyak koperasi yang belum memiliki izin simpan pinjam
- Banyaknya PKL yang menempati lokasi tidak sesuai dengan peruntukannya
- Belum adanya sentra UMKM di Kota Bekasi, Banyaknya UMKM Kota Bekasi yang belum Mandiri
- Pengetahuan tentang Perkoperasian di masyarakat masih relatif rendah
- Penegakan aturan terhadap koperasi masih relatif kurang
- Minat Pengurus Koperasi dalam mengurus ijin simpan Pinjam masih rendah
- Permodalan Koperasi masih kurang

11. Urusan Penanaman Modal

Permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam urusan Penanaman Modal di Kota Bekasi adalah:

- Kurangnya Sinkronisasi dengan OPD teknis terkait rekomendasi izin yang dimohonkan
- Kurangnya kontrol petugas verifikasi dan validasi berkas
- Kurangnya pemahaman petugas FO terhadap pelaksanaan standar pelayanan
- Masih belum memiliki ruang server yang memadai
- Belum lengkapnya format aplikasi pelayanan perizinan
- Regulasi tentang investasi atau penanaman modal sering mengalami perubahan
- Belum terfasilitasinya investor yang akan berinvestasi
- Belum optimalnya promosi investasi melalui media promosi
- Belum terbaharuinya data potensi dan peluang/profil investasi
- Kurangnya kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan LKPM dengan tertib
- Kurangnya pemahaman pelaku usaha akan OSS-RBA (Online Single Submission Risk Based Approach)

12. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Permasalahan utama dalam bidang Kepemudaan dan Olah Raga Kota Bekasi berdasarkan informasi Dinas Pemuda dan Olah Raga (DISPORA) adalah:

- Kurangnya minat atau kesadaran pemuda melalui pendidikan agama, pendidikan ideologi pancasila, wawasan kebangsaan dan bela negara, kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi dan karakter kebangsaan;
- Kurangnya daya saing wirausaha pemuda;
- Kurangnya minat partisipasi pemuda pengembangan kepeloporan;
- Kurangnya minat partisipasi pemuda dalam pengembangan kepemimpinan (developing leadership character);

- Kurangnya sinergis organisasi kepemudaan dan komunitas kreatif.
- Maraknya pornografi dan pornoaksi, perilaku seks bebas, prostitusi, HIV/AIDS, penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di kalangan pemuda;
- Lemahnya perlindungan pemuda terhadap ancaman penurunan kualitas moral dan konflik sosial, perilaku kekerasan fisik dan mental;
- Ancaman potensi tingginya pengangguran pemuda;
- Minimnya proteksi bagi pemuda terkait dampak negatif perkembangan teknologi informasi;
- Kurangnya Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Generasi Muda
- Kurangnya ketersediaan ruang terbuka publik;
- Belum optimalnya pembinaan terhadap organisasi olahraga masyarakat;
- Masyarakat lebih menggemari social media ketimbang berolahraga;
- Rendahnya penyelenggaraan event kejuaraan tingkat lokal
- Minimnya pelatih yang bersertifikat;
- Belum optimalnya PPLPD;
- Belum optimalnya pengembangan industri olahraga;
- Rendahnya penyelenggaraan event kompetisi tingkat lokal;
- Terbatasnya sarana dan prasarana.

13. Urusan Statistik

Permasalahan terkait dengan penyelenggaraan urusan Statistik di Kota Bekasi menurut informasi yang digali Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian (DISKOMINFOSTANDI) yaitu:

- Belum optimalnya ketersediaan data di OPD
- Belum optimalnya proses pengumpulan data

14. Urusan Persandian

Permasalahan terkait penyelenggaraan urusan Persandian di Kota Bekasi menurut informasi yang digali Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian (DISKOMINFOSTANDI) yaitu

Belum optimalnya penanganan keamanan informasi Sistem Elektronik atau sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

15. Urusan Kebudayaan

Permasalahan terkait dengan penyelenggaraan urusan Kebudayaan di Kota Bekasi berdasarkan kajian Dinas Pariwisata dan Budaya (DISPARBUD) adalah:

- Kurangnya minat masyarakat terhadap kesenian tradisional
- Kurangnya event-event kesenian tradisional
- Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kesenian tradisional
- masih adanya obyek diduga cagar budaya yang belum dilakukan kajian oleh Tim Ahli cagar Budaya sehingga belum dapat direkomendasikan naskah penetapannya
- belum adanya museum pelestarian cagar budaya

16. Urusan Perpustakaan

Permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan urusan Perpustakaan di Kota Bekasi menurut perspektif Dinas Arsip & Perpustakaan Daerah (DISARPUSDA) adalah:

- Kurangnya minat masyarakat terhadap kesenian tradisional
- Kurangnya event-event kesenian tradisional
- Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kesenian tradisional
- masih adanya obyek diduga cagar budaya yang belum dilakukan kajian oleh Tim Ahli cagar Budaya sehingga belum dapat direkomendasikan naskah penetapannya
- belum adanya museum pelestarian cagar budaya

17. Urusan Kearsipan

Beberapa permasalahan urusan Kearsipan yang dihadapi oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah (DISARPUSDA) Kota Bekasi yaitu Belum optimalnya pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, koleksi arsip dan sistem informasi pengelolaan kearsipan terintegrasi.

c) **Urusan Pemerintahan Pilihan**

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Permasalahan yang terkait dengan urusan Kelautan dan Perikanan yang ada di Kota Bekasi menurut identifikasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) yaitu :

- Belum optimalnya sumber daya kelembagaan
- Belum optimalnya kapasitas SDM perikanan
- Sarana dan prasarana belum maksimal
- Luas lahan budidaya yang berkurang
- Harga pakan ikan yang tinggi
- Minimnya sarana, prasarana dan permodalan
- Keterbatasan Ketersediaan Ikan Konsumsi terkait dengan peningkatan usaha perikanan budidaya.

2. Urusan Pariwisata

Permasalahan terkait dengan penyelenggaraan urusan Pariwisata di Kota Bekasi berdasarkan informasi dari Dinas Pariwisata dan Budaya (DISPARBUD) adalah:

- belum optimalnya pengembangan destinasi pariwisata
- belum optimalnya pemasaran destinasi pariwisata
- sertifikasi di sektor pariwisata masih minim
- Belum tersedianya Tourist Information Center (TIC) dan Sentra Oleh-oleh Kota Bekasi
- kualitas dan kuantitas produk ekraf masih rendah
- kurangnya pembinaan para pelaku ekraf

3. Urusan Pertanian

Permasalahan yang terkait urusan Pertanian yang ada di Kota Bekasi menurut identifikasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) adalah:

- Kebutuhan lahan semakin meningkat
- Harga tanah semakin meningkat

- Sektor pertanian kurang diminati sebagai suatu pekerjaan yang menjanjikan
- Usaha budidaya masih dilakukan secara konvensional
- Penggunaan teknologi budidaya peternakan yang belum optimal
- Peningkatan nilai tambah produk peternakan
- Ketersediaan sumber daya terbatas (SDM, Modal, bibit, pakan ternak dan Sarana prasarana usaha peternakan)
- Ketersediaan sarana prasarana penanganan penyakit hewan menular dan zoonosis
- Kompetensi pegawai teknis bidang kesehatan hewan
- Lalu lintas hewan dan Produk hewan ke Kota Bekasi sangat tinggi
- Hasil pemeriksaan laboratorium Pasar Tradisional positif virus flu burung
- Tempat penampungan dan pemotongan hewan masih belum terlokalisasi
- Unit pelayanan kesehatan hewan belum memadai
- Pemeliharaan hewan (domestik dan liar) oleh warga
- Penanganan produk pangan asal hewan (PAH) belum memenuhi standar
- hygiene sanitasi dan rantai dingin
- Banyak unit usaha PAH dan Produk hewan non pangan (PHNP) belum memenuhi persyaratan teknis kesmavet
- Belum Optimalnya Rumah Potong Hewan
- Terbatasnya jumlah Juru sembelih halal
- Penggunaan bahan kimia berbahaya
- Kecurangan dan pemalsuan pangan asal hewan
- Peredaran produk hewan non pangan untuk tujuan pangan
- Peredaran obat hewan yang belum memenuhi standar obat hewan Indonesia/ilegal
- Penggunaan obat hewan yang tidak sesuai ketentuan
- Keterbatasan lahan pertanian
- Kurangnya Minat Generasi Muda untuk melakukan usaha Pertanian

- Keterbatasan Sarana dan prasarana Pertanian

4. Urusan Kehutanan

Permasalahan umum terkait dengan urusan Kehutanan yang ada di Kota Bekasi menurut identifikasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) adalah terkait dengan pengembangan hutan kota.

5. Urusan Perdagangan

Permasalahan terkait dengan urusan Perdagangan yang ada di Kota Bekasi menurut identifikasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DISDAGPERIN) adalah:

- Permintaan/Kebutuhan Masyarakat terus meningkat menjelang Hari Raya namun jumlah ketersediaan tidak ikut meningkat (sama)
- Kelangkaan barang kebutuhan tertentu yang tidak terprediksi sebelumnya
- Inflasi Kebutuhan Barang Pokok
- Sarana prasarana yang belum memadai
- SDM Pengelola pasar yang belum memadai.

6. Urusan Perindustrian

Permasalahan terkait dengan urusan Perindustrian yang ada di Kota Bekasi menurut identifikasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DISDAGPERIN) adalah:

- Permintaan masyarakat terhadap produk berkurang
- biaya operasional lebih tinggi daripada keuntungan
- kurangnya event-event sebagai wadah promosi

2) Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan sehingga suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi

masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Isu strategis pembangunan Kota Bekasi menempatkan isu penguatan struktur ekonomi kota sebagai inti dari isu strategis pembangunan kota yang terintegrasi dengan isu strategis pada urusan pemerintah daerah yang meliputi aspek urusan kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, dan pelayanan umum. Penjelasan dari rumusan isu strategis pembangunan Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

a) Integrasi Wilayah Regional dan Penataan Kota Berkelanjutan

Peran Jakarta sebagai kota global membawa pengaruh besar terhadap Kota Bekasi. Aksesibilitas yang memadai dengan Jakarta menjadikan Kota Bekasi menarik bagi para komuter dan pendatang serta menjadi tempat yang menarik untuk tinggal, bekerja dan sekolah. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kota Bekasi akan semakin padat. Kota Bekasi merupakan bagian pengembangan wilayah Jabodetabekpunjur, sehingga pengembangan wilayah perlu terintegrasi dari sisi transportasi maupun penggunaan lahan. Kolaborasi dan kemitraan antar pemerintah sangat diperlukan dalam mendorong integrasi pembangunan mengingat berbagai rencana pembangunan infrastruktur berskala Nasional yang berlokasi atau melintasi Kota Bekasi.

Perkembangan pembangunan di Kota Bekasi yang pesat berimplikasi pada kebutuhan lahan yang makin meningkat. Dengan ketersediaannya lahan yang semakin terbatas maka pengendalian ruang agar pemanfaatannya sesuai dengan tata ruang harus dioptimalkan. Tidak hanya itu, sebagai kota metropolitan, Kota Bekasi telah transformasi menjadi mega urban sehingga mendorong pengelolaan kota harus menggunakan pendekatan *smart city*. Berbagai infrastruktur pendukung sangat diperlukan dan tentunya

harus ramah lingkungan, mengingat Kota Bekasi sangat rentan dengan berbagai ancaman bencana seperti banjir dan cuaca ekstrem. Upaya-upaya pelestarian lingkungan perlu dilakukan untuk menjaga *trade-off* jasa ekosistem, karena pada dasarnya kota juga membutuhkan jasa dari ekosistem penyedia, pengatur, sosial maupun biodiversitas untuk meningkatkan kualitas hidup Masyarakat

b) Daya Saing Sumber Daya Manusia

Bonus demografi yang dimiliki Kota Bekasi saat ini harus dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Keberadaan SDM usia produktif yang melimpah menjadi peluang strategis bagi kota ini dalam mempercepat pembangunan di berbagai sektor. Namun, jumlah SDM yang besar harus disertai dengan peningkatan kualitas, terutama dalam hal literasi yang masih menjadi tantangan utama. Sebagai kota dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, Bekasi membutuhkan SDM yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki daya saing tinggi. Jika literasi rendah, maka pemahaman, keterampilan berpikir kritis, serta kualitas hidup masyarakat di masa depan bisa terpengaruh.

Peningkatan kualitas SDM Kota Bekasi juga harus didukung dengan pendidikan karakter dan budaya. Pendidikan ini berperan dalam membentuk moral, etika, serta identitas budaya yang kuat, sehingga menghasilkan masyarakat yang berintegritas dan memiliki kesadaran sosial tinggi untuk kemajuan sosial, ekonomi, dan budaya kota. Selain itu, Pemerintah Kota Bekasi harus dapat memastikan bahwa akses terhadap kesehatan dan lapangan kerja juga perlu ditingkatkan. Kondisi ini diharapkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat mengingat ketimpangan pendapatan dan pengangguran terbuka Kota Bekasi masih tinggi.

c) Ekonomi Kreatif dan Digital;

Kota Bekasi tidak memiliki kekayaan alam melimpah, sehingga kota ini cukup banyak mengandalkan perkembangan kesejahteraan wilayahnya dari sektor industri pengolahan, perdagangan, transportasi, pergudangan, dan konstruksi sebagai mesin penggerak ekonominya. Di sisi lain, perkembangan teknologi dan era ekonomi digital merupakan sebuah peluang yang harus dioptimalkan. Dengan bertambahnya penduduk usia produktif, Kota Bekasi tentu juga memiliki kesempatan untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif yang juga mengandalkan inovasi dan kreativitas SDM, khususnya bagi generasi muda. Oleh karena itu, ekonomi kreatif perlu mendapatkan perhatian lebih sebagai sektor baru yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kota ke depannya.

Bekasi Creative Hub (BCH), yang telah ada, perlu dioptimalkan dengan melibatkan lebih banyak pelaku industri kreatif agar manfaatnya semakin luas. Dukungan terhadap infrastruktur transportasi dan aksesibilitas menjadi faktor penting untuk menunjang distribusi produk kreatif dan meningkatkan daya saing pelaku industri di Kota Bekasi. Selain itu, peningkatan keterampilan bagi masyarakat menjadi hal yang krusial. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan pelaku industri kreatif sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem ekonomi digital dan kreatif yang berkelanjutan. Dengan strategi yang tepat, Kota Bekasi dapat menjadikan ekonomi digital dan kreatif sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi di masa depan.

d) Iklim Investasi yang Kompetitif;

Jumlah penduduk Kota Bekasi yang cukup besar merupakan sebuah potensi bagi peningkatan daya tarik investasi, terutama pada sektor jasa dan perdagangan. Dengan tingkat urbanisasi yang tinggi, kebutuhan terhadap sektor-sektor seperti

pusat perbelanjaan, kuliner, properti, serta layanan kesehatan dan pendidikan akan semakin meningkat. Selain itu, keberadaan infrastruktur yang terus berkembang, seperti jalan tol dan transportasi umum, dapat berpotensi memperkuat daya tarik Bekasi sebagai lokasi strategis bagi investor. Jika didukung dengan perizinan yang mudah dan kebijakan pro-investasi, Kota Bekasi berpotensi menjadi pusat ekonomi regional yang kompetitif dan berdaya saing tinggi.

Kondisi investasi yang berkembang dengan baik perlu untuk dioptimalkan ke depannya. Persaingan investasi antara Kota Bekasi dengan daerah lain perlu untuk menjadi fokus perhatian agar investor dapat nyaman melakukan investasi di wilayah ini. Selain itu, perlu untuk dapat menguatkan kebijakan agar investor yang melakukan kerja sama di Kota Bekasi bersedia untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal agar kondisi ekonomi masyarakat dapat meningkat.

e) Tata Kelola Pemerintahan yang Modern;

Penduduk Kota Bekasi cenderung meningkat dengan karakter heterogen serta berciri urban yang kuat. Perkembangan kota dan penduduknya yang makin kompleks mengharuskan pengelolaan kota yang prima. Pelayanan publik tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat saja namun juga dituntut menghadirkan kemudahan, kecepatan, dan jangkauan yang lebih merata. Inovasi dan teknologi harus menjadi perangkat utama dalam melaksanakan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, pesatnya pembangunan yang terjadi baik dari arus perkembangan dalam wilayah maupun dari luar wilayah, mengharuskan kondisi tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif.

Perumusan isu strategis Kota Bekasi seperti yang diuraikan di atas juga telah mempertimbangkan rekomendasi isu dari KLHS

RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Rekomendasi isu berdasarkan KLHS, antara lain:

1. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan (TPB 11);
2. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk usia (TPB 3);
3. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua (TPB 6);
4. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi (TPB 9);
5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua (TPB 8);
6. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya (TPB 13); dan
7. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan (TPB 17).

Dari rekomendasi yang dihasilkan terdapat korelasi dengan isu strategis Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang telah dirumuskan. Korelasi tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

b. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Bekasi

Rangkaian kinerja visi yang dimungkinkan tercapai hingga tahun 2029 disusun dengan mempertimbangkan karakteristik dan kemampuan daerah, isu strategis, Sasaran Visi dan Sasaran Pokok RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045.

Sasaran Visi RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045 yang berjumlah 5 (lima) telah dilakukan penyelarasan dengan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025- 2045. Hal yang sama juga dilakukan untuk Sasaran Pokok RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025- 2045.

Sasaran Visi dan Sasaran Pokok RPJPD Kota Bekasi ini merupakan gambaran kondisi terwujudnya Visi **“Kota Bekasi Maju, Berdaya Saing, Berkelanjutan, dan Ihsan”** pada akhir periode rencana.

Secara ringkas, makna yang terkandung pada visi di atas adalah maju yang artinya Kota Bekasi diharapkan menjadi mega urban yang maju dengan perekonomian berbasis jasa, ekonomi digital dan industri kreatif berbasis pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Berdaya saing artinya Kota Bekasi dapat memperkuat dan membangun keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki. Berkelanjutan dimaknai bahwa Kota Bekasi berkomitmen untuk menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan seimbang dengan pertumbuhan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup. Sedangkan ihsan dimaknai sebagai perilaku masyarakat yang patuh pada peraturan, disiplin, tertib, berbudaya, dan bertoleransi dalam membangun ketahanan sosial masyarakat perkotaan.

Visi

Visi yang diusung Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi periode 2025-2029 merupakan gambaran ideal kondisi yang diinginkan untuk dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan isu strategis, sasaran visi, dan sasaran pokok RPJPD. Visi ini menjadi titik sentral bagi segala daya dan upaya yang akan diarahkan ke depannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bekasi. Visi Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah **“Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera”**

Visi ini memiliki kandungan makna bahwa “Kota Bekasi yang Semakin Nyaman dan Sejahtera”. Kata “yang Semakin” menunjukkan semangat pembaruan untuk menjadikan kondisi Kota Bekasi yang lebih maju dari kondisi sebelumnya. Apa yang sudah baik, dilanjutkan. Apa yang tidak baik, dihilangkan. Apa yang masih kurang, diperbaiki. Apa yang masih belum tertangani, dilengkapi. Apa yang belum sempurna, disempurnakan. Hal ini tentunya sejalan dengan tahap pertama RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045 yang menekankan pada penguatan modalitas atau sumber daya yang dimiliki oleh Kota Bekasi.

Kata “Nyaman” menunjukkan gambaran keadaan yang kondusif kehidupan perkotaannya, aman terlindungi bagi warganya, asri suasana lingkungan kotanya, tenang beraktivitas kesehariannya, terjamin bebas dalam berekspresi, dan guyub rukun saling menghargai dalam kehidupan beragama

dan berbudayanya di Kota Bekasi. Kata “Sejahtera” menunjukkan gambaran kondisi dan taraf kehidupan warga kotanya yang baik, dalam arti cukup “sandang, pangan, dan papan” serta sehat, cerdas, dan berpendapatan yang layak untuk menghidupi diri dan keluarganya.

Dalam rumusan dan penjelasan visi di atas, dijiwai dan disemangati dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai tersebut antara lain berke-Tuhan-an, berwawasan kebangsaan, berkeadilan rakyat, kebersamaan (gotong royong), keterbukaan, inovatif dan kreatif.

Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi Kota Bekasi di atas, rumusan umum mengenai upaya- upaya yang akan dilaksanakan oleh Kota Bekasi terangkum dalam 5 (lima) misi. Ke-5 (lima) misi tersebut, seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 1.2
Misi Kota Bekasi Tahun 2025-2029



Sumber: Naskah Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi, 2025 (diolah)

- 9. Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan publik perkotaan yang semakin memuaskan dengan didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai

Misi-1 ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ketersediaan pelayanan publik yang semakin memuaskan masyarakat Kota Bekasi, terutama pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta pelayanan lainnya baik transportasi, persampahan, air bersih, penyehatan lingkungan serta infrastruktur pendukungnya. Misi pertama ini berkaitan dengan kepentingan: (1) mewujudkan pembangunan infrastruktur modern dan merata; (2) mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas; dan (3) mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan.

10. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungan kehidupan perkotaan, baik jasmani maupun rohani, yang semakin kondusif dan berkelanjutan

Misi-2 ini dilakukan untuk memastikan lingkungan kehidupan perkotaan yang nyaman dalam mendukung fase tumbuh-kembang generasi anak Indonesia yang berkualitas: sehat, cerdas, berakhlak mulia, bebas berekspresi, berbudi pekerti, mandiri, dan cinta NKRI. Misi kedua ini berkaitan dengan kepentingan: (1) mengembangkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak, kreatif, dan berprestasi; dan (2) mewujudkan kehidupan masyarakat berbudaya, harmoni, dan peduli lingkungan.

11. Membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya didukung dengan pengembangan ruang-ruang inovasi dan kreativitas generasi produktif dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi

Misi-3 ini dilakukan untuk menjamin tersedianya dan terciptanya lapangan kerja yang luas bagi generasi milenial, generasi-Z, dan usia produktif lainnya yang lebih responsif dan berdaya saing terhadap kebutuhan pasar terutama di sektor jasa dan perdagangan perkotaan. Misi ketiga ini berkaitan dengan kepentingan meningkatkan kreativitas, inovasi. serta

pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi kelompok usia produktif lintas generasi, sehingga mampu berperan dan berkontribusi dalam pembangunan.

12. Mengembangkan iklim yang kondusif dan kemudahan bagi investasi pembangunan dan dunia usaha yang berkeadilan rakyat

Misi-4 ini dilakukan untuk menarik para investor di Kota Bekasi, baik dari dalam maupun luar negeri dengan berbagai kemudahan perizinan, akses data potensi dan insentif lainnya yang memudahkan dan memenuhi rasa keadilan dunia usaha khususnya yang turut berkontribusi mendorong berkembangnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara proporsional. Misi keempat ini berkaitan dengan kepentingan: (1) mengembangkan perekonomian dengan penguatan UMKM, koperasi, dan BUMD, serta penguatan daya tarik investasi, yang berkontribusi pada peningkatan nilai PDRB; dan (2) penyederhanaan birokrasi dan kepastian hukum untuk menjamin iklim investasi.

13. Mengembangkan kolaborasi strategis dan dukungan penguatan manajemen pemerintahan kota yang mendorong Kota Bekasi sebagai kota bertaraf internasional yang keren

Misi-5 ini dilakukan untuk menjalin kerja sama dengan multi-pihak dan sekaligus menyiapkan terpenuhinya prasyarat kehidupan perkotaan yang bertaraf internasional dari berbagai aspek, khususnya dalam pencapaian *Sustainable Development Goal* (SDG) yang ditetapkan PBB. Misi kelima ini berkaitan dengan kepentingan meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, responsif, dan akuntabel, sehingga mampu membentuk kota yang bertaraf internasional.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.

Kota Bekasi memiliki 1 (satu) Visi, 5 (lima) Misi, 5 (lima) Tujuan dan 19 (empat belas) Sasaran. Adapun untuk memudahkan melihat keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dapat di lihat pada tabel dibawah:

Gambar 1.3
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Kota Bekasi 2025 - 2029



Sumber : Bappelitbangda Kota Bekasi, 2025

Selanjutnya untuk mengukur tingkat pencapaian secara kualitatif maupun kuantitatif terhadap indikator kinerja, adapun target terhadap indikator kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.41
Visi, Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran beserta Target Capaian Pembangunan Kota Bekasi 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
Visi: “Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera” Misi: 1. Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan publik perkotaan yang semakin memuaskan dengan didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai 2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungan kehidupan perkotaan, baik jasmani maupun rohani, yang semakin kondusif dan berkelanjutan 3. Membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya	Terwujudnya tata Kota Bekasi yang berestetika disertai infrastruktur modern dan lestari		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Nilai	N/A	68,0	68,5	69,0	69,5	70,0	70,5
		Meningkatnya estetika kota disertai infrastruktur modern	Pilar Infrastruktur (IDSD)	Nilai	4,81	4,83	4,85	4,87	4,89	4,91	4,93
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang lestari	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Ton Co2eq/ Miliar	N/A	0,88	1,31	1,77	2,32	3,19	3,80
		Meningkatnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Indeks Risiko Bencana	Nilai	111,58	111,0	110,5	110,0	109,5	109,0	108,5
	Terwujudnya daya saing SDM Kota Bekasi yang berbudaya, humanis dan harmonis		Indeks Pembangunan Manusia	Poin	83,55	83,80	84,47	85,14	85,81	86,48	87,15
		Meningkatnya pendidikan masyarakat yang berkualitas dan merata	Rata-Rata Skor Literasi dan Numerasi Siswa 7-15 Tahun	Nilai	84,62	84,68	84,78	84,88	84,98	85,08	85,18
			Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,14	14,16	14,21	14,27	14,32	14,38	14,43
		Meningkatnya derajat	Usia Harapan Hidup	Tahun	76,14	76,16	76,26	76,39	76,52	76,66	76,79



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
didukung dengan pengembangan ruang-ruang inovasi dan kreativitas generasi produktif		kesehatan masyarakat	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	Persen	9,20	9,05	8,5	7,99	7,51	7,06	6,64
		Meningkatnya ketangguhan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga	Nilai	64,96	65,50	66,00	66,50	67,00	67,50	68,00
		Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Ketimpangan Gender	Nilai	0,273	0.26	0.25	0.24	0.23	0.22	0.21
		Meningkatnya pemenuhan hak anak	Nilai Kota Layak Anak	Nilai	742,34	742.35	742.36	742.37	742.38	742.39	742.40
	Terwujudnya struktur ekonomi Kota Bekasi		PDRB Per Kapita	Juta Rp	48,92	48.98 - 49. 34	54.94	56,89 - 58, 64	60,53 - 63,3 3	64,5 - 68,6 5	68,94 - 75,1 5

Sumber : Bappelitbangda Kota Bekasi, 2025

Tabel 1.42
Indikator dan Target dari Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bekasi
2024-2026

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR
					20024	2025	2026	
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	64.75	69.20	70.12	72.10	72.10
1.1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	Nilai	83.33	84.20	85.15	86.10	86.10
1.2	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	Nilai	3.40	3.50	3.53	3.56	3.56
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	67.07	72.05	73.12	74.10	74.10
		Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (Opini BPK terhadap Laporan Keuangan)	Nilai	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Presentase Peningkatan PAD	%	25.9	0.01	18.99	3.90	3.90
2	Terwujudnya Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas Secara Berkeadilan	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	81.95	83.41	83.78	84.15	84.15
2.1	Meningkatnya Masyarakat yang Berpengetahuan Tinggi	Indeks Pendidikan	Nilai	76.87	77.39	77.83	78.27	78.27
2.2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Nilai	84.91	84.93	84.95	84.97	84.97
2.3		Gini Ratio	Nilai	0.401	0.395	0.385	0.375	0.375
2.4	Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga dan Pembangunan Responsif Gender	Indeks Pembangunan Keluarga	%	51.52	52	52.5	53	53
		Indeks Pembangunan Gender	Nilai	92.95	93	93.2	93.5	93.5
2.5	Meningkatnya Tenaga Kerja yang Adaptif dan Kesejahteraan Masyarakat Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	10.88	8.55	8.42	8.29	8.29
		Angka Kemiskinan	%	4.74	4.5	4.4	4.3	4.3
3	Terwujudnya Ketersediaan Infrastruktur Kota	Indeks Infrastruktur Wilayah	%	52.90	62.48	64.40	66.20	66.20

NO	TUJUAN/SASASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR
					20024	2025	2026	
	dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan							
3.1	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berwawasan Lingkungan	Indeks Infrastruktur Ke- PU-an	%	43.66	46.48	47.46	48.56	48.56
		Indeks Sarana Prasarana Perhubungan	%	76.44	83.3	85.8	87.6	87.6
		Indeks Perumahan Permukiman Pertanahan	%	48.53	45.48	50.17	55.59	55.59
		Indeks Penataan Ruang	%	51.27	53.14	53.77	54.39	54.39
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	44.6	60	60.1	60.2	60.2
4	Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Umum	%	6.53	2.69	1.99	1.29	1.29
		Indeks Risiko Bencana	Nilai	122	108	103	98	98
4.1	Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang Didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Umum	%	6.53	2.69	1.99	1.29	1.29
		Prosentase Kerjasama Antar Kelompok Sara	%	100	100	100	100	100
4.2	Meningkatnya Upaya dan Kesiapsiagaan Dalam Mengurangi Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	Nilai	122	108	103	98	98
		Indeks Penanggulangan Kebakaran	Nilai	71.03	80.60	83	85.40	85.40
5	Terwujudnya Ketahanan Struktur Perekonomian Masyarakat Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3.22	2.71- 5.17	2.75- 5.12	2.81- 5.00	2.81-5.00
5.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan, Jasa, dan Industri serta Iklim Usaha Berbasis Pengalaman (Kreatif) dan Investasi	Persentase Peningkatan Nilai Sektor Perdagangan dan Jasa	%	3.09	3.12	3.13	3.14	3.14
		Persentase Peningkatan Nilai Sektor Industri	%	3.13	3.16	3.17	3.18	3.18



NO	TUJUAN/SASASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR
					20024	2025	2026	
		Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	%	Rp8.167.096.033.071	7	7	7	Rp13.309.516.696.458
5.2	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Peningkatan Pengeluaran Perkapita	%	0.81	1.5	1.5	1.5	1.5
		Laju Inflasi	%	1.61	3.05±1	3.08±1	3.07±1	3.07±1

Sumber : Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026

c. Program Perangkat Daerah

Program Perangkat Daerah merupakan kumpulan seluruh program yang terdapat dalam Bab IV Renstra Perangkat Daerah termasuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Perangkat Daerah. Rencana program Perangkat Daerah ini merupakan program untuk mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai tahun 2025 hingga tahun 2030. Program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode 2030-2034, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.43
Program Perangkat Daerah Kota Bekasi tahun 2025-2030

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN												PERANGKAT DAERAH
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				KINERJA	PAGU (Rp.)	KINERJA	PAGU (Rp.)	KINERJA	PAGU (Rp.)	KINERJA	PAGU (Rp.)	KINERJA	PAGU (Rp.)	KINERJA	PAGU (Rp.)	
PENDIDIKAN																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							1.115.587. 106.000		1.171.366. 461.300		1.229.934. 784.365		1.236.084. 458.287		1.239.792. 711.661	Dinas Pendidikan
Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	100	100	598. 130.000	100	275. 000.000	100	288. 750.000	100	303. 187.500	100	304. 703.438	100	305. 617.548	Dinas Pendidikan
Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	100	100	1.360.576. 961.685	100	1.111.562. 986.000	100	1.667.141. 135.300	100	1.225.498. 192.065	100	1.231.625. 683.025	100	1.235.320. 560.074	Dinas Pendidikan
Outcome: Meningkatnya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	%	85,71	86,21	185. 000.000	86,71	50. 000.000	87,21	52. 500.000	87,71	55. 125.000	88,21	55. 400.625	88,71	55. 566.827	Dinas Pendidikan
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	100	100	3.051. 966.297	100	3.669. 120.000	100	3.884. 076.000	100	4.078. 279.800	100	4.098. 671.199	100	4.110. 967.213	Dinas Pendidikan
Program Pengelolaan Pendidikan							557.475. 947.535		595.609. 248.863		623.697. 381.282		636.171. 328.908		642.533. 042.198	Dinas Pendidikan
Outcome: Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah Usia 7-12 Tahun	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun (SD)	%	99,61	99,75	335.939. 771.300	99,90	306.501. 519.435	100,00	327.319. 625.795	100,00	340.494. 999.601	100,00	347.304. 899.593	100,00	350.777. 948.589	Dinas Pendidikan
Outcome: Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah 13-15 Tahun	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Tahun (SMP)	%	99,61	99,75	195.299. 236.588	99,90	188.157. 810.000	100,00	201.208. 341.701	100,00	213.327. 670.618	100,00	217.594. 224.031	100,00	219.770. 166.272	Dinas Pendidikan



Outcome: Meningkatnya Partisipasi Anak Usia 5-6 Tahun	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 Tahun (PAUD)	%	68,44	71,48	45.967.226.100	74,52	48.828.213.100	77,56	52.141.188.017	80,60	54.183.931.178	83,56	55.267.609.802	86,53	55.820.285.900	Dinas Pendidikan
Outcome: Meningkatnya Partisipasi Kesetaraan/ Non Formal	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Tahun (Non Formal/ Kesetaraan)	%	17,07	21,17	15.114.255.000	25,27	13.988.405.000	29,37	14.940.093.350	33,47	15.690.779.885	37,57	16.004.595.482	41,67	16.164.641.437	Dinas Pendidikan
Program Pengelolaan Pendidikan							82.025.183.383		83.123.591.909		65.304.041.937		68.647.608.884		74.139.417.595	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Outcome: Meningkatnya Kualitas Gedung Pendidikan	Persentase Gedung Pendidikan yang Berkualitas Baik	%	44,69	52,09	81.237.089.551	60,00	82.025.183.383	65,50	83.123.591.909	70,35	65.304.041.937	75,00	68.647.608.884	80,35	74.139.417.595	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Program Pengembangan Kurikulum							1.022.448.887		1.075.411.739		1.137.355.456		1.195.588.055		1.259.671.575	Dinas Pendidikan
Outcome: Meningkatnya Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Kurikulum Muatan Lokal	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	%	N/A	-	-	80	1.022.448.887	85	1.075.411.739	90	1.137.355.456	95	1.195.588.055	100	1.259.671.575	Dinas Pendidikan
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan							3.500.000.000		3.665.760.000		3.559.627.776		3.741.880.718		3.942.445.525	Dinas Pendidikan
Outcome: Meningkatnya Mutu Pendidikan dan Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Negeri	Persentase Pemenuhan Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada Satuan Pendidikan Negeri sesuai Standar	%	65	69	3.112.543.300	73	3.500.000.000	77	3.665.760.000	81	3.559.627.776	85	3.741.880.718	98	3.942.445.525	Dinas Pendidikan
	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	%	50	55		60		65		70		75		100		Dinas Pendidikan
Program Pengendalian Perizinan Kependidikan							800.000.000		841.440.000		889.906.944		935.470.180		985.611.381	Dinas Pendidikan
Outcome: Terjaminnya Kualitas Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Satuan Pendidikan Swasta Berakreditasi B	%	70	75	1.149.280.000	80	800.000.000	85	841.440.000	90	889.906.944	95	935.470.180	100	985.611.381	Dinas Pendidikan
KESEHATAN																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							407.770.662.286		420.003.782.155		444.196.000.007		453.079.920.007		455.345.319.607	Dinas Kesehatan



Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	100	100	219.987.300	100	200.000.000	100	210.000.000	100	220.500.000	100	231.525.000	100	243.101.250	Dinas Kesehatan
Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	100	100	262.836.567.640	100	403.682.632.286	100	415.711.350.655	100	439.688.946.932	100	448.347.514.279	100	450.376.293.593	Dinas Kesehatan
Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	%	85	100	1.850.000.000	85	1.985.000.000	86	2.084.250.000	87	2.188.462.500	88	2.297.885.625	89	2.412.779.906	Dinas Kesehatan
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	100	100	5.716.630.000	100	1.903.030.000	100	1.998.181.500	100	2.098.090.575	100	2.202.995.103	100	2.313.144.858	Dinas Kesehatan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							415.436.169.000		415.436.169.000		415.436.169.000		415.436.169.000		415.436.169.000	Rumah Sakit Umum Daerah
Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	100	100	440.243.568.000	100	415.436.169.000	100	415.436.169.000	100	415.436.169.000	100	415.436.169.000	100	415.436.169.000	Rumah Sakit Umum Daerah
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat							7.500.000.000		7.888.500.00		8.342.877.600		8.770.032.933		9.240.106.698	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Outcome: Meningkatnya Kualitas Gedung Kesehatan	Persentase Gedung Kesehatan yang Berkualitas Baik	%	23,21	25,54	2.328.465.232	58,5	7.500.000.000	60,35	7.888.500.00	64	8.342.877.600	66,76	8.770.032.933	70	9.240.106.698	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat							52.680.281.800		84.489.715.335		118.797.453.363		100.640.234.511		30.000.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah
Outcome: Meningkatnya Ketersediaan Alat Kesehatan dan Non Kesehatan Rumah Sakit Tipe B	Persentase Ketersediaan Alat Kesehatan dan Non Kesehatan Rumah Sakit Tipe B	%	86,68	86,68	30.386.750.000	86,69	52.680.281.800	86,7	84.489.715.335	86,71	118.797.453.363	86,72	100.640.234.511	86,73	30.000.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah



Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat							311.486. 874.509		333.290. 955.725		352.488. 514.774		370.535. 926.731		389.062. 723.067	Dinas Kesehatan
Outcome: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Perorangan	Persentase Puskesmas Terakreditasi	%	90,57	100	105.543. 228.449	100	56.569. 368.849	100	59.397. 837.291	100	62.367. 729.156	100	65.486. 115.613	100	68.760. 421.393	Dinas Kesehatan
	Persentase Rumah sakit Terakreditasi	%	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan	%	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
Outcome: Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	%	11,7	11,54	12.390. 866.716	10,55	10.278. 313.975	9,7	10.792. 229.673	8,96	11.331. 841.156	8,33	11.898. 433.214	7,78	12.493. 354.875	Dinas Kesehatan
	Persentase Institusi dan Fasilitas Umum Memenuhi Syarat Kesehatan	%	92,86	92,96		93,06		93,2		93,26		93,36		93,46		Dinas Kesehatan
	Rata Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan Masyarakat	%	94,86	94,96		95,06		95,2		95,26		95,36		95,46		Dinas Kesehatan
Outcome: Meningkatkan Jaminan Kesehatan	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (UHC)	%	98,50	100	126.113. 485.080	100	160.000. 000.000	100	174.229. 737.493	100	185.474. 235.632	100	195.170. 933.632	100	204.929. 480.315	Dinas Kesehatan
Outcome: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar	Persentase Ketersediaan Alat Kesehatan dan Non Kesehatan di Puskesmas	%	72,17	72,20	183.423. 573.480	72,25	126.149. 994.555	72,3	130.245. 584.588	72,35	90.307. 760.253	72,4	94.823. 148.266	72,45	99.564. 305.679	Dinas Kesehatan
	Persentase Ketersediaan Alat Kesehatan dan Non Kesehatan di UPTD Rumah Sakit Lingkup Dinas Kesehatan	%	77,4	77,45		77,50		77,55		77,60		77,65		77,7		Dinas Kesehatan
	Persentase Ketersediaan Obat dan BMHP di Puskesmas dan Rumah Sakit	%	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas	%	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Rata Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan	%	90,89	91,39		91,89		92,39		92,89		93,39		93,89		Dinas Kesehatan
Outcome: Meningkatkan Pengendalian Penyakit	Rata Rata Capaian SPM Bidang Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	%	86,93	87,03	6.127. 928.595	87,13	6.839. 636.849	87,23	7.181. 618.691	87,33	7.540. 699.624	87,43	7.917. 734.606	87,53	8.313. 621.335	Dinas Kesehatan



Menular dan Tidak Menular	Persentase kasus penyakit Menular dan Tidak Menular Non SPM yang Tertangani	%	41,39	41,49		41,59		41,69		41,79		41,89		41,99		Dinas Kesehatan
	Persentase Kasus KLB yang Ditangani	%	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan							16.223.234.560		17.063.598.110		18.046.461.361		18.970.440.183		19.987.255.777	Dinas Kesehatan
Outcome: Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan yang Tersertifikasi	%	75,91	100	48.869.506.640	100	16.223.234.560	100	17.063.598.110	100	18.046.461.361	100	18.970.440.183	100	19.987.255.777	Dinas Kesehatan
	Persentase Praktik Tenaga Kesehatan yang Terkendali	%	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Persentase Ketersediaan SDM Kesehatan di Puskesmas dan RS	%	77	100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman							275.400.000		289.665.720		306.350.465		322.035.609		339.296.718	Dinas Kesehatan
Outcome: Terkendalinya Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Jumlah Sarana Kefarmasian Yang Memenuhi Standar Kesehatan	%	96,8	100	275.400.000	100	275.400.000	100	289.665.720	100	306.350.465	100	322.035.609	100	339.296.718	Dinas Kesehatan
	Persentase Jumlah Produk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) Berlabel yang Memenuhi Standar Kesehatan	%	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan							16.434.000.000		17.285.281.200		18.280.913.397		19.216.896.163		20.246.921.797	Dinas Kesehatan
Outcome: Meningkatnya Kualitas Perilaku Masyarakat	Persentase Keluarga ber-PHBS	%	65,03	65,1	8.414.008.007	65,12	16.434.000.000	65,14	17.285.281.200	65,16	18.280.913.397	65,18	19.216.896.163	65,2	20.246.921.797	Dinas Kesehatan
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							47.597.136.000		50.062.667.645		50.563.294.321		51.574.560.208		52.606.051.412	Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	100	100	187.100.000	100	367.000.000	100	370.000.000	100	375.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air



Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	83,99	85,25	35.256.084.960	86,53	39.927.982.000	87,83	42.792.667.645	89,14	43.188.294.321	90,48	44.074.560.208	91,83	45.079.551.412	Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
Outcome: Meningkatnya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Nilai	82	83	477.250.000	83	500.000.000	84	500.000.000	84	500.000.000	85	500.000.000	85	500.000.000	Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	89,73	91,13	2.202.650.000	92,53	6.802.154.000	93,09	6.400.000.000	93,65	6.500.000.000	94,77	6.600.000.000	95,24	6.626.500.000	Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)							49.923.762.000		52.509.812.872		55.534.378.093		58.377.738.251		62.464.179.929	Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
Outcome: Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Terhadap Banjir dan Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Irigasi	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	%	37,97	41,43	31.575.145.200	43,08	49.923.762.000	44,37	52.509.812.872	45,65	55.534.378.093	46,94	58.377.738.251	48,23	62.464.179.929	Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase							227.962.949.795		236.592.940.777		241.423.983.131		248.666.702.625		266.073.371.809	Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
Outcome: Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Permukiman	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	%	68,91	69,64	218.349.796.480	70,37	227.962.949.795	71,10	236.592.940.777	71,82	241.423.983.131	72,55	248.666.702.625	73,28	266.073.371.809	Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
Program Penyelenggaraan Jalan							320.262.483.000		328.111.823.134		330.796.712.563		340.720.613.940		357.756.644.637	Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
Outcome: Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Nyaman dan Aman	Tingkat Kemantapan Jalan	%	97,75	97,79	277.784.561.060	97,82	320.262.483.000	97,88	328.111.823.134	97,94	330.796.712.563	97,97	340.720.613.940	97,99	357.756.644.637	Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
Program Pengembangan Jasa Konstruksi							618.819.000		650.873.824		688.364.156		723.608.401		762.393.812	Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air



Outcome: Meningkatnya Kompetensi Tenaga Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	%	31,24	37,14	2.430.000.000	39,47	618.819.000	41,80	650.873.824	44,13	688.364.156	46,46	723.608.401	48,80	762.393.812	Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum							16.735.330.800		16.915.762.932		3.874.705.781		4.073.090.717		4.291.408.380	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Outcome: Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap SPAM	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kab/Kota	%	23	25,26	25.877.444.600	25,78	16.735.330.800	28,5	16.915.762.932	30,03	3.874.705.781	32,52	4.073.090.717	34,78	4.291.408.380	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah							45.827.719.399		43.468.494.212		45.972.279.479		48.326.060.188		50.916.337.014	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Outcome: Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah	Persentase Rumah Tangga yang mendapat Akses Sanitasi Layak	%	99,31	99,58	21.458.850.00	99,63	45.827.719.399	99,74	43.468.494.212	99,8	45.972.279.479	99,89	48.326.060.188	100	50.916.337.014	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Persentase Rumah Tangga yang mendapat Akses Sanitasi Aman	%	1,8	2		2,5		5		5		5		5		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Program Penataan Bangunan Gedung							144.559.827.120		153.734.997.730		154.129.333.600		162.020.755.480		170.121.793.254	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Tata Ruang
Outcome: Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	%	35,71	40,6	187.379.223.487	50,89	144.559.827.120	63,89	153.734.997.730	68,56	154.129.333.600	71,5	162.020.755.480	73	170.121.793.254	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Persentase Dokumen Teknis Penataan Bangunan Gedung yang Diterbitkan	%	94,18	94,3		94,4		94,5		94,6		94,7		95		Dinas Tata Ruang
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							23.831.784.400		24.070.102.244		24.310.803.266		24.553.911.299		24.799.450.412	Dinas Tata Ruang
Outcome: Meningkatnya Keselarasan	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat	%	100	92,5	190.800.000	92,5	25.000.000	92,5	25.000.000	92,5	30.000.000	92,5	30.000.000	92,5	230.000.000	Dinas Tata Ruang



Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Daerah dengan Penganggaran															
Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	89,1	89,3	23.613.290.638	89,5	23.116.784.400	89,7	23.205.102.244	89,9	23.340.803.266	90,1	23.383.911.299	90,3	23.384.450.412	Dinas Tata Ruang
Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	%	78,5	79	0	79,5	90.000.000	80	140.000.000	80,5	190.000.000	81	240.000.000	81,5	240.000.000	Dinas Tata Ruang
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	100	91,67	437.725.062	91,67	600.000.000	91,67	700.000.000	91,67	750.000.000	91,67	900.000.000	91,67	945.000.000	Dinas Tata Ruang
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang							3.101.504.800		3.262.162.749		3.450.063.323		3.626.706.565		3.763.735.005	Dinas Tata Ruang, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
Outcome: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Tersedianya Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah atau Kawasan Perkotaan	%	44,87	45,50	2.568.192.840	46,15	1.460.000.000	46,79	1.535.628.000	47,43	1.624.080.173	48,08	1.707.233.078	48,72	1.741.377.739	Dinas Tata Ruang
	Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang	%	77	78		78,2		78,4		78,6		78,8		79		Dinas Tata Ruang
	Persentase Penilaian Pemanfaatan Ruang	%	77	78		78,2		78,4		78,6		78,8		79		Dinas Tata Ruang
	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	%	83	83		83		83		83		83		83		Dinas Tata Ruang
Outcome: Terwujudnya Penataan Reklame dan Utilitas Jalan yang Tertib, Aman, Estetis, dan Sesuai Peraturan Guna Mendukung Kenyamanan,	Persentase Tingkat Pengaduan Masyarakat Terkait Reklame dan Utilitas Jalan yang Ditindaklanjuti	%	N/A	100	2.485.025.430	100	1.641.504.800	100	1.726.534.749	100	1.825.983.150	100	1.919.473.487	100	2.022.357.266	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air



Keselamatan, serta Keindahan Ruang Kota																
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							18.183. 458.000		21.086. 561.000		21.091. 561.000		21.246. 561.000		21.301. 561.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	100	100	65. 930.000	100	90. 000.000	100	115. 000.000	100	115. 000.000	100	215. 000.000	100	215. 000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	90,39	100	21.029. 015.440	100	17.833. 458.000	100	19.453. 561.000	100	19.453. 561.000	100	19.453. 561.000	100	19.453. 561.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Nilai	85,35	85,6	395. 000.000	85,85	0	86	660. 000.000	86,25	665. 000.000	86,5	670. 000.000	86,75	675. 000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	100	100	535. 743.360	100	260. 000.000	100	858. 000.000	100	858. 000.000	100	908. 000.000	100	958. 000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Program Pengembangan Perumahan							2.750. 019.173		2.892. 470.166		3.059. 076.448		3.215. 701.162		3.288. 062.744	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Outcome: Terpuhinya Rumah Layak Huni Bagi Warga Negara Korban	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	%	100	100	3.360. 019.173	100	2.750. 019.173	100	2.892. 470.166	100	3.059. 076.448	100	3.215. 701.162	100	3.288. 062.744	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan



Bencana dan yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau	%	6,26	6,26		6,26		6,26		6,26		6,26		6,26		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Kota yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	%	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Program Kawasan Permukiman							20.399.427.578		21.456.117.927		22.691.990.319		23.853.820.223		25.132.384.987	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Outcome: Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 Ha yang Ditangani	%	1,64	3,28	16.876.000.00	4,92	20.399.427.578	6,56	21.456.117.927	8,2	22.691.990.319	9,84	23.853.820.223	11,48	25.132.384.987	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh							1.387.620.800		1.459.499.557		1.543.566.732		1.622.597.349		1.709.568.567	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Outcome: Meningkatnya Luasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan/ Dipugar	Persentase Luasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan/ Dipugar di Kawasan Perkotaan	%	16,03	21,84	3.223.350.640	37,47	1.387.620.800	53,1	1.459.499.557	68,74	1.543.566.732	84,37	1.622.597.349	100	1.709.568.567	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)							66.882.239.600		70.346.739.611		74.398.711.813		78.207.925.858		79.772.084.375	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Outcome: Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU	%	43,75	47,26	80.780.028.878	50,78	66.882.239.600	54,98	70.346.739.611	59,18	74.398.711.813	63,38	78.207.925.858	67,58	79.772.084.375	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							106.502.242.657		123.198.000.000		123.819.000.000		124.440.000.000		124.450.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja



Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	100	100	160.000.000	100	310.000.000	100	315.000.000	100	315.000.000	100	320.000.000	100	325.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	92,80	100	46.799.112.000	100	91.566.519.657	100	100.023.000.000	100	100.024.000.000	100	100.030.000.000	100	100.035.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Nilai	83,99	85	30.753.942.560	86	6.125.723.000	87	6.960.000.000	88	7.530.000.000	88	7.990.000.000	90	7.990.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	100	100	3.950.000.000	100	8.500.000.000	100	15.900.000.000	100	15.950.000.000	100	16.100.000.000	100	16.100.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum							38.677.900.000		40.015.000.000		40.595.000.000		40.780.000.000		41.135.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
Outcome: Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	100	100	37.439.355.000	100	38.677.900.000	100	40.015.000.000	100	40.595.000.000	100	40.780.000.000	100	41.135.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
	Persentase Penegakan Pelanggaran Perda	%	100	100		100		100		100		100		100		Satuan Polisi Pamong Praja
	Rasio Pelindungan Masyarakat Tiap Kelurahan	Rasio	01:31	01:31		01:31		01:31		01:31		01:31		01:31		Satuan Polisi Pamong Praja
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							6.919.651.000		7.058.044.020		7.128.624.460		7.271.196.949		7.416.620.888	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	100	100	33.905.000	100	21.955.000	100	22.394.100	100	22.618.041	100	23.070.402	100	23.531.810	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	87,58	100	4.315.627.000	100	5.274.675.000	100	5.380.168.500	100	5.433.970.185	100	5.542.649.589	100	5.653.502.580	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Drah	Nilai	86,92	87	257.506.420	87,25	489.983.000	87,5	499.782.660	87,75	504.780.487	88	514.876.096	88,25	525.173.618	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(IP ASN) Perangkat Daerah																
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	100	100	3.501.552.0000	100	1.133.038.000	100	1.155.698.760	100	1.167.255.748	100	1.190.600.863	100	1.214.412.880	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Penanggulangan Bencana							5.377.669.438		5.656.232.715		5.982.031.719		6.288.311.743		6.625.365.253	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Outcome: Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Warga yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	%	100	100	6.604.302.000	100	5.377.669.438	100	5.656.232.715	100	5.982.031.719	100	6.288.311.743	100	6.625.365.253	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase Warga yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%	100	100		100		100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase Warga yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100	100		100		100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase Program Penanggulangan Bencana Dalam Dokumen Perencanaan	%	100	100		100		100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase Kemampuan Aparatur dan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana	%	100	100		100		100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah



Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							81.846. 880.328		90.246. 644.560		98.140. 144.560		105.783. 144.560		113.316. 144.560	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	100	100	95. 000.000	100	30. 000.000	100	55. 000.000	100	55. 000.000	100	55. 000.000	100	55. 000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	81,49	100	63.374. 944.260	100	76.554. 957.328	100	80.104. 644.560	100	86.967. 644.560	100	93.870. 644.560	100	100.743. 644.560	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Nilai	74,65	75	626. 080.000	76	627. 500.000	77	1.127. 500.000	78	1.127. 500.000	79	1.127. 500.000	80	1.127. 500.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	100	100	6.057. 796.000	100	7.896. 000.000	100	8.959. 500.000	100	9.990. 000.000	100	10.730. 000.000	100	11.390. 000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran							17.733. 721.798		24.197. 910.000		23.973. 700.000		25.278. 200.000		27.125. 400.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Outcome: Meningkatnya Layanan Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran	Persentase Layanan Pencegahan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	%	100	100	886. 000.000	100	1.270. 000.000	100	2.600. 000.000	100	1.100. 000.000	100	1.100. 000.000	100	1.600. 000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Persentase Layanan Pemeriksaan dan Pengujian Alat Proteksi Kebakaran	%	55	60		65		70		75		80		85		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Outcome: Meningkatnya Layanan Response Time Penanggulan Kejadian Kebakaran 15 Menit	Persentase Layanan Respon Cepat (Response Time) Penanggulangan Kejadian Kebakaran 15 Menit	%	94,49	92	11.562. 388.190	95	3.530. 460.900	96	4.743. 200.000	97	5.540. 200.000	98	6.117. 200.000	99	6.644. 200.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Outcome: Meningkatnya Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran serta Non Kebakaran	%	100	100	3.198. 194.290	100	1.752. 692.000	100	3.215. 000.000	100	3.350. 000.000	100	3.490. 000.000	100	3.650. 000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan



Outcome: Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	%	58,63	63	13.477.250.840	67	11.180.568.898	70	13.639.710.000	72	13.983.500.000	74	14.571.000.000	76	15.231.200.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
SOSIAL																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							13.652.995.250		13.789.525.203		13.927.420.455		14.066.964.659		14.207.361.606	Dinas Sosial
Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	100	100	50.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	Dinas Sosial
Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	89,7	90	12.635.446.000	100	12.741.995.250	100	12.742.525.203	100	12.880.420.455	100	12.891.964.659	100	12.932.361.606	Dinas Sosial
Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Nilai	85,08	85,08	231.554.000	85,08	50.000.000	86	125.000.000	86	125.000.000	87	150.000.000	87	150.000.000	Dinas Sosial
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	100	100	1.675.000.000	100	846.000.000	100	907.000.000	100	907.000.000	100	1.010.000.000	100	1.110.000.000	Dinas Sosial
Program Pemberdayaan Sosial							2.387.000.000		2.510.646.600		2.655.259.844		2.791.209.148		2.940.817.959	Dinas Sosial
Outcome: Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang Ikut Serta Dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	%	100	100	3.166.240.000	100	2.387.000.000	100%	2.510.646.600	100%	2.655.259.844	100%	2.791.209.148	100%	2.940.817.959	Dinas Sosial
Program Rehabilitasi Sosial							4.962.840.000		5.219.915.112		5.520.582.222		5.803.236.032		6.114.289.484	Dinas Sosial



Outcome: Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis yang Mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti	%	100	100	8.425.000.000	100	4.962.840.000	100	5.219.915.112	100	5.520.582.222	100	5.803.236.032	100	6.114.289.484	Dinas Sosial
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial							3.040.000.000		3.197.472.000		3.381.646.387		3.554.786.682		3.745.323.248	Dinas Sosial
Outcome: Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Peningkatan Pendayagunaan Data dan Informasi PPKS	%	90	93	2.800.000.000	94	3.040.000.000	95	3.197.472.000	96	3.381.646.387	97	3.554.786.682	98	3.745.323.248	Dinas Sosial
Program Penanganan Bencana							1.901.683.166		2.000.190.354		2.115.401.318		2.223.709.866		2.342.900.715	Dinas Sosial
Outcome: Meningkatnya Penanganan Korban Bencana	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	%	100	100	3.350.000.000	100	1.901.683.166	100	2.000.190.354	100	2.115.401.318	100	2.223.709.866	100	2.342.900.715	Dinas Sosial
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan							792.000.000		833.025.600		881.007.875		926.115.478		975.755.267	Dinas Sosial
Outcome: Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Area	1	1 Area	1.400.000.000	1 Area	792.000.000	1 Area	833.025.600	1 Area	881.007.875	1 Area	926.115.478	1 Area	975.755.267	Dinas Sosial
TENAGA KERJA																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							15.577.118.040		14.970.729.945		14.940.242.462		15.538.435.768		15.912.346.500	Dinas Tenaga Kerja
Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	100	100	11.346.000	100	10.000.000	100	65.000.000	100	65.000.000	100	115.000.000	100	115.000.000	Dinas Tenaga Kerja
Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	88,52	90	14.642.807.840	90	14.957.118.040	90	13.410.729.945	90	13.357.766.040	90	13.572.766.040	90	13.622.766.040	Dinas Tenaga Kerja



Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Nilai	85	85	101.300.000	86	20.000.000	87	320.000.000	88	320.000.000	89	330.000.000	90	399.580.460	Dinas Tenaga Kerja
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	100	100	1.148.279.000	100	590.000.000	100	1.175.000.000	100	1.197.476.422	100	1.520.669.728	100	1.775.000.000	Dinas Tenaga Kerja
Program Perencanaan Tenaga Kerja							0		0		250.000.000		0		0	Dinas Tenaga Kerja
Outcome: Terkelolanya Informasi Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	%	0	0	0	0	0	0	0	90	250.000.000	0	0	0	0	Dinas Tenaga Kerja
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja							1.204.647.200		1.254.647.200		1.254.647.200		1.284.647.200		1.314.647.200	Dinas Tenaga Kerja
Outcome: Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	N/A	13,28	4.170.250.000	15,28	1.054.647.200	17,28	1.054.647.200	19,28	1.054.647.200	21,28	1.084.647.200	23,28	1.084.647.200	Dinas Tenaga Kerja
Outcome : Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Program Peningkatan Produktivitas	%	84,40	85	90.500.000	86	150.000.000	87	200.000.000	88	200.000.000	89	200.000.000	90	230.000.000	Dinas Tenaga Kerja
Program Penempatan Tenaga Kerja							3.400.000.000		3.400.000.000		3.400.000.000		3.400.000.000		3.400.000.000	Dinas Tenaga Kerja
Outcome: Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	%	43,33	44,44	257.726.000	44,67	3.400.000.000	44,89	3.400.000.000	45,11	3.400.000.000	45,33	3.400.000.000	45,56	3.400.000.000	Dinas Tenaga Kerja
Program Hubungan Industrial							1.400.000.000		2.423.200.000		2.724.800.000		3.006.400.000		3.303.000.000	Dinas Tenaga Kerja
Outcome: Meningkatnya Kepatuhan Perusahaan terhadap Tata Kelola Kerja yang Layak	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	9,93	9,93	1.060.707.000	15,35	1.400.000.000	25,59	2.423.200.000	38,38	2.724.800.000	51,18	3.006.400.000	61,41	3.303.000.000	Dinas Tenaga Kerja
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																



Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							10.017. 371.400		11.863. 431.000		12.048. 431.000		12.223. 431.000		12.398. 431.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	100	100	54. 000.000	100	39. 000.000	100	169. 000.000	100	174. 000.000	100	179. 000.000	100	184. 000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	90	90	8.492. 833.870	90	9.437. 971.400	90	10.962. 431.000	90	11.102. 431.000	90	11.242. 431.000	90	11.382. 431.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Nilai	88,04	88,14	53. 850.000	88,24	0	88,34	120. 000.000	88,44	140. 000.000	88,54	150. 000.000	88,64	160. 000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	100	100	622. 612.000	100	540. 500.000	100	612. 000.000	100	632. 000.000	100	652. 000.000	100	672. 000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan							2.047. 720.800		2.373. 854.000		2.729. 932.000		3.139. 421.800		3.610. 335.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Outcome : Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan Dalam Pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	53,39	53,39	502. 340.000	53,89	2.047. 720.800	54,39	2.373. 854.000	54,89	2.729. 932.000	55,39	3.139. 421.800	55,89	3.610. 335.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Perlindungan Perempuan							1.123. 275.000		1.174. 000.000		1.315. 000.000		1.395. 000.000		1.580. 000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Outcome : Tertanganinya Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	64,53	64,53	1.116.676.564	65,03	1.123.275.000	65,53	1.174.000.000	66,03	1.315.000.000	66,53	1.395.000.000	67,03	1.580.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Peningkatan Kualitas Keluarga							37.100.000.000		3.513.500.000		3.579.500.000		3.689.500.000		3.799.500.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Outcome: Meningkatnya Kualitas Keluarga Dalam Mendukung Kesejahteraan Gender, Pemenuhan Hak, serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah Posyandu dalam Penyediaan 6 Layanan SPM	Unit	1621	1621	4.246.534.500	1622	37.100.000.000	1626	3.513.500.000	1628	3.579.500.000	1630	3.689.500.000	1636	3.799.500.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Persentase Pemenuhan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di Tingkat Kelurahan	%	20	20		32,29		46,86		55,86		64,86		73,86		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak							195.000.000		224.000.000		258.000.000		297.000.000		341.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Outcome : Meningkatnya Pemanfaatan Data Gender dan Anak	Persentase Pemenuhan Data Gender dan Anak	%	28,97	28,97	119.355.000	29,9	195.000.000	30,84	224.000.000	31,78	258.000.000	32,71	297.000.000	33,64	341.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pemenuhan Hak Anak							1.611.868.200		1.830.000.000		2.010.000.000		2.175.000.000		2.460.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Outcome : Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase Forum Anak Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang Terbentuk	%	18,84	18,84	1.451.848.000	37,68	1.611.868.200	53,73	1.830.000.000	73,91	2.010.000.000	84,05	2.175.000.000	100	2.460.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Perlindungan Khusus Anak							1.594.656.000		1.823.000.000		2.096.000.000		2.410.000.000		2.770.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Outcome : Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	63,90	63,90	1.652.109.514	64,40	1.594.656.000	64,90	1.823.000.000	65,40	2.096.000.000	65,90	2.410.000.000	66,40	2.770.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PANGAN																



Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							18.424. 388.000		18.475. 118.637		18.910. 012.193		19.319. 569.627		19.430. 425.549	Dinas Ketahanan Pangan,
																Pertanian dan Perikanan
Outcome 1: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	100	100	22. 390.000	100	18. 000.000	100	22. 000.000	100	25. 000.000	100	27. 000.000	100	35. 000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Outcome 2: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	84,83	85,5	15.277. 441.510	86,5	17.290. 388.000	87,5	17.383. 118.637	88	17.577. 512.193	89,5	17.799. 569.627	90	18.022. 425.549	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Outcome 3: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Nilai	84,7	84,80	195. 900.000	84,90	50. 000.000	85,00	65. 000.000	85,10	151. 000.000	85,20	77. 000.000	85,30	83. 000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Outcome 4: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	100	100	1.254. 556.500	100	1.066. 000.000	100	1.005. 000.000	100	1.156. 500.000	100	1.416. 000.000	100	1.290. 000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat							758. 000.000		805. 000.000		825. 000.000		857. 000.000		882. 000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Outcome: Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	%	91,53	92	278. 845.000	92,25	758. 000.000	92,5	805. 000.000	92,75	825. 000.000	93	857. 000.000	93,25	882. 000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Program Penanganan Kerawanan Pangan							2.102. 976.000		2.150. 000.000		2.165. 000.000		2.185. 000.000		2.430. 000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Outcome: Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	87	86,5	2.427. 380.000	85,5	2.102. 976.000	84,5	2.150. 000.000	83,5	2.165. 000.000	82,5	2.185. 000.000	81,5	2.430. 000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan



Program Pengawasan Keamanan Pangan							150.000.000		165.000.000		170.000.000		175.000.000		200.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Outcome: Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	%	85,5	89	328.800.000	90	150.000.000	91	165.000.000	92	170.000.000	93	175.000.000	94	200.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
PERTANAHAN																
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan							100.000.000		105.180.000		111.238.368		116.933.772		123.201.423	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Outcome: Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Terelesaiannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan Melalui Mediasi	%	0	100	0	100	100.000.000	100	105.180.000	100	111.238.368	100	116.933.772	100	123.201.423	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan							170.591.744.743		185.233.844.743		173.920.047.00		179.137.648.410		195.260.036.767	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Outcome: Meningkatnya Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	%	33	36,76	231.371.969.886	43,2	170.591.744.743	50,34	185.233.844.743	55,65	173.920.047.00	61,85	179.137.648.410	65,7	195.260.036.767	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
LINGKUNGAN HIDUP																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							97.649.931.334		101.382.000.000		100.502.000.000		108.592.000.000		108.902.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	100	100	124.500.000	100	97.649.931.334	100	45.000.000	100	50.000.000	100	55.000.000	100	60.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	92,87	92,90	74.333.378.970	93,00		93,10	89.727.000.000	93,15	89.732.000.000	93,20	97.737.000.000	93,25	97.742.000.000	Dinas Lingkungan Hidup



Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	%	72,7	72,7	539.930.000	72,7		72,7	1.160.000.000	72,7	570.000.000	72,7	850.000.000	72,7	950.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	95,83	95,90	9.476.055.894	96,00		96,10	10.450.000.000	96,15	10.150.000.000	96,20	9.950.000.000	96,25	10.150.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup							7.390.705.412		7.649.039.648		5.547.621.391		5.831.659.606		6.144.236.561	Dinas Lingkungan Hidup
Outcome: Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Indeks	38,62	56,76	7.736.511.208	56,96	7.390.705.412	57,16	7.649.039.648	57,36	5.547.621.391	57,56	5.831.659.606	57,76	6.144.236.561	Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Udara	Indeks	75,1	45,55		46,05		46,55		47,05		47,55		48,05		Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase Pertumbuhan Kampung Iklim	%	-	19,04		38,09		61,90		80,95		100		100		Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)							60.750.404.000		63.897.274.927		67.577.757.963		71.037.739.171		74.845.361.991	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
Outcome: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Capaian Ruang Terbuka Hijau (RTH) / Taman Hutan Kota yang Terkelola	%	100	100	326.049.000	100	250.000.000	100	262.950.000	100	278.095.920	100	292.334.431	100	308.003.557	Dinas Lingkungan Hidup
Outcome : Meningkatnya Pembangunan, dan Pemeliharaan Taman Perkotaan yang Mendukung Estetika Kota	Persentase Penambahan Taman Kota	%	23,67	24,98	25.457.869.250	25,98	60.500.404.000	26,98	63.634.324.927	27,98	67.299.662.043	28,98	70.745.404.740	29,98	74.537.358.434	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)							150.000.000		157.770.000		166.857.552		175.400.659		184.802.134	Dinas Lingkungan Hidup



Outcome: Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Usaha dan/atau Kegiatan yang Memiliki TPS Limbah B3	%	55	50	254.175.000	50	150.000.000	50	157.770.000	50	166.857.552	50	175.400.659	50	184.802.134	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)							13.007.660.000		13.012.840.000		111.238.368		116.933.772		123.201.423	Dinas Lingkungan Hidup
Outcome: Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan	Persentase Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	109	100	112.770.000	100% (50 usaha pengawasan, dan 40 usaha pembinaan)	13.007.660.000	100% (50 usaha pengawasan, dan 40 usaha pembinaan)	13.012.840.000	100% (50 usaha pengawasan, dan 40 usaha pembinaan)	111.238.368	100% (50 usaha pengawasan, dan 40 usaha pembinaan)	116.933.772	100% (50 usaha pengawasan, dan 40 usaha pembinaan)	123.201.423	Dinas Lingkungan Hidup
Program Perencanaan Lingkungan Hidup							300.000.000		315.540.000		333.715.104		350.801.317		369.604.268	Dinas Lingkungan Hidup
Outcome: Meningkatnya Efektivitas Kajian Lingkungan untuk Memitigasi Dampak KRP	Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	%	0	-	0	100	300.000.000	100	315.540.000	100	333.715.104	100	350.801.317	100	369.604.268	Dinas Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat							250.000.000		262.950.000		278.095.920		292.334.431		308.003.557	Dinas Lingkungan Hidup
Outcome: Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat dalam Lingkungan Hidup	%	80	80	415.375.000	100	250.000.000	100	262.950.000	100	278.095.920	100	292.334.431	100	308.003.557	Dinas Lingkungan Hidup
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat							150.000.000		157.770.000		166.857.552		175.400.659		184.802.134	Dinas Lingkungan Hidup
Outcome: Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	%	80	80	255.198.000	73	150.000.000	73	157.770.000	73	166.857.552	73	175.400.659	73	184.802.134	Dinas Lingkungan Hidup
	Capaian Perolehan Penghargaan Lingkungan Hidup	%	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Lingkungan Hidup
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup							25.000.000		26.295.000		27.809.592		29.233.443		30.800.356	Dinas Lingkungan Hidup



Outcome: Meningkatnya Penyelesaian Sengketa/ Kasus Tindak Pidana	Persentase Penanganan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat tentang Permasalahan Lingkungan	%	100	100	77.990.000	100	25.000.000	100	26.295.000	100	27.809.592	100	29.233.443	100	30.800.356	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Persampahan							317.166.091.218		329.078.607.731		336.872.977.881		348.804.167.218		364.346.375.579	Dinas Lingkungan Hidup
Outcome: Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi melalui 3R	%	11,97	13	202.873.690.783	13,5	317.166.091.218	13,7	329.078.607.731	13,9	336.872.977.881	14,1	348.804.167.218	14,3	364.346.375.579	Dinas Lingkungan Hidup
	Operasionalisasi TPA/TPS 3R/SPA	Poin	71,50	73,10		71,50		71,50		71,50		71,50		71,50		Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase Sampah yang Teranglut ke TPA	%	71,10	62,00		62,00		63,00		95,00		95,00		95,00		Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase Cakupan Area Pelayanan	%	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Lingkungan Hidup
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							25.459.987.000		25.969.186.740		26.228.878.607		26.753.456.180		27.020.990.741	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	94,8	94,8	200.000.000	94,85	75.000.000	94,95	85.000.000	95,05	95.000.000	96	105.000.000	96,5	240.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	90,92	90,92	27.658.872.440	91,05	23.124.537.000	91,25	23.424.186.740	91,4	23.433.878.607	91,55	23.698.456.180	91,75	24.020.990.741	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	%	88,58	88,88	1.060.000.000	89,18	1.110.000.000	89,48	1.160.000.000	89,78	1.275.000.000	89,98	1.325.000.000	90,02	1.375.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	95,8	95,80	2.309.158.000	96,00	1.150.450.000	96,50	1.300.000.000	96,85	1.425.000.000	97,00	1.625.000.000	97,25	1.385.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Program Pendaftaran Penduduk							3.550. 000.000		3.733. 890.000		3.948. 962.064		4.151. 148.922		4.373. 650.504	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Outcome: Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	65	53	3.900. 000.000	55	3.550. 000.000	57	3.733. 890.000	59	3.948. 962.064	61	4.151. 148.922	65	4.373. 650.504	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pencatatan Sipil							700. 000.000		736. 260.000		778. 668.576		818. 536.407		862. 409.959	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Outcome: Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran	%	67,29	95	1.080. 000.000	96	700. 000.000	97,5	736. 260.000	98	778. 668.576	98,05	818. 536.407	98,05	862. 409.959	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							3.255. 000.000		3.423. 609.000		3.620. 808.878		3.806. 194.293		4.010. 206.307	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Outcome: Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	%	N/A	33	3.960. 127.934	40	3.255. 000.000	50	3.423. 609.000	54	3.620. 808.878	61	3.806. 194.293	69	4.010. 206.307	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pengelolaan Profil Kependudukan							150. 000.000		157. 770.000		166. 857.552		175. 400.659		184. 802.134	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Outcome: Pemanfaatan Buku Profil Kependudukan bagi Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Mendapatkan Buku Profil Kependudukan	%	100	100	150. 000.00	100	150. 000.000	100	157. 770.000	100	166. 857.552	100	175. 400.659	100	184. 802.134	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							15.357. 823.875		15.664. 980.353		15.978. 279.960		16.138. 062.759		16.299. 443.378	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	100	100	127.240.000	100	5.000.000	100	6.612.500	100	7.604.375	100	8.745.031	100	10.056.785	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	86,5	87,5	23.917.648.475	87,8	14.445.558.875	87,92	14.838.672.078	88	15.065.075.796	88,2	15.128.633.357	88,5	15.269.710.841	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Nilai	85,31	86,00	90.932.000	86	85.000.000	86,05	78.688.750	86,05	90.492.062	86,05	104.065.871	86,10	119.675.752	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	100	100	612.402.500	100	822.265.000	100	741.007.025	100	815.107.727	100	896.618.500	100	900.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)							1.076.817.000		2.120.000.000		2.220.000.000		2.320.000.000		2.520.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Outcome: Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	%	40	50	1.360.000.000	60	1.076.817.000	70	2.120.000.000	80	2.220.000.000	90	2.320.000.000	95	2.520.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Lansia yang Mendapatkan Pendampingan	%	5,6 (base line BKKBN 2023)	6		6		8		10		12		14		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)							1.299.475.000		1.366.787.805		1.445.514.784		1.519.525.139		1.600.971.687	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Outcome: Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mCPR)	%	50	55	1.998.054.000	56	1.299.475.000	59	1.366.787.805	61	1.445.514.783	61,5	1.519.525.139	62	1.600.971.687	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	18,5	14		13		12		11,5		11		10		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	%	25,67	25,17		24,67		24,17		23,67		23,17		22,67		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Pengendalian Penduduk							300.000.000		315.540.000		333.715.104		350.801.317		369.604.268	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Outcome: Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	%	1,81	1,80	200.000.000	1,79	300.000.000	1,78	315.540.000	1,77	333.715.104	1,76	350.801.317	1,75	369.604.268	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Angka Kelahiran Remaja Umur 15 – 19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15 – 19)	%	5,2	5		4,95		4,9		4,85		4,8		4,75		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PERHUBUNGAN																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							81.900.921.150		226.864.110.010		235.329.900.128		246.521.948.198		250.296.188.075	Dinas Perhubungan
Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	100	100	73.000.000	100	20.000.000	100	80.000.000	100	125.000.000	100	150.000.000	100	160.000.000	Dinas Perhubungan
Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	93,92	94,42	92.808.830.420	95,2	78.029.778.000	95,5	217.821.272.010	96	225.529.879.128	96,42	235.496.927.198	97	238.261.167.075	Dinas Perhubungan



Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Nilai	86,25	86,50	832.655.000	86,75	1.100.000.000	87	2.100.000.000	87,25	1.900.000.000	87,50	1.500.000.000	87,75	2.000.000.000	Dinas Perhubungan
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	100	100	2.751.143.150	100	2.751.143.150	100	6.862.838.000	100	7.775.021.000	100	9.375.021.000	100	9.875.021.000	Dinas Perhubungan
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)							95.709.710.517		126.306.483.340		134.540.539.340		142.090.539.340		153.023.939.340	Dinas Perhubungan
Outcome: Meningkatnya Kinerja Perlengkapan Jalan	Indeks Perlengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas	Indeks	N/A	85,6	92.720.275.760	85,63	74.635.377.524	85,65	95.233.274.860	85,79	99.467.330.860	85,8	100.567.330.860	85,82	102.267.330.860	Dinas Perhubungan
Outcome: Meningkatnya Ketaatan Berjalan Lintas	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas	%	10	12	2.109.146.487	13	1.247.000.000	13,5	6.473.208.480	14	8.473.208.480	14,5	10.173.208.480	15	10.673.208.480	Dinas Perhubungan
Outcome: Meningkatnya Kepatuhan Kendaraan yang Wajib Uji Dalam Melaksanakan Uji Kendaraan Bermotor Secara Berkala	Jumlah Kendaraan Yang Wajib Uji yang Melakukan Uji Kendaraan Bermotor	Unit	68000	69000	1.471.193.953	70000	1.400.000.000	71000	2.600.000.000	72000	2.800.000.000	73000	3.550.000.000	74000	3.550.000.000	Dinas Perhubungan
Outcome: Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase Peningkatan Fasilitas Prasarana Penunjang Transportasi	%	49,50	51,72	1.343.143.200	56,9	1.227.332.993	57,76	2.300.000.000	60,34	2.300.000.000	61,21	2.300.000.000	61,21	2.300.000.000	Dinas Perhubungan
Outcome: Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum	Persentase Kapasitas Angkutan Umum yang Terpenuhi	%	20,45	70	4.952.200.000	75	17.200.000.000	78	19.700.000.000	80	21.500.000.000	83	25.500.000.000	85	34.233.400.000	Dinas Perhubungan
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							18.221.768.487		19.276.558.654		19.688.582.643		20.270.522.496		20.752.770.073	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian



Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	100	100	25.000.000	100	46.000.000	100	104.123.812	100	114.383.690	100	125.364.294	100	137.005.909	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	89,27	90	16.645.977.370	90,73	16.207.608.487	91,46	17.137.000.000	92,19	17.672.000.000	92,92	18.190.000.000	93,65	18.707.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Nilai	86,59	87	105.000.000	87,50	441.580.000	88	570.000.000	88,5	625.000.000	89	640.000.000	89,5	650.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	100	100	1.711.827.000	100	1.526.580.000	100	1.465.434.842	100	1.227.198.953	100	1.315.158.202	100	1.258.764.164	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika							13.512.974.868		14.212.946.966		15.031.612.711		15.801.231.282		16.648.177.279	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Outcome: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sistem Layanan Publik Berbasis Digital	Indeks Pengelolaan Sistem Layanan Publik Berbasis Digital	Indeks	4,21	4,21	15.505.459.700	4,98	13.512.974.868	4,98	14.212.946.966	4,98	15.031.612.711	4,99	15.801.231.282	4,99	16.648.177.279	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik							6.909.454.000		8.164.077.807		7.896.282.813		9.305.323.920		9.693.663.204	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Outcome: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Pengaduan dan Informasi Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Pengaduan dan Informasi Publik	Indeks	4,68	4,69	5.205.152.000	4,70	6.909.454.000	4,71	8.164.077.807	4,72	7.896.282.813	4,73	9.305.323.920	4,74	9.693.663.204	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							9.331.964.494		9.601.471.334		9.765.544.580		9.791.820.416		9.990.275.970	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	100	100	8.998.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	86,06	88	8.237.250.400	88,15	8.841.964.494	88,2	8.941.471.334	88,5	8.985.544.580	88,7	9.001.820.416	89	9.160.275.970	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Nilai	82	83	75.250.000	83	60.000.000	83	210.000.000	83	310.000.000	83	310.000.000	84	310.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	93	93	387.000.000	94	410.000.000	95	430.000.000	95	450.000.000	96	460.000.000	96	500.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam							80.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Outcome: Meningkatnya Kualitas Layanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Koperasi yang Usaha Simpan Pinjamnya Terdaftar di NIB Koperasi	%	0,43	2,5	60.121.800	2,5	80.000.000	2,5	150.000.000	2,5	150.000.000	2,5	150.000.000	2,5	150.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)							500.000.000		500.000.000		600.000.000		700.000.000		800.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Outcome : Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Persentase Pelaku Usaha Informal yang Diberdayakan	%	10,7	10	702.103.900	10	500.000.000	10	500.000.000	10	600.000.000	10	700.000.000	10	800.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program Pengembangan UMKM							1.750.000.000		1.750.000.000		1.750.000.000		1.750.000.000		1.750.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Outcome : Meningkatnya Pelaku UMKM yang Berdaya Saing	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	39	40	2.139.180.100	41	1.750.000.000	43	1.750.000.000	44	1.750.000.000	45	1.750.000.000	47	1.750.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Pertumbuhan Wirausaha	%	7	7		7		7		7		7		7		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi							150. 000.000		150. 000.000		150. 000.000		150. 000.000		150. 000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Outcome : Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Persentase Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang- Undangan	%	10,7	10	52. 900.000	10	150. 000.000	10	150. 000.000	10	150. 000.000	10	150. 000.000	10	150. 000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi							0		0		0		0		0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Outcome : Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi	Persentase Koperasi yang Telah Tersertifikasi Kesehatannya	%	4	4	70. 262.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi							467. 250.000		480. 000.000		500. 000.000		600. 000.000		700. 000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Outcome: Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	1,05	1,5	650. 805.000	2	467. 250.000	2	480. 000.000	2	500. 000.000	2	600. 000.000	2	700. 000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian							250. 000.000		250. 000.000		350. 000.000		500. 000.000		500. 000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Outcome: Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi yang Meningkatkan Kapasitasnya	%	4,34	8,5	271. 820.000	8,5	250. 000.000	8,5	250. 000.000	8,5	350. 000.000	8,5	500. 000.000	8,5	500. 000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PENANAMAN MODAL																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							26.561. 416.340		27.937. 297.706		29.546. 486.054		31.059. 266.140		31.680. 451.463	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	86,93	100	37. 172.000	100	6.000.000	99	10. 000.000	99	10. 000.000	99	10. 000.000	99	10. 000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	91,12	91,5	28.983. 786.580	92	25.903. 756.340	92,5	27.075. 637.706	93	27.484. 826.054	93,5	28.822. 606.140	94	29.843. 791.463	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Nilai	82,2	83	35.500.000	84	50.000.000	85	50.000.000	86	550.000.000	87	625.000.000	88	625.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Peningkatan dan Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	100	100	652.366.000	100	601.660.000	100	801.660.000	100	1.501.660.000	100	1.601.660.000	100	1.201.660.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pelayanan Penanaman Modal							4.293.000.000		4.515.377.400		4.775.463.138		5.019.966.851		5.289.037.074	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Outcome: Meningkatnya Kemudahan Pelayanan Perizinan	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	%	100	100	3.667.686.130	100	4.293.000.000	100	4.515.377.400	100	4.775.463.138	100	5.019.966.851	100	5.289.037.074	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal							525.319.070		519.530.598		584.356.360		614.275.406		647.200.568	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Outcome: Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	%	4 sistem (100%)	100	367.456.300	100	525.319.070	100	519.530.598	100	584.356.360	100	614.275.406	100	647.200.568	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal							225.000.000		600.735.000		250.286.328		263.100.988		277.203.201	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Outcome: Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	%	n/a	4	205.049.000	4	225.000.000	4	600.735.000	4	250.286.328	4	263.100.988	4	277.203.201	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Promosi Penanaman Modal							350.000.000		368.130.000		389.334.288		409.268.204		431.204.979	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Outcome: Tercapainya Cakupan Promosi Penanaman Modal	Persentase Cakupan Promosi Penanaman Modal	%	n/a	100	331.978.000	100	350.000.000	100	368.130.000	100	389.334.288	100	409.268.204	100	431.204.979	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal							600.000.000		300.000.000		667.430.208		701.602.635		739.208.536	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Outcome: Meningkatnya Perusahaan PMDN/PMA yang Patuh Terhadap Kewajiban LKPM	Persentase Perusahaan PMDN/PMA yang Patuh Terhadap Kewajiban LKPM	%	14,5	20	115.572.000	23,5	600.000.000	27,5	300.000.000	31,5	667.430.208	35,5	701.602.635	40	739.208.536	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							20.437.499.920		20.641.874.919		21.054.712.418		21.475.806.666		21.905.322.799	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan penganggaran	%	100	100	120.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	100	100	16.367.100.680	100	18.152.499.920	100	18.356.874.919	100	18.769.712.418	100	19.190.806.666	100	19.620.322.799	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	%	82,02	82,13	467.500.000	82,29	600.000.000	82,46	600.000.000	82,62	600.000.000	82,76	600.000.000	82,82	600.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	100	100	1.330.000.000	100	1.560.000.000	100	1.560.000.000	100	1.560.000.000	100	1.560.000.000	100	1.560.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan							2.950.000.000		3.102.810.000		3.281.531.856		3.449.546.287		3.634.441.968	Dinas Kepemudaan dan Olahraga



Outcome: Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	Rasio Wirausaha Pemuda	%	0,15	0,11	2.019.600.000	0,15	2.950.000.000	0,17	3.102.810.000	0,18	3.281.531.856	0,21	3.449.546.287	0,22	3.634.441.968	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan							240.014.490.760		41.025.590.820		43.388.664.851		45.610.164.492		48.054.869.308	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Outcome: Meningkatnya Prestasi Olahraga	Jumlah Atlet/pelatih yang Berprestasi di Tk. Provinsi, Nasional dan Internasional	Jumlah	722	732	37.621.711.645	742	236.014.490.760	752	39.425.590.820	762	41.688.664.851	772	43.810.164.492	782	46.154.869.309	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Outcome: Meningkatnya Pemasaran Olahraga	Jumlah Event Olahraga di Tk. Provinsi, Nasional dan Internasional	Jumlah	21	9	1.350.000.000	14	4.000.000.000	16	1.600.000.000	18	1.700.000.000	20	1.800.000.000	22	1.900.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan							1.150.000.000		1.209.570.000		1.279.241.232		1.344.738.383		1.416.816.360	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Outcome: Meningkatnya Eksistensi Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	%	0,61	1,02	800.000.000	1,07	1.150.000.000	1,14	1.209.570.000	1,22	1.279.241.232	1,29	1.344.738.383	1,37	1.416.816.360	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
STATISTIK																
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral							550.000.000		600.000.000		650.000.000		700.000.000		700.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Outcome: Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Indeks Ketersediaan Data Sektoral Berbasis Digital	Indeks	3,75	4,38	238.926.000	5	550.000.000	5	600.000.000	5	650.000.000	5	700.000.000	5	700.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
PERSANDIAN																
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi							5.126.524.897		3.783.500.000		4.723.500.000		3.778.500.000		4.083.500.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Outcome: Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Indeks Penyelenggaraan Pengamanan Informasi	Indeks	5	5	1.047.088.000	5	5.126.524.897	5	3.783.500.000	5	4.723.500.000	5	3.778.500.000	5	4.083.500.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian



PARIWISATA																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							11.905. 306.000		12.577. 734.851		13.159. 796.378		13.250. 025.953		13.690. 769.642	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	100	100	40. 000.000	100	23. 032.000	100	42. 000.000	100	57. 000.000	100	57. 000.000	100	195. 000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	89,33	90	10.733. 228.660	91	11.289. 389.306	92	11.506. 234.851	93	11.547. 796.378	94	11.848. 025.953	95	12.210. 769.642	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Nilai	84,6	84,7	195. 561.900	84,8	50. 000.000	84,9	239. 500.000	85	160. 000.000	85,6	310. 000.000	85,7	235. 000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	90	90	762. 099.500	90	542. 884.694	90	790. 000.000	90	1.395. 000.000	90	1.035. 000.000	90	1.050. 000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata							1.510. 000.000		1.570. 000.000		1.650. 000.000		1.900. 000.000		1.700. 000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Outcome: Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Kawasan Wisata yang Ditata	lokasi	1	3	1.075. 139.605	3	1.510. 000.000	3	1.570. 000.000	3	1.650. 000.000	3	1.900. 000.000	3	1.700. 000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Persentase Masyarakat Pariwisata yang Diberdayakan	%	47,62	54,76		64,29		64,29		64,29		64,29		64,29		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Pariwisata	%	97,56	97,89		98,22		98,55		98,88		99,21		99,54		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Program Pemasaran Pariwisata							1.000. 000.000		1.000. 000.000		1.150. 000.000		1.150. 000.000		1.150. 000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Outcome: Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Promosi/Pemasaran Kepariwisataan	%	16,67	14,3	1.609. 499.000	12,5	1.000. 000.000	11,1	1.000. 000.000	10	1.150. 000.000	9,1	1.150. 000.000	8,3	1.150. 000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif							500.000.000		500.000.000		500.000.000		650.000.000		650.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Outcome: Meningkatnya Kapasitas SDM Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	%	19,71	21,11	539.845.000	21,11	500.000.000	21,11	500.000.000	21,11	500.000.000	21,11	650.000.000	21,11	650.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual							200.000.000		200.000.000		200.000.000		500.000.000		600.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
KEBUDAYAAN																
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya							400.000.000		450.000.000		550.000.000		550.000.000		600.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Outcome: Meningkatnya Cagar Budaya yang Dilestarikan	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	situs	6	6	376.230.500	7	400.000.000	7	450.000.000	7	550.000.000	7	550.000.000	7	600.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Program Pengembangan Kebudayaan							1.170.000.000		1.270.000.000		1.290.000.000		1.390.000.000		1.390.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Outcome : Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Pelaku Seni dan Budaya dalam Pengembangan Kebudayaan	%	n/a	n/a	n/a	4,25	1.170.000.000	4,25	1.270.000.000	4,25	1.290.000.000	4,25	1.390.000.000	4,25	1.390.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Program Pengembangan Kesenian Tradisional							350.000.000		350.000.000		450.000.000		530.000.000		600.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Outcome: Meningkatnya Kesenian Tradisional yang Dilestarikan	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	%	6,67	6,67	625.310.000	33,33	350.000.000	33,33	350.000.000	33,33	450.000.000	33,33	530.000.000	33,33	600.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
PERPUSTAKAAN																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							15.067.149.990		15.567.149.990		15.675.862.850		15.989.380.107		16.309.176.709	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	100	100	110.000.000	100	175.000.000	100	175.000.000	100	175.000.000	100	175.000.000	100	175.000.000	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah



Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	87,36	87,46	12.568.845.080	87,56	13.142.149.990	87,66	13.443.492.990	87,76	13.750.862.850	87,86	14.064.380.107	87,96	14.384.176.709	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Nilai	81,35	81,45	67.500.000	81,46	250.000.000	81,47	250.000.000	81,48	250.000.000	81,49	250.000.000	81,5	250.000.000	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
Outcome : Meningkatnya Kualitas Ekosistem Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	orang	n/a	n/a	n/a	50	200.000.000	50	200.000.000	50	200.000.000	50	500.000.000	50	600.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	80	80	1.132.140.000	80	1.500.000.000	80	1.500.000.000	80	1.500.000.000	80	1.500.000.000	80	1.500.000.000	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
Program Pembinaan Perpustakaan							1.920.098.000		2.019.559.076		2.135.885.679		2.245.243.026		2.365.588.052	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
Outcome: Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Persentase Penambahan Perpustakaan yang Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	%	10 (100 Perpustakaan)	10 (110 Perpustakaan)	1.516.686.160	10 (121 Perpustakaan)	1.920.098.000	10 (133 Perpustakaan)	2.019.559.076	10 (146 Perpustakaan)	2.135.885.679	10 (160 Perpustakaan)	2.245.243.026	10 (176 Perpustakaan)	2.365.588.052	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
KEARSIPAN																
Program Pengelolaan Arsip							900.000.000		946.620.000		1.001.145.312		1.052.403.952		1.108.812.804	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
Outcome: Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Pengelolaan Arsip Secara Tertib	%	54.54 (24 OPD)	56.81 (25 OPD)	1.143.809.000	59.09 (26 OPD)	900.000.000	61.36 (27 OPD)	946.000.000	63.63 (28 OPD)	1.001.145.312	65.9 (29 OPD)	1.052.403.952	68.18 (30 OPD)	1.108.812.804	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip							200.000.000		210.360.000		222.476.736		233.867.545		246.402.845	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
Outcome: Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Sesuai NSPK	Persentase Penambahan Arsip Statis pada Depo Arsip	%	8,7 (403 Boks)	10	179.991.750	10	200.000.000	10	210.360.000	10	222.476.736	10	233.867.545	10	246.402.845	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah



KELAUTAN DAN PERIKANAN																					
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya							450. 000.000		480. 000.000		500. 000.000		510. 000.000		520. 000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan					
Outcome: Meningkatkan Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1975	1975,1	682. 222.100	1980,2	450. 000.000	1.981,67	480. 000.000	1.982,43	500. 000.000	1.983,5	510. 000.000	1.985,5	520. 000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan					
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan							318. 000.000		330. 000.000		340. 000.000		350. 000.000		360. 000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan					
Outcome: Meningkatkan Konsumsi Ikan oleh Masyarakat	Jumlah Produksi Olahan Perikanan	Ton	94.818	95.000	393. 707.500	97.000	318. 000.000	97.049	330. 000.000	97.107	340. 000.000	97.184	350. 000.000	97.194	360. 000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan					
PERTANIAN																					
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian							924. 000.000		940. 500.000		955. 000.000		970. 000.000		985. 000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan					
Outcome: Meningkatkan Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Jumlah Produksi Tanaman Pangan	Ton	2.379	2.380	3.201. 884.400	2.382	924. 000.000	2.385	940. 500.000	2.387	955. 000.000	2.389	970. 000.000	2.391	985. 000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan					
	Jumlah Produksi Hortikultura	Ton	22170	22.180				22.200				22.220				22.240		22.260		22.280	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
	Jumlah Produksi Komoditas Peternakan	Ton	10.765	11.093				11.195				11.300				11.300		11.300		11.300	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian							200. 000.000		325. 000.000		320. 000.000		330. 000.000		435. 000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan					
Outcome: Meningkatkan Kualitas Prasarana Pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapan Menjadi LP2B	Ha	29,60	0	0	29,60	200. 000.000	29,60	325. 000.000	29,60	320. 000.000	29,60	330. 000.000	29,60	435. 000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan					
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner							912. 000.000		1.030. 500.000		1.056. 000.000		1.065. 000.000		1.065. 000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan					



Outcome: Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	%	-	70,5	862.025.000	71	912.000.000	71,5	1.030.500.000	72	1.056.000.000	72,5	1.065.000.000	73	1.065.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
	Persentase Unit Usaha Pangan Asal hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	%	45,5	46		46,5		47		47,5		48		48,5		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Program Penyuluhan Pertanian							25.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		60.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Outcome: Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluhan Pertanian	Persentase Kapasitas SDM Penyuluh Pertanian Yang Ditingkatkan	%	-	100	22.800.000	100	25.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	60.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
PERDAGANGAN																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							29.016.801.000		29.789.589.667		30.629.524.797		31.442.013.085		32.328.213.175	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	100	100	14.999.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	86	87	27.808.294.220	87	28.385.416.000	88	29.158.204.667	89	29.998.139.797	90	30.810.628.085	91	31.696.828.175	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Nilai	82,79	83	473.500.000	83,5	30.000.000	84,0	30.000.000	84,5	30.000.000	85,0	30.000.000	85,5	30.000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	80	80	524.000.000	80	566.385.000	80	566.385.000	80	566.385.000	80	566.385.000	80	566.385.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian



Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan							20. 000.000		20. 000.000		20. 000.000		20. 000.000		20. 000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Outcome : Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan dan Pendaftaran Berusaha	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	%	n/a	n/a	n/a	85	20. 000.000	85	20. 000.000	85	20. 000.000	85	20. 000.000	85	20. 000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan							5.988. 000.000		5.988. 000.000		5.988. 000.000		5.988. 000.000		5.988. 000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Outcome: Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan	Jumlah Pasar Rakyat yang Difasilitasi	unit	10 Unit	10	3.401. 170.000	11	5.988. 000.000	11	5.988. 000.000	11	5.988. 000.000	11	5.988. 000.000	11	5.988. 000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting							1.523. 615.000		1.600. 000.000		2.000. 000.000		2.400. 000.000		2.800. 000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Outcome: Tersedia dan terjangkau barang kebutuhan pokok dan barang penting	Tingkat inflasi kelompok pengeluaran bahan makanan	%	1,54	< 4,00	2.683. 000.000	< 4,00	1.523. 615.000	< 4,00	1.600. 000.000	< 4,00	2.000. 000.000	< 4,00	2.400. 000.000	< 4,00	2.800. 000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen							300. 000.000		300. 000.000		300. 000.000		300. 000.000		300. 000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Outcome: Meningkatnya kualitas produk dan layanan	Persentase peningkatan alat UTP yang ditera ulang	%	2	2	219. 907.500	2	300. 000.000	2	300. 000.000	2	300. 000.000	2	300. 000.000	2	300. 000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Program Pengembangan Ekspor							1.300. 000.000		1.300. 000.000		1.300. 000.000		1.300. 000.000		1.300. 000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Outcome: Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor	USD	375.981. 675 USD	375.000 .000	819. 794.750	380.000 .000	1.300. 000.000	385.000 .000	1.300. 000.000	390.000 .000	1.300. 000.000	395.000 .000	1.300. 000.000	400.000 .000	1.300. 000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
PERINDUSTRIAN																
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri							1.600. 000.000		1.600. 000.000		1.600. 000.000		1.600. 000.000		1.600. 000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Outcome: Meningkatnya IKM yang Berdaya Saing	Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) yang Difasilitasi	%	14	14	910. 608.000	15	1.600. 000.000	15	1.600. 000.000	16	1.600. 000.000	16	1.600. 000.000	16	1.600. 000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian



Program Pengendalian Izin Usaha Industri							60. 000.000		60. 000.000		60. 000.000		60. 000.000		60. 000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Outcome : Meningkatkan Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Industri	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	%	n/a	n/a	n/a	85	60. 000.000	85	60. 000.000	85	60. 000.000	85	60. 000.000	85	60. 000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
SEKRETARIAT DAERAH																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							167.866. 751.000		176.562. 248.702		186.732. 234.227		196.292. 924.619		200.218. 783.112	Sekretariat Daerah
Outcome: Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Umum	Persentase Peningkatan Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	%	30	35	167.187. 577.951	40	167.866. 751.000	45	176.562. 248.702	50	186.732. 234.227	55	196.292. 924.619	60	200.218. 783.112	Sekretariat Daerah
	Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
	Persentase Keterlaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kota Bekasi	%	100	100		100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Sesuai dengan Kebutuhan	%	100	100		100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100	100		100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
	Persentase Tertib Administrasi dan Manajerial Sekretariat Daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	100	100		100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	100	100		100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah



Outcome : Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Nilai	85,49	85,58		85,67		85,75		85,84		85,93		86,02		Sekretariat Daerah
Outcome : Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	100	100		100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat							52.012.000.000		54.706.221.600		57.857.299.964		60.819.593.722		62.035.985.597	Sekretariat Daerah
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum Daerah yang Diundangkan	%	100	100		100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
	Persentase Penyelesaian Perkara yang Dihadapi Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
	Persentase Peningkatan Pemahaman IKK LPPD pada Perangkat Daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
	Persentase Peningkatan Profil Kelurahan	%	3,57	8,93		10,71		16,07		19,64		19,64		21,43		Sekretariat Daerah
	Persentase Fasilitas Kegiatan Keagamaan	%	100	100		100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
	Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Sosial	%	100	100		100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
	Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kerja Sama Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
Program Perekonomian dan Pembangunan							5.426.520.320		5.707.614.073		6.036.372.643		6.345.434.922		6.685.550.234	Sekretariat Daerah
Outcome: Meningkatnya Tata Kelola Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan	%	100	100	5.463.044.375	100	5.426.520.320	100	5.707.614.073	100	6.036.372.643	100	6.345.434.922	100	6.685.550.234	Sekretariat Daerah
	Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Ekonomi	%	100	100		100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah



	Tingkat Kematangan UKPBJ	Level	-	3		3		3		3		3		3		Sekretariat Daerah	
SEKRETARIAT DPRD																	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								111.816. 658.562		115.171. 158.319		119.626. 293.068		124.141. 081.861		125.833. 572.549	Sekretariat DPRD
Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	87	88	101.077. 071.704	88	97.793. 488.562	88	100.724. 173.219	88	104.142. 778.415	88	108.507. 941.768	88	110.054. 380.021	Sekretariat DPRD	
Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	%	86,20	86,2	951. 170.000	86,2	951. 170.000	86,2	979. 705.100	86,2	1.009. 096.253	86,2	1.039. 369.141	86,2	1.070. 550.215	Sekretariat DPRD	
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	96,54	96,54	10.120. 596.000	96,54	12.992. 000.000	96,54	13.387. 280.000	96,54	14.394. 418.400	96,54	14.513. 770.952	96,54	14.628. 642.313	Sekretariat DPRD	
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD							107.348. 440.671		111.933. 012.641		116.442. 050.743		120.529. 379.241		121.283. 593.164	Sekretariat DPRD	
Outcome: Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang- Undangan	Persentase Fasilitas Pembahasan Raperda menjadi Perda Tahun N	%	100	100	21.880. 418.000	100	26.638. 181.000	100	28.801. 445.180	100	29.895. 446.223	100	30.152. 259.610	100	30.443. 484.847	Sekretariat DPRD	
	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Tepat/ Tidak Tepat	Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Sekretariat DPRD					
Outcome: Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan	Persentase Fasilitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	100	75.626. 837.139	100	80.710. 259.671	100	83.131. 567.461	100	86.546. 604.520	100	90.377. 119.631	100	90.840. 108.317	Sekretariat DPRD	
	Persentase Fasilitas Layanan Peningkatan Kapasitas dan Kegiatan DPRD	%	100	100		100		100		100		100		Sekretariat DPRD			
PERENCANAAN																	



Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				26.444. 520.496		26.909. 668.069		27.847. 048.700		27.573. 239.145		27.149. 795.281	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	100	100	38.779.000	100	50.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	91,71	91,81	25.069.972.060	91,91	24.007.183.440	92,01	24.404.668.069	92,11	25.224.548.700	92,21	24.883.239.145	92,31	24.774.795.281	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil (IP ASN) Perangkat Daerah	Nilai	88,51	88,61	434.002.800	88,71	707.300.000	88,81	780.000.000	88,91	847.500.000	89,01	915.000.000	89,11	550.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	N/A	94,4	928.727.000	94,59	1.680.037.056	94,77	1.625.000.000	94,96	1.675.000.000	95,15	1.525.000.000	95,33	1.575.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah							2.453.285.000		2.650.000.000		2.650.000.000		3.150.000.000		4.600.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Outcome: Meningkatnya Keselarasan antara Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program	%	81,58	83,30	3.570.484.000	84,90	2.453.285.000	86,50	2.650.000.000	88,10	2.650.000.000	89,70	3.150.000.000	91,30	4.600.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah							2.390.000.000		2.390.000.000		2.440.000.000		2.800.000.000		2.700.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Outcome: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Target Kinerja Program RPJMD dengan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	100	133.170.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	450.000.000	100	500.000.000	100	550.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah



Outcome: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase Keselarasan Target Kinerja Program RPJMD dengan RKPDP Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	%	100	100	110.879.000	100	590.000.000	100	590.000.000	100	590.000.000	100	700.000.000	100	700.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Outcome: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan Target Kinerja Program RPJMD dengan RKPDP Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	97	100	359.294.500	100	1.400.000.000	100	1.400.000.000	100	1.400.000.000	100	1.600.000.000	100	1.450.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
KEUANGAN																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							134.274.849.860		136.960.346.857		139.699.553.794		142.493.544.870		145.343.415.768	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	100	100	58.700.000	100	10.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	95,49	90	125.936.315.260	95,60	132.484.372.860	95,70	134.213.966.857	95,80%	136.953.173.794	95,90%	139.747.164.870	96%	142.597.035.768	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Nilai	88,09	88,11	50.000.000	88,44	160.477.000	88,87	700.000.000	89,20	700.000.000	89,63	700.000.000	89,96	700.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	100	100	1.086.144.300	100	1.620.000.000	100	1.896.380.000	100	1.896.380.000	100	1.896.380.000	100	1.896.380.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Program Pengelolaan Keuangan Daerah							34.465.000.000		35.503.097.000		37.719.835.388		39.850.770.959		42.195.812.282	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Outcome: Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Ketepatan Waktu Penetapan APBD	%	100	100	44.688.533.759	100	31.360.000.000	100	32.113.141.000	100	34.219.679.388	100	36.231.014.959	100	38.576.056.282	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



	Ketepatan Waktu Penetapan Perubahan APBD	%	100	100		100		100		100		100		100		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase Kebutuhan Penggunaan Belanja Tak Terduga yang Diajukan dengan yang Ditetapkan	%	100	100		100		100		100		100		100		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Outcome : Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	Persentase Penyerapan Belanja Daerah	%	86,12	86,2	425.145.000	86,5	1.360.000.000	86,7	1.263.650.000	86,7	1.373.850.000	86,7	1.493.450.000	86,7	1.493.450.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Outcome : Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase OPD dengan Laporan Keuangan Kategori Baik	%	N/A	77	1.786.695.000	77	1.745.000.000	79	2.126.306.000	81	2.126.306.000	84	2.126.306.000	86	2.126.306.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah							3.850.000.000		3.900.000.000		3.900.000.000		3.900.000.000		3.900.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Outcome: Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Kepatuhan Perangkat Daerah dalam pengelolaan BMD sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan	%	N/A	100	3.001.116.600	100	3.850.000.000	100	3.900.000.000	100	3.900.000.000	100	3.900.000.000	100	3.900.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase Penyelesaian Usulan Penggunaan, Pemanfaatan Barang Milik Daerah	%	N/A	70		71		72		73		74		75		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase Penyelesaian Usulan Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	%	N/A	82		83		84		85		86		87		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase Pengamanan Barang Milik Daerah	%	N/A	51		52		53		54		55		56		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	N/A	4		5		6		7		8		9		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							225.574.028.000		235.732.680.232		249.560.162.613		260.647.242.939		274.209.715.156	Badan Pendapatan Daerah
Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	96,07	96,1	110.000.000	96,25	10.000.000	96,3	10.000.000	96,5	10.000.000	96,75	160.000.000	97	10.000.000	Badan Pendapatan Daerah



Daerah dengan Penganggaran																
Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	70,15	94,83	140.496.330.123	95,5	220.999.074.000	96,58	230.622.680.232	97	243.900.162.613	97,02	255.337.242.939	97,50	268.049.715.156	Badan Pendapatan Daerah
Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	%	89,12	90	80.063.350	91	150.000.000	92	150.000.000	93	650.000.000	94	150.000.000	95	650.000.000	Badan Pendapatan Daerah
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	99,81	99,82	4.308.058.498	99,83	4.414.954.000	99,84	4.950.000.000	99,85	5.000.000.000	99,86	5.000.000.000	99,87	5.500.000.000	Badan Pendapatan Daerah
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah							5.964.934.000		7.800.000.000		8.000.000.000		10.100.000.000		10.100.000.000	Badan Pendapatan Daerah
Outcome: Meningkatnya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	44,93	48,89	15.065.493.036	60,59	5.964.934.000	61,75	7.800.000.000	62,89	8.000.000.000	64,03	10.100.000.000	65,15	10.100.000.000	Badan Pendapatan Daerah
	Persentase Peningkatan Wajib Pajak Daerah	%	1,27	2		1,5		1,5		1,5		1,5		Badan Pendapatan Daerah		
	Nilai Hasil Survei Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	Nilai	86,37	86,4		86,5		86,75		87		87,25		87,3		Badan Pendapatan Daerah
	Persentase Piutang Pajak dan Retribusi Daerah yang Terbayarkan	%	7,03	8		8		8		8		8		8		Badan Pendapatan Daerah
KEPEGAWAIAN DAERAH																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							17.146.236.000		17.489.160.720		17.838.943.934		18.195.722.813		18.559.637.269	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Outcome : Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	100	100	10.000.000	100	65.000.000	100	65.000.000	100	65.000.000	100	65.000.000	100	65.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Outcome : Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	89,25	89,5	18.468.002.040	89,75	15.920.236.000	90	15.860.160.720	90,25	16.094.943.934	90,5	16.346.722.813	90,75	16.610.637.269	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Outcome : Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Nilai	85	85,25	24.000.000	85,50	220.000.000	85,75	424.000.000	86	459.000.000	86,25	474.000.000	86,50	494.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Outcome : Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	100	100	564.413.000	100	941.000.000	100	1.140.000.000	100	1.220.000.000	100	1.310.000.000	100	1.390.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program Kepegawaian Daerah							10.868.200.000		11.431.172.760		12.089.608.311		12.708.596.256		13.389.777.016	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Outcome : Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian	Mutu Layanan Administrasi Kepegawaian Bernilai Baik	Nilai	Baik (87.75)	Baik (88.00)	1.438.580.500	Baik (88.25)	1.900.000.000	Baik (88.50)	2.140.000.000	Baik (88.75)	2.260.000.000	Sangat Baik (90.00)	2.340.000.000	Sangat Baik (90.25)	2.430.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Outcome : Meningkatnya Kualifikasi dan Kompetensi ASN	Nilai Dimensi Kualifikasi dan Dimensi Kompetensi pada Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	50,47	50,60	5.496.562.000	50,65	8.448.200.000	50,70	8.516.194.760	50,75	9.004.630.311	50,80	9.493.618.256	50,85	10.034.799.016	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Outcome : Meningkatnya Kinerja dan Disiplin ASN	Nilai Dimensi Kinerja dan Dimensi Disiplin pada Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	30,84	30,85	150.068.000	30,86	520.000.000	30,87	774.978.000	30,88	824.978.000	30,89	874.978.000	30,90	924.978.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																



Program Riset dan Inovasi Daerah							2.550.000.000		2.800.000.000		2.800.000.000		3.100.000.000		3.100.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Outcome: Meningkatnya Pemanfaatan Riset dan Inovasi dalam Pembangunan	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan	%	79,31	80,00	2.335.331.000	81,00	2.550.000.000	82,00	2.800.000.000	83,00	2.800.000.000	84,00	3.100.000.000	85,00	3.100.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	Jumlah Predikat Inovasi dan Inovasi yang Diperoleh Tingkat Nasional dan Provinsi	Predikat	5	2		2		2		2		2		3		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
INSPEKTORAT DAERAH																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							46.318.779.000		48.718.091.752		51.524.253.837		54.162.295.634		57.065.394.680	Inspektorat
Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	100	100	48.721.401.060	100	46.318.779.000	100	48.718.091.752	100	51.524.253.837	100	54.162.295.634	100	57.065.394.680	Inspektorat
Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	93,8	95		95		96		96		100		100		
Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Inspektorat	IP ASN Inspektorat	%	86,8	86,8				86,95		87		87,5		88		
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	100	100		100		100		100		100		100		
Program Penyelenggaraan Pengawasan							1.540.220.000		1.620.003.396		1.713.315.592		1.801.037.350		1.897.572.952	Inspektorat
Outcome: Meningkatnya Kepatuhan terhadap	Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Internal Tahun Anggaran N-1	%	74	74,5	1.907.429.000	74,55	1.540.220.000	74,6	1.620.003.396	74,65	1.713.315.592	74,7	1.801.037.350	74,75	1.897.572.952	Inspektorat



Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Eksternal Tahun Anggaran N-1	%	86,50	86,55	86,6		86,65		86,7		86,75		86,8		Inspektorat	
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi							1.319.118.800		1.387.449.154		1.467.366.225		1.542.495.376		1.625.173.128	Inspektorat
Outcome: Meningkatnya Kapabilitas Pengelolaan Risiko dan Implementasi Strategi Pencegahan Korupsi	Indeks Manajemen Risiko	Poin	2.717	3	1.461.553.000	3	1.319.118.800	3,15	1.387.449.154	3,17	1.467.366.225	3,2	1.542.495.376	3,22	1.625.173.128	Inspektorat
	Nilai MCSP KPK	Poin	90,23	90,5		91		91,5		92		92,5		93		Inspektorat
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							13.213.744.000		13.478.018.880		13.747.579.258		14.022.530.840		14.302.981.460	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Outcome: Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	12.919.513.000	100	13.213.744.000	100	13.478.018.880	100	13.747.579.258	100	14.022.530.840	100	14.302.981.460	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan							1.885.499.300		1.983.168.164		2.097.398.650		2.204.785.461		2.322.961.962	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Outcome: Meningkatnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	%	100	100	2.812.569.800	100	1.885.499.300	100	1.983.168.164	100	2.097.398.650	100	2.204.785.461	100	2.322.961.962	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial							2.637.200.000		2.773.806.960		2.933.578.241		3.083.777.447		3.249.067.918	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Outcome: Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Pencegahan Potensi Konflik Daerah	%	100	100	2.812.569.800	100	2.637.200.000	100	2.773.806.960	100	2.933.578.241	100	3.083.777.447	100	3.249.067.918	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik							10.287.880.000		10.820.792.184		11.444.069.814		12.030.006.188		12.674.814.520	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Outcome: Meningkatnya Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Pembinaan Politik Daerah	%	100	100	15.229.773.200	100	10.287.880.000	100	10.820.792.184	100	11.444.069.814	100	12.030.006.188	100	12.674.814.520	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan							5.850.000.000		6.153.030.000		6.507.444.528		6.840.625.688		7.207.283.225	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Outcome: Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	%	100	100	9.800.000.000	100	5.850.000.000	100	6.153.030.000	100	6.507.444.528	100	6.840.625.688	100	7.207.283.225	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya							377.820.900		397.392.023		420.281.803		441.800.231		465.480.724	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Outcome: Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	%	100	100	1.400.000.000	100	377.820.900	100	397.392.023	100	420.281.803	100	441.800.231	100	465.480.724	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
KECAMATAN PONDOK GEDE																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							22.677.507.424		22.945.487.424		22.945.487.424		22.945.487.424		22.945.487.424	Kecamatan Pondok Gede
Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	100	100	7.800.000	100	28.395.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	Kecamatan Pondok Gede
Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	96,63	96,7	14.917.710.000	96,9	18.945.928.000	97	18.945.303.000	97,2	18.945.303.000	97,4	18.945.303.000	97,6	18.945.303.000	Kecamatan Pondok Gede
Outcome: Meningkatnya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	%	80	80,2	102.338.800	80,4	20.000.000	80,6	20.000.000	80,8	20.000.000	81	20.000.000	81,2	20.000.000	Kecamatan Pondok Gede



Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	100	100	9.035.357.220	100	3.683.184.424	100	3.950.184.424	100	3.950.184.424	100	3.950.184.424	100	3.950.184.424	Kecamatan Pondok Gede
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik							280.000.000		370.000.000		370.000.000		370.000.000		370.000.000	Kecamatan Pondok Gede
Outcome: Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	%	100	100	240.000.000	100	280.000.000	100	370.000.000	100	370.000.000	100	370.000.000	100	370.000.000	Kecamatan Pondok Gede
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan							19.503.237.000		19.578.237.000		19.578.237.000		19.578.237.000		19.578.237.000	Kecamatan Pondok Gede
Outcome: Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik	Persentase LKM yang Aktif	%	100	100	17.650.469.800	100	19.503.237.000	100	19.578.237.000	100	19.578.237.000	100	19.578.237.000	100	19.578.237.000	Kecamatan Pondok Gede
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum							20.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Kecamatan Pondok Gede
Outcome: Meningkatnya Penanganan Penanganan Gangguan Potensi Konflik di Wilayah Kecamatan	Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat	%	100	100	39.350.000	100	20.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	Kecamatan Pondok Gede
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum							1.148.000.000		1.336.125.000		1.336.125.000		1.336.125.000		1.336.125.000	Kecamatan Pondok Gede
Outcome: Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Wilayah Tertib	%	100	100	1.252.675.000	100	1.148.000.000	100	1.336.125.000	100	1.336.125.000	100	1.336.125.000	100	1.336.125.000	Kecamatan Pondok Gede
KECAMATAN JATI SAMPURNA																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							22.574.254.000		23.191.268.536		23.315.500.536		23.447.592.536		23.545.196.536	Kecamatan Jatisampurna
Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	100	100	3.000.000	100	11.200.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	Kecamatan Jatisampurna
Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	95,26	95,3	15.521.771.000	95,5	19.488.977.000	95,7	19.488.977.000	95,9	19.490.977.000	96	19.493.977.000	96,2	19.498.977.000	Kecamatan Jatisampurna



Outcome: Meningkatnya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	%	82,71	82,9	53.900.000	83,1	20.000.000	83,3	20.000.000	83,5	20.000.000	83,7	20.000.000	83,9	20.000.000	Kecamatan Jatisampurna
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	100	100	7.253.028.380	100	3.104.077.000	100	3.667.291.536	100	3.789.523.536	100	3.918.615.536	100	4.011.219.536	Kecamatan Jatisampurna
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik							310.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000	Kecamatan Jatisampurna
Outcome: Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	%	100	100	159.755.000	100	310.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	Kecamatan Jatisampurna
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan							15.618.572.800		16.093.572.800		16.115.572.800		16.115.572.800		16.145.572.800	Kecamatan Jatisampurna
Outcome: Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik	Persentase LKM yang Aktif	%	100	100	14.677.381.400	100	15.618.572.800	100	16.093.572.800	100	16.115.572.800	100	16.115.572.800	100	16.145.572.800	Kecamatan Jatisampurna
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum							20.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Kecamatan Jatisampurna
Outcome: Meningkatnya Penanganan Potensi Konflik di Wilayah Kecamatan Jatisampurna	Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat	%	100	100	50.000.000	100	20.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	Kecamatan Jatisampurna
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum							1.369.875.000		1.420.875.000		1.420.875.000		1.420.875.000		1.420.875.000	Kecamatan Jatisampurna
Outcome: Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Jatisampurna	Persentase Wilayah Tertib	%	100	100	1.205.914.000	100	1.369.875.000	100	1.420.875.000	100	1.420.875.000	100	1.420.875.000	100	1.420.875.000	Kecamatan Jatisampurna
KECAMATAN JATIASIH																



Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							26.636.096.600		26.636.096.600		26.636.096.600		26.636.096.600		26.636.096.600	Kecamatan Jatiasih
Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	100	100	30.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	Kecamatan Jatiasih
Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	95,80	95,82	18.047.914.000	95,84	22.487.777.144	95,86	22.487.777.144	95,88	22.487.777.144	95,90	22.487.777.144	95,92	22.487.777.144	Kecamatan Jatiasih
Outcome: Meningkatnya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	%	86,11	86,13	0	86,15	20.000.000	86,17	20.000.000	86,19	20.000.000	86,21	20.000.000	86,23	20.000.000	Kecamatan Jatiasih
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	100	100	9.311.221.100	100	4.113.319.456	100	4.113.319.456	100	4.113.319.456	100	4.113.319.456	100	4.113.319.456	Kecamatan Jatiasih
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik							140.000.000		140.000.000		140.000.000		140.000.000		140.000.000	Kecamatan Jatiasih
Outcome: Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	%	88,08	88,08	39.362.000	88,10	140.000.000	88,12	140.000.000	88,14	140.000.000	88,16	140.000.000	88,18	140.000.000	Kecamatan Jatiasih
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan							24.657.889.000		24.657.889.000		24.657.889.000		24.657.889.000		24.657.889.000	Kecamatan Jatiasih
Outcome: Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik	Persentase LKM yang Aktif	%	100	100	24.668.021.200	100	24.657.889.000	100	24.657.889.000	100	24.657.889.000	100	24.657.889.000	100	24.657.889.000	Kecamatan Jatiasih
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum							70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000	Kecamatan Jatiasih
Outcome: Meningkatnya Penanganan Potensi Konflik di Wilayah Kecamatan Jatiasih	Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat	%	100	100	38.438.000	100	70.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000	Kecamatan Jatiasih
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum							340.000.000		340.000.000		340.000.000		340.000.000		340.000.000	Kecamatan Jatiasih



Outcome: Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Jatisampurna	Persentase Wilayah Tertib	%	100	100	267.014.000	100	340.000.000	100	340.000.000	100	340.000.000	100	340.000.000	100	340.000.000	Kecamatan Jatisasih
KECAMATAN BANTAR GEBANG																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							19.338.218.000		20.171.491.692		21.354.889.614		22.447.987.962		23.127.427.601	Kecamatan Bantargebang
Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	100	100	10.000.000	100	10.284.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	Kecamatan Bantargebang
Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	95,05	95,06	12.888.555.000	95,07	15.832.370.800	95,08	16.855.653.492	95,09	18.029.051.414	95,1	19.122.149.762	95,05	19.801.589.401	Kecamatan Bantargebang
Outcome: Meningkatnya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	%	82,59	82,6	9.275.000	82,61	20.000.000	82,62	20.000.000	82,63	20.000.000	82,64	20.000.000	82,65	20.000.000	Kecamatan Bantargebang
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	100	100	6.631.951.360	100	3.475.563.200	100	3.275.838.200	100	3.285.838.200	100	3.285.838.200	100	3.285.838.200	Kecamatan Bantargebang
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik							219.000.000		230.344.200		243.612.026		256.084.962		269.811.116	Kecamatan Bantargebang
Outcome: Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	%	100	100	204.562.000	100	219.000.000	100	230.344.200	100	243.612.026	100	256.084.962	100	269.811.116	Kecamatan Bantargebang
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan							9.338.084.200		9.821.796.962		10.387.532.467		10.919.374.129		11.504.652.582	Kecamatan Bantargebang
Outcome: Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik	Persentase LKM yang Aktif	%	100	100	8.643.723.200	100	9.338.084.200	100	9.821.796.962	100	10.387.532.467	100	10.919.374.129	100	11.504.652.582	Kecamatan Bantargebang
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum							80.000.000		84.144.000		88.990.694		80.000.000		98.561.138	Kecamatan Bantargebang



Outcome: Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat	%	100	100	37.025.000	100	80.000.000	100	84.144.000	100	88.990.694	100	80.000.000	100	98.561.138	Kecamatan Bantargebang
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum							859.604.000		904.131.487		956.209.461		1.005.167.385		1.059.044.357	Kecamatan Bantargebang
Outcome: Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Wilayah Tertib	%	100	100	790.625.000	100	859.604.000	100	904.131.487	100	956.209.461	100	1.005.167.385	100	1.059.044.357	Kecamatan Bantargebang
KECAMATAN RAWALUMBU																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							22.203.818.748		22.978.458.559		24.318.041.772		25.577.069.511		26.335.631.596	Kecamatan Rawalumbu
Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	100	100	27.745.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	Kecamatan Rawalumbu
Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	94,7	94,8	13.572.911.000	95	17.925.506.000	95,2	18.838.380.811	95,4	20.147.964.024	95,6	21.361.991.763	95,8	22.125.553.848	Kecamatan Rawalumbu
Outcome: Meningkatnya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	%	84,4	84,6	9.275.000	84,8	20.000.000	85	20.000.000	85,1	20.000.000	85,2	20.000.000	85,3	20.000.000	Kecamatan Rawalumbu
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	100	100	10.220.832.240	100	4.253.312.748	100	4.105.077.748	100	4.135.077.748	100	4.180.077.748	100	4.195.077.748	Kecamatan Rawalumbu
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik							95.000.000		99.921.000		105.676.450		111.087.084		117.041.352	Kecamatan Rawalumbu
Outcome: Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	%	100	100	151.432.000	100	95.000.000	100	99.921.000	100	105.676.450	100	111.087.084	100	117.041.352	Kecamatan Rawalumbu
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan							21.626.811.800		22.747.080.651		24.057.312.497		25.289.046.897		26.644.539.810	Kecamatan Rawalumbu



Outcome: Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik	Persentase LKM yang Aktif	%	100	100	21.862.987.400	100	21.626.811.800	100	22.747.080.651	100	24.057.312.497	100	25.289.046.897	100	26.644.539.810	Kecamatan Rawalumbu
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum							20.000.000		21.036.000		22.247.674		23.386.754		24.640.285	Kecamatan Rawalumbu
Outcome: Meningkatnya Penanganan Potensi Konflik di Wilayah Kecamatan	Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat	%	100	100	50.000.000	100	20.000.000	100	21.036.000	100	22.247.674	100	23.386.754	100	24.640.285	Kecamatan Rawalumbu
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum							1.315.695.000		1.383.848.001		1.463.557.646		1.538.491.797		1.620.954.958	Kecamatan Rawalumbu
Outcome: Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Wilayah Tertib	%	100	100	1.340.695.000	100	1.315.695.000	100	1.383.848.001	100	1.463.557.646	100	1.538.491.797	100	1.620.954.958	Kecamatan Rawalumbu
KECAMATAN MEDAN SATRIA																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							20.827.646.850		21.911.698.957		23.173.572.817		24.359.186.945		25.086.716.553	Kecamatan Medansatria
Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.500.000	100	11.025.000	100	11.576.250	100	12.155.063	Kecamatan Medansatria
Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	93,59	93,59	12.754.308.000	93,8	17.421.641.000	94	18.313.892.814	94,2	19.396.876.367	94,4	20.446.558.495	94,6	21.468.886.418	Kecamatan Medansatria
Outcome: Meningkatnya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	%	85,02	85,02	6.508.000	85,03	20.000.000	85,04	20.000.000	85,05	20.000.000	85,06	20.000.000	85,07	20.000.000	Kecamatan Medansatria
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	91	91	9.065.153.150	91,5	3.376.005.850	92	3.567.306.143	92,5	3.745.671.450	93	3.881.052.200	93,5	3.585.675.072	Kecamatan Medansatria
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik							1.896.244.000		1.994.469.439		2.109.350.879		2.217.349.644		2.336.199.585	Kecamatan Medansatria



Outcome: Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	%	100	100	285.954.000	100	1.896.244.000	100	1.994.469.439	100	2.109.350.879	100	2.217.349.644	100	2.336.199.585	Kecamatan Medansatria
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan							20.180.269.300		21.225.607.250		22.448.202.227		23.597.550.181		24.862.378.871	Kecamatan Medansatria
Outcome: Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik	Persentase LKM yang Aktif	%	100	100	15.402.568.100	100	20.180.269.300	100	21.225.607.250	100	22.448.202.227	100	23.597.550.181	100	24.862.378.871	Kecamatan Medansatria
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum							20.000.000		21.036.000		22.247.674		23.386.754		24.640.285	Kecamatan Medansatria
Outcome: Meningkatnya Penanganan Potensi Konflik di Wilayah Kecamatan	Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat	%	100	100	115.503.000	100	20.000.000	100	21.036.000	100	22.247.674	100	23.386.754	100	24.640.285	Kecamatan Medansatria
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum							2.131.285.312		2.241.685.891		2.370.806.998		2.492.192.317		2.625.773.825	Kecamatan Medansatria
Outcome: Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Wilayah Tertib	%	100	100	959.676.162	100	2.131.285.312	100	2.241.685.891	100	2.370.806.998	100	2.492.192.317	100	2.625.773.825	Kecamatan Medansatria
KECAMATAN MUSTIKA JAYA																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							19.913.148.040		20.955.009.108		22.173.537.633		23.319.062.760		24.024.634.643	Kecamatan Mustika Jaya
Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	Kecamatan Mustika Jaya
Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	95,34	95,34	13.028.031.000	95,35	17.328.330.440	95,36	18.370.191.508	95,37	19.588.720.033	95,38	20.734.244.960	95,39	21.439.816.843	Kecamatan Mustika Jaya
Outcome: Meningkatnya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	%	87,66	87,66	45.500.000	87,66	20.000.000	87,67	20.000.000	87,68	20.000.000	87,69	20.000.000	87,71	20.000.000	Kecamatan Mustika Jaya



Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	100	100	8.525.969.740	100	2.554.817.600	100	2.554.817.600	100	2.554.817.600	100	2.554.817.800	100	2.554.817.800	Kecamatan Mustika Jaya
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik							310.000.000		326.058.000		344.838.941		362.494.695		381.924.410	Kecamatan Mustika Jaya
Outcome: Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	%	100	100	180.000.000	100	310.000.000	100	326.058.000	100	344.838.941	100	362.494.695	100	381.924.410	Kecamatan Mustika Jaya
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan							21.807.729.600		22.937.369.993		24.258.562.505		25.500.600.905		26.867.433.114	Kecamatan Mustika Jaya
Outcome: Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik	Persentase LKM yang Aktif	%	100	100	19.955.394.600	100	21.807.729.600	100	22.937.369.993	100	24.258.562.505	100	25.500.600.905	100	26.867.433.114	Kecamatan Mustika Jaya
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum							20.000.000		21.036.000		25.000.000		23.386.754		24.640.285	Kecamatan Mustika Jaya
Outcome: Meningkatnya Penanganan Penanganan Potensi Konflik di Wilayah Kecamatan	Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat	%	100	100	21.200.000	100	20.000.000	100	21.036.000	100	25.000.000	100	23.386.754	100	24.640.285	Kecamatan Mustika Jaya
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum							471.112.000		495.515.602		524.057.300		550.889.034		580.416.686	Kecamatan Mustika Jaya
Outcome: Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Wilayah Tertib	%	100	100	427.285.000	100	471.112.000	100	495.515.602	100	524.057.300	100	550.889.034	100	580.416.686	Kecamatan Mustika Jaya
KECAMATAN PONDOK MELATI																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							18.727.072.600		19.357.041.120		20.622.561.445		21.690.852.591		22.348.853.169	Kecamatan Pondok Melati
Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	100	100	1.000.000	100	2.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	Kecamatan Pondok Melati



Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	95,35	95,35	12.473.060.000	95,44	15.666.532.000	95,53	12.476.060.000	95,62	12.476.060.000	95,71	12.476.060.000	95,71	12.476.060.000	Kecamatan Pondok Melati
Outcome: Meningkatnya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	%	84,10	84,10	40.000.000	84,18	20.000.000	84,26	20.000.000	84,32	20.000.000	84,42	20.000.000	84,42	20.000.000	Kecamatan Pondok Melati
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	100	100	6.117.868.770	100	3.038.540.600	100	6.855.981.120	100	8.121.501.445	100	9.189.792.591	100	9.847.793.169	Kecamatan Pondok Melati
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik							240.000.000		252.432.000		266.972.083		280.641.054		295.683.414	Kecamatan Pondok Melati
Outcome: Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	%	100	100	232.309.000	100	240.000.000	100	252.432.000	100	266.972.083	100	280.641.054	100	295.683.414	Kecamatan Pondok Melati
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan							15.323.514.400		16.117.272.446		17.045.627.339		17.918.363.459		18.878.787.740	Kecamatan Pondok Melati
Outcome: Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik	Persentase LKM yang Aktif	%	100	100	8.544.065.400	100	15.323.514.400	100	16.117.272.446	100	17.045.627.339	100	17.918.363.459	100	18.878.787.740	Kecamatan Pondok Melati
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum							20.000.000		21.036.000		22.247.674		23.386.754		24.640.285	Kecamatan Pondok Melati
Outcome: Meningkatnya Penanganan Potensi Konflik di Wilayah Kecamatan	Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat	%	100	100	50.000.000	100	20.000.000	100	21.036.000	100	22.247.674	100	23.386.754	100	24.640.285	Kecamatan Pondok Melati
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum							400.000.000		420.720.000		444.953.472		467.753.090		492.805.691	Kecamatan Pondok Melati
Outcome: Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Wilayah Tertib	%	100	100	500.896.000	100	400.000.000	100	420.720.000	100	444.953.472	100	467.753.090	100	492.805.691	Kecamatan Pondok Melati



KECAMATAN BEKASI TIMUR																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							22.596. 159.104		23.774. 410.146		25.152. 456.170		26.447. 941.926		27.245. 880.184	Kecamatan Bekasi Timur
Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	100	100	30. 000.000	100	15. 789.424	100	15. 789.424	100	15. 789.424	100	15. 789.424	100	15. 789.424	Kecamatan Bekasi Timur
Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	96,02	96,15	13.569. 601.000	96,30	18.123. 617.000	96,45	19.301. 868.042	96,6	20.679. 914.066	96,75	21.975. 399.822	97	22.773. 338.080	Kecamatan Bekasi Timur
Outcome: Meningkatnya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	%	83,13	83,15	33. 240.000	83,17	20. 000.000	83,19	30 000.000	83,21	30. 000.000	83,23	30. 000.000	83,25	30. 000.000	Kecamatan Bekasi Timur
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	100	100	10.490. 939.400	100	4.436. 752.680	100	4.436. 752.680	100	4.436. 752.680	100	4.436. 752.680	100	4.436. 752.680	Kecamatan Bekasi Timur
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik							290. 000.000		305. 022.000		322. 591.267		339. 107.940		357. 284.126	Kecamatan Bekasi Timur
Outcome: Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	%	100	100	230. 787.000	100	290. 000.000	100	305. 022.000	100	322. 591.267	100	339. 107.940	100	357. 284.126	Kecamatan Bekasi Timur
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan							22.916. 348.800		24.103. 415.668		25.491. 772.410		26.796. 951.158		28.233. 267.740	Kecamatan Bekasi Timur
Outcome: Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik	Persentase LKM yang Aktif	%	100	100	20.828. 866.000	100	22.916. 348.800	100	24.103. 415.668	100	25.491. 772.410	100	26.796. 951.158	100	28.233. 267.740	Kecamatan Bekasi Timur
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum							20. 000.000		21. 036.000		22. 247.674		23. 386.754		24. 640.285	Kecamatan Bekasi Timur
Outcome: Meningkatnya Penanganan Potensi Konflik di Wilayah Kecamatan	Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat	%	100	100	100. 000.000	100	20. 000.000	100	21. 036.000	100	22. 247.674	100	23. 386.754	100	24. 640.285	Kecamatan Bekasi Timur
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum							50. 000.000		52. 590.000		55. 619.184		58. 466.886		61. 600.711	Kecamatan Bekasi Timur



Outcome: Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Persentase Wilayah Tertib	%	100	100	145.150.000	100	50.000.000	100	52.590.000	100	55.619.184	100	58.466.886	100	61.600.711	Kecamatan Bekasi Timur
KECAMATAN BEKASI UTARA																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							32.013.001.096		33.670.756.553		35.609.616.130		37.432.316.476		38.554.985.970	Kecamatan Bekasi Utara
Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	100	100	15.358.013	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	Kecamatan Bekasi Utara
Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	97,34	97,34	20.182.242.000	97,34	27.342.681.000	97,34	29.000.436.457	97,34	30.939.296.034	97,34	32.761.996.380	97,34	33.884.665.874	Kecamatan Bekasi Utara
Outcome: Meningkatnya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	%	84,22	84,6	18.550.000	84,22	20.000.000	84,22	20.000.000	84,22	20.000.000	84,22	20.000.000	84,22	20.000.000	Kecamatan Bekasi Utara
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	100	100	13.931.576.375	100	4.630.320.096	100	4.630.320.096	100	4.630.320.096	100	4.630.320.096	100	4.630.320.096	Kecamatan Bekasi Utara
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik							280.000.000		294.504.000		311.467.430		327.414.563		344.965.970	Kecamatan Bekasi Utara
Outcome: Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	%	100	100	400.000.000	100	280.000.000	100	294.504.000	100	311.467.430	100	327.414.563	100	344.965.970	Kecamatan Bekasi Utara
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan							36.109.100.200		37.979.551.590		40.167.173.762		42.223.733.059		44.486.925.151	Kecamatan Bekasi Utara
Outcome: Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik	Persentase LKM yang Aktif	%	100	100	32.010.190.900	100	36.109.100.200	100	37.979.551.590	100	40.167.173.762	100	42.223.733.059	100	44.486.925.151	Kecamatan Bekasi Utara
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum							30.000.000		31.554.000		33.371.510		35.080.132		36.960.427	Kecamatan Bekasi Utara



Outcome: Meningkatnya Penanganan Gangguan Potensi Konflik di Wilayah Kecamatan	Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat	%	100	100	40.000.000	100	30.000.000	100	31.554.000	100	33.371.510	100	35.080.132	100	36.960.427	Kecamatan Bekasi Utara
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum							60.000.000		63.108.000		66.743.021		70.160.263		73.920.854	Kecamatan Bekasi Utara
Outcome: Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Wilayah Tertib	%	100	100	75.000.000	100	60.000.000	100	63.108.000	100	66.743.021	100	70.160.263	100	73.920.854	Kecamatan Bekasi Utara
KECAMATAN BEKASI BARAT																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							23.982.549.440		25.232.278.801		26.693.923.660		28.067.999.751		28.914.344.744	Kecamatan Bekasi Barat
Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	100	100	8.530.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	Kecamatan Bekasi Barat
Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	95,22	95,22	15.559.606.000	95,22	20.354.793.000	95,22	21.604.522.361	95,22	23.066.167.220	95,22	24.440.243.311	95,22	25.286.588.304	Kecamatan Bekasi Barat
Outcome: Meningkatnya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	%	83,7	83,7	6.375.000	83,7	20.000.000	83,7	20.000.000	83,7	20.000.000	83,7	20.000.000	83,7	20.000.000	Kecamatan Bekasi Barat
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	100	100	9.854.070.680	100	3.592.756.440	100	3.592.756.440	100	3.592.756.440	100	3.592.756.440	100	3.592.756.440	Kecamatan Bekasi Barat
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik							320.000.000		336.576.000		355.962.778		374.188.072		394.244.552	Kecamatan Bekasi Barat
Outcome: Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	%	100	100	387.735.000	100	320.000.000	100	336.576.000	100	355.962.778	100	374.188.072	100	394.244.552	Kecamatan Bekasi Barat
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan							22.916.366.400		24.103.434.180		25.419.791.988		26.796.971.738		28.233.289.423	Kecamatan Bekasi Barat
Outcome: Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik	Persentase LKM yang Aktif	%	100	100	20.733.903.800	100	22.916.366.400	100	24.103.434.180	100	25.419.791.988	100	26.796.971.738	100	28.233.289.423	Kecamatan Bekasi Barat



Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum								20. 000.000		21. 036.000		22. 247.674		23. 386.754		24. 640.285	Kecamatan Bekasi Barat
Outcome: Meningkatnya Penanganan Potensi Konflik di Wilayah Kecamatan	Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat	%	100	100	38. 312.000	100	40. 000.000	100	21. 036.000	100	22. 247.674	100	23. 386.754	100	24. 640.285	Kecamatan Bekasi Barat	
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum							1.535. 233.000		1.614. 758.069		1.707. 768.134		1.795. 205.863		1.891. 428.897	Kecamatan Bekasi Barat	
Outcome: Meningkatkan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Wilayah Tertib	%	100	100	1.439. 675.000	100	1.535. 233.000	100	1.614. 758.069	100	1.707. 768.134	100	1.795. 205.863	100	1.891. 428.897	Kecamatan Bekasi Barat	
KECAMATAN BEKASI SELATAN																	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							24.657. 176.000		25.813. 381.717		27.295. 992.504		28.693. 129.320		29.547. 102.199	Kecamatan Bekasi Selatan	
Outcome: Meningkatkan Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	100	100	5.000.000	100	15. 000.000	100	16. 500.000	100	17. 325.000	100	17. 498.200	100	18. 373.200	Kecamatan Bekasi Selatan	
Outcome: Meningkatkan Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	93	93,1	15.266. 169.000	93,2	20.533. 030.200	93,3	21.468. 901.717	93,4	22.792. 788.504	93,5	24.117. 093.420	93,6	24.805. 764.199	Kecamatan Bekasi Selatan	
Outcome: Meningkatkan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	%	84,34	84,4	54. 118.000	84,5	20. 000.000	84,6	20. 000.000	84,7	20. 000.000	84,8	20. 000.000	84,9	20. 000.000	Kecamatan Bekasi Selatan	
Outcome: Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	100	100	10.873. 708.060	100	4.089. 145.800	100	4.307. 980.000	100	4.465. 879.000	100	4.538. 537.700	100	4.702. 964.800	Kecamatan Bekasi Selatan	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik							300. 000.000		315. 540.000		333. 715.104		350. 801.317		369. 604.268	Kecamatan Bekasi Selatan	
Outcome: Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	%	100	100	282. 500.000	100	300. 000.000	100	315. 540.000	100	333. 715.104	100	350. 801.317	100	369. 604.268	Kecamatan Bekasi Selatan	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan							23.165. 457.000		24.365. 427.673		25.768. 876.307		27.088. 242.773		28.540. 172.586	Kecamatan Bekasi Selatan	
Outcome: Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik	Persentase LKM yang Aktif	%	100	100	12.980. 088.575	100	23.165. 457.000	100	24.365. 427.673	100	25.768. 876.307	100	27.088. 242.773	100	28.540. 172.586	Kecamatan Bekasi Selatan	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum							50. 000.000		52. 590.000		55. 619.184		58. 466.886		61. 600.711	Kecamatan Bekasi Selatan	



Outcome: Meningkatnya Penanganan Potensi Konflik di Wilayah Kecamatan	Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat	%	100	100	50. 000.000	100	50. 000.000	100	52. 590.000	100	55. 619.184	100	58. 466.886	100	61. 600.711	Kecamatan Bekasi Selatan	
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum							50. 000.000		52. 590.000		55. 619.184		58. 466.886		61. 600.711	Kecamatan Bekasi Selatan	
Outcome: Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Wilayah Tertib	%	100	100	50. 000.000	100	50. 000.000	100	52. 590.000	100	55. 619.184	100	58. 466.886	100	61. 600.711	Kecamatan Bekasi Selatan	
Outcome: Meningkatnya Tata Kelola Bidang	Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerintahan	%	100	100	50.389. 419.150	100	52.012. 000.000	100	54.706. 221.600	100	57.857. 299.964	100	60.819. 593.722	100	62.035. 985.597	Sekretariat Daerah	
Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	96,55	98	80. 000.000	98	80. 000.000	98	80. 000.000	98	80. 000.000	98	80. 000.000	98	80. 000.000	Sekretariat DPRD	



d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Dalam penyusunan proyeksi Pendapatan Daerah ini perlu mempertimbangkan beberapa asumsi terkait dengan pertumbuhan pendapatan Kota Bekasi selama beberapa tahun ke belakang, potensi pendapatan daerah yang dapat diperoleh Pemerintah Kota Bekasi selama lima tahun ke depan, dan kebijakan keuangan pemerintah pusat, serta kondisi ekonomi makro Kota Bekasi.

Proyeksi Belanja Daerah dilakukan dengan memperhatikan proyeksi Pendapatan Daerah Kota Bekasi selama 5 (lima) tahun ke depan dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi dalam menutup kemungkinan terjadinya defisit anggaran. Akan tetapi, kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kota Bekasi selama ini berpegang pada prinsip keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Untuk itu, Belanja Daerah Kota Bekasi disusun berdasarkan asumsi pertumbuhan yang sama dengan pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.46
Proyeksi APBD Kota Bekasi Tahun 2026-2030 (Miliar Rupiah)

Uraian	2026	2027	2028	2029	2030
Pendapatan Daerah	6.820,79	7.027,22	7.244,67	7.473,35	7.713,40
Pendapatan Asli Daerah	4.132,56	4.338,99	4.556,43	4.785,11	5.025,16
Pajak Daerah	3.550,53	3.740,18	3.922,77	4.114,07	4.307,87
Retribusi Daerah	519,18	531,78	558,14	581,85	612,53
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22,75	29,19	36,48	47,71	60,42
Lain-lain PAD yang Sah	40,09	37,82	39,03	41,47	44,33
Pendapatan Transfer	2.688,23	2.688,23	2.688,23	2.688,23	2.688,23
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.343,34	2.343,34	2.343,34	2.343,34	2.343,34
▪ Dana Bagi Hasil (DBH)	194,73	194,73	194,73	194,73	194,73
▪ Dana Alokasi Umum (DAU)	1.477,17	1.477,17	1.477,17	1.477,17	1.477,17
▪ Dana Alokasi Khusus (DAK)	671,43	671,43	671,43	671,43	671,43

Uraian	2026	2027	2028	2029	2030
Pendapatan Daerah	6.820,79	7.027,22	7.244,67	7.473,35	7.713,40
□ DAK Fisik	-	-	-	-	-
□ DAK Non Fisik	671,43	671,43	671,43	671,43	671,43
Pendapatan Transfer Antar Daerah	344,89	344,89	344,89	344,89	344,89
▪ Pendapatan Bagi Hasil	344,89	344,89	344,89	344,89	344,89
▪ Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-	-
Belanja Daerah	6.827,22	6.789,56	7.182,88	7.576,20	7.969,00
Belanja Operasi	6.797,22	6.254,56	6.542,88	6.831,20	7.119,51
Belanja Modal	0,00	500,00	600,00	700,00	800,00

Sumber : BPKAD Kota Bekasi, 2025

Apabila mengacu rata-rata perkembangan Pendapatan Daerah dalam 6 tahun terakhir ini (2019-2024) sebesar 4,24 persen, maka Pendapatan Daerah tahun 2026 diperkirakan naik. Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Bekasi pada 2026 diperkirakan sebesar Rp6.820,79 miliar dan pada tahun 2030 sebesar Rp7.713,40 miliar. Sedangkan, Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi di tahun 2024 sebesar Rp 2.671,24 miliar diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan menjadi Rp5.025,16 miliar di tahun 2030. Untuk mencapai proyeksi Pendapatan Daerah Kota Bekasi, perlu beberapa kebijakan yang harus dilakukan di masa mendatang, antara lain:

- a. Peningkatan Pendapatan Daerah dari komponen PAD yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, terutama pajak restoran, pajak penerangan jalan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- b. Penyempurnaan sistem dan regulasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Identifikasi objek-objek wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. Peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah melalui pengelolaan sumber daya daerah secara lebih profesional; dan
- e. Intensifikasi pendapatan daerah melalui penyesuaian tarif pajak

daerah dan retribusi daerah.

Berdasarkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah tersebut, Belanja Daerah Kota Bekasi pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp 6.835,93 miliar dan akan tumbuh menjadi Rp 8.498,20 miliar pada tahun 2030.

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, pemerintah daerah dapat melakukan langkah dan upaya untuk menambah sumber pendapatan daerah. Upaya ini dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kegiatan pembangunan dalam bidang perekonomian melalui pembentukan dan penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD.

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD adalah :

- a. Penyertaan modal pemerintah daerah merupakan bagian dari investasi langsung. Untuk itu perlu dilakukan analisis kelayakan, analisis portofolio, dan analisis risiko atas penyertaan modal tersebut.
- b. Dana untuk penyertaan modal harus berasal dari surplus APBD;
- c. Penyertaan modal harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah;
- d. Penyertaan modal dapat berupa uang atau barang milik daerah,
- e. Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal BUMD dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh pemerintah daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD;
- f. Penyertaan modal pemerintah harus memperhatikan aspek keamanan, sehingga keputusan penyertaan modal harus didasarkan pada analisis investasi agar dana publik terbebas dari risiko kerugian.

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, Pemerintah Kota Bekasi dimungkinkan memanfaatkan surplus APBD untuk melakukan penyertaan modal kepada BUMD yang ada. Tujuan melakukan penyertaan modal pada BUMD adalah untuk memanfaatkan adanya surplus APBD, mengembangkan jangkauan pelayanan BUMD, dan menambah sumber pendapatan daerah.

Secara khusus, untuk 5 (lima) tahun ke depan, kontribusi PAD dari BUMD pada tahun 2026 ditarget sebesar Rp22,75 miliar, meningkat menjadi Rp60,42 miliar di tahun 2030. Kondisi ini sangat diperlukan agar kinerja BUMD semakin membaik dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan Kota Bekasi.

Berdasarkan proyeksi keuangan, baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan, disusun analisis terkait kapasitas real keuangan daerah. Kapasitas riil ini dihitung dengan mengkalkulasi penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan daerah dan SiLPA, untuk kemudian dikurangi dengan pengeluaran berupa belanja operasi dan pengeluaran pembiayaan. Program prioritas pembangunan untuk mendukung pencapaian target tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bekasi 2025-2029 dan Prioritas Pembangunan Kepala Daerah secara lebih detil dijabarkan dalam table berikut ini :

Tabel 1.47
Program Prioritas Pembangunan

PROGRAM PRIORITAS KOTA BEKASI	PAGU INDIKATIF TAHUN Dalam Juta (Rp 000.000)						PD PENGAMPU BIDANG URUSAN
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.568	1.460	1.535	1.624	1.707	1.741	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Penataan Bangunan Gedung	187.379	144.559	153.734	154.129	162.020	170.121	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	231.3711	170.591	185.233	173.920	179.137	195.260	Pertanahan
Program Penyelenggaraan Jalan	277.784	320.262	328.111	330.796	340.720	357.756	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	25.877	16.735	16.915	3.874	4.073	4.291	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	101.124	94.309	123.706	131.740	138.540	149.473	Perhubungan
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	7.736	7.390	7.649	5.547	5.831	6.144	Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	25.783	60.750	63.897	67.577	71.037	74.845	Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	31.575	49.923	52.509	55.534	58.377	62.464	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengelolaan Persampahan	202.873	317.166	329.078	336.872	348.804	364.346	Lingkungan Hidup

PROGRAM PRIORITAS KOTA BEKASI	PAGU INDIKATIF TAHUN Dalam Juta (Rp 000.000)						PD PENGAMPU BIDANG URUSAN
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Program Penanggulangan Bencana	6.604	5.377	5.656	5.982	6.288	6.625	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Linmas
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	886	1.270	2.600	1.100	1.100	1.600	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Linmas
Program Pengelolaan Pendidikan	592.320	557.475	595.609	623.697	636.171	642.533	Pendidikan
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.112	3.500	3.665	3.559	3.741	3.942	Pendidikan
Program Pembinaan Perpustakaan	1.516	1.920	2.019	2.135	2.245	2.236	Perpustakaan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	244.047	226.847	244.419	259.173	272.555	286.183	Kesehatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	48.869	16.223	17.063	18.046	18.970	19.987	Kesehatan
Program Kawasan Permukiman	16.876	20.399	21.456	22.691	23.853	25.132	Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1.350	4.000	1.600	1.700	1.800	1.900	Kepemudaan dan Olahraga
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	4.246	37.100	3.513	3.579	3.689	3.799	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1.998	1.299	1.366	1.445	1.519	1.600	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.360	1.076	2.120	2.220	2.320	2.520	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	502	2.047	2.373	2.729	3.139	3.610	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pemenuhan Hak Anak	1.451	1.611	1.830	2.010	2.175	2.460	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pengembangan Ekspor	819	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	Perdagangan
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	910	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	Perindustrian
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	702	500	500	600	700	800	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Program Pengembangan UMKM	2.139	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.075	1.510	1.570	1.650	1.900	1.700	Pariwisata
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	-	200	200	200	500	600	Pariwisata
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	539	500	500	500	650	650	Pariwisata
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	278	758	805	825	857	882	Pangan

PROGRAM PRIORITAS KOTA BEKASI	PAGU INDIKATIF TAHUN Dalam Juta (Rp 000.000)						PD PENGAMPU BIDANG URUSAN
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Program Pengawasan Keamanan Pangan	328	150	165	170	175	200	Pangan
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	4.170	1.054	1.054	1.054	1.084	1.084	Tenaga Kerja
Program Penempatan Tenaga Kerja	257	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	Tenaga Kerja
Program Pemberdayaan Sosial	3.166	2.387	2.510	2.655	2.791	2.940	Sosial
Program Rehabilitasi Sosial	8.425	4.962	5.219	5.520	5.803	6.114	Sosial
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.800	3.040	3.197	3.381	3.554	3.745	Sosial
Program Pelayanan Penanaman Modal	3.667	4.293	4.515	4.775	5.019	5.289	Penanaman Modal
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	205	225	600	250	263	277	Penanaman Modal
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	37.439	38.677	40.015	40.595	40.780	41.135	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Linmas
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi dan Sosial Budaya	1.400	377	397	420	441	465	Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	50.389	52.012	54.706	57.857	60.819	62.035	Sekretariat Daerah
Program Kepegawaian Daerah	1.438	1.900	2.140	2.260	2.340	2.430	Kepegawaian
Program Pendaftaran Penduduk	3.900	3.550	3.733	3.948	4.151	4.373	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pencatatan Sipil	1.080	700	736	778	818	862	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	240	280	370	370	370	370	Kecamatan (Pondok Gede)
	159	310	350	350	350	350	Kecamatan (Jati Sampurna)
	39	140	140	140	140	140	Kecamatan (Jatiasih)
	204	219	230	243	256	268	Kecamatan (Bantar Gebang)
	151	95	99	105	111	117	Kecamatan (Rawa Lumbu)
	285	1.896	1.994	2.109	2.217	2.336	Kecamatan (Medan Satria)
	180	310	326	344	362	381	Kecamatan (Mustika Jaya)
	232	240	252	266	280	295	Kecamatan (Pondok Melati)
	230	290	305	322	339	357	Kecamatan (Bekasi Timur)
	400	280	294	311	327	344	Kecamatan
							(Bekasi Utara)
	387	320	336	355	374	394	Kecamatan (Bekasi Barat)
	282	300	315	333	350	369	Kecamatan (Bekasi Selatan)

PROGRAM PRIORITAS KOTA BEKASI	PAGU INDIKATIF TAHUN Dalam Juta (Rp 000.000)						PD PENGAMPU BIDANG URUSAN
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	17.650	19.503	19.578	19.578	19.578	19.578	Kecamatan (Pondok Gede)
	14.677	15.618	16.093	16.115	16.115	16.145	Kecamatan (Jati Sampurna)
	24.668	24.657	24.657	24.657	24.657	24.657	Kecamatan (Jatiasih)
	8.643	9.338	9.821	10.387	10.919	11.504	Kecamatan (Bantar Gebang)
	21.862	21.626	22.747	24.057	25.289	26.644	Kecamatan (Rawa Lumbu)
	15.402	20.180	21.255	22.448	23.597	24.862	Kecamatan (Medan Satria)
	19.955	21.807	22.937	24.258	25.500	26.867	Kecamatan (Mustika Jaya)
	8.544	15.323	16.117	17.045	17.918	18.878	Kecamatan (Pondok Melati)
	20.828	22.916	24.103	25.491	26.796	28.233	Kecamatan (Bekasi Timur)
	32.000	36.109	37.979	40.167	42.223	44.486	Kecamatan (Bekasi Utara)
	20.733	22.916	24.103	25.419	26.796	29.233	Kecamatan (Bekasi Barat)
	12.980	23.265	24.365	25.768	27.088	28.540	Kecamatan (Bekasi Selatan)
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	97.506	107.348	111.933	116.442	120.529	121.283	Sekretariat DPRD
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3.570	2.453	2.650	2.650	3.150	4.600	Perencanaan
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	602	2.390	2.390	2.440	2.800	2.700	Perencanaan
Program Riset dan Inovasi	2.335	2.550	2.800	2.800	3.100	3.100	Penelitian dan Pengembangan
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	46.899	34.465	35.503	37.719	39.850	42.195	Keuangan
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.001	3.850	3.900	3.900	3.900	3.900	Keuangan
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	15.065	5.964	7.800	8.000	10.100	10.100	Keuangan
Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.907	1.540	1.620	1/713	1.801	1.897	Inspektorat Daerah
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1.461	1.319	1.387	1.4671	1.542	1.625	Inspektorat Daerah

1.1.3 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

1.1.3.1. Dasar Hukum

Dasar hukum penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kota Bekasi pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Sub Urusan Bencana Daerah Kab/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
14. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
15. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

1.1.3.2. Kebijakan Umum Daerah

Sesuai dengan pasal 18 UU Nomor 23 Tahun 2023, penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Konsekuensinya, pemerintah daerah harus menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penerapan SPM ini diprioritaskan bagi warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya.

Penerapan SPM di Kota Bekasi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir telah menunjukkan kemajuan. Pada tahun 2024, dari 29 indikator kinerja pelayanan dasar yang harus dipenuhi terdapat 12 indikator yang capaiannya mencapai 100 persen, sebanyak 12 indikator capaiannya antara 80-99 persen, dan sisanya berada di bawah 80 persen. Adapun pada tahun 2023, hanya 12 indikator yang capaiannya 100 persen, 11 indikator capaiannya antara 80-99 persen, dan 4 indikator capaiannya di bawah 80 persen. Jika dicermati, pada tahun 2023 dan 2024 terdapat 2 indikator yang capaiannya 0 persen yaitu indikator pada urusan perumahan rakyat. Hal ini dikarenakan pada tahun tersebut tidak terdapat kejadian bencana dan tidak terdapat program pemerintah yang mengharuskan untuk dilakukannya relokasi.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 18 menjelaskan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar harus berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pelayanan Dasar yang dimaksud dalam hal ini adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Sedangkan Standar Pelayanan Minimal yang dimaksud dalam hal ini adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secaraminimal.

Dalam menjalankan ketentuan pasal 18, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, yang dimaksud dengan Pelayanan dasar dijelaskan bahwa pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal tersebut harus didasarkan pada prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

Pelayanan Dasar yang dilakukan berdasarkan pada Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Pemerintah Kota Bekasi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari 6 urusan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 antara lain: (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

(4) Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman; (5) Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan (6) Sosial.

Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diatas sekaligus merupakan jenis layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kota Bekasi yang harus mencakup materi muatan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 antara lain: (1) Jenis Pelayanan Dasar; (2) Mutu Pelayanan Dasar; dan (3) Penerima Pelayanan Dasar. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 mengatur bahwa setiap standar pelayanan minimal memiliki standar teknis masing-masing yang sekurang-kurangnya memuat: (1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; (2) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial;dan (3) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Standar teknis yang dimaksud diatas, ditetapkan oleh kementerian terkait setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait, misalnya urusan pendidikan mengacu terhadap standar teknis yang ditetapkan oleh kementerian menyelenggarakan urusan pemerintahan di urusan pendidikan dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Secara rinci akan dijelaskan tentang layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

Tabel 1.49
Penjelasan Standar Pelayanan Minimal Dasar Menurut Urusan

No.	Urusan	Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal
1.	Pendidikan	a. Pendidikan anak usia dini. b. Pendidikandasar. c. Pendidikankesetaraan.
2.	Kesehatan	a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil. b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin. c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir.

No.	Urusan	Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal
		d. Pelayanan Kesehatan Balita. e. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar. f. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif. g. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lansia. h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi. i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus. j. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat. k. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis. l. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh <i>Human Immunodeficiency Virus</i> (HIV).
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari. b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman	a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kota. b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kota.
5.	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum. b. pelayanan informasi rawan bencana. c. pelayanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana. d. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. e. pelayanan penyelamatan dan evakuasikorban.
6	Sosial	a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luarpanti. b. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti. c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia

No.	Urusan	Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal
		telantar diluar panti d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti. e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kota.

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 bahwa penerapan Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Teknis yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian terkait dilakukan melalui 4 (empat) tahapan: (1) Pengumpulan data; (2) Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (3) Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (4) Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Sedangkan Laporan Standar Pelayanan Minimal termasuk dalam materi muatan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Materi muatan laporan penerapan Standar Pelayanan Minimal sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut: (1) Hasil penerapan SPM; (2) Kendala penerapan SPM; dan (3) Ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.

Khusus bagi Pemerintah Provinsi, Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencantumkan rekapitulasi penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten/Kota. Hasil laporan penerapan Standar Pelayanan Minimal dijadikan dasar bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam melakukan berbagai tindakan yaitu:

Tabel 1.50
Jenis Tindakan Menurut Tingkatan Pemerintah

No	Stakeholder	Jenis Tindakan Yang Dilakukan
1.	Pemerintah Pusat	1. Perumusan kebijakan nasional. 2. Pertimbangan pemerintah pusat untuk memberikan insentif dan disinsentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Pemerintah Daerah	1. Penilaian kinerja perangkat daerah. 2. Pengembangan kapasitas daerah dalam peningkatan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. 3. Penyempurnaan kebijakan penerapan SPM dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018.

Satu hal penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan Standar Pelayanan Minimal yaitu bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal, atas dasar prioritas tersebut dan terlaksananya Standar Pelayanan Minimal maka Standar Pelayanan Minimal telah menjamin hak konstitusional masyarakat. Oleh karena itu, ditegaskan bukan kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas utama apalagi kinerja kementerian tetapi prioritas utamanya yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Negara.

Dalam mendukung penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, maka Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Berbagai jenis Pelayanan Dasar untuk Kabupaten/Kota sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 Ayat (2) Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 yang terdiri atas:

1. Pendidikan anak usia dini;
2. Pendidikan dasar;
3. Pendidikan kesetaraan;

4. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
5. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
6. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
7. Pelayanan kesehatan balita;
8. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
9. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
10. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
11. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
12. Pelayanan kesehatan penderita diabetesmelitus;
13. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
14. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
15. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*);
16. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
17. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
18. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota;
19. Pasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
20. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
21. Pelayanan informasi rawanbencana;
22. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
23. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
24. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
25. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
26. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luarpanti;
27. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luarpanti;
28. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti;dan
29. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap

darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

Mutu Pelayanan Dasar yang dilakukan melalui layanan diatas harus sesuai dengan standar teknis yang diatur oleh Menteri teknis yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar setelah berkoordinasi dengan Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Ketentuan mengenai orientasi dan komitmen yang ditetapkan Pemerintah Kota Bekasi melalui kebijakan umum anggaran dialokasikan untuk pemenuhan pencapaian target penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023 yang dituangkan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah Kota Bekasi Tahun 2022-2026 dimana didalam peraturan tersebut tertuang Proyeksi Kebutuhan Anggaran berdasarkan Jenis dan Mutu Layanan Dasar SPM. Wali Kota menugaskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan SPM untuk melaksanakan pencapaian Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah yang di koordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi tata pemerintahan pada Sekretariat Daerah sebagai sekretariat tim penerapan SPM di Daerah.

Dalam menentukan kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar maka harus dilakukan perhitungan secara akurat dengan cara menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah Warga Negara penerima dan Mutu Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal. Kemudian hasil penghitungan tersebut digunakan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 8, Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan yang

dimuat dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD, yang mana Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar tersebut merupakan salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kemudian, Perangkat Daerah memprioritaskan anggaran program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.

Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar bahwa Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang sudah dibuat sekaligus menetapkan target pencapaian program dan kegiatan berdasarkan data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap tahunnya. Selanjutnya, implementasi pemenuhan Pelayanan Dasar dilakukan berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerjasama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk: (1) Membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (2) Memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya sesuai dengan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal. Sedangkan dalam hal kerjasama daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tercapainya kesuksesan penerapan Standar Pelayanan Minimal perlu didukung dengan dilakukannya koordinasi yang melibatkan

berbagai stakeholder, dimana Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah berwenang mengoordinasikan pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal secara nasional, Gubernur berwenang mengoordinasikan

Pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal di daerah provinsi, sedangkan Bupati/Wali Kota berwenang mengoordinasikan pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal di daerah kabupaten/kota. Selain itu juga, perlu dibentuk dibentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal daerah provinsi dan kabupaten/kota. Konteks koordinasi yang dilakukan meliputi: (1) Penerapan, pemantauan dan evaluasi Standar Pelayanan Minimal; dan (2) Penanganan isu dan permasalahan penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam hal pelaporan penerapan Standar Pelayanan Minimal Permendagri nomor 59 Tahun 2021 menjelaskan bahwa pelaporan penerapan Standar Pelayanan Minimal dimuat dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, materi laporan penerapan Standar Pelayanan Minimal paling sedikit memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal.



**LPPD
2025**

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH



BAB II

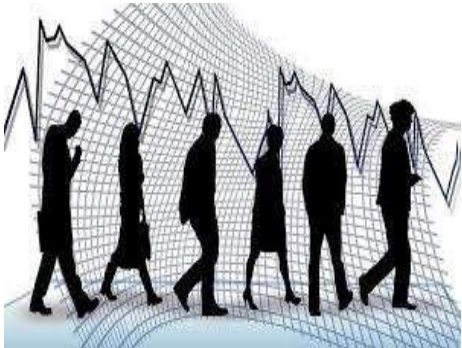
CAPAIAN KINERJA

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Untuk menyajikan capaian kinerja makro, Pemerintah Kota Bekasi menggunakan data yang dirilis dari Badan Pusat Statistik Kota Bekasi pada tahun 2025, yaitu capaian kinerja makro tahun 2025 dan pembandingnya adalah Capaian Kinerja Makro tahun 2024 yang tertuang dalam Buku Kota Bekasi Dalam Angka (*Bekasi Municipality in Figures 2025*). Sementara Capaian kinerja makro yang disajikan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 mempergunakan data capaian kinerja makro tahun 2024 dan Tahun 2025. Data Capaian Kinerja Makro yang telah sesuai dengan data yang dirilis tahun 2024 dan 2025 antara lain Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pendapatan Perkapita. Adapun data capaian kinerja makro tahun 2024 dan 2025 sebagai berikut:



Tabel 2.1
Capaian Kinerja Makro Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025	Laju Kinerja (%)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	83,55	84,43	+1,05%
2.	Angka Kemiskinan	4,01	3,96	-1,25%
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,82	7,33	-6,27%
4.	Pertumbuhan Ekonomi	5,19	5,39	+3,85%
5.	Pendapatan Per Kapita	48.921.014	52.513.488	+7,34%

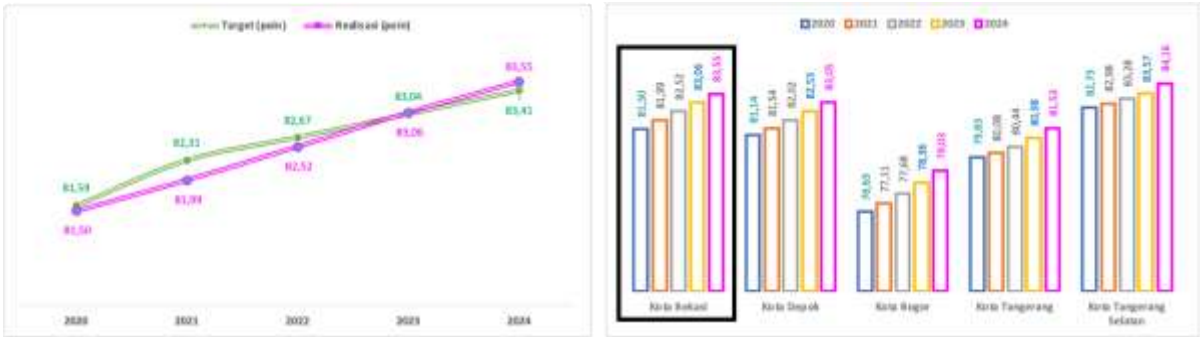
No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025	Laju Kinerja (%)
6.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,44	0,407	+6,44%

Sumber: BPS Kota Bekasi, 2025

2. 1. 1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) merupakan suatu metode evaluasi yang membandingkan harapan hidup, tingkat melek huruf, pendidikan, dan standar hidup di berbagai negara. IPM berguna untuk menentukan klasifikasi tingkat perkembangan suatu negara, apakah masuk kategori negara maju, berkembang, atau terbelakang. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan dan pembangunan suatu daerah yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran masyarakat. IPM Kota Bekasi sejak tahun 2020 hingga 2024 terus menunjukkan kenaikan yang signifikan. Dalam konteks kota di sekitar Jakarta, capaian ini hanya dibawah capaian IPM Kota Tangerang Selatan.

IPM Kota Bekasi Tahun 2020-2024



Sumber: Aplikasi Data Pembangunan Kota Bekasi dan BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 (diolah)

Peningkatan IPM Kota Bekasi dari tahun ke tahun menunjukkan adanya komitmen dan upaya yang dilakukan dalam

meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai program pembangunan manusia yang diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Bekasi dan pihak terkait, seperti peningkatan akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan yang lebih baik, serta peluang ekonomi yang lebih luas, kemungkinan besar telah berkontribusi dalam pencapaian ini.

Meskipun demikian, perbandingan dengan kota di sekitar Jakarta menunjukkan bahwa setiap kota memiliki tantangan dan potensi pembangunan manusia yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perlu adanya kolaborasi antarwilayah dan pembelajaran bersama untuk terus meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh di seluruh wilayah sekitar Jakarta

IPM tidak hanya menjadi sejumlah angka statistik semata, melainkan mencerminkan upaya yang lebih terperinci dalam mengukur kemajuan pembangunan manusia secara menyeluruh. Melibatkan harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup, IPM memberikan gambaran mendalam mengenai bagaimana suatu negara memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki tiga dimensi yang menjadi dasar perhitungan:

1. Umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan angka harapan hidup saat kelahiran;
2. Pengetahuan yang dihitung dari angka harapan sekolah dan angka rata-rata lama sekolah;
3. Standart hidup yang layak dihitung dari Produk Domestik Bruto/PDB per kapita.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki beberapa manfaat:

1. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia;
2. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu daerah/negara;

3. Bagi Kota Bekasi merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentu Dana Alokasi Umum (DAU).

Adapun cara menghitung Indek Pembangunan Manusia :

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran} \times 100}$$

Dimensi kesehatan :

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

Dimensi Pendidikan :

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$
$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$
$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

Dimensi Pengeluaran :

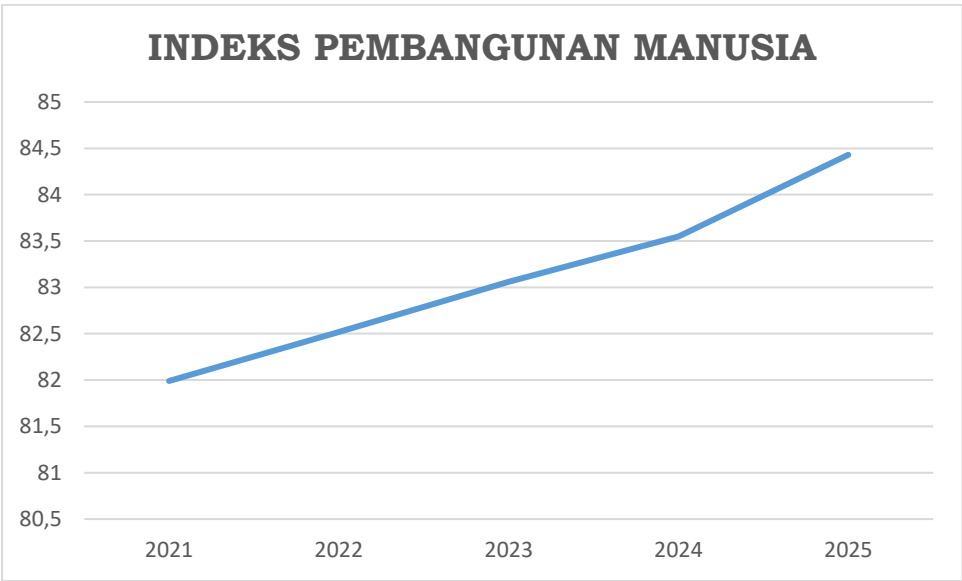
$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$$

INDIKATOR	SATUAN	NILAI MINIMAL	NILAI MAKSIMAL
AHH	Tahun	20	85
HLS	Tahun	0	18
RLS	Tahun	0	15
Pengeluaran Per Kapita disesuaikan	Rupiah	1,007,436	26,572,352

Capaian Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2025 Badan Pusat Statistik merilis capaian Indeks Pembangunan Manusia Kota Bekasi pada Tahun 2025 tertuang dalam buku Kota Bekasi Dalam Angka (Bekasi Municipality In Figures) 2026 halaman 251 terbitan Badan Pusat Statistik Kota Bekasi yang diterbitkan pada bulan Februari 2026. Adapun indikator Indeks Pembangunan Manusia tahun 2025 sebesar 84,43 capaian ini di indikasikan meningkat dari tahun sebelumnya yakni tahun 2024 sebesar 83,55 dan capaian Indeks Pembangunan Manusia tahun sebelumnya yang lebih rendah yaitu tahun 2023 hanya sebesar 83,06. Indeks Pembangunan Manusia ini lebih tinggi dibandingkan IPM Jawa Barat yang hanya mencapai nilai IPM sebesar 75,90. Dengan terjadinya peningkatan ini, sangat baik sekali dan bersifat positif untuk capaian Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan dan juga Daya Beli masyarakat.

Adapun perkembangan capaian Indeks Pembangunan Manusia dari tahun ke tahun dapat dilihat pada diagram berikut:

Gambar 2.1
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kota Bekasi



Sumber : BPS Kota Bekasi, 2025

2. 1. 2 Angka Kemiskinan

Badan Pusat Statistik menggunakan pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) untuk mengukur kemiskinan. Dalam perspektif ini, kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, terutama dalam hal pangan. Metode ini tidak hanya memerhatikan pengeluaran secara umum, tetapi lebih menekankan pada kemampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Oleh karena itu, penduduk dianggap miskin jika rata-rata pengeluaran per kapita per bulan mereka berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan sendiri dapat dijelaskan dalam konsep berikut:

1. Garis Kemiskinan (GK) merupakan hasil penjumlahan antara Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Individu yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan akan tergolong sebagai penduduk yang berada dalam kondisi kurang mampu secara ekonomi.
2. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merujuk pada nilai pengeluaran yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan,

setara dengan asupan energi 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi esensial untuk kebutuhan makanan ini terdiri dari 52 jenis komoditi. (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll)

3. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) merujuk pada kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Rincian paket komoditi kebutuhan dasar non makanan mencakup 51 jenis komoditi di lingkungan perkotaan dan 47 jenis komoditi di lingkungan pedesaan.

Adapun rumus yang dipergunakan Badan Pusat Statistik untuk menghitung Garis Kemiskinan sebagai berikut:

$$\mathbf{GK = GKM + GKNM}$$

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKNM = Garis Kemiskinan Non Makan

Adapun rumus untuk penghitungan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah sebagai berikut:

- Tahap pertama adalah menentukan kelompok referensi (reference population) yaitu 20 persen penduduk yang berada diatas Garis Kemiskinan Sementara (GKS). Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelas marginal. GKS dihitung berdasar GK periode sebelumnya yang di-inflate dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).
- Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Formula dasar dalam menghitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah :

$$GKM_{jp}^* = \sum_{k=1}^{52} P_{jkp} \cdot Q_{jkp} = \sum_{k=1}^{52} V_{jkp}$$

Dimana :
 GKM_{jp}^* : Gris Kemiskinan Makanan daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2100 kilokalori) provinsi p .
 P_{jkp} : Rata-rata harga komoditi k di daerah j dan provinsi p .
 Q_{jkp} : Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j di provinsi p .
 V_{jkp} : Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j provinsi p .
 j : Daerah (perkotaan atau pedesaan).
 p : Provinsi ke- p .

Selanjutnya GKM_j tersebut disetarakan dengan 2100 kilokalori dengan mengalikan 2100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah ‘j’ dari penduduk referensi, sehingga :

$$\overline{HK}_{jp} = \frac{\sum_{k=1}^{52} V_{jkp}}{\sum_{k=1}^{52} K_{jkp}}$$

Dimana :
 K_{jkp} : Kalori dari komoditi k di daerah j di provinsi p
 $\overline{HK}_{jp}$: Harga rata-rata kalori di daerah j di provinsi p

- Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah hasil penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan tertentu, yang mencakup aspek perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Proses pemilihan jenis barang dan jasa non makanan terus mengalami perkembangan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun, disesuaikan dengan dinamika perubahan pola konsumsi penduduk. Pada periode sebelum tahun 1993 terdiri dari 14 komoditi di perkotaan dan 12 komoditi di pedesaan. Sejak tahun 1998 terdiri dari 27 sub kelompok (51 jenis komoditi) di perkotaan dan 25 sub kelompok (47 jenis komoditi) di pedesaan. Nilai kebutuhan minimum perkomoditi/sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKKP 2004), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan yang lebih rinci dibanding data Susenas Modul Konsumsi. Nilai kebutuhan minimum non makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$GKNM_{jp} = \sum_{k=1}^n r_{kj} V_{kjp}$$

- $GKNM_{jp}$: Pengeluaran minimum non-makanan atau garis kemiskinan non-makanan daerah j dan provinsi p
 V_{kjp} : Nilai pengeluaran per komoditi/sub-kelompok non-makanan daerah j dan provinsi p
 r_{kj} : Rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok non-makanan k menurut daerah (hasil SPKKD 2004) dan daerah j
 k : Jenis komoditi non-makanan terpilih
 j : Daerah (Perkotaan atau perdesaan)
 p : Provinsi ke- p

Selanjutnya menghitung Persentase Penduduk Miskin atau Head Count Index (HCI-P0), adalah persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK). Adapun rumus perhitungannya:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

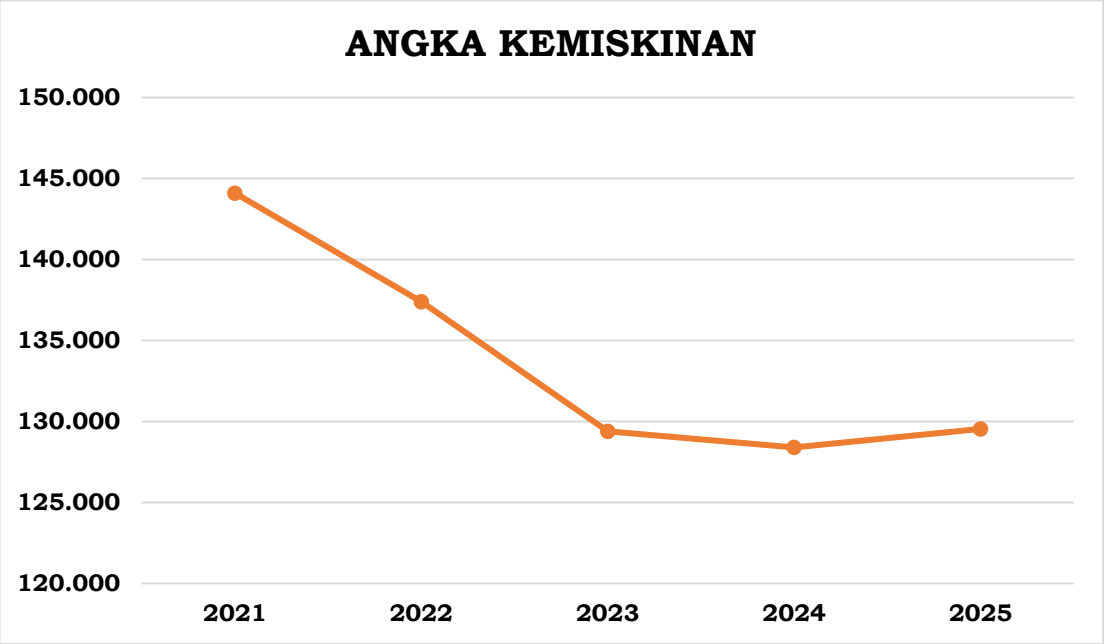
- Dimana :
 $\alpha = 0$
 z = garis kemiskinan.
 y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$
 q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.
 n = jumlah penduduk.

Untuk melihat angka kemiskinan di Kota Bekasi tahun 2025 dapat dilihat pada Buku Kota Bekasi Dalam Angka (*Bekasi Municipality in Figures*) 2026 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kota Bekasi bulan Februari Tahun 2026 pada halaman 111. Jumlah penduduk miskin di Kota Bekasi Tahun 2025 sebanyak 129,54 ribu orang (3,96 persen), terjadi penurunan disbanding tahun 2024. Pada 2024 jumlah penduduk miskin mencapai 128,84 ribu orang (4,01 persen).

Jumlah penduduk miskin di Kota Bekasi dalam empat tahun terakhir ini mengalami penurunan. Pada tahun 2021 sebesar 144,1 ribu jiwa, pada tahun 2022 terjadi penurunan yang cukup signifikan menjadi 137,39 ribu jiwa dan juga di tahun 2023 kembali mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yakni menjadi 129,4 ribu jiwa, pada Tahun 2024 menjadi 128,8 ribu jiwa dan pada tahun 2025 sejumlah 129,54 ribu jiwa, hal ini merupakan perkembangan yang sangat baik dan menunjukkan beberapa program pengentasan kemiskinan yang telah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir menemukan hasilnya. Adapun perkembangan angka kemiskinan di

Kota Bekasi selama beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada diagram berikut:

Gambar 2.2
Perkembangan Angka Kemiskinan Kota Bekasi



Sumber : BPS Kota Bekasi Tahun 2025

2. 1. 3 Angka Pengangguran

Angka pengangguran terbuka merupakan persentase yang mencerminkan jumlah individu yang tidak memiliki pekerjaan dibandingkan dengan total angkatan kerja. Pengukuran indikator ini mengikuti prinsip semakin rendah semakin baik. Perhitungan angka pengangguran terbuka melibatkan perbandingan antara jumlah individu yang tidak memiliki pekerjaan di Kota Bekasi dengan total angkatan kerja. Pendekatan ini mengacu pada konsep bahwa tingkat pengangguran yang rendah mengindikasikan kondisi ekonomi yang lebih baik.

Tingkat pengangguran yang tinggi dapat terjadi ketika lapangan kerja yang tersedia tidak cukup untuk menyerap pasokan tenaga kerja yang ada. Sebaliknya, tingkat pengangguran yang rendah dapat terjadi ketika permintaan akan tenaga kerja tinggi dan lapangan kerja tersedia cukup untuk menampungnya. Oleh karena itu, fluktuasi dalam tingkat

pengangguran terbuka sering kali mencerminkan dinamika antara permintaan dan penawaran tenaga kerja di Kota Bekasi. Permintaan tenaga kerja sangat terkait dengan proyeksi keuntungan perusahaan. Saat prospek laba membaik, perusahaan akan cenderung meningkatkan produksi dan merekrut lebih banyak tenaga kerja.

Permintaan tenaga kerja akan meningkat secara signifikan selama periode ekonomi yang sejahtera atau mengalami ekspansi. Namun, ketika prospek keuntungan perusahaan menunjukkan penurunan, mereka akan melakukan upaya efisiensi operasional. Tidak hanya berhenti merekrut, tetapi perusahaan mungkin juga harus melakukan pemutusan hubungan kerja dengan karyawan. Kondisi ini umumnya terjadi selama masa resesi ekonomi, di mana perusahaan berupaya mengatasi penurunan performa finansial.

Pasokan tenaga kerja, merujuk pada jumlah individu yang tersedia dan siap bekerja. Faktor-faktor seperti pertumbuhan populasi, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan imigrasi bersih memengaruhi tingkat pasokan tenaga kerja yang tersedia di pasar. Pertumbuhan populasi yang tinggi, partisipasi aktif di angkatan kerja, dan imigrasi bersih yang positif dapat meningkatkan ketersediaan tenaga kerja.

Adapun Angka Pengangguran Kota Bekasi pada tahun 2025 tertuang dalam buku Kota Bekasi Dalam Angka (*Bekasi Municipality In Figures*) 2026 terbitan Badan Pusat Statistik Kota Bekasi yang diterbitkan pada bulan Februari 2026 yang dimuat di halaman 43 yaitu sebanyak 98.963 orang. Penduduk Kota Bekasi berusia 15 tahun atau lebih pada tahun 2025 mencapai 2,106 juta orang. Jumlah angkatan kerja sebanyak 1,350 juta orang. Jumlah tersebut menjadikan angka tingkat pengangguran terbuka menjadi 7,33 persen. Mayoritas penduduk yang bekerja berstatus sebagai buruh/ karyawan/pegawai, menunjukkan dominannya sektor formal dalam struktur ketenagakerjaan Kota Bekasi. Selain itu, masih terdapat penduduk yang

bekerja sebagai usaha sendiri maupun pekerja keluarga/ tidak dibayar, yang mencerminkan keberagaman karakteristik pasar kerja di wilayah ini. Secara umum, kondisi ketenagakerjaan Kota Bekasi pada tahun 2025 menunjukkan partisipasi tenaga kerja yang cukup tinggi dengan struktur pekerjaan yang beragam.

Perkembangan angka pengangguran dari tahun ke tahun di Kota Bekasi pada tahun 2021 sebanyak 161.311 jiwa pada saat Pandemi COVID-19 di tahun 2022 terjadi peningkatan yang cukup tinggi menjadi 167.974 jiwa dan terjadi penurunan menjadi 104.170 jiwa di tahun 2023 setelah itu pada tahun 2024 mengalami sedikit kenaikan menjadi sebesar 105.565 orang dan pada tahun 2025 mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 98.963 orang.

Untuk melihat perkembangan angka pengangguran di Kota Bekasi selama beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Gambar 2.3
Perkembangan Angka Pengangguran di Kota Bekasi



Sumber : BPS Kota Bekasi Tahun 2025

2. 1. 4 Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi berfungsi sebagai indikator yang menilai tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah pemerintahan. Tingkat pertumbuhan ini sangat terkait dengan kinerja Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) di Kota Bekasi. PDRB ADHK sendiri menjadi pengukuran utama yang memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Indikator ini diukur dengan melakukan pengurangan diantara PDRB ADHK Tahun n dan PDRB ADHK Thn $(n-1)$. Hasil tersebut kemudian dibandingkan terhadap PDRB ADHK Thn n yang kemudian di persentasikan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga pasar merupakan agregat dari nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah bruto ini mencakup kontribusi dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam suatu proses produksi. Nilai tambah bruto tersebut terdiri dari komponen-komponen pendapatan faktor, seperti upah dan gaji, bunga, sewa tanah, dan keuntungan. Komponen ini mencerminkan distribusi nilai tambah bruto ke berbagai pihak yang terlibat dalam proses produksi. Selain itu, nilai tambah bruto juga mencakup penyusutan, yang merujuk pada depresiasi atau pengurangan nilai aset yang terjadi selama proses produksi. Komponen ini mencerminkan penggunaan aset produktif dan kontribusinya terhadap nilai tambah bruto.

Pajak tidak langsung neto juga menjadi bagian dari nilai tambah bruto. Pajak tidak langsung neto adalah selisih antara pajak tidak langsung yang diterapkan pada produksi dan subsidi yang diterima oleh produsen. Komponen ini memperhitungkan pengaruh pajak dan subsidi terhadap nilai tambah bruto. Dengan memahami komponen-komponen ini, PDRB atas dasar harga pasar memberikan gambaran komprehensif tentang kontribusi sektor perekonomian di suatu wilayah, dan secara efektif mencerminkan nilai tambah yang dihasilkan dalam proses produksi.

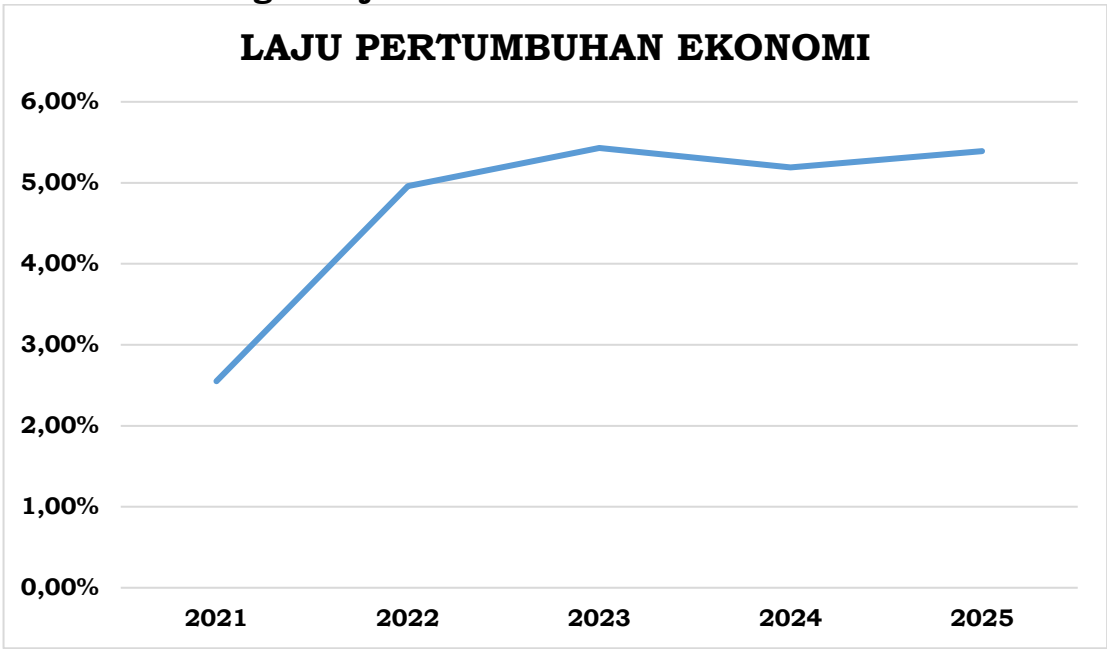
Penghitungan PDRB dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. Untuk menghitung Laju Pertumbuhan Ekonomi, Badan Pusat Statistik mempergunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{PDRB ADHK Thn } n - \text{PDRB ADHK Thn } (n - 1)}{\text{PDRB ADHK Thn } n} \times 100$$

Adapun Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bekasi pada tahun 2025 tertuang dalam buku Kota Bekasi Dalam Angka (*Bekasi Municipality In Figures* 2026 terbitan Badan Pusat Statistik Kota Bekasi yang diterbitkan pada bulan Februari 2026 yang dimuat di halaman 1. Perekonomian Kota Bekasi tahun 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 5,39 persen dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 5,19 persen. Laju pertumbuhan tertinggi adalah kategori transportasi dan pergudangan sebesar 9,68 persen. Sektor industri pengolahan merupakan sektor yang memiliki kontribusi paling besar terhadap PDRB Kota Bekasi tahun 2025 dengan share mencapai 32,45 persen, turun dibanding tahun 2024 yang sebesar 33,05 persen. Disusul oleh sector perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 20,73 persen, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 20,70 persen. Sementara itu, sektor-sektor yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya antara lain transportasi dan pergudangan; jasa perusahaan; dan jasa lainnya.

Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bekasi selalu mengalami fluktuasi dimana pada tahun tahun 2021 sebesar 2,55 persen karena pandemi COVID-19, pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 4,96 persen, lalu di tahun 2023 memperoleh angka sebesar 5,43 persen, pada tahun 2024 sedikit menurun menjadi sebesar 5,19 persen dan terakhir pada tahun 2025 mengalami kenaikan menjadi 5,39 persen. Untuk melihat fluktuasi Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2021 sampai dengan 2025 dapat dilihat pada diagram berikut ini:

Gambar 2.4
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bekasi



Sumber : BPS Kota Bekasi Tahun 2025

2. 1. 5 Pendapatan Perkapita

Pendapatan per kapita merupakan ukuran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap individu dalam suatu negara. Angka ini dihitung dengan membagi total pendapatan nasional negara tersebut dengan jumlah penduduknya. Dengan demikian, pendapatan per kapita juga mencerminkan Produktivitas Domestik Bruto (PDRB) per individu dalam masyarakat. Adapun dalam mengetahui jumlah PDRB per kapita dapat menggunakan rumus berikut ini:

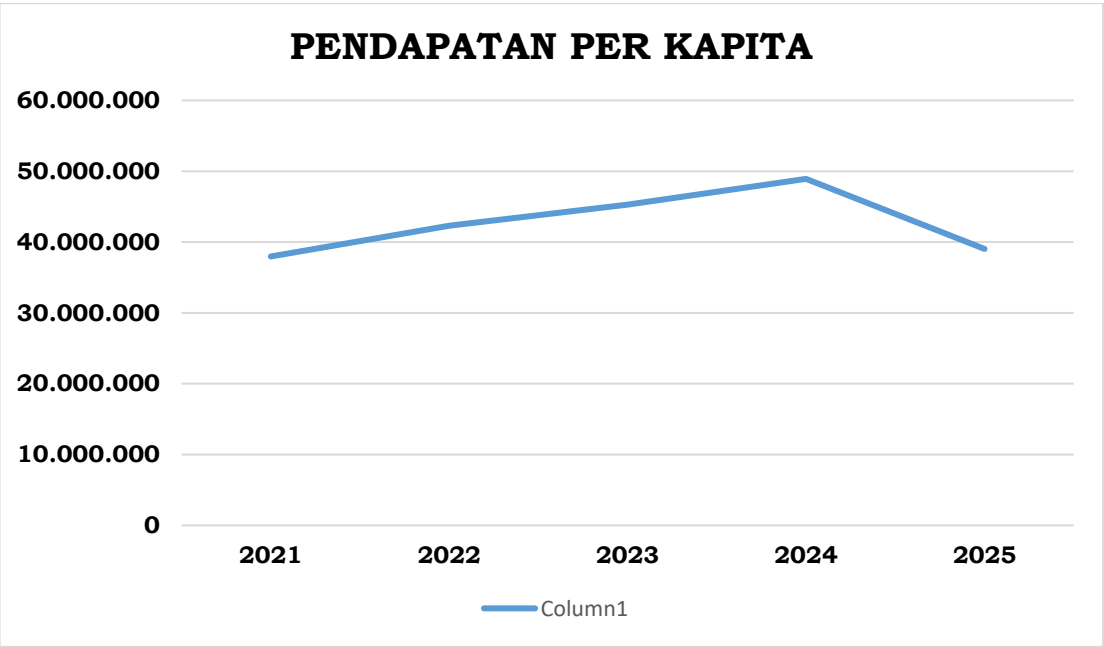
$$PDRB_{perkapita}(RP/Kapita) = \frac{PDRB}{\Sigma penduduk}$$

Pendapatan per kapita sering dijadikan indikator untuk mengukur tingkat kemakmuran dan perkembangan suatu negara. Semakin tinggi pendapatan per kapita, semakin besar potensi bahwa negara tersebut memiliki tingkat perkembangan dan rata-rata pendapatan penduduk yang tinggi. Adapun Pendapatan Per Kapita Kota Bekasi tahun 2025 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2026 ini yang tertuang dalam buku Kota Bekasi Dalam Angka

(*Bekasi Municipality In Figures 2025*) terbitan Badan Pusat Statistik Kota Bekasi yang diterbitkan pada bulan Februari 2026 dimana pada halaman 1 tercantum PDRB Kota Bekasi Tahun 2025 sebesar Rp. 139.070.000.000.000,00 dan pada halaman 43 tercantum jumlah penduduk Kota Bekasi tahun 2025 sebanyak 2.648.272 jiwa. Dengan demikian Pendapatan Per Kapita Kota Bekasi Tahun 2025 sebesar Rp. 39.016.211,-

Perkembangan Pendapatan Per Kapita di Kota Bekasi dari tahun 2021 secara berturut-turut mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 sebesar Rp. 37.964.536,- kemudian meningkat di tahun 2022 sebesar Rp. 42.293.446,- lalu di tahun 2023 terjadi peningkatan kembali sebesar Rp. 45.281.175,- kemudain pada tahun 2024 menjadi Rp. 48.921.014,- dan terakhir pada tahun 2025 menjadi 39.016.211,- Untuk melihat perkembangan Pendapatan Per Kapita Kota Bekasi selama beberapa tahun terakhir, dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 2.5
Perkembangan Pendapatan Per Kapita Kota Bekasi



Sumber : BPS Kota Bekasi Tahun 2025

2. 1. 6 Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Indeks Gini, atau dikenal juga sebagai koefisien Gini, adalah metrik umum yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pendapatan atau kekayaan didistribusikan secara merata di dalam suatu populasi. Rentang nilai Indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai 0 mencerminkan distribusi yang sangat merata, di mana setiap individu memiliki pendapatan atau kekayaan yang sama persis. Sebaliknya, nilai 1 mencerminkan distribusi yang sangat timpang, di mana satu individu memiliki segalanya sedangkan yang lainnya tidak memiliki apa-apa. Untuk menghitung Gini Ratio Badan Pusat Statistik mempergunakan rumus sebagai berikut:

$$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i (Q_i + Q_{i-1})$$

Pi : persentase rumahtangga atau penduduk pada kelas ke-i
Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i
Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika:
G < 0,3 = ketimpangan rendah
0,3 ≤ G ≤ 0,5 = ketimpangan sedang
G > 0,5 = ketimpangan tinggi

Berdasarkan data dari Badan Perencanaan Penelitian, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bekasi tahun 2026 Indeks Gini Kota Bekasi tahun 2025 mencapai 0,407 mengalami laju pertumbuhan sebesar 6,44% dibandingkan tahun 2024 yaitu sebesar 0,44.

2. 2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2. 2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil Pemerintah Kota Bekasi tahun 2025 terisi sebanyak 127 Indikator Kinerja Hasil, dengan demikian tingkat keterisian Indikator Kinerja Kunci Hasil sebesar 100 persen. Adapun Capaian kinerja pada Indikator Kinerja Kunci Hasil dapat dilihat pada tabel 2.3 di bawah ini:

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Hasil

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
			DEFINISI PARAMETER	NILAI			
1	2	3	4	5	6	7	7
1	Pendidikan	Persentase Anak Usia 5 s.d. 6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	63.137	98.88%	Dinas Pendidikan	OK
			Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada kab/kota yang bersangkutan	63.852		Dinas Pendidikan	OK
		Persentase Anak Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dasar	384.741	98.86%	Dinas Pendidikan	OK

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
			DEFINISI PARAMETER	NILAI			
1	2	3	4	5	6	7	7
		Persentase Anak Usia 7-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan	389.192	57.45%	Dinas Pendidikan	OK
			Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	7.974		Dinas Pendidikan	OK
			Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah	13.881		Dinas Pendidikan	OK
		Persentase Toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam Kondisi Baik	Jumlah toilet Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	3.126	33.93%	Dinas Pendidikan	OK
			Jumlah Seluruh Toilet	9.214		Dinas Pendidikan	OK

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
			DEFINISI PARAMETER	NILAI			
1	2	3	4	5	6	7	7
		Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam Kondisi Baik	Jumlah Ruang Kelas Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	7.294	34.65%	Dinas Pendidikan	OK
			Jumlah Ruang Kelas	20.923		Dinas Pendidikan	OK
2	Kesehatan	Persentase Kematian Ibu	Jumlah Kematian Ibu Tahun N	15	0.04%	Dinas Kesehatan	OK
			Jumlah Ibu Melahirkan Tahun N	39.956		Dinas Kesehatan	OK
		Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	Jumlah balita umur 0 sampai 59 bulan dengan panjang badan atau tinggi badan kurang dari -2 standar deviasi pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu	3.727	3.36%	Dinas Kesehatan	OK
			Jumlah balita umur 0 sampai 59 bulan yang diukur panjang badan atau tinggi badan pada	111.068		Dinas Kesehatan	OK

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
			DEFINISI PARAMETER	NILAI			
1	2	3	4	5	6	7	7
			suatu wilayah dan kurun waktu yang sama				
		Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun (nominator)	39.956	100 %	Dinas Kesehatan	OK
			Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	39.956		Dinas Kesehatan	OK
		Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan	39.956	100%	Dinas Kesehatan	OK

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
			DEFINISI PARAMETER	NILAI			
1	2	3	4	5	6	7	7
			kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun				
			Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	39.956		Dinas Kesehatan	OK
		Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun	39.348	100%	Dinas Kesehatan	OK

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
			DEFINISI PARAMETER	NILAI			
1	2	3	4	5	6	7	7
			Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	39.348			OK
		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah balita usia 12-23 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 1 + jumlah balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2 + balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar 3	137.386	100%	Dinas Kesehatan	OK

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
			DEFINISI PARAMETER	NILAI			
1	2	3	4	5	6	7	7
			Jumlah balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama	137.386		Dinas Kesehatan	OK
		Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran	361.533	92,89%	Dinas Kesehatan	OK
			Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama	389.192		Dinas Kesehatan	OK

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
			DEFINISI PARAMETER	NILAI			
1	2	3	4	5	6	7	7
		Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah orang usia 15–59 tahun di kabupaten/kota yang mendapatkan layanan kesehatan produktif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	1.434.780	83,01%	Dinas Kesehatan	OK
			Jumlah orang usia 15–59 tahun di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun	1.728.221		Dinas Kesehatan	OK
		Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun (nominator)	238.866	87,55%	Dinas Kesehatan	OK

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
			DEFINISI PARAMETER	NILAI			
1	2	3	4	5	6	7	7
			Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)	272.839		Dinas Kesehatan	OK
		Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	191.372	96,60%	Dinas Kesehatan	OK
			Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam	198.109		Dinas Kesehatan	OK

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
			DEFINISI PARAMETER	NILAI			
1	2	3	4	5	6	7	7
			wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama				
		Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah penderita diabetes melitus usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	44.023	100%	Dinas Kesehatan	OK
			Jumlah estimasi penderita diabetes melitus usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerja kabupaten/kota berdasarkan angka	44.023		Dinas Kesehatan	OK

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
			DEFINISI PARAMETER	NILAI			
1	2	3	4	5	6	7	7
			prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama				
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa berat di wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	3.620	100%	Dinas Kesehatan	OK
			Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	3.620		Dinas Kesehatan	OK
		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Terduga	Jumlah orang terduga Tuberkulosis yang dilakukan	58.468	100%	Dinas Kesehatan	OK

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
			DEFINISI PARAMETER	NILAI			
1	2	3	4	5	6	7	7
		Tuberkulosis Sesuai Standar	pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun				
			Jumlah perkiraan orang yang terduga Tuberkulosis dalam kurun waktu satu tahun yang sama	58.468		Dinas Kesehatan	OK
		Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV (Ibu hamil, Pasien IMS, Pasien TBC, WPS, LSL, Penasun, WBP, dan Transgender/Waria) yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	94.828		Dinas Kesehatan	OK

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
			DEFINISI PARAMETER	NILAI			
1	2	3	4	5	6	7	7
			Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV (Ibu hamil, Pasien IMS, Pasien TBC, WPS, LSL, Penasun, WBP, dan Transgender/Waria) di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	94.828		Dinas Kesehatan	OK
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Kondisi Baik (Ha)	-		DBMSDA	-
			Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	-		DBMSDA	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
			DEFINISI PARAMETER	NILAI			
1	2	3	4	5	6	7	7
		Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan kewenangan Kabupaten/Kota (Km) (panjang jalan kondisi baik + panjang jalan kondisi sedang)	4.573,241	97,80%	DBMSDA	OK
			Panjang jalan kewenangan Kabupaten/Kota (Km)	4.676,191		DBMSDA	OK
		Persentase Peningkatan Jumlah Penduduk Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Terlindungi dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Jumlah Penduduk Di Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di Kabupaten/Kota pada tahun N	2.587.440	99.67	DISPERKIMTAN	
			Jumlah total penduduk Kabupaten/Kota	2.595.927		DISPERKIMTAN	OK

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
			DEFINISI PARAMETER	NILAI			
1	2	3	4	5	6	7	7
		Persentase Jumlah Rumah yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah dioleh di Pengolahan Lumpur Tinja + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik	805.971	99.78	DISPERKIMTAN	OK
			Jumlah rumah di Kabupaten/Kota	807.750		DISPERKIMTAN	OK
		Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian dan Mitigasi Banjir	Luas Kawasan permukiman rawan banjir yang telah terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir (Ha)	989	8.77	DBMSDA	OK

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
			DEFINISI PARAMETER	NILAI			
1	2	3	4	5	6	7	7
			Luas Kawasan permukiman rawan banjir yang telah ditentukan dalam dokumen perencanaan daerah dengan mempertimbangkan kajian risiko bencana banjir (Ha)	11.276		DBMSDA	OK
		Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Kewenangan Kabupaten/Kota	Luas Kawasan sepanjang Pantai yang rawan abrasi dan banjir rob yang terlindungi infrastruktur pengaman pantai kewenangan kabupaten/kota (Ha)	-		Tidak Melaksanakan Urusan	OK
			Luas kawasan sepanjang pantai yang rawan abrasi dan banjir rob kewenangan kabupaten/kota (Ha)	-		Tidak Melaksanakan Urusan	OK

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
			DEFINISI PARAMETER	NILAI			
1	2	3	4	5	6	7	7
		Persentase Kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah pemanfaatan persetujuan bangunan gedung yang digunakan sesuai peruntukannya	2.645	100%	DPMPTSP	OK
			Jumlah persetujuan bangunan gedung yang berlaku	2.645		DPMPTSP	OK
		Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Jumlah pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang diterbitkan	1	100%	DISTARU	OK
			Jumlah permohonan persetujuan bangunan gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk	1		DISTARU	OK

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
			DEFINISI PARAMETER	NILAI			
1	2	3	4	5	6	7	7
		Persentase Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan terlibat dalam kegiatan konstruksi Pemerintah Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis	514	31,40%	DBMSDA DAN DISPERKIMTAN	OK
			Jumlah kebutuhan tenaga kerja operator dan teknis/analisis yang terlibat dalam kegiatan konstruksi Pemerintah Kabupaten/Kota	1.637			OK
		Persentase Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang	Jumlah kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang sudah dinilai pelaksanaannya dalam waktu 1 (satu) tahun	19	32,76%	DISTARU	OK

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
			DEFINISI PARAMETER	NILAI			
1	2	3	4	5	6	7	7
		Sudah diterbitkan di Kabupaten/Kota	Jumlah kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang sudah diterbitkan dalam waktu 1 (satu) tahun	58		DISTARU	OK
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota Yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang mendapatkan layanan penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah pada tahun N	5	100	DISPERKIMTAN	OK
			Jumlah total rencana warga negara korban bencana kabupaten/kota yang akan ditangani pada tahun N	5		DISPERKIMTAN	OK
		Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh di	Luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani tahun N	42.17	100	DISPERKIMTAN	OK

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
			DEFINISI PARAMETER	NILAI			
1	2	3	4	5	6	7	7
		Bawah 10 Ha yang Ditangani	Target luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha pada tahun N	42.17		DISPERKIMTAN	OK
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	Jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani pada tahun N	185	97.37	DISPERKIMTAN	OK
			Jumlah rumah tidak layak huni pada tahun N	190		DISPERKIMTAN	OK
		Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Realisasi jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di tahun N	94	100%	DISPERKIMTAN	OK
			Target jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana,	102		DISPERKIMTAN	OK

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
			DEFINISI PARAMETER	NILAI			
1	2	3	4	5	6	7	7
			dan Utilitas Umum di tahun N				
5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persentase Dokumen Kebencanaan yang Telah Ditetapkan dan Masih Berlaku	Jumlah dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku pada tahun N	94	100%	BPBD	OK
			Jumlah dokumen kebencanaan Kajian Resiko Bencana (KRB), Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), dan Rencana Kontijensi (Rekon) = 3	102		BPBD	OK
		Persentase Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Pengaduan Pelanggaran Trantibum Yang Ditangani	93	100	SATPOL PP	OK
			Jumlah Pengaduan Pelanggaran Trantibum Yang Dilaporkan	93		SATPOL PP	OK

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
			DEFINISI PARAMETER	NILAI			
1	2	3	4	5	6	7	7
		Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan	Jumlah peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi yang ditegakkan	38	100%	SATPOL PP	OK
			Jumlah keseluruhan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi	38		SATPOL PP	OK
		Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga negara dan aparatur yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	2.773	100%	BPBD	OK
			Jumlah warga negara yang tinggal di Kawasan rawan bencana berdasarkan target yang telah ditetapkan	2.773		BPBD	OK

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
			DEFINISI PARAMETER	NILAI			
1	2	3	4	5	6	7	7
		Persentase Jumlah Warga Negara yang Mendapatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1000	100%	BPBD	OK
			Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana	10000		BPBD	OK
		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di kabupaten /kota dalam tingkat waktu tanggap	300	95.54%	DISDAMKARMA T	OK
			Total kejadian kebakaran di kabupaten/kota	314		DISDAMKARMA T	OK
6	Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	672	100%	DINSOS	OK

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
			DEFINISI PARAMETER	NILAI			
1	2	3	4	5	6	7	7
			Populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	672		DINSOS	OK
		Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	Jumlah anak Terlantar di Luar Panti yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	400	100%	DINSOS	OK
			Populasi anak terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sesuai hasil asesmen	4001		DINSOS	OK
		Persentase Lanjut Usia Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	Jumlah lanjut usia terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	300	100%	DINSOS	OK

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
			DEFINISI PARAMETER	NILAI			
1	2	3	4	5	6	7	7
			Populasi lanjut usia terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sesuai hasil asesmen	300		DINSOS	OK
		Persentase Gelandangan dan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	Jumlah gelandangan dan pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	204	100%	DINSOS	OK
			Populasi gelandangan dan pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	204		DINSOS	OK
		Persentase Korban Bencana Alam, Sosial Dan/Atau Non Alam Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan	Jumlah korban bencana alam, sosial dan non alam kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	8.100	100%	DINSOS	OK

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
			DEFINISI PARAMETER	NILAI			
1	2	3	4	5	6	7	7
		Setelah Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Populasi korban bencana alam, sosial dan non alam yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	8.100		DINSOS	OK
		Persentase Penerima Manfaat Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Jumlah Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	41.009	100%	DINSOS	OK
			Populasi masyarakat miskin, fakir miskin dan kelompok rentan yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar cakupan daerah kabupaten/kota	41.009		DINSOS	OK
7	Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang	Jumlah kegiatan keseluruhan yang	8	100%	DISNAKER	OK

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
			DEFINISI PARAMETER	NILAI			
1	2	3	4	5	6	7	7
		Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja Daerah			DISNAKER	OK
			Jumlah kegiatan keseluruhan yang direncanakan di Kabupaten/Kota	8			
		Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (Peraturan Perusahaan/ Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan)	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak	2.464	100%	DISNAKER	OK
			Jumlah Perusahaan	2.4641		DISNAKER	OK
		Persentase Pekerja Bukan Penerima Upah dan Atau Pekerja Rentan Yang Mendapatkan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Jumlah pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	11.666	100%	DISNAKER	OK

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
			DEFINISI PARAMETER	NILAI			
1	2	3	4	5	6	7	7
			yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota				
			Jumlah target pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	11.666		DISNAKER	OK
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Jumlah anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	243	100%	DP3A	OK

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
			DEFINISI PARAMETER	NILAI			
1	2	3	4	5	6	7	7
		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus (penduduk usia kurang dari 18 tahun)	243	100%	DP3A	OK
			Jumlah perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	200		DP3A	OK
			Jumlah perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang	200		DP3A	OK
9	Pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	100	46.60%	DKPPP	OK
			Target Jumlah Cadangan Pangan	214.61		DKPPP	OK
10	Pertanahan	Persentase Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan	Luas tanah yang telah bersertifikat dalam	2.705.506,97	22.63%	DISPERKIMTAN	OK

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
			DEFINISI PARAMETER	NILAI			
1	2	3	4	5	6	7	7
		Pengelolaan Pemerintah Daerah	penguasaan pemerintah daerah				
			Luas seluruh tanah yang masuk dalam aset pemerintah daerah	11.955.745,88		DISPERKIMTAN	OK
		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	Luas Rencana Pola Ruang yang telah terwujud pada Kondisi Eksisting	46.787.348	21.96%	DISTARU	OK
			Luas Rencana Pola Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah	213.100.000		DISTARU	OK
		Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang Sudah Dilegalkan	Jumlah Rencana Detail Tata Ruang yang Sudah Legal	1	100%	DISTARU	OK
			Jumlah Rencana Detail Tata Ruang yang Diamanatkan Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah	1		DISTARU	OK

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
			DEFINISI PARAMETER	NILAI			
1	2	3	4	5	6	7	7
11J	Lingkungan Hidup	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) Yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	21	70%	DLH	OK
			Jumlah target tahunan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan secara langsung	30		DLH	OK

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
			DEFINISI PARAMETER	NILAI			
1	2	3	4	5	6	7	7
		Mengukur capaian penanganan sampah di wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah sampah yang diangkut, pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle, Pusat Daur Ulang, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, Stasiun Peralihan Antara, Pembangkit Listrik Energi Sampah/ Pembangkit Listrik Tenaga Sampah,	569.638	86.231%	DLH	OK
			Jumlah seluruh timbulan sampah di wilayah kabupaten/kota	660.594		DLH	OK
12	Administrasi Kependudukan	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan	Akta kelahiran yang diterbitkan	706.108	98.96%	DISDUKCAPIL	OK

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
			DEFINISI PARAMETER	NILAI			
1	2	3	4	5	6	7	7
	dan Pencatatan Sipil		Jumlah anak usia 0 – 17 tahun	713.526		DISDUKCAPIL	OK
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah Anak yang Memiliki KIA	509.585	76.64%	DISDUKCAPIL	OK
			Jumlah anak wajib KIA	684.886		DISDUKCAPIL	OK
		Persentase data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	Jumlah Data profil Kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	2	100%	DISDUKCAPIL	OK
			2 (Dua) Dokumen	2		DISDUKCAPIL	OK
		Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik	Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik	1.905.962	99.06%	DISDUKCAPIL	OK
			Jumlah penduduk 17 tahun ke atas	1.924.067		DISDUKCAPIL	OK
		Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	Akta kematian yang diterbitkan	19.756	100%	DISDUKCAPIL	OK
			Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa	19.756		DISDUKCAPIL	OK

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
			DEFINISI PARAMETER	NILAI			
1	2	3	4	5	6	7	7
			kependudukan (kematian) yang tercatat dan melaporkan				
		Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	Akta perkawinan yang diterbitkan	100	100%	DISDUKCAPIL	OK
			Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (perkawinan) yang tercatat dan melaporkan	100		DISDUKCAPIL	OK
		Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	Akta perceraian yang diterbitkan	100	100%	DISDUKCAPIL	OK
			Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (perceraian) yang tercatat dan melaporkan	100		DISDUKCAPIL	OK

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
			DEFINISI PARAMETER	NILAI			
1	2	3	4	5	6	7	7
13-	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa per tahun	-		Tidak Melaksanakan Urusan	-
			Jumlah desa tertinggal (per awal tahun N)	-		Tidak Melaksanakan Urusan	-
		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa maju dan mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa per tahun	-		Tidak Melaksanakan Urusan	-
			Jumlah desa berkembang (per-awal tahun N)	-		Tidak Melaksanakan Urusan	-
		Persentase Fasilitasi Kerja Sama Desa	Jumlah kerja sama desa yang telah ditetapkan dan berlaku	-		Tidak Melaksanakan Urusan	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
			DEFINISI PARAMETER	NILAI			
1	2	3	4	5	6	7	7
			Jumlah kerja sama desa yang ditangani	-		Tidak Melaksanakan Urusan	-
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) Per Wanita Usia Subur Usia 15-49 Tahun	Total Fertility Rate/TFR Kab/Kota	1.423.434	79079666.67	DPPKB	OK
			Target Fertility Rate/TFR Kab/Kota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat terhadap Kab/Kota yang bersangkutan	1.8		DPPKB	OK
		Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	Total peserta KB Aktif Modern	194.921	56.64%	DPPKB	OK
			Total Pasangan Usia Subur Usia 15- 49 Tahun	344.152		DPPKB	OK
		Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Persentase kebutuhan ber-Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need) kab/kota	9.243	66.02%	DPPKB	OK

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
			DEFINISI PARAMETER	NILAI			
1	2	3	4	5	6	7	7
			Target persentase kebutuhan ber-Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need) kab/kota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk provinsi yang bersangkutan	14		DPPKB	OK
15	Perhubungan	Konektivitas Kabupaten/Kota	$KTDaerah = (KTD \times WTD) + (KTL \times WTL)$	0.974	0.97	DISHUB	OK
		Volume/Capacity Ratio Di Jalan Kabupaten/Kota	V/C ratio di jalan Kabupaten/Kota	0.57	0.57	DISHUB	OK
		Persentase Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan	Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	2	4.88%	DISHUB	OK
			Jumlah perusahaan angkutan umum yang terdata	41		DISHUB	OK

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
			DEFINISI PARAMETER	NILAI			
1	2	3	4	5	6	7	7
16	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Perangkat Daerah dan atau unit pelaksana daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas Kominfo	56	100%	DISKOMINFOSTAN DI	OK
			Jumlah Perangkat Daerah dan atau unit pelaksana teknis daerah	56		DISKOMINFOSTAN DI	OK
		Presentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	Jumlah layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	96	98.97%	DISKOMINFOSTAN DI	OK
			Jumlah layanan publik	97		DISKOMINFOSTAN DI	OK
		Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas	1.792.261	99.75%	DISKOMINFOSTAN DI	OK

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
			DEFINISI PARAMETER	NILAI			
1	2	3	4	5	6	7	7
		Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota				
			Jumlah Penduduk	1.796.753		DISKOMINFOSTAN DID	OK
17	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Mengukur Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	$\sum$ Volume usaha koperasi tahun berjalan - $\sum$ Volume usaha koperasi tahun sebelumnya	357.122.775.671	9,94%	DISKOPUKM	OK
			$\sum$ Volume usaha koperasi tahun sebelumnya	324.836.375.142		DISKOPUKM	OK
		Persentase Usaha Kecil Yang Bertransformasi Dari Informal ke Formal	$\sum$ Usaha Mikro yang Memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB)	3.679	44,31%	DISKOPUKM	OK
			$\sum$ Usaha Mikro	8.303		DISKOPUKM	OK
18	Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota	Jumlah Investasi Tahun N - Jumlah nilai Investasi tahun N-1 di Kab/Kota	11.570.572.556.968	-15.59%	DPMPTSP	OK

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
			DEFINISI PARAMETER	NILAI			
1	2	3	4	5	6	7	7
			Jumlah Niali Investasi Tahun N-1 di Kab/Kota	13.708.107.364.170		DPMPTSP	OK
		Persentase Realisasi Investasi Terhadap Target Investasi	Total realisasi investasi kab/kota	11.570.572.556.968	77.29%	DPMPTSP	OK
			Target investasi Kab/kota yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi kepada kab/kota yang bersangkutan	14.970.000.000.000		DPMPTSP	OK
19	Kepemudaan dan Olahraga	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang berwirausaha di kab/kota	112	89.60%	DISPORA	OK
			Jumlah target pemuda usia (16-30) tahun yang mendapatkan pembinaan wirausaha di kab/kota	125		DISPORA	OK

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
			DEFINISI PARAMETER	NILAI			
1	2	3	4	5	6	7	7
		Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kab/kota	8.250	1.34	DISPORA	OK
			Jumlah pemuda usia (16-30) tahun di kab/kota	614.566		DISPORA	OK
		Persentase Atlet yang Berasal Dari Kabupaten/Kota yang Masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	Jumlah atlet daerah di kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	167	13.16%	DISPORA	OK
			Jumlah atlet daerah yang dibina ditingkat kabupaten/kota (Komite Olahraga Nasional Indonesia, Pusat Pendidikan dan Latihan	1.269		DISPORA	OK

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
			DEFINISI PARAMETER	NILAI			
1	2	3	4	5	6	7	7
			Daerah, Induk Cabang Olahraga)				
		Persentase Jumlah Atlet Berprestasi	Jumlah atlet peraih medali	32	96.97%	DISPORA	OK
			Jumlah atlet yang ikut event nasional dan internasional	33		DISPORA	OK
20	Statistik	Persentase Kepatuhan Daftar Data yang Dilaporkan kepada Wali Data Berdasarkan Kesepakatan Forum Satu Data Daerah	Jumlah daftar data yang di laporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	610	94.72%	DISKOMINFOSTAN DI	OK
			Jumlah daftar data yang disepakati oleh forum satu data daerah	644		DISKOMINFOSTAN DI	OK
21	Persandian	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	Nilai Indeks Keamanan Informasi (KAMI) hasil verifikasi	760	82.79%	DISKOMINFOSTAN DI	OK
			Nilai optimal indeks Keamanan Informasi (KAMI) (918)	918		DISKOMINFOSTAN DI	OK

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
			DEFINISI PARAMETER	NILAI			
1	2	3	4	5	6	7	7
23	Kebudayaan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Jumlah cagar Budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	5	17,24%	DISPARBUD	OK
			Jumlah cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang telah ditetapkan	29		DISPARBUD	OK
		Persentase Peningkatan Jumlah Masyarakat Yang Mengunjungi Pusat Seni dan Pusat Sejarah	Jumlah Kunjungan ke Pusat Peninggalan Bersejarah Tahun N - Jumlah Kunjungan ke Pusat Peninggalan Bersejarah Tahun N-1	50	25%	DISPARBUD	OK
			Jumlah Kunjungan ke Pusat Peninggalan Bersejarah Tahun N-1	40		DISPARBUD	OK
24	Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) Masyarakat	Penghitungan : TKM : {(0,15 x Pra Membaca) + (0,50 x Saat Membaca) + (0,35	54.62	54.62	DISARPUSDA	OK

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
			DEFINISI PARAMETER	NILAI			
1	2	3	4	5	6	7	7
			x Pasca Membaca}} x 100				
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Penghitungan : IPM : {(0,30 x Dimensi Kepatuhan) + (0,70 x Dimensi Kerja)} x 100	9.41	9.41	DISARPUSDA	OK
25	Kearsipan	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional	$T = (a + i + s + j) / 4$	80.25	80.25	DISARPUSDA	OK
26	Kelautan dan Perikanan	Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	Produksi Perikanan tangkap dan budidaya (ton	0	100.02%	DKP3	OK
			Target produksi perikanan tangkap dan budidaya (ton)	1.975,4		DKP3	OK
		Angka Konsumsi Ikan	Angka Konsumsi Ikan = Angka Konsumsi Rumah Tangga + Angka Konsumsi luar Rumah Tangga +	-		DKP3D	Belum rilis

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
			DEFINISI PARAMETER	NILAI			
1	2	3	4	5	6	7	7
			Angka Konsumsi tidan tercatat				
27	Pariwisata	Persentase Investasi sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan, Minum	Realisasi investasi sektor Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum yang dapat diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	947.665.377.608	8.19	DISPARBUD	OK
			Realisasi Investasi tahun N	11.570.572.556.968		DISPARBUD	OK
		Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Asing	Jumlah wisatawan asing tahun N - Jumlah wisatawan asing tahun N-1	19.880	27,082%	DISPARBUD	OK
			Jumlah wisatawan asing tahun N-1	27.082		DISPARBUD	OK

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
			DEFINISI PARAMETER	NILAI			
1	2	3	4	5	6	7	7
		OK Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke Kabupaten/Kota	Jumlah wisatawan nusantara tahun N - Jumlah wisatawan nusantara tahun N-1	3.276.061	33,05%	DISPARBUD	OK
			Jumlah wisatawan nusantara tahun N-1	2.462.197		DISPARBUD	OK
28	Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Produksi tanaman pangan tahun N – Produksi tanaman pangan tahun N-1	2.096,886	11,02%	DKP3	OK
			Produksi tanaman pangan tahun N-1	1.888,77		DKP3	OK
		Persentase peningkatan produksi hortikultura	Produksi hortikultura tahun N – Produksi hortikultura tahun N-1	16.756,55	-9.87%	DKP3	OK
			Produksi hortikultura tahun N-1	18.590,96		DKP3	OK
		Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Produksi komoditas peternakan tahun N – Produksi komoditas peternakan tahun N-1	13.226,58	25.11	DKP3	OK

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
			DEFINISI PARAMETER	NILAI			
1	2	3	4	5	6	7	7
			Produksi komoditas peternakan tahun N- 1	10.572,02		DKP3	OK
		Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (Diperoleh Dari Surveylance Penyakit Dari 5 Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS))	Luas wilayah terkendali dari penyakit hewan menular strategis tahun ini	53.76	100	DKP3	OK
			Wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis	53.76		DKP3	OK
29	Perdagangan	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya bertanda tera sah yang berlaku	16.910	100	DISDAGPERIN	OK
			Jumlah potensi Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab/kota	16.910		DISDAGPERIN	OK

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
			DEFINISI PARAMETER	NILAI			
1	2	3	4	5	6	7	7
30	Perindustrian	Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Daerah	Pencapaian dari setiap sasaran pembangunan industri daerah dihitung dengan cara membandingkan antara target yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan yang disepakati dengan capaian pada akhir tahun tersebut dan setiap sasaran memiliki bobot 20%	0		DISDAGPERIN	OK
		Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah Yang Melaporkan Informasi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional	430	35.25	DISDAGPERIN	OK

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
			DEFINISI PARAMETER	NILAI			
1	2	3	4	5	6	7	7
			Jumlah seluruh pelaku usaha industri kecil dan menengah	1.2202			OK
		Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota	Jumlah industry kecil dan menengah tahun N - Jumlah industri kecil dan menengah tahun N-1	216	64.89	DISDAGPERIN	OK
			Jumlah industry kecil dan menengah tahun N-1	131		DISDAGPERIN	OK
		Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri Dibandingkan Realisasi Investasi Seluruh Sektor	Nilai investasi sektor industri	2.070.650.152.606	17.90	DISDAGPERIN	OK
			Total investasi seluruh sektor	11.570.572.556.968		DISDAGPERIN	OK

Sumber: Diolah, 2025.

2. 2. 2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Urusan Pemerintahan

Capaian Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Kota Bekasi tahun 2025 terisi sebanyak 17 IKK Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, dengan demikian tingkat keterisian Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan sebesar 100 persen. Adapun Capaian kinerja pada Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dapat dilihat pada tabel 2.4 di bawah ini:

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
			DEFINISI PARAMETER	NILAI			
1	2	3	4	5	6	7	7
1	Perencanaan	Persentase Kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Program dan atau kegiatan yang dianggarkan dalam peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan direalisasikan	17	100	BAPPERIDA	OK
			Program kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan 17 program prioritas presiden	17		BAPPERIDA	OK
2	Keuangan	Persentase Belanja Pegawai Daerah Tidak Termasuk Belanja Untuk Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru, dan Tunjangan Sejenis Lainnya yang Bersumber	Anggaran belanja pegawai daerah di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD)	2.533.344.404.606	33.53%	BPKAD	OK

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
			DEFINISI PARAMETER	NILAI			
1	2	3	4	5	6	7	7
		dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang Telah Ditentukan Penggunaannya	Anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	7.555.652.396.242		BPKAD	OK
		Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	3.506.028.925.238	53.18%	BPKAD	OK
			Realisasi Pendapatan Daerah	6.592.887.028.980		BPKAD	OK
		Persentase Realisasi Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Terhadap Total Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	Total Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tahun N	55.621.932.030	0,86%	BPKAD	OK
			Total realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	6.451.429.852.145		BPKAD	OK
		Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	3.185.508.263.185	42,16%	BPKAD	OK
			Total Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di luar belanja	7.555.652.396.242		BPKAD	OK

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
			DEFINISI PARAMETER	NILAI			
1	2	3	4	5	6	7	7
			bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa				
3	Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Aparatur Sipil Negara Pendidikan Perguruan Tinggi (Aparatur Sipil Negara Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	Jumlah Aparatur Sipil Negara lulusan perguruan tinggi (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	5.535	51.53%	BKPSDM	OK
			Seluruh jumlah Aparatur Sipil Negara (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	10.742		BKPSDM	OK
4	Penelitian dan Pengembangan	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Inovasi dan Telah Menjadi Bagian dari Program Kegiatan	Jumlah produk inovasi perangkat daerah yang menjadi bagian dari program dan atau kegiatan perangkat daerah	180	89.95%	BAPPERIDA	OK
			Jumlah produk inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah	201		BAPPERIDA	OK

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
			DEFINISI PARAMETER	NILAI			
1	2	3	4	5	6	7	7
5	Pengawasan	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai 1/2/3/4/5	2	2	INSPEKTORAT	OK
		Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai 1/2/3/4/5	3	22	INSPEKTORAT	OK
		Manajemen Risiko Indeks	Nilai1/Nilai 2/Nilai 3/Nilai 4/Nilai 5	2	2	INSPEKTORAT	OK
		Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran N-1	Tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran tahun N-1	30	100%	INSPEKTORAT	OK
			Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran tahun N-1	30		INSPEKTORAT	OK
6	Pengadaan	Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Skor indikator tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	40	40	BAGIAN PBJ	OK

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
			DEFINISI PARAMETER	NILAI			
1	2	3	4	5	6	7	7
		Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Skor indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan	26.84	26.84	BAGIAN PBJ	OK
		Kualifikasi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)	Skor indikator kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang Jasa	23.57	23.57	BAGIAN PBJ	OK
7	Hubungan dengan Perwakilan Daerah	Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	1. Tepat Waktu; dan 2. Tidak Tepat Waktu.	1 Tepat Waktu		BAGIAN HUKUM	OK
		Persentase Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tahun N	Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan Tahun N	5	41.67%	BAGIAN HUKUM	OK
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang tertuang dalam program pembentukan peraturan daerah tahun N	12		BAGIAN HUKUM	OK

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
			DEFINISI PARAMETER	NILAI			
1	2	3	4	5	6	7	7
8	Pelayanan Publik	Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Nilai penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	94.25	94.25	BAGIAN ORGANISASI	OK

Sumber: Diolah, 2025.

2.2.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Alat untuk melaporkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), yang merupakan salah satu komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LKIP disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan data pendukung untuk melihat seberapa besar sasaran kinerja yang ditargetkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah dicanangkan pada Tahun 2025 telah berhasil dicapai.

Sebagai kerangka perencanaan jangka panjang dijabarkan dengan perencanaan jangka menengah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029 sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Penjabaran lebih lanjut RPJMD dituangkan dalam perencanaan 5 (lima) tahunan yaitu dalam Rencana Strategis dan perencanaan tahunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Dalam penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2025 ini didasari oleh RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Kota Bekasi disusun dengan berpedoman kepada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil pengukuran pencapaian kinerja memberikan gambaran keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan program Pemerintah Kota Bekasi selama tahun 2025.

A. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bekasi mencakup program utama, sasaran, indikator kinerja output, indikator kinerja outcome dan anggaran program yang dilaksanakan pada tahun 2025 dengan mengacu

pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi tahun 2024-2026. Perjanjian Kinerja ini dilakukan setelah Rencana Kinerja Tahunan disusun berdasarkan Rencana Strategis instansi/unit organisasi yang bersangkutan dan setelah anggaran ditetapkan.

Program utama, sasaran dalam Perjanjian Kinerja disajikan bersama indikator kinerjanya, sedangkan program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan. Sasaran Strategis Pembangunan dan Target Indikator Kinerja Utama setiap Program di Tahun 2025 adalah:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2025
(sesuai RPD)

SASARAN RANCANGAN RPD	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	SATUAN
1	2		3	4
Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	85,15	Nilai
Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah	2.	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	3,53	Nilai
	3.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	73,12	Nilai
	4.	Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (opini BPK terhadap Laporan Keuangan)	WTP	Nilai
	5.	Persentase Peningkatan PAD	86,77	%
Meningkatnya Masyarakat yang Berpengetahuan Tinggi	6.	Indeks Pendidikan	77,83	Nilai
Meningkatnya akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	7.	Indeks Kesehatan	84,95	Nilai

SASARAN RANCANGAN RPD	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	SATUAN
1	2		3	4
Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga dan Pembangunan Responsif Gender	8.	Indeks Pembangunan Keluarga	52,50	%
	9.	Indeks Pembangunan Gender	93,20	%
Meningkatnya Tenaga Kerja yang Adaptif dan Kesejahteraan Masyarakat Kota	10.	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,42	%
	11.	Angka Kemiskinan	4,40	%
Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berwawasan Lingkungan	12.	Indeks Infrastruktur Ke-PU-an	47,46	%
	13.	Indeks Sarana Prasarana Perhubungan	85,80	%
	14.	Indeks Perumahan Permukiman Pertanahan Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Ekonomi Kreatif	50,17	%
	15.	Indeks Penataan Ruang	53,77	%
	16.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,10	Nilai
Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang Didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat	17.	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	1,99	%
	18.	Persentase Kerjasama Antar Kelompok SARA	100,00	%
Meningkatnya Upaya dan Kesiapsiagaan dalam Mengurangi Risiko Bencana	19.	Indeks Risiko Bencana	103	Nilai
	20.	Indeks Penanggulangan Kebakaran	83,00	Nilai

SASARAN RANCANGAN RPD	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	SATUAN
1	2		3	4
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan, Jasa, dan Industri serta Iklim Usaha Berbasis Pengalaman (Kreatif) dan Investasi	21.	Persentase Peningkatan Nilai Sektor Perdagangan dan Jasa	3,13	%
	22.	Persentase Peningkatan Nilai Sektor Industri	3,17	%
	23.	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	7	%
Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	24.	Peningkatan Pengeluaran Perkapita	1,5	%
	25.	Laju Inflasi	3,08±1	%

Sumber: RPD Kota Bekasi 2024-2026.

B. Sesuai RPJMD Tahun 2025-2029

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bekasi mencakup program utama, sasaran, indikator kinerja output, indikator kinerja outcome dan anggaran program yang dilaksanakan pada tahun 2025 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi tahun 2025-2029. Perjanjian Kinerja ini dilakukan setelah Rencana Kinerja Tahunan disusun berdasarkan Rencana Strategis instansi/unit organisasi yang bersangkutan dan setelah anggaran ditetapkan.

Program utama, sasaran dalam Perjanjian Kinerja disajikan bersama indikator kinerjanya, sedangkan program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan. Sasaran Strategis Pembangunan dan Target Indikator Kinerja Utama setiap Program di Tahun 2025 adalah:

Tabel 2.5
Tujuan/Sasaran Strategis Pembangunan dan Target Indikator
Kinerja Utama Tahun 2025 (sesuai RPJMD)

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS RPJMD	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	SATUAN
1	2		3	4
Terwujudnya tata Kota Bekasi yang berestetika disertai infrastruktur modern dan lestari	1.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	68.00	Nilai
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang lestari	2.	Penurunan Intensitas Emisi GRK	0.88	Ton Co2eq/ Miliar
Terwujudnya daya saing SDM Kota Bekasi yang berbudaya, humanis dan harmonis	3.	Indeks Pembangunan Manusia	83.80	Nilai
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	4.	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	9.05	Persen
Meningkatnya ketangguhan keluarga	5.	Indeks Pembangunan Keluarga	65.50	Nilai
Meningkatnya kesetaraan gender	6.	Indeks Ketimpangan Gender	0.26	Nilai
Meningkatnya pemenuhan hak anak	7.	Nilai Kota Layak Anak	742.35	Nilai
Terwujudnya struktur ekonomi Kota Bekasi yang tangguh dan inklusif	8.	PDRB Per Kapita	48.98-49.34	Juta Rp
Meningkatnya ketahanan pangan kota	9.	Indeks Ketahanan Pangan	94.00	Nilai
Meningkatnya tingkat penyerapan tenaga kerja	10.	Tingkat Pengangguran Terbuka	7.06-7.68	Persen
Menurunnya tingkat kemiskinan	11.	Tingkat Kemiskinan	3.34-3.69	Persen

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS RPJMD	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	SATUAN
1	2		3	4
Terwujudnya iklim investasi Kota Bekasi yang mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	12.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5.14-5.50	Persen
	13.	Rasio Gini	0.401-0.408	Poin
	14.	Indeks Daya Saing Daerah	4.19	Poin
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	15.	Indeks Harmoni	6.47	Nilai
Terwujudnya Kota Bekasi cerdas disertai tata kelola pemerintahan modern dan inovatif	16.	Indeks Reformasi Birokrasi	84.00	Nilai
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	17.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	89.10	Nilai
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kota	18.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	67.83	Nilai
	19.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	74.872	Nilai
	20.	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	3.00	Nilai
	21.	Nilai Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah Terintegrasi Kota Bekasi	2.80	Nilai
Terwujudnya Kota Bekasi Cerdas	22.	Indeks Kota Cerdas	3.66	Nilai

RPJMD Kota Bekasi 2025-2029.

2.2.3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

A. Capaian Kinerja Berdasarkan Target IKU dalam RPD

Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi tercermin dari capaian 11 (sebelas) sasaran strategis RPD dan 25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja Utama (IKU), hal tersebut merupakan dampak dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi dengan menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran, sebanyak 12 indikator mencapai kinerja 100% atau lebih, sebanyak 5 indikator tidak mencapai kinerja 100%, dan 8 indikator belum ada nilainya. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025
(sesuai RPD)

NO	SASARAN RANCANGAN RPD	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3		4	5	6
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan pemerintah	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	85,15	88.83	104.32%
2.	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah	2.	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	3,53	N/A	N/A
		3.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	73,12	67.98	92.97%
		4.	Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (opini BPK terhadap Laporan Keuangan)	WTP	WTP	100%
		5.	Persentase Peningkatan PAD	86,77	N/A	N/A

NO	SASARAN RANCANGAN RPD	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3		4	5	6
3.	Meningkatnya Masyarakat yang Berpengetahuan Tinggi	6.	Indeks Pendidikan	77,83	79.67	102.36%
4.	Meningkatnya akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	7.	Indeks Kesehatan	84,95	87.09	102.52%
5.	Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga dan Pembangunan Responsif gender	8.	Indeks Pembangunan Keluarga	52,50	67.90	129.33%
		9.	Indeks Pembangunan Gender	93,20	93.62	100.45%
6.	Meningkatnya Tenaga Kerja yang Adaptif dan Kesejahteraan Masyarakat Kota	10.	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,42	7.33	114.87%
		11.	Angka Kemiskinan	4,40	3.96	111.11%
7.	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berwawasan Lingkungan	12.	Indeks Infrastruktur Ke-PU-an	47,46	62.53	131.75%
		13.	Indeks Sarana Prasarana Perhubungan	85,80	88.60	103.26%
		14.	Indeks Perumahan Permukiman Pertanahan	50,17	38.60	76.94
		15.	Indeks Penataan Ruang	53,77	58.50	108.80%
		16.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,10	51.46	85.62%
8.	Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang Didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat	17.	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	1,99	N/A	N/A
		18.	Persentase Kerjasama Antar Kelompok SARA	100,00	100	100%
9.	Meningkatnya Upaya dan Kesiapsiagaan	19.	Indeks Risiko Bencana	103	111.58*	92.31%

belum keluar nilainya. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Capaian Kinerja Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2025 (sesuai RPJMD)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGE T	REALISAS I	CAPAIAN (%)
1	2		3	4	5
Terwujudnya tata Kota Bekasi yang berestetika disertai infrastruktur modern dan lestari	1.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	68.00	70.49	103.66
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang lestari	2.	Penurunan Intensitas Emisi GRK	0.88	N/A	N/A
Terwujudnya daya saing SDM Kota Bekasi yang berbudaya, humanis dan harmonis	3.	Indeks Pembangunan Manusia	83.80	84.43	100.75
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	4.	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	9.05	N/A	N/A
Meningkatnya ketangguhan keluarga	5.	Indeks Pembangunan Keluarga	65.50	67.90	103.66
Meningkatnya kesetaraan gender	6.	Indeks Ketimpangan Gender	0.26	N/A	N/A
Meningkatnya pemenuhan hak anak	7.	Nilai Kota Layak Anak	742.35	501	67.49
Terwujudnya struktur ekonomi Kota Bekasi yang tangguh dan inklusif	8.	PDRB Per Kapita	49.16	52.51	106.82
Meningkatnya ketahanan pangan kota	9.	Indeks Ketahanan Pangan	94.00	73.07	77.73
Meningkatnya tingkat penyerapan tenaga kerja	10.	Tingkat Pengangguran Terbuka	7.68	7.33	104.56
Menurunnya tingkat kemiskinan	11.	Tingkat Kemiskinan	3.69	3.96	92.68
Terwujudnya iklim investasi Kota Bekasi yang	12.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5.32	5.39	101.32
	13.	Rasio Gini	0.408	0.407	100.25

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGE T	REALISAS I	CAPAIAN (%)
1	2		3	4	5
mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	14.	Indeks Daya Saing Daerah	4.19	4.09	97.61
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	15.	Indeks Harmoni	6.47	7.00	108.19
Terwujudnya Kota Bekasi cerdas disertai tata kelola pemerintahan modern dan inovatif	16.	Indeks Reformasi Birokrasi	84.00	89.28	106.29
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	17.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	88.10	88.83	100.83
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kota	18.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	67.83	67.98	100.22
	19.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	74.872	66.7542	89.16
	20.	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	3.00	N/A	N/A
	21.	Nilai Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah Terintegrasi Kota Bekasi	2.80	3.01	107.50
Terwujudnya Kota Bekasi Cerdas	22.	Indeks Kota Cerdas	3.66	3.67	100.27

Sumber: Bapelitbangda, 2026.

Keterangan:

* Capaian Tahun 2024

2.2.3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA IKU

A. Pengukuran Capaian Kinerja antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

1. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) adalah alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi persepsi dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pembangunan serta pemanfaatan fasilitas publik. IKLI mengadopsi indikator dari Peraturan Menteri PANRB No. 14/2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dengan fokus pada 6 unsur utama, yaitu:

- Ketersediaan fisik (*availability*): Keberadaan fisik infrastruktur.
- Kualitas fisik (*quality*): Kondisi fisik yang baik dan optimal.
- Kesesuaian (*appropriateness*): Keselarasan antara kebijakan dan kebutuhan masyarakat.
- Efektivitas pemanfaatan (*utility*): Tepatnya sasaran infrastruktur.
- Penyerapan tenaga kerja (*job creation*): Dampak penciptaan lapangan kerja.
- Kontribusi ekonomi: Dampak positif terhadap perekonomian.

Adapun lingkup infrastruktur yang dimaksud adalah: Jalan raya, jembatan, transportasi darat, irigasi pertanian, infrastruktur air bersih, perumahan, dan telekomunikasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik bahwa sasaran mengukur tingkat kepuasan masyarakat yaitu:

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan.
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan public.
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Rumus penghitungan IKLI yaitu:

$$IKLI := \frac{\text{Total nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$$

Tabel nilai interval dan konversi mutu skor IKLI 2025

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Sumber: Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017

Capaian kinerja IKLI pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

No	Indikaktor Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Nilai	68.00	70.49	103.66%

Kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur baik. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur pada tahun 2025 sudah sangat baik dengan capaian kinerja sebesar 103.66% dari target sebesar 68.00 poin dan terealisasi 70.49 poin. Jika dilihat dari nilai interval konversi (NIK), nilai 70.49 masuk ke dalam mutu pelayanan C atau kinerja unit pelayanan kurang baik.

IKLI tahun 2025 dihitung oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dengan capaian sebesar 70.49 poin, namun IKLI tahun 2025 hanya menghitung infrastruktur kebinamargaan dan ketataairan saja mengingat RPJMD baru disahkan pada bulan Agustus Tahun 2025 sehingga belum dilakukan survey secara menyeluruh. Perhitungan menyeluruh akan dilakukan pada tahun 2026.

2. Penurunan Intensitas Emisi GRK

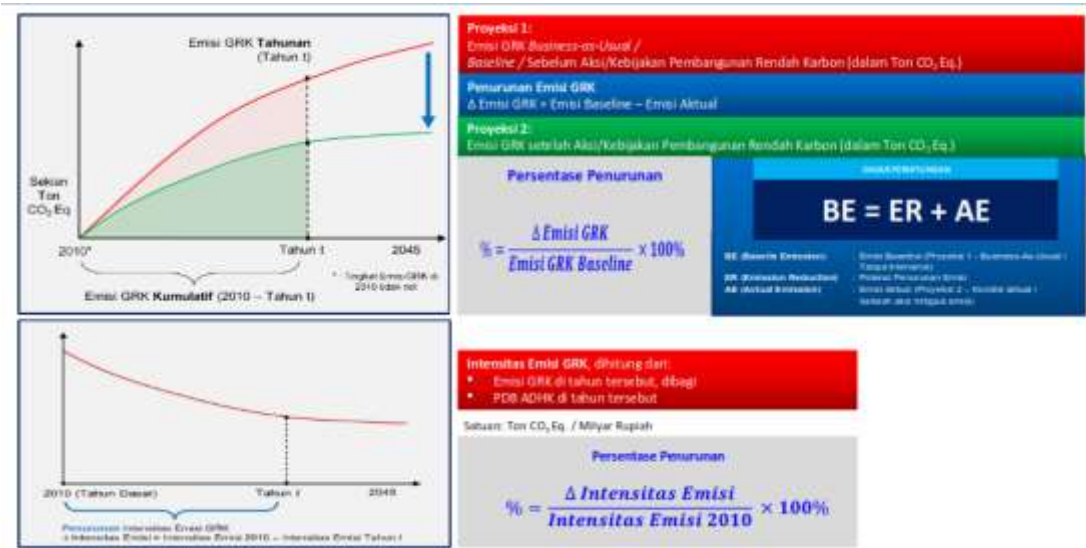
Penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) adalah upaya pengurangan jumlah emisi CO₂ atau setaranya (CO₂e)

yang dihasilkan per satuan output atau aktivitas ekonomi tertentu (misalnya per ton produksi, per GWh listrik, atau per PDB). Ini mencerminkan peningkatan efisiensi untuk memproduksi lebih banyak dengan emisi lebih sedikit, sering kali ditargetkan untuk melawan perubahan iklim. Tujuan penurunan ini untuk mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan industri dan ekonomi tanpa harus menghentikan produksi.

Semakin kecil intensitas emisi GRK, mengindikasikan kualitas pembangunan rendah karbon yang lebih baik. Penurunan intensitas emisi yang menurun menandakan aktivitas ekonomi yang dilakukan pada tahun tersebut menghasilkan emisi yang lebih rendah dibandingkan dengan kondisi awal/referensi. Metode perhitungan Persentase Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) didapatkan melalui perhitungan selisih antara intensitas emisi GRK dan intensitas emisi GRK baseline kemudian dibagi dengan intensitas emisi GRK baseline pada tahun tertentu. Rumus Penurunan intensitas GRK yaitu:

$$\%IE_t = \frac{(IE_t - IEB_t)}{IEB_t}$$

Gambar Ilustrasi Penurunan Intensitas Emisi GRK



Penetapan target penurunan Emisi GRK Kabupaten/Kota di Jawa Barat dalam Dokumen RPJPD dan RPJMD

Penetapan Target Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Penurunan Emisi GRK (Tn CO2e) Baseline 2023	Target 2025
1	Kabupaten Bogor	303,82	494.303,08
2	Kabupaten Bandung	90,55	780.547,79
3	Kabupaten Bandung Barat	3.073,88	966.896,37
4	Kabupaten Bekasi	49,64	476.725,50
5	Kabupaten Cirebon	97,46	644.797,94
6	Kabupaten Tasikmalaya	209,24	621.107,06
7	Kabupaten Ciamis	109,71	446.716,72
8	Kabupaten Kuningas	1.381,62	702.756,10
9	Kabupaten Cianjur	12.963,93	660.663,95
10	Kabupaten Majalengka	10,57	696.368,86
11	Kabupaten Sumedang	178,67	406.726,46
12	Kabupaten Indramayu	113,22	1.843.303,93
13	Kabupaten Sukabumi	27,22	1.392.524,20
14	Kabupaten Purwakarta	102,1	276.711,36
15	Kabupaten Karawang	261,27	1.408.844,69
16	Kabupaten Bekasi	398,28	808.687,67
17	Kabupaten Bandung Barat	72,99	326.969,27
18	Kabupaten Pangandaran	1.604,70	252.221,76
19	Kota Bogor	6,8	27.796,45
20	Kota Sukabumi	560.130,03	26.695,28
21	Kota Bandung	54.617,79	72.790,19
22	Kota Cirebon	34,50	8.381,48
23	Kota Bekasi	395,28	42.295,42
24	Kota Depok	0	42.861,46
25	Kota Cileunyi	499,42	11.392,72
26	Kota Tasikmalaya	491,47	79.040,43
27	Kota Banjar	778,16	47.132,76
Provinsi Jawa Barat (Tn CO2e)			26.966.560,18
Provinsi Jawa Barat (%)			2,66

Sumber:

- Realisasi: data AKSARA penurunan emisi GRK kumulatif Provinsi Jawa Barat, 2023
- Target : Kajian Proyeksi Target Indikator Makro Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat

Penetapan Target Penurunan Intensitas Emisi dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif Sektoral Kabupaten/Kota

Nama Kabupaten/Kota		Penurunan Emisi GRK (Tn CO2e) Baseline 2023		Target 2025		
		2023	2025	2023	2025	
Kab. Bogor	303,82	0,75	0,87	Kab. Bogor	494.303,08	7.867.890,89
Kab. Bandung	90,55	0,89	0,73	Kab. Bandung	780.547,79	6.077.088,67
Kab. Bandung Barat	3.073,88	0,11	0,12	Kab. Bandung Barat	966.896,37	3.624.041,88
Kab. Bekasi	49,64	0,75	0,87	Kab. Bekasi	476.725,50	5.084.070,89
Kab. Cirebon	97,46	0,75	0,87	Kab. Cirebon	644.797,94	5.084.070,89
Kab. Tasikmalaya	209,24	0,11	0,12	Kab. Tasikmalaya	621.107,06	5.084.070,89
Kab. Ciamis	109,71	0,11	0,12	Kab. Ciamis	446.716,72	5.084.070,89
Kab. Kuningas	1.381,62	0,11	0,12	Kab. Kuningas	702.756,10	5.084.070,89
Kab. Cianjur	12.963,93	0,11	0,12	Kab. Cianjur	660.663,95	5.084.070,89
Kab. Majalengka	10,57	0,11	0,12	Kab. Majalengka	696.368,86	5.084.070,89
Kab. Sumedang	178,67	0,11	0,12	Kab. Sumedang	406.726,46	5.084.070,89
Kab. Indramayu	113,22	0,11	0,12	Kab. Indramayu	1.843.303,93	5.084.070,89
Kab. Sukabumi	27,22	0,11	0,12	Kab. Sukabumi	1.392.524,20	5.084.070,89
Kab. Purwakarta	102,1	0,11	0,12	Kab. Purwakarta	276.711,36	5.084.070,89
Kab. Karawang	261,27	0,11	0,12	Kab. Karawang	1.408.844,69	5.084.070,89
Kab. Bekasi	398,28	0,11	0,12	Kab. Bekasi	808.687,67	5.084.070,89
Kab. Bandung Barat	72,99	0,11	0,12	Kab. Bandung Barat	326.969,27	5.084.070,89
Kab. Pangandaran	1.604,70	0,11	0,12	Kab. Pangandaran	252.221,76	5.084.070,89
Kota Bogor	6,8	0,11	0,12	Kota Bogor	27.796,45	5.084.070,89
Kota Sukabumi	560.130,03	0,11	0,12	Kota Sukabumi	26.695,28	5.084.070,89
Kota Bandung	54.617,79	0,11	0,12	Kota Bandung	72.790,19	5.084.070,89
Kota Cirebon	34,50	0,11	0,12	Kota Cirebon	8.381,48	5.084.070,89
Kota Bekasi	395,28	0,11	0,12	Kota Bekasi	42.295,42	5.084.070,89
Kota Depok	0	0,11	0,12	Kota Depok	42.861,46	5.084.070,89
Kota Cileunyi	499,42	0,11	0,12	Kota Cileunyi	11.392,72	5.084.070,89
Kota Tasikmalaya	491,47	0,11	0,12	Kota Tasikmalaya	79.040,43	5.084.070,89
Kota Banjar	778,16	0,11	0,12	Kota Banjar	47.132,76	5.084.070,89

Sumber: data Hasil Cakupan Bapenda Provinsi Jawa Barat terkait Penurunan Indikator Penurunan Emisi GRK kumulatif Kabupaten/Kota, 2025

nilai 0 hingga 100. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengklarifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia.

IPM dibentuk oleh 3 (lima) dimensi dasar:

- (i) Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), diukur dengan Angka Harapan Hidup (UHH) saat lahir;
- (ii) Pengetahuan (*knowledge*), diukur melalui Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS); dan
- (iii) Standar hidup layak (*decent standard of living*), diukur dengan Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang disesuaikan.

Dengan kata lain, IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan Pendidikan. Berdasarkan standar *United Nations Development Programme* (UNDP), status pembangunan manusia dibagi menjadi empat kategori:

1. **Sangat Tinggi:** Skor di atas 80.
2. **Tinggi:** Skor antara 70 – 80.
3. **Sedang:** Skor antara 60 – 70.
4. **Rendah:** Skor di bawah 60.

Rumus penghitungan Indeks Pembangunan Manusia dapat terlihat dari gambar di bawah ini:

Sebelum menghitung IPM, setiap komponen IPM harus dihitung indeksnya. Formula yang digunakan dalam penghitungan indeks komponen IPM adalah sebagai berikut:

Indeks Kesehatan

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH_{it} - AHH_{it_{min}}}{AHH_{it_{maks}} - AHH_{it_{min}}}$$

Indeks Pendidikan

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

Indeks Pengeluaran

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$$

Untuk menghitung indeks masing-masing komponen IPM digunakan batas maksimum dan minimum seperti terlihat dalam tabel berikut.

Komponen	Satuan	Min	Max
Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH _{it})	Tahun	20	85
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	18
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	15
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	Rupiah	1.007.436	26.572.352

Selanjutnya nilai IPM dapat dihitung sebagai:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$$

Capaian kinerja IPM pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10
Indeks Pembangunan Manusia

No	Indikaktor Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja
3.	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	83.80	84.43	100.75%

Pembangunan manusia di Kota Bekasi cukup baik/berkembang. Capaian Indeks Manusia tahun 2025 mencapai 100.75% dari target sebesar 83.80 poin dan terealisasi sebesar 84.43 poin. Artinya, indeks komponen yang membentuk IPM juga sudah cukup baik yaitu Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, Serta Indeks Pengeluaran.

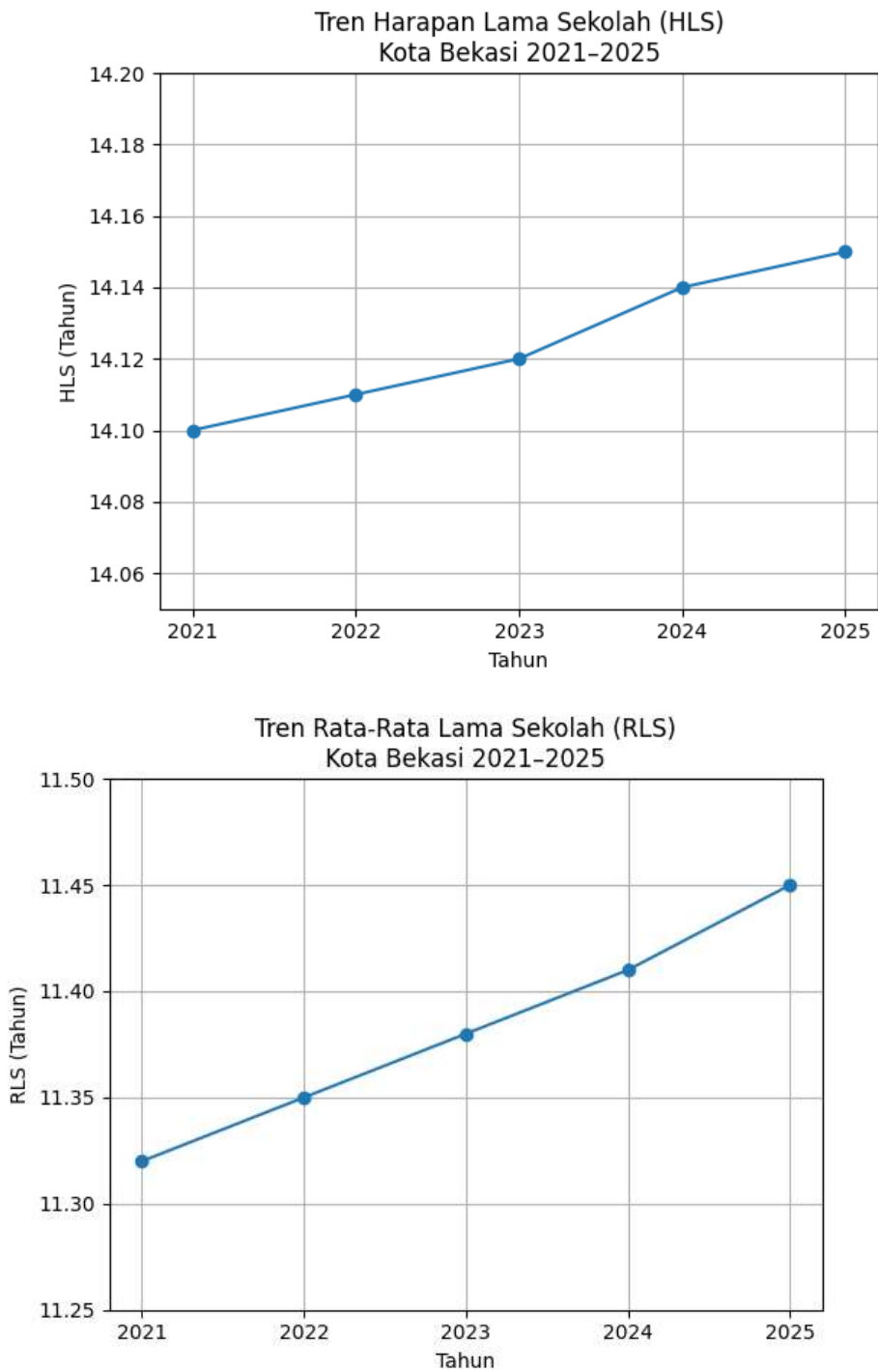
Dalam rangka mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bekasi beberapa Perangkat Daerah yang mempunyai daya ungkit ketercapaian terhadap target yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD adalah:

A. Dimensi Kesehatan (Umur Harapan Hidup)

1. Dinas Kesehatan dan RSUD
 - Penurunan stunting
 - Kematian ibu & Anak
 - Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin
 - Penguatan layanan primer (Puskesmas)
 2. Dinas PPKB/KB
 - Intervensi Gizi Balita dan Remaja Putri
- B. Dimensi Pendidikan (RLS & HLS)
1. Dinas Pendidikan
 - Pencegahan Drop Out
 - Wajib Belajar 9 Tahun (SD dan SMP)
 - Beasiswa Untuk Keluarga Miskin
 2. Dinas Sosial (DTSEN untuk pencegahan putus sekolah)
 3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(akses pendidikan anak perempuan dan Sekolah Layak Anak)
 4. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
- C. Dimensi Standar Hidup Layak (Pengeluaran Per Kapita)
1. Dinas Ketenagakerjaan
 - Penciptaan Lapangan Kerja
 - Pelatihan vokasi berbasis kebutuhan pasar
 - Hilirisasi UMKM
 - Pengendali inflasi
 2. DiskopUKM
 3. DPMPTSP

Faktor-faktor penyebab keberhasilan/peningkatan Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah HLS (tahun)

Gambar 2.5
Tren Harapan Lama Sekolah (HLS)



Sumber: BPS, 2021-2025

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Harapan Lama Sekolah di Kota Bekasi mengalami peningkatan bertahap selama 2021-2025. Capaian Tahun 2025 adalah sebesar 14,15 Tahun yang dapat diartikan bahwa Anak usia 7 tahun di Kota Bekasi secara statistik diharapkan bersekolah hingga 14,15 tahun atau sebagian besar diproyeksikan menamatkan SMA/SMK dan sebagian melanjutkan ke pendidikan tinggi. Sedangkan capaian Rata-rata

Lama Sekolah Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Bekasi selama periode 2021–2025 menunjukkan tren peningkatan yang stabil. Pada tahun 2021, RLS tercatat sebesar 11,32 tahun dan meningkat secara bertahap hingga mencapai 11,45 tahun pada tahun 2025. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan capaian pendidikan penduduk usia 25 tahun ke atas, di mana rata-rata masyarakat telah menempuh pendidikan hingga kelas XI jenjang SMA/ sederajat.

Peningkatan HLS dan RLS tersebut menunjukkan bahwa akses dan keberlanjutan pendidikan pada jenjang menengah relatif terjaga. Stabilitas kenaikan setiap tahun mengindikasikan efektivitas kebijakan pencegahan putus sekolah, perluasan akses pendidikan menengah, serta dukungan pembiayaan bagi keluarga tidak mampu.

Beberapa Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/ peningkatan Harapan Lama Sekolah HLS (tahun) dan Rata-Rata Lama Sekolah adalah:

a. Pencegahan putus sekolah

Pemerintah Kota Bekasi telah menganggarkan beasiswa bagi siswa tidak mampu pada jenjang PAUD, SD dan SMP yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan keberlanjutan pendidikan bagi anak dari keluarga tidak mampu guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kontribusi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Gambar 2.6

Pemberian Beasiswa Tidak Mampu Jenjang SMP Tahun 2025





b. Ketersediaan dan Pemerataan Sekolah Jenjang PAUD, SD dan SMP

Ketersediaan satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, dan SMP (Terutama pada sekolah negeri) di Kota Bekasi secara umum telah mampu menjangkau sebagian besar wilayah kecamatan dan kelurahan. Pada jenjang PAUD, jumlah PAUD Negeri relatif memadai di 12 Kecamatan (1 PAUD Negeri per Kecamatan) dengan penambahan kontribusi signifikan dari penyelenggara swasta. Hal ini mendukung peningkatan akses pendidikan usia dini sebagai fondasi kesiapan belajar pada jenjang dasar.

Pada jenjang SD, pemerataan sekolah sudah cukup baik karena 56 kelurahan telah memiliki sekolah dasar baik negeri dan swasta. Namun demikian, tantangan masih ditemui pada wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi, di mana rasio murid per kelas cenderung meningkat dan kebutuhan ruang kelas baru masih diperlukan. Kondisi ini memerlukan penataan daya tampung dan peningkatan sarana prasarana agar mutu layanan sesuai SPM dan Standar Nasional Pendidikan.

Sementara itu, pada jenjang SMP, jumlah satuan pendidikan relatif lebih terbatas dibandingkan SD, sehingga daya tampung menjadi isu strategis, terutama pada sekolah negeri yang memiliki tingkat peminat tinggi dimana saat ini masih terdapat 9 Kelurahan yang belum memiliki SMP Negeri. Peran SMP swasta cukup besar dalam menjaga keberlanjutan pendidikan lulusan SD. Pemerataan akses SMP menjadi faktor kunci dalam mencegah putus sekolah

pada masa transisi serta dalam mendukung peningkatan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

c. Penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak

Melalui DPPP, Sekolah-sekolah di Kota Bekasi telah menuju sekolah ramah anak, sekolah ramah anak bertujuan untuk mewujudkan satuan pendidikan yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, serta perundungan. Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata lama Sekolah (RLS) sangat dipengaruhi oleh Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada seluruh jenjang, sekolah ramah anak berkontribusi pada HLS dan RLS melalui peningkatan kenyamanan, keamanan, dan keberlanjutan pendidikan. Semakin aman dan inklusif lingkungan sekolah, semakin kecil risiko siswa keluar dari sistem pendidikan.

d. Penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak

Tujuan Pembentukan Sekolah Ramah Anak di Kota Bekasi Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Sekolah ramah Anak Kota Bekasi adalah:

1. Adanya keterjangkauan, kesetaraan, dan keterjaminan hak atas pendidikan bagi semua anak termasuk penyandang disabilitas, korban bencana, anak jalan, anak berhadapan dengan hukum, dan anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus lainnya;
2. Mendorong sekolah berperan penting dalam kehidupan anak sebagai tempat belajar, pengembangan dan sosialisasi;
3. Menghindari hukuman yang berakibat cedera baik secara fisik maupun psikis.

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor: 421/15039/Disdik.Set sampai dengan tanggal surat keputusan ini dibuat terdapat 1.442 Sekolah Ramah Anak di Kota Bekasi

e. Penyelenggaraan Perpustakaan sebagai bagian dari upaya peningkatan Nilai Literasi dan Numerasi

Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah melaksanakan perluasan akses dan pemerataan layanan literasi melalui penyediaan perpustakaan mini di sekretariat RW, operasional perpustakaan

keliling, serta fasilitasi kunjungan perpustakaan bagi peserta didik. Perpustakaan mini di tingkat RW bertujuan mendekatkan bahan bacaan kepada masyarakat hingga lingkup komunitas terkecil, sementara layanan perpustakaan keliling menjangkau wilayah yang belum memiliki fasilitas perpustakaan tetap. Kegiatan kunjungan perpustakaan mendorong peningkatan minat baca, pengenalan literasi informasi, serta pemanfaatan koleksi dan layanan perpustakaan secara optimal oleh pelajar dari berbagai jenjang pendidikan.

Selain perluasan akses, Disarpusda juga melaksanakan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dengan menempatkan perpustakaan sebagai pusat pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat. Guna meningkatkan literasi lokal dan kesadaran sejarah diperkuat melalui kegiatan bedah buku sejarah Kota Bekasi, serta bimbingan teknis bagi pengelola perpustakaan sekolah untuk meningkatkan kompetensi pengelolaan layanan, koleksi, dan otomasi perpustakaan. Secara keseluruhan, rangkaian program tersebut merupakan intervensi strategis dalam memperkuat ekosistem literasi daerah yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan capaian IPM Kota Bekasi secara berkelanjutan.

Gambar 2.7

Penyediaan pojok baca, perpustakaan mini, dan perpustakaan keliling di berbagai tempat



Faktor-faktor penyebab keberhasilan/peningkatan Usia Harapan Hidup



Sumber: BPS Kota Bekasi

Beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan UHH Kota Bekasi yang menjadi salah satu komponen dalam Indeks Pembangunan Manusia sebagai berikut:

- Akses dan fasilitas layanan kesehatan
Fasilitas layanan kesehatan yang makin banyak disertai kemudahan akses layanan kesehatan membuat masyarakat lebih cepat mendapatkan layanan kesehatan.
- Edukasi dan kesadaran masyarakat
Edukasi pola hidup sehat kepada masyarakat yang dilakukan juga memberi dampak yang baik terhadap perilaku di masyarakat dalam menerapkan pola hidup sehat. Edukasi kepada masyarakat masih perlu dan terus ditingkatkan agar perilaku hidup sehat tertanam dalam diri masyarakat.
- Jaminan Kesehatan
Program jaminan kesehatan, seperti BPJS memudahkan masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan dengan biaya terjangkau, sehingga memperbaiki status kesehatan masyarakat dalam jangka panjang.
- Tingkat pendidikan masyarakat Kota Bekasi
Tingkat pendidikan masyarakat Kota Bekasi yang cukup tinggi juga berkontribusi terhadap gaya hidup sehat dan akses terhadap

informasi terkait kesehatan yang lebih baik. Semakin tinggi tingkat pendidikan, berpengaruh terhadap kemampuan individu dalam mengakses informasi dan kemampuan dalam memilih informasi.

- Kondisi ekonomi

Pendapatan dan standar hidup yang baik mendukung kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan nutrisi, kesehatan, dan lingkungan yang layak. Hal ini juga berpengaruh pada peningkatan usia harapan hidup masyarakat.

- Lingkungan dan gaya hidup

Lingkungan yang bersih, sanitasi yang baik, gaya hidup sehat, serta perilaku hidup bersih dan sehat (seperti : olahraga teratur, makan makanan yang sehat dan bergizi, tidak merokok, dll) juga memengaruhi umur harapan hidup.

- Intervensi Pemerintah

Intervensi Pemerintah, baik pusat, provinsi maupun Kota Bekasi, dalam bentuk program pembangunan di bidang kesehatan yang dilaksanakan juga berpengaruh terhadap peningkatan UHH Kota Bekasi dari tahun ke tahun. Hal ini menjadi komitmen Wali Kota Bekasi yang diwujudkan dengan salah satu dari Sapta Program Wali Kota Tahun 2025-2029, yaitu Gerakan Kobe Sehat.

Hal-hal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi dalam mendukung peningkatan UHH di Kota Bekasi meliputi:

- Dalam penyediaan fasilitas kesehatan, Kota Bekasi memiliki 1 RSUD tipe B yaitu RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid dan 4 RSUD tipe D, yaitu RSUD Jatisampurna, RSUD Bantargebang, RSUD Pondokgede, dan RSUD Teluk Pucung, 55 puskesmas serta RS swasta dan klinik yang tersebar di Kota Bekasi.
- Kota Bekasi juga menganggarkan bantuan jaminan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu. Disamping dana yang juga dianggarkan oleh pusat dan juga provinsi.
- Penyuluhan juga menjadi salah satu program yang dilakukan oleh puskesmas serta pendampingan, terutama kepada keluarga beresiko baik stunting maupun penyakit lainnya. Dalam hal pendampingan kepada keluarga beresiko, puskesmas didukung oleh posyandu.

- Deteksi dini melalui Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di puskesmas dan sekolah serta Bulan Imunisasi Anak di Sekolah (BIAS) sebagai upaya edukasi dan aksi kesehatan sepanjang Tahun 2025. Edukasi tersebut mencakup pencegahan stunting perilaku hidup sehat, dan kesehatan mental.
- Penataan kawasan kumuh, penataan ruang terbuka hijau sebagai ruang interaksi warga juga menjadi salah satu program pembangunan yang terus dilaksanakan.



Halo Temandinkes 🌟

Vitamin A sangat penting untuk mendukung pertumbuhan, memperkuat daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan mata. Ayo, pastikan anak-anak kita mendapatkan vitamin A yang cukup untuk tumbuh sehat dan ceria!

Mari kita jaga kesehatan bersama!

#DinasKesehatan #DinkesBekasi #BulanVitaminA



Selama 17 Juni 2025 Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bekasi melaksanakan kegiatan skrining Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) di Kantor Kecamatan Jati Sampurna Kota Bekasi.

4. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita

Secara teknis, Prevalensi Stunting adalah persentase jumlah balita yang mengalami gangguan pertumbuhan sehingga tinggi

badannya tidak sesuai dengan standar usianya dalam suatu populasi. Berdasarkan standar Kementerian Kesehatan RI dan WHO, kondisi ini dibagi menjadi dua kategori utama menggunakan pengukuran *Z-Score* (simpangan baku):

- 1. Sangat Pendek (*Severely Stunted*):
Balita yang memiliki panjang atau tinggi badan menurut umur dengan nilai *Z-score* kurang dari -3.00 SD. Ini menunjukkan tingkat kekurangan gizi kronis yang sangat berat.
- 2. Pendek (*Stunted*):
Balita yang memiliki nilai *Z-score* antara -3.00 SD sampai dengan kurang dari -2.00 SD

Angka ini penting karena merupakan Indikator Gizi Kronis, berbeda dengan kurus (*wasting*) yang bersifat akut, stunting mencerminkan kekurangan asupan gizi yang berlangsung lama (kronis) atau infeksi berulang, terutama dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan. Pemerintah Indonesia menggunakan data prevalensi ini untuk memantau keberhasilan program percepatan penurunan stunting, dengan target nasional mencapai 14,2% pada tahun 2029. Anak yang masuk kategori ini berisiko mengalami penurunan kemampuan kognitif, motorik, serta lebih rentan terhadap penyakit tidak menular saat dewasa. Penting untuk diingat bahwa anak pendek belum tentu stunting, namun anak stunting pasti memiliki perawakan pendek karena adanya hambatan pada proses tumbuh kembangnya.

Capaian kinerja pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10
Prevalensi Stunting

No	Indikaktor Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja
4.	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	Persen	9.05	N/A	N/A

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) terakhir pada tahun 2024, prevalensi stunting pada balita secara nasional di Indonesia adalah sekitar 19.8%. Ini menunjukkan bahwa sekitar 1

dari 5 balita mengalami stunting pada tahun 2024, menurun dari sekitar 21.5 persen pada tahun sebelumnya. Sedangkan untuk capaian prevalensi stunting Kota Bekasi, belum ada data realisasi yang dikeluarkan oleh Kemenkes.

Selain hasil survei, Kementerian Kesehatan juga telah menyediakan aplikasi khusus yang berfungsi untuk surveilans/pemantauan berkelanjutan status gizi balita, dan penentuan hasil persentase stunting setiap tahun. Aplikasi tersebut adalah Sigizi Kesga, berdasarkan hasil rekapitulasi pengukuran balita yang telah dilakukan secara berkala, diperoleh hasil persentase stunting tiap tahun sebagai berikut:

- Persentase stunting tahun 2021 sebesar 7.87%
- Persentase stunting tahun 2022 sebesar 3.44%
- Persentase stunting tahun 2023 sebesar 2.99%
- Persentase stunting tahun 2024 sebesar 2.89%
- Persentase stunting tahun 2025 sebesar 3.36%

Upaya Penanganan Stunting di Kota Bekasi

Salah satu kegiatan yang kita fokuskan selama ini adalah memvalidasi data hasil pengukuran balita, di sisi lain Dinas Kesehatan Kota Bekasi juga telah melakukan intervensi spesifik dan intervensi sensitif terkait dengan percepatan penanganan kasus stunting.

a. Intervensi Spesifik (Sektor Kesehatan 30%):

1. Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) pada remaja putri. Pemberian TTD dilakukan pada remaja putri mulai dari usia 12-18 tahun di institusi Pendidikan pada jenjang SMP dan SMA. Capaian program pemberian TTD. Saat ini, program pemberian tablet tambah darah telah mencapai 65,17% dari target yang diharapkan sebesar 90%;
2. Pemberian Makanan Tambahan Berbahan Pangan Lokal (PMT) Bagi Balita Gizi Kurang dan Ibu Hamil KEK. Kegiatan PMT Lokal merupakan salah satu intervensi spesifik bagi balita gizi kurang. Kegiatan PMT Lokal khususnya di Kota Bekasi dilaksanakan di seluruh Puskesmas di Kota Bekasi pada triwulan III, dengan sasaran Balita Gizi Kurang sebanyak 3053

Balita Gizi Kurang dan 547 Ibu Hamil KEK. Kegiatan PMT Lokal ini melibatkan Tenaga Pelaksana Gizi, Kader Posyandu, dan dukungan warga Masyarakat;

3. Pemberian TTD pada ibu hamil. Kegiatan pemberian tablet zat besi Fe diberikan untuk seluruh ibu hamil dari TM 1 sebanyak 180 tablet Fe selama masa kehamilan guna untuk mencegah terjadinya anemia pada ibu hamil, kegiatan pemberian Fe bisa diberikan di TPMB, Puskesmas, Klinik, RS, dan Posyandu pada saat melakukan pemeriksaan ANC ibu hamil. Saat ini, program pemberian TTD telah mencapai 82,8% dari target yang diharapkan sebesar 90%;
4. Melaksanakan skrining anemia pada remaja putri. Skrining anemia dilakukan pada remaja putri kelas 7 SMP dan kelas 10 SMA, hal ini bertujuan untuk deteksi dini anemia pada remaja putri. Capaian program skrining anemia pada remaja putri sampai saat ini yaitu 94,67% dari target 75%
5. Pemeriksaan Skrining Hypotiroid Konginetal (SHK) pada bayi baru lahir dengan capaian saat ini sebesar 66,6% dari target program yaitu 65%;
6. Pemberian susu F100 untuk balita gizi buruk dengan capaian yaitu 100% balita gizi buruk diberikan intervensi pemberian susu F100;
7. Pemberian sirup zat besi untuk balita gizi buruk dengan capaian yaitu 100%, balita gizi buruk diberikan intervensi pemberian sirup zat besi;
8. Pemberian Vitamin A 100.000 IU untuk anak usia 6-11 bulan dan 200.000 IU untuk anak usia 12-59 bulan;
9. Pemberian asam folat pada calon pengantin;
10. Pemenuhan alat antropometri terstandar bagi 1.615 posyandu;
11. Peningkatan kapasitas nakes melalui pelatihan terstandar yaitu Pelatihan SDIDTK dan PMBA, pada tahun 2024 17 SDM PKM 2 SDM Dinkes, dan pada tahun 2025 20 SDM PKM.
12. Pelaksanaan pemeriksaan kualitas air minum pada 60 sampel;
13. Melakukan pembinaan germas dalam upaya pencegahan stunting;

14. Melakukan advokasi posyandu terintegrasi;
15. Penyediaan media KIE untuk puskesmas;
16. Melakukan bimbingan teknis pokjanal; dan
17. Belanja iuran jaminan kesehatan bagi setiap peserta PBP dan BP Kelas 3.

b. Intervensi Sensitif (Sektor Non Kesehatan 70%)

1. Diseminasi AKS Kota Bekasi Tahun 2025 dilaksanakan di Aula Balai Patriot pada hari Selasa, 23 Juli 2025. Pembukaan kegiatan oleh Bapak Sekretaris Daerah selaku Ketua TPPS Kota Bekasi dengan jumlah Peserta 75 orang dari TPPS Kota Bekasi dan TPPS Kecamatan. Selain itu dihadiri oleh wilayah yang dijadikan lokus untuk pelaksanaan Audit Kasus Stunting (AKS) yaitu Kec. Jatisampurna dan Kec. Bekasi Selatan. Kegiatan ini disampaikan materi oleh Narasumber dari Tim Pakar Audit Kasus Stunting diantaranya adalah Dokter Spesialis Anak, Dokter Spesialis Obgyn, Ahli Gizi dan Psikolog;
2. Pelaksanaan Workshop Verval dan Pendataan Keluarga Tahun 2025 dilaksanakan secara serentak pada hari Selasa tanggal 13 September 2025 bertempat di Aula pada 5 lokasi fokus diantaranya adalah Kec. Bekasi Utara, Kec. Pondokgede, Kec. Bekasi Timur, Kec. Mustikajaya dan Kec. Rawalumbu dengan dihadiri oleh 1.493 orang kader dengan masa periode Pendataan Keluarga selama 30 hari;
3. Pembangunan tangki septik SNI oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) melalui swakelola tipe IV pada program Dana Alokasi Khusus di Kelurahan Jatiluhur sebanyak 20 unit, Kelurahan Jatirangga sebanyak 20 unit, dan Kelurahan Teluk Pucung sebanyak 20 unit melalui Dinas Perkimtan. Pembangunan Tangki Septik Individu bertujuan untuk meningkatkan sanitasi yang aman dan layak serta mengurangi jumlah angka stunting yang ada di Kota Bekasi;
4. Monitoring penyaluran bantuan penanganan stunting berupa 10 butir telur dan 1 ekor ayam di Kec. Jatisampurna, Bekasi Selatan, Mustika Jaya, Jatiasih dan Medan Satria dilaksanakan pada Bulan Juli - September 2025;



Rakor Posyandu Tingkat Kota



Ruiuk Balita Stunting



Pemberian Susu Ibu Hamil KEK



Pendampingan CATIN



Pendampingan TPK



Skrining Anemia & Pemberian TTD Rematri



Pemberian vitamin A pada Balita 6-59 Bln

5. Indeks Pembangunan Keluarga

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran serta fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. iBangga merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga di Indonesia dan merupakan indikator yang digunakan BKKBN untuk mengukur kualitas keluarga. Indeks ini digunakan untuk mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh, berkembang atau rentan. Nilai iBangga berkisar antara 0 – 100 dengan kategori nilai:

- > 70 Baik/Tangguh
- 40 – 70 Cukup Baik/Berkembang
- < 40 Kurang Baik/Rentan

Capaian kinerja iBangga pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10
Indeks Pembangunan Keluarga

No	Indikaktor Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja
5.	Indeks Pembangunan Keluarga	Nilai	65.50	67.90	103.66%

Pembangunan keluarga di Kota Bekasi cukup baik/berkembang. Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) tahun 2025 mencapai 103.66% dengan target sebesar 65.50 poin dan terealisasi 67.90 poin. iBangga diukur dari nilai tiga dimensi yang terdiri dari indeks ketenteraman, indeks kemandirian, serta indeks kebahagiaan. Pada tahun 2025 Kota Bekasi memperoleh nilai indeks ketenteraman sebesar 85.20 poin, indeks kemandirian 71.50 poin, dan indeks kebahagiaan 46.90 poin. Hal ini diperoleh dari adanya kegiatan pelaksanaan advokasi; Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal; Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB; Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan KB di Kota

Bekasi; Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah Kota Bekasi; Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Kota Bekasi dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB; serta pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

INDEKS PEMBANGUNAN KELUARGA (IBANGGA) HASIL PEMUTAKHIRAN PK-25						
No	Provinsi	Kabupaten/Kota	IBangga 2025	Dimensi		
				Ketertramas	Kemandirian	Kebahagiaan
162	JAWA BARAT	BANDUNG BARAT	59.0	64.0	61.4	51.7
163	JAWA BARAT	BEKASI	72.2	78.5	74.3	63.9
164	JAWA BARAT	BOGOR	67.3	76.8	66.7	58.5
165	JAWA BARAT	CIAMIS	61.3	64.0	59.8	60.1
166	JAWA BARAT	CIANJUR	51.9	53.9	49.5	52.3
167	JAWA BARAT	CIREBON	61.6	74.3	62.0	48.6
168	JAWA BARAT	GARUT	54.3	61.1	53.1	48.6
169	JAWA BARAT	INDRAMAYU	59.8	69.7	59.5	50.3
170	JAWA BARAT	KARAWANG**	NA	72.9	NA	55.1
171	JAWA BARAT	KOTA BANDUNG	70.7	86.1	70.7	55.2
172	JAWA BARAT	KOTA BANJAR	72.9	81.3	69.7	67.7
173	JAWA BARAT	KOTA BEKASI	67.9	85.2	71.5	46.9
174	JAWA BARAT	KOTA BOGOR	66.6	85.0	61.8	52.9
175	JAWA BARAT	KOTA CIMAHI	69.7	88.5	72.4	48.2
176	JAWA BARAT	KOTA CIREBON	69.2	85.0	69.3	53.4
177	JAWA BARAT	KOTA DEPOK	72.1	87.6	70.9	57.7

Gambar 2.9



Kegiatan pendampingan dan pemeriksaan Pelayanan KB

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2025

6. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan suatu indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam aspek pembangunan manusia. Indeks ini dikembangkan secara global oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) dengan istilah *Gender Inequality Index* (GII), dan diadopsi di Indonesia oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai bagian dari indikator pembangunan berbasis gender. IKG hadir sebagai respons atas kebutuhan untuk tidak hanya melihat capaian pembangunan secara umum, tetapi juga mengidentifikasi sejauh mana perempuan dan laki-laki memperoleh manfaat pembangunan secara setara.

Secara konseptual, Indeks Ketimpangan Gender mengukur kerugian pembangunan manusia yang timbul akibat ketimpangan peran dan akses antara perempuan dan laki-laki. Indeks ini berangkat dari pemahaman bahwa ketidaksetaraan gender dapat menghambat kualitas pembangunan suatu negara atau daerah. Ketimpangan tersebut tidak hanya berdampak pada perempuan sebagai individu, tetapi juga pada keluarga, masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dengan demikian, IKG tidak sekadar menggambarkan kondisi perempuan, melainkan mencerminkan kesenjangan relasi sosial antara dua kelompok gender dalam struktur sosial dan ekonomi.

Dalam pengukurannya, IKG mencakup tiga dimensi utama, yaitu **kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi**. Dimensi kesehatan reproduksi menggambarkan risiko dan kerentanan perempuan dalam fungsi biologisnya, yang diukur melalui indikator seperti angka kematian ibu dan angka kelahiran remaja. Dimensi pemberdayaan menilai sejauh mana perempuan memiliki akses terhadap pendidikan dan keterwakilan dalam pengambilan keputusan politik, yang tercermin dari tingkat pendidikan menengah atau tinggi serta proporsi kursi parlemen yang diduduki perempuan. Sementara itu, dimensi partisipasi ekonomi mengukur keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam pasar kerja melalui tingkat partisipasi angkatan kerja. Ketiga dimensi ini dipilih karena dianggap mewakili aspek fundamental dalam pembangunan manusia yang sensitif terhadap ketimpangan gender.

Nilai IKG berada pada rentang antara 0 hingga 1. Nilai yang semakin mendekati 0 menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin rendah atau kondisi yang semakin setara antara perempuan dan laki-laki. Sebaliknya, nilai yang mendekati 1 menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Dengan demikian, interpretasi IKG berbeda dari beberapa indeks pembangunan lainnya yang semakin tinggi nilainya semakin baik. Dalam konteks ini, penurunan nilai IKG justru mencerminkan kemajuan dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender.

Keberadaan Indeks Ketimpangan Gender memiliki peran strategis dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan publik. Pemerintah dapat menggunakan IKG sebagai alat untuk mengidentifikasi sektor-sektor yang masih menunjukkan kesenjangan signifikan, seperti rendahnya partisipasi kerja perempuan atau terbatasnya keterwakilan perempuan dalam jabatan

politik. Selain itu, IKG juga menjadi instrumen penting dalam pemantauan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya tujuan kelima yang menekankan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Capaian kinerja IKG pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10
Indeks Ketimpangan Gender

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja
6.	Indeks Ketimpangan Gender	Nilai	0.26	N/A	N/A

Untuk realisasi IKG tahun 2025, belum ada nilai yang dirilis oleh BPS sehingga tidak dapat dihitung capaiannya berdasarkan target yang telah ditetapkan. Namun Kota Bekasi tetap optimis mendapat nilai baik untuk indikator ini. Sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kota Bekasi dalam menurunkan Indeks Ketimpangan Gender (IKG), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis dengan aktivitas kegiatan sebagai berikut:

- 1) **P2WKSS (Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera)** merupakan program terpadu lintas sektor yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup perempuan dalam pembangunan berbasis keluarga. Program ini menitikberatkan pada pemberdayaan perempuan sebagai penggerak utama ketahanan keluarga melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan, ekonomi produktif, serta partisipasi sosial. (Pelatihan ketrampilan bagi KK Binaan, Sosialisasi perlindungan perempuan dan anak bagi KK Binaan, Sekopi Berharga (Sekolah Perempuan Kota Bekasi Berdaya Harmonis Keluarga Sejahtera), dan intervensi lintas sektor yang mencakup peningkatan kapasitas ekonomi perempuan, penguatan kesehatan ibu dan anak, peningkatan pendidikan keluarga, serta perbaikan lingkungan permukiman).



- 2) Peningkatan kapasitas kader Posyandu 6 SPM untuk meningkatkan kesehatan reproduksi mencakup Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kelahiran Remaja (ASFR 15–19 tahun) yang menjadi komponen penghitungan IKG. Penguatan kapasitas kader Posyandu berperan langsung dalam mendukung deteksi dini risiko kehamilan, pemantauan ibu hamil, edukasi gizi, pencegahan stunting, serta penyuluhan kesehatan reproduksi bagi remaja dan calon pengantin. perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat layanan kesehatan, tetapi juga aktor utama dalam sistem pelayanan publik pada masyarakat sehingga mendukung dimensi pemberdayaan dalam kerangka pembangunan responsif gender.



- 3) Pertemuan rutin PKK berfungsi sebagai ruang pembelajaran, peningkatan kapasitas, dan penguatan literasi perempuan, termasuk dalam aspek kesehatan keluarga, ekonomi produktif, pengasuhan anak, dan ketahanan keluarga yang mempengaruhi capaian IKG pada dimensi pemberdayaan dan partisipasi perempuan.



- 4) Pertemuan rutin GOW dimana GOW sebagai wadah koordinasi berbagai organisasi perempuan memiliki peran penting dalam memperluas partisipasi perempuan dalam ruang publik,

memperkuat jejaring kelembagaan, serta meningkatkan kapasitas kepemimpinan perempuan di tingkat daerah.



- 5) Pelatihan ketrampilan (memasak, membuat kue, packaging dan marketing) bagi Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) turut menyumbang capaian IKG khususnya pada dimensi partisipasi ekonomi dan pemberdayaan perempuan. PEKKA termasuk kelompok rentan yang menghadapi hambatan akses terhadap pekerjaan layak, sumber permodalan, dan perlindungan sosial. Dengan pelatihan ketrampilan, diharapkan PEKKA dapat meningkatkan pendapatan keluarga dan mengembangkan usaha produktif mandiri sehingga dapat meningkatkan partisipasi kerja perempuan.



- 6) Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi Perangkat Daerah se-Kota Bekasi bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam siklus perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan agar kualitas kebijakan dan alokasi anggaran Kota Bekasi lebih tepat sasaran terhadap kelompok perempuan dan rentan.



- 7) Pembinaan dan pembentukan PUSPAGA sebagai layanan satu pintu berbasis keluarga yang menyediakan edukasi, konseling, dan rujukan terkait pengasuhan, perlindungan anak, pencegahan kekerasan, serta kesehatan reproduksi.



- 8) Pembinaan Forum PUSPA Kota Bekasi dimana Forum PUSPA berfungsi sebagai wadah kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi masyarakat, akademisi, dan media dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan perempuan serta anak.



- 9) Pencegahan, pendampingan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi merupakan prasyarat utama terciptanya kesetaraan akses dan partisipasi dalam pembangunan. Perempuan yang mengalami kekerasan atau berada dalam situasi rentan cenderung mengalami hambatan dalam melanjutkan pendidikan, bekerja secara produktif, atau berpartisipasi dalam ruang publik. Dengan adanya layanan perlindungan—seperti pendampingan hukum, layanan psikologis, rumah aman, dan rehabilitasi sosial—perempuan korban memperoleh pemulihan dan kesempatan untuk kembali berdaya.



7. Nilai Kota Layak Anak

Kota Layak Anak (KLA) adalah sebuah sistem pembangunan berbasis hak anak yang diterapkan oleh pemerintah daerah di

Indonesia untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak secara menyeluruh, terencana, dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan seperti pemerintah, masyarakat, dunia usaha, serta lembaga lainnya. Fokusnya adalah pada pemenuhan hak anak—termasuk hak sipil dan kebebasan, kesehatan, pendidikan, lingkungan keluarga yang layak, pemanfaatan waktu luang, serta perlindungan khusus dari kekerasan atau eksploitasi—melalui kebijakan, program, dan layanan yang responsif kepada kebutuhan anak. Penilaian KLA dilakukan melalui 24 indikator penilaian yang mencakup kelembagaan dan substansi pemenuhan hak anak, berdasarkan pedoman dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Republik Indonesia.

Penilaian KLA menghasilkan beberapa kategori capaian berdasarkan skor, yaitu:

- **Pratama** – skor 500–600
- **Madya** – skor 601–700
- **Nindya** – skor 701–800
- **Utama** – skor 801–900
- **KLA (Istimewa)** – skor 901–1000/di atas 900 (tingkat tertinggi pengakuan)

Pada Tahun 2025, Kota Bekasi mendapatkan nilai KLA sebesar 501 poin yang menempatkannya dalam predikat Pratama, turun dari peringkat Nindya di tahun 2024—artinya belum memenuhi banyak indikator pemenuhan hak anak, terutama di sektor pemenuhan administrasi. Kota Bekasi terus berupaya meningkatkan predikat ini melalui berbagai program, evaluasi berkala, dan koordinasi dengan semua pihak untuk memenuhi indikator lebih optimal dan meraih predikat lebih tinggi di penilaian berikutnya.

Capaian kinerja Nilai KLA pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11
Nilai Kota Layak Anak

No	Indikaktor Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja
7.	Nilai Kota Layak Anak	Nilai	742.35	501	67.49%

Capaian kinerja Nilai KLA Kota Bekasi pada tahun 2025 berada di bawah 100% yaitu sebesar 67.49%, hal ini dikarenakan jauhnya nilai realisasi yang didapat dibanding nilai target yang ditetapkan. Angka 501 masuk ke dalam predikat Pratama dan ini merupakan predikat paling rendah di antara predikat-predikat lainnya. Pada tahun 2024 Kota Bekasi mendapat Predikat Nindya, hal ini tentu saja menjadi pembelajaran untuk dinas terkait agar lebih tertib administrasi ke depannya.

Sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kota Bekasi dalam meningkatkan Nilai Kota Layak Anak (KLA) Kota Bekasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis dengan aktivitas kegiatan sebagai berikut:

- 1) Rapat Koordinasi Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) dilaksanakan sebagai bagian dari upaya konsolidasi dan penguatan komitmen lintas perangkat daerah dalam meningkatkan capaian indikator KLA. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap progres pemenuhan lima klaster hak anak, mengidentifikasi kendala dalam pemenuhan indikator, serta merumuskan langkah strategis percepatan peningkatan nilai KLA sesuai standar nasional.



- 2) Desk Evaluasi Data KLA dilaksanakan sebagai tahapan verifikasi dan penelaahan terhadap kelengkapan serta kesesuaian data dukung indikator KLA untuk meningkatkan kualitas pelaporan dan

optimalisasi capaian nilai KLA secara komprehensif dan akuntabel pada saat penilaian Kota Layak Anak yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.



- 3) Sosialisasi Sekolah Ramah Anak untuk meningkatkan pemahaman kepala sekolah, tenaga pendidik, serta pemangku kepentingan pendidikan mengenai prinsip-prinsip sekolah yang aman, inklusif, nondiskriminatif, dan bebas kekerasan. Melalui sosialisasi ini diharapkan terbentuk komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal serta berkontribusi terhadap peningkatan capaian indikator Kota Layak Anak (KLA).



- 4) Pembinaan, Jambore FORAKSI dan FORAKSI Goes to School. FORAKSI atau Forum Anak Kota Bekasi merupakan wadah penguatan kapasitas serta partisipasi anak dalam pembangunan daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman anak mengenai peran strategisnya sebagai pelopor perubahan dan pelapor atas berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Melalui kegiatan ini, FORAKSI diharapkan mampu memperkuat peran anak sebagai agen perubahan dalam menyosialisasikan hak anak serta pencegahan kekerasan di lingkungan Pendidikan.



- 5) Pelaksanaan Lomba-Lomba Ramah Anak diselenggarakan sebagai strategi penguatan komitmen dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong inovasi, kreativitas, serta praktik baik dalam penerapan prinsip ramah anak di berbagai sektor, baik di lingkungan sekolah, kelurahan, maupun ruang publik. (Lomba Taman Ramah Anak, Lomba Kreativitas Anak, Lomba Sekolah Ramah Anak, Lomba Puskesmas Ramah Anak, dsb).



- 6) Sosialisasi Perlindungan Khusus Anak terkait Perda Perlindungan Khusus Anak dan Teman Curhat Perempuan dan Anak (TERPANA) pada sekolah dan masyarakat untuk memperkuat pengetahuan mengenai bentuk-bentuk perlindungan, mekanisme penanganan kasus, serta peran lintas sektor dalam menjamin pemenuhan hak anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. TERPANA merupakan inovasi DPPPA Kota Bekasi sebagai upaya memperluas akses informasi dan layanan pengaduan bagi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan, kekerasan, maupun diskriminasi. Melalui sosialisasi ini diharapkan tercipta lingkungan yang lebih responsif, peduli, dan berani melapor, sehingga penguatan sistem perlindungan perempuan dan anak dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.





TERPANA

Teman Curhat Perempuan dan Anak

WHATSAPP :
0822 1000 0697
0816 8484 78

Butuh informasi terkait permasalahan perempuan dan anak?

- Perempuan dan anak-anak dalam situasi darurat;
- Perempuan dan anak yang berhadapan dengan masalah hukum;
- Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA);



OPERATOR :
021-89452119

Butuh teman berbagi cerita permasalahan perempuan dan anak?

- Perempuan dan Anak Korban kekerasan baik fisik dan/atau mental;
- Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- Anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual.



KONSELOR :
0822 1000 0697
0816848478

Butuh Konsultasi, konseling atau rujukan permasalahan perempuan dan anak?

- Layanan Telekonseling bagi perempuan dan anak;
- Layanan penjangkauan / Home Visit
- Layanan Rujukan bagi perempuan dan anak yang membutuhkan perawatan dan perlindungan khusus;

Offline Service / Layanan Tatap langsung
(Jam 08.00 s.d 16.00 WIB)

Unit Perlindungan Perempuan dan anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi

Jl. A. Yani No. 1 Lantai 5 Gedung D Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan



GRATIS

DPPPA Kota Bekasi Tidak Menerima Gratifikasi

Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tidak Dipungut Biaya !

7) Pendampingan dan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak dilaksanakan sebagai bentuk komitmen dalam memberikan perlindungan komprehensif kepada anak korban kekerasan. Kegiatan ini mencakup layanan pengaduan, asesmen awal, pendampingan psikologis dan hukum, koordinasi rujukan lintas sektor, hingga

pemantauan pemulihan korban. Melalui penanganan yang terintegrasi dan responsif, diharapkan hak-hak anak korban dapat dipulihkan serta sistem perlindungan anak di Kota Bekasi semakin kuat dan efektif.



8. PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan indikator ekonomi yang menggambarkan nilai rata-rata output barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap penduduk dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Dalam konteks pembangunan daerah, PDRB per kapita digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara lebih komprehensif.

Secara konsep, PDRB per kapita menunjukkan seberapa besar kontribusi ekonomi yang “secara rata-rata” dapat diasosiasikan dengan setiap individu di daerah tersebut. Oleh karena itu, indikator ini tidak hanya berfungsi sebagai ukuran produktivitas masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi perkembangan ekonomi dari tahun ke tahun maupun perbandingan antarwilayah.

PDRB per kapita dapat dihitung dalam dua pendekatan nilai, yaitu Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). ADHB mencerminkan nilai ekonomi berdasarkan harga pada tahun berjalan. ADHK mengukur nilai ekonomi berdasarkan harga pada tahun tertentu (tahun dasar), sehingga lebih tepat digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi riil tanpa pengaruh inflasi.

Secara umum, perhitungan PDRB per kapita menggunakan rumus berikut:

$$\text{PDRB per kapita} = \frac{\text{Total PDRB}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

Keterangan:

- Total PDRB merupakan nilai keseluruhan produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam satu tahun.

- Jumlah penduduk adalah total penduduk di wilayah tersebut pada periode yang sama.

PDRB per kapita merupakan indikator penting untuk menilai kondisi ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Dengan membandingkan nilai PDRB per kapita antardaerah atau dari tahun ke tahun, pemerintah dan peneliti dapat mengevaluasi efektivitas pembangunan, mengidentifikasi ketimpangan, dan merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Capaian kinerja PDRB Per Kapita pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.12
PDRB Per Kapita

No	Indikaktor Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja
8.	PDRB Per Kapita	Juta Rp	49.16	52.51	106.82%

PDRB per Kapita Kota Bekasi sebesar 52.513.718 rupiah, artinya nilai rata-rata output barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap penduduk Kota Bekasi senilai 52,51 juta rupiah. Angka ini didapat dari total PDRB Kota Bekasi dibagi jumlah penduduk Kota Bekasi pada tahun 2025, angka ini naik dari besaran PDRB per Kapita Kota Bekasi pada tahun 2024 yang sebesar 48,92 juta rupiah.

Secara umum, peningkatan kinerja tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- a. Penguatan Ekonomi Berbasis Kerakyatan
Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan koperasi mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi produktif di tingkat lokal, sehingga meningkatkan nilai tambah sektor perdagangan dan jasa dalam pembentukan PDRB.
- b. Peningkatan Kapasitas dan Daya Saing Usaha
Perbaikan kualitas produk, peningkatan kompetensi pelaku usaha, serta perluasan akses pasar berdampak pada meningkatnya produktivitas dan skala usaha sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
- c. Peningkatan Kesempatan Kerja dan Kualitas Tenaga Kerja

Fasilitasi di bidang ketenagakerjaan, termasuk peningkatan kompetensi dan perluasan akses kerja, turut mendorong terserapnya tenaga kerja secara lebih optimal. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja dan produktivitas tenaga kerja berimplikasi langsung terhadap kenaikan pendapatan per kapita.

d. Terjaganya Stabilitas Daya Beli Masyarakat

Upaya menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi daerah mendukung keberlangsungan konsumsi rumah tangga sebagai komponen utama pembentuk PDRB dari sisi pengeluaran.

9. Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan adalah suatu ukuran komposit yang digunakan untuk menilai tingkat ketahanan pangan suatu wilayah berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu:

1. Ketersediaan Pangan (*availability*), menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam menyediakan pangan yang cukup dan beragam melalui produksi lokal, distribusi, dan cadangan pangan.
2. Akses Pangan (*access*), berkaitan dengan kemampuan ekonomi dan fisik rumah tangga untuk memperoleh pangan yang layak, termasuk faktor harga, pendapatan, dan infrastruktur.
3. Pemanfaatan Pangan (*utilization*), mencakup aspek kualitas konsumsi pangan, pola hidup sehat, layanan kesehatan, serta kondisi gizi masyarakat.

Indeks ini dihitung berdasarkan sejumlah indikator yang telah ditetapkan untuk masing-masing dimensi, sehingga mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi ketahanan pangan pada tingkat kabupaten/kota maupun provinsi

Penghitungan Indeks Ketahanan Pangan bertujuan untuk:

- ✓ Mengidentifikasi wilayah yang rentan terhadap kerawanan pangan, sehingga dapat diberikan prioritas penanganan.
- ✓ Mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program pembangunan pangan, baik di tingkat daerah maupun nasional.
- ✓ Menyediakan dasar perencanaan pembangunan, terutama dalam penyusunan intervensi peningkatan produksi pangan, penanggulangan kemiskinan, dan perbaikan gizi masyarakat.

- ✓ Mendorong koordinasi antarinstansi dalam mewujudkan penyelenggaraan ketahanan pangan yang berkelanjutan

Indeks Ketahanan Pangan diperoleh dengan menggabungkan skor ketiga dimensi menggunakan bobot yang telah ditetapkan. Secara umum, rumus sederhananya dapat ditulis sebagai:

$$IKP = (W_a \times S_{availability}) + (W_b \times S_{access}) + (W_c \times S_{utilization})$$

Semakin tinggi nilai indeks, semakin baik kondisi ketahanan pangan suatu wilayah. Sebaliknya, nilai yang rendah menunjukkan kerentanan terhadap krisis pangan dan memerlukan intervensi pemerintah. Capaian kinerja IKP pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.13
Indeks Ketahanan Pangan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja
9.	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	94.00	73.07	77.73%

IKP Kota Bekasi mengalami penurunan nilai dari tahun 2024, capaian kinerja tahun 2025 sebesar 77.73 persen dari target 94.00 poin terealisasi 73.07 poin. Hal ini disebabkan adanya perbedaan rumus penghitungan nilai IKP yang dilakukan pada tahun 2024 dan 2025, pada tahun 2024 terdapat 12 dimensi sedangkan tahun 2025 terdapat 3 dimensi sehingga mengakibatkan adanya penurunan standar nilai IKP.

Kegiatan yang sudah dilakukan dalam mencapai peningkatan Indeks Ketahanan Pangan:

- ❖ Penyaluran Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) untuk Masyarakat Kurang Mampu (berupa beras dan minyak goreng), Balita Gizi Kurang (berupa daging sapi dan susu bubuk), dan Korban Bencana



❖ Kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM)



❖ Monitoring Harga dan Ketersediaan Pangan Pokok Strategis



10. Tingkat Pengangguran Terbuka

Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka adalah salah satu indikator yang bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di wilayah Pemerintahan Kota Bekasi, Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah Angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (supply) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga

kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi, perubahan siklus bisnis dan teknologi, dan lain-lain. Perbedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antar kelompok tersebut.

Rumus Penghitungan:

$$TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$$

Keterangan:

TPT : Tingkat pengangguran terbuka (%)

PP : Jumlah pengangguran (orang)

PAK : Jumlah angkatan kerja (orang)

Capaian kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.14

Tingkat Pengangguran Terbuka

No	Indikaktor Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja
10.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7.68	7.33	104.56%

Kualitas dan taraf hidup masyarakat dilihat dari indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan, capaian kinerja indikator TPT Kota Bekasi 2025 sebesar 104.56% dari target 7.68% dan terealisasi 7.33%. TPT adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi TPT, diantaranya pertumbuhan ekonomi, upah, inflasi dan investasi. Pengangguran Kota Bekasi didominasi oleh lulusan SMA Umum dan SMA Kejuruan dengan masing-masing sebesar 23.384 orang dan 39.272 orang. Apabila membandingkan dengan data tahun 2024 maka jumlah pengangguran di Kota Bekasi berkurang sebanyak 6.602 orang dan penduduk yang bekerja bertambah sebanyak 6.532

orang. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, angka TPT sebesar 7.33% terus mengalami penurunan, pada tahun 2022 TPT kota Bekasi mencapai 8.81%, kemudian menurun di tahun 2023 sebesar 7.90%, tahun 2024 turun kembali menjadi 7.82% dan 7.33% pada 2025.

Dalam upaya menurunkan TPT di Kota Bekasi yang masih tinggi, Pemerintah Kota Bekasi di tahun 2025 melakukan strategi berupa pembekalan calon tenaga kerja melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi. Secara teori ekonomi ketenagakerjaan, pengangguran sering terjadi karena ketidaksesuaian keterampilan (*skill mismatch*), kurangnya pengalaman kerja, rendahnya kompetensi teknis maupun soft skills dan minimnya informasi pasar kerja. Maka Dinas Tenaga Kerja Kota Kerja selaku *leading sector* mengadakan kegiatan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi berupa Pelatihan Perhotelan, Pelatihan K3, Pelatihan Komputer, Pelatihan Otomotif, Pelatihan Tata Boga, Pelatihan Tata Rias dan Pelatihan Tata Kecantikan dengan total peserta pelatihan sebanyak 252 orang. Pemilihan kejuruan pelatihan ini dilakukan berdasarkan hasil poling tren pelatihan yang diminati warga Kota Bekasi.

Melalui pelaksanaan kegiatan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi ini, diharapkan dapat menjadi jembatan atas kesenjangan masalah ketenagakerjaan yang ada dengan target berupa:

1. Peningkatan Kompetensi (Upskilling & Reskilling)
Pelatihan meningkatkan keterampilan teknis sesuai kebutuhan industri
2. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja
Lulusan pelatihan lebih siap kerja dan memiliki sertifikasi kompetensi.
3. Mempercepat Transisi dari Penganggur ke Bekerja
Lulusan pelatihan lebih siap kerja dan memiliki sertifikasi kompetensi.
4. Mendorong Kewirausahaan
Pelatihan berbasis kompetensi juga dapat menghasilkan wirausaha baru, sehingga menciptakan lapangan kerja.

Capaian target penyerapan pelatihan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Kejuruan	Jumlah Peserta	Sudah Bekerja / Berwirausaha	Persentase
1	Perhotelan	39 orang	39 orang	100 %
2	Komputer	52 orang	11 orang	21 %
3	Otomotif	25 orang	11 orang	41 %
4	K3	33 orang	4 orang	12%
5	Tata Boga	39 orang	2 orang	5 %
6	Tata Rias	39 orang		
7	Tata Kecantikan	25 orang	9 orang	36%
Total		252 orang	76 orang	30%

Kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2025

- 1. Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi berlokasi LPK Swasta tanggal 17 Juni s.d 3 Juli 2025



Sumber: Dinas Tenaga Kerja

Peserta Pelatihan

No	Kejuruan	Jumlah Peserta
1	Perhotelan	39 Orang
2	Komputer	52 Orang
3	Otomotif	25 Orang
4	K3	33 Orang
5	Tata Boga	39 Orang
6	Tata Kecantikan	25 Orang

Selain melalui pembekalan calon tenaga kerja, dalam upaya menurunkan TPT di Kota Bekasi juga dilakukan upaya peningkatan kesempatan penempatan kerja. Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan antar kerja sebesar 100% atau sebanyak 5.028 orang. Upaya-upaya untuk meningkatkan kesempatan penempatan kerja antara lain melalui penyelenggaraan Job Fair yang diikuti oleh 16.801 pencari kerja dengan jumlah lowongan kerja yang tersedia sebanyak 1.000 lowongan pada 50 perusahaan

Faktor-faktor yang mempengaruhi turunnya tingkat pengangguran secara makro antara lain bertambahnya investasi baru baik di wilayah Kota Bekasi maupun wilayah sekitar. Pemerintah Kota Bekasi berupaya menurunkan pengangguran melalui perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat melalui kegiatan job fair (*offline*) dan melalui aplikasi pelayanan informasi pasar kerja (*online*), kegiatan Job Fair tersebut diikuti oleh 50 perusahaan, sedangkan jumlah pencari kerja 16.801 orang, berhasil ditempatkan melalui bursa kerja offline adalah sebanyak 659 orang. Juga dilakukan kegiatan pelatihan dengan sumber dana dari APBD dengan pencari kerja yang diberikan Pelatihan Berbasis Kompetensi sebanyak 252 orang.

2. Pelaksanaan Job Fair/Bursa Kerja



Sumber: Dinas Tenaga Kerja

Pada Tahun 2025 kegiatan penyelenggaraan Job Fair/Bursa Kerja dilaksanakan pada hari Rabu dan Kamis, tanggal 21 dan 22 Mei 2025 bertempat di Blu Plaza Bekasi, yang diikuti oleh 50 perusahaan dan tersedia 1.000 lowongan pekerjaan dari 150 jabatan, dan berhasil ditempatkan melalui bursa kerja adalah sebanyak 659 orang.

Dalam mendukung sasaran strategis tahun 2025, Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi melaksanakan kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme penyelesaian hubungan industrial. Terjadinya perselisihan hubungan industrial disebabkan antara pekerja dan perusahaan terdapat perbedaan pendapat terkait Perselisihan Hak, Perselisihan Kepentingan, Perselisihan PHK dan Perselisihan antar SP/SB hanya dalam satu perusahaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan

Indusrial (PPHI). Jumlah Perkara Perselisihan Hubungan Industrial yang masuk pada Tahun 2025 sebanyak 87 kasus jauh berkurang dibandingkan tahun sebelumnya Tahun 2024 sebanyak 103 jumlah kasus. Ini menunjukan keadaan yang baik karena jumlah kasus yang menurun sehingga mencerminkan hubungan antara pekerja dan perusahaan terbilang cukup harmonis.

3. Penyelesaian Hubungan Industrial



Sumber: Dinas Tenaga Kerja, 2025

Jumlah Perkara Perselisihan Hubungan Industrial yang masuk pada Tahun 2025 sebanyak 87 kasus jauh berkurang dibandingkan tahun sebelumnya Tahun 2024 sebanyak 103 jumlah kasus. Ini menunjukan keadaan yang baik karena jumlah kasus yang menurun sehingga mencerminkan hubungan antara pekerja dan perusahaan terbilang cukup harmonis.

Tabel 2.15

Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2020	132
2	2021	98
3	2022	103
4	2023	83
5	2024	103
6	2025	87
TOTAL		606

11. Tingkat Kemiskinan

Indikator Tingkat Kemiskinan adalah salah satu indikator yang bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Penghitungan tingkat kemiskinan dimulai dengan survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) rumah tangga. Setiap tahunnya, Susenas dilakukan dengan mendatangi 300.000 rumah tangga secara acak di seluruh Indonesia setiap bulan Maret dan September. Susenas mengumpulkan informasi mencakup berbagai aspek sosial ekonomi dan pemenuhan kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, keamanan dan kesempatan kerja. Hasil Susenas digunakan untuk mengetahui kondisi dan status kemiskinan di Indonesia.

Penghitungan persentase penduduk miskin (Angka Kemiskinan) diperoleh dengan menghitung Head Count Index (HCI-P0). Head Count Index (HCI-P0) adalah persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).

Rumus Penghitungan:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

dimana:

Po = Persentase penduduk miskin

z = garis kemiskinan.

yi = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada

di bawah garis kemiskinan (i=1, 2, 3, ..., q), yi < z

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n = jumlah penduduk.

Capaian target Tingkat Kemiskinan pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.16
Tingkat Kemiskinan

No	Indikaktor Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja
11.	Tingkat Kemiskinan	Persen	3.69	3.96	92.68%

Kualitas dan taraf hidup masyarakat di Kota Bekasi meningkat. Angka kemiskinan Kota Bekasi belum melebihi target yang ditentukan yaitu sebesar 92.68% dari target sebesar 3.69% dan terealisasi 3.96%.

Tingkat Kemiskinan menunjukkan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah, dimana penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan. BPS menyatakan tingkat kemiskinan di Kota Bekasi pada tahun 2025 mencapai 3,96%, artinya sebanyak 3,96% penduduk Kota Bekasi merupakan penduduk miskin atau yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah Rp864.601. Beberapa indikator kemiskinan Kota Bekasi mengalami perbaikan pada tahun 2025 antara lain jumlah penduduk miskin di Kota Bekasi yang mengalami penurunan pada tahun 2025 yaitu sebesar 129.538 jiwa setelah sempat melonjak dikarenakan Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 sebanyak 134.000 jiwa, tahun 2021 sebanyak 144.100 jiwa, tahun 2022 sebanyak 137.400 jiwa, tahun 2023 sebanyak 128.800 jiwa, dan tahun 2024 sebanyak 128.840 jiwa. Melalui upaya bersama dan komitmen Pemerintah Kota Bekasi untuk terus mengentaskan kemiskinan, penurunan angka kemiskinan Kota Bekasi mulai menunjukkan hasil positif.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) tahun 2025 sebesar 0.51 poin dan menurun 0.29 poin dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 0.80 poin pada tahun 2024. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Hal ini baik adanya,

masyarakat yang miskin mulai memiliki daya beli. Peningkatan nilai indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin Kota Bekasi cenderung semakin menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Gap Index-P2) Kota Bekasi cenderung mengalami penurunan sebesar 0.13 poin dari 0.21 poin di tahun 2024 menjadi 0.08 poin di tahun 2025, hal ini menunjukkan bahwa kerentanan terhadap kemiskinan di Kota Bekasi menurun. Indeks Keparahan Kemiskinan merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Sudah pulihnya ekonomi dari pandemi Covid-19 menyebabkan aktivitas ekonomi keluarga dan pendapatan keluarga Kembali seperti semula bahkan meningkat dari kondisi biasanya.

Meskipun perekonomian pascapandemi Covid-19 menunjukkan tren pemulihan dan aktivitas ekonomi rumah tangga meningkat, sebagian kelompok masyarakat miskin masih menghadapi tekanan daya beli sebagaimana tercermin dari peningkatan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Meskipun perekonomian pascapandemi Covid-19 menunjukkan tren pemulihan dan aktivitas ekonomi rumah tangga meningkat, sebagian kelompok masyarakat miskin masih menghadapi tekanan daya beli sebagaimana tercermin dari peningkatan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Pulihnya perekonomian pascapandemi Covid-19 mendorong peningkatan aktivitas ekonomi rumah tangga serta perbaikan pendapatan masyarakat secara bertahap.

Dinas Sosial Kota Bekasi telah berupaya dalam mengurangi Tingkat Kemiskinan di Kota Bekasi, salah satunya dengan Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan Sumber Dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT). Dengan adanya pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) diharapkan dapat membantu Keluarga Miskin di Kota Bekasi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri.

Penerima BLT pada Tahun 2025 ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

dan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Desil 1-5 Non-Bansos. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan diberikan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. KPM penerima BLT di Tahun 2025 sebanyak 10.149 KPM dengan rincian 8.117 KPM dari sumber dana DBHCHT dan 2.032 KPM dari sumber dana PAD/APBD.



Sumber Data : Dinas Sosial Kota Bekasi tahun 2025

12. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi adalah tingkat perubahan atau persentase kenaikan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan kata lain, laju pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan barang dan jasa.

Pertumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan adanya peningkatan kapasitas produksi, peningkatan investasi, dan meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang rendah atau negatif dapat menjadi indikator melemahnya aktivitas produksi, menurunnya daya beli, atau adanya gangguan pada stabilitas ekonomi.

Penghitungan laju pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan beberapa tujuan, antara lain:

- Menilai kinerja ekonomi suatu wilayah dari waktu ke waktu.

- Membandingkan perkembangan ekonomi antardaerah atau antarnegara.
- Menjadi dasar perumusan kebijakan pemerintah, khususnya dalam bidang fiskal, moneter, dan pembangunan daerah.
- Mengidentifikasi sektor-sektor unggulan yang berkontribusi besar terhadap perekonomian.
- Menilai efektivitas program pembangunan yang telah dilaksanakan.

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain:

- ❖ Modal (*capital*) – investasi dalam infrastruktur dan teknologi yang meningkatkan kapasitas produksi.
- ❖ Tenaga kerja (*labor*) – jumlah dan kualitas sumber daya manusia.
- ❖ Sumber daya alam – ketersediaan bahan baku dan energi.
- ❖ Teknologi – inovasi dan efisiensi produksi.
- ❖ Kebijakan pemerintah – regulasi, insentif, dan stabilitas politik.
- ❖ Kondisi pasar global – perdagangan internasional, nilai tukar, dan permintaan dunia.

Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan nilai PDB/PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), karena ADHK telah menghilangkan pengaruh inflasi sehingga mencerminkan pertumbuhan riil.

$$\text{Laju Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{(PDRB_t - PDRB_{t-1})}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

- $PDRB_t$ = nilai PDRB pada tahun berjalan
- $PDRB_{t-1}$ = nilai PDRB pada tahun sebelumnya

Contoh perhitungan:

Misalkan suatu daerah memiliki:

- PDRB ADHK tahun 2023 = Rp 215 triliun
- PDRB ADHK tahun 2022 = Rp 200 triliun

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{(215 - 200)}{200} \times 100\% = 7,5\%$$

Artinya, perekonomian daerah tersebut tumbuh sebesar 7,5% dalam satu tahun.

Capaian kinerja LPE pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.17
Laju Pertumbuhan Ekonomi

No	Indikaktor Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja
12.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5.32	5.39	101.32%

Sumber: Bekasi dalam Angka, BPS.

Pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi cenderung stabil dan positif. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bekasi melebihi target yang ditentukan yaitu sebesar 101.32 persen dari target sebesar 5.32 persen dan terealisasi 5.39 persen. Beberapa sektor dengan pertumbuhan relatif tinggi pada 2025 antara lain Informasi dan Komunikasi (8,37 persen), Jasa Perusahaan (8,46 persen), Real Estat (7,84 persen), serta Transportasi dan Pergudangan (9,68 persen). Hal ini menunjukkan dinamika ekonomi yang semakin bertumpu pada sektor jasa dan aktivitas berbasis mobilitas serta teknologi.

Nilai pertumbuhan ekonomi dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- ✚ Pertumbuhan tinggi (>6%) menunjukkan peningkatan produksi yang kuat dan ekspansi ekonomi.
- ✚ Pertumbuhan moderat (3–6%) mencerminkan aktivitas ekonomi yang stabil.
- ✚ Pertumbuhan rendah (<3%) menandakan perlambatan ekonomi.
- ✚ Pertumbuhan negatif (<0%) mengindikasikan resesi atau kontraksi ekonomi.

Interpretasi ini harus dilengkapi dengan analisis sektor-sumber pertumbuhan, kondisi eksternal, serta kebijakan pemerintah yang sedang berjalan.

Program dan kegiatan Perangkat Daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian target Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bekasi Tahun 2025, antara lain:

- 1. Diskopukm**
 - a. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**

Fasilitasi akta pendirian atau perubahan koperasi guna memastikan legalitas serta memperkuat tata kelola kelembagaan yang baik, disertai penyelenggaraan kegiatan intermediasi dan temu bisnis untuk memperluas jejaring kemitraan, meningkatkan akses pasar, serta memperkuat permodalan koperasi agar lebih adaptif dan kompetitif. Selain itu, dilaksanakan pula pelatihan bagi pengurus Koperasi Merah Putih yang bertujuan meningkatkan kapasitas manajerial, pemahaman prinsip perkoperasian, tata kelola organisasi, serta pengelolaan keuangan yang akuntabel, sehingga koperasi dapat beroperasi secara profesional, transparan, dan berkelanjutan dalam mendukung perekonomian daerah.



b. Program Pengembangan UMKM

Pelatihan peningkatan kapasitas usaha, serta fasilitasi sertifikasi halal dan PIRT guna meningkatkan standar mutu, keamanan produk, dan daya saing pelaku usaha di pasar yang lebih luas. Selain itu dilaksanakan juga promosi produk UMKM melalui penyelenggaraan bazar dan pameran UMKM.



c. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Dukungan dilakukan dalam bentuk pelatihan kewirausahaan dan pemberian peralatan usaha bagi pelaku usaha informal. Intervensi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas manajerial dan kompetensi pelaku usaha, memperkuat daya saing usaha, serta mendorong peningkatan produktivitas dan pengembangan skala usaha secara berkelanjutan.



2. Disdagperin

a. Program Pengembangan Ekspor

Perluasan akses pasar melalui partisipasi dalam pameran dagang lokal dan nasional serta pembinaan pelaku usaha berorientasi ekspor. Pembinaan tersebut mencakup sosialisasi pemahaman prosedur ekspor, standar mutu produk, serta strategi pemasaran guna meningkatkan daya saing produk daerah di pasar luar negeri. Selain itu, dilaksanakan kegiatan coaching clinic pengembangan bisnis bagi pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang memberikan pendampingan terkait perencanaan usaha, penguatan model bisnis, strategi pemasaran, manajemen keuangan, serta peningkatan nilai tambah produk sehingga diharapkan mampu mengembangkan usahanya secara lebih terarah, berkelanjutan, dan siap bersaing di pasar yang lebih luas.



b. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Mendorong peningkatan kualitas dan standardisasi industri melalui sosialisasi pengurusan sertifikasi seperti ISO, SNI, dan HACCP. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat daya saing industri lokal di tingkat nasional maupun internasional.



c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Pelaksanaan Operasi Pasar Murah (OPM) dan Operasi Pasar Bersubsidi (OPADI) dilaksanakan sebagai bentuk intervensi pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan laju inflasi serta menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.



13. Rasio Gini

Indikator *Gini Ratio* adalah salah satu indikator yang bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di wilayah Pemerintahan

Kota Bekasi. Salah satu masalah yang kerap dialami negara-negara di dunia yaitu terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan antarkelompok masyarakat. Tidak hanya negara berkembang, negara maju juga tidak terlepas dari masalah ketimpangan pendapatan. Ketimpangan yang terjadi dapat memunculkan dampak lanjutan bagi keberlangsungan pembangunan suatu negara, khususnya di bidang ekonomi. Ketimpangan pendapatan di Indonesia diukur dengan menggunakan indikator Gini Ratio. Dasar dari Gini Ratio adalah kurva Lorenz, sebuah kurva perbandingan distribusi variabel (seperti pendapatan) dengan distribusi seragam yang menggambarkan persentase kumulatif penduduk. Makin dekat kurva dengan garis diagonal yang merupakan garis pemerataan dalam distribusi pendapatan, berarti nilai Gini Ratio semakin kecil, sebaliknya semakin kurva menjauhi garis diagonal berarti nilai Gini Ratio semakin besar (BPS Indonesia, 2022). Dari Gini Ratio dapat diketahui ukuran tingkat ketimpangan pengeluaran sebagai proksi pendapatan.

Dalam mengukur tingkat ketimpangan di Indonesia, BPS menggunakan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Susenas. Gini ratio adalah salah satu ukuran ketimpangan pengeluaran yang digunakan. Nilai gini ratio berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai *gini ratio* yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Rumus Penghitungan:

$$GR = 1 - \sum fi [Yi + Yi - 1]$$

Keterangan:

f_i = Jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke- i .

Y_i = Jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke- i .

Capaian kinerja Rasio Gini pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.18
Rasio Gini

No	Indikaktor Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja
13.	Rasio Gini	Poin	0.408	0.407	100.25%

Target pencapaian *Gini Ratio* pada tahun 2025 adalah 0,408 poin, sementara realisasinya 0,407 poin sehingga capaian kinerja tahun 2025 atas *Gini Ratio* adalah sebesar 100,25%. Ada beberapa penyebab tingginya angka Gini Ratio di Kota Bekasi, antara lain disebabkan karena:

1. Masih tingginya angka kemiskinan di Kota Bekasi yaitu 3,96% dari total jumlah penduduk sehingga membuat kesenjangan sosial terasa;
2. Masih rendahnya angka pertumbuhan nilai investasi di Kota Bekasi yaitu sebesar Rp11.570.572.556.968,- atau sebesar - 7,17% dari target yang ditetapkan di awal tahun 2025;
3. Masih rendahnya rata-rata pengeluaran per kapita penduduk di kota Bekasi, tercatat sebesar Rp2.827.217,- per bulan sehingga menyebabkan daya beli masyarakat tidak terlalu tinggi;
4. Sedangkan pada persentase Tingkat Pengangguran Terbuka dan persentase Laju Inflasi sudah berada di angka yang baik sehingga tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap capaian gini ratio Kota Bekasi.

Penurunan Gini Ratio Kota Bekasi tahun 2025, Secara umum, intervensi Pemerintah Kota Bekasi difokuskan pada peningkatan pendapatan kelompok bawah dan menengah, perluasan kesempatan kerja, serta penguatan ekonomi lokal sehingga kesenjangan pendapatan dapat ditekan secara bertahap.

Intervensi dimaksud dilakukan melalui Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah diantaranya Diskop UKM, Disnaker, Disdik, Dinkes, Dinsos, DBMSDA dan DPMPTSP. Adapun kegiatan yang mendukung sebagai berikut:

1. Penguatan UMKM dan Ekonomi Kerakyatan

- * Fasilitasi permodalan bagi UMKM
- * Pelatihan kewirausahaan dan peningkatan kapasitas usaha
- * Pendampingan legalitas usaha (NIB, sertifikasi halal, dll.)
- * Pemasaran digital dan kemitraan usaha

Tujuan: meningkatkan pendapatan kelompok usaha kecil agar distribusi pendapatan lebih merata.

2. Peningkatan Akses dan Kualitas Ketenagakerjaan

- * Pelatihan berbasis kompetensi melalui Balai Latihan Kerja (BLK)
- * Program penempatan tenaga kerja dan job fair
- * Fasilitasi link and match dengan dunia industri

Tujuan: mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah.

3. Program Perlindungan Sosial Daerah

- * Bantuan sosial bagi keluarga kurang mampu
- * Bantuan pendidikan (beasiswa)
- * Subsidi layanan dasar tertentu

Tujuan: menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan.

4. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan

- * Pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan
- * Peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat
- * Jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu

Tujuan: meningkatkan kualitas SDM sehingga peluang memperoleh pendapatan lebih baik semakin besar.

5. Pengembangan Infrastruktur Wilayah

- * Peningkatan jalan lingkungan dan kawasan permukiman
- * Penataan kawasan kumuh
- * Penyediaan sarana perdagangan rakyat

Tujuan: membuka akses ekonomi dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.

6. Digitalisasi dan Penyederhanaan Perizinan

- * Pelayanan perizinan terpadu berbasis elektronik

* Kemudahan investasi skala kecil dan menengah

Tujuan: mendorong pertumbuhan usaha dan penciptaan lapangan kerja.

14. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah ukuran komposit yang menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Secara konseptual, daya saing daerah mencerminkan kemampuan suatu wilayah dalam:

- Mengelola sumber daya secara produktif dan inovatif,
- Menciptakan iklim usaha yang kondusif,
- Mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, serta
- Memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

IDSD disusun berdasarkan beberapa pilar utama yang saling berkaitan. Pilar-pilar tersebut umumnya mengacu pada kerangka daya saing global yang juga digunakan oleh *World Economic Forum* dalam penyusunan *Global Competitiveness Index* (GCI), namun disesuaikan dengan konteks nasional dan daerah di Indonesia. Secara umum, IDSD terdiri atas empat aspek utama:

1. Lingkungan Pendukung (*Enabling Environment*)

Aspek ini mencakup kualitas institusi, stabilitas ekonomi makro daerah, infrastruktur, serta kesiapan teknologi informasi dan komunikasi.

2. Sumber Daya Manusia

Meliputi tingkat pendidikan, kesehatan, keterampilan tenaga kerja, serta kapasitas inovasi masyarakat.

3. Pasar

Mencerminkan efisiensi pasar barang, pasar tenaga kerja, akses pembiayaan, serta ukuran pasar (*market size*).

4. Ekosistem Inovasi

Meliputi kapasitas penelitian dan pengembangan (litbang), kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri, jumlah paten, serta dukungan terhadap kewirausahaan berbasis teknologi.

Keempat aspek tersebut kemudian diuraikan menjadi indikator-indikator kuantitatif yang diolah menjadi nilai indeks dengan skala tertentu.

Penyusunan IDSD memiliki beberapa tujuan utama, yaitu mengukur tingkat daya saing antar daerah secara objektif dan terstandar, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan daerah dalam aspek tertentu, menjadi dasar perencanaan pembangunan daerah yang lebih terarah, serta mendorong peningkatan inovasi dan produktivitas di tingkat lokal. Bagi pemerintah daerah, IDSD dapat menjadi acuan dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sementara bagi investor, indeks ini memberikan gambaran mengenai iklim usaha dan potensi ekonomi suatu wilayah.

Capaian kinerja IDSD pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.19
Indeks Daya Saing Daerah

No	Indikaktor Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja
14.	Indeks Daya Saing Daerah	Poin	4.19	4.09	97.61%

Indeks Daya Saing Daerah Kota Bekasi mendapat capaian kinerja 97.61 persen, dari target 4.19 poin terealisasi 4.09 poin. Skor 4.09 didapat dari skor 12 pilar yang mendukung capaian tersebut, uraian skor 12 pilar antara lain:

Pilar 1 (Institusi)	: 4.53
Pilar 2 (Infrastruktur)	: 4.37
Pilar 3 (Adopsi TIK)	: 5.00
Pilar 4 (Stabilitas Ekonomi Makro)	: 4.21
Pilar 5 (Kesehatan)	: 4.26
Pilar 6 (Keterampilan)	: 3.90
Pilar 7 (Pasar Produk)	: 4.80
Pilar 8 (Pasar Tenaga Kerja)	: 3.41
Pilar 9 (Sistem Keuangan)	: 3.93
Pilar 10 (Ukuran Pasar)	: 5.00

Pilar 11 (Dinamika Bisnis) : 2.76

Pilar 12 (Kapabilitas Inovasi) : 2.94

Terlihat dari penjabaran pilar-pilar di atas bahwa Kota Bekasi unggul pada pilar 3 dan 10, artinya pilar Adopsi TIK dengan indikator pengguna telepon seluler, jangkauan jaringan 4G, pelanggan internet *Fixed-Broadband*, dan pengguna internet serta pilar Ukuran Pasar dengan indikator PDRB ADHK dan persentase nilai impor terhadap PDRB ADHK mendapat skor sempurna. Secara keseluruhan, sesuai dengan realisasi dan capaian pada tahun 2025 yang berdasarkan kerangka dalam Indeks Daya Saing Daerah 2025 (IDSD 2025), mencerminkan peningkatan kinerja daerah dan keberhasilan secara agregat nasional.

15. Indeks Harmoni

Untuk mengukur tingkat kerukunan dan keharmonisan dalam masyarakat, pemerintah mengembangkan suatu instrumen yang dikenal sebagai **Indeks Harmoni** atau lebih spesifik disebut **Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)** yang disusun oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Indeks ini menjadi alat ukur kuantitatif untuk menilai kualitas hubungan antarumat beragama di Indonesia secara periodik.

Indeks Harmoni adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat kerukunan sosial dalam masyarakat, khususnya dalam konteks hubungan antarumat beragama. Indeks ini mengukur persepsi, sikap, dan pengalaman masyarakat terhadap toleransi, kesetaraan, dan kerja sama antar kelompok sosial.

Secara konseptual, harmoni sosial mencerminkan kondisi terciptanya hubungan yang saling menghormati, minimnya konflik sosial berbasis identitas, adanya kerja sama lintas kelompok, dan terjaminnya kebebasan menjalankan keyakinan.

Dalam praktiknya, Indeks Harmoni (IKUB) umumnya disusun berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu:

Toleransi

Mengukur sejauh mana masyarakat memiliki sikap saling menghargai perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan.

Indikatornya meliputi penerimaan terhadap pendirian rumah ibadah, interaksi sosial lintas agama, dan sikap terhadap perbedaan.

Kesetaraan

Menilai persepsi masyarakat terhadap perlakuan yang adil tanpa diskriminasi dalam aspek sosial, hukum, dan pelayanan publik.

Kerja Sama

Menggambarkan tingkat partisipasi dan kolaborasi antarumat beragama dalam kegiatan sosial, budaya, maupun kemasyarakatan.

Ketiga dimensi tersebut diukur melalui survei nasional yang melibatkan responden dari berbagai provinsi di Indonesia, kemudian diolah menjadi skor indeks dengan skala tertentu (biasanya 0–100).

Indeks Harmoni memiliki beberapa tujuan strategis, antara lain:

- ❖ Mengukur tingkat kerukunan umat beragama secara objektif dan terstandar.
- ❖ Mengidentifikasi wilayah yang memiliki potensi konflik sosial.
- ❖ Menjadi dasar perumusan kebijakan pencegahan konflik dan penguatan toleransi.
- ❖ Mendorong peran aktif pemerintah daerah dan tokoh masyarakat dalam membangun kohesi sosial.

Selain itu, indeks ini juga menjadi indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi dan stabilitas sosial suatu negara

Nilai Indeks Harmoni yang tinggi menunjukkan kondisi sosial yang kondusif bagi pembangunan ekonomi dan sosial. Sebaliknya, nilai yang rendah dapat menjadi peringatan dini (*early warning system*) terhadap potensi konflik. Implikasi kebijakan yang dapat diambil antara lain penguatan pendidikan toleransi dan moderasi beragama, dialog lintas agama dan budaya, penegakan hukum terhadap tindakan diskriminatif, serta pemberdayaan forum kerukunan umat beragama (FKUB).

Capaian kinerja IH pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.20
Indeks Harmoni

No	Indikaktor Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja
15.	Indeks Harmoni	Nilai	6.47	7.00	108.19%

Harmoni Kota Bekasi sangat baik, capaian kinerja Indeks Harmoni Kota Bekasi sebesar 108.19 persen didapat dari target 6.47 poin dan terealisasi 7.00 poin. Nilai Indeks Harmoni yang tinggi menunjukkan kondisi sosial yang kondusif bagi pembangunan ekonomi dan sosial. Sebaliknya, nilai yang rendah dapat menjadi peringatan dini (*early warning system*) terhadap potensi konflik. Implikasi kebijakan yang dapat diambil antara lain penguatan pendidikan toleransi dan moderasi beragama, dialog lintas agama dan budaya, penegakan hukum terhadap tindakan diskriminatif, serta pemberdayaan forum kerukunan umat beragama (FKUB).

Berdasarkan data Kementerian Agama RI, Nilai Indeks Harmoni Umat Beragama Nasional mencapai 7,789 dengan predikat tinggi. Adapun Kota Bekasi memiliki nilai 7,00 dengan predikat sangat baik. Nilai indeks Kota Bekasi memang masih di bawah nilai nasional, namun predikat sangat baik menunjukkan bahwa harmoni kehidupan agama, sosial, dan budaya di Kota Bekasi telah berlangsung dengan baik.

16. Indeks Reformasi Birokrasi

Capaian target indikator Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2025 dapat dilihat pada diagram berikut:

Tabel 2.21
Indeks Reformasi Birokrasi

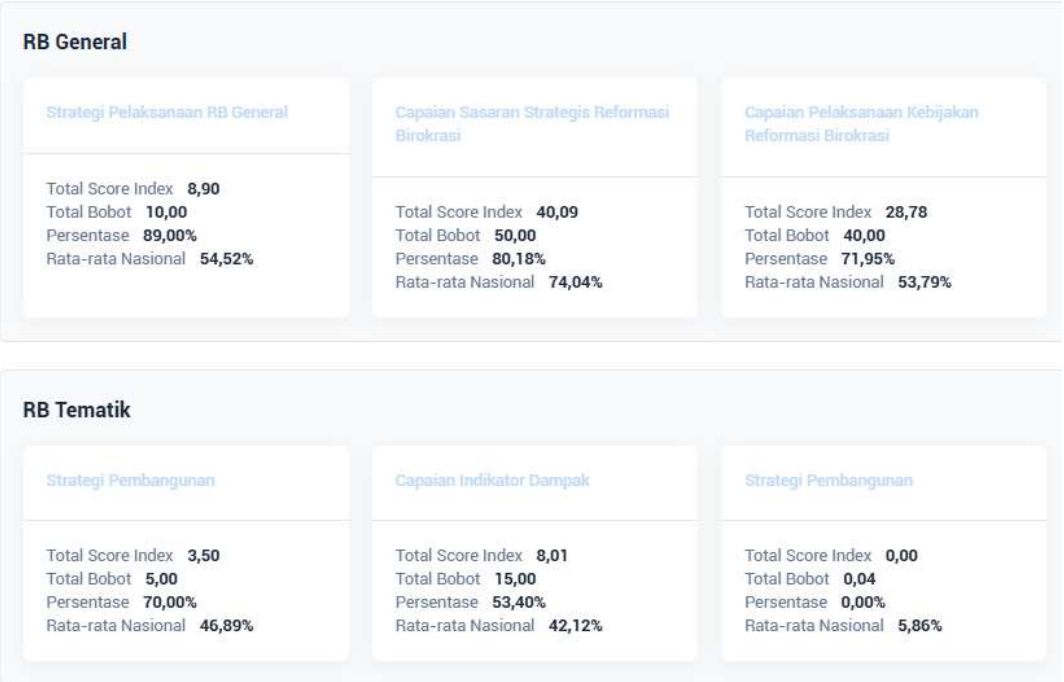
No	Indikaktor Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja
16.	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	84.00	89.28	106.29%

Indeks Reformasi Birokrasi adalah Suatu indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan reformasi birokrasi pada suatu instansi pemerintah. Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business proses*) dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi Birokrasi (RB) merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik.

Pengukuran Indeks RB dibagi ke dalam dua komponen, yaitu komponen pengungkit dan hasil. Komponen Pengungkit adalah pengukuran terhadap seluruh upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh pihak internal instansi pemerintah agar mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, efektif, efisien, akuntabel dan bebas KKN. Komponen Hasil adalah pengukuran terhadap kapasitas dan akuntabilitas, integritas (bersih dan bebas KKN), dan kepuasan pengguna layanan. Bobot Pengukuran diberikan 60% untuk Komponen Pengungkit dan 40% untuk Komponen Hasil. Komponen Pengungkit memiliki bobot sebesar 60% dengan tiga sub-komponen dengan bobot masing-masing. Sub-komponen Pengungkit lengkap dengan bobotnya secara rinci antara lain Aspek Pemenuhan 20%, Aspek Hasil Antara 10%, Aspek Reform 30%. Komponen Hasil memiliki bobot sebesar 40% dengan rincian empat sub-komponen berbeda yang berisikan bobot tersendiri. Adapun rincian sub-komponen Hasil di antaranya adalah Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan 10%, Kualitas Pelayanan Publik 10%, Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN: 10%, Kinerja Organisasi 10%.

Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2025 sudah sangat baik dengan capaian kinerja sebesar 106.29% dari target sebesar 84.00 poin dan terealisasi 89.28 poin. Hasil Evaluasi Pemerintah Daerah Kota Bekasi dapat terlihat pada perhitungan di bawah ini:

Komponen	No	Sub-Komponen	Total Score Index
RB General	1	Strategi Pelaksanaan RB General	8,90
	2	Capaian Sasaran Strategis RB	40,09
	3	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	28,78
RB Tematik	4	Strategi Pembangunan RB Tematik	3,50
	5	Capaian Indikator Dampak	8,01
	6	Strategi Pembangunan	0,00
Total Nilai RB General + Tematik			89,28



5 indikator dengan capaian bobot tertinggi pada Pelaksanaan Kebijakan RB dicapai oleh Indeks Reformasi Hukum, Indeks Pelayanan Publik, Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik, Tingkat Digitalisasi Arsip, serta Indeks Tata Kelola Pengadaan. 5 indikator dengan capaian bobot terendah terdiri atas Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI, Indeks Pembangunan Statistik, Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE, serta Tingkat Maturitas SPIP serta Nilai SAKIP.

3 indikator dengan capaian bobot tertinggi pada Sasaran Strategis RB dicapai oleh Opini BPK, Capaian IKU Makro, dan Survei Kepuasan Masyarakat. 3 indikator dengan capaian bobot terendah terdapat pada Capaian IKU Non Makro, Survei Penilaian Integritas, dan Indeks BerAkhlaq.



17. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik

Capaian target indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.22

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik

No	Indikaktor Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja
17.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Nilai	88.10	88.83	100.83%

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa perlu upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dari penyalahgunaan wewenang pelayanan publik, maka dalam hal ini Pemerintah Kota Bekasi berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat. Hal ini bertujuan agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat diberikan secara tepat, cepat, murah, terbuka, sederhana, dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif. Untuk mengetahui sejauh mana penyelenggaraan pelayanan publik telah mampu memberikan harapan masyarakat, salah satunya dengan melakukan survei kepuasan masyarakat.

Survei kepuasan masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Survei ini wajib dilaksanakan oleh seluruh unit penyelenggara pelayanan publik sebagaimana di amanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Survei kepuasan masyarakat dilakukan menggunakan metode kuantitatif dengan pengukuran skala likert, sedangkan data populasi yang diambil adalah data pengakses pelayanan publik pada jenis pelayanan yang ada pada 101 (Seratus satu) unit pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Kemudian untuk data responden dalam kegiatan survei kepuasan masyarakat ini sebanyak 148.892 orang/responden. Hasil dari survei kepuasan masyarakat dijadikan indikator indeks kepuasan masyarakat melalui rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

N = bobot nilai per unsur

Contoh: jika unsur yang dikaji sebanyak 9 (sembilan) unsur

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan

nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM Unit pelayanan} \times 25$$

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

- a. Menambah unsur yang dianggap relevan;
- b. Memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 (sembilan) unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.

Adapun Nilai persepsi indeks kepuasan masyarakat terhadap mutu pelayanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.7
Nilai Persepsi Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Mutu Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Sumber: PermenPANRB No. 14 Tahun 2017

Kepuasan masyarakat terhadap layanan publik baik. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik pada tahun 2025 sudah sangat baik dengan capaian kinerja sebesar 100.83% dari target sebesar 88.10 poin dan terealisasi 88.83 poin. Adapun daftar nilai dan perangkat Daerah serta unit kerja yang menjadi obyek survei IKM dapat kita lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.23
Daftar Nilai Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat
Daerah Kota Bekasi Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Nilai IKM	Mutu Pelayanan
1	Sekretariat Daerah	90.06	Sangat Baik
2	Sekretariat DPRD	89.49	Sangat Baik
3	Inspektorat Daerah	87.82	Baik
4	Badan Pendapatan Daerah	88.06	Baik
5	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	84.98	Baik
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	95.97	Sangat Baik
7	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Sumber Daya Manusia	95.45	Sangat Baik
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	85.83	Baik
9	Dinas Pendidikan	84.53	Baik
10	Dinas Kesehatan	84.49	Baik
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	88.06	Baik
12	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	92.87	Sangat Baik
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	87.45	Baik
14	Dinas Lingkungan Hidup	87.87	Baik
15	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	88.86	Sangat Baik
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	86.74	Baik
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	85.18	Baik
18	Dinas Tenaga Kerja	87.03	Baik
19	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	94.07	Sangat Baik
20	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	95.66	Sangat Baik
21	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	82.05	Baik
22	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	87.41	Baik
23	Dinas Tata Ruang	82.63	Baik
24	Dinas Perhubungan	87.42	Baik
25	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	96.57	Sangat Baik

No	Perangkat Daerah	Nilai IKM	Mutu Pelayanan
26	Dinas Sosial	95.58	Sangat Baik
27	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	84.62	Baik
28	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	84.29	Baik
29	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	95.28	Sangat Baik
30	RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid	89.29	Sangat Baik
31	Satuan Polisi Pamong Praja	85.63	Baik
32	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	88.51	Sangat Baik
33	Kecamatan Bekasi Barat	82.37	Baik
34	Kecamatan Bekasi Selatan	84.93	Baik
35	Kecamatan Bekasi Utara	89.20	Sangat Baik
36	Kecamatan Bekasi Timur	86.96	Baik
37	Kecamatan Medansatria	86.21	Baik
38	Kecamatan Mustikajaya	89.03	Sangat Baik
39	Kecamatan Rawalumbu	89.23	Sangat Baik
40	Kecamatan Bantargebang	93.54	Sangat Baik
41	Kecamatan Jatisampurna	86.72	Baik
42	Kecamatan Jatiasih	83.25	Baik
43	Kecamatan Pondokmelati	86.14	Baik
44	Kecamatan Pondokgede	85.74	Baik
45	RSUD Kelas D Jatisampurna	91.63	Sangat Baik
46	RSUD Kelas D Bantargebang	85.20	Baik
47	RSUD Kelas D Pondokgede	91.65	Sangat Baik
48	RSUD Kelas D Teluk Pucung	92.20	Sangat Baik
49	Puskesmas Seroja	98.47	Sangat Baik
50	Puskesmas Kaliabang Tengah	86.64	Baik
51	Puskesmas Teluk Pucung	92.98	Sangat Baik
52	Puskesmas Pejuang	86.50	Baik
53	Puskesmas Kota Baru	82.54	Baik
54	Puskesmas Bintara	80.20	Baik
55	Puskesmas Bintara Jaya	85.52	Baik
56	Puskesmas Kranji	87.48	Baik
57	Puskesmas Rawatembaga	88.42	Sangat Baik
58	Puskesmas Margamulya	89.48	Sangat Baik

No	Perangkat Daerah	Nilai IKM	Mutu Pelayanan
59	Puskesmas Margajaya	93.21	Sangat Baik
60	Puskesmas Pekayon Jaya	92.49	Sangat Baik
61	Puskesmas Jakamulya	94.53	Sangat Baik
62	Puskesmas Karangkitri	94.57	Sangat Baik
63	Puskesmas Bojong Rawalumbu	95.37	Sangat Baik
64	Puskesmas Pengasinan	96.10	Sangat Baik
65	Puskesmas Arenjaya	90.61	Sangat Baik
66	Puskesmas Bekasi Jaya	85.87	Baik
67	Puskesmas Pondokgede	94.46	Sangat Baik
68	Puskesmas Jatirahayu	90.86	Sangat Baik
69	Puskesmas Jatiwarna	85.00	Baik
70	Puskesmas Jatimakmur	90.54	Sangat Baik
71	Puskesmas Jatibening	92.49	Sangat Baik
72	Puskesmas Jatisampurna	92.66	Sangat Baik
73	Puskesmas Jatiasih	94.39	Sangat Baik
74	Puskesmas Jatiluhur	83.26	Baik
75	Puskesmas Bantargebang	89.96	Sangat Baik
76	Puskesmas Bojongmenteng	86.47	Baik
77	Puskesmas Durenjaya	88.92	Sangat Baik
78	Puskesmas Mustikajaya	92.93	Sangat Baik
79	Puskesmas Harapan Baru	86.89	Baik
80	Puskesmas Padurenan	96.35	Sangat Baik
81	Puskesmas Perwira	90.76	Sangat Baik
82	Puskesmas Jatiranggon	91.16	Sangat Baik
83	Puskesmas Cimuning	82.04	Baik
84	Puskesmas Kalibaru	90.17	Sangat Baik
85	Puskesmas Jakasetia	75.90	Kurang Baik
86	Puskesmas Perumnas II	83.83	Baik
87	Puskesmas Sumur Batu	93.65	Sangat Baik
88	Puskesmas Mustikasari	83.41	Baik
89	Puskesmas Ciketing Udik	89.95	Sangat Baik
90	Puskesmas Jatibening Baru	85.94	Baik
91	Puskesmas Harapan Mulya	92.04	Sangat Baik
92	Puskesmas Jatikramat	81.47	Baik

No	Perangkat Daerah	Nilai IKM	Mutu Pelayanan
93	Puskesmas Medansatria	90.17	Sangat Baik
94	Puskesmas Jatimekar	84.27	Baik
95	Puskesmas Jatikarya	84.78	Baik
96	Puskesmas Cikiwul	96.12	Sangat Baik
97	Puskesmas Jatimelati	87.83	Baik
98	Puskesmas Jatimurn	81.61	Baik
99	Puskesmas Jatirasa	93.12	Sangat Baik
100	Puskesmas Jatisari	92.15	Sangat Baik
101	Puskesmas Sepanjangjaya	91.38	Sangat Baik
Nilai rata-rata capaian IKM		88.83	Sangat Baik

Sumber: Bagian Organisasi, 2025.

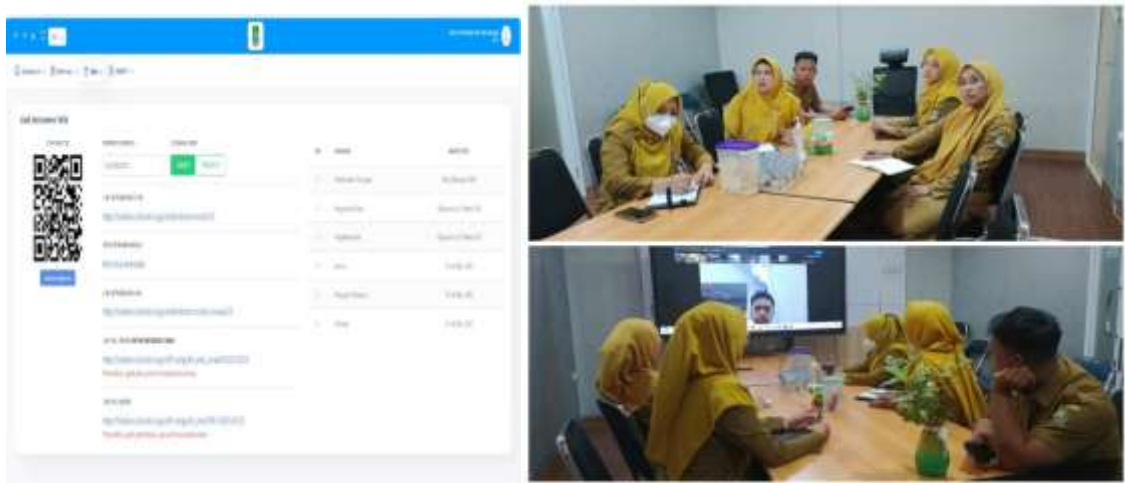
Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa capaian IKM Kota Bekasi pada tahun 2025 dari nilai IKM 101 unit pelayanan di lingkungan pemerintah Kota Bekasi (32 Perangkat Daerah, 12 Kecamatan, 4 RSUD Kelas D, dan 53 Puskesmas) adalah sebesar 88.83 poin. Hasil tersebut jika diklasifikasikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik termasuk dalam kategori mutu pelayanan “A” (Sangat Baik). Unit penyelenggara pelayanan yang memiliki nilai IKM tertinggi adalah Puskesmas Seroja yaitu sebesar 98.47 poin, sedangkan nilai IKM terendah adalah Puskesmas Jakasetia yaitu sebesar 75.90 poin. Adapun capaian mutu pelayanan Pemerintah Kota Bekasi dikategorikan “Sangat Baik” karena didukung oleh 52 unit pelayanan memiliki mutu pelayanan “Sangat Baik” dan 48 unit pelayanan memiliki mutu pelayanan “Baik”, dan 1 unit pelayanan “Kurang Baik”, hal ini meningkat dari capaian Tahun 2024 dimana 40 unit pelayanan memiliki mutu pelayanan “Sangat Baik” dan 56 unit pelayanan memiliki mutu pelayanan “Baik”.

Berdasarkan hasil pelaksanaan survei hasil kepuasan masyarakat yang telah dilaksanakan oleh 101 unit penyelenggara pelayanan, terdapat beberapa unsur pelayanan yang memiliki kelemahan atau dianggap kurang. Namun secara umum terdapat unsur penilaian yang memiliki nilai terendah yaitu unsur produk

spesifikasi jenis layanan, unsur biaya/tarif, dan unsur sistem, mekanisme dan prosedur. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Kota Bekasi dalam mencapai indikator ini sudah meningkat baik.

Gambar 2.10

Zoom meeting dengan Penyedia terkait Pengembangan aplikasi Sistem Survei Kepuasan Masyarakat (SISUKMA)



Sumber: Bagian Organisasi, 2026.

18. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Untuk mengukur Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan evaluasi AKIP untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP suatu instansi/unit kerja. Hasil evaluasi AKIP ini dinyatakan dalam suatu Nilai peringkat.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 ini tertuang dalam Surat Deputy Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/213/AA.05/2025 tanggal 27 Desember 2025 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kemenpan RB telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Bekasi. Pelaksanaan evaluasi tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja di bawahnya.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Untuk Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.24

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No	Indikaktor Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja
18.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	67.83	67.98	100.22%

Kota Bekasi berhasil mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang smart, bersih, dan akuntabel. Kota Bekasi yang kapabel bersih dan akuntabel terbentuk dari Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang berkualitas. Nilai AKIP pada tahun 2025 masuk ke dalam kategori B dengan capaian 100.22% dari target sebesar 67.83 poin dan terealisasi sebesar 67.98 poin.

Gambar 2.12

Pelaksanaan Workshop Penguatan Tim SAKIP Kota Bekasi dan Perangkat Daerah oleh Kemenpan RB



Sumber: Bagian Organisasi Setda, 2025

Berikut ini Nilai Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Bekasi berdasarkan hasil reviu dari Inspektorat:

Tabel 2.25

Daftar Perangkat Daerah Dengan Nilai Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025

No.	Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi	Predikat
1.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	85.17	A
2.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	85.02	A
3.	Inspektorat Daerah	84.67	A
4.	Rumah Sakit Umum Daerah Chasbullah Abdul Madjid	84.59	A
5.	Sekretariat Daerah	82.10	A
6.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	81.82	A
7.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	81.62	A
8.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	81.15	A
9.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	80.80	A
10.	Dinas Kesehatan	80.67	A
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	80.56	A
12.	Dinas Perhubungan	80.28	A
13.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	80.03	A
14.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	79.72	BB
15.	Dinas Tata Ruang	79.32	BB
16.	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	78.27	BB
17.	Kecamatan Medan Satria	78.99	BB
18.	Dinas Lingkungan Hidup	78.61	BB
19.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	78.43	BB
20.	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	78.24	BB
21.	Badan Pendapatan Daerah	78.10	BB
22.	Kecamatan Rawalumbu	77.91	BB
23.	Dinas Sosial	77.32	BB

No.	Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi	Predikat
24.	Kecamatan Pondokgede	77.29	BB
25.	Kecamatan Bekasi Timur	76.57	BB
26.	Kecamatan Jatisampurna	75.95	BB
27.	Kecamatan Bekasi Selatan	75.33	BB
28.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	75.27	BB
29.	Kecamatan Pondokmelati	75.14	BB
30.	Kecamatan Mustikajaya	74.88	BB
31.	Kecamatan Bantargebang	74.86	BB
32.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	74.58	BB
33.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	74.58	BB
34.	Kecamatan Bekasi Utara	72.75	BB
35.	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	71.98	BB
36.	Dinas Pariwisata dan Budaya	70.15	BB
37.	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	70.02	BB
38.	Sekretariat DPRD	70.01	BB
39.	Satuan Polisi Pamong Praja	67.29	B
40.	Kecamatan Bekasi Barat	63.78	B
41.	Dinas Tenaga Kerja	61.87	B
42.	Kecamatan Jatiasih	61.46	B
43.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	61.09	B
44.	Dinas Pendidikan	60.02	B

Sumber: Inspektorat Daerah Kota Bekasi, 2025

19. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

IPKD berfungsi sebagai instrumen evaluasi nasional terhadap kinerja tata kelola keuangan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah ukuran komposit yang menggambarkan kualitas tata kelola keuangan daerah berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

IPKD disusun untuk menilai kinerja pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pengelolaan fiskal daerah, dan mendorong perbaikan sistem tata kelola keuangan berbasis kinerja. IPKD umumnya disusun berdasarkan beberapa dimensi utama yang mencerminkan siklus pengelolaan keuangan daerah, yaitu:

a. Perencanaan dan Penganggaran

Mengukur kualitas penyusunan APBD, konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran, serta ketepatan waktu penetapan anggaran.

b. Pelaksanaan Anggaran

Menilai tingkat serapan anggaran, efektivitas belanja daerah, serta kesesuaian antara rencana dan realisasi.

c. Transparansi dan Akuntabilitas

Mengukur keterbukaan informasi publik terkait APBD serta kualitas laporan keuangan daerah.

IPKD memiliki beberapa manfaat strategis, antara lain memberikan gambaran objektif mengenai kualitas pengelolaan keuangan daerah, menjadi dasar pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat, mendorong kompetisi positif antar daerah dalam meningkatkan tata kelola fiskal, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan APBD. Bagi pemerintah daerah, hasil IPKD dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kelemahan dalam sistem penganggaran dan pelaporan keuangan. Nilai IPKD yang tinggi menunjukkan pengelolaan keuangan daerah yang baik dan mendukung pembangunan yang efektif. Sebaliknya, nilai rendah dapat menjadi sinyal perlunya reformasi tata kelola fiskal.

Untuk Nilai IPKD tahun 2025, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.26
Pencapaian Indeks Pengelolaan keuangan Daerah

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja
19.	Pencapaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	74.842	66.7524	89.16%

Pemerintah Kota Bekasi terus berkomitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) untuk tahun anggaran 2024 Tahun Ukur 2025, Kota Bekasi berhasil meraih skor sebesar **66,7524** dengan predikat "**Cukup Baik**". Pencapaian ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menyelaraskan proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan keuangan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Nilai indeks tersebut diperoleh melalui akumulasi penilaian dari enam dimensi utama pengelolaan keuangan, yang mencakup kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, hingga aspek transparansi serta pertanggungjawaban.



Berdasarkan hasil pengukuran tahun anggaran 2024 (Tahun Ukur 2025), Kota Bekasi memperoleh skor akumulatif sebesar **66,7524**. Secara administratif, nilai ini menempatkan Kota Bekasi pada predikat "**Cukup Baik**", namun secara kategorisasi performa nasional, Kota Bekasi mendapat nilai “C” dengan peringkat "Perlu Perbaikan". Capaian ini merupakan hasil penjumlahan dari enam dimensi utama dengan rincian kalkulasi sebagai berikut:

(11,1971 + 7,8819 + 15 + 13,3333 + 16 + 3,3400 = 66,7524)

No	Dimensi Pengelolaan Keuangan	Skor Capaian	Status Analisis
1	Perencanaan dan Penganggaran	111,971	Perlu Sinkronisasi
2	Pelaksanaan Anggaran	78,819	Fokus Utama Perbaikan
3	Transparansi Keuangan Daerah	150	Optimal
4	Laporan Keuangan Daerah	133,333	Baik
5	Opini Audit BPK	160	Sangat Baik
6	Pemenuhan Belanja Wajib	33,4	Perlu Optimalisasi
	Total Skor Akhir	667,524	Grade C (Perlu Perbaikan)

Meskipun menunjukkan konsistensi dalam kepatuhan prosedur, skor tersebut mengindikasikan adanya deviasi antara realisasi kinerja dengan target standar nasional (ideal di atas 75,00), sehingga diperlukan langkah-langkah korektif yang lebih masif pada dimensi yang memiliki gap nilai cukup lebar.

Status peringkat "Perlu Perbaikan" ini menjadi dasar evaluasi strategis bagi seluruh Perangkat Daerah, khususnya dalam mengoptimalkan dimensi Pelaksanaan Anggaran dan Transparansi. Pemerintah Kota Bekasi menyadari bahwa untuk bergeser ke peringkat "Baik" (Nilai B) atau "Sangat Baik" (Nilai A), diperlukan akselerasi pada aspek digitalisasi sistem keuangan dan penguatan pengawasan internal guna meminimalisir inefisiensi belanja. Komitmen ke depan difokuskan pada penguatan integrasi data keuangan yang lebih akuntabel, sehingga setiap rupiah APBD tidak hanya memenuhi syarat administratif, tetapi memberikan dampak linier terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

20. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

EPPD dievaluasi melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, yang dibuat dalam rangka memberikan laporan pelaksanaan dan gambaran pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. LPPD menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh pemerintah daerah, untuk itu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan. Pemerintah daerah harus mengisi realisasi capaian dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut. Dalam menyusun LPPD, kepala daerah wajib menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja dalam LPPD. Data yang dituangkan dalam LPPD wajib diverifikasi atau divalidasi oleh Inspektorat dan BPKP daerah yang bersangkutan.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, bahwa capaian kinerja urusan pemerintahan dalam penyusunan LPPD menggunakan IKK Output (Keluaran) dan IKK Outcome (Hasil) yang merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Selanjutnya, LPPD digunakan sebagai dasar Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dan penilaian, perumusan kebijakan, dan pembinaan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian. Evaluasi LPPD dilaksanakan agar terwujud sinkronisasi antara target yang ditetapkan dengan realisasi, sehingga terjadi perbaikan kualitas LPPD secara berkelanjutan. Capaian target indikator Nilai EPPD Tahun 2025 dapat dilihat pada diagram berikut:

Untuk Nilai EPPD tahun 2025, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.27
Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

No	Indikaktor Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja
20.	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai	3.00	N/A	N/A

Untuk capaian kinerja dan realisasi nilai EPPD Tahun 2025, belum dapat ditentukan karena belum ada nilai yang dikeluarkan oleh Kemendagri. Kegiatan yang sudah dilakukan antara lain:



Desk Penajaman IKK Bersama Kemendagri dan Desk IKK Bersama Perangkat Daerah di Bagian Tata Pemerintahan. Dalam rangka meningkatkan kualitas penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Pemerintah Kota Bekasi melalui Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) melaksanakan kegiatan Desk Penajaman Indikator Kinerja Kunci (IKK) bersama Kementerian Dalam Negeri serta Desk IKK bersama Perangkat Daerah terkait. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan keselarasan antara indikator, definisi operasional, formulasi perhitungan, serta kelengkapan data dukung sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Kemendagri. Pada sesi desk bersama Kemendagri, dilakukan pembahasan mendalam terhadap indikator-indikator strategis, klarifikasi atas metodologi pengukuran, serta penguatan pemahaman terhadap aspek outcome yang menjadi komponen penilaian EPPD.

Selanjutnya, melalui desk internal bersama Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang dilaksanakan di Bagian Tata Pemerintahan, dilakukan verifikasi dan validasi data capaian IKK, serta identifikasi kendala teknis dalam penginputan dan pelaporan. Forum ini juga menjadi sarana koordinasi untuk memperkuat sinergi antar Perangkat Daerah agar penyampaian data lebih akurat, tepat waktu, dan sesuai standar evaluasi. Melalui pelaksanaan desk penajaman ini, diharapkan kualitas data dan ketepatan pelaporan IKK semakin meningkat sehingga dapat

mendukung optimalisasi nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Kota Bekasi secara berkelanjutan.

21. Nilai Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah Terintegrasi Kota Bekasi

SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Landasan hukum SPIP diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kematangan penerapan SPIP secara menyeluruh dan terintegrasi dalam proses bisnis organisasi pemerintahan. Konsep “terintegrasi” mengandung arti bahwa sistem pengendalian intern tidak berdiri sendiri sebagai dokumen formal, melainkan telah menyatu dalam seluruh proses manajemen risiko, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, hingga pelaporan dan evaluasi kinerja.

Penilaian maturitas dilakukan berdasarkan lima unsur SPIP, yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan Pengendalian Intern. Nilai maturitas SPIP biasanya diklasifikasikan dalam beberapa level, yaitu:

- Level 1 (Rintisan): Pengendalian intern belum terdokumentasi dan belum berjalan secara sistematis.
- Level 2 (Berkembang): Praktik pengendalian mulai diterapkan, namun belum sepenuhnya terstandarisasi.
- Level 3 (Terdefinisi): Proses pengendalian telah terdokumentasi dan dilaksanakan secara konsisten.
- Level 4 (Terkelola dan Terukur): Pengendalian telah berbasis risiko dan dievaluasi secara berkala.

- Level 5 (Optimum): Pengendalian intern telah terintegrasi penuh, adaptif, dan mendukung pencapaian kinerja organisasi secara strategis.

Semakin tinggi level maturitas, semakin baik kualitas tata kelola dan manajemen risiko suatu instansi pemerintah.

Penilaian maturitas SPIP Terintegrasi memiliki beberapa tujuan, antara lain mengukur efektivitas implementasi pengendalian intern, mendorong perbaikan tata kelola dan manajemen risiko, menjadi dasar pembinaan dan peningkatan kapasitas instansi pemerintah, mendukung peningkatan opini laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK). Manfaat strategis lainnya adalah terciptanya sistem pemerintahan yang lebih akuntabel, transparan, dan responsif terhadap potensi penyimpangan.

Untuk Nilai SPIP Terintegrasi tahun 2025, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.28

Nilai Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah Terintegrasi Kota Bekasi

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja
21.	Nilai Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah Terintegrasi Kota Bekasi	Nilai	2.80	3.01	107.50%

Capaian Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah Terintegrasi Kota Bekasi sebesar 107.50 persen, dari target 2.80 terealisasi 3.01. Sebelum pembahasan lebih lanjut, perlu diketahui bahwa terdapat kesalahan pencantuman indikator sasaran/kinerja utama (IKU) pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029, yaitu “Nilai Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah Terintegrasi Kota Bekasi” yang seharusnya adalah “Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Bekasi” berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Adapun untuk satuan targetnya bukan “Poin” tetapi “Nilai”.

Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas pencapaian kinerja adalah Inspektorat Daerah Kota Bekasi. Dalam pelaksanaannya didukung oleh Tim Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yang idealnya sesuai Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, yaitu:

1. Koordinator Tim Penilaian Mandiri oleh Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
2. Tim Penilaian Mandiri Tingkat Pemda, terdiri dari:
 - a. Asesor Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi oleh Kepala Bappelbangda Kota Bekasi;
 - b. Asesor Keandalan Laporan Keuangan oleh Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Kota Bekasi;
 - c. Asesor Pengamanan Atas Aset (BMD) oleh Kepala Bidang Aset BPKAD Kota Bekasi;
 - d. Asesor Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan oleh Sekretaris Inspektorat Daerah Kota Bekasi.
3. Tim Penilaian Mandiri Tingkat Perangkat Daerah oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
4. Koordinator Tim Penjamin Kualitas oleh Inspektur Kota Bekasi.
5. Tim Penjamin Kualitas oleh Irban Urusan Pemerintahan Daerah Inspektorat Daerah Kota Bekasi.

22. Indeks Kota Cerdas

Indeks Kota Cerdas adalah ukuran komposit yang digunakan untuk menilai tingkat kesiapan dan capaian suatu kota dalam menerapkan konsep smart city secara terintegrasi. Indeks ini mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu memanfaatkan teknologi digital dan inovasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik, efisiensi tata kelola, daya saing ekonomi, serta keberlanjutan lingkungan.

Secara konseptual, kota cerdas merupakan kota yang mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi, meningkatkan partisipasi masyarakat, mengelola sumber daya

secara efisien dan berkelanjutan, mendorong inovasi dalam pelayanan publik.

Indeks Kota Cerdas umumnya disusun berdasarkan enam dimensi utama yang dikenal sebagai enam pilar smart city, yaitu:

1. Smart Governance

Mencakup tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*), transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan.

2. Smart Branding

Menilai kemampuan kota dalam membangun identitas, daya tarik investasi, dan promosi potensi daerah melalui strategi komunikasi dan pemasaran digital.

3. Smart Economy

Mengukur penguatan ekonomi berbasis inovasi, kewirausahaan digital, serta dukungan terhadap UMKM dan industri kreatif.

4. Smart Living

Mencerminkan kualitas hidup masyarakat, termasuk layanan kesehatan, pendidikan, keamanan, dan kenyamanan kota.

5. Smart Society

Menggambarkan kesiapan sumber daya manusia, literasi digital, serta partisipasi sosial masyarakat dalam pemanfaatan teknologi.

6. Smart Environment

Menilai pengelolaan lingkungan berbasis teknologi, seperti sistem transportasi cerdas, pengelolaan sampah, efisiensi energi, dan mitigasi bencana.

Keenam dimensi tersebut dinilai melalui indikator kuantitatif dan kualitatif yang kemudian dihitung menjadi skor indeks.

Indeks Kota Cerdas memiliki beberapa tujuan strategis, antara lain mengukur tingkat kesiapan dan implementasi konsep smart city, menjadi dasar evaluasi dan perbaikan kebijakan pembangunan kota, mendorong inovasi dan transformasi digital di tingkat daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Bagi pemerintah daerah, indeks ini berfungsi sebagai benchmarking tool untuk mengetahui posisi dan kemajuan kota dibandingkan daerah lain.

Untuk Nilai IKC tahun 2025, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.29
Indeks Kota Cerdas

No	Indikaktor Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja
22.	Indeks Kota Cerdas	Nilai	3.66	3.67	100.27%

Kenaikan Indeks Kota Cerdas tahun 2025 menjadi 3.67 yang dilakukan melalui evaluasi mandiri didasarkan pada nilai yang didapatkan Kota Bekasi pada saat Evaluasi Implementasi Ekosistem Kota Cerdas Tahun 2024 oleh Kementerian Kominfo RI yang berganti nama menjadi Kementerian Komdigi RI tidak menyelenggarakan evaluasi Smart City seperti tahun 2024 dan mempersilahkan masing-masing Kabupaten/Kota untuk melaksanakan evaluasi secara mandiri.

Kenaikan nilai di tahun 2025 berdasar pada kenaikan nilai tata kelola pemerintahan yang lebih baik seperti kinerja kesehatan fiskal (Laporan BPK), Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LKPPD), kenaikan nilai SPBE, serta tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP). Selain itu terdapat juga peningkatan pada sisi Peningkatan Kualitas Hidup (*Smart Living*) diantaranya pada peningkatan persentase balita dengan imunisasi lengkap serta cakupan persalinan dengan tenaga kesehatan di Kota Bekasi. Pada sisi dimensi *Smart Society* terdapat nilai peningkatan terhadap pengembangan aplikasi pendukung *Smart City* serta peningkatan pada pengembangan literasi *Smart City*.

Berdasarkan hasil evaluasi mandiri yang dibantu oleh tenaga ahli dari Telkom University disampaikan sebagai berikut:

1. Baseline

: 4,00
2. Output

: 3,45
3. Outcome

: 3,75
4. Impact

: 3,62
5. Quickwins

: 3,65
- Total

: 3,67

B. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Tahun Sebelumnya

Untuk melihat realisasi capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

Tabel 2.29
Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur tahun ini dengan tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Nilai	N/A	N/A	N/A	68.00	70.49	103.66%

Sumber: Diolah, 2026.

Pada aspek target, realisasi dan capaian, Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya karena di tahun sebelumnya Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur ini bukan merupakan Indikator Kinerja Utama Kota Bekasi sehingga tidak dirumuskan baik target, realisasi maupun capaiannya. IKLI baru digunakan sebagai Indikator Kinerja Utama saat RPJMD terbaru 2025-2029, sehingga belum pernah dilakukan perhitungan pada periode RPJMD sebelumnya.

2. Penurunan Intensitas Emisi GRK

Tabel 2.30
Perbandingan capaian Penurunan Intensitas Emisi GRK tahun ini dengan tahun sebelumnya



No	Indikaktor Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2.	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Ton Co2eq/ Miliar	N/A	N/A	N/A	0.88	N/A	N/A

Sumber: Diolah, 2026.

Pada aspek target, realisasi dan capaian, Penurunan Intensitas Emisi GRK tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya karena di tahun sebelumnya Penurunan Intensitas Emisi GRK ini bukan merupakan Indikator Kinerja Utama Kota Bekasi sehingga tidak dirumuskan baik target, realisasi maupun capaiannya.

3. Indeks Pembangunan Manusia

Tabel 2.31

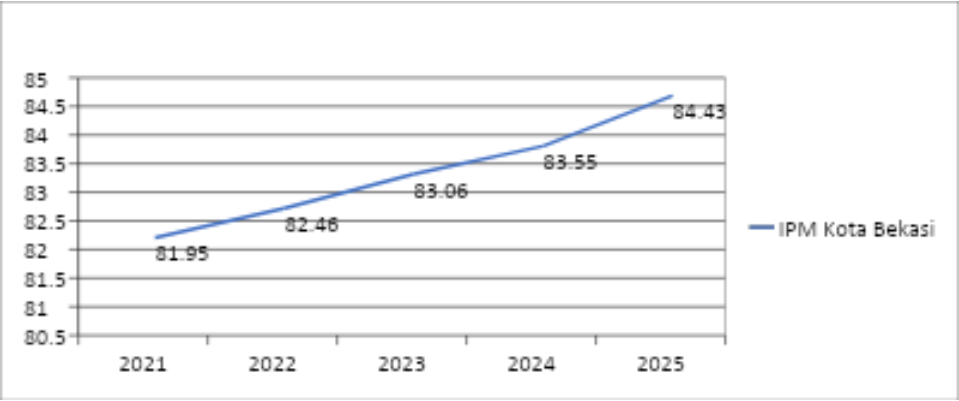
Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Manusia tahun ini dengan tahun sebelumnya

No	Indikaktor Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
3.	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	N/A	83.55	N/A	83.80	84.43	100.75%

Sumber: Diolah, 2026.

Pada aspek target dan capaian, Indeks Pembangunan Manusia tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya karena di tahun sebelumnya Indeks Pembangunan Manusia ini bukan merupakan Indikator Kinerja Utama Kota Bekasi sehingga tidak dirumuskan baik target maupun capaiannya. Dari segi realisasi, nilai IPM naik sebesar 0.88 poin dari realisasi sebesar 83.55 pada tahun 2024 menjadi 84.43 pada tahun 2025.

Tren Nilai IPM Kota Bekasi Tahun 2021-2025:



Sumber: BPS, 2021-2025.

4. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita

Tabel 2.31

Perbandingan Capaian Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita tahun ini dengan tahun sebelumnya

No	Indikaktor Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
4.	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	Persen	N/A	11.70	N/A	9.05%	N/A	N/A

Sumber: Diolah, 2026.

Pada aspek target dan capaian, Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya karena di tahun sebelumnya Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita ini bukan merupakan Indikator Kinerja Utama Kota Bekasi sehingga tidak dirumuskan baik target maupun capaiannya. Untuk besaran Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita tahun 2025, belum ada data

realisasi yang dikeluarkan oleh Kemenkes sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya.

Gambar 2.13
Persentase Stunting Tahun 2022-2025
(Berdasarkan Data Sigizi Kesga)



Berdasarkan grafik persentase stunting Kota Bekasi yang bersumber dari Aplikasi Sigizi Kesga tahun 2021 hingga 2025, terlihat bahwa angka stunting mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021, persentase stunting tercatat sebesar 7.87 persen yang menjadi angka awal dalam periode pengamatan. Selanjutnya, pada tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 3.44 persen yang menunjukkan adanya perbaikan kondisi gizi balita serta efektivitas pelaksanaan program intervensi stunting yang telah dilakukan.

Penurunan tersebut berlanjut pada tahun 2023 dan 2024, di mana persentase stunting kembali menurun menjadi 2.99 persen dan 2,89 persen. Meskipun penurunannya tidak sebesar tahun sebelumnya, kondisi ini mencerminkan upaya penanganan stunting yang masih berjalan dan memberikan hasil positif. Namun demikian, pada tahun 2025 terjadi peningkatan kembali persentase stunting menjadi 3.36 persen.

5. Indeks Pembangunan Keluarga

Tabel 2.233
Perbandingan Indeks Pembangunan Keluarga tahun ini dengan tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
5.	Indeks Pembangunan Keluarga	Nilai	52.00	64.96	124.92%	65.50	67.90	103.66%

Sumber: Diolah, 2026.

Dari segi realisasi, capaian iBangga tahun 2025 mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar 2.94 poin yaitu iBangga tahun 2024 sebesar 64.96 poin sedangkan tahun 2025 sebesar 67.90 poin. Pada aspek capaian kinerja terjadi penurunan dari tahun 2024 sebesar 21.26% yaitu capaian iBangga tahun 2024 sebesar 124.92% sedangkan tahun 2025 sebesar 103.66%.

Tren nilai iBangga Kota Bekasi mengalami kenaikan setiap tahunnya, hal ini dapat terlihat dari tabel di bawah ini:

INDEKS PEMBANGUNAN KELUARGA (IBANGGA) HASIL PEMUTAKHIRAN PK-25				TREN IBANGGA			
No	Provinsi	Kabupaten/Kota	iBangga 2025	2021	2022	2023	2024
162	JAWA BARAT	BANDUNG BARAT	59.0	52.2	53.9	59.0	61.1
163	JAWA BARAT	BEKASI	72.2	51.5	58.5	66.5	66.4
164	JAWA BARAT	BOGOR	67.3	51.6	55.5	60.4	61.3
165	JAWA BARAT	CIAMIS	61.3	53.4	55.5	58.5	58.8
166	JAWA BARAT	CIANJUR	51.9	52.4	53.1	55.6	57.5
167	JAWA BARAT	CIREBON	61.6	52.5	57.1	60.8	62.2
168	JAWA BARAT	GARUT	54.3	52.2	53.8	56.4	58.6
169	JAWA BARAT	INDRAMAYU	59.8	53.5	56.2	59.9	58.9
170	JAWA BARAT	KARAWANG**	NA	51.9	55.7	60.4	63.5
171	JAWA BARAT	KOTA BANDUNG	70.7	52.6	56.5	59.7	61.2
172	JAWA BARAT	KOTA BANJAR	72.9	53.4	56.7	61.7	62.9
173	JAWA BARAT	KOTA BEKASI	67.9	51.5	59.1	63.9	65.0
174	JAWA BARAT	KOTA BOGOR	66.6	52.2	57.4	61.8	62.7
175	JAWA BARAT	KOTA CIMAHI	69.7	52.7	56.8	61.4	61.8
176	JAWA BARAT	KOTA CIREBON	69.2	53.1	55.4	61.1	61.4
177	JAWA BARAT	KOTA DEPOK	72.1	51.7	59.0	63.2	63.5

6. Indeks Ketimpangan Gender

Tabel 2.34

Perbandingan capaian Indeks Ketimpangan Gender tahun ini dengan tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
6.	Indeks Ketimpangan Gender	Nilai	N/A	0.273	N/A	0.26	N/A	N/A

Sumber: Diolah, 2026.

Pada aspek target dan capaian, Indeks Ketimpangan Gender tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya karena di tahun sebelumnya Indeks Ketimpangan Gender ini bukan merupakan Indikator Kinerja Utama Kota Bekasi sehingga tidak dirumuskan baik target maupun capaiannya. Tahun 2025 nilai IKG belum rilis sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya.

TAHUN	NILAI	PERKEMBANGAN
2021	0.250	-
2022	0.334	Naik
2023	0.253	Turun
2024	0.273	Naik
2025	N/A	Belum Rilis Data Terbaru

Sumber data : <https://www.bps.go.id/id/publication/2025/07/31/83ae68c36720895d3895ec58/indeks-ketimpangan-gender-2024.html>

Berdasarkan data Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Bekasi tahun 2021–2025, terlihat adanya fluktuasi capaian dengan kecenderungan penurunan pada tahun 2024.

Pada tahun 2021 nilai IKG sebesar 0.250, kemudian meningkat menjadi 0.334 pada tahun 2022. Kenaikan ini mengindikasikan kenaikan ketimpangan gender, karena dalam konsep IKG semakin tinggi nilai indeks menunjukkan semakin besar ketimpangan dalam dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan (keterwakilan parlemen dan pendidikan), serta partisipasi angkatan kerja perempuan.

Pada tahun 2023 nilai IKG turun menjadi 0.253 dan kembali naik menjadi 0.273 pada 2024. Penurunan pada tahun 2023 menunjukkan perbaikan kondisi ketimpangan gender, namun kenaikan kembali terjadi pada tahun 2024 menandakan adanya kenaikan pada salah satu atau beberapa dimensi pembentuk IKG, seperti menurunnya partisipasi kerja perempuan, stagnasi keterwakilan perempuan di parlemen, atau belum optimalnya capaian indikator kesehatan reproduksi.

7. Nilai Kota Layak Anak

Tabel 2.35

Perbandingan capaian Nilai Kota Layak Anak tahun ini dengan tahun sebelumnya

No	Indikaktor Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
7.	Nilai Kota Layak Anak	Nilai	N/A	742.34	N/A	742.35	501	67.49%

Sumber: Diolah, 2026.

Pada aspek target dan capaian, Nilai Kota Layak Anak tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya karena di tahun sebelumnya Nilai Kota Layak Anak ini bukan merupakan Indikator Kinerja Utama Kota Bekasi sehingga tidak dirumuskan baik target maupun capaiannya. Namun dari segi realisasi, terjadi penurunan nilai sebesar 241.34 poin dari realisasi sebesar 742.34 poin pada tahun 2024 menjadi 501 poin pada tahun 2025.

Tabel 2.36
Tren Nilai Kota Layak Anak Kota Bekasi

TAHUN	NILAI	PREDIKAT	PERKEMBANGAN
2023	658	MADYA	Naik
2024	742,34	NINDYA	Naik
2025	501	PRATAMA	Turun

Sumber data : LKIP DPPPA Kota Bekasi Tahun 2025, diolah

Berdasarkan hasil penilaian Kota Layak Anak (KLA), capaian Kota Bekasi pada periode 2023–2025 menunjukkan **tren fluktuatif**. Pada Tahun 2023 nilai capaian sebesar **658** dengan predikat **Madya** dan menunjukkan tren meningkat dibanding periode sebelumnya. Kinerja kembali mengalami peningkatan pada Tahun 2024 dengan nilai **742,34** dan naik ke predikat **Nindya**, yang mencerminkan adanya penguatan tata kelola, kualitas program, maupun pemenuhan indikator penilaian secara lebih optimal. Namun demikian, pada Tahun 2025 terjadi penurunan signifikan menjadi **501** dengan predikat **Pratama**. Penurunan ini mengindikasikan adanya penurunan pemenuhan indikator atau tidak terpenuhinya komponen penilaian tertentu secara maksimal.

8. PDRB Per Kapita

Tabel 2.37
Perbandingan capaian PDRB Per Kapita tahun ini dengan tahun sebelumnya

No	Indikaktor Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
8.	PDRB Per Kapita	Juta Rp	N/A	48.92	N/A	49.16	52.51	106.82%

Sumber: Diolah, 2026.

Pada aspek target dan capaian, PDRB Per Kapita tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya karena di tahun sebelumnya PDRB Per Kapita ini bukan merupakan Indikator Kinerja Utama Kota Bekasi sehingga tidak dirumuskan baik target maupun capaiannya. Namun dari segi realisasi, terjadi peningkatan PDRB per kapita sebesar 3.59 juta rupiah dari realisasi sebesar 48.92 juta rupiah pada tahun 2024 menjadi 52.51 juta rupiah pada tahun 2025.

PDRB Per Kapita (ADHB)

Tahun	Realisasi (Rp Juta)	Keterangan
2021	39,48	Naik
2022	42,29	Naik
2023	45,28	Naik
2024	48,92	Naik
2025	52,51	Naik

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perkembangan PDRB per kapita Kota Bekasi dalam periode 2021–2025 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK). Pada indikator ADHB, PDRB per kapita meningkat dari Rp39,48 juta pada tahun 2021 menjadi Rp52,51 juta pada tahun 2025. Sementara itu, pada indikator ADHK, terjadi peningkatan dari Rp27,18 juta pada tahun 2021 menjadi Rp30,73 juta pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan pemulihan dan penguatan aktivitas ekonomi daerah

pasca pandemi serta meningkatnya produktivitas dan daya beli masyarakat.

9. Indeks Ketahanan Pangan

Tabel 2.38

Perbandingan capaian Indeks Ketahanan Pangan tahun ini dengan tahun sebelumnya

No	Indikaktor Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
9.	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	N/A	93.90	N/A	94.00	73.07	77.73%

Sumber: Diolah, 2026.

Pada aspek target dan capaian, Indeks Ketahanan Pangan tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya karena di tahun sebelumnya Indeks Ketahanan Pangan ini bukan merupakan Indikator Kinerja Utama Kota Bekasi sehingga tidak dirumuskan baik target maupun capaiannya. Dari segi realisasi, terjadi penurunan nilai IKP pada tahun 2025, hal ini disebabkan adanya perbedaan cara penghitungan nilai IKP antara tahun 2024 dan 2025.



10. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tabel 2.39

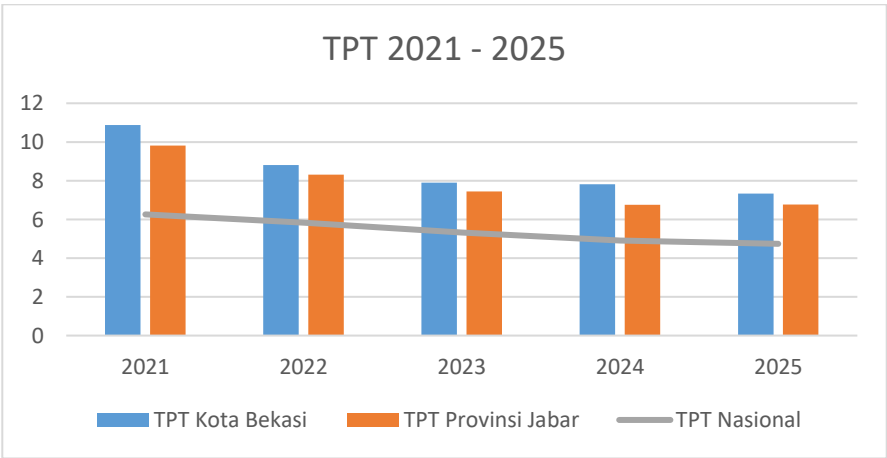
Perbandingan capaian Tingkat Pengangguran Terbuka tahun ini dengan tahun sebelumnya

No	Indikaktor Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Reali- sasi	Capaian Kinerja	Target	Reali- sasi	Capaian Kinerja
10.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8.55	7.82	108.54%	7.37	7.33	104.56%

Sumber: Diolah, 2026.

Dari aspek realisasi, pengangguran di Kota Bekasi tahun 2025 lebih baik 0.49% bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2024 yaitu dari realisasi tahun 2024 sebesar 7.82% menjadi 7.33% pada tahun 2025. Sedangkan dari aspek capaian kinerja, TPT mengalami penurunan 3.98% dari tahun sebelumnya yaitu dari capaian kinerja tahun 2024 sebesar 108.54% menjadi 104.56% pada tahun 2025.

Gambar 2.14
Tren Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2021-2025 (Kota Bekasi, Prov. Jabar, Nasional)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025.

TPT adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi TPT, diantaranya pertumbuhan ekonomi, upah, inflasi dan investasi. Pengangguran Kota Bekasi didominasi oleh lulusan SMA Umum dan SMA Kejuruan dengan masing-masing sebesar 23.384 orang dan 39.272 orang. Apabila membandingkan dengan data tahun 2024 maka jumlah pengangguran di Kota Bekasi berkurang sebanyak 6.602 orang dan penduduk yang bekerja bertambah sebanyak 6.532 orang. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, angka TPT sebesar 7.33% terus mengalami penurunan, pada tahun 2022 TPT kota Bekasi mencapai 8.81%, kemudian menurun di tahun 2023 sebesar 7.90%, tahun 2024 turun kembali menjadi 7.82% dan 7.33% pada Agustus 2025.

11. Tingkat Kemiskinan

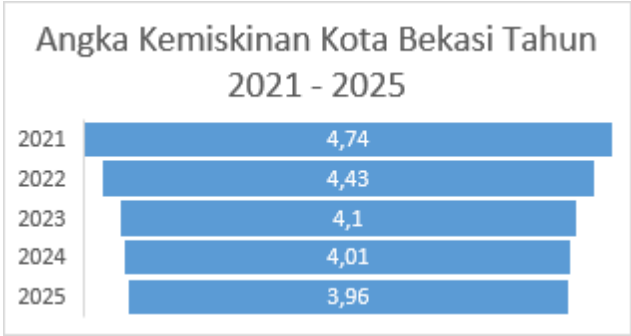
Tabel 2.40
Perbandingan capaian Tingkat Kemiskinan tahun ini dengan tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
11.	Tingkat Kemiskinan	Persen	4.50	4.01	110.89%	3.69	3.96	92.68%

Sumber: Diolah, 2026.

Dari aspek realisasi, tingkat kemiskinan Kota Bekasi menurun 0.05% dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2024 sebesar 4.01% dan pada tahun 2025 sebesar 3.96%. Sedangkan dari segi capaian kinerjanya mengalami penurunan sebesar 18.21% dengan capaian tahun 2024 sebesar 110.89% dan tahun 2025 sebesar 92.68%. Dalam kurun waktu 1 tahun sejak tahun 2024, jumlah penduduk miskin Kota Bekasi mengalami peningkatan sebanyak 700 jiwa, yaitu dari 128.840 jiwa menjadi 129.538 jiwa pada tahun 2025.

Gambar 2.15
Tren Perkembangan Angka Kemiskinan



Sumber: BPS Kota Bekasi, 2025

12. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Tabel 2.41

Perbandingan capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun ini dengan tahun sebelumnya

No	Indikaktor Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
12.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3.93	5.19	132.06%	5.32	5.39	101.32%

Sumber: Diolah, 2026.

Laju Pertumbuhan Ekonomi bukan Indikator Kinerja Utama dalam RPD Tahun 2024-2026 namun hanya sebagai indikator tujuan, rumusan target ditetapkan dalam dokumen RPD dengan target sebesar 3.93 persen. Dari segi capaian, terjadi penurunan capaian dari tahun 2024 ke 2025 sebesar 30.74 persen. Namun dari segi realisasi, terjadi peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0.20 persen dari realisasi sebesar 5.19 persen pada tahun 2024 menjadi 5.39 persen pada tahun 2025.

Tabel 4.42

Tren Nilai Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021–2025

Tahun	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	Keterangan
2021	3,22	Masa pemulihan pasca pandemi
2022	4.96	Pemulihan sektor perdagangan dan industri
2023	5,43	Stabil dan meningkat
2024	5,19	Penguatan sektor jasa & UMKM

Tahun	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	Keterangan
2025	5,39	Bertumpu pada sektor jasa dan aktivitas berbasis mobilitas serta teknologi

Secara tren tahun 2021-2025 laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren meningkat dari 3,22% menjadi 5,39%. Kenaikan ini mencerminkan pemulihan yang kuat pasca pandemi, terutama didorong oleh sektor jasa dan perdagangan. Pada 2024 pertumbuhan sedikit melambat ke 5,19%, namun tetap berada pada level tinggi, yang mengindikasikan kondisi ekonomi yang relatif stabil. Secara keseluruhan, tren 2021–2025 menunjukkan pemulihan yang berhasil dan transisi menuju fase pertumbuhan yang lebih stabil dan berkelanjutan.

13. Rasio Gini

Tabel 2.44
Perbandingan capaian Rasio Gini tahun ini dengan tahun sebelumnya

No	Indikaktor Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Reali- sasi	Capaian Kinerja	Target	Reali- sasi	Capaian Kinerja
13.	Rasio Gini	Poin	0.395	0.435	89.87%	0.408	0.407	100.25%

Sumber: Diolah, 2026.

Rasio Gini bukan Indikator Kinerja Utama dalam RPD Tahun 2024-2026 namun hanya sebagai indikator tujuan, rumusan target ditetapkan dalam dokumen RPD dengan target sebesar 0.395 poin. Dari segi capaian, terjadi peningkatan capaian dari tahun 2024 ke 2025 sebesar 10.38 persen. Namun dari segi realisasi, terjadi penurunan Rasio Gini sebesar 0.028 poin dari realisasi sebesar 0.435 poin pada tahun 2024 menjadi 0.407 poin pada tahun 2025.

Grafik 3.5 Perbandingan Gini Ratio Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional selama 5 Tahun



Sumber: Badan Pusat Statistik RI, 2025

Besarnya Gini Rasio di suatu daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berhubungan, antara lain laju pertumbuhan penduduk, laju pertumbuhan nilai investasi, laju pertumbuhan PDRB per kapita, laju pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, upah minimum provinsi, peningkatan sektor perdagangan dan jasa, peningkatan pengeluaran per kapita, laju inflasi, serta indeks pembangunan manusia.

14. Indeks Daya Saing Daerah

Tabel 2.44

Perbandingan capaian Indeks Daya Saing Daerah tahun ini dengan tahun sebelumnya

No	Indikaktor Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
14.	Indeks Daya Saing Daerah	Poin	N/A	4.18	N/A	4.19	4.09	97.61%

Sumber: Diolah, 2026.

Pada aspek target dan capaian, Indeks Daya Saing Daerah tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya karena di tahun sebelumnya Indeks Daya Saing Daerah ini bukan merupakan Indikator Kinerja Utama Kota Bekasi sehingga tidak dirumuskan baik target maupun capaiannya. Namun dari segi realisasi, terjadi penurunan IDSD sebesar 0.09 poin dari realisasi

sebesar 4.18 poin pada tahun 2024 menjadi 4.09 poin pada tahun 2025.

Tren nilai IDSD Kota Bekasi dalam 5 tahun terakhir

Indikator	Nilai	Kategori	Tren Umum
IDSD Kota Bekasi 2021	3,6968	Tinggi	Positif/Baik
IDSD Kota Bekasi 2022	3,46	Tinggi	Positif/Baik
IDSD Kota Bekasi 2023	3,87	Tinggi	Positif/Baik
IDSD Kota Bekasi 2024	4,09	Tinggi	Positif/Baik
IDSD Kota Bekasi 2025	4,09	Tinggi	Positif/Baik

15. Indeks Harmoni

Tabel 2.45

Perbandingan capaian Indeks Harmoni tahun ini dengan tahun sebelumnya

No	Indikaktor Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
15.	Indeks Harmoni	Nilai	N/A	N/A	N/A	6.47	7.00	108.19%

Sumber: Diolah, 2026.

Pada aspek target, realisasi dan capaian, Indeks Harmoni tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya karena di tahun sebelumnya Indeks Harmoni ini bukan merupakan Indikator Kinerja Utama Kota Bekasi sehingga tidak dirumuskan baik target, realisasi maupun capaiannya.

16. Indeks Reformasi Birokrasi

Tabel 2.46

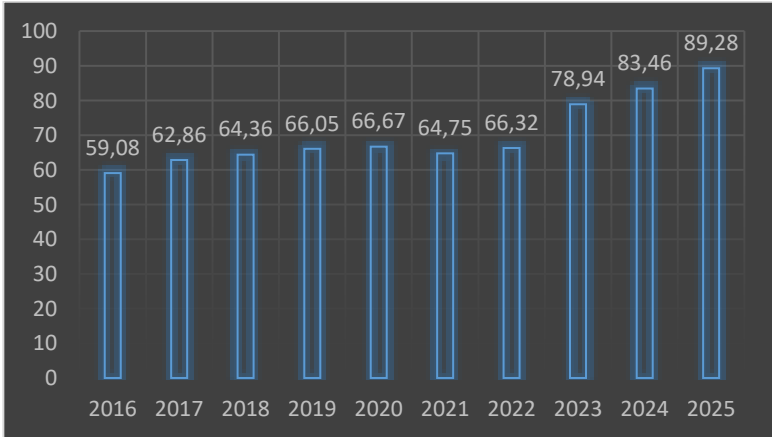
Perbandingan capaian Indeks Reformasi Birokrasi tahun ini dengan tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
16.	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	70.12	83.46	119.02%	84.00	89.28	106.29%

Sumber: Diolah, 2026.

Dari aspek realisasi, Indeks Reformasi Birokras meningkat sebesar 5.82 poin dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2024 sebesar 83.46 dan pada tahun 2025 sebesar 89.28. Sedangkan dari segi capaian kinerjanya mengalami penurunan sebesar 12.73% dengan capaian tahun 2024 sebesar 119.02% dan tahun 2025 sebesar 106.29%.

Tren nilai RB Kota Bekasi dalam 10 tahun terakhir



17. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik

Tabel 2.41

Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik tahun ini dengan tahun sebelumnya

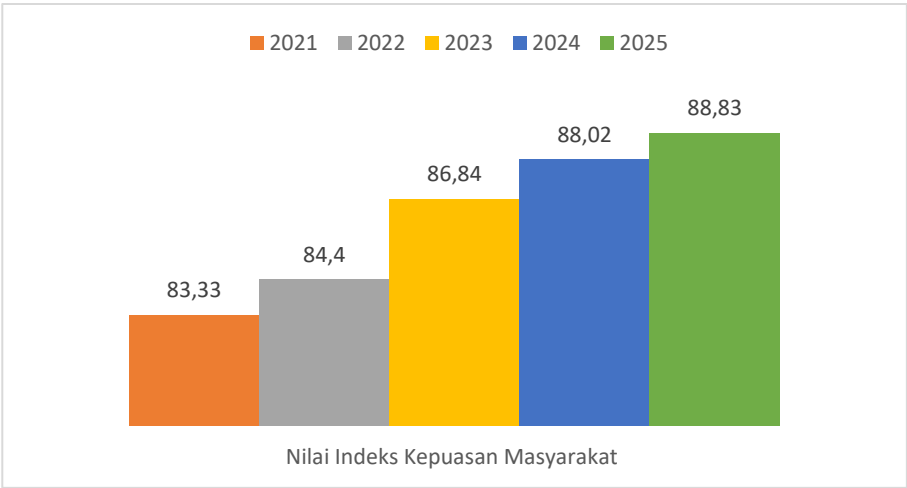
No	Indikaktor Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
17.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Nilai	84.20	88.02	104.54%	88.10	88.83	100.83%

Sumber: Diolah, 2026.

Dari aspek realisasi, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik meningkat sebesar 0.81 poin dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2024 sebesar 88.02 dan pada tahun 2025 sebesar 88.83. Sedangkan dari segi capaian kinerjanya mengalami penurunan sebesar 3.71% dengan capaian tahun 2024 sebesar 104.54% dan tahun 2025 sebesar 100.83%.

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kota Bekasi dalam kurung waktu 5 Tahun terakhir dapat dilihat pada diagram berikut ini:

Grafik 2.3.5 Capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Selama 5 Tahun



Sumber: Bagian Organisasi, 2025.

18. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Tabel 2.44

Perbandingan capaian Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun ini dengan tahun sebelumnya

No	Indikaktor Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Reali- sasi	Capaian Kinerja	Target	Reali- sasi	Capaian Kinerja
18.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	72.05	67.33	93.45%	67.83	67.98	100.22%

Sumber: Diolah, 2026.

Dari segi realisasi, nilai AKIP meningkat 0.65 poin yaitu pada tahun 2024 sebesar 67.33 dan pada tahun 2025 menjadi 67.98 poin. Dari sisi capaian kinerja, capaian nilai AKIP tahun 2024 meningkat 6.77% dari tahun 2024 yaitu sebesar 93.45% dan tahun 2025 sebesar 100.22%. Perbandingan hasil evaluasi nilai AKIP tahun 2023, 2024 dan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.49
Perbandingan Nilai AKIP Tahun 2023, 2024 dan Tahun 2025

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai		
		2023	2024	2025
a. Perencanaan Kinerja	30	22,16	22,26	22,28
b. Pengukuran Kinerja	30	20,47	20,50	20,55
c. Pelaporan Kinerja	15	8,90	8,93	9,29
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,57	15,64	15,86
Nilai Hasil Evaluasi	100	67,10	67,33	67,98
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B	B

Sumber: Bagian Organisasi Setda, 2026.

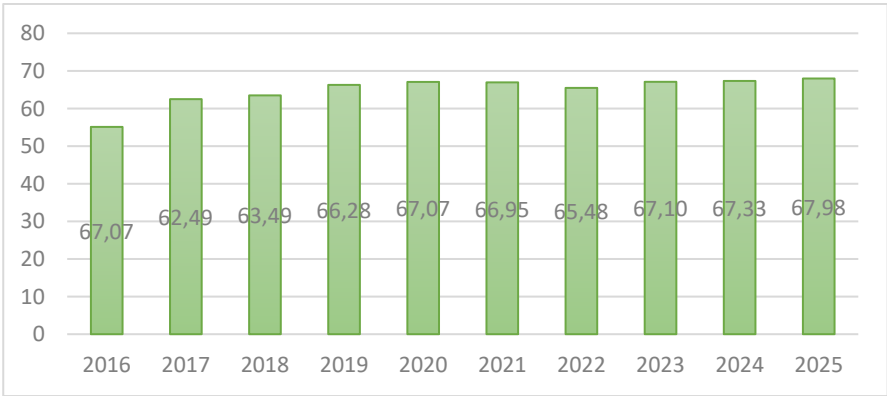
Komponen yang mendukung pencapaian Indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah antara lain komponen Perencanaan Kinerja mendapat nilai 22.28 dari bobot 30, nilai ini meningkat sebesar 0.02 poin dari nilai tahun 2024; komponen Pengukuran Kinerja mendapat nilai 20.55 dari bobot 30, nilai ini meningkat sebesar 0.05 poin dari nilai tahun 2024; komponen Pelaporan Kinerja mendapat nilai 9.29 dari bobot 15, nilai ini meningkat sebesar 0.36 poin dari nilai tahun 2024; dan komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mendapat nilai 15.86 dari bobot 25, nilai ini meningkat sebesar 0.22 poin dari nilai tahun 2024.

Upaya peningkatan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 yaitu antara lain dengan melaksanakan reviu RPJMD dan melakukan perbaikan atas perumusan indikator kinerja dengan menggambarkan kinerja (outcome) yang diharapkan,

melaksanakan reviu dokumen renstra Perangkat Daerah serta penyempurnaan atas penjabaran kinerja yang telah ada dengan memastikan kesesuaiannya dengan Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2021, melaksanakan reviu kinerja secara berjenjang pada tingkatan organisasi maupun individu, serta meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk mempercepat pelaksanaan manajemen kinerja.

Capaian indikator kinerja utama nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah selama 5 tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel dan grafik di bawah ini:

Grafik 2.3.6 Capaian Indikator Nilai AKIP Selama 10 Tahun



Sumber: Bagian Organisasi, 2026.

19. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Tabel 2.50

Perbandingan capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah tahun ini dengan tahun sebelumnya

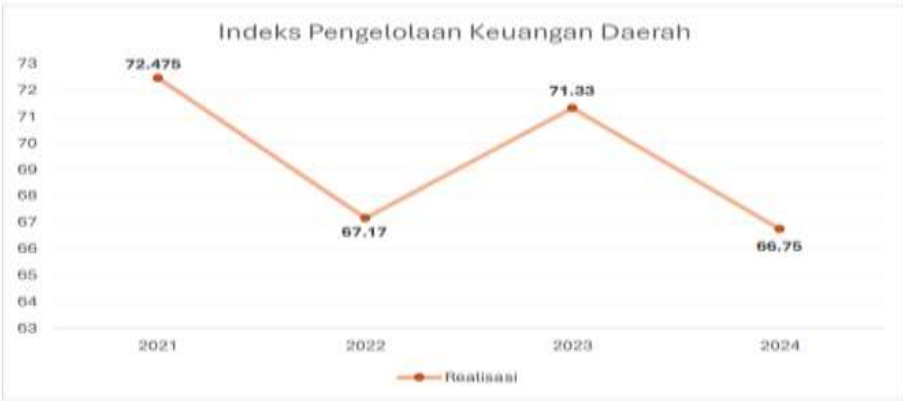
No	Indikaktor Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
19.	Pencapaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	N/A	71.33 (2023)	N/A	74.842	66.7524 (2024)	89.16%

Sumber: Diolah, 2026.

Pada aspek target, realisasi dan capaian, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya karena di tahun sebelumnya Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah ini bukan merupakan Indikator Kinerja Utama Kota Bekasi sehingga tidak dirumuskan baik target maupun capaiannya.

Jika dibandingkan realisasi IPKD tahun 2023 dan 2024, terjadi penurunan sebesar 4.58 persen. Hal ini pernah terjadi pada tahun 2021 dan 2022 dimana terjadi penurunan sebesar 5.31 persen namun meningkat di tahun 2023 sebesar 4.16 persen, tentunya ini menjadi harapan bahwa di tahun 2025 akan terjadi peningkatan nilai IPKD Kembali.

Tren Nilai IPKD Tahun 2021-2024



Sumber: Kemendagri

20. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Tabel 2.52

Perbandingan capaian Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun ini dengan tahun sebelumnya

No	Indikaktor Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
20.	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai	3.47	3.17	91.35%	3.00	N/A	N/A

Sumber: Diolah, 2026.

Dari aspek realisasi, Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tidak dapat diketahui karena nilai EPPD Tahun 2025 belum dirilis oleh Kemendagri. Tren nilai EPPD selama 3 tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	Nilai	3,47	3,17	91,35%	3,50	3,17*	90,57%	3,0	N/A	N/A

Sampai dengan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2025, nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2025 belum dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri. Oleh karena itu, capaian indikator Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) untuk Tahun 2025 belum dapat disajikan dan dicantumkan sebagai N/A (Not Available) pada tabel capaian kinerja. Perlu dijelaskan bahwa penilaian EPPD dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun sebelumnya. Dengan demikian, nilai EPPD Tahun 2024 yang telah dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri merupakan hasil evaluasi atas LPPD Tahun 2023, sehingga tidak merepresentasikan secara langsung capaian penyelenggaraan pemerintahan pada Tahun 2025. Atas dasar tersebut, nilai EPPD Tahun 2024 tidak digunakan sebagai realisasi capaian indikator kinerja Tahun 2025 dalam laporan ini. Nilai EPPD Tahun 2025 yang merupakan hasil evaluasi terhadap LPPD Tahun 2024 akan diumumkan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri.

21. Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Kota Bekasi

Tabel 2.53

Perbandingan capaian Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Kota Bekasi tahun ini dengan tahun sebelumnya

No	Indikaktor Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
21.	Nilai Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah Terintegrasi Kota Bekasi	Nilai	N/A	2.796	N/A	2.80	3.01	107.50%

Sumber: Diolah, 2026.

Pada aspek target, realisasi dan capaian, Nilai Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah Terintegrasi Kota Bekasi tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya karena di tahun sebelumnya Nilai Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah Terintegrasi Kota Bekasi ini bukan merupakan Indikator Kinerja Utama Kota Bekasi sehingga tidak dirumuskan baik target, realisasi maupun capaiannya.

Tren Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Kota Bekasi Tahun 2021-2025:

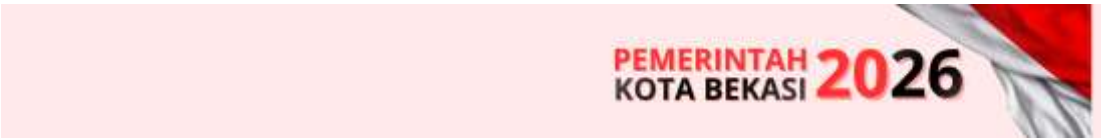
Indikator Sasaran/Kinerja Utama	Satuan	Capaian				
		2021 (Baseline)	2022	2023	2024	2025
Nilai Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah Terintegrasi	Poin	2,743	2,451	2,690	2,796	3,010

Sumber : Hasil Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2021-2025

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada Tahun 2025, Nilai Maturitas SPIP Kota Bekasi telah mencapai 3,010 poin dengan predikat level 3.

22. Indeks Kota Cerdas

Tabel 2.54



Perbandingan capaian Indeks Kota Cerdas tahun ini dengan tahun sebelumnya

No	Indikaktor Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Reali- sasi	Capaian Kinerja	Target	Reali- sasi	Capaian Kinerja
22.	Indeks Kota Cerdas	Nilai	N/A	3.60	N/A	3.66	3.67	100.27%

Sumber: Diolah, 2026.

Pada aspek target dan capaian, Indeks Kota Cerdas tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya karena di tahun sebelumnya Indeks Kota Cerdas ini bukan merupakan Indikator Kinerja Utama Kota Bekasi sehingga tidak dirumuskan baik target maupun capaiannya. Dari segi realisasi, nilai IKC naik 0.07 poin dari realisasi tahun 2024 yang sebesar 3.60 menjadi 3.67.

Berdasarkan pemberitahuan hasil evaluasi Smart City tahap II tahun 2024 untuk 191 Kabupten/Kota Nomor B-1478/DJAI/AI.01.02/11/2024 tanggal 24 November 2024 disampaikan hasil evaluasi yang dilakukan Kementerian Kominfo RI untuk Kota Bekasi berdasarkan capaian kinerja tahun 2023 sebagai berikut:

- 1. Baseline : 4,00
- 2. Output : 3,45
- 3. Outcome : 3,56
- 4. Impact : 3,57
- 5. Quickwins : 3,65
- Total : 3,60**



C. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target akhir RPJMD

Untuk melihat realisasi capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun akhir RPJMD (2029) adalah sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

Tabel 2.55

Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur tahun ini dengan tahun akhir RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025			Tahun 2029		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Nilai	68.00	70.49	103.66%	70.00	70.49	100.70%

Sumber: Diolah, 2026.

Dari aspek perencanaan lima tahunan, capaian Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur sudah melebihi target akhir RPJMD sebesar 100.70% dari target akhir RPJMD sebesar 70.00 poin

terrealisasi sebesar 70.49 poin pada tahun 2025. Upaya peningkatan kinerja pada indikator ini untuk ke depannya adalah Bapperida akan melakukan perhitungan nilai Indeks IKLI tiap tahun sesuai indikator lengkap.

2. Penurunan Intensitas Emisi GRK

Tabel 2.56

Perbandingan capaian Penurunan Intensitas Emisi GRK tahun ini dengan tahun akhir RPJMD

No	Indikaktor Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025			Tahun 2029		
			Target	Reali- sasi	Capaian Kinerja	Target	Reali- sasi	Capaian Kinerja
2.	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Ton Co2eq/ Miliar	0.88	N/A	N/A	3.19	N/A	N/A

Sumber: Diolah, 2026.

Jika dilihat dari aspek perencanaan lima tahunan, capaian kinerja Penurunan Intensitas Emisi GRK Tahun 2025 ini belum dapat ditentukan karena belum rilisnya angka dimaksud. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun mendatang untuk meningkatkan upaya perbaikan kinerja atas indikator ini yaitu:

- 1. Menganggarkan penyusunan RAD Emisi GRK; dan
- 2. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah untuk selalu menginput kegiatan yang berdampak terhadap penurunan emisi GRK

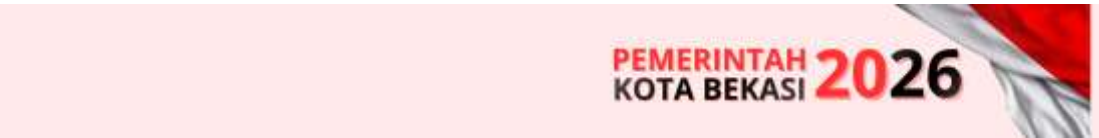
3. Indeks Pembangunan Manusia

Tabel 2.57

Perbandingan capaian Indeks Pembangunan Manusia tahun ini dengan tahun akhir RPJMD

No	Indikaktor Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025			Tahun 2029		
			Target	Reali- sasi	Capaian Kinerja	Target	Reali- sasi	Capaian Kinerja
3.	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	83.80	84.43	100.75%	86.48	84.43	97.63%

Sumber: Diolah, 2026.



Adapun dari segi perencanaan lima tahunan, kinerja Indeks Pembangunan Manusia tahun 2025 belum melampaui target RPJMD yaitu sebesar 97.63% yaitu dari target 86.48 poin dan terealisasi sebesar 84.43 poin pada tahun 2025. Langkah-langkah/kegiatan yang sudah dilakukan dalam menunjang peningkatan Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah:

1. Peningkatan Akses Pendidikan

- Pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas baru (RKB) pada jenjang SD dan SMP untuk mengurangi kepadatan kelas.
- Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP).

2. Program Bantuan Pendidikan

- Pemberian beasiswa bagi siswa dari keluarga tidak mampu pada jenjang SMP.
- Sinergi dengan program bantuan pendidikan dari pemerintah pusat.

3. Pencegahan Anak Putus Sekolah

- Program pendidikan kesetaraan (Paket A, Paket B, dan Paket C) bagi masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan formal.

4. Peningkatan Mutu Pendidikan

- Peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, workshop, dan pengembangan profesional berkelanjutan.
- Penguatan implementasi kurikulum dan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.

5. Penguatan Lingkungan Sekolah yang Ramah Anak

- Implementasi program Sekolah Ramah Anak (SRA) untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif.
- Pencegahan perundungan (bullying) dan kekerasan di lingkungan sekolah.

6. Perluasan Layanan Pendidikan Nonformal

- Penguatan lembaga pendidikan nonformal dan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM).
- Program literasi melalui perluasan akses dan pemerataan layanan literasi melalui penyediaan perpustakaan mini di

sekretariat RW, operasional perpustakaan keliling, serta fasilitasi kunjungan perpustakaan bagi peserta didik.

Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam meningkatkan Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah

- Pemenuhan Tenaga Pendidik dan Kependidikan melalui mekanisme P3K

Mekanisme P3K merupakan bagian dari upaya menjamin keberlangsungan layanan pendidikan dasar dan menengah Pertama, khususnya pada satuan pendidikan yang mengalami kekurangan tenaga pendidik namun belum memenuhi kebutuhan formasi penuh, dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui:

- a. Pemetaan Kebutuhan dan analisis beban kerja
- b. Proyeksi kebutuhan akan disesuaikan dengan kemampuan daerah
- c. Usulan Formasi P3K
- d. Pengadaan Guru P3K
- e. Penempatan Berbasis Kebutuhan Sekolah skala prioritas

- Rintisan Sekolah Gratis jenjang SMP di Sekolah Swasta

Program ini bertujuan membuka akses pendidikan untuk anak tidak mampu yang tidak tertampung di SMP negeri, dengan memanfaatkan sekolah swasta yang bekerja sama dengan pemerintah. Mekanisme pelaksanaan Rintisan Sekolah Gratis melalui:

- a. Penyusunan Juknis Kerjasama dan sistem seleksi penerimaan
- b. Seleksi/ Kerja Sama dengan Sekolah Swasta yang memenuhi syarat (MoU)
- c. Memberikan biaya pendidikan yang disepakati dengan sekolah swasta sehingga sekolah swasta tersebut tidak memungut biaya apapun selama pendidikan bagi anak yang tidak mampu.
- d. Pendaftaran diatur lewat sistem penerimaan peserta didik baru sistem SPMB online yang ada pada dinas Pendidikan Kota Bekasi.
- Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan
Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, seperti pengadaan mebelair yang dilaksanakan berdasarkan hasil inventarisasi barang milik daerah, di mana sebagian mebelair telah melewati umur pakai ekonomis dan berada dalam kondisi rusak berat sehingga tidak lagi layak dipelihara, melalui:

- a. Inventarisasi dan Pendataan Sarana dan prasarana dan Penilaian Kondisi.
- b. Mekanisme pengadaan mebelair baru.
- c. Mekanisme pemeliharaan mebelair hanya untuk barang yang masih dalam umur pakai.
- d. Penghapusan barang untuk kondisi rusak berat dan tidak ekonomis untuk diperbaiki.

4. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita

Tabel 2.58

Perbandingan capaian Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita tahun ini dengan tahun akhir RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025			Tahun 2029		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
4.	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	Persen	9.05	N/A	N/A	7.06	N/A	N/A

Sumber: Diolah, 2026.

Dalam perspektif target akhir RPJMD, Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) tahun 2025 belum ada data realisasi yang dikeluarkan oleh Kemenkes sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan target akhir tahun RPJMD. Rencana percepatan penurunan stunting merupakan prioritas nasional yang membutuhkan pendekatan konvergensi, yaitu integrasi intervensi spesifik (kesehatan) dan intervensi sensitif (non-kesehatan). Berdasarkan Intervensi Spesifik, Dinas Kesehatan memiliki rencana strategis pada tahun 2026 yakni sbb :

1. Peningkatan Deteksi Dini dan Surveilans Gizi

Peningkatan deteksi dini dan surveilans gizi merupakan pilar krusial dalam upaya penurunan stunting karena keduanya berfungsi sebagai "sistem peringatan dini" (early warning system). Tanpa data yang akurat dan deteksi yang cepat, intervensi medis maupun nutrisi sering kali terlambat diberikan;

2. Penguatan Kolaborasi dan Peran Serta Masyarakat dalam Tim Percepatan dan Penanganan Penurunan Stunting TPPPS tingkat kota dan tingkat Kecamatan

Penguatan kolaborasi lintas sektor dan peran serta masyarakat dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat Kota maupun Kecamatan sangat krusial karena stunting adalah masalah multidimensi. Masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dari sisi medis (Dinas Kesehatan), tetapi juga dari sisi lingkungan, sosial, dan ekonomi;

3. Pemberian Susu PKMK pada balita Stunting

Pemberian Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK), dalam hal ini berupa susu formula khusus (tinggi kalori/tinggi protein), merupakan intervensi medis yang sangat krusial bagi balita yang sudah terdiagnosa stunting oleh dokter spesialis anak;

4. Pemberian Susu Ibu Hamil pada ibu hamil KEK

Pemberian susu khusus ibu hamil pada kondisi Kurang Energi Kronis (KEK) yaitu ibu hamil dengan Lingkar Lengan Atas (LLA) di bawah 23,5 cm merupakan intervensi spesifik yang sangat krusial. Kondisi KEK menandakan bahwa ibu tidak memiliki cadangan energi dan protein yang cukup untuk mendukung pertumbuhan janin, mencegah BBLR dan mencegah balita lahir dengan resiko stunting;

5. Peningkatan kapasitas dan soft skill SDM Kesehatan terkait Pelatihan Pemantauan Pertumbuhan Balita

Peningkatan kapasitas dan soft skill bagi SDM Kesehatan (termasuk tenaga gizi, bidan, hingga kader Posyandu) adalah investasi krusial. Penyelesaian masalah stunting akan terasa berat jika dalam implementasi pendekatan wilayah dikarenakan cara komunikasi yang kurang efektif kepada orang tua. Harapannya melalui pelatihan Pemantauan Pertumbuhan Balita dapat menjadi salah satu solusi penanganan stunting dari sisi membangun kepercayaan masyarakat, bahwasannya Pemerintah Kota Bekasi hadir melalui perpanjangan tangan Nakes yang berkualitas;

6. Penyediaan Lembar Balik PMBA dan Konseling Menyusui

Penyediaan Lembar Balik Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) dan layanan Konseling Menyusui adalah instrumen krusial dalam

mengubah pengetahuan menjadi perilaku nyata di tingkat keluarga. Tanpa alat bantu visual dan bimbingan personal, pesan kesehatan sering kali hanya menjadi informasi yang numpang lewat tanpa diterapkan;

7. Pemberian PMT Lokal untuk Bumil KEK, Balita Gizi Kurang, Balita Tidak Naik dan Balita BB Kurang yang dilaksanakan oleh Puskesmas dari Dana Bantuan Kesehatan Non Fisik Kemenkes
- Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbasis pangan lokal kini menjadi strategi utama Kementerian Kesehatan dibandingkan pemberian biskuit pabrikan. Pendekatan ini dinilai jauh lebih efektif karena berfokus pada perubahan perilaku makan dan pemanfaatan sumber daya di sekitar keluarga

Dengan kombinasi strategi dari hulu ke hilir ini, Dinas Kesehatan Kota Bekasi dapat bergerak lebih efektif bukan saja berfokus pada penurunan kasus stunting, melainkan juga pencegahan muncul kasus stunting baru.

5. Indeks Pembangunan Keluarga

Tabel 2.59

Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga tahun ini dengan Tahun Akhir RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025			Tahun 2029		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
5.	Indeks Pembangunan Keluarga	Nilai	65.50	67.90	103.66%	67.50	67.90	100.59%

Sumber: Diolah, 2026.

Dalam perspektif target akhir RPJMD, Indeks Pembangunan Keluarga tahun 2025 sudah mencapai target akhir RPJMD sebesar 100.59% yaitu dari target akhir RPJMD sebesar 67.50 poin dan terealisasi sebesar 67.90 poin. Upaya peningkatan kinerja pada indikator ini untuk ke depannya adalah meningkatkan KIE (komunikasi informasi dan edukasi), pelatihan dan pendampingan dalam peningkatan pendapatan melalui kegiatan usaha pendapatan keluarga, penerapan puspaga (pusat pembelajaran keluarga), sekolah ibu, layanan mediasi dan konseling serta memperkuat cakupan

program dengan memperluas jangkauan wilayah dgn keterlibatan pihak terkait seperti KUA, MUI, Dinas Pendidikan, dan Ormas keagamaan.

6. Indeks Ketimpangan Gender

Tabel 2.60
Perbandingan capaian Indeks Ketimpangan Gender tahun ini
dengan tahun akhir RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025			Tahun 2029		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
6.	Indeks Ketimpangan Gender	Nilai	0.26	N/A	N/A	0.22	N/A	N/A

Sumber: Diolah, 2026.

Dari aspek perencanaan lima tahunan, Indeks Ketimpangan Gender 2025 tidak dapat ditentukan karena belum rilisnya nilai IKG tahun 2025 dari instansi terkait. Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Capaian Kinerja Indeks Ketimpangan Gender (IKG) antara lain:

- a. Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam bidang politik, sosial dan ekonomi melalui pembinaan organisasi wanita, peningkatan kapasitas kader Posyandu, PKK, PUSPAGA dan Forum PUSPA, serta pemberian pelatihan ketrampilan pada perempuan pelaku usaha/Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA);
- b. Penguatan koordinasi pengarusutamaan gender melalui pelatihan PPRG, dan sosialisasi ruang publik responsif gender untuk Perangkat Daerah dan para stakeholder; dan
- c. Penguatan data gender melalui penyusunan data pilah gender dan anak serta identifikasi masalah gender di Kota Bekasi.

7. Nilai Kota Layak Anak

Tabel 2.61
Perbandingan capaian Nilai Kota Layak Anak tahun ini dengan
tahun akhir RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025			Tahun 2029		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
7.	Nilai Kota Layak Anak	Nilai	742.35	501	67.49%	742.39	501	67.48%

Sumber: Diolah, 2026.

Dalam konteks perencanaan lima tahunan, Nilai Kota Layak Anak masih jauh dalam mencapai target akhir RPJMD yaitu sebesar 67.48% dengan target akhir RPJMD sebesar 742.39 poin dan terealisasi sebesar 501 poin. Pemerintah Kota Bekasi harus bekerja keras dalam meningkatkan nilai Kota Layak Anak agar dapat mencapai target yang telah ditentukan. Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Capaian Kinerja Nilai Kota Layak Anak :

- a. Penguatan Kelembagaan Kota Layak Anak dan pemenuhan hak anak melalui rapat koordinasi Tim Gugus Tugas KLA, Rapat sinergitas dan sosialisasi Kota Layak Anak pada Perangkat Daerah dan para stakeholder terkait, sosialisasi Sekolah Ramah Anak/Puskesmas Ramah Anak dan pelaksanaan lomba-lomba ramah anak untuk Perangkat Daerah/stakeholder;
- b. Fasilitasi Forum Anak Kota Bekasi sebagai wadah partisipasi anak dalam pembangunan Daerah melalui pembentukan dan pembinaan FORAKSI, mendorong keterlibatan anggota FORAKSI dalam Musrenbang Tk. Kelurahan/Kecamatan hingga Tk. Kota untuk menyuarakan aspirasi, dan pelaksanaan FORAKSI Goes To School terkait sosialisasi hak anak pada masyarakat dan lembaga pendidikan, serta pelaksanaan lomba-lomba kreativitas anak; dan
- c. Peningkatan perlindungan khusus anak melalui sosialisasi perlindungan khusus anak pada orang tua, lembaga pendidikan dan masyarakat umum lainnya, peningkatan sarana dan prasana ramah anak serta pendampingan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

8. PDRB Per Kapita

Tabel 2.62
Perbandingan capaian PDRB Per Kapita tahun ini dengan tahun akhir RPJMD

No	Indikaktor Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025			Tahun 2029		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
8.	PDRB Per Kapita	Juta Rp	49.16	52.51	106.82%	64.50	52.51	81.42%

Sumber: Diolah, 2026.

Dalam konteks perencanaan lima tahunan, PDRB Per Kapita masih di bawah target akhir RPJMD yaitu sebesar 81.42% dengan target akhir RPJMD sebesar 64.50 Juta Rupiah dan terealisasi sebesar 52.51 Juta Rupiah. Strategi dan tindak lanjut meningkatkan PDRB Per Kapita pada tahun-tahun mendatang yaitu dengan melakukan apa yang sudah dikerjakan di tahun 2025 dengan perbaikan-perbaikan.

Dalam rangka meningkatkan PDRB per kapita Kota Bekasi pada tahun-tahun mendatang, Pemerintah Kota Bekasi akan terus memperkuat kebijakan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada peningkatan produktivitas, nilai tambah, serta perluasan kesempatan kerja. Upaya tersebut dilakukan agar peningkatan pendapatan masyarakat dapat berlangsung secara berkelanjutan dan merata. Pertama, penguatan sektor UMKM dan koperasi akan terus dilakukan melalui peningkatan kapasitas usaha, fasilitasi sertifikasi produk, serta perluasan akses pasar. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan omzet usaha serta mendorong pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa. Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tenaga kerja akan diperkuat melalui program pelatihan kerja berbasis kompetensi serta perluasan kegiatan job fair dan penempatan tenaga kerja. Upaya ini bertujuan meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Ketiga, pengembangan sektor industri, perdagangan, dan ekonomi kreatif akan terus didorong melalui pembinaan pelaku usaha, peningkatan standar mutu produk, serta perluasan akses pasar hingga berorientasi ekspor. Penguatan sektor ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah.

Keempat, penjagaan stabilitas harga dan daya beli masyarakat akan tetap menjadi prioritas melalui pengendalian inflasi daerah serta pelaksanaan program stabilisasi harga kebutuhan pokok.

Melalui berbagai upaya tersebut, diharapkan pertumbuhan PDRB Per Kapita Kota Bekasi dapat terus meningkat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

9. Indeks Ketahanan Pangan

Tabel 2.63
Perbandingan capaian Indeks Ketahanan Pangan tahun ini
dengan tahun akhir RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025			Tahun 2029		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
9.	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	94.00	73.07	77.73%	94.40	73.07	77.40%

Sumber: Diolah, 2026.

Dalam perspektif perencanaan lima tahunan, realisasi IKP tahun 2025 masih jauh di bawah target akhir RPJMD yaitu sebesar 77.40 persen dari target sebesar 94.40 poin terealisasi 73.07 poin. Adapun langkah-langkah dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu adanya revisi target di masa mendatang karena adanya perbedaan cara penghitungan nilai IKP pada tahun 2025 dan seterusnya sehingga target-target yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam RPJMD dirasa terlalu tinggi dan sulit dicapai.

Dalam rangka meningkatkan nilai Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di masa mendatang, Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan akan melakukan berbagai upaya strategis, antara lain memperkuat ketersediaan pangan melalui pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah, meningkatkan stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah dan pemantauan harga pangan secara berkala.

10. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tabel 2.64

Perbandingan capaian Tingkat Pengangguran Terbuka tahun ini dengan tahun akhir RPJMD

No	Indikaktor Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025			Tahun 2029		
			Target	Reali- sasi	Capaian Kinerja	Target	Reali- sasi	Capaian Kinerja
10.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7.68	7.33	104.56%	7.34	7.33	100.14%

Sumber: Diolah, 2026.

Dari perspektif perencanaan lima tahunan, TPT ini sudah melampaui target akhir RPJMD dengan capaian sebesar 100.14% yaitu dari target TPT pada akhir RPJMD sebesar 7.34% dan terealisasi sebesar 7.33%. Oleh karenanya direkomendasikan perbaikan untuk meminimalkan kendala pencapaian sasaran pada tahun-tahun berikutnya antara lain:

- 1. Anggaran APBD mampu mendukung kegiatan yang ada;
- 2. Tambahan pegawai sebagai pelaksana kegiatan;
- 3. Penyediaan sarana dan prasarana gerai layanan informasi ketenagakerjaan; dan
- 4. Penyediaan sarana dan prasarana pelatihan kerja dalam hal ini Balai Latihan Kerja milik Kota Bekasi.

11. Tingkat Kemiskinan

Tabel 2.65

Perbandingan capaian Tingkat Kemiskinan tahun ini dengan tahun akhir RPJMD

No	Indikaktor Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025			Tahun 2029		
			Target	Reali- sasi	Capaian Kinerja	Target	Reali- sasi	Capaian Kinerja
11.	Tingkat Kemiskinan	Persen	3.69	3.96	92.68%	3.11	3.96	72.67%

Sumber: Diolah, 2026.

Dari segi perencanaan lima tahunan, capaian angka kemiskinan tahun 2025 masih jauh dari kata mencapai target akhir RPJMD yaitu sebesar 72.67% dari target akhir RPJMD sebesar 3.11% dan terealisasi

pada tahun 2025 sebesar 3.96%. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun-tahun mendatang untuk meningkatkan capaian kinerja atas indikator kinerja utama penurunan Tingkat Kemiskinan antara lain sebagai berikut:

1. Verifikasi dan Validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Desil 1-5 yang diperoleh dari Kementerian Sosial;
2. Menyusun Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Kemiskinan;
3. Menyusun regulasi pemanfaatan DTSEN bagi perangkat daerah pengampu kemiskinan untuk menentukan sasaran kegiatan;
4. Melaksanakan rapat koordinasi TKPKD Kota Bekasi; dan
5. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

12. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Tabel 2.66

Perbandingan capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun ini dengan tahun akhir RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025			Tahun 2029		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
12.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5.32	5.39	101.32%	5.98	5.39	90,13%

Sumber: Diolah, 2026.

Pada segi perencanaan lima tahunan, capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bekasi tahun 2025 belum mencapai target akhir RPJMD sebesar 90.13% yaitu dari target RPJMD sebesar 5.98% dan terealisasi 5.39%. Dalam rangka peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi pada tahun selanjutnya, Pemerintah Kota Bekasi melakukan upaya-upaya yang konsisten terhadap apa yang sudah dikerjakan di tahun 2025 dengan perbaikan-perbaikan.

Dalam rangka menjaga momentum Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bekasi agar tetap stabil dan berkelanjutan pada tahun-tahun mendatang, Pemerintah Kota Bekasi akan terus memperkuat berbagai kebijakan dan program pembangunan ekonomi yang

berorientasi pada peningkatan produktivitas, daya saing usaha, serta perluasan kesempatan kerja. Upaya tersebut diarahkan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi, tetapi juga lebih inklusif dan merata di seluruh lapisan masyarakat. Pertama, penguatan sektor perdagangan, industri, dan UMKM akan terus ditingkatkan melalui fasilitasi peningkatan kapasitas usaha, perluasan akses pembiayaan, serta dukungan sertifikasi dan standardisasi produk. Selain itu, pemerintah daerah akan mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran produk dan pengembangan ekosistem ekonomi digital guna memperluas akses pasar bagi pelaku usaha lokal. Kedua, pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif akan terus didorong melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan produk dan pemasaran, serta pengembangan kegiatan ekonomi berbasis kreativitas masyarakat. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan peluang usaha baru, meningkatkan aktivitas ekonomi lokal, serta memperluas lapangan pekerjaan. Ketiga, peningkatan daya saing sektor industri dan ekspor daerah akan terus dilakukan melalui pendampingan Industri Kecil dan Menengah (IKM), fasilitasi sertifikasi mutu seperti SNI dan ISO, serta pembinaan pelaku usaha agar mampu menembus pasar ekspor. Penguatan sektor industri diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk daerah dan memperbesar kontribusi sektor industri terhadap pembentukan PDRB. Keempat, penguatan stabilitas ekonomi daerah akan tetap menjadi prioritas melalui pengendalian inflasi dan stabilisasi harga kebutuhan pokok. Pemerintah Kota Bekasi akan terus melakukan intervensi melalui kegiatan operasi pasar, penguatan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta menjaga kelancaran distribusi barang kebutuhan masyarakat. Kelima, penguatan iklim investasi dan kemudahan berusaha akan terus ditingkatkan melalui penyederhanaan perizinan, digitalisasi layanan investasi, serta peningkatan kepastian regulasi bagi dunia usaha. Upaya ini diharapkan mampu menarik investasi baru yang dapat mendorong pertumbuhan sektor industri, perdagangan, dan jasa.

Secara keseluruhan, berbagai upaya tersebut diharapkan mampu menjaga tren pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi agar tetap berada pada tingkat yang kompetitif, meningkatkan kontribusi sektor

unggulan daerah, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan di masa mendatang.

13. Rasio Gini

Tabel 2.67
Perbandingan capaian Rasio Gini tahun ini dengan tahun akhir RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025			Tahun 2029		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
13.	Rasio Gini	Persen	0.408	0.407	100.25%	0.412	0.407	101.21%

Sumber: Diolah, 2026.

Jika dilihat dari aspek perencanaan lima tahunan, capaian Rasio Gini tahun 2025 sudah melampaui target akhir RPJMD yaitu sebesar 101.21% dari target RPJMD sebesar 0.412% dan terealisasi 0.407%. Dalam rangka memperkuat upaya penurunan ketimpangan pendapatan serta menjaga tren perbaikan Rasio Gini di Kota Bekasi pada tahun-tahun mendatang, Pemerintah Kota Bekasi akan terus melakukan berbagai langkah strategis yang terintegrasi dan berkelanjutan. Upaya tersebut diarahkan untuk memperluas kesempatan ekonomi masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Pertama, penguatan sektor UMKM dan ekonomi kreatif akan terus ditingkatkan melalui perluasan akses permodalan, peningkatan kapasitas usaha, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran produk. Pemerintah daerah juga akan mendorong pengembangan ekosistem kewirausahaan yang lebih inklusif agar pelaku usaha kecil mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing sehingga pendapatan masyarakat dapat meningkat secara lebih merata. Kedua, peningkatan kualitas dan kesempatan kerja akan terus diperkuat melalui pengembangan pelatihan kerja berbasis kompetensi yang selaras dengan kebutuhan industri serta perluasan kerja sama dengan dunia usaha. Kegiatan job fair, penempatan tenaga kerja, dan pengembangan pusat pelatihan kerja akan terus dioptimalkan guna meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal dan menekan tingkat

pengangguran. Ketiga, penguatan program perlindungan sosial akan tetap menjadi prioritas, khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan. Pemerintah Kota Bekasi akan memastikan program bantuan sosial, bantuan langsung tunai, serta dukungan kepesertaan jaminan sosial berjalan tepat sasaran melalui pemanfaatan basis data sosial ekonomi yang terintegrasi dan terus diperbarui. Keempat, peningkatan akses dan kualitas pendidikan akan terus didorong melalui pemberian beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu, peningkatan sarana prasarana pendidikan, serta penguatan program peningkatan kualitas sumber daya manusia. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan. Kelima, peningkatan kualitas permukiman dan infrastruktur dasar akan terus dilakukan melalui program penanganan kawasan kumuh, pembangunan rumah tidak layak huni (Rutilahu), serta peningkatan akses sanitasi dan air bersih. Upaya ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat tetapi juga mendukung pemerataan pembangunan antarwilayah. Keenam, penguatan iklim investasi dan kemudahan berusaha juga akan terus ditingkatkan melalui digitalisasi layanan perizinan dan penyederhanaan regulasi. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan investasi dan aktivitas ekonomi yang lebih luas sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, berbagai upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat pemerataan ekonomi di Kota Bekasi, menekan kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat, serta mendorong Rasio Gini menunjukkan tren penurunan yang lebih konsisten sehingga semakin mendekati sasaran pembangunan nasional.

14. Indeks Daya Saing Daerah

Tabel 2.68
Perbandingan capaian Indeks Daya Saing Daerah tahun ini
dengan tahun akhir RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025			Tahun 2029		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
14.	Indeks Daya Saing Daerah	Poin	4.19	4.09	97.61%	4.23	4.09	96.69%

Sumber: Diolah, 2026.

Jika dilihat dari aspek perencanaan lima tahunan, capaian Indeks Daya Saing Daerah tahun 2025 belum mencapai target akhir RPJMD yaitu sebesar 96.69 persen dari target RPJMD sebesar 4.23 poin dan terealisasi 4.09 poin. Upaya peningkatan kinerja pada indikator ini untuk ke depannya adalah tetap melaksanakan apa yang sudah dikerjakan di tahun 2025 dengan perbaikan-perbaikan. Tren nilai IDSD Kota Bekasi dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator	Nilai	Kategori	Tren Umum
IDSD Kota Bekasi 2021	3,6968	Tinggi	Positif/Baik
IDSD Kota Bekasi 2022	3,46	Tinggi	Positif/Baik
IDSD Kota Bekasi 2023	3,87	Tinggi	Positif/Baik
IDSD Kota Bekasi 2024	4,09	Tinggi	Positif/Baik
IDSD Kota Bekasi 2025	4,09	Tinggi	Positif/Baik

Langkah-langkah untuk meningkatkan IDSD antara lain:

1. Melakukan evaluasi komprehensif terhadap capaian 12 pilar IDSD tahun sebelumnya untuk mengidentifikasi indikator yang masih berada di bawah rata-rata nasional, terutama pada pilar dinamika bisnis.
2. Meningkatkan pilar Dinamisme Bisnis yang menggambarkan kemudahan melakukan bisnis yang dilihat melalui administrasi dan budaya kewirausahaan.
3. Mengintegrasikan seluruh produsen data sektoral ke dalam sistem informasi yang terpusat guna memastikan ketersediaan data sekunder yang akurat, mutakhir, dan valid, mengingat pengukuran IDSD sangat bergantung pada kualitas input data dari berbagai instansi dan kementerian lembaga terkait.

15. Indeks Harmoni

Tabel 2.69
Perbandingan capaian Indeks Harmoni tahun ini dengan tahun akhir RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025			Tahun 2029		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
15.	Indeks Harmoni	Nilai	6.47	7.00	108.19%	6.53	7.00	107.20%

Sumber: Diolah, 2026.

Dalam perspektif perencanaan lima tahunan, realisasi Indeks Harmoni tahun 2025 sudah melebihi target akhir RPJMD sebesar 107.20% dari target akhir 6.53 poin terealisasi 7.00 poin. Untuk perbaikan ke depan, Pemerintah Kota Bekasi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi akan melakukan:

1. Berkoordinasi dengan Ditjen Polpum Kemendagri terkait perhitungan Indeks Harmoni Kota Bekasi Tahun 2026 melalui kolaborasi survey Indeks Harmoni Kota Bekasi Tahun 2026;
2. Meningkatkan sinergi positif dengan forum-forum yang terkait dengan peningkatan nilai Indeks Harmoni, seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);
3. Meningkatkan sinergi pemerintah daerah dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk meningkatkan nilai Indeks Harmoni di Kota Bekasi;
4. Menginsentifkan peran dan fungsi Tim Kewaspadaan Dini, Forkopimda, dan Forkopimcam guna mendukung peningkatan nilai Indeks Harmoni di Kota Bekasi.

16. Indeks Reformasi Birokrasi

Tabel 2.70

Perbandingan capaian Indeks Reformasi Birokrasi tahun ini dengan tahun akhir RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025			Tahun 2029		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
16.	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	84.00	89.28	106.29%	86.00	89.28	103.81%

Sumber: Diolah, 2026.

Pada perencanaan lima tahunan, capaian IRB Kota Bekasi tahun 2025 sudah mencapai target akhir RPJMD yaitu sebesar 103.81% dari target RPJMD sebesar 86.00 poin dan terealisasi 89.28 poin pada tahun 2025. Upaya peningkatan kinerja pada indikator ini untuk ke depannya adalah:

1. Menyusun Tim RB General dan Tematik yang akan melaksanakan kegiatan RB di Kota Bekasi;
2. Menyusun rencana aksi RB General dan Tematik yang memuat target dan capaian target yang harus dilakukan oleh Tim dalam meningkatkan capaian IKU IRB;
3. Melaksanakan rapat koordinasi Tim RB agar terjadi sinergitas sesama anggota tim dalam melaksanakan rencana aksi; serta
4. Adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB di Kota Bekasi.

17. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik

Tabel 2.71

Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik tahun ini dengan tahun akhir RPJMD

No	Indikaktor Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025			Tahun 2029		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
17.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Nilai	88.10	88.83	100.83%	88.75	88.83	100.09%

Sumber: Diolah, 2026.

Dalam perspektif perencanaan lima tahunan, realisasi kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik dengan target akhir RPJMD masih diatas 100%. Target akhir RPJMD sebesar 88.75 terealisasi 88.83 sehingga capaiannya sebesar 100.09%. Upaya peningkatan kinerja pada indikator ini untuk ke depannya adalah memaksimalkan kinerja sistem survey IKM (Sisukma) baik aplikasinya maupun penggunaanya.

18. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

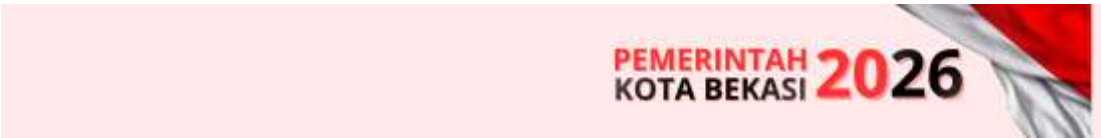
Tabel 2.72

Perbandingan capaian Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun ini dengan tahun akhir RPJMD

No	Indikaktor Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025			Tahun 2029		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
18.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	67.83	67.98	100.22%	69.83	67.98	97.35%

Sumber: Diolah, 2026.

Dari aspek perencanaan lima tahunan, Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah hampir mencapai target akhir RPJMD



sebesar 97.35% dari target akhir RPJMD sebesar 69.83 poin dan realisasi tahun 2025 sebesar 67.98 poin. Dalam rangka peningkatan Nilai SAKIP pada tahun selanjutnya, Pemerintah Kota Bekasi melakukan upaya-upaya yang konsisten terhadap:

1. Pelaksanaan rapat koordinasi Tim Sakip untuk penguatan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi internal;
2. Penguatan sistem e-Sakip dan e-monev yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dan dicek berkala oleh Bagian Organisasi dan Bapperida; dan
3. Menindaklanjuti LHE yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB atas nilai Sakip Kota Bekasi tahun 2025 untuk peningkatan Nilai AKIP tahun berikutnya.

19. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Tabel 2.73

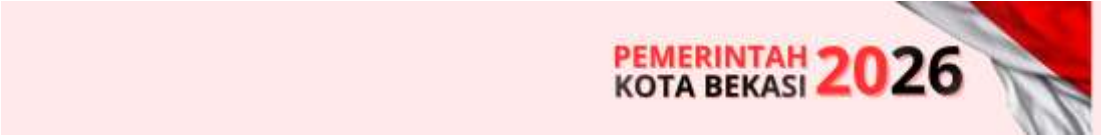
Perbandingan capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah tahun ini dengan tahun akhir RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025			Tahun 2029		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
19.	Pencapaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	74.872	66.752	89.16%	76.406	66.752	87.36%

Sumber: Diolah, 2026.

Jika dilihat dari aspek perencanaan lima tahunan, capaian kinerja IPKD tahun 2025 belum melampaui target akhir RPJMD yaitu sebesar 87.36% dari target RPJMD sebesar 76.406 poin dan terealisasi sebesar 66.752 poin. Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi terkait dengan keberhasilan nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun selanjutnya adalah tetap focus pada apa yang sudah dikerjakan di tahun 2025 dengan perbaikan-perbaikan.

Langkah Strategis Perbaikan (Rekomendasi) untuk memperbaiki skor pada dimensi Pelaksanaan Anggaran di tahun mendatang,



Pemerintah Kota Bekasi akan mengimplementasikan langkah-langkah berikut:

- a. Akselerasi Tender Dini
Mendorong seluruh Perangkat Daerah untuk melakukan proses tender pada akhir tahun sebelumnya atau paling lambat Januari tahun berjalan.
- b. Penguatan Dashboard Monitoring
Mengoptimalkan penggunaan dashboard pemantau realisasi anggaran secara *real-time* untuk memberikan peringatan dini terhadap kegiatan yang mengalami deviasi progres di atas 10%.
- c. Peningkatan Kapasitas SDM
Melakukan bimtek berkelanjutan bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara terkait tata kelola administrasi keuangan pada sistem terbaru untuk meminimalisir kendala retur atau penolakan dokumen pencairan.

20. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Tabel 2.74

Perbandingan capaian Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun ini dengan tahun akhir RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025			Tahun 2029		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
20.	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai	3.00	N/A	N/A	3.25	N/A	N/A

Sumber: Diolah, 2026.

Pada segi perencanaan lima tahunan, capaian Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Bekasi tahun 2025 belum dapat ditentukan karena belum rilisnya nilai EPPD yang dikeluarkan oleh Kemendagri. Dalam rangka meningkatkan kualitas penyusunan LPPD serta optimalisasi capaian nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), Pemerintah Kota Bekasi akan melakukan beberapa langkah perbaikan pada Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan desk capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada saat proses penyusunan LPPD bersama Perangkat Daerah pengampu indikator, guna memastikan kesesuaian indikator, formulasi perhitungan, serta kelengkapan data dukung yang disampaikan.
2. Pelaksanaan desk dan verifikasi capaian IKK secara berkala yang difasilitasi oleh Bagian Tata Pemerintahan, sehingga permasalahan teknis dalam pengisian dan pelaporan indikator dapat diidentifikasi lebih dini dan segera dilakukan perbaikan.
3. Penyusunan IKK melalui pelaporan Semester I Tahun 2026, sebagai sarana pembelajaran bagi Perangkat Daerah dalam memahami definisi operasional indikator, metode perhitungan, serta penyusunan data dukung yang sesuai dengan pedoman Kementerian Dalam Negeri.
4. Peningkatan pemahaman aparatur terhadap pelaporan IKK dan penyusunan LPPD, melalui kegiatan rapat koordinasi.

Melalui langkah-langkah tersebut diharapkan kualitas data, ketepatan pelaporan, serta konsistensi pengelolaan Indikator Kinerja Kunci dapat semakin meningkat sehingga mendukung optimalisasi capaian nilai EPPD Kota Bekasi pada tahun-tahun berikutnya.

21. Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Kota Bekasi

Tabel 2.75

Perbandingan capaian Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Kota Bekasi tahun ini Dengan tahun akhir RPJMD

No	Indikaktor Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025			Tahun 2029		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
21.	Nilai Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah Terintegrasi Kota Bekasi	Nilai	2.80	3.01	107.50%	3.10	3.01	97.10%

Sumber: Inspektorat Kota Bekasi, 2026.

Dalam perspektif target akhir RPJMD, Nilai Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah Terintegrasi Kota Bekasi hampir mencapai target akhir RPJMD yaitu sebesar 97.10% dari target RPJMD sebesar 3.10 dan terealisasi 3.01. Untuk dapat meningkatkan capaian SPIP, maka Pemerintah Kota Bekasi melalui Tim Satuan Tugas Pelaksanaan SPIP Pemerintah Kota Bekasi akan melakukan langkah-langkah berikut ini:

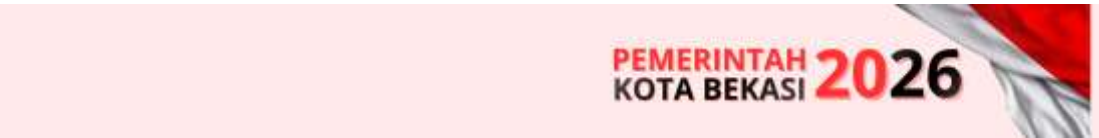
- Menyusun dan menetapkan rencana aksi penguatan SPIP Tahun 2026 serta mengoordinasikan implementasinya pada seluruh perangkat daerah.
- Menerapkan manajemen risiko pada level strategis pemerintah daerah, strategis perangkat daerah, dan operasional perangkat daerah untuk mendukung pencapaian isu strategis nasional, provinsi, dan daerah.
- Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis, dan konsultasi guna meningkatkan pemahaman pimpinan dan pegawai terkait SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI), dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).
- Menginternalisasikan budaya antikorupsi secara sistematis melalui upaya pencegahan, deteksi, dan respons terhadap potensi korupsi kepada pegawai pemerintah daerah dan stakeholder.
- Mengoptimalkan pengawasan berbasis risiko serta memantau tindak lanjut Area of Improvement (AoI) hasil penilaian SPIP Tahun 2025 guna meningkatkan efektivitas pengendalian internal dan deteksi dini fraud.

22. Indeks Kota Cerdas

Tabel 2.76
Perbandingan capaian Indeks Kota Cerdas tahun ini dengan tahun akhir RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025			Tahun 2029		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
22.	Indeks Kota Cerdas	Nilai	3.66	3.67	100.27%	3.90	3.67	94.10%

Sumber: Diolah, 2026.



Dalam perspektif target akhir RPJMD, Peningkatan Indeks Kota Cerdas belum melampaui target akhir RPJMD yaitu sebesar 94.10% dari target RPJMD sebesar 3.90 dan terealisasi 3.67 poin. Dalam rangka peningkatan Nilai IKC pada tahun selanjutnya, Pemerintah Kota Bekasi melakukan upaya-upaya yang konsisten terhadap apa yang sudah dikerjakan di tahun 2025 dengan perbaikan-perbaikan.

D. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Capaian Nasional

Untuk melihat realisasi capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan capaian nasional adalah sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

Tabel 2.78
Perbandingan Capaian Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur terhadap Capaian Nasional

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025			Tahun 2025	
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Realisasi Nasional	Capaian
1.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Nilai	68.00	70.49	103.66%	N/A	N/A

Sumber: Diolah, 2026.

Terkait dengan perbandingan nasional, nilai Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kota Bekasi tahun 2025 tidak dapat ditentukan karena belum rilisnya nilai IKLI secara nasional. Secara dunia, IKLI mengacu pada QI4SD, QI4SD adalah singkatan dari **Quality Infrastructure for Sustainable Development Index** (Indeks Infrastruktur Mutu untuk Pembangunan Berkelanjutan). Ini adalah sebuah kerangka indikator yang dikembangkan oleh *United Nations Industrial Development Organization* (UNIDO) bersama *International Network on Quality Infrastructure* (INetQI) untuk mengukur kesiapan Infrastruktur Mutu (QI) suatu negara dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Dalam laporan *Quality Infrastructure for Sustainable Development (QI4SD) Index* tahun 2024 yang baru dirilis oleh *United Nations Industrial Development Organization* (UNIDO), dengan nilai indeks QI4SD sebesar

60.7. Indonesia berhasil menduduki peringkat ke-28 dari 155 negara. Peringkat ini meningkat signifikan dibanding posisi tahun 2022, dimana Indonesia berada di urutan ke-34 dunia.

2. Penurunan Intensitas Emisi GRK

Tabel 2.78

Perbandingan Capaian Penurunan Intensitas Emisi GRK terhadap Capaian Nasional

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025			Tahun 2025	
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Realisasi Nasional	Capaian
2.	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Ton Co2eq/ Miliar	0.88	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Diolah, 2026.

Terkait dengan perbandingan nasional, karena Penurunan Intensitas Emisi GRK secara nasional belum dirilis maka belum dapat dibandingkan dengan rata-rata nasional.

3. Indeks Pembangunan Manusia

Tabel 2.79

Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Manusia terhadap Capaian Nasional

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025			Tahun 2025	
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Realisasi Nasional	Capaian
3.	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	83.80	84.43	100.75%	75.90	+8.53

Sumber: Diolah, 2026.

Pada tingkat nasional, nilai IPM Kota Bekasi tahun 2025 lebih tinggi 8.53 poin dibanding rata-rata nasional yang sebesar 75.90 poin dari nilai IPM Kota Bekasi sebesar 84.43 poin.

4. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek)

Tabel 2.80
Analisis Perbandingan Capaian Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita terhadap Capaian Nasional

No	Indikaktor Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025			Tahun 2025	
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Realisasi Nasional	Capaian
4.	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	Persen	9.05	11.70	70.72%	19.8	+8.10

Sumber: Diolah, 2026.

Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada level nasional lebih tinggi 8.10 poin dibandingkan dengan Kota Bekasi. Artinya, ukuran epidemiologi yang menunjukkan jumlah total kasus (lama dan baru) stunting pada balita di Kota Bekasi lebih rendah dan lebih sedikit dibandingkan pada level nasional.

5. Indeks Pembangunan Keluarga

Tabel 2.81
Analisis Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga terhadap Capaian Nasional

No	Indikaktor Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025			Tahun 2025	
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Realisasi Nasional	Capaian
5.	Indeks Pembangunan Keluarga	Nilai	65.50	67.90	103.66%	67.30	+0.60

Sumber: Diolah, 2026.

Terkait dengan perbandingan nasional, indikator iBangga Kota Bekasi mendapat nilai lebih tinggi 0.60 poin dibanding nilai iBangga nasional. Dengan kata lain, indeks kebahagiaan, kemandirian, dan ketentraman di Kota Bekasi lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata capaian di Kota/Kabupaten lainnya.

6. Indeks Ketimpangan Gender

Tabel 2.82
Analisis Perbandingan Capaian Indeks Ketimpangan Gender
terhadap Capaian Nasional

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025			Tahun 2025	
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Realisasi Nasional	Capaian
6.	Indeks Ketimpangan Gender	Nilai	0.26	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Diolah, 2026.

Terkait dengan perbandingan nasional, karena Indikator Indeks Ketimpangan Gender secara nasional belum dirilis maka belum dapat dibandingkan dengan realisasi Kota Bekasi.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Nasional

TAHUN	NILAI	PERKEMBANGAN
2021	0.465	-
2022	0.459	Naik
2023	0.447	Naik
2024	0.421	Naik
2025	N/A	Belum Rilis Data Terbaru

Sumber data : <https://www.bps.go.id/id/publication/2025/07/31/83ae68c36720895d3895ec58/indeks-ketimpangan-gender-2024.html>

Berdasarkan data pada tabel, nilai Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia tahun 2018–2024 menunjukkan tren **menurun secara konsisten**, yang berarti ketimpangan gender secara nasional semakin membaik. Semakin mendekati 0, maka ketimpangan semakin kecil. Penurunan dari 0,499 (2018) menjadi 0,421 (2024) menunjukkan adanya perbaikan struktural dalam akses dan partisipasi perempuan, meskipun angka 0,421 masih mencerminkan ketimpangan yang cukup signifikan.

7. Nilai Kota Layak Anak

Tabel 2.83
Analisis Perbandingan Capaian Nilai Kota Layak Anak terhadap
Capaian Nasional

No	Indikaktor Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025			Tahun 2025	
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Realisasi Nasional	Capaian
1.	Nilai Kota Layak Anak	Nilai	742.35	501	67.49%	1000	-499

Sumber: Diolah, 2026.

Nilai standar Nasional untuk Kota Layak Anak adalah 1000 poin. Nilai tersebut merupakan akumulasi pemenuhan seluruh indikator kelembagaan dan lima klaster hak anak yang meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan serta pemanfaatan waktu luang, dan perlindungan khusus. Capaian Nilai Kota Layak Anak (KLA) Kota Bekasi pada tahun 2025 yaitu sebesar 501 poin hanya memenuhi separuh dari standar nasional dan terdapat gap sebesar **49,9%** dari skor maksimal atau 499 poin di bawah standar nasional.

8. PDRB Per Kapita

Tabel 2.84
Analisis Perbandingan Capaian PDRB Per Kapita terhadap
Capaian Nasional

No	Indikaktor Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025			Tahun 2025	
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Realisasi Nasional	Capaian
8.	PDRB Per Kapita	Juta Rp	49.16	52.51	106.82%	83.70	-31.19

Sumber: Diolah, 2026.

Terkait dengan perbandingan nasional, nilai PDRB Per Kapita Kota Bekasi tahun 2025 lebih rendah 31,19 juta rupiah dibanding PDB per Kapita Indonesia yang sebesar 83,70 juta rupiah.

9. Indeks Ketahanan Pangan

Tabel 2.85
Analisis Perbandingan Capaian Indeks Ketahanan Pangan
terhadap Capaian Nasional

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025			Tahun 2025	
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Realisasi Nasional	Capaian
9.	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	94.00	73.07	77.73%	73.00	+0.07

Sumber: Diolah, 2026.

Terkait dengan perbandingan nasional, nilai IKP Kota Bekasi sebesar 73.07 poin lebih unggul 0.07 poin dibanding nilai IKP nasional. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Nasional 2025 mencapai skor 73.00, terdiri dari aspek ketersediaan pangan (61,47), keterjangkauan pangan (82,70), dan pemanfaatan pangan (74,99). Lima daerah dengan capaian IKP tertinggi adalah Kabupaten Badung (Bali), Kota Payakumbuh (Sumatera Barat), Kabupaten Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur), Kabupaten Balangan (Kalimantan Selatan), dan Kota Solok (Sumatera Barat).

10. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tabel 2.86
Analisis Perbandingan Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka
terhadap Capaian Nasional

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025			Tahun 2025	
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Realisasi Nasional	Capaian
10.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7.33	7.33	104.56%	4,74%	+2.59%

Sumber: Diolah, 2026.

Adapun dalam konteks nasional, posisi TPT Kota Bekasi masih lebih tinggi 2.59% dibandingkan rata-rata nasional dengan TPT Kota Bekasi pada tahun 2025 sebesar 7.33% dan TPT nasional sebesar 4.74%. Secara nasional, Pemerintah melalui perencanaan

pembangunan menetapkan target TPT pada kisaran 4,5%–5%, sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam dokumen perencanaan daerah, Pemerintah Kota Bekasi melalui RPJMD Kota Bekasi menetapkan target TPT pada kisaran 7,06%–7,68%. Target ini disusun dengan mempertimbangkan karakteristik Kota Bekasi sebagai wilayah penyangga metropolitan, mobilitas tenaga kerja yang tinggi, serta struktur ekonomi yang didominasi sektor perdagangan dan jasa.

Berdasarkan data, realisasi TPT Kota Bekasi masih berada dalam rentang target yang telah ditetapkan, sehingga secara kinerja indikator daerah dapat dinilai tercapai. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan target nasional sebesar 4,5%–5%, angka TPT Kota Bekasi masih berada di bawah standar nasional, sehingga diperlukan upaya yang lebih progresif dan terintegrasi dalam peningkatan penyerapan tenaga kerja.

11. Tingkat Kemiskinan

Tabel 2.87
Analisis Perbandingan Capaian Tingkat Kemiskinan terhadap Capaian Nasional

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025			Tahun 2025	
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Realisasi Nasional	Capaian
11.	Tingkat Kemiskinan	Persen	3.69	3.96	92.68%	8.25%	+4,29%

Sumber: Diolah, 2026.

Pada level nasional, capaian Tingkat Kemiskinan Kota Bekasi lebih baik sebesar 4.29% dibandingkan rata-rata nasional dengan angka kemiskinan nasional sebesar 8.25% dan realisasi angka kemiskinan Kota Bekasi sebesar 3.96%. Tingkat kemiskinan di Indonesia pada September 2025 berhasil turun menjadi 8.25% atau setara 23.36 juta orang, menandai penurunan dari 8.47% pada Maret 2025. Penurunan ini menunjukkan perbaikan ekonomi, meskipun tekanan biaya hidup masih tinggi. Penurunan terjadi baik di perkotaan (6.6%) maupun pedesaan (10.72%)

12. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Tabel 2.88
Analisis Perbandingan Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi
terhadap Capaian Nasional

No	Indikaktor Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025			Tahun 2025	
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Realisasi Nasional	Capaian
12.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5.32	5.39	101.32%	5.11	+0.28

Sumber: Diolah, 2026.

Terkait dengan perbandingan nasional, LPE Kota Bekasi Tahun 2025 lebih tinggi 0.28 poin dibandingkan dengan LPE nasional. Ekonomi Indonesia pada tahun 2025 tumbuh stabil sebesar 5.11% (yoy), menandai pertumbuhan tertinggi sejak 2022 dan menunjukkan resiliensi di tengah ketidakpastian global. Pertumbuhan ini didorong kuat oleh konsumsi rumah tangga, investasi, dan belanja pemerintah. Kuartal IV-2025 mencatatkan angka impresif 5.39%, tertinggi di antara negara-negara G20

13. Rasio Gini

Tabel 2.89
Analisis Perbandingan Capaian Rasio Gini terhadap Capaian
Nasional

No	Indikaktor Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025			Tahun 2025	
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Realisasi Nasional	Capaian
13.	Rasio Gini	Persen	0.408	0.407	100.25%	0.363	-0.044

Sumber: Diolah, 2026.

Terkait dengan perbandingan nasional, Rasio Gini Kota Bekasi Tahun 2025 lebih tinggi dari Rasio Gini Tingkat nasional sebesar 0.044 poin. Artinya ketimpangan pendapatan atau kekayaan di Kota Bekasi lebih melebar dan tidak merata. Sebagian kecil kelompok kaya menguasai porsi pendapatan yang jauh lebih besar, sementara sebagian besar penduduk lainnya memiliki pendapatan yang relatif kecil. Kesenjangan antara penduduk kaya dan miskin meningkat,

menunjukkan ketidaksetaraan sosial yang lebih dalam. Pendapatan terkonsentrasi pada segmen populasi tertentu, bukan tersebar merata.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2025 untuk meningkatkan capaian kinerja atas indikator kinerja utama penurunan Gini Rasio antara lain sebagai berikut:

1. Merencanakan dan membuat kegiatan berbasis outcome dan data terpadu guna mencapai tujuan dan sasaran;
2. Melakukan koordinasi berjenjang dan kontinyu antara Dinas Sosial dengan Dinas/Badan penanggung jawab urusan;
3. Monitoring secara berkala terhadap capaian Indikator sehingga memudahkan dalam mengevaluasi dan mengambil langkah tindak lanjut; dan
4. Keselarasan antara program dan kegiatan berbasis pemberdayaan PSKS yang diampu Dinas Sosial sehingga terdapat peran PSKS dalam peningkatan Capaian Indikator.

14. Indeks Daya Saing Daerah

Tabel 2.90

Analisis Perbandingan Capaian Indeks Daya Saing Daerah dengan terhadap Capaian Nasional

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025			Tahun 2025	
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Realisasi Nasional	Capaian
14.	Indeks Daya Saing Daerah	Poin	4.19	4.09	97.61%	3.50	+0.59

Sumber: Diolah, 2025.

Terkait dengan perbandingan nasional, IDSD Kota Bekasi lebih unggul 0.59 poin dibandingkan dengan IDSD nasional yang sebesar 3.50 poin. Perbandingan nilai IDSD nasional Indoensia selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada table di bawah ini:

Indikator	Nilai
Nilai Standar Nasional 2021	-
Nilai Standar Nasional 2022	3,26
Nilai Standar Nasional 2023	3,44
Nilai Standar Nasional 2024	3,43
Nilai Standar Nasional 2025	3,50

15. Indeks Harmoni

Tabel 2.91
Analisis Perbandingan Capaian Indeks Harmoni terhadap Capaian Nasional

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025			Tahun 2025	
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Realisasi Nasional	Capaian
15.	Indeks Harmoni	Nilai	6.47	7.00	108.19%	7.79	-0.79

Sumber: Diolah, 2026.

Terkait dengan perbandingan nasional, Indeks Harmoni Kota Bekasi masih berada di bawah Indeks Harmoni nasional sebesar 0.79 poin.

16. Indeks Reformasi Birokrasi

Tabel 2.92
Analisis Perbandingan Capaian Indeks Reformasi Birokrasi terhadap Capaian Nasional

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025			Tahun 2025	
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Realisasi Nasional	Capaian
16.	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	84.00	89.28	106.%	71.83	+17,45

Sumber: Diolah, 2026.

Pada tingkat nasional, IRB Kota Bekasi tahun 2025 berada di atas rata-rata nasional dengan selisih 17.45 poin dari rata-rata nasional sebesar 71.83 poin

17. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik

Tabel 2.94

Analisis Perbandingan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik terhadap Capaian Nasional

No	Indikaktor Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025			Tahun 2025	
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Realisasi Nasional	Capaian
17.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Nilai	88.10	88.83	100.83%	89.11	-0.28 poin

Sumber: Diolah, 2026.

Pada tingkat nasional, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik tahun 2025 berada di bawah rata-rata nasional dengan selisih 0.28 poin dari rata-rata nasional sebesar 89.11 poin.

18. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Tabel 2.94

Analisis Perbandingan Capaian Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terhadap Capaian Nasional

No	Indikaktor Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2029			Tahun 2025	
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Realisasi Nasional	Capaian
18.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	67.83	67.98	100.22%	66.42	+1,56

Sumber: Diolah, 2026.

Pada tingkat nasional, Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025 berada di atas rata-rata nasional dengan selisih 1.56 poin dari rata-rata nasional sebesar 66.42 poin.

19. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Tabel 2.95

Analisis Perbandingan Capaian Indeks Pengelolaan Keuangan
Daerah terhadap Capaian Nasional

No	Indikaktor Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025			Tahun 2025	
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Realisasi Nasional	Capaian
19.	Pencapaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	74.872	66.754	89.15%	75-80	-8.25

Sumber: Diolah, 2026.

Nilai yang diharapkan untuk mencapai kategori "Baik" berada pada rentang skor 75 – 80. Selisih (gap) sebesar kurang lebih 8.25 poin menjadi fokus utama perbaikan pada periode mendatang. Langkah-langkah untuk meningkatkan IPKD antara lain:

1. Meningkatkan konsistensi nomenklatur Program dan Pagu antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran;
2. Melakukan pemenuhan Mandatory Spending dan SPM;
3. Meningkatkan transparansi dokumen pengelolaan keuangan daerah di Website Utama Pemerintah Daerah dalam rentang waktu <30 hari dari tanggal penetapan;
4. Memaksimalkan penyerapan anggaran belanja minimal 80%;
5. Meningkatkan kemampuan keuangan atau kemandirian daerah dengan meningkatkan PAD, tidak bergantung pada Transfer Pusat serta menekan Belanja Pegawai, mengurangi kewajiban (Utang), dan memaksimalkan Aset; dan
6. Perlunya mempertahankan Opini WTP dari BPK

20. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Tabel 2.96

Analisis Perbandingan Capaian Nilai Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah terhadap Capaian Nasional

No	Indikaktor Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025			Tahun 2025	
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Realisasi Nasional	Capaian
20.	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai	3.00	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Diolah, 2026.

Terkait dengan perbandingan nasional, indikator ini tidak dapat dibandingkan dikarenakan belum rilisnya nilai dari Kemendagri.

21. Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Kota Bekasi

Tabel 2.97

Analisis Perbandingan Capaian Nilai Maturitas Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Kota Bekasi
terhadap Capaian Nasional

No	Indikaktor Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025			Tahun 2025	
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Realisasi Nasional	Capaian
21.	Nilai Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah Terintegrasi Kota Bekasi	Poin	2.80	3.010	107.50%	3.000	0.01

Sumber: Diolah, 2026.

SPIP menjadi bagian integral dalam perbaikan tata kelola pemerintahan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029. Pada tahun 2025, Pemerintah Kota Bekasi menjadi salah satu Pemerintah Daerah yang mencapai level 3 dari hasil evaluasi penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP oleh BPKP Perwakilan.

Pemerintah Kota Bekasi dievaluasi oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat, karena terlambatnya penyampaian laporan hasil penilaian

4. Kemudahan Prosedur dalam mendapatkan layanan infrastruktur;
5. Koordinasi yang baik antara perencanaan, anggaran dan perangkat daerah teknis; serta
6. Infrastruktur yang aman tidak rapuh.

2. Penurunan Intensitas Emisi GRK

Beberapa faktor pendukung indikator Penurunan Intensitas Emisi GRK antara lain:

- Transisi Energi dan Efisiensi energi
- Restrukturisasi ekonomi
- Kebijakan dan regulasi Pemerintah
- Inovasi Teknologi dan Perubahan Gaya Hidup
- Pengelolaan Sektor Kehutanan dan Lahan

3. Indeks Pembangunan Manusia

Beberapa Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/ peningkatan Harapan Lama Sekolah HLS (tahun) dan Rata-Rata Lama Sekolah adalah:

a. Pencegahan putus sekolah,

Pemerintah Kota Bekasi telah menganggarkan beasiswa bagi siswa tidak mampu pada jenjang PAUD, SD dan SMP yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan keberlanjutan pendidikan bagi anak dari keluarga tidak mampu guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kontribusi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

b. Ketersediaan dan Pemerataan Sekolah Jenjang PAUD, SD dan SMP

Ketersediaan satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, dan SMP (Terutama pada sekolah negeri) di Kota Bekasi secara umum telah mampu menjangkau sebagian besar wilayah kecamatan dan kelurahan. Pada jenjang PAUD, jumlah PAUD Negeri relatif memadai di 12 Kecamatan (1 PAUD Negeri per Kecamatan) dengan penambahan kontribusi signifikan dari penyelenggara swasta. Hal ini mendukung peningkatan akses pendidikan usia dini sebagai fondasi kesiapan belajar pada jenjang dasar.

Pada jenjang SD, pemerataan sekolah sudah cukup baik karena 56 kelurahan telah memiliki sekolah dasar baik negeri dan swasta. Namun demikian, tantangan masih ditemui pada wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi, di mana rasio murid per kelas cenderung meningkat dan kebutuhan ruang kelas baru masih diperlukan. Kondisi ini memerlukan penataan daya tampung dan peningkatan sarana prasarana agar mutu layanan sesuai SPM dan Standar Nasional Pendidikan.

Sementara itu, pada jenjang SMP, jumlah satuan pendidikan relatif lebih terbatas dibandingkan SD, sehingga daya tampung menjadi isu strategis, terutama pada sekolah negeri yang memiliki tingkat peminat tinggi dimana saat ini masih terdapat 9 Kelurahan yang belum memiliki SMP Negeri. Peran SMP swasta cukup besar dalam menjaga keberlanjutan pendidikan lulusan SD. Pemerataan akses SMP menjadi faktor kunci dalam mencegah putus sekolah pada masa transisi serta dalam mendukung peningkatan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

c. Penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak

Melalui DPPPA, Sekolah-sekolah di Kota Bekasi telah menuju sekolah ramah anak, sekolah ramah anak bertujuan untuk mewujudkan satuan pendidikan yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, serta perundungan. Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata lama Sekolah (RLS) sangat dipengaruhi oleh Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada seluruh jenjang, sekolah ramah anak berkontribusi pada HLS dan RLS melalui peningkatan kenyamanan, keamanan, dan keberlanjutan pendidikan. Semakin aman dan inklusif lingkungan sekolah, semakin kecil risiko siswa keluar dari sistem pendidikan.

d. Penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak

Tujuan Pembentukan Sekolah Ramah Anak di Kota Bekasi Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Sekolah ramah Anak Kota Bekasi adalah :

1. Adanya keterjangkauan, kesetaraan, dan keterjaminan hak atas pendidikan bagi semua anak termasuk penyandang

disabilitas, korban bencana, anak jalan, anak berhadapan dengan hukum, dan anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus lainnya;

2. Mendorong sekolah berperan penting dalam kehidupan anak sebagai tempat belajar, pengembangan dan sosialisasi;
 3. Menghindari hukuman yang berakibat cedera baik secara fisik maupun psikis.
- e. Penyelenggaraan Perpustakaan sebagai bagian dari upaya peningkatan Nilai Literasi dan Numerasi

Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah melaksanakan perluasan akses dan pemerataan layanan literasi melalui penyediaan perpustakaan mini di sekretariat RW, operasional perpustakaan keliling, serta fasilitasi kunjungan perpustakaan bagi peserta didik. Perpustakaan mini di tingkat RW bertujuan mendekatkan bahan bacaan kepada masyarakat hingga lingkup komunitas terkecil, sementara layanan perpustakaan keliling menjangkau wilayah yang belum memiliki fasilitas perpustakaan tetap. Kegiatan kunjungan perpustakaan mendorong peningkatan minat baca, pengenalan literasi informasi, serta pemanfaatan koleksi dan layanan perpustakaan secara optimal oleh pelajar dari berbagai jenjang pendidikan.

Selain perluasan akses, Disarpusda juga melaksanakan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dengan menempatkan perpustakaan sebagai pusat pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat. Guna meningkatkan literasi lokal dan kesadaran sejarah diperkuat melalui kegiatan bedah buku sejarah Kota Bekasi, serta bimbingan teknis bagi pengelola perpustakaan sekolah untuk meningkatkan kompetensi pengelolaan layanan, koleksi, dan otomasi perpustakaan. Secara keseluruhan, rangkaian program tersebut merupakan intervensi strategis dalam memperkuat ekosistem literasi daerah yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan capaian IPM Kota Bekasi secara berkelanjutan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan UHH Kota Bekasi yang menjadi salah satu komponen dalam Indeks Pembangunan Manusia sebagai berikut:

- Akses dan fasilitas layanan kesehatan
Fasilitas layanan kesehatan yang makin banyak disertai kemudahan akses layanan kesehatan membuat masyarakat lebih cepat mendapatkan layanan kesehatan.
- Edukasi dan kesadaran masyarakat
Edukasi pola hidup sehat kepada masyarakat yang dilakukan juga memberi dampak yang baik terhadap perilaku di masyarakat dalam menerapkan pola hidup sehat. Edukasi kepada masyarakat masih perlu dan terus ditingkatkan agar perilaku hidup sehat tertanam dalam diri masyarakat.
- Jaminan Kesehatan
Program jaminan kesehatan, seperti BPJS memudahkan masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan dengan biaya terjangkau, sehingga memperbaiki status kesehatan masyarakat dalam jangka panjang.
- Tingkat pendidikan masyarakat Kota Bekasi
Tingkat pendidikan masyarakat Kota Bekasi yang cukup tinggi juga berkontribusi terhadap gaya hidup sehat dan akses terhadap informasi terkait kesehatan yang lebih baik. Semakin tinggi tingkat pendidikan, berpengaruh terhadap kemampuan individu dalam mengakses informasi dan kemampuan dalam memilih informasi.
- Kondisi ekonomi
Pendapatan dan standar hidup yang baik mendukung kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan nutrisi, kesehatan, dan lingkungan yang layak. Hal ini juga berpengaruh pada peningkatan usia harapan hidup masyarakat.
- Lingkungan dan gaya hidup
Lingkungan yang bersih, sanitasi yang baik, gaya hidup sehat, serta perilaku hidup bersih dan sehat (seperti : olahraga teratur, makan makanan yang sehat dan bergizi, tidak merokok, dll) juga memengaruhi umur harapan hidup.
- Intervensi Pemerintah
Intervensi Pemerintah, baik pusat, provinsi maupun Kota Bekasi, dalam bentuk program pembangunan di bidang kesehatan yang dilaksanakan juga berpengaruh terhadap peningkatan UHH Kota

Bekasi dari tahun ke tahun. Hal ini menjadi komitmen Wali Kota Bekasi yang diwujudkan dengan salah satu dari Sapta Program Wali Kota Tahun 2025-2029, yaitu Gerakan Kobe Sehat.

4. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek)

Analisis kendala dan hambatan yang menyebabkan kenaikan kasus stunting di Kota Bekasi:

- **Faktor Demografi dan Urbanisasi Tinggi**
Beberapa wilayah menunjukkan adanya tren kenaikan kepadatan penduduk yang disebabkan karena urbanisasi. Mobilitas penduduk yang tinggi menyulitkan pendataan (surveilans) balita secara konsisten. Terdapat balita yang tidak terdata di Posyandu seringkali luput dari intervensi gizi sejak dini.
- **Tantangan Sanitasi dan Lingkungan (Kawasan Industri)**
Kecamatan seperti Bantar Gebang memiliki tantangan lingkungan yang spesifik (dekat dengan area pengolahan sampah). Kualitas air bersih dan sanitasi yang buruk dapat menyebabkan infeksi berulang (seperti diare) pada balita. Infeksi berulang ini dapat menghambat penyerapan nutrisi, yang menjadi salah satu penyebab tidak langsung kenaikan kasus stunting. Selain di bantar gebang, Dinas Kesehatan bersama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat pernah turun lapangan di Bekasi selatan yang nyatanya masih ditemukan akses air bersih dan sanitasi yang sangat membutuhkan perhatian lebih.
- **Masalah Ekonomi dan Ketahanan Pangan**
Meskipun Kota Bekasi adalah kota industri dan Kota Bisnis, inflasi harga pangan protein hewani (telur, daging, ikan) dapat berdampak langsung pada daya beli keluarga menengah ke bawah. Pergeseran pola konsumsi ke makanan olahan (*ultra-processed food*) yang rendah gizi karena harga yang lebih murah dibandingkan makanan segar bergizi tinggi.
- **Kurangnya Kesadaran di Wilayah**
Salah satu hal yang dikhawatirkan yakni adanya "*false sense of security*" atau rasa aman palsu. Karena angka stunting dianggap sudah rendah, perhatian orang tua terhadap pola asuh dan

kunjungan rutin ke Posyandu menurun, sehingga terjadi kenaikan kasus stunting di Kota Bekasi.

5. Indeks Pembangunan Keluarga

Keberhasilan iBangga di Kota Bekasi dalam menggambarkan capaian pembangunan keluarga di Kota Bekasi dipengaruhi oleh beberapa faktor utama:

- **Adanya Advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi):** yang terus dilakukan melalui kegiatan langsung kesasaran maupun melalui pertemuan yang intensif termasuk kepada pemangku kepentingan dan masyarakat.
- **Sosialisasi dan Komitmen Stakeholder:** Sosialisasi yang masif ke berbagai Perangkat Daerah terkait sehingga berhasil meningkatkan komitmen dalam kebijakan pembangunan keluarga.
- **Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Bekasi melakukan Koordinasi dengan BKKBN Perwakilan Jawa Barat dan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan keluarga dalam rangka koordinasi Peran Strategis Kemenduk Bangga/ BKKBN** sebagai *leading sector* yang mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan, termasuk penggunaan iBangga sebagai indikator keberhasilan.
- **Pemanfaatan Teknologi Informasi:** Pemantauan dan evaluasi iBangga dilakukan secara berkala (minimal satu kali setahun) dan didukung oleh sistem berbasis teknologi informasi, sehingga pengukurannya lebih akurat.
- **Kunjungan Lapangan dan Apresiasi (iBangga Awards):** Dilakukannya kunjungan lapangan dan *awards* tingkat provinsi/nasional memotivasi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas keluarga di wilayahnya.
- **Integrasi dengan Program Pembangunan Lain:** iBangga terintegrasi dengan program lainnya, seperti Kampung KB, Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)

Menurunnya angka indeks kebahagiaan di kota Bekasi tahun 2025 dan meningkatnya kemandirian keluarga dapat memberikan makna bahwa Masyarakat Kota Bekasi saat ini sedang mengurangi ketergantungan terhadap segala macam bantuan tapi berusaha memenuhi kebutuhan sendiri.

6. Indeks Ketimpangan Gender

Secara analitis, permasalahan utama terletak pada belum stabilnya capaian indikator pemberdayaan dan ekonomi perempuan.

1. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan masih lebih rendah dibanding laki-laki. (lebih banyak perempuan bekerja di sektor informal)
2. Belum optimalnya Perencanaan dan penganggaran responsif gender berbasis data terpilah. Meskipun secara regulatif pengarusutamaan gender (PUG) telah diamanatkan dalam sistem perencanaan daerah, namun implementasinya belum sepenuhnya didukung oleh ketersediaan dan pemanfaatan data terpilah menurut jenis kelamin, usia, dan kelompok rentan lainnya secara konsisten di seluruh perangkat daerah pada integrasi data sektoral terpilah dalam SIPD dan dokumen perencanaan
3. Belum optimalnya keterwakilan perempuan di parlemen. Partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif daerah (DPRD Kota Bekasi) masih berada di bawah angka ideal keterwakilan 30% sebagaimana amanat kebijakan afirmasi nasional.
4. Sistem rekrutmen partai politik yang belum sepenuhnya melakukan kaderisasi berkelanjutan bagi Perempuan.

7. Nilai Kota Layak Anak

Beberapa faktor yang mempengaruhi belum tercapainya target indikator kinerja **Kota Layak Anak** antara lain:

1. **Belum optimalnya pemenuhan indikator pada seluruh klaster**, terutama indikator yang menjadi kewenangan OPD teknis lain seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial.

2. **Masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak dan anak berhadapan dengan hukum**, yang berdampak pada rendahnya capaian klaster perlindungan khusus.
3. **Keterbatasan data dan validasi indikator pendukung**, sehingga sebagian pemenuhan klaster belum dapat terkonfirmasi secara optimal dalam sistem penilaian.
4. **Keterbatasan kapasitas layanan dan SDM pendamping**, khususnya pada layanan perlindungan anak dan rehabilitasi sosial dimana UPTD PPA Kota Bekasi baru beroperasi di tahun 2025.

8. PDRB Per Kapita

Realisasi PDRB per kapita Kota Bekasi Tahun 2025 sebesar Rp52,51 juta melampaui target RPJMD sebesar Rp48,98–49,34 juta. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja ekonomi daerah berjalan dengan baik dan mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat serta efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah. Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

a. Penguatan Ekonomi Berbasis Kerakyatan

Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan koperasi mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi produktif di tingkat lokal, sehingga meningkatkan nilai tambah sektor perdagangan dan jasa dalam pembentukan PDRB.

b. Peningkatan Kapasitas dan Daya Saing Usaha

Perbaikan kualitas produk, peningkatan kompetensi pelaku usaha, serta perluasan akses pasar berdampak pada meningkatnya produktivitas dan skala usaha sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

c. Peningkatan Kesempatan Kerja dan Kualitas Tenaga Kerja

Fasilitasi di bidang ketenagakerjaan, termasuk peningkatan kompetensi dan perluasan akses kerja, turut mendorong terserapnya tenaga kerja secara lebih optimal. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja dan produktivitas tenaga kerja berimplikasi langsung terhadap kenaikan pendapatan per kapita.

d. Terjaganya Stabilitas Daya Beli Masyarakat

Upaya menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi daerah mendukung keberlangsungan konsumsi rumah tangga sebagai komponen utama pembentuk PDRB dari sisi pengeluaran.

9. Indeks Ketahanan Pangan

Penurunan nilai IKP Kota Bekasi pada Tahun 2025 menjadi 70,03 tidak sepenuhnya disebabkan oleh penurunan kinerja program ketahanan pangan daerah. Penurunan tersebut juga dipengaruhi oleh perubahan metode penghitungan IKP dan penyesuaian indikator yang digunakan tahun 2025.

Perubahan metode penghitungan tersebut mengakibatkan adanya penyesuaian bobot indikator pada tiga dimensi ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Penambahan serta penyesuaian indikator dalam penghitungan IKP menyebabkan nilai yang dihasilkan menjadi berbeda dibandingkan dengan metode penghitungan pada tahun-tahun sebelumnya.

Selain itu, terdapat beberapa faktir lain yang turut mempengaruhi capaian nilai IKP di Kota Bekasi, antara lain:

- a. Keterbatasan lahan pertanian di wilayah perkotaan, sehingga sebagian besar kebutuhan pangan masih dipasok dari daerah lain.
- b. Fluktuasi harga pangan, khususnya pada komoditas strategis seperti beras, cabai, dan bawang yang mempengaruhi akses pangan masyarakat.
- c. Pertumbuhan jumlah penduduk, yang meningkatkan kebutuhan pangan masyarakat.
- d. Akses pangan masyarakat berpenghasilan rendah, yang masih perlu ditingkatkan melalui program bantuan dan stabilisasi harga.
- e. Namun demikian, pemerintah daerah terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan melalui berbagai program dan kegiatan.

10. Tingkat Pengangguran Terbuka

Analisa Faktor-Faktor Penyebab Keberhasilan/Peningkatan Kinerja turunnya tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Bekasi

a. Pelatihan Berbasis Kompetensi

Secara teori ekonomi ketenagakerjaan, pengangguran sering terjadi karena ketidaksesuaian keterampilan (*skill mismatch*), kurangnya pengalaman kerja, rendahnya kompetensi teknis maupun soft skills dan minimnya informasi pasar kerja. Maka Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi selaku *leading sector* mengadakan kegiatan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi berupa Pelatihan Perhotelan, Pelatihan K3, Pelatihan Komputer, Pelatihan Otomotif, Pelatihan Tata Boga, Pelatihan Tata Rias dan Pelatihan Tata Kecantikan dengan total peserta pelatihan sebanyak 252 orang. Pemilihan kejuruan pelatihan ini dilakukan berdasarkan hasil polling tren pelatihan yang diminati warga Kota Bekasi.

Melalui pelaksanaan kegiatan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi ini, diharapkan dapat menjadi jembatan atas kesenjangan masalah ketenagakerjaan yang ada dengan target berupa:

1. Peningkatan Kompetensi (Upskilling & Reskilling)

Pelatihan meningkatkan keterampilan teknis sesuai kebutuhan industry.

2. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja

Lulusan pelatihan lebih siap kerja dan memiliki sertifikasi kompetensi.

3. Mempercepat Transisi dari Penganggur ke Bekerja

Lulusan pelatihan lebih siap kerja dan memiliki sertifikasi kompetensi.

4. Mendorong Kewirausahaan

Pelatihan berbasis kompetensi juga dapat menghasilkan wirausaha baru, sehingga menciptakan lapangan kerja.

b. Pelaksanaan Job Fair dan Perluasan Informasi Pasar Kerja

Kegiatan job fair (offline) yang dilaksanakan secara rutin mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan secara lebih efektif.

c. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Terjadinya perselisihan hubungan industrial disebabkan antara pekerja dan perusahaan terdapat perbedaan pendapat terkait

Perselisihan Hak, Perselisihan Kepentingan, Perselisihan PHK dan Perselisihan antar SP/SB hanya dalam satu Perusahaan. Pelaksanaan Bimtek, FGD terkait pentingnya hubungan industrial yang hamonis antara pengusaha dan pekrja untuk kelangsungan hidup/ pengembangan Perusahaan.

11. Tingkat Kemiskinan

Beberapa faktor penyebab tidak tercapainya indikator Tingkat Kemiskinan:

- Ketimpangan Ekonomi dan Akses Modal, Akses Permodalan Usaha Kecil Menengah Bagi Kelompok Penerima Manfaat/KPM yang menghambat Kelompok Miskin Naik Kelas;
- Basis Data yang Belum Up-to-date menyebabkan Bantuan Sosial masih belum Tepat sasaran (Naik Status Sosial Sudah Tidak Miskin lagi, Pindah Alamat, Sudah meninggal); dan
- Masih Fokus pada Bantuan Langsung Tunai/BLT atau Bantuan Sosial Sementara, Tanpa diikuti dengan Pemberdayaan Ekonomi berkelanjutan, cenderung membuat Masyarakat tergantung dan tidak meningkatkan taraf Hidup mereka secara Permanen.

12. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Realisasi PDRB per kapita Kota Bekasi Tahun 2025 sebesar Rp52,51 juta melampaui target RPJMD sebesar Rp48,98–49,34 juta. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja ekonomi daerah berjalan dengan baik dan mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat serta efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah. Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Penguatan Ekonomi Berbasis Kerakyatan

Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan koperasi mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi produktif di tingkat lokal, sehingga meningkatkan nilai tambah sektor perdagangan dan jasa dalam pembentukan PDRB.

2. Peningkatan Kapasitas dan Daya Saing Usaha

Perbaikan kualitas produk, peningkatan kompetensi pelaku usaha, serta perluasan akses pasar berdampak pada meningkatnya produktivitas dan skala usaha sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Peningkatan Kesempatan Kerja dan Kualitas Tenaga Kerja

Fasilitasi di bidang ketenagakerjaan, termasuk peningkatan kompetensi dan perluasan akses kerja, turut mendorong terserapnya tenaga kerja secara lebih optimal. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja dan produktivitas tenaga kerja berimplikasi langsung terhadap kenaikan pendapatan per kapita.

4. Terjaganya Stabilitas Daya Beli Masyarakat

Upaya menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi daerah mendukung keberlangsungan konsumsi rumah tangga sebagai komponen utama pembentuk PDRB dari sisi pengeluaran.

13. Rasio Gini

Besarnya Gini Rasio di suatu daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berhubungan, antara lain laju pertumbuhan penduduk, laju pertumbuhan nilai investasi, laju pertumbuhan PDRB per kapita, laju pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, upah minimum provinsi, peningkatan sektor perdagangan dan jasa, peningkatan pengeluaran per kapita, laju inflasi, serta indeks pembangunan manusia.

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan pada tahun 2025 untuk meningkatkan capaian kinerja atas indikator kinerja utama penurunan Gini Rasio antara lain sebagai berikut:

1. Merencanakan dan membuat kegiatan berbasis outcome dan data terpadu guna mencapai tujuan dan sasaran;
2. Melakukan koordinasi berjenjang dan kontinyu antara Dinas Sosial dengan Dinas/Badan penanggung jawab urusan;
3. Monitoring secara berkala terhadap capaian Indikator sehingga memudahkan dalam mengevaluasi dan mengambil langkah tindak lanjut; dan

4. Keselarasan antara program dan kegiatan berbasis pemberdayaan PSKS yang diampu Dinas Sosial sehingga terdapat peran PSKS dalam peningkatan Capaian Indikator

14. Indeks Daya Saing Daerah

Faktor-faktor penyebab keberhasilan dan peningkatan kinerja dapat dikelompokkan ke dalam 4 komponen utama dan 12 pilar dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Lingkungan Pendukung

a) Institusi yang kuat

Keberhasilan terjadi apabila:

- Reformasi birokrasi berjalan baik
- Transparansi anggaran meningkat
- Pencegahan korupsi efektif
- Keamanan dan kepastian hukum terjaga

Dampak: Meningkatkan kepercayaan investor dan efisiensi pelayanan publik.

b) Infrastruktur Berkualitas

- Jalan, pelabuhan, bandara memadai
- Rasio elektrifikasi tinggi
- Akses air bersih meningkat
- Infrastruktur logistik efisien

Dampak: Menurunkan biaya produksi dan distribusi

c) Adopsi TIK Tinggi

- Jangkauan 4G luas
- Pengguna internet tinggi
- Transformasi digital sektor publik & bisnis

Dampak: Efisiensi transaksi & percepatan inovasi.

d) Stabilitas Ekonomi Makro

- Inflasi terkendali
- Pertumbuhan ekonomi stabil
- Investasi meningkat
- Kapasitas fiskal kuat

Dampak: Menciptakan iklim usaha yang kondusif.

2. Sumber Daya Manuis

a) Kesehatan

- Angka harapan hidup tinggi
- Akses layanan Kesehatan baik

Dampak: Produktivitas tenaga kerja meningkat.

b) Keterampilan

- Keterampilan digital meningkat
- Tenaga kerja mudah ditemukan

Dampak: Daya saing industri meningkat

3. Pasar yang Efisien

a) Pasar Produk

- Persaingan usaha sehat
- UMKM mampu bersaing
- Minim monopoli

b) Pasar Tenaga Kerja

- Upah kompetitif
- Mobilitas tenaga kerja tinggi
- Kesenjangan gender terjaga

c) Sistem Keuangan

- Akses kredit tinggi
- KUR tersalurkan optimal
- NPL rendah
- Pembiayaan UMKM meningkat

d) Ukuran Pasar

- PDRB besar
- Daya beli kuat
- Perdagangan aktif

Dampak umum komponen pasar: Meningkatkan skala produksi dan efisiensi ekonomi.

4. Ekosistem Inovasi

a) Dinamika Bisnis

- Pertumbuhan NIB tinggi
- Kemudahan memulai usaha
- Pelayanan publik cepat

b) Kapabilitas Inovasi

- Belanja riset meningkat
- Publikasi ilmiah banyak

- Paten & KI meningkat
- Klaster industri berkembang

Dampak: Mendorong nilai tambah ekonomi dan pertumbuhan jangka Panjang.

15. Indeks Harmoni

Faktor-faktor penyebab keberhasilan pencapaian target ini, antara lain:

- 1) Melakukan sinkronasi di dalam menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah (Teknokratik). Sinkronasi tersebut dilakukan dengan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang selaras dengan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, RPJPD Kota Bekasi, RPJMD Provinsi dan Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, serta RPJMN Kemendagri dan Renstra Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum (PUM) Kemendagri RI;
- 2) Dukungan dana dari Pemerintah Kota Bekasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi;

Terbangunnya koordinasi yang baik diantara stakeholder terkait, Badan Kesbangpol bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), dan Forkopimda saling sinergis dalam rangka membangun kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM di Kota Bekasi.

16. Indeks Reformasi Birokrasi

Beberapa faktor pendukung yang menyebabkan nilai IRB Kota Bekasi tahun 2025 naik antara lain:

- Tim RB General dan Tematik sudah dapat menyusun rencana aksi yang dapat menjadi rujukan dalam pelaksanaan kinerja RB;
- Masing-masing tim RB sudah mempunyai komitmen dalam melaksanakan dan meningkatkan kualitas nilai RB;
- Adanya komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan RB di Kota Bekasi; dan

- Terdapat sistem penilaian RB Perangkat Daerah di Kota Bekasi melalui aplikasi SURABI dari Provinsi Jawa Barat yang memotivasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan penilaian mandiri RB.

17. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik

Beberapa faktor pendukung yang menyebabkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kota Bekasi tahun 2025 naik antara lain:

- ✓ Pelaksanaan SKM dilakukan secara berkala (per triwulan), hal ini menyebabkan dapat diketahuinya kelemahan atas pelayanan sehingga dapat dilaksanakan perbaikan dengan cepat dan tepat;
- ✓ Terdapatnya aplikasi Sistem Survei Kepuasan Masyarakat (Sisukma) Kota Bekasi yang digunakan salah satunya dalam monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan pelayanan public baik oleh UPP maupun oleh Bagian Organisasi selaku Pembina; dan
- ✓ Adanya respon yang cepat dari UPP atas setiap hasil SKM yang dilakukan antara lain respon dalam pengaduan layanan.

18. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Beberapa faktor pendukung yang menyebabkan nilai SAKIP Kota Bekasi tahun 2025 naik yaitu:

- ✚ Sudah adanya rapat koordinasi yang dilaksanakan secara berkala dalam melakukan evaluasi rencana aksi;
- ✚ Adanya Sistem e-Sakip yang mendukung Perangkat Daerah untuk melakukan pelaporan dokumen sehingga lebih tertib administrasi; serta
- ✚ Terdapat peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan serta evaluasi kinerja Sakip.

19. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Faktor Penyebab Capaian Dimensi Pelaksanaan Anggaran antara lain pada pengukuran IPKD Tahun Ukur 2025 menjadi aspek yang memerlukan perhatian khusus dengan raihan skor 7,8819. Nilai ini merupakan yang terendah dibandingkan dimensi lainnya

dan menjadi faktor utama yang menarik turun akumulasi nilai IPKD Kota Bekasi ke peringkat "C" (Perlu Perbaikan). Berdasarkan evaluasi internal dan tinjauan performa fiskal, terdapat beberapa faktor fundamental yang menyebabkan rendahnya capaian pada dimensi ini:

1. Pola Serapan Anggaran yang Belum Proporsional

Salah satu indikator utama dalam dimensi ini adalah konsistensi penyerapan anggaran per triwulan. Diidentifikasi bahwa masih terdapat pola penumpukan realisasi belanja di akhir tahun anggaran (Triwulan IV). Hal ini disebabkan oleh keterlambatan dimulainya proses pengadaan barang dan jasa pada proyek-proyek strategis di awal tahun, sehingga progres keuangan tidak berjalan linier dengan progres fisik pada semester pertama. Rendahnya serapan di awal tahun memberikan bobot penilaian yang kecil dalam variabel efektivitas pelaksanaan anggaran.

2. Kendala Administratif dan Adaptasi Sistem Informasi

Transisi penuh penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI) dalam proses penatausahaan keuangan menuntut adaptasi teknis yang masif di tingkat Perangkat Daerah. Kendala teknis pada validasi dokumen pertanggungjawaban serta sinkronisasi data realisasi antara sistem lokal dan pusat seringkali menghambat kecepatan pencairan anggaran. Selain itu, adanya ketidaksesuaian antara perencanaan kas (SPD) dengan kebutuhan riil di lapangan menyebabkan terjadinya *idle cash* yang menurunkan nilai efisiensi pengelolaan kas daerah.

3. Gap Realisasi pada Belanja Modal

Rendahnya nilai juga dipicu oleh belum optimalnya realisasi pada sektor Belanja Modal. Beberapa kendala lapangan, seperti permasalahan administrasi lahan atau perubahan desain teknis di tengah tahun anggaran, menyebabkan pelaksanaan kontrak mengalami keterlambatan (*shortfall*). Hal ini berdampak langsung pada variabel penilaian yang mengukur rasio realisasi belanja terhadap target yang telah ditetapkan dalam APBD murni maupun perubahan.

4. Kelemahan dalam Monitoring dan Evaluasi Berjenjang

Belum optimalnya fungsi kontrol internal pada masing-masing Perangkat Daerah dalam memantau *timeline* pelaksanaan kegiatan menyebabkan deviasi antara rencana penarikan dana dengan realisasi menjadi cukup lebar. Tanpa mitigasi risiko yang cepat terhadap hambatan pelaksanaan di lapangan, efektivitas penggunaan sumber daya menjadi berkurang, yang secara otomatis terefleksi pada rendahnya skor IPKD pada dimensi ini.

20. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Sampai dengan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2025, nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2025 belum dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri. Oleh karena itu, capaian indikator Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) untuk Tahun 2025 belum dapat disajikan dan dicantumkan sebagai N/A (Not Available) pada tabel capaian kinerja. Perlu dijelaskan bahwa penilaian EPPD dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun sebelumnya. Dengan demikian, nilai EPPD Tahun 2024 yang telah dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri merupakan hasil evaluasi atas LPPD Tahun 2023, sehingga tidak merepresentasikan secara langsung capaian penyelenggaraan pemerintahan pada Tahun 2025. Atas dasar tersebut, nilai EPPD Tahun 2024 tidak digunakan sebagai realisasi capaian indikator kinerja Tahun 2025 dalam laporan ini. Nilai EPPD Tahun 2025 yang merupakan hasil evaluasi terhadap LPPD Tahun 2024 akan diumumkan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri.

21. Nilai Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah Terintegrasi Kota Bekasi

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa Pemerintah Kota Bekasi belum berhasil mencapai target kinerja, karena ada beberapa faktor yang menjadi penyebab, diantaranya:

1. Telah terbentuk Tim yang mendukung pelaksanaan SPIP Terintegrasi, namun dalam pelaksanaannya masing-masing Tim tidak sepenuhnya melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya

masing-masing, dan pada akhirnya penugasan kembali ditangani oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi, dalam hal ini Irban Urusan Pemerintahan Daerah selaku Tim Penjamin Kualitas. Sehingga penugasan menjadi tumpang tindih di Tim Penjamin Kualitas.

2. SPIP Terintegrasi bertujuan memberikan keyakinan memadai atas tercapainya efektivitas organisasi, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan regulasi. Melalui integrasi manajemen risiko, efektivitas pengendalian, dan kapabilitas APIP, sistem ini dirancang untuk meningkatkan maturitas tata kelola. Namun, implementasinya masih dirasakan memberatkan tim, sehingga hasil yang dicapai kurang maksimal.
3. Pada penilaian atas efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi belum ada peningkatan, karena kualitas penetapan sasaran, indikator dan target belum seluruhnya berorientasi hasil.
4. Implementasi manajemen risiko belum memadai, karena:
 - a. Identifikasi risiko kemitraan belum dilakukan secara memadai oleh seluruh Perangkat Daerah;
 - b. Risiko fraud belum diidentifikasi secara komprehensif;
 - c. Pemantauan risiko belum dilakukan secara memadai;
 - d. Pengomunikasian risk register dan rencana tindak pengendalian belum optimal.
5. Persepsi berdasarkan Survei Penilaian Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (SPI KPK) Tahun 2024 sebesar 63,26 (kategori Rentan) dan Tahun 2025 sebesar 70,58 (kategori Rentan), sehingga capaian SPI KPK masih berada pada Zona Merah. Kondisi ini berdampak pada parameter integritas organisasional dan persepsi terhadap pengelolaan korupsi.
6. Nama indikator kinerja tidak tepat, bukan “Nilai Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah Terintegrasi” tetapi “Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi”.
7. Satuan target tidak tepat, bukan “Poin” tetapi “Level”.

Berbagai kegiatan yang dilakukan dalam meningkatkan capaian indikator ini:



Rapat persiapan pelaksanaan SPIP-T Tahun 2025



Pendampingan Pelaksanaan Penilaian Mandiri (PM) kepada Perangkat Daerah



Koordinasi dengan Bappelitbangda



Pemaparan RPM SPIP-T bersama Wali Kota Bekasi dan Kepala Perangkat Daerah se-Kota Bekasi



Penyampaian Laporan Hasil PM kepada BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat

22. Indeks Kota Cerdas

Kenaikan hasil evaluasi mandiri Implementasi Ekosistem Kota Cerdas Bekasi Tahun 2025 didasari sebagai berikut:

- 1. Kenaikan tata kelola pemerintahan yang lebih baik seperti kinerja kesehatan fiskal:
 - a. Pemulihan Opini Laporan Keuangan (WTP)

- Transisi dari WDP ke WTP: Setelah mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2023 (atas laporan tahun 2022) dan 2024 (atas laporan tahun 2023), Kota Bekasi berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada bulan Mei 2025 untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
 - Penyelesaian Masalah Aset: Kenaikan opini ini mencerminkan keberhasilan Pemkot dalam memperbaiki sistem pencatatan aset dan pengendalian internal yang sebelumnya menjadi temuan utama BPK.
- b. Peningkatan Kesehatan Fiskal dan Efisiensi
- Optimalisasi APBD: Pada akhir 2025, DPRD dan Pemkot Bekasi menyepakati struktur APBD 2026 senilai Rp6,7 triliun, menunjukkan kapasitas fiskal yang stabil untuk mendukung pembangunan daerah.
 - Efisiensi Anggaran: Sekretariat Daerah mencatat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 12,23% pada tahun 2024 dengan capaian indikator strategis yang melampaui target hingga 112,23%.
 - Kesehatan Fiskal Sektoral: Alokasi anggaran kesehatan tetap menjadi prioritas utama guna memastikan keberlanjutan program jaminan kesehatan masyarakat (LKM-NIK) yang terintegrasi.
- c. Penguatan Transparansi dan Pengawasan Internal
- Akuntabilitas Publik: Opini WTP yang diraih pada 2025 dinilai sebagai bukti pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan profesional oleh jajaran pemerintah daerah bersama DPRD.
 - Tindak Lanjut Rekomendasi: Meskipun masih terus ditingkatkan, progres tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK menjadi salah satu faktor kunci dalam perbaikan nilai tata kelola secara keseluruhan.
- d. Transformasi Layanan Publik
- Pemerataan Fasilitas: Sebagai bagian dari tata kelola yang melayani, Pemkot Bekasi telah memastikan ketersediaan 56 Puskesmas di seluruh kelurahan pada awal

2025 untuk meningkatkan indeks pembangunan kesehatan masyarakat.

2. Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LKPPD):

a. Status Kinerja Tahun 2024

Pada tahun 2024, evaluasi kinerja didasarkan pada laporan penyelenggaraan tahun sebelumnya dengan fokus pada pemulihan akuntabilitas.

- **Capaian IKU:** Secara umum, Sekretariat Daerah dan perangkat daerah strategis mencatatkan capaian realisasi kinerja rata-rata sebesar 112,23%, yang dikategorikan Sangat Baik.
- **Efisiensi Anggaran:** Pemerintah Kota Bekasi berhasil melakukan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 12,23% dari total pagu yang ditetapkan.
- **Fokus Perbaikan:** Prioritas pada tahun ini adalah penyelarasan data indikator makro (kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing) untuk memperbaiki skor Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).

b. Status Kinerja Tahun 2025

Tahun 2025 menjadi tahun "emas" bagi performa birokrasi Kota Bekasi dengan raihan berbagai predikat tertinggi nasional.

- **Peringkat Nasional Pelayanan Publik:** Kota Bekasi berhasil menempati Peringkat ke-6 Nasional dalam kinerja penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan hasil PEKPPP Tahun 2025.
- **Predikat Nilai A:** Meraih predikat Tertinggi (A) dari Kementerian PANRB untuk penghargaan pelayanan publik.
- **Inovasi Daerah:** Kota Bekasi dinobatkan sebagai Kota Terinovatif Peringkat ke-3 Nasional pada akhir 2025, yang menunjukkan efektivitas tata kelola dalam menghadirkan solusi pelayanan baru.
- **Status EPPD:** Melalui Rapat Koordinasi Peningkatan LPPD, Pemerintah Kota Bekasi menargetkan skor kinerja yang berprestasi tinggi secara nasional untuk diusulkan

menerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti
Praja Nugraha

3. Kenaikan Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Bekasi:

- Tahun 2024: Meraih skor 3,83 dengan predikat Sangat Baik.
- Tahun 2025: Mengalami peningkatan menjadi skor 3,96 dengan predikat Sangat Baik.

Catatan Kenaikan: Tren ini menunjukkan komitmen Kota Bekasi dalam digitalisasi layanan publik, di mana nilai tersebut melonjak signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang hanya berada di angka 3,01 (Predikat Baik). Kenaikan pada 2025 didorong oleh penguatan integrasi sistem informasi antar perangkat daerah dan peningkatan kualitas layanan digital kepada masyarakat.

4. Demikian juga pada Dimensi Smart Living, terjadi Peningkatan Kualitas Hidup (Smart Living) diantaranya pada peningkatan persentase balita dengan imunisasi lengkap serta cakupan persalinan dengan tenaga kesehatan di Kota Bekasi:

- Capaian Target Maksimal (100%): Jika 2024 masih dalam tahap mengejar standar minimal nasional (95%), tahun 2025 berhasil menetapkan dan mengawal target 100% Imunisasi Dasar Lengkap serta cakupan persalinan nakes yang merata.
- Kematangan Digital (Aplikasi ASIK): Tahun 2025 telah mencapai sinkronisasi penuh antara data lapangan dengan sistem digital nasional. Hal ini menghilangkan kendala data ganda atau manual yang masih sering terjadi pada masa transisi 2024.
- Aksesibilitas Total (56 Puskesmas): Kelebihan fisik yang nyata adalah operasional penuh 56 Puskesmas di seluruh kelurahan. Ini berarti tidak ada lagi hambatan geografis bagi warga untuk mengakses layanan kesehatan dasar.
- Validasi Prestasi Nasional: Keunggulan mutlak tahun 2025 adalah raihan "Hat-trick" 3 Penghargaan Kesehatan Nasional. Ketiga penghargaan tersebut adalah:
 - Penghargaan Capaian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Terbaik: Diberikan atas keberhasilan Kota Bekasi mencapai

target imunisasi 100% dan inovasi dalam pelacakan balita Zero Dose melalui integrasi data digital.

- Penghargaan Penanggulangan Penyakit Menular Terbaik: Apresiasi atas efektivitas sistem surveilans dan penanganan penyakit menular (seperti HIV/AIDS dan TBC) yang terintegrasi dengan layanan Puskesmas 24 jam.
- Penghargaan Kota Sehat (Swastisaba Wistara): Predikat tertinggi untuk kota yang berhasil menyinergikan kebersihan lingkungan, fasilitas kesehatan merata (56 Puskesmas), dan perilaku hidup sehat masyarakat secara berkelanjutan.

- Ini membuktikan bahwa kualitas layanan bukan lagi sekadar rencana (seperti di 2024), melainkan prestasi yang diakui.
- Resiliensi Penanganan Stunting: Keberhasilan mempertahankan posisi Terbaik ke-3 Nasional menunjukkan bahwa sistem kesehatan 2025 sudah sangat stabil dan mampu memberikan dampak jangka panjang bagi kualitas hidup balita.

5. Pada sisi dimensi Smart Society terdapat nilai peningkatan terhadap pengembangan aplikasi pendukung Smart City serta peningkatan pada pengembangan literasi Smart City:

Perubahan Layanan call center 1500444 (berbayar) menjadi layanan *call center* 112 (gratis) adalah "pintu masuk" utama bagi warga ke dalam ekosistem digital. Keberhasilannya meningkatkan kepercayaan publik dan partisipasi aktif, dua variabel kunci yang membuat skor dimensi Smart Society di tahun 2025 jauh lebih unggul dibanding tahun-tahun sebelumnya

F. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) yang Telah Dicapai

1. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

Jumlah pegawai yang terlibat sebanyak 16 Pegawai, metode yang dilakukan yaitu Pengambilan Data Primer dan Skunder untuk kemudian diolah, anggaran yg terefisiensi sebesar Rp62.120.000 (pengurangan pada asisten tenaga ahli). Sementara keberadaan sarana

prasarana pada Tahun 2025 dan penggunaan waktu untuk pencapaian target sesuai timeline yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan penggunaan waktu untuk pencapaian target sesuai dengan timeline yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, maka penggunaan sumber daya ini jika dikaitkan dengan ketercapaian target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat dikatakan efisien.

2. Penurunan Intensitas Emisi GRK

Jumlah pegawai yang terlibat dari Tim Bapperida, Tim DPKPP, serta Tim DLH. Metode yang dilakukan yaitu menginput data pada aplikasi AKSARA yang disediakan oleh Provinsi Jawa Barat, kemudian dihitung menggunakan rumus penurunan intensitas emisi GRK. Anggaran yg terefisiensi: Rp.62.120.000 (pengurangan pada asisten tenaga ahli).

3. Indeks Pembangunan Manusia

Jumlah Sumber Daya Manusia yang dipergunakan untuk mencapai Indeks Pembangunan Manusia adalah sebanyak 220 orang, yang terdiri dari para Kepala Perangkat Daerah, Sekretaris Perangkat Daerah dan Kepala Sub Bagian/Bidang/Pejabat Fungsional yang membidangi dimensi pendidikan, dimensi kesehatan dan dimensi standar hidup layak pada 44 Perangkat Daerah. Sementara keberadaan sarana prasarana pada Tahun 2025 dan penggunaan waktu untuk pencapaian target sesuai timeline yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan penggunaan waktu untuk pencapaian target sesuai dengan timeline yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, maka penggunaan sumber daya ini jika dikaitkan dengan ketercapaian target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat dikatakan efisien.

Program yang mendukung pencapaian Indeks Pembangunan Manusia yaitu Dimensi Pendidikan, anggaran terbesar berada di Dinas Pendidikan yaitu pada Program Pengelolaan Pendidikan dan Program Pendidik dan tenaga Kependidikan. Adapun efisiensi anggaran atas capaian indikator Dimensi Pendidikan yaitu 6,5% atau setara Rp128.166.199.137,-.

4. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek)

Upaya percepatan penurunan stunting di Kota Bekasi merupakan prioritas strategis yang menuntut pengelolaan sumber daya secara efisien, terintegrasi, dan tepat guna. Efisiensi dalam konteks ini tidak hanya diukur dari penyerapan anggaran, tetapi dari sejauh mana sumber daya yang ada—baik fiskal, manusia, maupun sarana prasarana—mampu memberikan dampak nyata terhadap perbaikan status gizi balita di Kota Patriot. Salah satu efisiensi sumber daya meliputi SDM Kesehatan di Kota Bekasi. Berikut jumlah tenaga kesehatan yang berkontribusi dalam Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting di Kota Bekasi:

Profesi	Jumlah SDM Kesehatan
	Kota Bekasi
Kebidanan	424
Kesehatan Masyarakat	64
Kesehatan Lingkungan	44
Nutrisionis	46

Melalui prinsip efisiensi ini, Pemerintah Kota Bekasi berkomitmen untuk memaksimalkan setiap potensi sumber daya guna mencapai target prevalensi stunting yang lebih rendah, sekaligus menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil (result-oriented).

5. Indeks Pembangunan Keluarga

Jumlah Sumber Daya Manusia yang dipergunakan untuk mencapai Indeks Pembangunan Keluarga adalah sebanyak 48 orang, yang terdiri dari para Kepala Perangkat Daerah, Sekretaris Perangkat Daerah dan Kepala Sub Bagian/Bidang/Pejabat Fungsional. Sementara keberadaan sarana prasarana pada Tahun 2025 dan penggunaan waktu untuk pencapaian target sesuai timeline yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan penggunaan waktu untuk pencapaian target sesuai dengan timeline yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, maka penggunaan sumber daya ini jika dikaitkan dengan ketercapaian target Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) dapat dikatakan efisien.

Program yang mendukung pencapaian Indeks Pembangunan Keluarga yaitu Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dan

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS). Adapun efisiensi anggaran atas capaian indikator iBangga yaitu 9,79% atau setara Rp1.664.942.845,-

6. Indeks Ketimpangan Gender

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk menilai sejauh mana input berupa anggaran, SDM, dan sarana prasarana telah dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pencapaian sasaran strategis, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, serta pengarusutamaan gender yang berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG).

Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi adalah sebanyak 37 orang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang terdiri dari 24 orang Pegawai Negeri Sipil PNS), sedangkan sisanya sebanyak 13 orang adalah PPPK.

Tabel 2.99
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	ASN		PPPK		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	0	0	0	0	0
2	SMA Sederajat	0	3	4	1	8
3	D3	1	1	0	0	2
4	S1	3	7	1	6	17
5	S2	0	8	0	0	8
JUMLAH		4	19	5	7	36

Sumber Data : Sub Bagian Tata Usaha DPPPA Kota Bekasi

Jumlah SDM pada bidang yang menjadi pengampu capaian kinerja IKG adalah:

Sekretariat : 13 orang

Bidang PUGPPKK : 9 Orang

Bidang PPKPA : 3 Orang

Tabel 2.100
Pagu Anggaran Program Penunjang Indikator Kineja
Indeks Ketimpangan Gender (Ikg)
Tahun 2024 Dan Tahun 2025

NO	NAMA PROGRAM	PAGU ANGGARAN 2024 (Rp)	PAGU ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2025 (Rp)	CAPAIAN ANGGARAN 2024 (Rp)	CAPAIAN ANGGARAN 2025 (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.937.092.360,00	9.048.727.168	7.567.758.113,00	7.839.465.239	84,68	86,64
2	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	5.846.745.000,00	4.868.229.501	5.583.009.953,00	4.428.465.883	95,49	90,97
3	Program Perlindungan Perempuan	933.500.000,00	1.116.676.564	861.221.166,00	970.790.519	92,26	86,94

Sumber data : LKIP DPPP Kota Bekasi Tahun 2025, diolah

Efisiensi anggaran pada masing-masing program pendukung Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan efisiensi sebesar 15.32% pada tahun 2024 dan 13.36% pada tahun 2025,
2. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan dengan efisiensi sebesar 4.51% pada tahun 2024 dan efisiensi sebesar 9.03 pada tahun 2025,
3. Program Perlindungan Perempuan dengan efisiensi sebesar 7.74% pada tahun 2024 dan efisiensi sebesar 13.06% pada tahun 2025.

Metode yang digunakan dalam Efisiensi penggunaan sumber daya adalah:

- 1) Pengendalian realisasi melalui monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan kesesuaian antara target fisik dan penyerapan anggaran yang dilakukan setiap bulan melalui aplikasi simplerbang.bekasikota.go.id, dilakukan setiap triwulan melalui aplikasi siencang.bekasikota.go.id dan sisukma.bekasikota.go.id dan setiap tahun melalui aplikasi e-sakip.bekasikota.go.id
- 2) Optimalisasi sumber daya manusia melalui pembagian peran yang proporsional dan pemanfaatan tim lintas sector dengan bekerjasama dengan para stakeholder;

- 3) Sinergi dan kolaborasi dengan perangkat daerah serta mitra untuk menghindari duplikasi program; serta
- Pemanfaatan sarana prasarana yang tersedia secara maksimal guna menekan biaya operasional dengan menggunakan kantor/ruang rapat di kelurahan/kecamatan dalam melakukan sosialisasi/peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

7. Nilai Kota Layak Anak

Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi adalah sebanyak 37 orang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang terdiri dari 24 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), sedangkan sisanya sebanyak 13 orang adalah PPPK.

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	ASN		PPPK		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	0	0	0	0	0
2	SMA Sederajat	0	3	4	1	8
3	D3	1	1	0	0	2
4	S1	3	7	1	6	17
5	S2	0	8	0	0	8
JUMLAH		4	19	5	7	36

Sumber Data : Sub Bagian Tata Usaha DPPPA Kota Bekasi

Jumlah SDM pada bidang yang menjadi pengampu capaian kinerja IKG adalah:

Bidang PHA : 6 Orang

Bidang PPKPA : 3 Orang

NO	NAMA PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI		FISIK	EFISIENSI SUMBER DAYA
			Rp.	%	%	
1	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1.652.109.514	1.542.521.179	93,37	100	6,63
2	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1.451.848.000	1.319.746.380	90,9	92,95	9,1
	JUMLAH	3.103.957.514	2.862.267.559	92,2134902	96,47	7,79

Berdasarkan data diatas, total pagu anggaran program yang mendukung capaian kinerja Nilai Kota Layak Anak (KLA) adalah sebesar Rp3.103.957.514 dengan realisasi sebesar Rp. 2.862.267.559 atau 92,21%, serta capaian fisik 96,47% dengan efisiensi sumber daya rata-rata 7,79%.

Metode yang digunakan dalam Efisiensi penggunaan sumber daya adalah:

- 1) Pengendalian realisasi melalui monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan kesesuaian antara target fisik dan penyerapan anggaran yang dilakukan setiap bulan melalui aplikasi simplerbang.bekasikota.go.id, dilakukan setiap triwulan melalui aplikasi siencang.bekasikota.go.id dan sisukma.bekasikota.go.id dan setiap tahun melalui aplikasi e-sakip.bekasikota.go.id
- 2) Optimalisasi sumber daya manusia melalui pembagian peran yang proporsional dan pemanfaatan tim lintas sector dengan bekerjasama dengan para stakeholder;
- 3) Sinergi dan kolaborasi dengan perangkat daerah serta mitra untuk menghindari duplikasi program; serta
- 4) Pemanfaatan sarana prasarana yang tersedia secara maksimal guna menekan biaya operasional dimana tahun 2025 kantor UPTD PPA Kota Bekasi masih bergabung dengan kantor DPPPA Kota Bekasi dan baru memiliki kantor sendiri di akhir tahun 2025

8. PDRB Per Kapita

Jumlah Sumber Daya Manusia yang dipergunakan untuk mencapai PDRB Per Kapita adalah sebanyak 147 orang, yang terdiri dari para Kepala Perangkat Daerah, Sekretaris Perangkat Daerah dan Kepala Sub Bagian/Bidang/Pejabat Fungsional. Sementara keberadaan sarana prasarana pada Tahun 2025 dan penggunaan waktu untuk pencapaian target sesuai timeline yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan penggunaan waktu untuk pencapaian target sesuai dengan timeline yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, maka penggunaan sumber daya ini jika dikaitkan dengan ketercapaian target PDRB Per Kapita dapat dikatakan efisien.

Program yang mendukung pencapaian PDRB Per Kapita terdiri dari 13 Program, adapun efisiensi anggaran atas capaian indikator PDRB Per Kapita yaitu 18,74% atau setara Rp4.078.656.289,-

9. Indeks Ketahanan Pangan

Jumlah Sumber Daya Manusia yang dipergunakan untuk mencapai Indeks Ketahanan Pangan adalah sebanyak 70 orang, yang terdiri dari para Kepala Perangkat Daerah, Sekretaris Perangkat Daerah dan Kepala Sub Bagian/Bidang/Pejabat Fungsional. Sementara keberadaan sarana prasarana pada Tahun 2025 dan penggunaan waktu untuk pencapaian target sesuai timeline yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan penggunaan waktu untuk pencapaian target sesuai dengan timeline yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, maka penggunaan sumber daya ini jika dikaitkan dengan ketidakketercapaian target Indeks Ketahanan Pangan dapat dikatakan tidak efisien.

Program yang mendukung pencapaian Indeks Ketahanan Pangan yaitu Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dan Program Pengawasan Keamanan Pangan. Adapun efisiensi anggaran atas capaian indikator iBangga yaitu 11,48% atau setara Rp69.736.044,-.

10. Tingkat Pengangguran Terbuka

Jumlah Pegawai yang Terlibat pada kegiatan Job Fair melibatkan 15 (lima belas) orang. Metode yang dilakukan yaitu Pelaksanaan kegiatan Job Fair dilaksanakan secara tatap muka/Offline. Anggaran yang terealisasi dari Pagu Anggaran Rp150.000.000, realisasi anggarannya Rp144.559.000.

11. Tingkat Kemiskinan

Jumlah Sumber Daya Manusia yang dipergunakan untuk mencapai target Tingkat Kemiskinan sebanyak 88 orang personil dimana didalamnya 21 orang merupakan pejabat struktural dan 67 orang merupakan pelaksana, dari 67 orang pelaksana tersebut sebanyak 10 orang diangkat sebagai anggota Tim TKPKD. Sementara keberadaan sarana prasarana pada tahun 2025 cukup memadai dan penggunaan

waktu untuk pencapaian target sesuai dengan timeline yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, maka penggunaan sumber daya ini jika dikaitkan dengan ketidaktercapaian target Tingkat Kemiskinan dapat dikatakan tidak efisien.

Program yang mendukung untuk mewujudkan penurunan Tingkat Kemiskinan yaitu Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, dan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, efisiensinya sebesar 19,17% atau setara dengan Rp2.407.967.834,-.

12. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Jumlah Sumber Daya Manusia yang dipergunakan untuk mencapai Laju Pertumbuhan Ekonomi adalah sebanyak 173 orang, yang terdiri dari para Kepala Perangkat Daerah, Sekretaris Perangkat Daerah dan Kepala Sub Bagian/Bidang/Pejabat Fungsional. Sementara keberadaan sarana prasarana pada Tahun 2025 dan penggunaan waktu untuk pencapaian target sesuai timeline yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan penggunaan waktu untuk pencapaian target sesuai dengan timeline yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, maka penggunaan sumber daya ini jika dikaitkan dengan ketercapaian target Laju Pertumbuhan Ekonomi dapat dikatakan efisien.

13. Rasio Gini

Jumlah Sumber Daya Manusia yang dipergunakan untuk mencapai target Gini Ratio sebanyak 88 orang personil dimana didalamnya 21 orang merupakan pejabat struktural dan 67 orang merupakan pelaksana, dari 67 orang pelaksana tersebut sebanyak 10 orang diangkat sebagai anggota Tim Unit Reaksi Cepat (URC) Dinas Sosial Kota Bekasi. Tim URC tersebut bertugas menangani langsung kasus Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terjadi di lapangan, baik melalui laporan masyarakat maupun instansi pemerintah lainnya. Disamping aparaturnya Dinas Sosial Kota Bekasi, terdapat juga 121 orang Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan 12 orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang bertugas mendampingi PMKS, baik lansia terlantar, disabilitas terlantar, anak terlantar serta penanganan korban pasca terjadinya bencana alam

dan bencana sosial, disamping itu terdapat 49 orang Taruna Siaga Bencana yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi Nomor 406/020-Dinsos.Set tentang Pengurus Forum Koordinasi Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Kota Bekasi, sementara keberadaan sarana prasarana pada tahun 2025 cukup memadai dan penggunaan waktu untuk pencapaian target sesuai dengan timeline yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, maka penggunaan sumber daya ini jika dikaitkan dengan ketercapaian target Gini Ratio dapat dikatakan efisien.

14. Indeks Daya Saing Daerah

Analisis efisiensi sumber daya di Kota Bekasi dilakukan melalui pemanfaatan data sekunder yang bersumber dari statistik resmi berbagai kementerian, lembaga, dan institusi. Pengukuran ini mengintegrasikan data dari produsen data nasional seperti Badan Pusat Statistik (BPS) untuk indikator ketenagakerjaan dan air minum, Kementerian PU untuk kualitas infrastruktur, hingga PLN untuk rasio elektrifikasi. Penggunaan data sekunder ini memastikan bahwa evaluasi terhadap pilar-pilar peningkat efisiensi, seperti pasar produk dan pasar tenaga kerja, didasarkan pada basis data yang valid, kredibel, dan dapat dibandingkan antarwilayah secara objektif.

Melalui pendekatan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) yang memanfaatkan kalkulator simulasi IDSD, Kota Bekasi dapat memproyeksikan dampak perubahan nilai indikator tertentu terhadap skor pilar secara keseluruhan, sehingga alokasi sumber daya di masa depan dapat diarahkan secara lebih terarah dan efisien untuk mencapai target pembangunan daerah.

15. Indeks Harmoni

Untuk melaksanakan program-program di atas, Badan Kesbangpol Kota Bekasi mengaktifkan penggunaan seluruh aparatur badan yang berjumlah 47 orang. Program-program di atas dilaksanakan melalui beberapa metode, antara lain:

- 1) Kolaborasi antar stakeholder. Badan Kesbangpol berkolaborasi dengan Ormas, Sekolah Menengah Atas di Kota Bekasi, dan beberapa perguruan tinggi untuk menyebarluaskan pesan-pesan

harmoni, toleran, dan kerukunan antar umat beragama di Kota Bekasi;

- 2) Melalui pemberdayaan Organisasi Masyarakat. Upaya ini dilakukan melalui pemberian Hibah Anggaran TA 2025 kepada beberapa Ormas yang terdapat di Kota Bekasi.

Untuk mendukung program efisiensi penggunaan anggaran di tingkat Kota, Badan Kesbangpol juga melakukan efisiensi anggaran di TA. 2025. Alokasi anggaran Bakesbangpol Kota Bekasi pada tahun 2025 sebesar Rp46.615.263.760,-. Kemudian dilakukan efisiensi anggaran sebesar Rp8.064.899.710,- atau 17.30% dari total anggaran. Sehingga, total pagu anggaran Badan Kesbangpol pada TA. 2025 menjadi Rp38.550.364.050,- dengan rincian sebagai berikut, Belanja Langsung Urusan (BLU) Rp4.091.502.803,- dan Belanja Hibah Rp18.183.672.000,- Seluruh Kegiatan sampai dengan akhir Desember 2025 dengan realisasi keuangan 87% dan realisasi fisik Kegiatan 97%.

16. Indeks Reformasi Birokrasi

Jumlah Sumber Daya Manusia yang dipergunakan untuk mencapai Indeks Reformasi Birokrasi sebanyak 220 orang, yang terdiri dari para Kepala Perangkat Daerah, Sekretaris Perangkat Daerah dan Kepala Sub Bagian/Bidang yang membidangi perencanaan pada 44 Perangkat Daerah. Sementara keberadaan sarana prasarana pada Tahun 2025 dan penggunaan waktu untuk pencapaian target sesuai timeline yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan penggunaan waktu untuk pencapaian target sesuai dengan timeline yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, maka penggunaan sumber daya ini jika dikaitkan dengan ketercapaian target Indeks Reformasi Birokrasi dapat dikatakan efisien.

Program yang mendukung pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi terdiri dari 14 Program, adapun efisiensi anggaran atas capaian indikator tersebut yaitu 32.07% atau setara Rp64.489.692.914,-.

17. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik

Jumlah Sumber Daya Manusia yang dipergunakan untuk mencapai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik sebanyak 220 orang, yang terdiri dari para Kepala Perangkat Daerah, Sekretaris

Perangkat Daerah dan Kepala Sub Bagian/Bidang yang membidangi perencanaan pada 44 Perangkat Daerah. Sementara keberadaan sarana prasarana pada Tahun 2025 dan penggunaan waktu untuk pencapaian target sesuai timeline yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan penggunaan waktu untuk pencapaian target sesuai dengan timeline yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, maka penggunaan sumber daya ini jika dikaitkan dengan ketercapaian target Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik dapat dikatakan efisien.

Program yang mendukung pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik yaitu 5 Program terkait pelayanan publik, adapun efisiensi anggaran atas capaian indikator tersebut yaitu 27.88% atau setara Rp31.225.702.256,-.

18. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Jumlah Sumber Daya Manusia yang dipergunakan untuk mencapai Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebanyak 220 orang, yang terdiri dari para Kepala Perangkat Daerah, Sekretaris Perangkat Daerah dan Kepala Sub Bagian/Bidang yang membidangi perencanaan pada 44 Perangkat Daerah. Sementara keberadaan sarana prasarana pada Tahun 2025 dan penggunaan waktu untuk pencapaian target sesuai timeline yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan penggunaan waktu untuk pencapaian target sesuai dengan timeline yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, maka penggunaan sumber daya ini jika dikaitkan dengan ketidaktercapaian target Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dapat dikatakan efisien.

Program yang mendukung pencapaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdiri dari 8 program, adapun efisiensi anggaran atas capaian indikator tersebut yaitu 44.95% atau setara Rp32.428.843.451,-.

19. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemerintah Kota Bekasi, melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), terus mengedepankan prinsip *lean management* dalam menjalankan fungsi penatausahaan keuangan

daerah. Efisiensi bukan hanya diartikan sebagai pengurangan biaya, melainkan optimalisasi output kinerja dengan penggunaan input yang paling rasional, baik dari sisi personel maupun alokasi anggaran operasional.

1. Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam mendukung pencapaian kinerja tahun 2025, BPKAD melakukan transformasi pola kerja melalui penguatan peran Pejabat Fungsional Perencana dan Pengelola Keuangan. Strategi utama yang dilakukan adalah Digitalisasi Alur Kerja, di mana penggunaan sistem informasi terintegrasi telah mengurangi beban administratif manual. Hal ini memungkinkan jumlah pegawai yang terlibat tetap ramping namun memiliki spesialisasi yang tinggi. Fokus SDM diarahkan pada pengawasan kualitas data dan verifikasi dokumen secara digital, yang secara signifikan memangkas waktu birokrasi koordinasi antarbidang (Anggaran, Perbendaharaan, dan Akuntansi). Dengan kompetensi yang terfokus, risiko kesalahan input data yang berdampak pada skor IPKD dapat diminimalisir secara berkelanjutan.

Tabel 1.1
Aparatur BPKAD Kota Bekasi
Berdasarkan Golongan Tahun 2025

NO	SATUAN UNIT KERJA	PNS				PPPK						JUMLAH
		GOLONGAN				GOLONGAN						
		IV	III	II	I	IX	VIII	VII	VI	V	IV	
1	Kepala Badan	1										1
2	Sekretaris	1										1
3	Kabid	4										4
4	Kasubag / Kasubid	1	9									10
5	Sekretariat	1	11	2	-	18	-	-	1	8	1	42
6	Bidang Anggaran	-	2	1	-	5	-	-	-	-	-	8
7	Bidang Perbendaharaan	-	10	5	-	7	-	-	3	3	-	28
8	Bidang Akuntansi	1	2	-	-	8	-	-	-	2	-	13
9	Bidang Aset	-	14	-	-	8	-	-	4	5	-	31
10	Jabatan Fungsional	1	24	-	-							25
JUMLAH		10	72	8	0	46			8	18	1	163
TOTAL PEGAWAI BPKAD		90				73						163

Tabel 1.2
Aparatur BPKAD Kota Bekasi Berdasarkan Pendidikan
Tahun 2025

NO	SATUAN UNIT KERJA	PNS				PPPK						JUMLAH
		GOLONGAN				GOLONGAN						
		IV	III	II	I	IX	VIII	VII	VI	V	IV	
1	S III	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	S II	8	15	-	-	-	-	-	-	-	-	23
3	S I	1	51	-	-	46	-	-	-	-	-	98
4	Diploma/Sederajat	-	3	4	-	-	-	-	8	-	-	15
5	SLTA/Sederajat	-	3	4	-	-	-	-	-	18	-	25
6	SLTP/Sederajat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
JUMLAH		10	72	8	-	46			8	18	1	163
TOTAL PEGAWAI BPKAD		90				73						163

Sumber: Dokumen LAKIP BPKAD 2025

2. Efisiensi Anggaran Operasional

Secara fiskal, BPKAD Tahun 2025 berhasil mengimplementasikan efisiensi pada belanja pendukung melalui transisi metode kerja. Pengalihan sebagian besar koordinasi teknis dari metode tatap muka fisik ke format Hybrid dan Digital telah memberikan kontribusi nyata dalam penghematan belanja alat tulis kantor (ATK), konsumsi, serta biaya perjalanan dinas dalam daerah. Selain itu, efisiensi anggaran dilakukan melalui Prioritas Belanja Berbasis Kinerja, di mana setiap rupiah anggaran dialokasikan secara ketat pada kegiatan yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas tata kelola keuangan, seperti bimtek pemutakhiran sistem dan rekonsiliasi data aset. Langkah ini memastikan bahwa anggaran yang tersedia digunakan untuk menyelesaikan akar permasalahan (seperti rendahnya skor pada dimensi pelaksanaan anggaran) ketimbang belanja rutin yang bersifat administratif semata.

Kesimpulan Efisiensi

Melalui metode koordinasi digital dan pemangkasan prosedur birokrasi yang redundan, BPKAD mampu menciptakan ruang fiskal yang lebih sehat. Efisiensi sumber daya ini menjadi modal penting bagi Pemerintah Kota Bekasi untuk melakukan akselerasi perbaikan pada dimensi-dimensi IPKD yang masih rendah, sehingga target pergeseran peringkat dari "C" menuju "B" di tahun

mendatang dapat tercapai tanpa harus membebani struktur APBD secara berlebihan.

20. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Jumlah Sumber Daya Manusia yang dipergunakan dalam upaya pencapaian Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) sebanyak 56 orang, yang terdiri atas unsur Perangkat Daerah pengampu indikator Nilai EPPD. Dukungan sarana dan prasarana pada Tahun 2025 relatif memadai serta pelaksanaan kegiatan telah mengacu pada timeline sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Namun demikian, apabila dikaitkan dengan belum tercapainya target Nilai EPPD, maka efektivitas pemanfaatan sumber daya tersebut masih perlu ditingkatkan agar lebih optimal dan berdampak langsung terhadap peningkatan capaian indikator.

Dalam rangka meningkatkan capaian indikator kinerja, Pemerintah Kota Bekasi perlu melakukan evaluasi komprehensif terhadap faktor-faktor yang memengaruhi hasil EPPD, khususnya pada aspek koordinasi antar Perangkat Daerah, ketepatan penyampaian data dukung, serta konsistensi pelaksanaan program dan kebijakan. Peningkatan kualitas pengendalian dan monitoring kinerja secara berkelanjutan menjadi langkah strategis untuk mendorong perbaikan dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efektif.

21. Nilai Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah Terintegrasi Kota Bekasi

Jumlah pegawai yang terlibat penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dilaksanakan oleh Tim yang telah terbentuk melalui Keputusan Wali Kota Bekasi, yang terdiri dari Tim Penilai Mandiri Tingkat Pemda, Tim Penilai Mandiri Tingkat Perangkat Daerah, dan Tim Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri, serta didukung oleh koordinator. Metode yang dilakukan dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yaitu dengan penyelenggaraan aktifitas Penilaian Mandiri (PM) oleh Tim Asesor Tingkat Pemda dan Tim Asesor Tingkat OPD yang kemudian dilakukan pemeriksaan final oleh Tim Penjaminan Kualitas

(PK) sebelum hasil PM nya disampaikan kepada BPKP selaku Tim Evaluator, yang terdiri tahapan sebagai berikut:

1) Tahap Persiapan

- a) Pembentukan Tim Asesor: Wali Kota Bekasi melalui Sekretaris Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Keputusan tentang Tim Asesor untuk melakukan PM;
- b) Penyusunan Rencana Kerja sebagai rencana kegiatan, pembagian tugas, dan jadwal penilaian;
- c) Diselenggarakan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman kepada seluruh Tim mengenai konsep SPIP terintegrasi.

2) Tahap Pelaksanaan (Penilaian Mandiri - PM)

Tim melakukan evaluasi atas dokumen perencanaan tahun berjalan, yaitu pada:

a) Struktur dan Proses

Tim PM melakukan penilaian maturitas SPIP yang tercermin dari pemenuhan 5 unsur SPIP (Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, Pemantauan).

b) Pencapaian Tujuan

Tim PM menilai atas kinerja tahun sebelumnya, meliputi efektivitas dan efisiensi, pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan peraturan.

c) Pengumpulan Bukti

Tim Asesor mengumpulkan bukti dukung berupa dokumen, wawancara, observasi, atau kuesioner.

d) Tim PM menyampaikan hasil PM kepada Tim PK.

3) Tahap Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance* - PK)

Tim PK melakukan validasi setelah PM selesai, pada proses ini dilakukan wajib dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah/Inspektorat).

4) Tahap Pelaporan dan Tindak Lanjut

- a) Menyusun laporan hasil penilaian maturitas SPIP Terintegrasi.
- b) Menindaklanjuti hasil penilaian (baik kelemahan maupun rekomendasi) digunakan untuk perbaikan pada tahun berikutnya (penyusunan anggaran dan mitigasi risiko).

- c) Menyampaikan laporan hasil PM kepada BPKP untuk dilakukan evaluasi.

Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi didukung anggaran sebesar Rp. 207.944.000 pada Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, Kegiatan Pendampingan Asistensi, Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah yang terealisasi sebesar Rp. 21.000.000 dan juga didukung Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Umum Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terealisasi sebesar Rp. 12.710.000, sehingga total anggaran terealisasi sebesar Rp. 33.710.000.

Untuk hasil efisiensi hanya dapat dianalisa atas Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, Kegiatan Pendampingan Asistensi, Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah, yang merupakan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pendukung langsung atas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa efisiensi anggaran atas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi adalah sebesar 89,90%, karena yang terserap hanyalah sebesar 10,10% dari total pagu anggaran yang disediakan.

22. Indeks Kota Cerdas

Berdasarkan kebijakan strategis dan realisasi anggaran tahun 2025, berikut adalah analisa terstruktur mengenai efisiensi sumber daya dalam bingkai Indeks Kota Cerdas (Smart City) Kota Bekasi:

1. Efisiensi Tata Kelola (Smart Governance)

Transformasi efisiensi dilakukan melalui desentralisasi operasional untuk mengurangi beban APBD terpusat.

Rasionalisasi Infrastruktur Digital: Pemerintah resmi menghapus anggaran terpusat untuk titik Wi-Fi gratis di taman dan kantor RW.

Optimalisasi Anggaran Hibah: Pendanaan internet dan operasional kantor RW kini dialokasikan melalui Dana Hibah RW Rp100 Juta.

Hal ini menghilangkan biaya pemeliharaan (maintenance) di tingkat dinas dan memastikan penggunaan kuota internet lebih tepat sasaran karena dikelola langsung oleh warga.

Matriks SPBE: Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mengurangi duplikasi aplikasi layanan publik, sehingga menghemat sumber daya server dan biaya pengembangan perangkat lunak.

2. Efisiensi Sumber Daya Lingkungan (Smart Environment)

Efisiensi dilakukan dengan menekan biaya pengelolaan sampah melalui pemberdayaan komunitas.

Program Bank Sampah RW: Program ini mewajibkan RW melakukan pemilahan sampah di sumbernya sebagai syarat pencairan dana hibah.

Reduksi Biaya Operasional TPA: Dengan aktifnya Bank Sampah dan program upcycling (seperti eco-brick), volume sampah yang diangkut ke TPA berkurang. Hal ini secara langsung mengefisiensikan biaya bahan bakar armada sampah dan memperpanjang usia pakai lahan pembuangan.

3. Efisiensi Sumber Daya Finansial (Smart Economy)

Peningkatan Efektivitas PAD: Hingga akhir 2025, Kota Bekasi mencatat pertumbuhan PAD sebesar 31,32% (YoY). Efisiensi tercapai melalui digitalisasi pajak daerah yang memangkas biaya pemungutan manual dan menutup celah kebocoran anggaran.

Prinsip Belanja Prioritas: Mengikuti instruksi efisiensi belanja nasional, anggaran yang dihemat dari pos rutin (seperti Wi-Fi publik) dialihkan untuk penguatan ekonomi kerakyatan dan bantuan modal melalui koperasi/UMKM lokal.

4. Efisiensi Infrastruktur & Ruang (Smart Living)

Integrasi Utilitas: Inisiasi proyek ducting (kabel bawah tanah) secara terpadu mencegah kerusakan jalan akibat penggalian berulang oleh vendor berbeda, yang selama ini menjadi pemborosan anggaran pemeliharaan jalan.

Pemanfaatan Aset Lokal: Balai warga dan taman kini berfungsi ganda sebagai pusat literasi digital yang dikelola mandiri, meningkatkan utilitas aset publik tanpa menambah beban biaya operasional pemerintah kota.

G. Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, baik level RPJMD maupun Renstra Perangkat Daerah. Untuk melihat apa saja program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 2.101

Jumlah Pagu Anggaran dan Realisasi Program Pendukung Indikator Kinerja Utama

Indikator	Program Prioritas	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase	Sisa Anggaran	Tingkat Efisiensi
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	5,697,790,430	3,759,992,306	65.99%	1,937,798,124	34.01%
	Program Penataan Bangunan Gedung	195,651,977,487	147,161,170,007	75.22%	48,490,807,480	24.78%
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	265,788,079,886	137,505,898,231	51.74%	128,282,181,655	48.26%
	Program Penyelenggaraan Jalan	355,139,579,791	311,892,593,502	87.82%	43,246,986,289	12.18%
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	27,620,894,600	9,905,047,180	35.86%	17,715,847,420	64.14%

Indikator	Program Prioritas	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase	Sisa Anggaran	Tingkat Efisiensi
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	100,627,784,330	78,877,738,190	78.39%	21,750,046,140	21.61%
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	226,864,673,814	224,502,642,646	98.96%	2,362,031,168	1.04%
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	11,993,230,442	10,439,933,416	87.05%	1,553,297,026	12.95%
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	28,059,465,292	23,723,070,995	84.55%	4,336,394,297	15.45%
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	38,205,531,714	26,731,105,360	69.97%	11,474,426,354	30.03%
	Program Pengelolaan Persampahan	425,537,317,693	332,402,266,696	78.11%	93,135,050,997	21.89%

Indikator	Program Prioritas	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase	Sisa Anggaran	Tingkat Efisiensi
	Program Penanggulangan Bencana	5,174,156,120	4,945,639,406	95.58%	228,516,714	4.42%
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	23,969,309,626	22,318,047,007	93.11%	1,651,262,619	6.89%
Total		1,710,329,791,225	1,334,165,144,942	78.01%	376,164,646,283	21.99%
Indikator	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase	Sisa Anggaran	Tingkat Efisiensi
Penurunan Intensitas Emisi GRK	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	11,993,230,442	10,439,933,416	87.05%	1,553,297,026	12.95%

Indikator	Program Prioritas	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase	Sisa Anggaran	Tingkat Efisiensi
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	28,059,465,292	23,723,070,995	84.55%	4,336,394,297	15.45%
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	38,205,531,714	26,731,105,360	69.97%	11,474,426,354	30.03%
	Program Pengelolaan Persampahan	425,537,317,693	332,402,266,696	78.11%	93,135,050,997	21.89%
Total		503,795,545,141	393,296,376,467	78.07%	110,499,168,674	21.93%
Indikator	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase	Sisa Anggaran	Tingkat Efisiensi
Indeks Pembangunan Manusia	Program Pengelolaan Pendidikan	657,708,271,573	594,965,356,832	90.46%	62,742,914,741	9.54%
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2,508,282,300	1,537,925,302	61.31%	970,356,998	38.69%

Indikator	Program Prioritas	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase	Sisa Anggaran	Tingkat Efisiensi
	Program Pembinaan Perpustakaan	1,052,116,160	974,805,702	92.65%	77,310,458	7.35%
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1,047,690,234,157	929,447,853,794	88.71%	118,242,380,363	11.29%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	33,767,596,742	32,578,806,707	96.48%	1,188,790,035	3.52%
	Program Kawasan Permukiman	16,965,100,000	14,205,331,993	83.73%	2,759,768,007	16.27%
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	49,184,080,635	45,903,278,155	93.33%	3,280,802,480	6.67%

Indikator	Program Prioritas	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase	Sisa Anggaran	Tingkat Efisiensi
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga					
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4,934,628,968	4,106,416,622	83.22%	828,212,346	16.78%
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	12,063,845,000	11,227,114,501	93.06%	836,730,499	6.94%
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	4,868,229,501	4,428,465,883	90.97%	439,763,618	9.03%
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	1,451,848,000	1,319,746,380	90.90%	132,101,620	9.10%
Total		1,832,194,233,036	1,640,695,101,871	89.55%	191,499,131,165	10.45%

Indikator	Program Prioritas	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase	Sisa Anggaran	Tingkat Efisiensi
Indikator	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase	Sisa Anggaran	Tingkat Efisiensi
Prevalensi Stunting pada Balita	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1,047,690,234,157	929,447,853,794	88.71%	118,242,380,363	11.29%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	33,767,596,742	32,578,806,707	96.48%	1,188,790,035	3.52%
	Program Kawasan Permukiman	16,965,100,000	14,205,331,993	83.73%	2,759,768,007	16.27%
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	49,184,080,635	45,903,278,155	93.33%	3,280,802,480	6.67%
Total		1,147,607,011,534	1,022,135,270,649	89.07%	125,471,740,885	10.93%

Indikator	Program Prioritas	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase	Sisa Anggaran	Tingkat Efisiensi
Indikator	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase	Sisa Anggaran	Tingkat Efisiensi
Indeks Pembangunan Keluarga	Program Peningkatan Kualitas Keluarga					
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4,934,628,968	4,106,416,622	83.22%	828,212,346	16.78%
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	12,063,845,000	11,227,114,501	93.06%	836,730,499	6.94%
	Total	16,998,473,968	15,333,531,123	90.21%	1,664,942,845	9.79%
Indikator	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase	Sisa Anggaran	Tingkat Efisiensi
Indeks Ketimpangan Gender	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	4,868,229,501	4,428,465,883	90.97%	439,763,618	9.03%

Indikator	Program Prioritas	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase	Sisa Anggaran	Tingkat Efisiensi
Indikator	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase	Sisa Anggaran	Tingkat Efisiensi
Nilai Kota Layak Anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	1,451,848,000	1,319,746,380	90.90%	132,101,620	9.10%
Indikator	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase	Sisa Anggaran	Tingkat Efisiensi
PDRB Per Kapita	Program Pengembangan Ekspor	1,019,794,750	864,643,436	84.79%	155,151,314	15.21%
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	910,608,000	101,461,770	11.14%	809,146,230	88.86%

Indikator	Program Prioritas	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase	Sisa Anggaran	Tingkat Efisiensi
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	702,103,900	561,491,250	79.97%	140,612,650	20.03%
	Program Pengembangan UMKM	2,189,180,100	1,979,793,445	90.44%	209,386,655	9.56%
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1,670,339,605	1,440,393,989	86.23%	229,945,616	13.77%
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual					

Indikator	Program Prioritas	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase	Sisa Anggaran	Tingkat Efisiensi
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	589,845,000	558,471,242	94.68%	31,373,758	5.32%
	Program Pengembangan Kebudayaan					
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	278,845,000	232,164,100	83.26%	46,680,900	16.74%
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	328,800,000	305,744,856	92.99%	23,055,144	7.01%
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1,260,750,000	1,247,970,582	98.99%	12,779,418	1.01%

Indikator	Program Prioritas	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase	Sisa Anggaran	Tingkat Efisiensi
	Program Penempatan Tenaga Kerja	257,726,000	245,169,230	95.13%	12,556,770	4.87%
	Program Pemberdayaan Sosial	3,341,258,639	2,427,542,487	72.65%	913,716,152	27.35%
	Program Rehabilitasi Sosial	4,645,554,625	4,005,923,311	86.23%	639,631,314	13.77%
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	4,572,316,800	3,717,696,432	81.31%	854,620,368	18.69%
Total		21,767,122,419	17,688,466,130	81.26%	4,078,656,289	18.74%
Indikator	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase	Sisa Anggaran	Tingkat Efisiensi
Indeks Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	278,845,000	232,164,100	83.26%	46,680,900	16.74%

Indikator	Program Prioritas	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase	Sisa Anggaran	Tingkat Efisiensi
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	328,800,000	305,744,856	92.99%	23,055,144	7.01%
Total		607,645,000	537,908,956	88.52%	69,736,044	11.48%
Indikator	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase	Sisa Anggaran	Tingkat Efisiensi
Tingkat Pengangguran Terbuka	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1,260,750,000	1,247,970,582	98.99%	12,779,418	1.01%
	Program Penempatan Tenaga Kerja	257,726,000	245,169,230	95.13%	12,556,770	4.87%
Total		1,518,476,000	1,493,139,812	98.33%	25,336,188	1.67%
Indikator	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase	Sisa Anggaran	Tingkat Efisiensi
Tingkat Kemiskinan	Program Pemberdayaan Sosial	3,341,258,639	2,427,542,487	72.65%	913,716,152	27.35%

Indikator	Program Prioritas	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase	Sisa Anggaran	Tingkat Efisiensi
	Program Rehabilitasi Sosial	4,645,554,625	4,005,923,311	86.23%	639,631,314	13.77%
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	4,572,316,800	3,717,696,432	81.31%	854,620,368	18.69%
Total		12,559,130,064	10,151,162,230	80.83%	2,407,967,834	19.17%
Indikator	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase	Sisa Anggaran	Tingkat Efisiensi
Indeks Daya Saing Daerah	Program Pelayanan Penanaman Modal	3,667,686,130	2,954,193,878	80.55%	713,492,252	19.45%
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	205,049,000	15,939,800	7.77%	189,109,200	92.23%
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	23,491,389,480	19,839,357,150	84.45%	3,652,032,330	15.55%

Indikator	Program Prioritas	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase	Sisa Anggaran	Tingkat Efisiensi
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	1,066,848,000	631,650,000	59.21%	435,198,000	40.79%
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	43,971,301,150	38,840,948,633	88.33%	5,130,352,517	11.67%
Total		72,402,273,760	62,282,089,461	86.02%	10,120,184,299	13.98%
Indikator	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase	Sisa Anggaran	Tingkat Efisiensi
Indeks Harmoni	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	23,491,389,480	19,839,357,150	84.45%	3,652,032,330	15.55%

Indikator	Program Prioritas	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase	Sisa Anggaran	Tingkat Efisiensi
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	1,066,848,000	631,650,000	59.21%	435,198,000	40.79%
Total		24,558,237,480	20,471,007,150	83.36%	4,087,230,330	16.64%
Indikator	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase	Sisa Anggaran	Tingkat Efisiensi
Indeks Reformasi Birokrasi	Program Kepegawaian Daerah	6,709,210,500	4,908,997,154	73.17%	1,800,213,346	26.83%
	Program Pendaftaran Penduduk	3,439,625,000	3,192,787,745	92.82%	246,837,255	7.18%
	Program Pencatatan Sipil	1,439,943,000	1,370,009,399	95.14%	69,933,601	4.86%
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2,920,251,000	2,700,055,307	92.46%	220,195,693	7.54%

Indikator	Program Prioritas	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase	Sisa Anggaran	Tingkat Efisiensi
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	97,507,255,139	68,618,732,778	70.37%	28,888,522,361	29.63%
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	437,227,000	290,694,446	66.49%	146,532,554	33.51%
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3,570,484,000	2,147,375,444	60.14%	1,423,108,556	39.86%
	Program Riset dan Inovasi Daerah	2,335,331,000	2,145,960,974	91.89%	189,370,026	8.11%
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	45,596,827,468	21,183,871,134	46.46%	24,412,956,334	53.54%



Indikator	Program Prioritas	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase	Sisa Anggaran	Tingkat Efisiensi
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3,021,116,600	1,452,225,874	48.07%	1,568,890,726	51.93%
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	13,809,236,100	11,968,388,245	86.67%	1,840,847,855	13.33%
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1,907,429,000	106,576,600	5.59%	1,800,852,400	94.41%
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1,461,553,000	415,268,000	28.41%	1,046,285,000	71.59%
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	16,934,359,700	16,099,212,493	95.07%	835,147,207	4.93%
Total		201,089,848,507	136,600,155,593	67.93%	64,489,692,914	32.07%
Indikator	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase	Sisa Anggaran	Tingkat Efisiensi

Indikator	Program Prioritas	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase	Sisa Anggaran	Tingkat Efisiensi
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Program Kepegawaian Daerah	6,709,210,500	4,908,997,154	73.17%	1,800,213,346	26.83%
	Program Pendaftaran Penduduk	3,439,625,000	3,192,787,745	92.82%	246,837,255	7.18%
	Program Pencatatan Sipil	1,439,943,000	1,370,009,399	95.14%	69,933,601	4.86%
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2,920,251,000	2,700,055,307	92.46%	220,195,693	7.54%
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	97,507,255,139	68,618,732,778	70.37%	28,888,522,361	29.63%
Total		112,016,284,639	80,790,582,383	72.12%	31,225,702,256	27.88%
Indikator	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase	Sisa Anggaran	Tingkat Efisiensi

Indikator	Program Prioritas	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase	Sisa Anggaran	Tingkat Efisiensi
- Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah - Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah - Nilai Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah Terintegrasi Kota Bekasi	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	437,227,000	290,694,446	66.49%	146,532,554	33.51%
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3,570,484,000	2,147,375,444	60.14%	1,423,108,556	39.86%
	Program Riset dan Inovasi Daerah	2,335,331,000	2,145,960,974	91.89%	189,370,026	8.11%
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	45,596,827,468	21,183,871,134	46.46%	24,412,956,334	53.54%
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3,021,116,600	1,452,225,874	48.07%	1,568,890,726	51.93%

Indikator	Program Prioritas	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase	Sisa Anggaran	Tingkat Efisiensi
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	13,809,236,100	11,968,388,245	86.67%	1,840,847,855	13.33%
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1,907,429,000	106,576,600	5.59%	1,800,852,400	94.41%
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1,461,553,000	415,268,000	28.41%	1,046,285,000	71.59%
Total		72,139,204,168	39,710,360,717	55.05%	32,428,843,451	44.95%
Indikator	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase	Sisa Anggaran	Tingkat Efisiensi
Indeks Kota Cerdas	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	16,934,359,700	16,099,212,493	95.07%	835,147,207	4.93%

Sumber : Diolah, 2026.



**LPPD
2025**

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN



BAB III
CAPAIAN KINERJA
PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.1 DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Kota Bekasi antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
8. Peraturan BKKBN RI Nomor 14 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024.

3.2 GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Tugas pembantuan yang diterima sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan konkruen adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi penugasan.

Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa. Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah meliputi sebagian tugas-tugas Pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah akan lebih efisien dan efektif.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada kabupaten/kota meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten/kota dan sebagian tugas pemerintahan di bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota. Upaya pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yang bermuara kepada kesejahteraan rakyat semakin meningkat. Penyerahan wewenang urusan pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem desentralisasi merupakan salah satu upaya untuk mempercepat proses pembangunan di daerah.

Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan setelah adanya penugasan pemerintah pusat melalui Kementerian Negara/Lembaga kepada Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota) atas beban APBN, maupun dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota atas beban APBD daerah Provinsi.

3.3 CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah

Pada Tahun 2025 Pemerintah Kota Bekasi melaksanakan beberapa tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan memperoleh tugas pembantuan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
2. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi memperoleh tugas pembantuan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional/BKKBN.

Untuk lebih jelasnya deskripsi mengenai pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah penerima tugas Pembantuan sebagai berikut:

3.3.1.1 Target Kinerja

Target kinerja yang diharapkan dalam pelaksanaan tugas pembantuan adalah target kinerja program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan semua termaktub dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA K/L) atas Sub Kegiatan yang dibiayai oleh Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) sebagai berikut:

1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
2. Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Adapun target kinerja atas pelaksanaan Sub Kegiatan dan Kegiatan tugas pembantuan dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Target Kinerja Tugas Pembantuan
Tahun 2025

NO	KEMENTERIAN/LPNK	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
1	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Dinas Pendidikan Kota Bekasi	A. Program Pengelolaan Pendidikan		
			1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
			a. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	sekolah	Terselenggaranya bantuan operasional sekolah melalui BOS Reguler sebanyak 315 SD Negeri dan 265 SD Swasta
			2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
			a. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	sekolah	Terselenggaranya jumlah siswa yang menerima bantuan Pendidikan BOS Pusat sebanyak 62 SMP Negeri dan

NO	KEMENTERIAN/LPNK	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
					156 SMP Swasta
2	Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi	A. Program Pembinaan Keluarga Berencana		
			1. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		
			a. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Kampung KB	Terlaksananya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas
			2. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		
			a. Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta

NO	KEMENTERIAN/LPNK	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
					Media Luar Ruang
			b. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Laporan	Terlaksananya Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana
			c. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	Presentase pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
			4. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		
			a. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan	Laporan	Presentase hasil kegiatan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di

NO	KEMENTERIAN/LPNK	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
			Jejaringnya		Daerah Kabupaten/Kota
			b. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	Presentase hasil kegiatan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
			c. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	Presentase hasil kegiatan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
			B. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)		
			1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		

NO	KEMENTERIAN/LPNK	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
			a. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	Orang	Terlaksananya Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor/UPPKA)
			C. Program Pengendalian Penduduk		
			1. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
			a. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Dokumen	Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah kabupaten/Kota

Sumber : Diolah Tahun 2025

3. 3. 1. 2 Realisasi

Adapun realisasi dari pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Kota Bekasi dari Pemerintah Pusat pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut:



Tabel 3.2
Realisasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat
Tahun 2025

No	KEMENTERIAN/ LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA TUGAS PEMBANTUAN	KINERJA		CAPAIAN KINERJA (%)	ANGGARAN (Rp,-)		REALISASI ANGGARAN (%)	KETERANGAN
						TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah dan	A. Program Pengelolaan Pendidikan	Kota Bekasi	Dinas Pendidikan Kota Bekasi							

No	KEMENTERIAN/ LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	KINERJA		CAPAIAN KINERJA (%)	ANGGARAN (Rp,-)		REALISASI ANGGARAN (%)	KETERANGAN
						TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Bantuan Operasional Penyelenggara n Pendidikan Kesetaraan										
			1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Bekasi	Dinas Pendidikan Kota Bekasi							
			a. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Bekasi	Dinas Pendidikan Kota Bekasi	580 sekolah	580 sekolah	100%	216.156.866.888	215.752.380.182	99.81%	Terselenggarakan bantuan operasional sekolah melalui BOS Reguler sebanyak 315 SD Negeri dan 265 SD Swasta

No	KEMENTERIAN/ LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA TUGAS PEMBANTUAN	KINERJA		CAPAIAN KINERJA (%)	ANGGARAN (Rp,-)		REALISASI ANGGARAN (%)	KETERANGAN
						TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Bekasi	Dinas Pendidikan Kota Bekasi							
			a. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kota Bekasi	Dinas Pendidikan Kota Bekasi	218 sekolah	218 sekolah	100%	113.676.407.042	113.018.875.062	99.42%	Terselenggara jumlah siswa yang menerima bantuan Pendidikan BOS Pusat sebanyak 62 SMP Negeri dan 156 SMP Swasta
2	Kementerian Kependudukan dan	Peraturan BKKBN RI Nomor 4 Tahun 2024 tentang	A. Program Pembinaan Keluarga Berencana									

No	KEMENTERIAN/ LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	KINERJA		CAPAIAN KINERJA (%)	ANGGARAN (Rp,-)		REALISASI ANGGARAN (%)	KETERANGAN
						TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pembangunan Keluarga/ BKKBN	Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2025	1. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kota Bekasi	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
			a. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di	Kota Bekasi	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga	56 Kampung KB	56 Kampung KB	100%	336.000.000	335.100.800	99.73%	

No	KEMENTERIAN/ LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	KINERJA		CAPAIAN KINERJA (%)	ANGGARAN (Rp,-)		REALISASI ANGGARAN (%)	KETERANGAN
						TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Kampung Keluarga Berkualitas		Berencana							
			2. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kota Bekasi	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
			a. Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa	Kota Bekasi	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100.000.000	98.755.000	98,75%	

No	KEMENTERIAN/ LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	KINERJA		CAPAIAN KINERJA (%)	ANGGARAN (Rp,-)		REALISASI ANGGARAN (%)	KETERANGAN
						TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang									
			b. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Kota Bekasi	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 Laporan	1 Laporan	100%	387.845.000	382.708.500	98,68%	
			c. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa	Kota Bekasi	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga	1 Laporan	1 Laporan	100%	240.000.000	235.320.000	98,05%	

No	KEMENTERIAN/ LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA TUGAS PEMBANTUAN	KINERJA		CAPAIAN KINERJA (%)	ANGGARAN (Rp,-)		REALISASI ANGGARAN (%)	KETERANGAN
						TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Kencana Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)		Berencana							
			3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta									

No	KEMENTERIAN/ LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA TUGAS PEMBANTUAN	KINERJA		CAPAIAN KINERJA (%)	ANGGARAN (Rp,-)		REALISASI ANGGARAN (%)	KETERANGAN
						TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota									
			a. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Bekasi	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12 Laporan	12 Laporan	100%	123.750.000	48.708.000	39.36%	“Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Tidak diserap karena nilai pagu terlalu kecil” Realisasi belanja perjalanan dinas dalam kota belum dapat dilaksanakan secara

No	KEMENTERIAN/ LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	KINERJA		CAPAIAN KINERJA (%)	ANGGARAN (Rp,-)		REALISASI ANGGARAN (%)	KETERANGAN
						TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			a									optimal mengingat keterbatasan pagu anggaran yang dialokasikan pada kegiatan dimaksud.
			b. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Bekasi	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4646 Orang	4558 Orang	98.10 %	2.200.710.000	1.694.163.984	76.98%	
			c. Pembinaan Pelayanan	Kota Bekasi	Dinas Pengendalian	245 Laporan	245 Orang	100%	245.000.000	243.700.000	99.47%	

No	KEMENTERIAN/ LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA TUGAS PEMBANTUAN	KINERJA		CAPAIAN KINERJA (%)	ANGGARAN (Rp,-)		REALISASI ANGGARAN (%)	KETERANGAN
						TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya		Penduduk dan Keluarga Berencana							
			B. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Kota Bekasi	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							

No	KEMENTERIAN/ LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	KINERJA		CAPAIAN KINERJA (%)	ANGGARAN (Rp,-)		REALISASI ANGGARAN (%)	KETERANGAN
						TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga									
			a. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kota Bekasi	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5877 Orang	5877 Orang	100%	10.828.600.000	10.361.231.770	95.68%	

No	KEMENTERIAN/ LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA TUGAS PEMBANTUAN	KINERJA		CAPAIAN KINERJA (%)	ANGGARAN (Rp,-)		REALISASI ANGGARAN (%)	KETERANGAN
						TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			(BKB,BKR ,BKL,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)									
			C. Program Pengendalian Penduduk	Kota Bekasi	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
			1. Pemetaan Perkiraan Pengendalian	Kota Bekasi	Dinas Pengendalian Penduduk							

No	KEMENTERIAN/ LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA TUGAS PEMBANTUAN	KINERJA		CAPAIAN KINERJA (%)	ANGGARAN (Rp,-)		REALISASI ANGGARAN (%)	KETERANGAN
						TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten /Kota		dan Keluarga Berencana							
			a. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kota Bekasi	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	142.784.200	81.800.000	60%	

Sumber: Diolah, 2025

3. 3. 2. Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah

Tahun 2025 Pemerintah Kota Bekasi tidak mendapat Tugas Pembantuan yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sehingga target dan capaian kinerja tidak ada/nihil.

3. 3. 2. 1 Target Kinerja

Tidak terdapat target kinerja tugas pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Kota Bekasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2025 sehingga disajikan tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3
Target Kinerja Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2025

NO	SUMBER KEUANGAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
			NIHIL		

Sumber: Diolah, 2025.

3.3.2.2 Realisasi

Tidak terdapat realisasi capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bekasi pada tahun 2025 sehingga disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2025

NO	SUMBER KEUANGAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA TUGAS PEMBANTUAN	KINERJA		PROSENTASE CAPAIAN KINERJA (%)	ANGGARAN		PROSENTASE REALISASI ANGGARAN (%)	KETERANGAN
						TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					NIHIL							

Sumber: Diolah, 2025.

3. 4 PERMASALAHAN DAN KENDALA

Dalam melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan tugas pembantuan tahun 2025 di Kota Bekasi, terdapat beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah diantaranya:

A. Dinas Pendidikan

1. Keterbatasan alokasi anggaran tugas pembantuan yang belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan riil di lapangan, sehingga berdampak pada optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Perubahan kebijakan dan regulasi dari pemerintah pusat yang terjadi dalam tahun berjalan, sehingga memerlukan penyesuaian perencanaan, pelaksanaan, serta administrasi kegiatan.
3. Keterbatasan sumber daya manusia, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi teknis, khususnya dalam pengelolaan administrasi dan pelaporan kegiatan tugas pembantuan.
4. Keterlambatan penyaluran dana dan petunjuk teknis, yang berdampak pada penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target output.
5. Koordinasi lintas sektor yang belum optimal antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan kerja terkait, sehingga mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program di lapangan.
6. Kondisi sarana dan prasarana pendukung yang belum sepenuhnya memadai, terutama pada satuan pendidikan penerima manfaat kegiatan tugas pembantuan.
7. Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan, khususnya pada program yang diterima pada pertengahan atau akhir tahun anggaran.

B. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Tugas Pembantuan dan Penugasan yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi memerlukan konfirmasi dari Perangkat Daerah penerima tugas pembantuan untuk capaian

realisasi keuangan dan kinerja dikarenakan alokasinya berasal langsung dari APBN untuk pemerintah Pusat dan APBD Provinsi untuk yang berasal dari Provinsi Jawa Barat dan langsung dilaksanakan oleh Perangkat Daerah serta bukan melalui dana bantuan yang berasal dari APBN maupun APBD Provinsi yang ditransfer melalui APBD Kota Bekasi tahun berjalan sehingga tidak termonitoring dalam aplikasi keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi.

2. Adanya ketidak samaan menu kegiatan yang terdapat pada Sistem Krisna dengan DPA sehingga terdapat kesulitan dalam menginput realisasi anggaran atau kegiatan khususnya pada anggaran yang bersumber BKKBN.
3. Adanya efisiensi dan rasionalisasi anggaran yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal sehingga adanya keterlambatan pelaksanaan kegiatan yang berpengaruh terhadap realisasi anggaran.

3. 5 SARAN DAN TINDAK LANJUT

Berdasarkan permasalahan-permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan di Kota Bekasi, kami menyampaikan beberapa saran tindak lanjut sebagai berikut:

A. Dinas Pendidikan

1. Peningkatan koordinasi dan komunikasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan kerja terkait, sehingga pelaksanaan program dapat lebih efektif dan selaras dengan ketentuan yang berlaku.
2. Optimalisasi perencanaan anggaran dan alokasi dana sesuai kebutuhan riil di lapangan, termasuk upaya percepatan penyaluran dana untuk mendukung kelancaran kegiatan tugas pembantuan.

3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan, terutama dalam hal pengelolaan administrasi, pelaporan, serta implementasi program.
4. Penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan untuk mengakomodasi keterlambatan penyaluran dana atau perubahan regulasi, sehingga target output tetap dapat tercapai.
5. Penguatan sarana dan prasarana pendukung di satuan pendidikan maupun unit pelaksana kegiatan, guna menunjang kualitas dan efektivitas pelaksanaan program.
6. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah koordinasi, monitoring, evaluasi, serta pelaporan kegiatan secara lebih cepat dan akurat.
7. Evaluasi dan perbaikan mekanisme kerja, termasuk prosedur penugasan dan pelaksanaan tugas pembantuan, agar lebih adaptif terhadap dinamika regulasi dan kebutuhan masyarakat.

B. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Melakukan pendataan dan penyuluhan untuk peningkatan kesadaran warga atas kesehatan lingkungan;
2. Melakukan monitoring terhadap juknis dan aplikasi sistem krisna sehingga tidak terjadi kesalahan kembali.
3. Melakukan persiapan dan penjadwalan kegiatan lebih matang lagi apabila terjadi efisiensi dan rasionalisasi bisa teratasi.



**LPPD
2025**

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL



BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 URUSAN PENDIDIKAN

Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan di Kota Bekasi pada tahun 2024 telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, diperbaharui oleh Peraturan Menteri Pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan meskipun belum seluruhnya dilakukan pemenuhan terhadap Barang/Jasa, Personil dan Anggaran untuk penunjang pencapaian kinerja Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan tahun 2025. Penerapan Standar Pelayanan Minimal dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yaitu (a) Pengumpulan data; (b) Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (c) Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; (d) Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Adapun perangkat Daerah pelaksana Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan adalah Dinas Pendidikan, dengan didukung oleh beberapa perangkat Daerah lainnya, seperti Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dan Bagian Perlengkapan Setda Kota Bekasi untuk pemenuhan barang dan jasa, serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi untuk pemenuhan kualitas personil.

Untuk mengetahui capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan di Kota Bekasi tahun 2025, dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar SPM Urusan Pendidikan

Jenis pelayanan dasar urusan pendidikan yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Kota Bekasi tahun 2024 sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jenis Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Kota Bekasi Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100%	Setiap Tahun (Disdik)
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Kota Bekasi Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan Kesetaraan	100%	Setiap Tahun
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Kota Bekasi Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Setiap Tahun

Sumber: Permendagri Nomor 59 Tahun 2021.

Jika melihat Tabel 4.1 diatas, maka Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 mengamanatkan bahwa Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan harus dicapai 100 persen setiap tahunnya. Jenis standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi tersebut, jumlah dan jenisnya sama dengan tersebut jumlah dan jenis standar pelayanan minimal yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan oleh Daerah

Adapun target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan Kota Bekasi sesuai sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pada Tahun 2025 Dinas Pendidikan Kota Bekasi memberikan target pencapaian Standar Pelayanan Minimal 100 persen dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.2
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar (SPM)	Indikator Capaian	Target Indikator Tahun 2024	Batas Waktu
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Kota Bekasi Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100 %	2025
2	Pendidikan Kesenjangan	Jumlah Warga Kota Bekasi Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan Kesenjangan	100 %	2025
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Kota Bekasi Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100 %	2025

Sumber: Permendagri Nomor 59 Tahun 2021.

4.1.3 Hasil Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan

Hasil Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan di Kota Bekasi didukung oleh Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025, yang tersebar di beberapa perangkat Daerah, dimana Dinas Pendidikan Kota Bekasi sebagai leading sector dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan. Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi dilaksanakan oleh Aparatur Dinas Pendidikan Kota Bekasi, baik Tenaga Pendidik maupun Kependidikan.

Adapun realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan Tahun 2025 dapat disajikan dalam Tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar (SPM)	Indikator Capaian	Jumlah Penduduk Usia Sekolah	Jumlah Penduduk Yang Mendapatkan Pelayanan Pendidikan	Realisasi Capaian
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Kota Bekasi Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan	36.467 orang	36.467 Orang	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar (SPM)	Indikator Capaian	Jumlah Penduduk Usia Sekolah	Jumlah Penduduk Yang Mendapatkan Pelayanan Pendidikan	Realisasi Capaian
		PAUD			
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Kota Bekasi Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dasar (SD/MI, SMP/MTs)	66.697 Orang	66.697 Orang	100%
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Kota Bekasi Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan Kesetaraan	5.601 orang	5.601 orang	100%

Sumber: Dinas Pendidikan, 2025.

Data peserta didik jenjang pendidikan dasar diperoleh dari Data Jumlah Penduduk berdasarkan jumlah penduduk prioritas yang harus mendapatkan pelayanan pendidikan sebesar 66.697 orang. Data tersebut diperoleh dari Dapodik milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta EMIS milik Kementerian Agama.

Jumlah peserta kesetaraan dihitung berdasarkan jumlah anak usia 7 – 18 tahun yang putus sekolah sebanyak 5.601 orang. Dari jumlah tersebut, seluruhnya telah mengikuti program pendidikan anak putus sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan Paket A, B dan Paket C sehingga capaian partisipasi mencapai 100 persen. Penanganan permasalahan anak putus sekolah ini ditangani oleh Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Sedangkan Perhitungan peserta pendidikan anak usia dini dilakukan berdasarkan data jumlah penduduk pada kelompok usia

prioritas 5–6 tahun, yaitu sebanyak 36.467 orang dan seluruhnya telah terlayani sehingga capaian pelayanan mencapai 100 persen%

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 , Menegaskan bahwa LPPD disusun secara sistematis, terukur, dan dapat dievaluasi, yang secara implisit menuntut penyajian yang jelas dan informatif.

Laporan harus disusun dengan menggunakan kalimat yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami, sehingga informasi yang disampaikan dapat dimengerti secara tepat oleh para pemangku kepentingan serta mendukung transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Pemenuhan pelayanan dasar Urusan Pendidikan tersebut selanjutnya dirinci lebih lanjut pada aspek pemenuhan kebutuhan dasar. Adapun Indikator Kriteria/Jenis layanan SPM Pendidikan yang menjadi tugas Pemerintah Kota Bekasi adalah :

1. Indikator Pendidikan Dasar

Dalam pemberian layanan pendidikan dasar, terdapat kriteria pemenuhan barang dan/atau jasa dan mutu yang wajib diberikan oleh Pemerintah Kota Bekasi kepada penerima layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun realisasi kinerja tahun 2025 sesuai dengan target yang telah ditetapkan atas capaian tahun sebelumnya adalah :

- Target jumlah peserta didik yang harus dilayani pada pendidikan dasar adalah sebanyak 66.697 orang. Seluruh peserta didik tersebut telah dilayani, sehingga capaian kinerja indikator ini mencapai 100% dan target pelayanan dasar terpenuhi secara penuh.
- Untuk menjamin mutu layanan pendidikan dasar, penilaian mutu minimal dilakukan melalui sejumlah indikator pada dua jenjang pendidikan, yaitu Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- Secara keseluruhan, baik indikator *persentase penerima*

layanan dasar maupun mutu minimal layanan dasar berhasil dicapai secara penuh sesuai target yang ditetapkan pada tahun 2025. Hal ini mencerminkan bahwa kualitas dan jangkauan layanan pendidikan dasar di Kota Bekasi telah berjalan dengan efektif dan sesuai standar pelayanan.

Indikator: Jumlah Warga Kota Bekasi Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/MI,SMP/MTs)

Tabel 4.4
Pemenuhan Barang/Jasa dan Personil Indikator Pendidikan Dasar

Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Satuan	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Total Pencapaian
A. Jumlah yang harus dilayani	Orang	66.697	66.697	-	100%
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					
B. Jumlah yang harus dilayani		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Total Pencapaian
Sekolah Dasar					
1. Kemampuan literasi	Nilai	90.02	90.02	0	100%
2. Kemampuan Numerasi	Nilai	86.2	86.2	0	100%
3. Indeks iklim keamanan	Nilai	78.5	78.5	0	100%
4. Indeks iklim kebinekaan	Nilai	75.2	75.2	0	100%
5. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	4	4	0	100%
Sekolah Menengah Pertama					
1. Kemampuan literasi	Nilai	93.15	93.15	0	100%
2. Kemampuan numerasi	Nilai	90.1	90.1	0	100%
3. Indeks iklim keamanan	Nilai	4	4	0	100%
4. Indeks iklim kebinekaan	Nilai	74.54	74.54	0	100%
5. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	4	4	0	100%

Sumber: Dinas Pendidikan, 2025.

2. Pendidikan Kesetaraan

Dalam pemberian layanan pendidikan dasar, terdapat kriteria pemenuhan barang dan/atau jasa dan mutu yang wajib diberikan oleh Pemerintah Kota Bekasi kepada penerima layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun realisasi kinerja tahun 2025 sesuai dengan target yang telah ditetapkan atas capaian tahun sebelumnya adalah :

- Target jumlah peserta didik yang harus dilayani pada pendidikan dasar adalah sebanyak 66.697 orang. Seluruh peserta didik tersebut telah dilayani, sehingga capaian kinerja indikator ini mencapai 100% dan target pelayanan dasar terpenuhi secara penuh.
- Untuk menjamin mutu layanan pendidikan dasar, penilaian mutu minimal dilakukan melalui sejumlah indikator pada dua jenjang pendidikan, yaitu Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- Secara keseluruhan, baik indikator *persentase penerima layanan dasar* maupun *mutu minimal layanan dasar* berhasil dicapai secara penuh sesuai target yang ditetapkan pada tahun 2025. Hal ini mencerminkan bahwa kualitas dan jangkauan layanan pendidikan dasar di Kota Bekasi telah berjalan dengan efektif dan sesuai standar pelayanan.

Indikator: Jumlah Warga Kota Bekasi Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi dalam PendidikanKesetaraan

Tabel 4.5
Pemenuhan Barang/Jasa dan Personil Indikator Pendidikan Kesetaraan

Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Satuan	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Total Pencapaian
A. Jumlah yang harus dilayani	Orang	5.601	5.601	0	100%
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					
B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Total Pencapaian
1. Angka partisipasi sekolah (7-18 Tahun) Kesetaraan	%	100	100	0	100%

Sumber: Dinas Pendidikan, 2025.

3. Pendidikan Anak Usia Dini

Dalam pemberian layanan pendidikan dasar, terdapat kriteria pemenuhan barang dan/atau jasa dan mutu yang wajib diberikan oleh Pemerintah Kota Bekasi kepada penerima layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun realisasi kinerja tahun 2025 sesuai dengan target yang telah ditetapkan atas capaian tahun sebelumnya adalah :

- Target Angka partisipasi sekolah adalah 80 % dan telah tercapai pada tahun 2024 sebesar 68,43 % , dan belum terlayani sebesar 11, 57 % menjadi target layanan tahun 2025, dengan rincian :
 - a. jumlah yang harus dilayani sebanyak 36.467 orang dan terlayani sebanyak 36.467 dengan capaian kinerja sebesar 100%
 - b. Jumlah Mutu barang dan/atau jasa dengan 2 indikator yang harus dipenuhi yaitu:
- Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi, target 100 % dan

realisasi 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.

- Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV) target 80 % dan realisasi 61.43% dengan capaian kinerja sebesar 76,79% dan belum terpenuhi sebesar 38,57 % dikarenakan untuk PAUD masih banyak swasta dan menggunakan jasa guru swasta

Indikator: Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD

Tabel 4.6
Pemenuhan Barang/Jasa dan Personil Indikator Pendidikan Anak Usia Dini

Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Satuan	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Total Pencapaian
A. Jumlah yang harus dilayani	Orang	36.467	36.467	0	100%
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					
B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Total Pencapaian
1. Angka partisipasi sekolah	%	80	68.43	31.57	85,54%
2. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	100	100	0	100%
3. Proporsi guru PAUD dengan kualitas Sarjana (S1/Diploma empat (DIV)	%	80	61.43	38.57	76,79%

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bekasi, 2025.

4.1.4 A l o k a s i Anggaran untuk Pemenuhan SPM Urusan Pendidikan

Alokasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.8
Anggaran SPM Bidang Pendidikan Tahun 2025



NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KOTA BEKASI	6,984,726,328,180
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	1,960,994,370,270
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	652,730,612,234
	APBD	652,730,612,234
	A. APBD MURNI	235,265,035,659
	B. APBD DAU	67,356,025,486
	C. APBD DAK FISIK	86,561,427,435
	D. APBD DAK NON FISIK	263,548,123,654
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

Sumber : e-SPM Bidang Pendidikan, 2025

4.1.5 Dukungan Personil untuk Pemenuhan SPM Urusan Pendidikan

Dalam Upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pendidikan, sumber daya aparatur atau sumber daya manusia memegang peranan penting dan strategis. Sumber daya aparatur yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan secara umum dapat di bagi menjadi dua kelompok yaitu tenaga/ pegawai struktural dan tenaga fungsional. Tenaga struktural meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Non ASN yang melaksanakan tugas kedinasannya baik di kantor Dinas Pendidikan, UPP maupun di sekolah-sekolah. Sedangkan tenaga fungsional terdiri dari guru, pamong, tutor, penilik, dan pengawas yang melaksanakan tugas secara profesional sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Sampai dengan Tahun 2025 tenaga SDM yang ada pada kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi berjumlah 8.916 orang terdiri dari tenaga PNS dan

Non PNS. Dengan rincian berdasarkan jumlah dan gender seperti tercantum pada tabel berikut

Adapun kebutuhan pemenuhan kebutuhan kualifikasi pendidikan teknis bagi sumber daya manusia pengelola Standar Pelayanan Minimal Pendidikan sebagai berikut:

Tabel 4.7
Jumlah Personalia Struktural dan Fungsional di Dinas Pendidikan

No	Jabatan	Jumlah Personalia									Jumlah Total		
		PNS			PPPK			TKK					
		L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2	Sekretariat	12	8	20	22	16	38	20	7	27	54	31	85
3	Bidang Pembinaan SD	4	2	6	7	6	13	6	3	9	17	11	28
4	Bidang Pembinaan SMP	3	5	8	9	6	15	6	1	7	18	12	30
5	Bidang Pembinaan PAUD dan Penmas	3	1	4	6	9	15	4	1	5	13	11	24
6	Bidang PTK	3	3	6	6	5	11	3	-	3	12	8	20
7	Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
8	Widyaprada Ahli Muda	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
9	Pengawas SMP	13	14	27	-	-	-	-	-	-	13	14	27
10	Personalia Fungsional Umum di UPP	31	13	44	-	-	-	23	17	40	54	30	84
11	Pengawas SD	12	8	20	-	-	-	-	-	-	12	8	20
12	Penilik	10	10	20	-	-	-	-	-	-	10	10	20
13	Kepala SDN	118	141	259	-	-	-	-	-	-	118	141	259
14	Kepala TKN	-	9	9	-	-	-	-	-	-	-	9	9
15	Guru SDN	454	1.373	1.827	836	2.131	2.967	52	65	117	1.342	3.569	4.911
16	Guru TKN	-	48	48	-	5	5	-	2	2	-	55	55
17	Staff TU dan Administrasi di SDN	60	15	75	186	248	434	300	84	384	546	347	893
18	Staff TU dan Administrasi di TKN	-	1	1	1	2	3	1	2	3	2	5	7
19	Kepala SMPN	27	23	50	-	-	-	-	-	-	27	23	50
20	Guru SMPN	209	626	835	267	466	733	41	46	87	517	1.138	1.655
21	Staff TU dan Administrasi SMPN	25	10	35	242	180	422	205	61	266	472	251	723
22	Kepala SKB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Jabatan	Jumlah Personalia									Jumlah Total		
		PNS			PPPK			TKK					
		L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
23	Guru SKB	-	-	-	-	-	-	5	5	10	5	5	10
24	Staff TU dan Administrasi SKB	1	-	1	1	2	3	-	-	-	2	2	4
	Jumlah Seluruhnya	986	2.311	3.297	1.583	3.076	4.659	666	294	960	3.235	5.681	8.916

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bekasi, 2025.

Berdasarkan tabel 3.3 tersebut, dapat diperoleh informasi bahwa Jumlah keseluruhan Personalia baik Struktural dan Fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi berjumlah 8.916 orang, dengan status sebagai PNS sebanyak 3.297 orang, PPPK sebanyak 4.659 dan TKK sebanyak 960 orang.

4.1.6 Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Urusan Pendidikan

A. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka penerapan dan pemenuhan SPM Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya capaian partisipasi sekolah PAUD usia 5–6 tahun, dimana capaian angka partisipasi sekolah tidak mencapai target 80%, realisasi hanya sebesar 68,43 % maka capaiannya hanya 85,54%, tidak tercapai sebesar 14,46 %, hal ini menunjukkan adanya keterbatasan akses layanan, kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak usia dini, serta kondisi sosial ekonomi keluarga.
2. Masih belum meratanya mutu layanan pendidik PAUD, ditunjukkan dengan rendahnya proporsi guru PAUD berpendidikan S1/D-IV. .Dalam sistem 61,43 adalah realisasi, capaiannya 76,79 %, pertimbangkan : Masih belum meratanya mutu layanan pendidik PAUD, ditunjukkan dengan

rendahnya proporsi guru PAUD berpendidikan S1/D-IV (hanya 61,43%) dan rendahnya tenaga pendidik bersertifikat (42,01%) serta proporsi PTK penggerak yang masih sangat rendah (0,92%).

3. Masih rendahnya kecukupan dan distribusi pendidik tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP), ditunjukkan dengan rendahnya kecukupan formasi guru ASN pada jenjang SD dan SMP (30,65%) serta indeks distribusi guru di SD (19,02%) dan SMP (73,40%) yang menunjukkan ketidakseimbangan penempatan tenaga pendidik.
4. Masih rendahnya capaian partisipasi sekolah pendidikan kesetaraan, di mana angka partisipasi kasar realisasinya sebesar 27,14 dengan capaian 54,28 %. Masih rendahnya capaian partisipasi sekolah pendidikan kesetaraan disebabkan oleh rendahnya minat masyarakat untuk kembali melanjutkan pendidikan, keterbatasan waktu belajar bagi peserta didik yang sudah bekerja, kurangnya sosialisasi mengenai program Paket A, Paket B, dan Paket C, serta faktor sosial ekonomi dan dukungan keluarga yang belum optimal.
5. Terkendala pada aspek perencanaan dan penganggaran, karena masih banyak kegiatan Kepala Sekolah maupun Pengawas Sekolah yang belum dapat dianggarkan akibat belum tersedianya regulasi yang secara definitif mengatur pembiayaan kegiatan operasional tersebut.
6. Kegiatan masih berjalan pada Triwulan 3 (TW III), sehingga kegiatan pemenuhan SPM belum dapat dilaporkan sepenuhnya.

B. Solusi

Upaya pemecahan atas permasalahan yang dihadapi

dalam rangka penerapan dan pemenuhan SPM Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pendataan ulang layanan PAUD usia 5–6 tahun dengan memastikan semua satuan PAUD terdaftar dalam Dapodik/EMIS, meningkatkan advokasi dan sosialisasi kepada orang tua tentang pentingnya pendidikan usia dini, serta memperluas layanan PAUD berbasis komunitas di wilayah dengan partisipasi rendah.
2. Mendorong peningkatan kualifikasi pendidik PAUD secara bertahap, melalui fasilitasi program peningkatan kompetensi (RPL, beasiswa S1/D-IV, pelatihan profesi), serta mengoptimalkan kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga pelatihan untuk meningkatkan proporsi PTK bersertifikat dan PTK penggerak.
3. Memperkuat strategi pemenuhan kebutuhan dan distribusi pendidik SD–SMP, dengan melakukan pemetaan kebutuhan guru per sekolah, redistribusi dini guru antar satuan pendidikan, serta mengajukan tambahan formasi ASN dan PPPK sesuai kekurangan riil pada satuan pendidikan dasar.
4. Mengoptimalkan penjangkauan pendidikan kesetaraan melalui pendataan ulang kelompok usia 7–18 tahun yang tidak/putus sekolah, kolaborasi dengan kelurahan/RT/RW, memfasilitasi layanan pendidikan kesetaraan berbasis komunitas, serta menyediakan biaya personal untuk memastikan siswa rentan dapat kembali belajar.
5. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan kesetaraan, dengan memfasilitasi peningkatan kompetensi tutor/pendidik, memperluas akses sertifikasi pendidik kesetaraan, dan

mengembangkan model pelatihan berbasis sekolah maupun komunitas sebagai pengganti kebutuhan ASN.

6. Mengoptimalkan perencanaan dan penganggaran kegiatan Kepala Sekolah dan Pengawas, melalui penyusunan regulasi internal (Keputusan Kepala Dinas/Bupati/Wali Kota) yang memberi kepastian pembiayaan operasional, termasuk tugas supervisi, monitoring, pembinaan mutu sekolah, dan koordinasi pemenuhan SPM.
7. Melakukan mitigasi risiko dari permasalahan yang ada untuk mengajukan kebutuhan Anggaran sebagai rencana tindak pengendalian serta memperkuat koordinasi keuangan agar serapan anggaran lebih efektif dan capaian SPM dapat dilaporkan tepat waktu.
8. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja, penyelenggaraan Urusan Pendidikan belum memenuhi target 100% tingkat capaian 99,23%. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan perencanaan dan penganggaran telah selaras dengan kebutuhan pelayanan dasar pendidikan masyarakat. Ke depan, fokus kebijakan diarahkan pada peningkatan kualitas layanan dan penguatan sistem pendidikan yang lebih responsif dan berkelanjutan.

4.2 URUSAN KESEHATAN

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib diperoleh setiap warga negara. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdapat 12 indikator SPM Bidang Kesehatan yang menjadi kewajiban pemerintah daerah kabupaten/kota, yaitu: (1) pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar; (2) pelayanan persalinan sesuai standar; (3) pelayanan kesehatan ibu nifas; (4) pelayanan kesehatan bayi baru lahir; (5) pelayanan kesehatan balita; (6) pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; (7) pelayanan kesehatan pada usia produktif; (8) pelayanan kesehatan pada usia lanjut; (9) pelayanan kesehatan penderita hipertensi; (10) pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; (11) pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; dan (12) pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar.

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan dibagi menjadi dua kuadran, yaitu pemenuhan pada level proses dan pemenuhan pada level kinerja. Adapun perangkat Daerah pelaksana Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan adalah Dinas Kesehatan, dengan didukung oleh beberapa perangkat Daerah lainnya, seperti Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, Rumah Sakit Umum Daerah dr. ChasbullahAbdulmadjid Kota Bekasi dan Bagian Perlengkapan Setda Kota Bekasi untuk pemenuhan barang dan jasa, serta Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi untuk pemenuhan kualitas personil. Untuk mengetahui capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan di Kota Bekasi tahun 2025, dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar SPM Urusan Kesehatan

Jenis pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Kota Bekasi tahun 2025 sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11
Jenis Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	100%	Setiap Tahun
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan persalinan sesuai standar	100%	Setiap Tahun
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir (umur 0-28 hari) yang mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal sesuai standar	100%	Setiap Tahun
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang berumur 0-59 bulan yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%	Setiap Tahun
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Kota Bekasi usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Setiap Tahun
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Warga Kota Bekasi usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Setiap Tahun
7.	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah orang berusia 60 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Setiap Tahun
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	100%	Setiap Tahun
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%	Setiap Tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Setiap Tahun
11.	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkolosis	Jumlah orang terduga tubercolosis (TBC) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Setiap Tahun
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia HIV (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia HIV (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Setiap Tahun

Sumber: Permendagri 59 Tahun 2021.

Jika melihat Tabel 4.11 diatas, maka Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 mengamanatkan bahwa Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan harus dicapai 100 persen setiap tahunnya. Jenis standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi tersebut, jumlah dan jenisnya sama dengan tersebut jumlah dan jenis standar pelayanan minimal yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan.

4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan oleh Daerah

Adapun Target pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan adalah 100% sebagaimana terlihat dalam tabel berikut sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar:

Tabel 4.12
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar (SPM)	Indikator Capaian	Target Indikator Tahun 2025	Batas Waktu
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	100%	Setiap Tahun
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan persalinan sesuai standar	100%	Setiap Tahun
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir (umur 0 - 28 hari) yang mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal essensial sesuai standar	100%	Setiap Tahun
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang berumur 0 – 59 bulan Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Setiap Tahun
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Kota Bekasi usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Setiap Tahun
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Warga Kota Bekasi usia produktif (15-59 tahun) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Setiap Tahun
7.	Pelayanan Kesehatan pada usia lansia	Jumlah orang berusia 60 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Setiap Tahun
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah orang yang berusia 15 tahun keatas menderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Setiap Tahun
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Kota Bekasi orang yang berusia 15 tahun keatas menderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Setiap Tahun
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Setiap Tahun
11.	Pelayanan Kesehatan orang	Jumlah orang terduga tubercolosis yang	100%	Setiap Tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar (SPM)	Indikator Capaian	Target Indikator Tahun 2025	Batas Waktu
	terduga tuberkulosis	mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia HIV (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Setiap Tahun

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tahun 2025.

4.2.3 Hasil Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan

Hasil Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan di Kota Bekasi didukung oleh Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 20245 yang tersebar di beberapa perangkat Daerah, dimana Dinas Kesehatan Kota Bekasi sebagai leading sector dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi dilaksanakan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kota Bekasi. Adapun realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan Tahun 2025 dapat disajikan dalam Tabel 4.13 berikut:

Tabel 4.13
Capaian Kinerja SPM Kesehatan Kota Bekasi Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Orang Yang Terlayani	Realisasi Capaian (%)
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	39.956	41.174	103,05
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	39956	39956	100

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Orang Yang Terlayani	Realisasi Capaian (%)
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir umur 0 - 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan	39348	39348	100
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang berumur 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan	158787	158787	100
5.	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga Kota Bekasi usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	351195	351195	105,17
6.	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Kota Bekasi usia produktif (15-59 tahun) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	950091	1463791	100
7.	Pelayanan Kesehatan pa da usia lansia	Jumlah orang berusia lebih dari 60 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan	223938	223938	108,7
8.	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	Jumlah orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	154171	191372	124,13

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Orang Yang Terlayani	Realisasi Capaian (%)
9.	Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Diabet Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan	43315	62597	144,52
10 .	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah orang orang dengan gangguan Jiwa (ODG) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	3504	3685	105,17
11 .	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosi	Jumlah orang orang terduga Tuberkulosis (TBC) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	53788	58468	108,7
12 .	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah orang orang terduga beresiko Terinfeksi virus HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan	61547	94828	154,07

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025.

Dari tabel diatas tampak bahwa ada seluruh indikator SPM sudah mencapai target 100%. Pencapaian ini diperoleh dari pelaporan puskesmas, rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain. Secara umum indikator SPM mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

- a. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Sasaran pelayanan SPM pada ibu hamil sesuai dengan PMK Nomor 6 Tahun 2024, disamakan dengan sasaran ibu bersalin. Pada tahun 2025 terdapat 39.956 orang sasaran ibu hamil di Kota Bekasi. Berdasarkan laporan bulanan pelayanan di Puskesmas jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai adalah 41.174 orang (100%). Sementara apabila dihitung dengan sasaran ibu bersalin yang seharusnya capaian menjadi 100%. Capaian diperoleh dari kunjungan bumil ke-6 di fasilitas kesehatan. Kegiatan yang sudah dilakukan diantaranya: Supervisi Layanan Program KIA ke puskesmas, Penguatan jejaring puskesmas dalam pelayanan KIA, Validasi Data, Pengkajian Kasus Kematian Ibu dan Bayi Oleh Tim AMPSR Kota Bekasi dan Pengadaan Buku KIA, Pelatihan Kewaspadaan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal. Meskipun demikian tetap harus terus dilakukan penguatan kemitraan jejaring antara fasilitas kesehatan (RS, TPMB, Klinik) dengan Puskesmas wilaya sehingga pelaporan pelayanan menjadi lebih optimal.
- b. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan
 Tahun 2025 terdapat 39.956 sasaran ibu bersalin di Kota Bekasi. Berdasarkan laporan bulanan pelayanan di Puskesmas jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai adalah 39.956 orang (100%). Diperoleh dari jumlah kunjungan ibu bersalin di fasilitas Kesehatan. Pada umumnya kendala yang dihadapi sama dengan kendala pada pelayanan Kesehatan pada ibu hamil yaitu masih perlunya penguatan kemitraan jejaring antara fasilitas kesehatan (RS, TPMB, Klinik) dengan Puskesmas wilayah. Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan

capaian SPM Pelayanan Kesehatan ibu bersalin adalah Supervisi Layanan Program KIA ke puskesmas, Penguatan jejaring puskesmas dalam pelayanan KIA, Validasi Data, Pengkajian Kasus Kematian Ibu dan Bayi Oleh Tim AMPSR Kota Bekasi dan Pengadaan Buku KIA, Pelatihan Kewaspadaan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal.

- c. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Tahun 2025 terdapat 39.348 sasaran bayi baru lahir di Kota Bekasi berdasarkan jumlah kelahiran hidup. Berdasarkan laporan bulanan pelayanan di Puskesmas seluruh bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Diperoleh dari jumlah kunjungan ke-3 (KN3) bayi baru lahir di fasilitas kesehatan ditambah dengan layanan pada kegiatan posyandu di masyarakat. Meskipun capaian sudah mendekati target 100%, tetap perlu penguatan kemitraan jejaring antara fasilitas kesehatan (RS, TPMB, Klinik) dengan Puskesmas wilayah dalam rangka mengoptimalkan pelaporan. Kegiatan yang sudah dilakukan dalam Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir adalah Supervisi Layanan Program KIA ke puskesmas, Penguatan jejaring puskesmas dalam pelayanan KIA, Validasi Data, Pengkajian Kasus Kematian Ibu dan Bayi Oleh Tim AMPSR Kota Bekasi dan Pengadaan Buku KIA, Pelatihan Kewaspadaan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal, Pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) pada bayi baru lahir.

- d. Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita
- Tahun 2025 terdapat 158.787 sasaran balita di Kota Bekasi. Berdasarkan laporan bulanan pelayanan di Puskesmas jumlah balita semua mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Meskipun demikian masih perlu peningkatan KIE (Kominukasi, Informasi, dan Edukasi)

pada keluarga terutama keluarga yang memiliki balita, dapat dilakukan melalui perpanjangan tangan puskesmas yaitu para kader kesehatan sehingga kader perlu juga ditingkatkan pula keterampilannya. Kegiatan yang telah dilakukan adalah Supervisi Layanan Program KIA ke puskesmas, Penguatan jejaring puskesmas dalam pelayanan KIA, Validasi Data, Pelatihan SDIDTK dan PMBA.

- e. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Tahun 2025 terdapat 351.195 anak usia pendidikan dasar yang menjadi sasaran pelayanan kesehatan di Kota Bekasi. Berdasarkan laporan pelayanan di Puskesmas semua siswa mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (100%). Kegiatan yang dilakukan tahun ini yaitu Pengadaan Buku Raport Kesehatanku.

- f. Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Tahun 2025 terdapat 950.091 warga negara usia produktif, yaitu usia 15-59 tahun yang menjadi target sasaran pelayanan kesehatan di Kota Bekasi yang diperoleh datanya dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan disesuaikan dengan kemampuan daerah. Berdasarkan laporan pelayanan di Puskesmas jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar melebihi jumlah target, yaitu 1.463.791 orang. Diperoleh dari data skrining kesehatan terkait penyakit tidak menular dan edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana yang dilakukan pada penduduk usia produktif. Meningkat dari tahun lalu, berkat adanya keterlibatan lintas sektor dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan pada usia produktif. Namun demikian ini menjadi tantangan tersendiri untuk

mempertahankan terutama terkait upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya skrining kesehatan secara berkala terutama deteksi dini leher rahim dan payudara pada wanita usia subur. Selain itu, masih adanya kendala teknis dalam penggunaan aplikasi SIPTM. Kegiatan yang telah dilakukan adalah beberapa peningkatan kapasitas baik petugas puskesmas maupun kader posbindu, juga kepada anak sekolah berupa workshop terkait Deteksi Dini (skrining).

- g. Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar standar. Tahun 2025 terdapat 223.938 warga negara usia 60 tahun keatas yang menjadi sasaran pelayanan kesehatan di Kota Bekasi. Berdasarkan laporan pelayanan di Puskesmas jumlah warga negara usia 60 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah 223.938 orang (100%). Kegiatan yang sudah dilakukan Pengadaan Buku Kesehatan Lansia. Keterbatasan lansia dan kesadaran untuk rutin memeriksakan diri masih kurang, sehingga masih perlu dilakukan sweeping atau program jemput bola yang membutuhkan tambahan waktu dan tenaga.
- h. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Tahun 2025 terdapat 154.171 penderita hipertensi yang menjadi sasaran pelayanan kesehatan di Kota Bekasi yang dihitung berdasarkan perhitungan rumus prevalensi hipertensi (Riskesdas 2018) dan jumlah penduduk yang menggunakan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dengan mempertimbangkan kemampuan daerah. Berdasarkan laporan pelayanan di puskesmas, jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai

standar adalah 191.372 orang (124%). Meningkat dari tahun lalu pun melebihi target yang ditetapkan, namun masih saja ditemukan masyarakat penderita hipertensi yang melakukan pengobatan mandiri dan belum memanfaatkan pelayanan kesehatan secara rutin. Sehingga perlu mengoptimalkan lagi edukasi kepada masyarakat tentang pemantauan kesehatan penderita hipertensi secara teratur. Kegiatan yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Edukasi Faktor Risiko Hipertensi.

- i. Persentase penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Tahun 2025 terdapat 43.315 penderita diabetes melitus yang menjadi sasaran pelayanan kesehatan di Kota Bekasi yang dihitung berdasarkan perhitungan rumus prevalensi diabetes (Riskesdas 2018) dan jumlah penduduk yang menggunakan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Berdasarkan laporan pelayanan di Puskesmas jumlah penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah 62.597 orang (145%). Meningkat sesuai dengan adanya peningkatan kasus. Kegiatan yang sudah dilakukan dalam pencapaian SPM pada penderita DM adalah peningkatan kapasitas petugas kesehatan melalui workshop penanganan dan penanggulangan DM, pembuatan media informasi dan pendampingan pengendalian gula darah. Meskipun capaian sudah tercapai namun kendala yang dialami adalah Aplikasi SIPTM yang sering bermasalah pada saat pengambilan data untuk pelaporan.

- j. Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Tahun 2025 terdapat 3.504 penderita ODGJ yang menjadi sasaran pelayanan kesehatan di Kota Bekasi, yang dihitung

berdasarkan perhitungan rumus prevalensi diabetes (Riskesdas 2018) dan jumlah penduduk yang menggunakan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan disesuaikan kemampuan daerah. Berdasarkan laporan pelayanan di Puskesmas jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah 3.685 orang (105%), melebihi dari target yang ditetapkan. Meskipun demikian masih ditemukan kendala yaitu stigma negatif di masyarakat terhadap pasien gangguan jiwa sehingga keluarga pasien urung melanjutkan pengobatan. Berikut adalah kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya meningkatkan pelayanan kasus kesehatan jiwa serta terlaksananya program pemerintah berdasarkan Permenkes No. 29 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, yaitu kegiatan monev pemantauan pasien di panti rehabilitasi di Kota Bekasi, perencanaan kebutuhan obat psikofarmaka di Kota Bekasi, dan Pendampingan evakuasi pasien ODGJ ke rumah sakit rujukan.

- k. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

Tahun 2025 terdapat 53.886 orang terduga TBC yang menjadi sasaran pelayanan kesehatan di Kota Bekasi, terlayani 58.468 orang (109%). Pada tahun 2025, SPM TBC di Kota Bekasi sudah mencapai target, namun pada saat penerapannya ditemukan beberapa permasalahan, yakni :

- TBC masih mendapatkan stigma negative dari masyarakat sehingga masyarakat yang menderita TBC enggan datang ke Puskesmas untuk berobat.
- Tidak ada follow up dari suspek TB untuk mengembalikan pot dahak yang telah diberikan sehingga pelayanan tidak dapat dilanjutkan.

- Terdapat keterbatasan sumber daya terkait pemeriksaan dengan kartrid TCM, sehingga puskesmas harus membatasi pemeriksaan hariannya.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target SPM Tuberkulosis di Kota Bekasi, selain kegiatan rutin investigasi kontak di fasilitas pelayanan kesehatan dan memaksimalkan penyuluhan sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat untuk dapat memeriksakan suspek TBC ke fasilitas pelayanan Kesehatan juga melaksanakan Gebyar Skrining TBC di puskesmas dan pemenuhan pot dahak di fasilitas kesehatan.

1. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Masih sama dengan tahun lalu, target SPM HIV telah tercapai hasil kolaborasi bersama antara lintas program yang ada di Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Fasyankes, termasuk dukungan dari LSM Penggiat HIV dalam menjangkau sasaran populasi kunci yang berisiko terinfeksi HIV dapat melakukan tes HIV. Tahun 2025 terdapat 61.547 orang yang terpetakan dan mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar bahkan secara absolut pun melebihi target yang ditetapkan, yaitu 94.828 orang. Namun demikian, masih saja ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan khususnya untuk tes mobile HIV di tempat populasi kunci berkumpul terdapat kesulitan untuk dapat akses melakukan tes HIV berkala untuk mengetahui status kesehatannya, sehingga masih diperlukan keterlibatan lintas sektor dan masyarakat dalam mendukung pengelolaan risiko orang terinfeksi HIV di Kota Bekasi pada semua sasaran orang berisiko terinfeksi HIV. Adapun kegiatan yang dilakukan pada tahun ini adalah pelatihan enumerator dan pelaksanaan

sero-survei HIV, dimana kegiatan ini berhasil memberikan dampak yang signifikan terhadap pencapaian pelayanan SPM terhadap orang dengan resiko terinfeksi HIV. Selain itu, kendala juga ditemukan terkait pengobatan, yaitu masih tingginya stigma negatif di masyarakat terhadap orang dengan HIV/AIDS (ODHIV/ODHA)

Dalam penerapan SPM diketahui memberikan pelayanan dasar tersebut, ada pula pemenuhan mutu yang harus tersedia. Selanjutnya dirinci lebih lanjut pada aspek pemenuhan kebutuhan dasar pada indikator-indikator sebagai berikut:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Indikator: Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan

Pelayanan kesehatan ibu hamil merupakan salah satu indikator utama dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang bertujuan untuk menjamin kesehatan ibu selama masa kehamilan serta menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Pelayanan ini meliputi pemeriksaan kehamilan (antenatal care/ANC) sesuai standar, pemantauan kondisi ibu dan janin, pemberian imunisasi Tetanus Difteri (Td), pemberian tablet tambah darah, serta deteksi dini faktor risiko kehamilan.

Pemenuhan indikator ini tidak hanya diukur dari jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan, tetapi juga dari aspek mutu pelayanan yang diberikan. Mutu pelayanan antara lain diukur melalui cakupan pemberian imunisasi Td dan distribusi tablet tambah darah sesuai standar kepada ibu hamil. Dengan demikian, capaian indikator ini mencerminkan sejauh mana Pemerintah Kota Bekasi mampu menjamin akses dan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh ibu hamil.

Berdasarkan data Tahun 2025, capaian pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.14
Pemenuhan Barang/Jasa Indikator Pelayanan Kesehatan
Ibu Hamil

Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Satuan	Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah Total yang terlayani	Yang belum terlayani	Total Pencapaian
Jumlah yang harus dilayani		Orang	39956	41174	+1218	100%
Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)			Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	Total Pencapaian
1	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Vaksin	4000	4118	+118	100%
2	Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	Tablet	7192080	7411320	+219240	100%
3	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Orang	39956	41174	+1218	100%
4	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	39956	41174	+1218	100%
5	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	39956	41174	+1218	100%
6	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	Paket	39956	41174	+1218	100%
7	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	39956	41174	+1218	100%
8	Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	39956	41174	+1218	100%
9	Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	39956	41174	+1218	100%
10	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	53	53	0	100%
11	Gel USG (untuk Puskesmas yang memiliki alat USG) (proyeksi pengadaan	Botol	576	576	0	100%

Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Satuan	Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah Total yang terlayani	Yang belum terlayani	Total Pencap aian
	1/15 dari jumlah ibu hamil)					
12	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi; (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)"	Orang	158	158	0	100%
13	Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1: 885 penduduk)	Orang	336	336	0	100%
14	Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang	468	468	0	100%
15	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	53	53	0	100%
16	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	53	53	0	100%
17	Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)	Orang	39956	41174	+1218	103,04%

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025.

Tabel diatas menggambarkan mutu SPM (logistik dan SDM) yang merupakan pendukung dalam penerapan SPM dengan bobot capaian 20%. Sehingga apabila dihitung capaian mutu SPM Pelayanan Kesehatan pada Ibu Hamil diperoleh angka sebagai berikut:

$(100 + 100) / 2 = 100$

Sehingga Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) nya untuk Pelayanan Kesehatan pada Ibu Hamil adalah sebagai berikut:

$(\text{Persentase capaian mutu} \times \text{bobot mutu}) + (\text{Persentase capaian penerima layanan} \times \text{bobot penerima})$
 $= (100 \times 20\%) + (100 \times 80\%)$
 $= 20 + 80$
 $= 100.$

2. **Pelayanan kesehatan ibu bersalin**
Indikator: Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan ibu bersalin merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang bertujuan menjamin setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan kompeten di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar. Pelayanan ini mencakup pemeriksaan kondisi ibu dan bayi saat persalinan, pencegahan komplikasi, penanganan kegawatdaruratan, serta sistem rujukan apabila diperlukan.

Berdasarkan data Tahun 2025, capaian pelayanan kesehatan ibu bersalin dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 4.15
Pemenuhan Barang/Jasa Indikator Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Satuan	Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah Total yang terlayani	Yang belum terlayani	Total Pencapaian
Jumlah yang harus dilayani		Orang	39956	39956	0	100%
Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)			Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Total Pencapaian
1	Formulir Partograf	Formulir	39956	39956	0	100%
2	Kartu ibu (rekam medis ibu)	Paket	39956	39956	0	100%
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) (Terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)	Buku	39956	39956	0	100%
4	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	53	53	0	100%

Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Satuan	Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah Total yang terlayani	Yang belum terlayani	Total Pencapa i an
5	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	Orang	158	158	0	100%
6	Tenaga kesehatan : Bidan angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	Paket	468	468	0	100%
7	Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal : dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	336	336	0	100%
8	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	53	53	0	100%
9	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	53	53	0	100%

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025.

Tabel diatas menggambarkan mutu SPM (logistik dan SDM) yang merupakan pendukung dalam penerapan SPM dengan bobot capaian 20%. Sehingga apabila dihitung capaian mutu SPM Pelayanan Kesehatan pada ibu bersalin diperoleh angka sebagai berikut:

$(100 + 100) / 2 = 100$

Sehingga Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) nya untuk Pelayanan Kesehatan pada Ibu Bersalin adalah sebagai berikut:

$(\text{Persentase capaian mutu} \times \text{bobot mutu}) + (\text{Persentase capaian penerima layanan} \times \text{bobot penerima})$
 $= (100 \times 20\%) + (100 \times 80\%)$
 $= 20 + 80$
 $= 100$

3. **Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir**
Indikator: Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang bertujuan

menjamin setiap bayi memperoleh pelayanan esensial segera setelah kelahiran. Pelayanan ini menjadi langkah penting dalam menurunkan angka kematian neonatal serta memastikan tumbuh kembang bayi berlangsung optimal sejak awal kehidupan. Berdasarkan data Tahun 2025, capaian pelayanan kesehatan bayi baru lahir dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.16
Pemenuhan Barang/Jasa Indikator Pelayanan Kesehatan
Bayi Baru Lahir

Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Satuan	Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah Total Yang terlayani	Yang belum terlayani	Total Pencapaian
Jumlah yang harus dilayani		Orang	39348	39348	0	100%
Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)			Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Total Pencapaian
1	Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	39348	39348	0	100%
2	Vitamin K1 injeksi	Ampul	39348	39348	0	100%
3	Salep/tetes mata antibiotik	Orang	39348	39348	0	100%
4	Formulir bayi baru lahir	Formulir	39348	39348	0	100%
5	Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	Formulir	39348	39348	0	100%
6	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	39348	39348	0	100%
7	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	53	53	0	100%
8	Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	158	158	0	100%
9	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	468	468	0	100%
10	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	336	336	0	100%
11	Tenaga kesehatan :	Orang	53	53	0	100%

Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Satuan	Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah Total Yang terlayani	Yang belum terlayani	Total Pencapaian
	Tenaga Kefarmasian					
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	53	53	0	100%
13	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	53	53	0	100%
14	Kader Kesehatan	Orang	16220	16220	0	100%

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025.

Tabel diatas menggambarkan mutu SPM (logistik dan SDM) yang merupakan pendukung dalam penerapan SPM dengan bobot capaian 20%. Sehingga apabila dihitung capaian mutu SPM Pelayanan Kesehatan pada bayi baru lahir diperoleh angka sebagai berikut:

$(100 + 100) / 2 = 100$

Sehingga Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) nya untuk Pelayanan Kesehatan pada bayi baru lahir adalah sebagai berikut:

$(\text{Persentase capaian mutu} \times \text{bobot mutu}) + (\text{Persentase capaian penerima layanan} \times \text{bobot penerima})$
 $= (100 \times 20\%) + (100 \times 80\%)$
 $= 10 + 80$
 $= 100.$

4. **Pelayanan kesehatan balita**
Indikator: Jumlah Balita yang mendapatkan layanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan balita merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang bertujuan menjamin setiap anak usia di bawah lima tahun memperoleh pemantauan pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Pelayanan ini meliputi penimbangan dan pengukuran rutin, pemantauan status gizi, pemberian imunisasi dasar lengkap, pemberian vitamin A, serta deteksi dini gangguan tumbuh kembang dan penyakit pada balita.

Pelayanan kesehatan balita menjadi upaya strategis dalam



menurunkan angka kesakitan dan kematian anak serta mencegah stunting. Berdasarkan data Tahun 2025, capaian pelayanan kesehatan balita dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 4.17
Pemenuhan Barang/Jasa Indikator Pelayanan Kesehatan Balita

Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Satuan	Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	Total Pencapaian
Jumlah yang harus dilayani		Orang	158787	158787	0	100%
Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)			Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Total Pencapaian
1	Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Dokumen	158787	158787	0	100%
2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Formulir	158787	158787	0	100%
3	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	Orang	158787	158787	0	100%
4	Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	Kapsul	8833	8833	0	100%
5	Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	Kapsul	108262	108262	0	100%
6	Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	13340	13340	0	100%
7	Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	26680	26680	0	100%
8	Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	13340	13340	0	100%
9	ksin imunisasi dasar: DPT -HB - Hib	Vaksin	40020	40020	0	100%
10	Vaksin imunisasi dasar: Campak Rubella	Vaksin	13340	13340	0	100%
11	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	Vaksin	12519	12519	0	100%
12	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak Rubella	Vaksin	12519	12519	0	100%

13	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	811169	811169	0	100%
14	Peralatan Anafilaktik	Paket	101	101	0	100%
15	Formula Terapi Gizi Buruk	Paket	11	11	0	100%
16	Tenaga medis : Dokter	Orang	158	158	0	100%
17	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	468	468	0	100%
18	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	336	336	0	100%
19	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	53	53	0	100%
20	Guru PAUD	Orang	482528	482528	0	100%
21	Kader Kesehatan	Orang	16220	16220	0	100%

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025.

Tabel diatas menggambarkan mutu SPM (logistik dan SDM) yang merupakan pendukung dalam penerapan SPM dengan bobot capaian 20%. Sehingga apabila dihitung capaian mutu SPM Pelayanan Kesehatan pada balita diperoleh angka sebagai berikut:

$(100 + 100) / 2 = 100$

Sehingga Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) nya untuk Pelayanan Kesehatan pada balita adalah sebagai berikut:

$(\text{Persentase capaian mutu} \times \text{bobot mutu}) + (\text{Persentase capaian penerima layanan} \times \text{bobot penerima})$
 $= (100 \times 20\%) + (100 \times 80\%)$
 $= 20 + 80$
 $= 100.$

5. **Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar**
Indikator: Jumlah Warga negara usia pendidikan dasar yang mendapat layanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang bertujuan untuk memastikan peserta didik memperoleh pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Pelayanan ini dilaksanakan melalui kegiatan penjangkaran dan pemeriksaan kesehatan di sekolah, yang

meliputi pemeriksaan status gizi, kesehatan gigi dan mulut, ketajaman penglihatan dan pendengaran, skrining penyakit tidak menular, serta edukasi perilaku hidup bersih dan sehat. Hasil pemeriksaan dicatat dalam formulir penjangkaran kesehatan dan raport kesehatan peserta didik sebagai dokumen pemantauan berkelanjutan.

Pelayanan ini penting untuk mendeteksi secara dini gangguan kesehatan yang dapat mempengaruhi proses belajar anak serta mendukung terciptanya lingkungan sekolah sehat. Berdasarkan data Tahun 2025, capaian pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.18
Pemenuhan Barang/Jasa Indikator Pelayanan Kesehatan
Pada Usia Pendidikan Dasar

Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Satuan	Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	Total Pencap aian
Jumlah yang harus dilayani		Orang	351195	351195	0	100%
Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)			Jumlah Mutu yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	Total Pencap aian
1	Form pencatatan/Buku raport kesehatanku (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/ pesantren)	Buku	14848	14848	0	100%
2	Form pencatatan/Buku pemantauan Kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	Buku	14848	14848	0	100%
3	Kuesioner skrining Kesehatan (Sesuai	Dokume n	351195	351195	0	100%

	jumlah anak usia pendidikan dasar)					
4	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/ madrasah/ pesantren	Formulir	351195	351195	0	100%
5	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)	Formulir	351195	351195	0	100%
6	Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opnameyang ada di gudangfarmasi kabupaten/kota)	Tablet	4500000	4500000	0	100%
7	Alat Pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Alat	53	53	0	100%
8	Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di	Strip	36447	36447	0	100%

	sekolah SMP/ sederajat)					
9	Media promosi Kesehatan (Media khusus remaja sehat)	Paket	53	53	0	100%
10	Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	Vaksin	37641	37641	0	100%
11	Tenaga medis Dokter/ Dokter gigi	Orang	158	158	0	100%
12	Tenaga kesehatan Bidan	Orang	468	468	0	100%
13	Tenaga kesehatan Perawat	Orang	336	336	0	100%
14	Tenaga kesehatan Tenaga Gizi	Orang	53	53	0	100%
15	Tenaga kesehatan Tenaga Kefarmasian	Orang	53	53	0	100%
16	Tenaga kesehatan Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	53	53	0	100%
17	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	1173	1173	0	100%
18	Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/ peer conselor	Orang	16220	16220	0	100%

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025.

Tabel diatas menggambarkan mutu SPM (logistik dan SDM) yang merupakan pendukung dalam penerapan SPM dengan bobot capaian 20%. Sehingga apabila dihitung capaian mutu SPM Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar diperoleh angka sebagai berikut:

$(100 + 100) / 2 = 100$

Sehingga Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) nya untuk Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar adalah sebagai berikut:

(Persentase capaian mutu x bobot mutu) + (Persentase capaian penerima layanan x bobot penerima)

= (100 x 20%) + (100 X 80%)

= 20 + 80

= 100.

6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif

Indikator: Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan pada usia produktif merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pada usia produktif berperan penting dalam mendeteksi dini faktor risiko penyakit sehingga dapat mencegah komplikasi dan menekan angka kesakitan di usia kerja. Berdasarkan data Tahun 2025, capaian pelayanan kesehatan pada usia produktif dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.19

Pemenuhan Barang/Jasa Indikator Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Satuan	Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	Total Pencapaian
Jumlah yang harus dilayani		Orang	950091	1463791	+513700	100%
Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)			Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Total Pencapaian
1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	354	354	0	100%
2	Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Unit	354	354	0	100%
3	Alat : Tensimeter	Unit	354	354	0	100%
4	Alat : Glukometer	Unit	354	354	0	100%

5	Alat: Alat Pemeriksa Hb	Unit	354	354	0	100%
6	Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Unit	950091	1463791	+513700	100%
7	Alat : KIT IVA Tes	Unit	53	53	0	100%
8	Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	950091	1463791	+513700	100%
9	Kit Opthalmologi Komunitas	Unit	53	53	0	100%
10	Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/ PPOK)	Dokumen	53	53	0	100%
11	Alat Pelayanan KB	Unit	53	53	0	100%
	a. Set Pemasangan dan Pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	Unit	53	53	0	100%
	b. Set Pemasangan dan Pencabutan Implan	Unit	53	53	0	100%
	c. Vasectomi Set	Unit	4	4	0	100%
12	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	950091	1463791	+513700	100%
13	Vaksin Tetanus Difteri (td)	Ampul	18028	18028	0	100%
14	Tenaga medis : Dokter	Orang	158	158	0	100%
15	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	468	468	0	100%
16	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	336	336	0	100%
17	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	53	53	0	100%
18	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	53	53	0	100%
19	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	16220	16220	0	100%

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025.

Tabel diatas menggambarkan mutu SPM (logistik dan SDM) yang merupakan pendukung dalam penerapan SPM dengan bobot capaian 20%. Sehingga apabila dihitung capaian mutu SPM Pelayanan Kesehatan pada usia produktif diperoleh angka sebagai berikut:
 $(100 + 100) / 2 = 100$

Sehingga Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) nya untuk Pelayanan Kesehatan pada usia produktif adalah sebagai berikut:

(Persentase capaian mutu x bobot mutu) + (Persentase capaian penerima layanan x bobot penerima)

= (100 x 20%) + (100 X 80%)

= 20 + 80

= 100.

7. **Pelayanan kesehatan pada usia lanjut**
Indikator: Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan pada usia lanjut merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang bertujuan menjaga kualitas hidup dan kemandirian lansia. Pelayanan kesehatan lansia menjadi langkah strategis dalam mengendalikan penyakit degeneratif dan meningkatkan harapan hidup sehat. Berdasarkan data Tahun 2025, capaian pelayanan kesehatan pada usia lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.20
Pemenuhan Barang/Jasa Indikator Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Satuan	Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	Total Pencapaian
Jumlah yang harus dilayani		Orang	223938	223938	0	100%
Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)			Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Total Pencapaian
1	Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	53	53	0	100%
2	Glukometer (alat pemeriksaan gula darah)	Paket	53	53	0	100%
3	Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	53	53	0	100%

Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Satuan	Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	Total Pencap aian
4	Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	223938	223938	0	100%
5	Instrumen skrining lansia sederhana (SKILAS), instrumen aktivitas kehidupan sehari-hari (AKS/Activity daily living (ADL Barthel)	Paket	223938	223938	0	100%
6	Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	16199	16199	0	100%
7	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	53	53	0	100%
8	Tenaga medis : Dokter	Orang	158	158	0	100%
9	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	468	468	0	100%
10	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	336	336	0	100%
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	53	53	0	100%
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	53	53	0	100%
13	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	16220	16220	0	100%

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025.

Tabel diatas menggambarkan mutu SPM (logistik dan SDM) yang merupakan pendukung dalam penerapan SPM dengan bobot capaian 20%. Sehingga apabila dihitung capaian mutu SPM Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut diperoleh angka sebagai berikut:

$(100 + 100) / 2 = 100$

Sehingga Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) nya untuk Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut adalah sebagai berikut:

$(\text{Persentase capaian mutu} \times \text{bobot mutu}) + (\text{Persentase capaian penerima layanan} \times \text{bobot penerima})$
 $= (100 \times 20\%) + (100 \times 80\%)$

= 20 + 80
= 100.

8. **Pelayanan kesehatan penderita hipertensi**
Indikator: Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang bertujuan mengendalikan tekanan darah serta mencegah terjadinya komplikasi seperti stroke, penyakit jantung, dan gagal ginjal. Pengendalian hipertensi secara berkelanjutan menjadi upaya penting dalam menekan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular. Berdasarkan data Tahun 2025, capaian pelayanan kesehatan penderita hipertensi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.21
Pemenuhan Barang/Jasa Indikator Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Satuan	Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	Total Pencapaian
Jumlah yang harus dilayani		Orang	154171	191372	+37201	100%
Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)			Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Total Pencapaian
1	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	Paket	354	354	0	100%
2	Obat Hipertensi	Paket	1850052	2296464	+446412	100%
3	Tensimeter (mengukur tekanan darah)	Unit	354	354	0	100%
4	Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Aplikasi	154171	191372	+37201	100%

Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Satuan	Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	Total Pencapaian
5	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat) kesehatan	Paket	53	53	0	100%
6	Tenaga medis : Dokter	Oran g	158	158	0	100%
7	Tenaga kesehatan : Bidan	Oran g	468	468	0	100%
8	Tenaga kesehatan : Perawat	Oran g	336	336	0	100%
9	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Oran g	53	53	0	100%
10	Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Oran g	53	53	0	100%
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Oran g	53	53	0	100%
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Oran g	53	53	0	100%

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025.

Tabel diatas menggambarkan mutu SPM (logistik dan SDM) yang merupakan pendukung dalam penerapan SPM dengan bobot capaian 20%. Sehingga apabila dihitung capaian mutu SPM Pelayanan Kesehatan pada penderita hipertensi bayi baru lahir diperoleh angka sebagai berikut:

$(100 + 100) / 2 = 100$

Sehingga Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) nya untuk Pelayanan Kesehatan pada penderita hipertensi adalah sebagai berikut:

$(\text{Persentase capaian mutu} \times \text{bobot mutu}) + (\text{Persentase capaian penerima layanan} \times \text{bobot penerima})$
 $= (100 \times 20\%) + (100 \times 80\%)$
 $= 20 + 80$
 $= 78.51.$

9. **Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus**
Indikator: Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan layanan kesehatan

Pelayanan kesehatan bagi penderita diabetes melitus merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang bertujuan mengendalikan kadar gula darah serta mencegah komplikasi jangka panjang seperti penyakit jantung, gagal ginjal, neuropati, dan gangguan penglihatan. Pengelolaan diabetes melitus secara komprehensif dan berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup penderita dan menekan angka kesakitan akibat penyakit tidak menular. Berdasarkan data Tahun 2025, capaian pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.22
Pemenuhan Barang/Jasa Indikator Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Satuan	Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	Total Pencapaian
Jumlah yang harus dilayani		Orang	43315	62597	+19282	100%
Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)			Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	Total Pencapaian
1	Obat Diabetes Melitus	Paket	519780	751164	+231384	100%
2	Fotometer atau Glukometer (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	Unit	354	354	0	100%
3	BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : Reagen Glukosa atau Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet	Unit	519780	950000	+430220	100%

4	Formulir pencatatan dan pelaporan, aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM), ASIK, SIMPUS	Formulir	43315	62597	+19282	100%
5	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Paket	354	354	0	100%
6	Tenaga medis : Dokter	Orang	158	158	0	100%
7	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	468	468	0	100%
8	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	336	336	0	100%
9	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	53	53	0	100%
10	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	53	53	0	100%
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	53	53	0	100%
12	Tenaga kesehatan : Teknis Medis (ATLM)	Orang	53	53	0	100%

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025.

Tabel diatas menggambarkan mutu SPM (logistik dan SDM) yang merupakan pendukung dalam penerapan SPM dengan bobot capaian 20%. Sehingga apabila dihitung capaian mutu SPM Pelayanan Kesehatan pada penderita diabetes mellitus diperoleh angka sebagai berikut:

$(100 + 100) / 2 = 83.72$

Sehingga Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) nya untuk Pelayanan Kesehatan pada penderita diabetes mellitus adalah sebagai berikut:

(Persentase capaian mutu x bobot mutu) + (Persentase capaian penerima layanan x bobot penerima)

$= (100 \times 20\%) + (100 \times 80\%)$

$= 20 + 80$

$= 100.$

10. Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat Indikator: Jumlah Warga Negara Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) yang terlayani Kesehatan

Tabel 4.23
Pemenuhan Barang/Jasa Indikator Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Satuan	Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	Total Pencapaian
Jumlah yang harus dilayani		Orang	3504	3685	+181	100%
Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)			Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Total Pencapaian
1	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia) bentuk fisik atau elektronik	Buku	54	54	0	100%
2	Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)	Jenis	11	11	0	100%
3	Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)	Formulir	3	3	0	100%
4	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	Formulir	3504	3685	+181	100%
5	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Media	200	247	-47	100%
6	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	53	53	0	100%
7	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan	Orang	53	53	0	100%

	yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa					
8	Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	Orang	53	53	0	100%
9	Tenaga profesional lainnya	Orang	30	30	0	100%

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025.

Tabel diatas menggambarkan mutu SPM (logistik dan SDM) yang merupakan pendukung dalam penerapan SPM dengan bobot capaian 20%. Sehingga apabila dihitung capaian mutu SPM Pelayanan Kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) diperoleh angka sebagai berikut:

$(100 + 100) / 2 = 79.2$

Sehingga Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) nya untuk Pelayanan Kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) adalah sebagai berikut:

$(\text{Persentase capaian mutu} \times \text{bobot mutu}) + (\text{Persentase capaian penerima layanan} \times \text{bobot penerima})$
 $= (100 \times 20\%) + (100 \times 80\%)$
 $= 20 + 60$
 $= 100.$

11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
Indikator: Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan bagi orang terduga tuberkulosis (TBC) merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang bertujuan menemukan dan menangani kasus TBC secara dini guna mencegah penularan di masyarakat. Deteksi dan penanganan dini kasus TBC menjadi langkah strategis dalam memutus rantai penularan serta meningkatkan keberhasilan pengobatan. Berdasarkan data Tahun 2025, capaian pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.24
Pemenuhan Barang/Jasa Indikator Pelayanan Kesehatan
Orang Terduga Tuberkulosis

Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Satuan	Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	Total Pencapaian
Jumlah yang harus dilayani		Oran g	53788	58468	+4680	100%
Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)			Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	Total Pencapaian
1	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	Paket	98	98	0	100%
2	Reagen Zn TB	Kit	11067	11067	0	100%
3	Masker bedah dan Masker N95	Paket	11067	11067	0	100%
4	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/ Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	53788	58468	+4680	100%
5	Katrid tes cepat molekuler	Test	53788	58468	+4680	100%
6	Formulir pencatataFormulir pencatatan dan pelaporann dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Doku men	170	170	0	100%
7	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Doku men	170	170	0	100%
8	Tuberkulin	Vial	830	830	0	100%
9	Tenaga medis : Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	Oran g	170	170	0	100%
10	Tenaga kesehatan : Perawat	Oran g	170	170	0	100%
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Oran g	170	170	0	100%
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Oran g	50	50	0	100%

13	Tenaga kesehatan : Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Oran g	168	168	0	100%
14	Tenaga kesehatan : Radiografer	Oran g	48	48	0	100%
15	Kader Kesehatan	Oran g	53	53	0	100%

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025.

Tabel diatas menggambarkan mutu SPM (logistik dan SDM) yang merupakan pendukung dalam penerapan SPM dengan bobot capaian 20%. Sehingga apabila dihitung capaian mutu SPM Pelayanan Kesehatan pada orang terduga tuberkulosis diperoleh angka sebagai berikut:

$(100 + 100) / 2 = 100$

Sehingga Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) nya untuk Pelayanan Kesehatan pada orang terduga tuberkulosis adalah sebagai berikut:

$(\text{Persentase capaian mutu} \times \text{bobot mutu}) + (\text{Persentase capaian penerima layanan} \times \text{bobot penerima})$
 $= (100 \times 20\%) + (100 \times 80\%)$
 $= 20 + 80$
 $= 100.$

12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)
Indikator: Jumlah Warga Negara Dengan Risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya

Pelayanan kesehatan bagi orang dengan risiko terinfeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang bertujuan meningkatkan deteksi dini dan mencegah penularan HIV di masyarakat. Upaya ini menjadi langkah strategis dalam pengendalian HIV/AIDS melalui pendekatan promotif, preventif, dan kuratif secara berkelanjutan. Berdasarkan data Tahun 2025, capaian pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.25
Pemenuhan Barang/Jasa Indikator Pelayanan Kesehatan
Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya
Tahan Tubuh Manusia (Human immunodeficiency Virus)

Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Satuan	Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	Total Pencapai an
Jumlah yang harus dilayani		Oran g	61547	94828	+33281	100%
Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)			Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenu hi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuh i	Total Penca paian
1	Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	Paket	100	100	0	100%
2	Tes cepat HIV (RDT) pertama	Test	61547	94828	+33281	100%
3	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Sput yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	61547	94828	+33281	100%
4	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	Paket	61547	94828	+33281	100%
5	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Oran g	100	100	0	100%
6	Tenaga kesehatan : Bidan	Oran g	100	100	0	100%
7	Tenaga kesehatan : Perawat	Oran g	100	100	0	100%
8	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Oran g	100	100	0	100%
9	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Oran g	50	50	0	100%
10	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunya	Oran g	100	100	0	100%

Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Satuan	Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	Total Pencapa ian
i Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan						

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025.

Tabel diatas menggambarkan mutu SPM (logistik dan SDM) yang merupakan pendukung dalam penerapan SPM dengan bobot capaian 20%. Sehingga apabila dihitung capaian mutu SPM Pelayanan Kesehatan pada orang dengan risiko terinfeksi HIV diperoleh angka sebagai berikut:

$(100 + 100) / 2 = 100$

Sehingga Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) nya untuk Pelayanan Kesehatan pada orang dengan risiko terinfeksi HIV adalah sebagai berikut:

$(\text{Persentase capaian mutu} \times \text{bobot mutu}) + (\text{Persentase capaian penerima layanan} \times \text{bobot penerima})$
 $= (100 \times 20\%) + (100 \times 80\%)$
 $= 20 + 80$
 $= 100.$

4.2.4 Alokasi Anggaran untuk Pemenuhan SPM Urusan Kesehatan

Alokasi anggaran untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan tahun 2025 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, juga dari sumber lain yang sah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.27
Anggaran SPM Bidang Kesehatan Tahun 2025

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KOTA BEKASI	6,984,726,328,180
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	930,339,974,897
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	5,457,185,632

NO	PENDANAAN	PAGU
	APBD	5,457,185,632
	A. APBD MURNI	324,471,800
	B. APBD DAU	351,927,000
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	3,635,512,632
	E. DANA BAGI HASIL	1,145,274,200
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

Sumber : e-SPM Bidang Kesehatan Tahun 2025

4.2.5 Dukungan Personil untuk Pemenuhan SPM Urusan Kesehatan

Jumlah pegawai pendukung SPM Bidang Kesehatan Tahun 2025 sebanyak 5.033 orang, meningkat dari 3.268 orang pada Tahun 2024 atau bertambah sekitar 1.800 personil. Penambahan ini berkaitan dengan perluasan cakupan 12 indikator SPM, peningkatan jumlah sasaran layanan, serta penguatan kapasitas puskesmas dan rumah sakit. Secara efektivitas, hal ini sejalan dengan capaian indikator kinerja sebesar 89,48%, sehingga mendukung peningkatan pelayanan. Namun demikian, dari sisi efisiensi tetap perlu evaluasi berbasis analisis beban kerja agar penambahan SDM benar-benar proporsional dan optimal

Adapun tenaga fungsional yang khusus di bidang teknis kesehatan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.27
Rekapitulasi Tenaga Fungsional Kesehatan di Kota Bekasi

No	Perangkat Daerah	Jenis Jabatan	Jumlah
1.	Dinas Kesehatan	Dokter	295
		Dokter Gigi	249
		Perawat	509
		Bidan	628

No	Perangkat Daerah	Jenis Jabatan	Jumlah
		Farmasi	222
		Kesehatan Masyarakat	54
		Kesehatan Lingkungan	52
		Gizi	81
		Pranata Laboratorium Kesehatan	122
		Tenaga Penunjang	1121
		Jumlah	3333
2.	RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid	Medis	153
		Psikologi Klinis	-
		Keperawatan	548
		Kebidanan	81
		Kefarmasian	65
		Kesehatan Masyarakat	10
		Kesehatan Lingkungan	5
		Gizi	19
		Keterapian Fisik	60
		Keteknisian Medis	33
		Teknik Biomedika	41
		Kesehatan Tradisional	-
		Asisten Tenaga Kesehatan	19
		Tenaga Penunjang	666
		Jumlah	1700
		Jumlah Total	5033

Sumber: Dinas Kesehatan dan RSUD CAM, 2025.

Untuk SDM (Sumber Daya Manusia Kesehatan) Kota Bekasi sudah cukup baik, dari jumlahnya yang selalu mengalami peningkatan, namun masih perlu peninjauan ulang terhadap pemerataan dan juga peningkatan kapasitas dalam memberikan pelayanan, utamanya pelayanan yang sesuai standar minimal sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang

4.2.6. Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Urusan Kesehatan

Pada Tahun 2025 dalam upaya mencapai target capaian kinerja 100% Dinas Kesehatan Kota Bekasi masih menemui kesulitan. Permasalahan dalam penerapan SPM. Permasalahan-permasalahan teknis pada tiap jenis pelayanan SPM yang ada dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4,27
Kendala, Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM
Urusan Kesehatan Tahun 2025

NO	INDIKATOR	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Pengelolaan pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Belum kuatnya kemitraan dengan lintas program dan lintas sektor dalam hal pelaporan	Meningkatkan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor
2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Belum kuatnya kemitraan dengan lintas program dan lintas sektor dalam hal pelaporan	Meningkatkan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor
3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Belum kuatnya kemitraan dengan lintas program dan lintas sektor dalam hal pelaporan	Meningkatkan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor
4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Masyarakat kurang memahami tentang pentingnya pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita dalam peningkatan kualitas anak, Kurang kuatnya jejaring kemitraan antara Dinas Kesehatan dan DPP KB (Bina Keluarga Balita), Dinas Pendidikan	Penguatan sosialisasi kepada masyarakat secara kontinyu, Pembuatan MOU antara Dinas Kesehatan, DPPKB, Dinas Pendidikan terkait pelayanan sdidtk bagi balita terutama dalam hal pencatatan dan pelaporan fasilitas kesehatan di kirim ke Puskesmas wilayah
5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pengadaan buku raport kesehatan masih sangat minim dibandingkan jumlah anak baru masuk sekolah di tiap tahunnya.	Penambahan pengadaan buku raport kesehatan dan pemantauan kesehatan anak usia Pendidikan dasar.
6	Pengelolaan	Masih diperlukannya	Memperkuat

NO	INDIKATOR	PERMASALAHAN	SOLUSI
	Terduga Tuberkulosis	masyarakat yang menderita TBC enggan datang ke Puskesmas untuk berobat, Terduga TBC sudah diberikan pot dahak untuk menampung dahak pagi, namun terduga TBC tidak dapat mengeluarkan dahak sehingga pot yang sudah diberikan tidak kembali, Terdapat keterbatasan kartrid TCM karena: Barang Import dan pembeliannya melalui pemesanan terlebih dahulu. Saat ini pengadaan katrid TCM secara nasional hanya dilakukan oleh PT. Medquest.	TBC (apa itu TBC, Pencegahan dan cara penularan), Bekerjasama dengan bidang kesmas dan OPD lain seperti Diskominfo dalam rangka penyebarluasan informasi terkait TBC, Bagi petugas pelayanan kesehatan diharapkan untuk mengedukasi terkait cara mengeluarkan dahak, kemudian petugas dapat menampung dahak sewaktu untuk meminimalisir sampel yang tidak Kembali, ketersediaan kartrid pada saat ini masih aman sehingga masih cukup untuk penegakan Diagnosa TBC, dan dapat dilakukan juga dengan Pemeriksaan Mikroskopis.
12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Server pada aplikasi SIHA 2.1 sering terkendala ataupun maintenance yang berpengaruh pada penginputan yang tidak real time, masalah yang terjadi pada hal pencatatan pelaporan seperti	Monitoring secara berkala agar setiap tim HIV di fasyankes tertib dalam penginputan pelaporan SIHA 2.1, dan aktif berkoordinasi dengan Dinkes Jabar & Kemenkes

NO	INDIKATOR	PERMASALAHAN	SOLUSI
		ketidaksesuaian laporan yang di input dengan data yang terbaca oleh SIHA 2.1, yang sangat berpengaruh terhadap tarikan serta pengolahan data untuk laporan SPM HIV.	terkait kendala yang dihadapi di SIHA 2.1 agar data laporan SPM juga tidak terkendala
		Pada saat mobile VCT (Tes HIV) terhadap kelompok orang berisiko di tempat tertentu (contoh di tempat hiburan). Tim kesehatan dari Puskesmas mengalami kesulitan untuk masuk (ditolak) melakukan pemeriksaan HIV.	Berkoordinasi dengan Tim Sekretariat KPA Kota Bekasi untuk melakukan advokasi terhadap hotspot maupun tempat lain yang terdapat populasi kunci atau kelompok risiko lain, agar dapat mendukung kegiatan mobile vct yang manfaatnya dalam rangka mendukung penanggulangan HIV Kota Bekasi
		Isu efisiensi dan pemenuhan logistik dari Pusat khususnya non ARV termasuk rapid tes untuk tes HIV (SPM HIV) yang kedepannya dibebankan ke Pemerintah Daerah, sehingga kedepannya berpotensi terdapat keterbatasan logistik	Memaksimalkan ketersediaan anggaran daerah untuk pemenuhan logistik, serta berkoordinasi berkala dengan Kemenkes/Dinkes Jabar agar kebutuhan logistik SPM HIV dapat terpenuhi

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bekasi, 2025.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja, penyelenggaraan Urusan Kesehatan Tahun 2025 menunjukkan

kategori baik, dengan tingkat capaian indikator sebesar 89,48%. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) telah terlaksana secara optimal, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang perlu ditingkatkan agar mencapai target maksimal.

Hal ini menunjukkan bahwa dukungan perencanaan dan penganggaran telah relatif selaras dengan kebutuhan pelayanan dasar kesehatan masyarakat, termasuk penguatan sumber daya manusia dan fasilitas pelayanan kesehatan. Ke depan, fokus kebijakan perlu diarahkan pada peningkatan kualitas dan pemerataan layanan, optimalisasi efektivitas anggaran, serta penguatan sistem kesehatan yang lebih responsif, preventif, dan berkelanjutan guna mencapai capaian SPM yang lebih maksimal.

4.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM

Urusan Pekerjaan Umum (PU) di Kota Bekasi memiliki peran strategis dalam mendukung penyediaan infrastruktur dasar yang berkualitas dan berkelanjutan. Pelaksanaan urusan ini mencakup penyediaan kebutuhan pokok air minum, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase dan pengendalian banjir, serta pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan. Mengingat karakteristik Kota Bekasi sebagai wilayah perkotaan dengan tingkat pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang tinggi, kebutuhan terhadap layanan infrastruktur dasar terus mengalami peningkatan.

Untuk mengetahui capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum di Kota Bekasi tahun 2025, dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar SPM Urusan Pekerjaan Umum

Jenis pelayanan dasar urusan pekerjaan umum yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Kota Bekasi tahun 2024 sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut:

Tabel 4.30
Jenis Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Kota Bekasi yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari hari	100%	Setiap Tahun
2.	pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Kota Bekasi yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap Tahun

Sumber: Permendagri Nomor 59 Tahun 2021.

Jika melihat Tabel 4.30 diatas, maka Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 mengamanatkan bahwa Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum harus dicapai 100 persen setiap tahunnya. Jenis standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi tersebut, jumlah dan jenisnya sama dengan tersebut jumlah dan jenis standar pelayanan minimal yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum

- Adapun target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum oleh Pemerintah Kota Bekasi sudah tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2025-2029 ditempatkan pada Indikator Program : Persentase Penduduk Berakses Air Minum pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, karena sudah ditetapkan dalam perda, ada pun kalimat namum menunjukkan bahwa apa yang sudah diperdakan tidak sesuai

seharusnya, karena penetapan target seharusnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Maka, capaian atas terlayannya air minum adalah : 100 % dari target 25 % pada tahun 2025

2. Cakupan Luasan Wilayah Perumahan dan Permukiman yang terlayani Pengolahan Air Limbah Domestik pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, namun dalam target capaian kinerja Tahun 2025 baru ditetapkan sebesar 99,58 persen.

Kedua indikator program tersebut ditetapkan untuk mencapai Sasaran Strategis “Meningkatnya kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran” dengan Indikator Sasaran “Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran”. Dalam Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2025-2029” meskipun belum secara eksplisit menetapkan nomenklatur Indikator SPM Urusan Pekerjaan Umum, namun Sasaran Strategis beserta Indikator Program yang ditetapkan dapat mendukung pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum.

Mengacu pada Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi menentukan target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.31
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan
Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar (SPM)	Indikator Capaian	Target Indikator Tahun 2024	Batas Waktu
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Kota Bekasi yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari hari	2.121 Orang	2025
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Kota Bekasi yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	3.912 Orang	2025

Sumber: Dinas Perkimtan Kota Bekasi, 2025.

Dalam proses penetapan Target Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum tersebut, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi melakukan tiga tahapan penghitungan target sebagai berikut:

1. Proses Pengumpulan Data
Target SPM Urusan Pekerjaan Umum ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Standar Pelayanan Minimal serta mempertimbangkan kondisi eksisting layanan infrastruktur dan kapasitas fiskal daerah.
2. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar
Setelah dilakukan pengumpulan data, tahap selanjutnya dilakukan analisa kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar Urusan Pekerjaan Umum meliputi Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Data yang diperoleh dilakukan analisa dan menghasilkan dua rencana kegiatan pemenuhan pelayanan dasar Urusan Pekerjaan Umum sebagai berikut:
 - a. Pembangunan Tanki Septic yang kedap di 23 (dua puluh tiga) kelurahan sebanyak 1160 unit untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Sanitasi Buruk;
 - b. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan (Pengembangan

- Jaringan Distribusi) di Jatisampurna dan Jatiasih;
- c. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan (Pemasangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah) di Kelurahan Cikiwul, Ciketing Udik dan Sumur Batu Kecamatan Bantar Gebang;
 - d. Pembangunan Sumur Artesis (Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Sumur Artesis, Reservoir dan Bangunan Penunjang) di Kelurahan Cikiwul, Ciketing Udik dan Sumur Batu Kecamatan Bantar Gebang;
 - e. Lanjutan kegiatan operasional UPTD Pengolahan Air Limbah Domestik dan Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2025.

3. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Hasil pengumpulan data dan penghitungan kebutuhan di atas, selanjutnya dimasukkan ke dalam Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi tahun 2025 dan telah ditetapkan menjadi RKA dan DPA pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi tahun 2025.

4.3.3 Hasil Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum

Hasil Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum di Kota Bekasi didukung oleh Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025, yang tersebar di beberapa perangkat Daerah, dimana Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi sebagai leading sector dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum. Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi. Adapun Realisasi Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025 dapat disajikan sebagai berikut:

1. **Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari**
Indikator: Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan pokok Air Minum Sehari Hari

Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari merupakan salah satu bentuk pelayanan dasar dalam Urusan Pekerjaan Umum yang bertujuan menjamin setiap warga negara memperoleh akses terhadap air minum yang aman, layak, dan berkelanjutan. Pelayanan ini dilaksanakan melalui sistem penyediaan air minum perpipaan maupun non-perpipaan sesuai standar kualitas, kuantitas, dan kontinuitas yang ditetapkan. Pemenuhan indikator ini menjadi prioritas mengingat kebutuhan air minum merupakan hak dasar masyarakat serta berpengaruh langsung terhadap kesehatan dan kualitas hidup.

Berdasarkan data Tahun 2025, capaian penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.32
Pemenuhan Barang/Jasa Indikator Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari Hari

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3	4			5
1 . Penyediaan Kebutuhan Pokok Air M inum Sehari-hari						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIM A LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUM LAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	2.124	2.124	0	100 %
PERSENTASE PENCAPAIAN M UTU M INIM AL LAYANAN DASAR (20%)						
	B. Jumlah M utu Barang / Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani /Terpenuhi	
	JARINGAN PERPIPAAN					
1	Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan	Sambungan Rumah/S R	531	531	0	100 %

	perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang /hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM					
2	Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Sambungan Rumah/SR	531	531	0	100 %
	BUKAN JARINGAN PERPIPAAN					
3	Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	0	0	0	0%
4	Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	0	0	0	0%

Sumber: Dinas Perkimtan Kota Bekasi, 2025.

Untuk pemenuhan pelayanan dasar Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari jumlah target yang harus dilayani pada tahun 2025, diambil dari target yang ditentukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan permukiman, dan pertanahan kota Bekasi melalui hasil analisis di lapangan. Adapun warga Negara yang berhak menerima kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM sebanyak 531 Rumah Tangga, dimana realisasi pelayanan yang telah diberikan adalah 100 persen, yaitu sebesar 531 Rumah Tangga yang terdiri dari warga Negara yang telah terlayani dengan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari. Selain itu dalam pemberian layanan Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari tersebut ada kriteria pemenuhan jumlah mutu barang/jasa/sdm yang harus diberikan Pemerintah Kota Bekasi kepada penerima layanan sebagai berikut:

A. Jaringan Pemipaan

B. jaringan Non Pemipaan

- 1) Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM terealisasi 100% dari target yang ditentukan untuk seluruh warga kota Bekasi, adapun penerima jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari, yaitu sebanyak 531 Rumah Tangga;
- 2) Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023) terealisasi 100 Persen,

target warga yang menerima layanan SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau sebanyak 531 Rumah Tangga. Dengan demikian jumlah warga Negara yang telah terlayani SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau sebanyak 531 Rumah Tangga, capaian tersebut diperoleh dari 531 Rumah Tangga yang telah memperoleh layanan SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau;

- 3) Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon) terealisasi 0% dikarenakan tidak adanya kegiatan pembangunan Bukan Jaringan Perpipaan selama Tahun 2025;
- 4) Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst terealisasi 0% dikarenakan tidak adanya kegiatan pembangunan Bukan Jaringan Perpipaan selama Tahun 2025.

2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik **Indikator: Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik**

Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik merupakan bagian dari pelayanan dasar Urusan Pekerjaan Umum

yang bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan mencegah pencemaran air serta penyebaran penyakit berbasis lingkungan. Berdasarkan data Tahun 2025, capaian penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.33
Pemenuhan Barang/Jasa Indikator Pelayanan Air Limbah Domestik

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2		3			4
2 . Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	3.912	3.912	0	100%
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)						
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / JasaYang Belum Tersedia	
KUANTITAS SPALD						
	1 . Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	978	978	0	100%
KUALITAS SPALD						
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)						
	2 . Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	978	978	0	100%
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-S)						

3 . Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kotamaupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	594	594	0	100%
2.Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	384	384	0	100%

Sumber: Dinas Perkintan Kota Bekasi, 2025.

Untuk pemenuhan pelayanan dasar Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik target yang harus dilayani pada tahun 2025, diambil dari target yang ditentukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan permukiman, dan pertanahan kota Bekasi melalui hasil analisis di lapangan. Adapun warga Negara yang berhak menerima layanan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik sebanyak 3.912 Rumah Tangga, dimana realisasi pelayanan yang telah diberikan adalah 100 persen, yaitu sebanyak 3.912 Rumah Tangga yang telah memiliki akses sanitasi dasar dan aman, yaitu cubluk atau tangki septic.

Dalam pemberian layanan Penyediaan Pelayanan Pengolahan

Air limbah domestik tersebut ada kriteria pemenuhan jumlah mutu barang/jasa/sdm yang harus diberikan Pemerintah Kota Bekasi kepada penerima layanan sebagai berikut:

- a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)
- b. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)

Kedua sistem tersebut dirancang untuk memastikan pengolahan air limbah domestik dilakukan secara aman, layak, dan tidak mencemari lingkungan. Adapun ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic sebagai berikut :

- 1) Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik di Kota Bekasi dengan target 978 Rumah Tangga dan sudah di realisasikan sebesar 978 Rumah Tangga dengan presentase sebesar 100%;
- 2) Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota yaitu 978 Rumah Tangga dan telah terealisasi sebesar 100% atau 978 Rumah Tangga;
- 3) Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota realisasi yang telah tercapai adalah 100 persen, yaitu sebanyak 594 Rumah Tangga. Capaian tersebut diperoleh dari jumlah warga yang berjumlah 594 Rumah Tangga.

4) Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar realisasi yang telah tercapai adalah 100 persen, yaitu sebanyak 384 Rumah Tangga. Capaian tersebut diperoleh dari jumlah warga yang berjumlah 384 Rumah Tangga.

4.3.4 Alokasi Anggaran untuk Pemenuhan SPM Urusan Pekerjaan Umum

Anggaran Penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.35
Anggaran SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2025

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KOTA BEKASI	6,984,726,328,180
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	627,683,444,795
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	56,754,095,530
	APBD	56,754,095,530
	A. APBD MURNI	40,368,145,530
	B. APBD DAU	7,978,150,000
	C. APBD DAK FISIK	6,418,400,000
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	1,989,400,000
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

Sumber : e-SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2025

4.3.5 Dukungan Personil untuk Pemenuhan SPM Urusan Pekerjaan Umum

Adapun jumlah personil yang mendukung pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum sebanyak 10 (Sepuluh) orang pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dan untuk mengoptimalkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi telah mengajukan kebutuhan personil teknis bidang Pekerjaan Umum sebagai berikut:

Tabel 4.34
Kebutuhan Personil Penunjang Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Analisis Beban Kerja
1.	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama (JFT)	Diploma IV/Sarjana (S1) Teknik Sipil/Teknik Pengairan atau yang sejenisnya	5 orang
2.	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil (JFT)	Sarjana (S1) Teknik Sipil/Teknik Pengairan atau yang sejenisnya	4 orang
3.	Penata Penyehatan Lingkungan Permukiman	Diploma III/Sarjana (S1) Kesehatan Lingkungan/ Teknik/ Teknik Lingkungan	19 orang
4.	Penyusun Bahan Materi Penyuluhan	Diploma III/Sarjana (S1) Manajemen/Administrasi/Teknik	2 orang
5.	Pengadministrasi Umum	SLTA/Diploma I/Diploma II/Diploma III	4 orang

Sumber: Dinas Perkimtan Kota Bekasi, 2025.

Adapun kebutuhan pemenuhan kebutuhan kualifikasi pendidikan teknis bagi sumber daya manusia pengelola Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum sebagai berikut:

Tabel 4.35
Kebutuhan Diklat Teknis Penunjang SPM Urusan Pekerjaan Umum

No	Nama Diklat	Target	Pagu Anggaran	Terakomodir di Renstra Perangkat Daerah		Ket
				Sudah	Belum	
1.	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama (JFT)	2 orang	Dikoordinasi - kan dengan BKPSDM		Y	
2.	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil (JFT)	1 orang	Dikoordinasi- kan dengan BKPSDM		Y	
3	Penata Penyehatan Lingkungan Permukiman	2 orang	Dikoordinasi - kan dengan BKPSDM		Y	
4	Penyusun Bahan Materi Penyuluhan	1 orang	Dikoordinasi- kan dengan BKPSDM		Y	
5	Pengadministrasi Umum	3 orang	Dikoordinasi - kan dengan BKPSDM		Y	

Sumber: Dinas Perkimtan Kota Bekasi, 2025.

Berdasarkan data kebutuhan diklat dan formasi jabatan pada Urusan Pekerjaan Umum, masih terdapat sejumlah kebutuhan SDM yang belum terakomodir dalam Renstra Perangkat Daerah dan masih dikoordinasikan dengan BKPSDM. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi ketersediaan SDM, Urusan Pekerjaan Umum masih belum sepenuhnya mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pelayanan secara optimal, khususnya pada aspek sanitasi dan penyehatan lingkungan. Secara rasio kebutuhan, apabila dibandingkan dengan cakupan layanan seperti jumlah rumah tangga penerima layanan air limbah domestik dan target pelayanan infrastruktur dasar lainnya, kekurangan tenaga teknis dapat berdampak pada beban kerja yang tinggi serta potensi keterlambatan pelaksanaan program. Dengan demikian, penguatan SDM menjadi kebutuhan strategis agar capaian kinerja Urusan Pekerjaan Umum dapat lebih optimal, baik dari sisi kualitas perencanaan, pelaksanaan teknis, maupun pengawasan kegiatan.

4.3.6 Kendala, Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025 diperoleh data permasalahan penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum sebagai berikut:

Tabel 4.36
Kendala, Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025

No	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
A.	Perencanaan		
	1. Dasar dalam penentuan kebutuhan air minum berbeda tiap OPD, contohnya dalam menentukan jumlah penduduk, data yang digunakan bersumber dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil atau badan pusat statistik. Sumber air baku yang dapat dijadikan air minum sulit dicari;	1. Diperlukan pendataan untuk penentuan kebutuhan air minum serta akses sanitasi layak dan aman; 2. Koordinasi dengan OPD terkait.	1. Pendataan untuk penentuan kebutuhan air minum serta akses sanitasi layak dan aman dimasukan dalam target renja dinas; 2. Meningkatkan koordinasi antar OPD.
	2. Perhitungan kebutuhan untuk pengelolaan air limbah domestik di kota Bekasi masih belum detail , hanya di titik-titik tertentu yang berdasar hasil survey rawan sanitasi. Diharapkan dengan adanya pendataan yang detail dan terinci pada seluruh penduduk kota Bekasi bisa dijadikan acuan untuk perhitungan kebutuhan pengelolaan air limbah domestik.		
B.	Koordinasi		
	1. Kurangnya sinkronisasi data	1. Melakukan koordinasi	1. Meningkatkan dialog dan

No	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
	antara Dinas Kesehatan, Disperkimtan dan Bappelitbangda mengenai jumlah akses sanitasi layak dan aman serta pengelola SPAM komunal tidak mencatatkan penyelenggaraan air minum dengan baik sehingga kesulitan dalam permintaan data; 2. Masih terdapat penolakan warga dalam pembangunan ipal skala kota, ipal komunal dan septik tank individual serta akses air minum perpipaan karena sumber air minum dari air tanah masih layak.	dengan Dinkes dan Bappelitbangda. 2. Melakukan koordinasi dengan Perangkat warga untuk mengetahui dan mencari solusi bersama	koordinasi dengan Dinkes dan Bappelitbangda . 2. Terus meningkatkan dialog dan koordinasi dengan perangkat warga.
C.	Pendanaan		
	1. Terbatasnya dana pembangunan fisik pembangunan bidang Air Minum dan bidang Sanitasi; 2. Terbatasnya akses untuk memperoleh sumber dana selain dari APBD dan DAK kegiatan Bidang Air Minum dan Bidang Sanitasi.	Melakukan koordinasi dan sosialisasi rencana pembangunan bidang Air Minum dan Bidang Sanitasi kepada OPD terkait untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.	1. Mempersiapkan perencanaan dan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan pengajuan untuk bantuan dari pusat atau kerjasama dengan swasta; 2. Mencari informasi sumber-sumber pendanaan bidang air minum dan bidang sanitasi.
D.	Lain-lain		

No	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
	Sulitnya mendapatkan data untuk penyusunan pelaporan dari OPD terkait dan masyarakat penyelenggara air minum non perpipaan	Melakukan koordinasi dengan OPD terkait dan masyarakat untuk mencari solusi bersama terkait data untuk penyusunan pelaporan	Terus meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait dan masyarakat

Sumber : Dinas Perkimtan Kota Bekasi. 2025.

Namun permasalahan-permasalahan penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum tersebut, jika dikelompokkan ke dalam format sebagaimana yang tertuang pada menu aplikasi pelaporan Standar Pelayanan Minimal milik Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri pada laman www.spm.bangda.kemendagri.go.id, permasalahan-permasalahan tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 4.37
Permasalahan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum

No	Uraian	Permasalahan
1.	Pengumpulan data	1) Perbedaan data yang dikeluarkan oleh opd terkait yg menangani SPM, perbedaan nilai data, cara pengambilan data, pengelola SPAM komunal tidak mencatatkan penyelenggaraan air minum dengan baik sehingga kesulitan dalam permintaan data, birokrasi penyelenggaraan organisasi; 2) Data yang diperoleh dari OPD yang terkait dalam menangani SPM Sanitasi, belum detail dan terinci, sehingga memerlukan pendataan untuk akses sanitasi layak dan aman.
2.	Penghitungan kebutuhan	1) Dasar penentuan kebutuhan air minum berbeda tiap OPD contoh jumlah penduduk data yang digunakan pencatatan sipil atau badan statistik, sumber air baku yang

No	Uraian	Permasalahan
		dapat dijadikan air minum sulit dicari; 2) Perhitungan kebutuhan untuk pengelolaan air limbah domestik di kota Bekasi masih belum detail, hanya di titik-titik tertentu yang berdasar hasil survey rawan sanitasi. Diharapkan dengan adanya pendataan yang detail dan terinci pada seluruh penduduk kota Bekasi bisa dijadikan acuan untuk perhitungan kebutuhan pengelolaan air limbah domestik.
3.	Perencanaan dan penganggaran	1) Ketersediaan dana terkadang tidak sesuai dengan pengembangan air minum. Sumber pendanaan yang dapat digunakan untuk pembangunan air minum terbatas; 2) Berdasarkan pengumpulan data dan perhitungan kebutuhan penanganan SPM Sanitasi, membutuhkan anggaran yang cukup besar, namun ketersediaan anggaran yang terbatas, maka perlu dibuat skala prioritas.
4.	Pelaksanaan	1) Hambatan kondisi lingkungan, contoh infrastuktur yang sulit dibangun instalasi. Masih terdapat penolakan warga untuk diberikan akses air minum perpipaan karena sumber air minum dari air tanah masih layak. Terjadi bentrokan kegiatan pembangunan yang tidak sejalan dengan kegiatan air minum. Ketersediaan lahan untuk pembangunan instalasi air minum baru sulit diperoleh. Koordinasi pembangunan air minum antar OPD belum terkoordinasi dan terintegrasi dengan baik; 2) Dalam pelaksanaan untuk operasional Pengelolaan Air limbah Domestik dibutuhkan peningkatan

No	Uraian	Permasalahan
		kapasitas IPLT, karena IPLT yang ada kapasitasnya hanya mencapai 120 m3/hari. Masih adanya penolakan warga dalam pembangunan ipal skala kota, ipal komunal dan septitank individual. Masih belum optimalnya kesadaran warga untuk pengelolaan air limbah domestic.
5.	Lain-lain	-

Sumber : Dinas Perkintan Kota Bekasi. 2025.

4.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat di Kota Bekasi pada tahun 2024 telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, meskipun belum seluruhnya dilakukan pemenuhan terhadap Barang/Jasa, dan Anggaran untuk penunjang pencapaian kinerja Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat tahun 2025.

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dibagi menjadi dua kuadran, yaitu pemenuhan pada level proses dan pemenuhan padalevel kinerja. Adapun perangkat Daerah pelaksana Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, dengan didukung oleh beberapa perangkat Daerah lainnya, seperti Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi, Dinas Tata Ruang, Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk perencanaan penanganan 1) penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota dan (2) fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah. Untuk mengetahui capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat di

Kota Bekasi tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar SPM Urusan Perumahan Rakyat

Jenis pelayanan dasar urusan perumahan rakyat yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Kota Bekasi tahun 2025 sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut:

Tabel 4.38
Jenis Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1.	Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kota Bekasi	Jumlah Warga Kota Bekasi korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap Tahun
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kota Bekasi	Jumlah Warga Kota Bekasi yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kota Bekasi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap Tahun

Sumber: Permendagri Nomor 59 Tahun 2021.

Jika melihat Tabel 3.38 diatas, maka Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 mengamanatkan bahwa Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat harus dicapai 100 persen setiap tahunnya. Jenis standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi tersebut, jumlah dan jenisnya sama dengan tersebut jumlah dan jenis standar pelayanan minimal yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum.

4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat

Adapun target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat oleh Pemerintah Kota Bekasi sudah tertuang dalam Rencana Strategis Perubahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2025-2029 ditempatkan pada Indikator Program, yaitu Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan pada Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, adapun target capaian kinerja Tahun 2025 ditetapkan sebesar 21,84 persen.

Indikator program tersebut ditetapkan untuk mencapai Sasaran Strategis “Meningkatnya kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantor” dengan Indikator Sasaran “Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran”. Dalam Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Bekasi 2025-2029 meskipun belum secara eksplisit menetapkan nomenklatur Indikator SPM Urusan Pekerjaan Umum, namun Sasaran Strategis beserta Indikator Program yang ditetapkan dapat mendukung pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum.

Mengacu pada Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi menentukan target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.39
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan
Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar (SPM)	Indikator Capaian	Target Indikator Tahun 2024	Batas Waktu
1.	Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kota Bekasi	Jumlah Warga Kota Bekasi korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	2025
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kota Bekasi	Jumlah Warga Kota Bekasi yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kota Bekasi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	2025

Sumber: Permendagri Nomor 59 Tahun 2021.

Dalam proses penetapan Target Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat tersebut, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi melakukan tiga tahapan penghitungan target sebagai berikut:

1. Proses Pengumpulan Data

Berdasarkan data kejadian bencana Tahun 2025 dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi telah melaksanakan pemenuhan layanan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana melalui identifikasi tingkat kerusakan serta penyusunan rencana kebutuhan biaya yang telah dianggarkan dalam Renja Perangkat Daerah. Untuk layanan fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi, perencanaan belum dimuat dalam Renja Disperkintan karena pada Tahun 2024 tidak terdapat kegiatan

relokasi. Secara umum, pelaksanaan layanan disesuaikan dengan data kejadian dan kebutuhan riil pada tahun berjalan.

2. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Dalam penghitungan kebutuhan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2025, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi berpedoman pada:

- a. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- c. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

3. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Kategori bencana dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu bencana alam dan bencana sosial, sesuai dengan Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. Bencana alam yang dimaksud dalam Permensos Nomor 9 Tahun 2018 diantaranya gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, letusan gunung api, gelombang laut ekstrem, angin topan, termasuk siklon tropis/puting beliung dan atau kekeringan. Sedangkan bencana sosial terdiri dari konflik sosial, aksi teror, kebakaran permukiman dan gedung, wabah/epidemi, gagal teknologi dan atau kebakaran hutan dan lahan.

Rumah bencana dapat diberikan kepada penerima pelayanan sesuai sesuai dengan kegiatan yang memenuhi standar pelayanan dasar, yaitu:

- a. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan dan sedang, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.

- b. Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak berat, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.
- c. Pembangunan baru dilokasi baru/relokasi bagi korban bencana diberikan kepada setiap penerima layanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan, sedang dan berat yang memiliki surat Keputusan Gubernur atau Bupati/Wali Kota tentang relokasi korban bencana alam.
- d. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang menghuni rumah sewa. Kualitas jasa yang diberikan adalah pendampingan akses sewa rumah layak huni terjangkau dan bersubsidi uang sewa selama 3 bulan setelah masa tanggap darurat.

Penerima layanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang rumahnya terkena bencana alam, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Penghasilan rumah tangga kurang atau sama dengan UMK dan tidak memiliki tabungan yang mencukupi untuk menyewa atau membeli rumah.
- b. Memiliki sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan.
- c. Tidak memiliki aset bangunan lain.
- d. Terkecuali yang tidak memiliki penguasaan atas hak tanah dan bangunan dapat difasilitasi melalui bantuan uang sewa rumah layak huni atau akses terhadap rumah sewa, baik rumah susun sewa maupun rumah sewa umum.

Adapun untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota yaitu setiap rumah tangga yang terkena relokasi program pemerintah daerah dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Tidak memiliki aset tanah dan atau bangunan dalam kabupaten/kota yang sama, kecuali DKI Jakarta.
- b. Penghasilan dibawah UMP daerah setempat yang dibuktikan

dengan surat pernyataan bermaterai.

- c. Mendapatkan surat keterangan tidak mampu dari Lurah/Kepala Desa.

Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung :

- a. Pengurangan kawasan kumuh 5-10 Ha; dan/atau
- b. Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada dilahan hunian fungsi permukiman dan tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya.

4.4.3 Hasil Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat

Hasil Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat di Kota Bekasi didukung oleh Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025, yang tersebar di beberapa perangkat Daerah, dimana Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi sebagai leading sector dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat. Adapun realisasi capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2025 dapat disajikan sebagai berikut:

1. Penyediaan & Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota

Indikator: Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni

Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan yang bertujuan memastikan masyarakat terdampak bencana memperoleh tempat tinggal yang aman dan memenuhi standar kelayakan. Indikator ini diukur berdasarkan jumlah rumah korban bencana yang terdata dan memenuhi kriteria untuk memperoleh bantuan rumah layak huni. Berdasarkan data

Tahun 2025, capaian penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.40
Penyediaan & Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi
Korban Bencana

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
1	2	3			4
1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota				
	1. Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form Tahapan Penerapan) 2. Ya Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)				
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	N/A
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :	5	5	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				
	B. Jumlah Mutu Barang/ Jasa	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Belum Tersedia	
	1. Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/s ub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	5	5	0	100%

Sumber: Dinas Perkimtan Kota Bekasi, 2025.

Untuk pemenuhan pelayanan dasar Penyediaan & Rehabiitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana kabupaten/kota pada tahun 2025 realisasi 5 Rumah dari target 5 Rumah.

2. **Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**
Indikator: Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah

Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan yang bertujuan menjamin terpenuhinya kebutuhan hunian bagi warga yang terdampak kebijakan atau program pembangunan pemerintah daerah. Indikator ini diukur berdasarkan jumlah warga negara yang terdampak relokasi dan berhak memperoleh fasilitasi rumah layak huni sesuai ketentuan. Berdasarkan data Tahun 2025, capaian fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.41
Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
1	2	3			4
2.	Fasilitas Penyediaan Rumah yang layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program	N/A			N/A
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	N/A
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :	N/A	N/A	N/A	N/A
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				N/A
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Belum Tersedia	N/A

	1. Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	N/A	N/A	N/A	N/A
	2. Subsidi uang sewa	N/A	N/A	N/A	N/A
	3. Penyediaan rumah layak huni	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Disperkimtan Kota Bekasi, 2025.

Untuk pemenuhan pelayanan dasar Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada tahun 2025 realisasi N/A (*Not Available*), dikarenakan pada tahun 2025 tidak ada kegiatan relokasi warga, baik program dari Pemerintah Kota Bekasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Pusat.

4.4.4 Alokasi Anggaran untuk Pemenuhan SPM Urusan Perumahan Rakyat

Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat pada tahun 2025 yang berasal dari APBD Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 4.42
Anggaran Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2025

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KOTA BEKASI	6,984,726,328,180
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	627,683,444,795
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	555,000,000
	APBD	555,000,000
	A. APBD MURNI	0
	B. APBD DAU	555,000,000
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0

NO	PENDANAAN	PAGU
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

Sumber : e-SPM Bidang Perumahan Rakyat, 2025

4.4.5 Dukungan Personil untuk Pemenuhan SPM Urusan Perumahan Rakyat

Adapun jumlah personil yang mendukung pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat sebanyak 4 (empat) orang pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dan untuk mengoptimalkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi telah mengajukan kebutuhan personil tekni Urusan Perumahan Rakyat sebagai berikut:

Tabel 4.42
Kebutuhan Personil Penunjang Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Analisis Beban Kerja
1.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama (JFT)	Sarjana (S1) Planologi/Teknik Sipil/Arsitektur	3 orang
2.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Terampil (JFT)	Diploma III Planologi/Teknik Sipil/Arsitektur	5 orang
3.	Analisis Pengembangan Infrastruktur	Sarjana (S1) Planologi/Teknik Sipil/Arsitektur	8 orang
4.	Pengadministrasi Umum	SLTA/Diploma I/Diploma II/Diploma III	2 orang

Sumber: Dinas Perkimtan Kota Bekasi, 2025.

Adapun kebutuhan pemenuhan kebutuhan kualifikasi pendidikan teknis bagi sumber daya manusia pengelola Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat sebagai berikut:

Tabel 4.43
Kebutuhan Diklat Teknis Penunjang SPM Urusan Perumahan



Rakyat						
No	Nama Diklat	Target	Pagu Anggaran	Terakomodir di Renstra Perangkat Daerah		Ket
				Sudah	Belum	
1.	Analisis Pengembangan Infrastruktur	3 orang	Dikoordinasikan dengan BKPSDM		Y	
2.	Pengadministrasian Umum	1 orang	Dikoordinasikan dengan BKPSDM		Y	

Sumber: Dinas Perkimtan Kota Bekasi, 2025.

Berdasarkan Tabel 4.43, kebutuhan diklat teknis penunjang SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2025 meliputi Diklat Analisis Pengembangan Infrastruktur sebanyak 3 orang dan Pengadministrasian Umum sebanyak 1 orang. Seluruh kebutuhan tersebut masih dalam koordinasi dengan BKPSDM dan belum terakomodir dalam Renstra Perangkat Daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas SDM masih diperlukan guna mendukung pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal secara lebih optimal, khususnya dalam aspek perencanaan teknis dan administrasi layanan perumahan rakyat.

4.4.6 Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025 diperoleh data permasalahan penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat sebagai berikut:

Tabel 4.44
Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Urusan Perumahan
Rakyat Tahun 2025

No	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
A.	Perencanaan		
	1. Data warga yang berhak memperoleh layanan diperoleh setelah terjadi kejadian bencana; 2. Belum menganggarkan untuk pembangunan kembali atau rehabilitasi rumah yang terkena relokasi program pemerintah	1. Mengidentifikasi kerusakan rumah akibat bencana sesuai dengan hasil survey serta mengajukan database hasil survey untuk diusulkan dalam program rutilahu; 2. Melakukan perencanaan dan penganggaran dalam rencana kerja dinas.	Pembangunan kembali atau rehabilitasi rumah yang terkena relokasi program pemerintah dimasukan dalam target Renja Dinas
B.	Koordinasi		
	Masih belum optimalnya koordinasi lintas perangkat daerah dalam	Diperlukan koordinasi yang lebih optimal dengan OPD Terkait	Membuat Standar Operasional Prosedur penanganan rutilahu akibat bencana
C.	Pendanaan		
	Anggaran peningkatan rutilahu akibat bencana sudah masuk kedalam renja Disperkimtan, namun untuk pemberian ganti rehabilitasi rumah layak huni korban bencana, warga negara yang berhak mendapatkan layanan baru dapat ditentukan setelah adanya bencana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah terkait status kebencanaan.	Apabila terdapat kekurangan anggaran dapat diajukan di APBD-P	Mengajukan usulan dan pendanaan untuk kegiatan rehabilitasi rumah korban bencana
D.	Lain-lain		
	-	-	-

Sumber: Dinas Perkimtan Kota Bekasi, 2025.

Namun permasalahan-permasalahan penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat tersebut, jika dikelompokkan ke dalam format sebagaimana yang tertuang pada menu aplikasi pelaporan Standar Pelayanan Minimal milik Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri pada laman www.spm.bangda.kemendagri.go.id, permasalahan - permasalahan tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 4.45
Permasalahan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat

No	Uraian	Permasalahan
1.	Pengumpulan data	Seringkali ditemui warga korban bencana yang tidak memiliki identitas kependudukan karena hilang ataupun bukan merupakan warga yang memiliki Nomor Induk Kependudukan Kota Bekasi serta rumah yang rusak akibat bencana dalam kondisi tidak berpenghuni, sehingga menyulitkan pendataan.
2.	Penghitungan kebutuhan	Karena bencana sulit diprediksi, sehingga berdampak pada sulitnya merencanakan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar urusan Perumahan Rakyat.
3.	Perencanaan dan penganggaran	Anggaran peningkatan rutilahu akibat bencana sudah masuk kedalam renja Disperkimtan, namun untuk ganti rehabilitasi rumah layak huni korban bencana, warga negara yang berhak mendapatkan layanan baru dapat ditentukan setelah adanya bencana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah terkait status kebencanaan.
4.	Pelaksanaan	-
5.	Lain-lain	-

Sumber: Dinas Perkimtan Kota Bekasi, 2025.

Secara umum, penyelenggaraan Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM), khususnya dalam penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana berdasarkan data kejadian pada tahun berjalan. Perencanaan dan penganggaran

telah disesuaikan dengan kebutuhan riil yang teridentifikasi. Pada aspek fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat terdampak relokasi, pelaksanaan disesuaikan dengan kondisi aktual dimana tidak terdapat kegiatan relokasi pada periode sebelumnya. Dari sisi sumber daya manusia, masih terdapat kebutuhan penguatan kapasitas melalui diklat teknis guna mendukung optimalisasi pelaksanaan program. Secara keseluruhan, pelaksanaan Urusan Perumahan Rakyat berjalan sesuai kebutuhan layanan dan ketentuan yang berlaku.

4.5 URUSAN TRANTIBUMLINMAS

Kondisi Kota Bekasi sebagai wilayah perkotaan dengan kepadatan penduduk dan aktivitas ekonomi yang tinggi menuntut respons cepat terhadap potensi gangguan ketertiban umum, kejadian kebakaran, serta risiko bencana. Upaya yang dilakukan meliputi patroli penegakan peraturan daerah, penanganan pelanggaran ketertiban umum, peningkatan kapasitas respons kebakaran dan penyelamatan, serta penguatan sistem mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Penyelenggaraan layanan terus diarahkan pada peningkatan kecepatan respons, ketersediaan sarana prasarana, serta penguatan koordinasi antarinstansi guna menjamin rasa aman dan perlindungan bagi masyarakat.

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dibagi menjadi dua kuadran, yaitu pemenuhan pada level proses dan pemenuhan pada level kinerja. Adapun perangkat Daerah pelaksana Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan didukung oleh beberapa perangkat Daerah lainnya, seperti Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, Dinas Sosial Kota Bekasi dan Bagian Perlengkapan Setda Kota Bekasi.

Jenis pelayanan dasar urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah

Kota Bekasi tahun 2025 sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut:

Tabel 4.46
Jenis Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Kota Bekasi yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	Setiap Tahun
2.	Pelayanan Informasi Rawan bencana	Jumlah Warga Kota Bekasi yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap Tahun
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Kota Bekasi yang memperoleh layanan pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap Tahun
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Kota Bekasi yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap Tahun
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran	Jumlah Warga Kota Bekasi yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap Tahun

Sumber: Permendagri Nomor 59 Tahun 2021

4.5.1 SUB URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Standar Pelayanan Minimal Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kota Bekasi diampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi, meskipun secara operasional untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum erat kaitannya dengan Dinas Sosial Kota Bekasi,

Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi dan Bagian Perlengkapan Setda Kota Bekasi, untuk pemenuhan layanan ketentraman dan ketertiban umum. Untuk mengetahui capaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kota Bekasi tahun 2025, dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.5.1.1 Jenis Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Jenis pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Kota Bekasi tahun 2025 sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut:

Tabel 4.47
Jenis Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Targe Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Kota Bekasi yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	Setiap Tahun

Sumber: Permendagri Nomor 59 Tahun 2021.

Jika melihat Tabel 4.47 diatas, maka Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 mengamanatkan bahwa Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat harus dicapai 100 persen setiap tahunnya. Jenis standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi tersebut, jumlah dan jenisnya tidak sama dengan peraturan menteri teknisnya, dimana khusus untuk urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat diatur oleh 3 peraturan Menteri Dalam Negeri, yaitu:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar

Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur 3 jenis pelayanan dasar sub urusan bencana, dimana di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, seluruh jenis pelayanan dasar tersebut ditetapkan sebagai jenis pelayanan dasar yang capaian kinerjanya harus mencapai 100 persen.

- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur 1 jenis pelayanan dasar sub urusan kebakaran yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengatur 3 jenis pelayanan dasar sub urusan ketentraman dan ketertiban umum. Namun yang menjadi target pencapaian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 hanya pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

4.5.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat oleh Daerah

Indikator Jumlah Warga Kota Bekasi yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada tetap dicantumkan sebagai target daerah untuk Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.49
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan
Ketentraman Dan Ketertiban Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar (SPM)	Indikator Capaian	Target Indikator Tahun 2025	Batas Waktu
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Kota Bekasi yang memperoleh layanan dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100 %	2025

Sumber: Permendagri Nomor 59 Tahun 2021.

4.5.1.3 Hasil Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Hasil Capaian Standar Pelayanan Minimal Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kota Bekasi didukung oleh Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025, yang tersebar di beberapa perangkat Daerah, dimana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi sebagai *leading sector* dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dilaksanakan oleh Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi, Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) serta didukung oleh unsursamping seperti unsur Polresta Bekasi Kota, Kodim 0507/Bekasi dan Sub Denpom Jaya/2-1 Kota Bekasi. Adapun realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dapat disajikan dalam Tabel 4.49 berikut:

Tabel 4.49
Hasil Capaian Standar Pelayanan Minimal
Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar (SPM)	Indikator Capaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Orang Yang Terlayani	Realisasi Capaian
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Kota Bekasi yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	46 Orang	46 Orang	100%

Sumber: Satpol PP Kota Bekasi, 2025.

Pada tahun 2025, telah dilaksanakan kegiatan Penegakan Perda dan Perkada di Kota Bekasi Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 4.50
Kegiatan Penegakkan Peraturan Daerah danPeraturan Kepala Daerah Tahun 2025

No	Kegiatan Penegakan Perda/Perkada	Jumlah Kegiatan	Objek Penegakan Perda/Perkada	Jumlah Korban
1	Kegiatan Pengawasan	120 Kegiatan	a. Pelaku Usaha : 121 b. Pelaku Individu : 99	0
2	Kegiatan Non Yustisi	40 Kegiatan		
3	Kegiatan Yustisi	60 Kegiatan		

Sumber : Satpol PP Kota Bekasi 2025.

Berdasarkan data di atas, pada tahun 2025 telah dilaksanakan 38 kali kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan Perkada, namun tidak ada satupun kegiatan penegakan Perda dan Perkada yang menimbulkan korban terdampak penegakan Perda dan Perkada atau Zero korban terdampak. Angka tersebut djadikan dasar untuk penghitungan target pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2025:

1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang bertujuan menciptakan kondisi masyarakat yang tertib, aman, dan

kondusif. Pelayanan ini dilaksanakan melalui penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pengawasan terhadap potensi gangguan ketertiban umum, serta penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah Kota Bekasi. Pelaksanaan pelayanan ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja melalui kegiatan patroli rutin, penertiban, penanganan pengaduan masyarakat, serta pembinaan kepada pelaku usaha dan masyarakat agar mematuhi ketentuan yang berlaku. Indikator pelayanan diukur berdasarkan tingkat penanganan pelanggaran ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah sesuai standar teknis yang ditetapkan. Berdasarkan data Tahun 2025, capaian pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.51
Pemenuhan Barang/Jasa Indikator Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	Total Pencapaian
Jumlah yang harus dilayani		46	46	0	100%
Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)		Jumlah mutu yang harus dilayani/ dipenuhi	Jumlah mutu yang terlayani/ terpenuhi	Mutu yang belum terlayani/ terpenuhi	Total Pencapaian
1	Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)	8	8	0	100%
2	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada* (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas,	9	9	0	100%

	pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)				
3	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	40	40	0	100%
4	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	1	1	0	100%
5	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	0	0	0	100%
6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti	0	0	0	100%

dengan membawa ke rumah sakit/ pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat)				

Sumber: Satpol PP Kota Bekasi, 2025.

Untuk pemenuhan pelayanan dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu jumlah target yang harus dilayani pada tahun 2024 dari kegiatan penegakkan Peraturan Dearah dan Peraturan Kepala Daerah sebanyak 0 orang, Adapun realisasi pelayanan yang diberikan adalah 100 persen, dimana karena yang terjadi zero korban terdampak penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Namun dalam pemberian layanan tersebut ada kriteria pemenuhan barang/jasa yang harus diberikan Pemerintah Kota Bekasi kepada penerima layanan sebagai berikut:

1. Layanan Penegakan Perda sesuai SOP terealisasi 100 persen, dimana dari kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, seluruhnya dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur;
2. Layanan Pelaksanaan penegakan Perda sesuai dengan standar jumlah SDM Polisi PP dan Linmas yang sesuai standar terealisasi 100 persen, dimana dari kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, seluruhnya dilaksanakan sesuai dengan standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas;
3. Layanan Pelaksanaan penegakan perda menggunakan Sarpras sesuai standar terealisasi 100 persen, dimana dari kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, seluruhnya dilaksanakan dengan menggunakan sarana dan prasarana sesuai standar.

Pencapaian zero korban terdampak penegakkan Perda dan Perkada dikarenakan dalam operasional, Satuan Polisi Pamong Praja berpegang pada regulasi yang mengatur tentang Standar Oprasional Prosedur (SOP), kompetensi aparatur, serta sarana dan prasarana yang memadai. Terkait dengan Standar Operasional Prosedur (SOP),

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, dimana dalam permendagri tersebut mengamanatkan Satuan Polisi Pamong Praja harus memiliki minimal 6 (enam) Standar Operasional Prosedur, yaitu:

- a. Standar Operasional Prosedur penegakan peraturan daerah;
- b. Standar Operasional Prosedur ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- d. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting;
- e. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan tempat-tempat penting; dan
- f. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan operasional patrol.

Sampai dengan tahun 2025, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi memiliki 16 (enam belas) Standar Operasional Prosedur:

- a. Standar Operasional Prosedur Pengendalian Dan Pendataan Tempat Usaha Di Wilayah Pemerintah Kota Bekasi;
- b. Standar Operasional Prosedur Pengamanan Kegiatan Acara Massal;
- c. Standar Operasional Prosedur Penertiban Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
- d. Standar Operasional Prosedur Penertiban Tempat Hiburan Malam (THM);
- e. Standar Operasional Prosedur Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol;
- f. Standar Operasional Prosedur Pengamanan Kegiatan Penanganan Unjuk Rasa;
- g. Standar Operasional Prosedur Monitoring Dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Produk Hukum Kota Bekasi Terhadap

Masyarakat Dan Pelaku Usaha Yang Tidak Berbadan Hukum/Usaha (PKL);

- h. Standar Operasional Prosedur Sosialisasi Produk Hukum Kota Bekasi Terhadap Masyarakat Dan Pelaku Usaha Yang Tidak Berbadan Ukum/Usaha (PKL);
- i. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pengaduan Masyarakat Tentang Ketertiban Umum;
- j. Standar Operasional Prosedur Penyelidikan Dan Penyidikan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah Melalui Tindak Pidana Ringan (Tipiring);
- k. Standar Operasional Prosedur Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah Di Wilayah Pemerintah Kota Bekasi;
- l. Standar Operasional Prosedur Kewaspadaan Dini Di Wilayah Pemerintah Kota Bekasi;
- m. Standar Operasional Prosedur Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat;
- n. Standar Operasional Prosedur Peyelenggaraan Pelatihan Bagi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Kota Bekasi;
- o. Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Data Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
- p. Standar Operasional Prosedur penyelenggaraan Sosialisasi Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Sistem Keamanan Lingkungan;

Disamping itu, aspek penting yang dapat menjamin terwujudnya zero warga korban terdampak penegakkan perda dan perkara adalah kompetensi anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang diperoleh dari pendidikan dan pelatihan teknis sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, khususnya pada pasal 3 yang menjelaskan standar peningkatan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan anggota perlindungan masyarakat. Untuk

pendidikan dan pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja tersebut selanjutnya lebih diperjelas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Polisi Pamong Praja. Dengan semakin terdidik dan terlatihnya anggota Satuan Polisi Pamong Praja, maka akan menjadi jaminan untuk meminimalisir terjadinya warga yang terdampak penegakkan perda dan perkara, karena anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

Adapun pemenuhan sarana dan prasarana yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2025 untuk memenuhi kebutuhan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut:

1. Seragam Satuan Polisi Pamong Praja

Tabel 4.52

Pemenuhan Seragam Satuan Polisi Pamong Praja

No	Jenis Seragam	Jumlah Kebutuhan	Jumlah Yang Ada	Sisa Kebutuhan	Ket.
1.	Seragam PDU	6	-	-	Eselon 2 dan 3
2.	Seragam PDH	672	-	-	
3.	Seragam PDL 1	672	-	-	
4.	Seragam PDL 2	672	-	-	
5.	Seragam PTI	8	-	-	
6.	Seragam Pataka	13	-	-	

Sumber: Satpol PP, 2025.

2. Bangunan Gedung

Tabel 4.53

Pemenuhan Prasarana Gedung Satuan Polisi Pamong Praja

No	Uraian	Ya	Tidak	Ket.
1.	Bertingkat Wajib Memenuhi Syarat	v		
2.	Mempunyai Ruang Pemeriksaan	v		
3.	Mempunyai Aula	v		
4.	Mempunyai Musholla	v		
5.	Mempunyai toilet Pria/WanitaTerpisah	v		
6.	Mempunyai Gudang/ Ruang Penyimpanan	v		
7.	Mempunyai Ruangan Perbidang (10) Ruangan	v		

Sumber: Satpol PP, 2025

3. Kendaraan Operasional

Tabel 4.54
Pemenuhan Kebutuhan Kendaraan Operasional Satuan Polisi
Pamong Praja

No	Jenis Kendaraan	Jumlah Kebutuhan	Kondisi Yang Ada	Keterangan
1.	Double Cabin Roda 4	2	2	
2.	Truk Roda 6	4	4	
3.	Truck Angkle Roda 4	1	1	
4.	Kendaraan Dinas Roda 4	15	15	2
5.	Kendaraan Dinas Roda 4 Elf	1	1	
6.	Kendaraan Pick Up Roda 4	25	10	2
7.	Kendaraan Motor Roda 2	50	40	5
8.	Kendaraan Patroli Motor (PatMor)	7	7	
Jumlah		105	80	9

Sumber: Satpol PP, 2025.

Data tersebut dievaluasi oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dengan melibatkan seluruh Bidang dan stakeholder yang berhubungan dengan kegiatan penegakan Perda dan Perkada.

Berdasarkan data sarana dan prasarana kendaraan operasional Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025, dari total kebutuhan sebanyak 105 unit kendaraan, tersedia 80 unit atau sekitar 76,19% dari kebutuhan. Beberapa jenis kendaraan telah terpenuhi sesuai kebutuhan, seperti double cabin, truk roda 6, truck angkle, kendaraan patroli motor, dan kendaraan dinas elf. Namun demikian, masih terdapat kekurangan pada kendaraan pick up roda 4 dan kendaraan motor roda 2 yang menjadi sarana utama dalam mendukung mobilitas patroli dan penegakan Perda di lapangan.

Kondisi ini berpengaruh terhadap optimalisasi pelayanan SPM bidang ketenteraman dan ketertiban umum, khususnya dalam aspek kecepatan respons, jangkauan wilayah patroli, dan intensitas pengawasan. Meskipun layanan tetap dapat berjalan, keterbatasan sarana operasional berpotensi membatasi efektivitas pelaksanaan tugas di wilayah dengan tingkat aktivitas dan kepadatan yang tinggi. Oleh karena itu, pemenuhan sarana prasarana secara bertahap menjadi faktor penting dalam mendukung peningkatan capaian kinerja SPM bidang Trantibum.

4.5.1.4 Alokasi Anggaran untuk Pemenuhan SPM Sub urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Alokasi anggaran untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 4.56
Anggaran Bidang Trantibumlinmas Tahun 2025

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KOTA BEKASI	6,984,726,328,180
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	207,864,251,111
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	57,159,550,746
	APBD	57,159,050,746
	A. APBD MURNI	56,478,259,746
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	680,791,000
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	500

4.5.1.5 Dukungan Personil untuk Pemenuhan SPM Sub urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Ketentuan mengenai jumlah personil Satuan Polisi Pamong Prajadalam mendukung pelaksanaan Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong

Praja, dimana apabila mengacu pada penghitungan sesuai dengan instrumen pada lampiran Permendagri tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja hanya memerlukan personil sebanyak 251 – 350 orang. Namun pada kenyataannya Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai jumlah personil sebanyak 672. Adapun rincian personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dapat disajikan kedalam Tabel berikut:

Tabel 4.55
Rekapitulasi Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi
Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2025

No	Status Pegawai	Jumlah (Orang)
1.	PNS	
	a. Jabatan Struktural	
	- Eselon II b	1
	- Eselon III a	1
	- Eselon III b	2
	- Eselon IV a	11
	b. Staf PNS	126
	c. Staf Fungsional	49
2.	P3K	482
	Jumlah	672

Sumber: Satpol PP Kota Bekasi, 2025.

Berdasarkan data Tahun 2025, jumlah SDM pada Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 672 orang yang terdiri dari pejabat struktural, staf PNS, pejabat fungsional, dan 482 pegawai P3K. Komposisi ini menunjukkan bahwa dukungan personel operasional cukup dominan, sehingga mendukung pelaksanaan tugas penegakan Perda, patroli ketertiban umum, serta penanganan pengaduan masyarakat secara lebih luas dan intensif.

Ketersediaan SDM tersebut memberikan dampak positif terhadap pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam meningkatkan jangkauan pengawasan, kecepatan respons terhadap gangguan ketertiban umum, serta efektivitas pelaksanaan kegiatan lapangan. Dengan jumlah personel yang memadai, pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketenteraman dan ketertiban umum dapat berjalan lebih optimal sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

4.5.1.6 **Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Sub Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.**

Permasalahan yang dihadapi dan solusi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat telah pada tahun 2025 terdapat beberapa jenis masalah. Standar Pelayanan Minimal diperoleh data permasalahan penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai berikut:

Tabel 4.56
Permasalahan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Kententraman dan Ketertiban Umum

No	Uraian	Permasalahan
1.	Pengumpulan data	Karena padatnya kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang-Bidang yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi, berdampak pada banyaknya kegiatan yang tidak terdokumentasikan dengan baik sehingga berakibat data kurang valid.
2.	Penghitungan Kebutuhan	Dalam penghitungan kebutuhan personil, banyaknya regulasi dan kebutuhan di lapangan berdampak pada kualitas anggota Satpol PP dan Satlinmas kurang memadai.
3.	Perencanaan dan penganggaran	Satuan Polisi Pamong Praja terkendala pada penyediaan sarana dan prasarana terutama untuk kendaraan operasional di wilayah.
4.	Pelaksanaan	Terdapat beberapa sub-kegiatan yang belum ada di Tahun 2025 dan pelaksanaannya akan ada di Tahun Anggaran 2026
5.	Lain-lain	Rasio pemenuhan barang/jasa dan personil anggota Satpol PP yang ada belum sebanding dengan jumlah personil Satpol PP yang ada, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 17 Tahun 2019, sehingga dikhawatirkan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tidak bisa mempertahankan kondisi Zero Korban terdampak penegakan Perda dan Perkada di tahun-tahun berikutnya.

Sumber: Satpol PP, 2025.

Berdasarkan identifikasi permasalahan Padatnya kegiatan operasional berdampak pada dokumentasi dan validitas data,

keterbatasan sarana prasarana operasional mempengaruhi mobilitas di wilayah, serta rasio pemenuhan barang/jasa dan personel yang belum sebanding dengan kebutuhan sesuai ketentuan regulasi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan wajib tetap berjalan, namun masih memerlukan penguatan pada aspek perencanaan, dukungan sarana prasarana, peningkatan kualitas SDM, dan sistem pendataan agar capaian Standar Pelayanan Minimal dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sesuai target yang ditetapkan.

4.5.2 SUB URUSAN BENCANA

Kota Bekasi sebagai wilayah perkotaan dengan kepadatan penduduk tinggi memiliki potensi risiko bencana seperti banjir, cuaca ekstrem, kebakaran permukiman, serta kejadian kedaruratan lainnya yang memerlukan respons cepat dan terkoordinasi.

Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana di Kota Bekasi diampu oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi, meskipun secara operasional untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana erat kaitannya dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi, Dinas Sosial Kota Bekasi, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi, Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Disdamkarmat Kota Bekasi dan DBMSDA Kota Bekasi, untuk pemenuhan Pelayanan Informasi Rawan bencana, Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Untuk mengetahui capaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana di Kota Bekasi tahun 2025, dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.5.2.1 Jenis Pelayanan Dasar SPM Sub urusan Bencana

Jenis pelayanan dasar urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Kota Bekasi tahun 2024 sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut:

Tabel 4.57
Jenis Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1.	Pelayanan Informasi Rawan bencana	Jumlah Warga Kota Bekasi yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap Tahun
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Kota Bekasi yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap Tahun
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Kota Bekasi yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap Tahun

Sumber: Permendagri 59 Tahun 2021.

4.5.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana oleh Daerah

Indikator dan target SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub. Urusan bencana berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut :

Tabel 4.58
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan
Bencana

No	Jenis Pelayanan Dasar (SPM)	Indikator Capaian	Target Indikator Tahun 2024	Batas Waktu
1	Pelayanan Informasi Rawan bencana	Jumlah Warga Kota Bekasi yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	2025
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Kota Bekasi yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	2025
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Kota Bekasi yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	2025

Sumber: Permendagri 59 Tahun 2021.

Jika melihat tabel diatas untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdapat 3 jenis Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dilaksanakan dan target yang harus dicapai setiap tahunnya adalah 100% dengan kata lain, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi harus berupaya lebih optimal dalam memberikan pelayanan penanggulangan bencana kepada warga/masyarakat Kota Bekasi untuk tercapainya target SPM Sub. Urusan bencana yang sudah ditetapkan serta Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan Kota Bekasi tahun 2025-2029.

4.5.2.3 Hasil Capaian Standar Pelayanan Minimal Sub urusan
Bencana

Hasil capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana di Kota Bekasi didukung oleh Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 di dukung dengan program kegiatan dan sub.kegiatan dan sasaran prasaran Penunjang Operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi dalam memberikan pelayanan yang prima dan optimal kepada

masyarakat. Berikut realisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub.urusan bencana pada tahun 2025 :

Tabel 4.59
Hasil Capaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar SPM	Indikator Capaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Orang Yang Terlayani	Realisasi Capaian
1	Pelayanan Informasi Rawan bencana	Jumlah Warga Kota Bekasi yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	1000	1000	100%
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Kota Bekasi yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1324	1320	99.70%
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Kota Bekasi yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	145	145	100%

Sumber: BPBD Kota Bekasi, 2025.

Selain realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), untuk memberikan pelayanan yang optimal dan prima kepada masyarakat diperlukan mutu layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan mutu layanan menjadi target yang harus dipenuhi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi. Data realisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Mutu Layanan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi sebagaimana diatas, berdasarkan rekapitulasi jenis kejadian bencana yang berimplikasi

kepada korban jiwa warga/masyarakat Kota Bekasi yang terdampak bencana yang diolah oleh Tim Satuan Tugas Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOP-PB) Kota Bekasi dan data tersebut dihimpun serta direkap selama 1 (satu) Tahun pada tahun 2025, berikut realisasi mutu layanan BPBD Kota Bekasi:

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Pelayanan Informasi Rawan Bencana merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana yang bertujuan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai potensi dan tingkat risiko bencana di wilayahnya. Pelayanan ini dilaksanakan melalui penyusunan peta rawan bencana, penyebarluasan informasi kebencanaan, sosialisasi kepada masyarakat, serta pemanfaatan media komunikasi dan sistem peringatan dini untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan. Pelayanan ini menjadi dasar dalam upaya mitigasi bencana karena memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait langkah antisipasi yang perlu dilakukan sebelum terjadi bencana. Berdasarkan data Tahun 2025, capaian pelayanan informasi rawan bencana dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.60
Pemenuhan Barang/Jasa Indikator Pelayanan Informasi Rawan Bencana

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN						99.50 %
1 .	Pelayanan Informasi Rawan Bencana					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1000	1000	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				-20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA /SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPE NUHI					100.00 %
	1 . Penyusunan Kajian Risiko Bencana		0	0	0	100.00 %
	a. Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkara dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen	1	1	0	100.00 %
	b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2)	dokumen	1	1	0	100.00 %
	c. Tersedianya Berita Acara Asistensi yang ditandatangani BNPB (minimal 3)	orang	1	1	0	100.00 %
	d. Tersedianya Tenaga ahli/personil penyusunan KRB (sesuai dengan kebutuhan)	orang	4	4	0	100.00 %
	e. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang	6	6	0	100.00 %
	2 . Komunikasi, Informasi dan		0	0	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	Edukasi Rawan Bencana					
	1) . Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00 %
	a. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	eksempplar	1000	1000	0	100.00 %
	b. Terlaksananya sosialisasi tatap muka	desa	5	5	0	100.00 %
	c. Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	orang	3	3	0	100.00 %
	d. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	19	19	0	100.00 %
	2) . Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00 %
	a. Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	media	4	4	0	100.00 %
	b. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	buah	4	4	0	100.00 %
	c. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	unit	36	36	0	100.00 %
	d. Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	3	3	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	e. Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	orang	19	19	0	100.00 %
	3) . Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00 %
	a. Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	buah	12	12	0	100.00 %
	b. Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	buah	12	12	0	100.00 %
	c. Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	orang	55	55	0	100.00 %
	d. Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	orang	5	5	0	100.00 %
	e. Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	orang	55	55	0	100.00 %

Sumber: BPBD Kota Bekasi, 2025.

Berdasarkan hasil rekapitulasi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Tahun 2025, kategori pencapaian SPM kebencanaan untuk indikator Pelayanan Informasi Rawan Bencana mencapai 100%, dengan capaian agregat sebesar 99,50%.

- 1) Persentase pencapaian penerima layanan dasar yang memiliki bobot penilaian 80% telah terpenuhi secara optimal. Dari jumlah warga yang harus dilayani sebanyak 1.000 orang, seluruhnya telah menerima layanan, sehingga tidak terdapat warga yang belum terlayani.

Adapun pemenuhan mutu layanan (barang/jasa/SDM)

dengan bobot 20% juga telah terpenuhi sebesar 100%, yang meliputi:

- Tersedianya Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang telah dilegalkan;
 - Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik dan Asistensi;
 - Tersedianya tenaga ahli dan penyelenggara kegiatan;
 - Terlaksananya kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) baik secara tatap muka maupun melalui media sosial;
 - Penyediaan serta pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik.
- 2) Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana di Kota Bekasi mencatat sebanyak 1.000 jiwa yang berada pada wilayah terdampak banjir, tanah longsor dan angin puting beliung.
- 3) Kegiatan sosialisasi KIE rawan bencana yang dilaksanakan secara tatap muka di kelurahan/kecamatan diikuti oleh 1.324 peserta, serta didukung oleh 60 personel BPBD dalam pemasangan rambu evakuasi dan perangkat pendukung lainnya.

2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Tabel 4.61

Pemenuhan Barang/Jasa Indikator Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:	Orang	1324	1320	4	99.70 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				-20%	18.75 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	

	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayan i	Yang Belum Terlayan i	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/ SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPEN UHI					93.75 %
	1 . Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana		0	0	0	100.00 %
	a. Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalkan dalam bentuk perkada	doku men	1	1	0	100.00 %
	b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2)	doku men	1	1	0	100.00 %
	c. Tersedianya Berita Acara Asistensi BNPB (minimal 2)	oran g	1	1	0	100.00 %
	d. Tersedianya Tenaga ahli/personil penyusun RPB (sesuai dengan kebutuhan)	oran g	4	4	0	100.00 %
	e. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	oran g	180	180	0	100.00 %
	2 . Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)		0	0	0	100.00 %
	a. Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi (sesuai dengan kebutuhan)	doku men	1	1	0	100.00 %
	b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2 setiap penyusunan RENKON)	doku men	1	1	0	100.00 %

	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayan i	Yang Belum Terlayan i	
	c. Tersedianya Personil penyusun Renkon (sesuai dengan kebutuhan)	oran g	1	1	0	100.00 %
	d. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	oran g	1	1	0	100.00 %
	3 . Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi		0	0	0	91.67 %
	1) . Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					83.33 %
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100.00 %
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	3	3	0	100.00 %
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah	4	4	0	100.00 %
	d. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	0	1	0.00 %
	e. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	oran g	3	3	0	100.00 %
	f. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	oran g	4	4	0	100.00 %
	2) . Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00 %
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan	paket	2	2	0	100.00 %

	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayan i	Yang Belum Terlayan i	
	(sesuai dengan kebutuhan)					
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	2	2	0	100.00 %
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah	600	600	0	100.00 %
	d. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	oran g	6	6	0	100.00 %
	e. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	oran g	19	19	0	100.00 %
	4 . Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana		0	0	0	83.33 %
	1) . Simulasi Dalam Ruangan (Table-Top Exercise) *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					66.67 %
	a. Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	doku men	0	0	0	0.00 %
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100.00 %
	c. Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	oran g	86	86	0	100.00 %
	2) . Gladi Lapang *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00 %
	a. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang	doku men	1	1	0	100.00 %

	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayan i	Yang Belum Terlayan i	
	(sesuai dengan kebutuhan)					
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100.00 %
	c. Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	oran g	86	86	0	100.00 %
	5 . Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana		0	0	0	87.50 %
	1) . Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00 %
	a. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	hari	365	365	0	100.00 %
	b. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	perte mua n	12	12	0	100.00 %
	c. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	oran g	1	1	0	100.00 %
	d. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	oran g	1	1	0	100.00 %
	e. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	oran g	9	9	0	100.00 %
	2) . Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00 %

	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayan i	Yang Belum Terlayan i	
	a. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit	5	5	0	100.00 %
	b. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	unit	22	22	0	100.00 %
	c. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	unit	2	2	0	100.00 %
	d. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1	1	0	100.00 %
	3) . Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					50.00 %
	a. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	paket	15	22	-7	100.00 %
	b. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	0	0.00 %
	4) . Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00 %
	a. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat	paket	2	2	0	100.00 %

	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayan i	Yang Belum Terlayan i	
	(sesuai dengan kebutuhan)					
	b. Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	paket	15	22	-7	100.00 %
	6 . Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		0	0	0	100.00 %
	a. Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	paket	178	178	0	100.00 %
	b. Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1320	1320	0	100.00 %
	c. Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	paket	94	94	0	100.00 %
	e. Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	unit	22	22	0	100.00 %

Sumber: BPBD Kota Bekasi, 2025.

Berdasarkan tabel capaian indikator SPM Sub Urusan Bencana, secara umum kinerja pelayanan kebencanaan berada pada kategori baik dengan mayoritas indikator mencapai target. Aspek pengendalian operasi dan kesiapsiagaan menunjukkan capaian optimal, ditunjukkan dengan layanan Pusdalops 24/7 selama 365 hari, koordinasi teknis yang terpenuhi, serta ketersediaan sarana prasarana operasional dan peralatan perlindungan yang mencapai 100%.

Pada aspek pelatihan, pencegahan, dan mitigasi, sebagian besar indikator telah terpenuhi, termasuk pelatihan bagi aparatur dan masyarakat. Terdapat indikator yang belum terpenuhi pada asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana serta dokumen simulasi table-top exercise, yang memengaruhi persentase capaian pada komponen tersebut.

Secara keseluruhan, sistem penanggulangan bencana telah berjalan efektif dengan tingkat keterlayanan penerima layanan mencapai 99,70%. Peningkatan dapat diarahkan pada pemenuhan asesmen sertifikasi dan kelengkapan dokumen simulasi guna memperkuat kualitas kesiapsiagaan dan standar kompetensi sumber daya manusia.

4.5.2.3 Alokasi Anggaran untuk Pemenuhan SPM Sub Urusan Bencana

Pada tahun 2025 Pemerintah Kota Bekasi telah mengalokasikan anggaran untuk program kegiatan dan sub.kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi yang dimuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025, dan untuk Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi yang mengampu standar pelayanan minimal (SPM) untuk sub urusan bencana sebesar Rp. 5.174.156.120,- (*lima miliar seratus tujuh puluh empat juta seratus lima puluh enam ribu seratus dua puluh*

4.5.2.4 Dukungan Personil untuk Pemenuhan SPM Sub Urusan Bencana

Selain Anggaran untuk Program Kegiatan dan Sub. Kegiatan yang dialokasi Pemerintah Kota Bekasi ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi untuk tercapainya target serta tujuan dan sasaran diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan mempunyai kapasitas di bidang Penanggulangan Bencana.

Berikut rincian Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi:

Tabel 4.63
Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jenis Kepegawaian	Tingkat Pendidikan								
	S2	S1	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	Jml
ASN	3	5				3			11
TKK		10				31		1	42
PHL						5			5
Jumlah	3	17		-	-	64	-	1	85

Sumber: BPBD Kota Bekasi, 2054.

Tabel 4.64
Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang

No	Pangkat / Golongan	Jumlah	Satuan
1.	Pembina (IV.a)	3	Orang
2.	Penata (III)	6	Orang
3.	Pengatur (II)	2	Orang

Sumber: BPBD Kota Bekasi, 2025.

Tabel 4.65
Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JABATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	ASN	9 orang	3 orang	11 orang
2	PPPK	37 orang	6 orang	43 orang
3	PPPK PARUH WAKTU	27 orang		27 orang
4	PHL	8 orang		8 Orang

Sumber: BPBD Kota Bekasi, 2025.

Melihat tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi yang begitu banyak tidak sebanding dengan kualitas dan kuantitas SDM serta jabatan yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi. Dikarenakan kekurangan SDM khusus nya pada jabatan fungsional / kategori keterampilan, maka dibutuhkan penambahan pegawai dan perubahan STATUS

Grade Ke A pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk kredibilitas dalam management penanggulangan bencana serta pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana baik dari segi kualitas dan kauntitas. Sebagai acuan dalam penemuan kebutuhan pegawai dan jabatan

Tabel 4.66
Tabel Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM)

No	Jabatan	Eselon	Pendidikan	Jumlah Kebutuhan Pegawai	Satuan
1.	Kepala Pelaksana	III.d	S2/S3	1	Orang
2.	Sekretaris Badan	III.d	S1/S2	1	Orang
3.	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	IV.a	S1/S2	1	Orang
4.	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik	III.d	S1/S2	1	Orang
5.	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi	III.d	S1/S2	1	Orang
6.	Pengelola Kepegawaian		SMA	1	Orang
7.	Bendahara Pengeluaran	IV.a	S1/S2	1	Orang
8.	Verifikator Keuangan	IV.a	D3/S1	1	Orang
9.	Pengelola Laporan Keuangan	IV.a	D3/S1	1	Orang
10.	Bendahara Pembantu Barang	IV.a	D3/S1	1	Orang
11.	pengelola Barang BMD	IV.a	D3/S1	1	Orang
12.	Jabatan fungsional Umum	IV.a	D3/S1	1	Orang
13.	Tim Reaksi Cepat (TRC) / Teknis Operasional Lapangan	Non ASN	SMA / D3 / S1	84	Orang
JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI				96	Orang

Sumber: BPBD Kota Bekasi, 2025.

Selain sumber daya manusia (SDM) dan Jabatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang masih kurang memumpuni Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi juga masih membutuhkan personil berkompotensi baik secara kuantitas dan kualitas. Berikut rincian

kebutuhan diklat yang sudah atau yang belum pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah :

Tabel 4.67
Kebutuhan Diklat Teknis Penunjang SPM Urusan Bencana

No	Nama Diklat	Target	Diklat Yang Pernah Diikuti		Terakomodir Dalam Sub.Kegiatan
			Sudah	Belum	
1.	Dasar Manajemen Bencana	87 orang	81 Orang	6 Orang	Peningkatan Kapasitan SDM aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/kota
2.	TOT dasar manajemen bencana	87 orang	4		Peningkatan Kapasitan SDM aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/kota
3.	Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA)	87 orang	25 Orang	0	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten / Kota
4.	Ahli K3 Umum	87 orang	10 Orang		Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten / Kota
5.	Manajemen Jenazah saat darurat	87 orang	1 Orang		Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten / Kota
6.	Medical first responder	87 orang	1 Orang		Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten / Kota

Sumber: BPBD Kota Bekasi, 2025.

Sub. kegiatan yang mengakomodir pelaksanaan diklat aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1. -2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Tiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi Validasi. Dan keputusan tersebut menjadi dasar dalam pembuatan dan penyusunan Rencana Kerja pada Tahun 2025.

Untuk mendukung tercapaianya sebuah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang prima dan optimal kepada masyarakat Kota Bekasi di perlukan sarana prasarana Penanggulangan Bencana yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Peraturan

Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Peralatan Penanggulangan Bencana. Berikut rincian sarana prasarana penunjang operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi diantaranya :

Tabel 4.68
Peralatan Gedung Kantor

No	Uraian	Luas Tanah	Luas Bangunan	Kondisi Bangunan	Keterangan
1	Gedung Kantor	375 M2	375 M2	Kurang Layak	Milik OPD Lain
2	Gudang Logistik	1024 M2	400 M2	Layak	Milik Sendiri

Sumber: BPBD Kota Bekasi, 2025.

Tabel 4.69
Peralatan Kendaraan R-4 & R-2

No	Jenis Kendaraan	Jm 1	Merk	Tahun	Kondisi			Sumber Dana		
					Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	AP B D	AP B N	Ket
1	Truck Tangki Hino	2	Hino	2017 2025	√			√		
2	Truck Serbaguna	1	Hino	2025	√			√		
3	Daihatsu Terios Deluxe	1	Daihatsu	2021	√			√		
4	Suzuki Cary	1	Suzuki	2004	√			√		
5	Toyota Hilux Pick Up	1	Toyota	2010	√			√		
6	Isuzu Double cabin	1	Isuzu	2018	√					Hibah
7	Isuzu Panther	1	Isuzu	2018	√			√		
8	Toyota Kijang	1	Toyota	2006	√			√		
9	Daihatsu Grand Max	1	Daihatsu	2017	√			√		
10	Mitsubishi Double Cabin	2	Mitsubishi	2022	√			√		
11	Suzuki Pick up	1	Suzuki	2025	√			√		Hibah
13	Baktor Viar	2	Viar	2024	√					Hibah

No	Jenis Kendaraan	Jml	Merk	Tahun	Kondisi			Sumber Dana		
					Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	AP BD	AP BN	Ket
14	Honda Beat	1	Beat	2015	√			√		
15	Honda Revo	1	Revo	2014	√			√		
16	Trail Kawasaki	2	Kawasaki	2015	√					Hibah
17	Yamaha Progi	1	Yamaha	2020	√			√		
18	Trail Yamaha	2	Yamaha	2021	√			√		
19	Yamaha Vixion	3	Yamaha	2022	√			√		
20	Yamaha MT15	1	Yamaha	2023	√			√		

Sumber: BPBD, 2025.

Tabel 4.70
Peralatan Komunikasi

No	Jenis Alat Komunikasi	Jml	Merk	Tahun Perolehan	Kondisi			Sumber Dana		
					Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	AP BD	AP BN	Ket
1	Handy Talky	3	Icom	2014			3		√	Sudah Hibah
2	Handy Talky	12	HYT	2017	7		5	√		
3	Handy Talky	5	Motorola	2017	5			√		
4	Handy Talky	1	Motorola	2019	1			√		
5	Handy Talky	24	Motorola	2020	20		4		√	Sudah Hibah
6	Handy Talky	10	Icom	2020	10			√		

Sumber: BPBD Kota Bekasi, 2025.

Tabel 4.71
Peralatan Lainnya (Perahu/Mesin, DLL)

No	Jenis Peralatan	Jml	Merk	Tahun Perolehan	Kondisi			Sumber Dana		
					Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	AP BD	AP BN	Ket
1.	Mesin Perahu LCR 2tak	2	Yamaha	2014	2			√		
2.	Mesin Perahu LCR	1	Suzuki	2016	1			√		
3.	Mesin Perahu LCR	1	Mercury	2019	1					Hibah

No	Jenis Peralatan	Jml	Merk	Tahun Perolehan	Kondisi			Sumber Dana		
					Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	AP BD	AP BN	Ket
4.	Mesin Perahu LCR	6	Tohatsu	2020	6					Hibah
5.	Mesin Perahu LCR	1	Suzuki	2020	1					Hibah
6	Mesin Perahu LCR	2	Suzuki	2022	2			√		
7	Mesin Perahu LCR	10	Suzuki	2025	10			√		
8	Genset 5000 Watt	4	Miyata	2020	4			√		
9	Genset 6500 Watt	2	Miyata	2020	2			√		
10	Perahu LCR	1	SILVERADO	2014			1	√		
11	Perahu LCR	1	ACISA	2016	1			√		
12	Perahu Karet Rafting	2	LIQUIDSTAR	2017	1		1	√		
13	Perahu Fiber	8	Custom	2020	8					Hibah
14	Perahu Karet Rafting	1	Zebec	2020	1			√		
15	Perahu Karet LCR	1	Borneo	2020	1			√		
16	Perahu Karet Rafting	10	Moyorati	2020	10			√		
17	Perahu Karet LCR	1	BONROE	2020	1					
18	Perahu Karet Rafting	10	Jayaboard	2020	10			√		
19	Perahu Karet Rafting	2	SEABEE	2021	2			√		
20	Water Treatment	1	Custom	2015			1			Hibah
21	Tenda	7	Custom	2015	5		3			Hibah
22	Tenda Keluarga	10	Custom	2015	10					Hibah
23	Tandu Lipat	15	Custom	2015	15			√		
24	Pelampung	300	Custom	2020	300			√		
25	Dayung	100	Custom	2020	100			√		

No	Jenis Peralatan	Jml	Merk	Tahun Perolehan	Kondisi			Sumber Dana		
					Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	AP BD	AP BN	Ket
26	Helm	100	Custom	2020	100			√		
27	Mesin Pemotong Rumput	1	Krisbow	2017	1			√		
28	Compressor	1	Krisbow	2017	1			√		
29	Gergaji Mesin	4	H&L	2020	4			√		
30	Gergaji Mesin	5	STHL	2021	5			√		
31	Alat Peringatan Dini Banjir	4	Custom	2018	4					HI BAH
32	Light Tower	1	BaseLight	2020	1					HI BAH
33	Tenda Pengungsi	7	Custom	2020	7					HI BAH
34	Tenda Pleton	7	Custom	2020			7	√		
35	Tenda Pleton	5	Custom	2020	5			√		
36	Tangga Alumunium	2	KRISBOW	2017	2			√		
37	Tali Karmantel	1	Custom	2020	1			√		
38	Trolli Hand truck	1	KRISBOW	2017	1			√		
39	Mesin Foging	3	Aerofox	2021	3			√		
40	Perahu Rafting	17	OCEAN	2022	17			√		
41	Tenda Lorong	5	Custom	2022	5			√		
42	Alat Selam	2	CRESSI	2022	2			√		
43	Alat Vertical Rescue	4	REICIO	2022	4			√		
44	Tali Karmantel 200 Meter	1	TITAN	2022	1			√		
45	Tali Karmantel 200 Meter	1	BEAL	2023	1			√		
46	Alat Selam	2	AMSC	2023	2			√		

No	Jenis Peralatan	Jml	Merk	Tahun Perolehan	Kondisi			Sumber Dana		
					Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	AP BD	AP BN	Ket
			UD							
47	Body Harnes	12	A-SATBI L	2023	12			√		
48	Alat Vertical Rescue	4	PETZL	2022	4			√		

Sumber: BPBD Kota Bekasi, 2025.

Berdasarkan identifikasi kendala pada Sub Urusan Bencana di Kota Bekasi, secara umum permasalahan utama terletak pada aspek perencanaan regulatif, kelembagaan, pendanaan, serta dukungan sarana prasarana dan sumber daya manusia. Kajian risiko bencana telah tersedia, namun belum ditetapkan dalam bentuk regulasi daerah sehingga memerlukan penguatan legalitas melalui Peraturan Kepala Daerah.

Pada aspek kelembagaan, status Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi yang masih Tipe B berdampak pada efektivitas koordinasi lintas perangkat daerah. Perubahan status menjadi Tipe A menjadi langkah strategis untuk memperkuat fungsi komando, koordinasi, dan pelaksanaan penanggulangan bencana.

Dari sisi pendanaan, masih terdapat indikator dan subindikator SPM yang belum memperoleh alokasi anggaran, sehingga diperlukan prioritas penganggaran dalam dokumen perencanaan tahunan. Selain itu, keterbatasan sarana prasarana operasional serta kebutuhan peningkatan kapasitas dan sertifikasi SDM kebencanaan menjadi fokus tindak lanjut melalui pengadaan fasilitas dan pengajuan pelatihan kepada instansi teknis seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Secara keseluruhan, upaya tindak lanjut yang direncanakan menunjukkan arah penguatan sistem penanggulangan bencana yang lebih terstruktur, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

4.5.2.6 Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Sub Urusan Bencana

Dalam pelaksana penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi dihadapkan dengan permasalahan dan kendala yang dihadapi diantaranya sebagai berikut :

Tabel 4.72
Kendala dan Solusi Penerapan SPM Sub Urusan Bencana Tahun 2025

No	Kendala	Solusi	Rencana Tindaklanjut
1.	Perencanaan		
	Sudah adanya Kajian resiko bencana untuk penanganan banjir, angin puting beliung dan bencana social namun di tetapkan menjadi PERKADA/PERWALI	Harus segera di tetapkan menjadi PERKADA / PERWALI tentang kajian resiko bencana untuk penanganan banjir, angin puting beliung dan bencana sosial	Pada tahun 2025 akan dilaksanakan sub.kegiatan penyusunan kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana
2.	Koordinasi		
	Kurang efektifnya koordinasi antar Perangkat Daerah terkait, yang disebabkan oleh status Grade BPBD Kota Bekasi masih type B atau yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon III.b	Harus dilakukan perubahan Status Grade ke type A agar menjadi Badan dan pelaksana penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Bekasi menjadi lebih maksimal dan efisien efektif.	Pengajuan perubahan status grade BPBD dari tybe B ke Type A agar menjadi stara dengan Dinas / Badan di Lingkungan Perintahan Kota Bekasi
3.	Pendanaan		
	Banyak indikator dan sub indikator SPM Sub Urusan Bencana yang belum memperoleh alokasi anggaran.	Perlu adanya alokasi anggaran untuk pemenuhan SPM Sub Urusan Bencana.	Memperioritas kegiatan dan sub.kegiatan yang menjadi pelayanan dasar standar pelayanan minimal (SPM) dan dialokasi kedalam Rencana Kerja (Renja) BPBD Kota Bekasi untuk

No	Kendala	Solusi	Rencana Tindaklanjuti
			tahun tahun depan.
4.	Lain-lain		
	1) Kurangnya sarana dan prasarana operasional BPBD 2) Kurangnya SDM Kebencanaan yang terlatih dan tersertifikasi	1) Perujukan sarana dan prasarana operasional BPBD 2) Perlu adanya penambahan SDM dan peningkatan kapasitas SDM baik secara kuantitas ataupun kualitas agar terlatih dan tersertifikasi.	1) Menyampaikan Pengajuan pengadaan sarana dan prasarana Operasional BPBD 2) Pengajuan Diklat dan Bimtek ke lembaga/ kementrian seperti - BNPB - BASARNAS

Sumber: BPBD Kota Bekasi, 2025.

4.5.3 SUB URUSAN KEBAKARAN

Standar Pelayanan Minimal adalah jenis pelayanan dasar yang pada hakekatnya merupakan hak bagi setiap warga untuk memperoleh pelayanan sehingga menjadi kewajiban pemerintah untuk melaksanakannya. Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat pada Sub Urusan Kebakaran di Kota Bekasi dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi. Dari sisi manajemen pemerintahan, urusanyelayanan dasar yang tercakup dalam penyelenggaraan urusan wajib (bukan pilihan). Terkait dengan pengadaan pelayanan dasar untuk menjamin akses dan mutu pelayanan, maka disusun Standar Pelayanan Minimal (SPM).

4.5.3.1 Jenis Pelayanan Dasar SPM Sub Urusan Kebakaran

Jenis pelayanan dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut:

Tabel 4.73
Jenis Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Kota Bekasi yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap Tahun

Sumber: Permendagri Nomor 59 Tahun 2021.

Jika melihat Tabel 4.73 diatas, maka Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 mengamanatkan bahwa Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran harus dicapai 100 persen setiap tahunnya. Jenis standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi tersebut dijabarkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dalam pasal 3 meliputi:

- a. Layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran;
- b. Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
- c. Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi;
- d. Layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; dan
- e. Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

4.5.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran oleh Daerah

Target capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran di Kota Bekasi melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi sudah ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Indikator Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran sudah ditetapkan menjadi indikator sasaran, yaitu oleh Indikator Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran pada level Indikator Sasaran dan Indikator Program yang mendukung Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non-Kebakaran dalam Renstra Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Dan Dokumen Rencana Stratergis Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Tabel 4.74
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran

No	Jenis Pelayanan Dasar (Spm)	Indikator Capaian	Target Indikator Tahun 2024	Batas Waktu
1	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Kota Bekasi yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	2024

Sumber: Permendagri Nomor 59 Tahun 2021.

Dalam Renstra Perubahan ini Dinas Pemadam Kebakaran menetapkan Indikator Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran menjadi indikator tujuan dan indikator sasaran Dinas Pemadam Kebakaran, dengan demikian indikator Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran menjadi Indikator Kinerja

Utama Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi.

Disamping itu, 5 (lima) indikator layanan yang diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 ditetapkan menjadi Indikator Program pada Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi 2024-2026 serta RPJMD 2025-2029 dan Renstra 2025-2029 Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan. Perubahan untuk mendukung Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan menetapkan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Persentase layanan respon cepat (*response time*) penanggulangan kejadian kebakaran 15 menit;
2. Persentase layanan pemeriksaan dan pengujian alat proteksi kebakaran;
3. Persentase layanan pencegahan pemadam kebakaran dan penyelamatan;
4. Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran serta non kebakaran;
5. Persentase penyediaan sarana dan prasarana pemadaman kebakaran dan penyelamatan;

4.5.3.3 Hasil Capaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal, target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi pada Jenis Pelayanan Dasar “Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran” adalah 100% setiap tahun. Teknis penghitungan capaian Standar Pelayanan Minimal sub urusan kebakaran dilihat dari dua indikator, yaitu indikator utama layanan Standar Pelayanan Minimal dan indikator penunjang layanan capaian Standar Pelayanan Minimal. Secara kuantitatif teknis perhitungan dituliskan (Permendagri Nomor

114 Tahun 2018). Adapun rumus untuk menghitung indikator layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah sebagai berikut :

Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kota Bekasi pada Tahun 2025 dalam tingkat waktu tanggap (response time) Oleh Dinas Pemadam Kebakaran + Jumlah layanan pemadaman di Kota Bekasi dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran

X100%

Jumlah kasus kebakaran di Kota Bekasi pada Tahun 2025

Adapun realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.75
Realisasi Capaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar (SPM)	Indikator Capaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Orang Yang Terlayani	Realisasi Capaian
1	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Kota Bekasi yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 Orang	100 Orang	100%

Sumber: Dinas Damkarmat Kota Bekasi, 2025.

Adapun capaian kinerja Tahun 2025 atas indikator layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah kejadian kebakaran di Kota Bekasi = 314 kejadian.

b. Jumlah kejadian kebakaran yang ditangani oleh Dinas Pemadam Kebakaran dalam waktu tanggap (respon time)

= 300 kejadian.

- c. Jumlah kejadian kebakaran yang ditangani oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Pemda dalam waktu tanggap = 0 (nihil) kejadian.
- d. Jumlah kejadian kebakaran yang ditangani diluar waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan/atau relawan kebakaran = 14 kejadian.

Dari 314 kejadian kebakaran tersebut, jumlah orang yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah sebagai berikut:

Tabel 4.76
Jumlah Warga Yang Memperoleh
Layanan Penyelamatan dan Evakuasi
Korban Kebakaran

PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Satuan	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Total Pencapaian
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	300	314	+14	100%
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani /Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani /Terpenuhi	Total Pencapaian
1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	Layanan	250	300	(+50)	250
2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	Dokumen	27	27	0	27

3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	Unit	233	239	(+4)	233
4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/ Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang	52	145	(+93)	52
5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	Layanan	30	32	(+2)	30
6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	Layanan	230	449	(+219)	230

Sumber: Dinas Damkarmat Kota Bekasi, 2025.

Dari tabel di atas, secara umum, penyelenggaraan pelayanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi telah menunjukkan kinerja yang cukup baik dan responsif, didukung oleh kapasitas kelembagaan yang memadai. Dari 449 warga yang harus dilayani, telah dilaksanakan 2.025 layanan pemadaman dan penyelamatan dengan capaian waktu tanggap 15 menit pada 326 layanan, yang mencerminkan kesiapsiagaan operasional yang relatif efektif. Dukungan 27 dokumen prosedur operasional, 961 unit sarana prasarana, serta 342 aparatur yang telah mengikuti pelatihan minimal Pemadam I menunjukkan penguatan sistem, tata kelola, dan kapasitas sumber daya manusia. Meskipun demikian, peningkatan kualitas layanan tetap diperlukan melalui optimalisasi pemerataan sarana, peningkatan kompetensi lanjutan SDM, serta konsistensi pencapaian waktu tanggap guna memastikan pemenuhan

Standar Pelayanan Minimal secara berkelanjutan pada sub unsur kebakaran

Dengan demikian capaian kinerja Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban terdampak Kebakaran yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi mencapai 100 persen, hal tersebut menunjukkan bahwa target pelayanan minimal Sub Urusan Kebakaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tercapai.

Berdasarkan analisa dari kejadian kebakaran (*assessment*) oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi, diperoleh data taksiran kerugian harta benda akibat kebakaran adalah Rp. 51,192,931,136,- (*lima puluh satu milyar seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah*). Adapun data taksiran aset yang bisa diselamatkan sebagai akibat tidak menjalarnya kejadian kebakaran adalah senilai Rp. 143,629,931,136,- (*seratus empat puluh tiga milyar enam ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah*). Jumlah taksiran kerugian di tahun 2025 ini menurun dari jumlah total kerugian masyarakat pada tahun 2025 yaitu dengan taksiran kerugian harta benda akibat kebakaran adalah Rp. 322,069,885,489,- (*tiga ratus dua puluh dua milyar enam puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah*). Adapun data taksiran aset yang bisa diselamatkan sebagai akibat tidak menjalarnya kejadian kebakaran adalah senilai Rp. 1,135,909,599,643,- (*satu triliun seratus tiga puluh lima milyar sembilan ratus sembilan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah*).

Selain kejadian kebakaran, selama Tahun 2025 juga terdapat layanan penyelamatan dan evakuasi terhadap keadaan yang membahayakan kondisi manusia (operasi

darurat non kebakaran) sejumlah 2704 kali, terdiri dari:

- a. Evakuasi kecelakaan transportasi 55 kali;
- b. Evakuasi hewan liar 1846 kali;
- c. Evakuasi pohon tumbang 446 kali;
- d. Evakuasi percobaan bunuh diri 15 kali;
- e. Water Rescue 10 kali;
- f. Pelepasan Cincin 83 kali;
- g. Bangunan pada Bangunan 47 kali;
- h. Evakuasi lain-lain 602 kali;

Adapun rekapitulasi kejadian kebakaran dan korban kejadian kebakaran yang terjadi pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.77
Data Kejadian Kebakaran Selama Tahun 2025

No.	Bulan/ Tahun	Jumlah Kejadian	Jenis Kejadian							Estimasi Kerugian (Rp)			Keterangan
			Rumah tinggal	Pabrik/ Gudang	Gedung	Swalayan/ Toko/Warung	Kendara an	Sampah/ Alang2	Lain- lain	Harta Keseluruhan	Harta Terbakar	Harta Terselamatkan	
1	Januari	21	8	2	1	4	-	1	5	Rp 12.479.919.093	Rp 1.158.265.992	Rp 11.321.653.101	-
2	Februari	15	7	-	1	1	1	-	5	Rp 5.527.072.592	Rp 477.939.987	Rp 5.049.132.605	
3	Maret	23	6	3	1	5	2	1	5	Rp 23.826.787.972	Rp 16.616.521.731	Rp 7.210.266.241	
4	April	35	14	1	3	3	1	1	12	Rp 9.725.274.998	Rp 1.260.692.828	Rp 8.464.582.170	
5	Mei	22	11	-	-	1	2	-	8	Rp 48.405.863.665	Rp 335.273.298	Rp 48.070.590.367	
6	Juni	32	13	3	-	4	5	-	7	Rp 19.156.514.208	Rp 6.332.756.631	Rp 12.823.757.577	
7	Juli	26	14	2	-	2	-	-	8	Rp 16.711.862.071	Rp 2.733.247.290	Rp 13.978.614.781	
8	Agustus	32	8	-	1	6	1	1	15	Rp 4.657.568.599	Rp 2.444.623.712	Rp 2.212.944.887	
9	September	32	11	4	3	5	2	1	6	Rp 11.259.986.000	Rp 3.338.959.270	Rp 7.921.026.730	
10	Oktober	25	12	1	1	1	1	1	8	Rp 12.731.585.402	Rp 3.833.823.586	Rp 8.897.761.816	
11	November	25	7	1	-	6	1	2	8	Rp 9.636.966.950	Rp 4.872.541.074	Rp 4.764.425.876	
12	Desember	26	10	4	-	5	1	2	4	Rp 20.703.115.847	Rp 7.788.285.737	Rp 12.914.830.110	
	Jumlah	314	121	21	11	43	17	10	91	Rp 194.822.517.397	Rp 51.192.931.136	Rp 143.629.586.261	

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, 2025.



4.5.3.4 Alokasi Anggaran Penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran

Dalam mendukung pemenuhunan Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Kota Bekasi pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi sebesar Rp. 23,969,309,626,- (*dua puluh tiga milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus sembilan ribu enam ratus dua puluh enam rupiah*) dengan realisasi Rp. 22,318,047,007,- (*dua puluh dua milyar tiga ratus delapan belas juta empat puluh tujuh ribu tujuh rupiah*) atau sebesar 93,11%.

4.5.3.5 Dukungan Personil untuk Pemenuhan SPM Sub Urusan Kebakaran

Dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi memiliki Sumber Daya Manusia baik yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Non ASN. Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.78
Kualifikasi Sumber Daya Manusia Pemadam Kebakaran

No	Deskripsi	Jumlah	
		Orang	Persen
1	Pemadam 1	331	33,89%
2	Pemadam 2	55	8,36%
3	Pemadam 3	-	-
4	Inspektur Muda Kebakaran	17	2,58%
5	Inspektur Madya Kebakaran	-	-
6	Inspektur Utama Kebakaran	-	-
7	Penyuluh Muda Kebakaran	4	0,61%
8	Penyuluh Madya Kebakaran	-	-
9	Investigator Muda Kebakaran	-	-

No	Deskripsi	Jumlah	
		Orang	Persen
10	Investigator Madya Kebakaran	-	-
11	Instruktur Muda Kebakaran	-	-
12	Instruktur Madya Kebakaran	-	-
13	Operator Mobil Kebakaran	5	0,76%
14	Montir Mobil Kebakaran	-	-
15	Caraka Mobil Kebakaran	-	-
16	Operator Komunikasi Kebakaran	15	-
17	Rescue	24	1,82%
18	MFR	18	0,91%
	Sudah tersertifikasi	331	48,93%
	Belum tersertifikasi	322	51,07%
	Jumlah	653	100 %

Sumber: Dinas Damkarmat Kota Bekasi, 2025.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jumlah aparatur yang telah bersertifikat sebanyak 331 orang, sedangkan yang bersertifikat Diklat lain sebanyak 138 orang. Untuk mengikuti Diklat yang lainnya, sebelumnya harus sudah bersertifikat Diklat Pemadam 1, sehingga jumlah aparatur yang bersertifikat Pemadam 1 sebanyak 331 orang.

Berdasarkan data ketersediaan sumber daya manusia Sub Urusan Kebakaran pada Kota Bekasi Tahun 2025, total personel sebanyak 653 orang. Dari jumlah tersebut, 322 orang (48,93%) telah tersertifikasi dan 331 orang (51,07%) belum tersertifikasi. Komposisi ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh personel belum memenuhi standar kompetensi formal yang dipersyaratkan.

Sebaran personel juga belum merata pada beberapa jabatan fungsional tertentu, seperti inspektur, investigator, instruktur, serta tenaga teknis pendukung. Kondisi ini berpengaruh terhadap optimalisasi pelaksanaan tugas pencegahan, penanggulangan, investigasi, dan edukasi kebakaran.

Ketersediaan anggaran memiliki keterkaitan langsung dengan capaian kinerja Sub Urusan Kebakaran.

Keterbatasan anggaran berdampak pada belum terpenuhinya kebutuhan sertifikasi, pelatihan teknis, serta penguatan kapasitas jabatan fungsional. Hal ini berimplikasi pada capaian indikator kinerja yang belum maksimal, khususnya dalam aspek profesionalitas, waktu tanggap, dan kualitas layanan penanggulangan kebakaran.

Secara umum, peningkatan alokasi anggaran yang terarah pada penguatan kompetensi SDM, sertifikasi, serta pemenuhan formasi jabatan teknis akan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan capaian kinerja Sub Urusan Kebakaran secara menyeluruh.

4.5.3.6 Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Sub Urusan Kebakaran

Permasalahan atau kendala yang dihadapi dan solusi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran telah pada tahun 2025 terdapat beberapa jenis masalah. Namun permasalahan-permasalahan penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran tersebut, jika dikelompokkan ke dalam format sebagaimana yang tertuang pada menu aplikasi pelaporan Standar Pelayanan Minimal milik Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri pada laman www.spm.bangda.kemendagri.go.id, permasalahan-permasalahan tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 4.79
Permasalahan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran

No	Uraian	Permasalahan
1.	Pengumpulan data	Dalam pengumpulan data tidak ada permasalahan yang berarti karena melibatkan Bidang-Bidang dan stakeholder yang terkait dengan kegiatan pemadam kebakaran dan penyelamatan.

No	Uraian	Permasalahan
2.	Penghitungan kebutuhan	1. Dalam penghitungan kebutuhan tidak ada kendala, karena didasarkan pada data yang telah ada dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018. 2. Dalam perhitungan target kejadian dan korban kebakaran sering terjadi perbedaan dengan realisasi target, dikarenakan tidak ada pedoman atau peraturan yang mengaturnya, selain itu kejadian kebakaran yang tidak dapat diprediksi setiap Tahunnya.
3.	Perencanaan dan penganggaran	Dalam perencanaan, terkait tindak lanjut penghitungan kebutuhan barang/jasa dan sumber daya manusia telah diakomodir dalam RPJMD 2025-2029, Renstra dan Renja, namun pada tahap penganggaran masih terdapat kegiatan yang tidak terakomodir sesuai dengan Renstra dan Renja
4.	Pelaksanaan	1. Belum terpenuhinya fasilitas 3 pos sektor pada setiap kecamatan di Kota Bekasi (Bekasi Barat, Bekasi Timur, Pondok Melati); 2. Belum adanya Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) di Kota Bekasi; 3. Belum semua sarana dan prasarana, kendaraan serta peralatan kesiapsiagaan pemadam kebakaran dan penyelamatan terpenuhi berdasarkan standar nasional; 4. Belum adanya mobil ambulance rescue pemadam kebakaran; 5. Belum adanya mobil tangki air (water supply) 10000 liter; 6. Jumlah armada mobil pemadam kebakaran dan penyelamatan belum memadai untuk mendukung Standar Pelayanan Minimal.
5.	Lain-lain	

Sumber: Dinas Damkarmat, 2025.

4.6 URUSAN SOSIAL

Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial di Kota Bekasi pada tahun 2025 telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, meskipun belum seluruhnya dilakukan pemenuhan terhadap Barang/Jasa dan Anggaran untuk penunjang pencapaian kinerja Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial tahun 2025.

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dibagi menjadi dua kuadran, yaitu pemenuhan pada level proses dan pemenuhan pada level kinerja. Adapun perangkat Daerah pelaksana Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial adalah Dinas Sosial Kota Bekasi, dengan didukung oleh beberapa perangkat Daerah lainnya, seperti Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi, dan Bagian Perlengkapan Setda Kota Bekasi. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial di Kota Bekasi, lebih lanjut diuraikan sebagai berikut:

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar SPM Urusan Sosial

Jenis pelayanan dasar urusan sosial yang wajib dipenuhi oleh Dinas Sosial Kota Bekasi tahun 2025 sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.80

Jenis Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Kota Bekasi penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Kota Bekasi lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	Jumlah Warga KotaBekasi gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana Kota	Jumlah Warga Kota Bekasi korban bencana Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	Setiap Tahun

Sumber: Permendagri Nomor 59 Tahun 2021.

Jika melihat Tabel 4.80 diatas, maka Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 mengamanatkan bahwa Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial harus dicapai 100 persen setiap tahunnya. Jenis standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi tersebut, jumlah dan jenisnya sama dengan tersebut jumlah dan jenis standar pelayanan minimal yang tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Bidang Sosial Pada Standar Pelayanan Minimal di Provinsi dan di Kabupaten/Kota.

4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial

Adapun target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial oleh Pemerintah Kota Bekasi telah tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun 2018-2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.81
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar (SPM)	Indikator Capaian	Target Indikator Tahun 2025	Batas Waktu
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100 %	2025
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah warga negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	100 %	2025
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar di luar panti	100 %	2025
4	Rehabilitasi sosial dasar gelandangan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100 %	2025
5	Perlindungan dan jaminan sosial korban bencana di daerah kab/kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100 %	2025

Sumber: Permendagri Nomor 59 Tahun 2021.

4.6.3 Hasil Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial

Hasil capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial di Kota Bekasi didukung oleh Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025, yang tersebar di beberapa perangkat Daerah, dimana Dinas Sosial Kota Bekasi sebagai *leading sector* dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial. Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Sosial Kota Bekasi dilaksanakan oleh Aparatur Dinas Sosial Kota Bekasi serta didukung Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diantaranya Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) dan Tim Tanggap Bencana (TAGANA). Adapun realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial Tahun 2025 dapat disajikan dalam Tabel 4.82 berikut:

Tabel 4.82
Capaian Target SPM Sosial

No	Jenis Layanan Dasar	Capaian Penerima Layanan Dasar (Demand)			Capaian Penyediaan Layanan Dasar			Capaian SPM	Kategori
		Jumlah Klaim Luar Panti	Populasi Di Daerah Kabupaten Kota Yang Membutuhkan rehabsos Luar Panti	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penyandang Disabilitas Terlantar	672	672	100	672	672	100	100	Sangat Tinggi
2	Anak Terlantar	400	400	100	400	400	100	100	Sangat Tinggi
3	Lansia Terlantar	300	300	100	300	300	100	100	Sangat Tinggi
4	Gepeng	204	204	100	204	204	100	100	Sangat Tinggi
5	Bencana alam dan sosial	8.100	8.100	100	8.100	8.100	100	100	Sangat Tinggi

Sumber: Dinas Sosial Kota Bekasi, 2025.

Tabel 4.83
Hasil Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar (SPM)	Indikator Capaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Orang Yang Terlayani	Realisasi Capaian
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga Kota Bekasi penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	672 Orang	672 Orang	100%

2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah warga Kota Bekasi anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	400 Orang	400 Orang	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga Kota Bekasi lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar di luar panti	300 Orang	300 Orang	100%
4	Rehabilitasi sosial dasar gelandangan pengemis di luar panti	Jumlah warga Kota Bekasi gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	204 Orang	204 Orang	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial korban bencana di daerah kab/kota	Jumlah warga Kota Bekasi korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	8.100 Orang	8.100 Orang	100%

Sumber: Dinas Sosial Kota Bekasi, 2025.

Pemenuhan pelayanan dasar Urusan Sosial tersebut selanjutnya dirinci lebih lanjut pada aspek pemenuhan kebutuhan dasar pada indikator-indikator sebagai berikut:

1. **Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar diLuar Panti Sosial**
Indikator: Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti

Pelaksanaan pelayanan dasar bidang sosial merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, khususnya kelompok rentan. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial menjadi salah satu bentuk intervensi yang bertujuan meningkatkan keberfungsian sosial dan kualitas hidup penyandang disabilitas di lingkungan keluarga dan masyarakat. Berdasarkan data Tahun 2025, capaian Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial di Kota Bekasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.84
Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2		3			4
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		SANGAT TINGGI			100%
1 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti					100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A.	JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	672	672	0	100%
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				100 %
	B.	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Jumlah Mutu Yang Belum Terlayani	
	1.	Layanan data dan pengaduan	597	597	0	100%
	2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	110	110	0	100%

3	Penyediaan permakanaan	602	602	0	100%
4	Penyediaan sandang	25	25	0	100%
5	Penyediaan alat bantu	70	70	0	100%
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	100	100	0	100%
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	75	75	0	100%
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	100	100	0	100%
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	25	25	0	0,00%
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	15	15	0	100%
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	110	110	0	100%
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	75	75	0	100%
13	Layanan rujukan	65	65	0	100%

Sumber: Dinas Sosial Kota Bekasi, 2025.

Untuk pemenuhan pelayanan dasar Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti jumlah target yang harus dilayani pada tahun 2025 sebanyak 672 orang, diambil dari DTSEN dan pengaduan melalui Media Sosial yang dikelola oleh Dinas Sosial Kota Bekasi khusus untuk menerima pengaduan dan pemberian layanan kedaruratan urusan sosial. Adapun realisasi pelayanan yang diberikan adalah 100 persen, dimana seluruh warga Negara yang berhak menerima layanan Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti terlayani sebanyak 672 orang. Namun dalam pemberian layanan tersebut ada kriteria pemenuhan barang/jasa yang harus

diberikan Pemerintah Kota Bekasi kepada penerima layanan sebagai berikut:

- 1) Layanan Data Dan Pengaduan terealisasi sebanyak 597 Orang dengan capaian 100%.
- 2) Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat sebanyak 110 Orang dengan capaian 100%.
- 3) Penyediaan permakanan sebanyak 602 orang dengan capaian 100%
- 4) Penyediaan Sandang terealisasi sebanyak 25 orang dengan capaian sebesar 100%.
- 5) Penyediaan Alat bantu sebanyak 70 orang dengan capaian sebesar 100%
- 6) Pelayanan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K) sebanyak 100 Orang dengan capaian 100%;
- 7) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial sebanyak 75 Orang dengan capaian 100%.
- 8) Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar sebanyak 100 orang dengan capaian 100%
- 9) Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan sebanyak 25 Orang dengan cpaian sebesar 100%
- 10) Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan sebanyak 15 Orang dengan capaian 100%
- 11) Pemberian pelayanan penelusuran keluarga sebanyak 110 Orang dengan capaian sebesar 100%
- 12) Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga sebanyak 75 orang dengan capaian 100%.
- 13) Layanan rujukan sebanyak 65 orang dengan capaian 100%.

2. **Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial**
Indikator: Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti

Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial merupakan pelayanan yang diberikan kepada anak terlantar yang berada di lingkungan keluarga atau masyarakat, dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan perlindungan serta kesejahteraan anak. Berdasarkan data Tahun 2025, capaian Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial di Kota Bekasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.85
Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti

N o	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2		3			4
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		SANGAT TINGGI			100%
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMALAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A.	JUMLAH YANG HARUSDILAYANI :	400	400	0	100%
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				0.00 %
	B.	Jumlah Mutu Barang /Jasa / SDM	Jumlah MutuYang Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Jumlah Mutu Yang Belum Terlayani	0.00 %
	1	Layanan data dan pengaduan	377	377	0	100%
	2	Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	110	110	0	100%
	3	Penyediaan permakanan	377	377	0	100%

4	Penyediaan sandang	25	25	0	100%
5	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	100	100	0	100%
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	50	50	0	100%
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	100	100	0	100%
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/Bukti dokumen kependudukan	25	25	0	100%
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	10	10	0	100%
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	110	110	0	100%
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	75	75	0	100%
12	Layanan rujukan	60	60	0	100%

Sumber: Dinas Sosial Kota Bekasi, 2025.

Untuk pemenuhan pelayanan dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial jumlah target yang harus dilayani pada tahun 2025 sebanyak 400 orang, diambil dari data Basis Data Terpadu dan pengaduan melalui Media Sosial yang dikelola oleh Dinas Sosial Kota Bekasi khusus untuk menerima pengaduan dan pemberian layanan kedaruratan urusan sosial. Adapun realisasi pelayanan yang diberikan adalah 100 persen, dimana seluruh warga Negara

yang berhak menerima layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial terlayani sebanyak 400 orang. Namun dalam pemberian layanan tersebut ada kriteria pemenuhan barang/jasa yang harus diberikan Pemerintah Kota Bekasi kepada penerima layanan sebagai berikut:

- 1) Layanan Data Dan Pengaduan terealisasi sebanyak 377 Orang dengan capaian 100%.
- 2) Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat sebanyak 110 Orang dengan capaian 100%.
- 3) Penyediaan permakanan sebanyak 377 orang dengan capaian 100%
- 4) Penyediaan Sandang terealisasi sebanyak 25 orang dengan capaian sebesar 100%.
- 5) Pelayanan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K) sebanyak 100 Orang dengan capaian 100%;
- 6) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial sebanyak 50 Orang dengan capaian 100%.
- 7) Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Anak terlantar sebanyak 100 orang dengan capaian 100%
- 8) Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan sebanyak 25 orang dengan capaian 100%
- 9) Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar/Fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan sebanyak 10 Orang dengan capaian 100%
- 10) Pemberian pelayanan penelusuran keluarga sebanyak 110 Orang dengan capaian sebesar 100%
- 11) Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga sebanyak 75 orang dengan capaian 100%.
- 12) Layanan rujukan sebanyak 60 orang dengan capaian 100%.

3. **Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial Indikator: Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti**

Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial merupakan salah satu jenis pelayanan dasar yang termasuk dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesejahteraan Sosial. Lanjut usia terlantar didefinisikan sebagai seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih yang karena berbagai keterbatasan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara mandiri, tidak lagi mendapatkan dukungan dari keluarga atau masyarakat, serta berpotensi mengalami kekerasan, perlakuan salah, dan penelantaran sosial sehingga kebutuhan dasar hidupnya tidak terpenuhi. Rehabilitasi sosial di luar panti dilakukan melalui pendekatan asistensi, dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, pendampingan sosial, dan kegiatan pemberdayaan berbasis keluarga maupun komunitas agar lanjut usia terlantar dapat kembali berfungsi dalam kehidupan sosialnya di lingkungan masyarakat. Indikator ini diukur melalui jumlah warga lanjut usia terlantar yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial dalam periode tertentu. Berdasarkan data capaian kinerja tahun 2025, rinciannya sebagai berikut :

Tabel 4.86
Jumlah Warga Kota Bekasi lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2		3	4			5
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIANSPM						100%
3 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR(80%)			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A.	JUMLAH YANG HARUSDILAYANI :	Orang	300	300	0 Orang	100%

PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR						
	B.	Jumlah Mutu Barang / Jasa /SDM		Jumlah Mutu Yang Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Jumlah Mutu Yang Belum Terlayani
						0.00 %
	1	Layanan data dan pengaduan	Orang	75	75	0
	2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	110	110	0
	3	Penyediaan permakanan	Orang	243	243	0
	4	Penyediaan sandang	Orang	50	50	0
	5	Penyediaan alat bantu	Orang	57	57	0
	6	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	100	100	0
	7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	75	75	0
	8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	Orang	100	100	0
	9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan	Orang	25	25	0
	10	Akses ke layanan pendidikan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan	Orang	15	15	0
	11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	110	110	0
	12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	100	100	0
	13	Layanan rujukan	Orang	65	65	0

Sumber: Dinas Sosial Kota Bekasi, 2025.

Untuk pemenuhan pelayanan dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial jumlah target yang harus dilayani pada tahun 2025 sebanyak 300 orang, diambil dari data Basis Data Terpadu dan pengaduan melalui

Media Sosial yang dikelola oleh Dinas Sosial Kota Bekasi khusus untuk menerima pengaduan dan pemberian layanan kedaruratan urusan sosial. Adapun realisasi pelayanan yang diberikan adalah 100 persen, dimana seluruh warga Negara yang berhak menerima layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial terlayani sebanyak 300 orang. Namun dalam pemberian layanan tersebut ada kriteria pemenuhan barang/jasa yang harus diberikan Pemerintah Kota Bekasi kepada penerima layanan sebagai berikut:

1. Layanan Data Dan Pengaduan terealisasi sebanyak 75 Orang dengan capaian 100%.
2. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat sebanyak 110 Orang dengan capaian 100%.
3. Penyediaan permakanan sebanyak 243 orang dengan capaian 100%
4. Penyediaan Sandang sebanyak 50 orang dengan capaian 100 %
5. Penyediaan Alat Bantu sebanyak 57 Orang dengan capaian 100%
6. Pelayanan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K) sebanyak 100 Orang dengan capaian 100%;
7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial sebanyak 75 Orang dengan capaian 100%.
8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas Lanjut Usia terlantar sebanyak 100 orang dengan capaian 100%
9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan sebanyak 25 orang dengan capaian 100%
10. Akses kelayakan kesehatan dasar/fasilitasi layanan kesehatan sebanyak 15 orang dengan capaian 100%

- 11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga sebanyak 110 Orang dengan capaian sebesar 100%
- 12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga sebanyak 100 orang dengan capaian 100%.
- 13. Layanan rujukan sebanyak 65 orang dengan capaian 100%.

4. **Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial**
Indikator: Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial

Tabel 4.87
Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		Sangat Tinggi			100%
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		204	204	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah mutu yang harus dilayani	Jumlah mutu yang terlayani	Mutu yang belum terlayani	
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	63	63	0	100%
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	120	120	0	0,00%
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	77	77	0	100%
	4 . Penyediaan sandang	Orang	75	75	0	100%
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	204	204	0	100%

	(Penyediaan P3K)					
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	50	50	0	100%
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	204	204	0	100%
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/ atau Kartu Identitas Anak/Bukti dokumen kependudukan	Orang	25	25	0	100%
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	10	10	0	100%
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	120	120	0	100%
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	100	100	0	100%
	12 . Layanan rujukan	Orang	60	60	0	100%

Sumber: Dinas Sosial Kota Bekasi, 2025.

Untuk pemenuhan pelayanan dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial jumlah target yang harus dilayani pada tahun 2025 sebanyak 204 orang, diambil dari data Basis Data Terpadu dan pengaduan melalui Media Sosial yang dikelola oleh Dinas Sosial Kota Bekasi, khusus untuk menerima pengaduan dan pemberian layanan kedaruratan urusan sosial. Adapun realisasi pelayanan yang diberikan adalah 100 persen, dimana seluruh warga Negara yang berhak menerima layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial terlayani sebanyak

204 orang. Namun dalam pemberian layanan tersebut ada kriteria pemenuhan barang/jasa yang harus diberikan Pemerintah Kota Bekasi kepada penerima layanan sebagai berikut:

- 1) Layanan Data Dan Pengaduan terealisasi sebanyak 63 Orang dengan capaian 100%.
- 2) Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat sebanyak 120 orang dengan capaian 100%
- 3) Penyediaan permakanan sebanyak 77 orang dengan capaian 100%
- 4) Penyediaan Sandang terealisasi sebanyak 75 orang dengan capaian sebesar 100%.
- 5) Pelayanan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K) sebanyak 204 Orang dengan capaian 100%;
- 6) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial sebanyak 50 Orang dengan capaian 100%.
- 7) Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis sebanyak 204 orang dengan capaian 100%
- 8) Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak /Bukti dokumen kependudukan sebanyak 25 orang dengan capaian 100%
- 9) Akses kelayakan pendidikan dan kesehatan dasar/fasilitasi layanan kesehatan sebanyak 10 orang dengan capaian 100%
- 10) Pemberian pelayanan penelusuran keluarga sebanyak 120 Orang dengan capaian sebesar 100%
- 11) Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga sebanyak 100 orang dengan capaian 100%.
- 12) Layanan Rujukan sebanyak 60 Orang dengan capaian 100%

5. **Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota**
Indikator: Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota

Tabel 4.88
Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		Sangat Tinggi			100%
5	Rehabilitasi Sosial Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		8100	8100	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah mutu yang harus dilayani	Jumlah mutu yang terlayani	Mutu yang belum terlayani	
	1 . Penyediaan permakanan	Orang	8100	8100	0	100%
	2 . Penyediaan sandang	Orang	300	300	0	100%
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Orang	2	0	2	0,00%
	4 . Penanganan khusus bagi Kelompok Rentan	Orang	200	200	0	100%
	5 . Pelayanan dukungan psikososial	Orang	100	100	0	100%

Sumber: Dinas Sosial Kota Bekasi, 2025.

Untuk jenis pelayanan dasar Perlindungan dan jaminan sosial korban bencana di daerah kab/kota pada tahun 2025 terealisasi 100 persen, dimana terdapat terdapat beberapa kali bencana alam dan bencana sosial yang harus ditangani, diantaranya bencana banjir, angin putting beliung dan Kebakaran.

Secara garis besar jumlah Warga Kota Bekasi yang berhak

mendapatkan pelayanan dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana di Kota Bekasi pada tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.89
Rekapitulasi jumlah Warga Kota Bekasi yang berhak mendapatkan pelayanan dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		Sangat Tinggi			100%
5	Rehabilitasi Sosial Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		8100	8100	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah mutu yang harus dilayani	Jumlah mutu yang terlayani	Mutu yang belum terlayani	
	1 . Penyediaan permakanan	Orang	8100	8100	0	100%
	2 . Penyediaan sandang	Orang	300	300	0	100%
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Orang	2	0	2	0,00%
	4 . Penanganan khusus bagi Kelompok Rentan	Orang	200	200	0	100%
	5 . Pelayanan dukungan psikososial	Orang	100	100	0	100%

Sumber: Dinas Sosial Kota Bekasi, 2025.

Penjelasan mengenai jumlah 8.100 orang yang berhak memperoleh pelayanan dasar Jumlah Warga Kota Bekasi yang berhak mendapatkan pelayanan dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana sebagai berikut:

- a. Sebanyak 7.658 Warga Kota Bekasi yang menjadi korban

bencana alam, yaitu:

1. Bencana banjir yang terjadi pada bulan Januari-Desember 2024 yang tersebar di 11 kecamatan di Kota Bekasi dengan korban terdampak banjir sebanyak 7.400 jiwa;
 2. Bencana Angin Puting Beliung yang terjadi ditahun 2025 sebanyak 255 jiwa yang terdampak;
 3. Bencana Longsor yang terjadi di Kelurahan Margahayu, Kec. Bekasi Timur, yang terjadi di bulan mei tahun 2025 dengan 3 orang yang terdampak.
- b. Bencana Sosial, Dimana Dinas Sosial memberikan Bantuan berupa Permakanan, Sandang, Psikososial, dan Rentan kepada Anak-anak terlantar, lanjut usia terlantar, Disabilitas terlantar yang berada dalam yayasan atau panti yang dikelola oleh masyarakat sebanyak 442 orang, yang terdiri dari:
1. Kejadian Kebakaran yang mengakibatkan 48 orang terdampak.
 2. Rumah Roboh, dengan korban yang terdampak sebanyak 220 orang.
 3. Masalah Sosial, seperti keterlantaran Anak, Lanjut usia, Disabilitas dengan jumlah 174 orang.

Dalam pemberian layanan tersebut ada kriteria pemenuhan barang/jasa yang harus diberikan Pemerintah Kota Bekasi kepada penerima layanan sebagai berikut:

- 1) Layanan Penyediaan Permakanan terealisasi 100 persen, yaitu dari 8.100 warga Negara yang berhak memperoleh layanan permakanan, sebanyak 8.100 yang menerima layanan;
- 2) Layanan Penyediaan Sandang terealisasi sebesar 100 persen yaitu dari 350 warga Negara yang berhak memperoleh layanan sandang, sebanyak 350;

- 3) Layanan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi terealisasi 2 unit, Sehingga capaian 100%;
- 4) Layanan Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan terealisasi sebesar 100 persen yaitu dari 400 warga Negara yang berhak memperoleh layanan penanganan khusus bagi kelompok rentan, sebanyak 400 orang yang terealisasi memperoleh layanan tersebut. Yang dikategorikan kelompok rentan tersebut adalah balita, ibu hamil dan lansia yang terdampak bencana banjir pada bulan Januari dan Februari 2025;
- 5) Layanan Dukungan Psikososial terealisasi sebesar 100 persen yaitu dari 791 warga Negara yang berhak memperoleh layanan dukungan psikososial, sebanyak 791 orang yang terealisasi memperoleh layanan tersebut, yakni anak-anak korban bencana banjir yang terjadi pada bulan Januari dan Februari 2025.

4.6.4 Alokasi Anggaran Penerapan SPM Urusan Sosial

Anggaran Dinas Sosial Kota Bekasi pada Tahun 2025 untuk pemenuhan SPM sebagai berikut :

Tabel 4.90
Anggaran SPM Bidang Sosial Tahun 2025

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KOTA BEKASI	6,984,726,328,180
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	29,226,552,145
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	8,736,503,960
	APBD	6,521,398,960
	A. APBD MURNI	6,521,398,960
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0

NO	PENDANAAN	PAGU
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	2,215,105,000

Sumber : e-SPM Bidang Sosial, 2025

4.6.5 Dukungan Personil untuk Penerapan SPM Urusan Sosial

Dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial, Dinas Sosial Kota Bekasi memiliki Sumber Daya Manusia baik yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Non ASN dan Para Pekerja Sosial Masyarakat, yang semuanya berkontribusi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Adapun rincian Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun 2025 terdiri dari:

- a. ASN : 68 Orang
 - b. Non ASN : 10 Orang
 - c. TKSK : 12 Orang
 - d. PSM : 238 Orang
 - e. Peksos : 10 Orang
 - f. TAGANA : 88 Personil.
- 426 Orang

Dengan demikian pada Dinas Sosial Kota Bekasi terdapat 426 orang personil dimana didalamnya 7 orang merupakan pejabat struktural dan 61 orang merupakan pelaksana. Dari 68 orang pelaksana tersebut sebanyak 10 orang mengemban tugas tambahan sebagai anggota Tim Reaksi Cepat (TRC) Dinas Sosial Kota Bekasi. Tim TRC tersebut bertugas menangani langsung kasus Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terjadi di lapangan, baik melalui laporan masyarakat, maupun instansi pemerintah lainnya. Disamping aparatur Dinas Sosial Kota Bekasi juga terdapat 138 orang Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan 12 orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

(TKSK) yang bertugas mendampingi PPKS, baik lansia terlantar, disabilitas terlantar, anak terlantar serta penanganan korban pasca terjadinya bencana alam dan bencana sosial , disamping itu terdapat 88 orang Taruna Siaga Bencana yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi Nomor 400.9.10/Kep.160-Dinsos/I/2024 tentang Pengurus Forum Koordinasi Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Kota Bekasi.

Untuk mengoptimalkan peran Dinas Sosial Kota Bekasi dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial ke depan, Dinas Sosial Kota Bekasi telah mengajukan kebutuhan personil teknis bisang sosial sebagai berikut:

Tabel 4.90
Kebutuhan Personil Penunjang Standar Pelayanan Minimal
Urusan Sosial

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Analisis Beban Kerja
1.	Analisis Bencana	D3/S-1 (Ekonomi)	1. Melaksanakan Perlindungan Korban Bencana Alam 2. Menganalisis fasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar (pangan) bagi korban bencana; 3. Menganalisis Personil Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dalam penanganan bencana. 4. Menganalisis pelatihan Kampung Siaga Bencana (KSB).
2.	Pengelola Perlindungan Sosia	SLTA/D-3/S-1 (Ekonomi)	1. Mengelola pelaksanaan dan pemberian bantuan sosial terhadap kinerja migran korban tindak kekerasan; 2. Mengelola pelaksanaan perlindungan dan pemberian bantuan sosial korban bencana sosial dan PMKS; 3. Mengelola pelaksanaan kegiatan perlindungan dan penyuluhan sosial lingkup kota; 4. Mengelola Penyelenggaran Sistem Informasi dan Perlindungan Sosial.
3.	Pengelola Data Bantuan Sosial	SLTA/D-3/S-1 (Management)	1. Mengelola bahan dan menyusun anggaran; 2. Mengelola pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana alam;

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Analisis Beban Kerja
			3. Mengelola fasilitasi kebutuhan dasar (pangan); 4. Mengelola personil Taruna Siaga Bencana (TAGANA); 5. Mengelola pelatihan Kampung Siaga Bencana (KSB).
4.	Analisis Rehabilitasi Sosial Untuk Penanganan PMKS	D3/S1 (Jurusan Ilmu—lmu Sosial)	1. Menganalisa pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap pekerja seks komersial; 2. Menganalisis rehabilitasi sosial terhadap orang dengan HIV?AIDS; 3. Menganalisa pelaksanaan pencegahan dan penjangkaran terhadap PMKS; 4. Menganalisa/memfasilitasi rehabilitasi sosial mantan korban Narkoba.
5.	Analisis Rehabilitasi Sosial Untuk Anak dan Lansia	D3/S1 (Jurusan Ilmu—lmu Sosial)	1. Menganalisa bahan dan proses pengangkatan anak; 2. Menganalisa bimtek dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial; 3. Menganalisa pemberian bantuan sosial bagi Anak dan Lansia.
6.	Analisis Rehabilitasi Sosial Untuk Penyandang Disabilitas	D3/D4/S1 (Jurusan Ilmu—lmu Sosia dan Psikologi)	1. Menganalisa pelaksanaan/ memfasilitasi Loka Bina Karya (LBK); 2. Menganalisa dan memfasilitasi pendampingan orang terlanter disabilitas; 3. Menganalisa dan menyiapkan bahan pemberian bantuan terhadap LKS Disabilitas.
7.	Penegelola Bimbingan Sosia	S-1/S-2 Jurusan Psikologi	1. Mengelola pelaksanaan rehabilitasi terhadap pekerja seks komersial; 2. Mengelola pelaksanaan pendampingan mental untuk PMKS; 3. Mengelola pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap pekerja seks komersial; 4. Mengelola rehabilitasisosial terhadap orang dengan HIV/AIDS; 5. Mengelola pelaksanaan pencegahan dan penjangkaran PMKS; 6. Mengelola/Memfasilitasi sosial mantan korban narkotika; 7. Mengelola bahan dan proses pengangkatan anak; 8. Mengelola bimtek dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial; 9. Mengelola pemberian bantuan sosial bagi anak dan lansia;

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Analisis Beban Kerja
			10.Mengelola pelaksanaan/memfasilitasi Loka Bina Karya (LBK); 11.Mengelola/memfasilitasi pendampingan orang terlantar disabilitas; 12.Mengelola dan menyiapkan bahan pemberia bantuan terhadap LKS disabilitas; 13.Mengelola pelaksanaan pendampingan mental untuk PMKS.

Sumber: Dinsos Kota Bekasi, 2025.

Adapun kebutuhan pemenuhan kebutuhan kualifikasi pendidikan teknis bagi sumber daya manusia pengelola Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial sebagai berikut:

Tabel 4.91
Kebutuhan Diklat Teknis Penunjang SPM Urusan Sosial

No	Nama Diklat	Target	Pagu Anggaran	Terakomodir di Renstra Perangkat Daerah		Ket
				Sudah	Belum	
1.	Analisis Bencana	2 orang	60.000.000		Y	
2.	Pengelolaan Data Perlindungan Sosial	2 orang	60.000.000		Y	
3.	Pengelolaan Data Bantuan Sosial	2 orang	60.000.000		Y	
4.	Pengembangan Model, Metode, Teknik dan Media Sosial	10 orang	200.000.000		Y	
5.	Pekerja Sosial Dasar	10 orang	200.000.000		Y	
6.	Analisa Rehabilitasi Sosial	3 orang	90.000.000		Y	
7.	Pengelolaan Bimbingan Sosial	2 orang	60.000.000		Y	

Sumber: Dinas Sosial Kota Bekasi, 2025.

4.6.6 Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Urusan Sosial

Permasalahan-permasalahan penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial Tahun 2025 telah dibahas dalam kegiatan *Focuss Group Discussion* pada tanggal 24 Februari 2025 bertempat di Ruang Rapat Dinas Sosial Kota Bekasi. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial, Pemerintah Kota Bekasi telah menyusun strategi yang harus dilaksanakan oleh lintas perangkat Daerah untuk menyelesaikan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial, permasalahan dan solusi penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial sebagai berikut:

Tabel 4.92
Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Urusan Sosial Tahun 2025

No	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
1.	Perencanaan		
	Data PPKS	Melakukan Verifikasi dan validasi terhadap Data PPKS	Melakukan kegiatan pendataan PPKS
2.	Koordinasi		
	-	-	-
3.	Pendanaan		
	Minimnya anggaran untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial.	Memetakan kebutuhan anggaran sesuai dengan kebutuhan pelayanan dasar	Mengusulkan kebutuhan ke bidang terkait anggaran
4.	Lain-lain		
	Minimnya Sarana dan Prasana	Memetakan kebutuhan terhadap sarana dan prasarana penunjang SPM	Mengusulkan kegiatan pengadaan Sarana dan prasarana
	Minimnya SDM	Melakukan rekrutmen dan seleksi terhadap SDM yang memahami tentang background kesejahteraan sosial	Mengusulkan kegiatan kebutuhan penerima tenaga kesejahteraan sosial

Sumber: Dinas Sosial Kota Bekasi, 2025.

Namun permasalahan-permasalahan penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial tersebut, jika dikelompokkan ke dalam format sebagaimana yang tertuang pada menu aplikasi pelaporan Standar Pelayanan Minimal milik Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri pada laman www.spm.bangda.kemendagri.go.id permasalahan-permasalahan tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 4.93
Permasalahan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial

No	Uraian	Permasalahan	Tindaklanjut
1.	Pengumpulan data	Kekurangan Sumber Daya Manusia untuk mengelola data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sangat terbatas.	
2.	Penghitungan kebutuhan	Karena Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sulit diprediksi perkembangannya, sementara target yang harus dipenuhi sebesar 100 persen menyulitkan Dinas Sosial Kota Bekasi untuk menghitung kebutuhan pemenuhan barang/jasa untuk pelayanan dasar Urusan Sosial.	1. Optimalisasi data berbasis realtime dan digital : - Pemuktahiran data secara real time dan digital memakai Aplikasi Sistem Layanan Orang Terlantar pada Rumah Singgah dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) di kelurahan - Menjadikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data utama yang terus diperbaharui oleh Dinas Sosial 2. Strategi anggaran dan operasional yang fleksibel - Penggunaan SPM dalam menyusun standar pelayanan

No	Uraian	Permasalahan	Tindaklanjut
			permakanan, sandang dan jaminan kesehatan untuk Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) agar pemenuhan kebutuhan dasar tetap terjadi meskipun jumlahnya berfluktuasi - Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam melakukan penjangkauan/survei langsung dan pendampingan saat terdapat laporan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) diwilayah 3. Strategi Komunitas dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dengan menggerakkan relawan sosial diantaranya Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pendamping Rehabilitasi Sosial dan Taruna Siaga Bencana (Tagana) 4. Pendekatan Layanan Terintegrasi - Rumah Singgah (Rumsing) sebagai layanan terpadu saat penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang bersifat mendesak/darurat Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) sebagai pusat layanan data kesejahteraan sosial di tingkat kelurahan

No	Uraian	Permasalahan	Tindaklanjut
3.	Perencanaan dan penganggaran	Dalam dokumen perencanaan kebutuhan tahunan telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029, namun realisasi pemenuhan kebutuhan sulit terealisasi dikarenakan penganggaran untuk penerapan SPM Urusan Sosial belum menjadi prioritas ketika dihadapkan pada ketersediaan anggaran pada APBD.	
4.	Pelaksanaan	Keterbatasan sumber daya manusia teknis yang berkompeten dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Keterbatasan sarana/prasarana barang/jasa untuk pemenuhan pelayanan dasar Urusan Sosial.	
5.	Pelaporan	Petugas di lapangan seringkali kesulitan mendokumentasikan data-data kejadian, khususnya bencana, meliputi identitas korban, jumlah korban, kerugian, langkah-langkah penanganan dan sebagainya. Hal ini dikarenakan kondisi pada saat kejadian bencana. Tidak ada kendala yang berarti dikarenakan hasil FGD yang difasilitasi oleh Bagian Tata Pemerintahan berdampak pada peningkatan tertib administrasi dan pelaporan pada Dinas Sosial Kota.	
6.	Lain-lain	-	

Sumber: Dinas Sosial Kota Bekasi, 2025.

4.7 PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada tahun 2025 Pemerintah Kota Bekasi telah mengalokasikan anggaran melalui program dan kegiatan yang dimuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun 2025, yang tersebar di beberapa Dinas pengampu Standar Pelayanan Minimal dengan rincian sebagai berikut:

4.7.1 Urusan Pendidikan

Tabel 4.94
Program, Kegiatan dan Anggaran Urusan Pendidikan

No	PROGRA M	KEG- IAT- AN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSENTASE	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
								652,730,612,234	464,750,232,657	71.20 %	
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
	1	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) K20240327112412						17,697,224,396	16,443,841,107	92.92 %	
Angka Partisipasi Sekolah											
		1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	01.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0051	0	0	0.00 %	
		2	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Peserta didik	01.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0011	3,640,066,225	3,466,798,095	95.24 %	
		3	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Orang	01.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0015	0	0	0.00 %	

No	PROGRA M	KEG- IAT- AN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSENTASE	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		4	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokume n	01.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0025	0	0	0.00 %	
		5	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	01.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0030	0	0	0.00 %	
		6	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	01.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0040	0	0	0.00 %	
		7	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	01.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0041	0	0	0.00 %	
Kekhususan PAUD											
		1	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit	01.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0045	0	0	0.00 %	
		2	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Paket	01.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0046	395,167,000	348,771,324	88.26 %	
		3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada	Orang	01.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0016	0	0	0.00 %	

No	PROGRA M	KEG- IAT- AN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSENTASE	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Satuan Pendidikan PAUD								
		4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan Pendidik an	01.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0017	13,661,991,171	12,628,271,688	92.43 %	
		5	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	01.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0023	0	0	0.00 %	
		6	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	01.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0024	0	0	0.00 %	
		7	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokume n	01.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0026	0	0	0.00 %	
		8	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunit as	01.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0029	0	0	0.00 %	
		9	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan	Orang	01.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0039	0	0	0.00 %	

No	PROGRA M	KEG- IAT- AN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSENTASE	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Kapasitas Bidang Pendidikan								
	JUMLAH INDIKATOR				17,697,224 ,396	16,443,841,107	92.92 %				
	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) K20240327110629						87,657,180,014	58,337,416,931	66.55 %	
Angka Partisipasi Sekolah											
		1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0001	0	0	0.00 %	
		2	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD / Sekolah Dasar / Sekolah Menengah Pertama / Nonformal/Kesetaraan	Peserta didik	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0054	4,997,654,000	4,799,709,497	96.04 %	
		3	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0038	0	0	0.00 %	

No	PROGRA M	KEG- IAT- AN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSENTASE	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		4	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0046	1,000,000,000	0	0.00 %	
		5	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0047	0	0	0.00 %	
		6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0051	0	0	0.00 %	
Literasi											
		1	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0055	0	0	0.00 %	
		2	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0026	0	0	0.00 %	
		3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0027	513,143,108	385,128,287	75.05 %	

No	PROGRA M	KEG- IAT- AN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSENTASE	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		4	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0035	250,000,000	160,946,214	64.38 %	
		5	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0036	0	0	0.00 %	
		6	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0037	0	0	0.00 %	
		7	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunit as	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0041	0	0	0.00 %	
		8	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0045	0	0	0.00 %	
		9	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan	Orang	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0049	0	0	0.00 %	

No	PROGRA M	KEG- IAT- AN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSENTASE	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Kapasitas Bidang Pendidikan								
		10	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidik an	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0050	14,030,511,519	8,790,609,216	62.65 %	
Numerasi											
		1	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Orang	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0026	0	0	0.00 %	
		2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Orang	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0027	513,143,108	385,128,287	75.05 %	
		3	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan	Orang	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0035	250,000,000	160,946,214	64.38 %	

No	PROGRA M	KEG- IAT- AN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSENTASE	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan								
		4	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0037	0	0	0.00 %	
		5	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunit as	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0041	0	0	0.00 %	
		6	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidik an	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0050	14,030,511,519	8,790,609,216	62.65 %	
		7	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0045	0	0	0.00 %	
		8	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0055	1,424,236,760	0	0.00 %	
		9	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0036	0	0	0.00 %	

No	PROGRA M	KEG- IAT- AN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSENTASE	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		10	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0049	0	0	0.00 %	
Keamanan											
		1	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0036	0	0	0.00 %	
		2	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0049	0	0	0.00 %	
		3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidik an	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0028	16,882,660,000	11,619,780,000	68.83 %	
		4	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan,	Kegiatan	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0043	0	0	0.00 %	

No	PROGRA M	KEG- IAT- AN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSENTASE	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			kekerasan, dan intoleransi								
Kebhinekaan											
		1	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0036	0	0	0.00 %	
		2	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0049	0	0	0.00 %	
		3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidik an	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0028	16,882,660,000	11,622,280,000	68.84 %	
		4	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0043	0	0	0.00 %	
Inklusifitas											

No	PROGRA M	KEG- IAT- AN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSENTASE	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		1	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0036	0	0	0.00 %	
		2	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0049	0	0	0.00 %	
		3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidik an	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0028	16,882,660,000	11,622,280,000	68.84 %	
		4	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0043	0	0	0.00 %	
	JUMLAH INDIKATOR				87,657,180 ,014	58,337,416,93 1	66.55 %				
	3	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) K20240327110647						59,905,130,324	40,649,329,589	67.86 %	

No	PROGRA M	KEG- IAT- AN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSENTASE	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
Angka Partisipasi Sekolah											
		1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0001	0	0	0.00 %	
		2	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0014	0	0	0.00 %	
		3	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta didik	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0032	12,550,240,000	8,825,150,382	70.32 %	
		4	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokume n	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0051	384,250,000	0	0.00 %	
		5	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0059	0	0	0.00 %	
		6	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0062	0	0	0.00 %	
Literasi											
		1	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0067	274,236,760	234,000,000	85.33 %	

No	PROGRA M	KEG- IAT- AN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSENTASE	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		2	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0039	0	0	0.00 %	
		3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0040	467,816,250	457,719,215	97.84 %	
		4	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0048	489,995,000	0	0.00 %	
		5	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0049	500,000,000	0	0.00 %	
		6	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0050	0	0	0.00 %	

No	PROGRA M	KEG- IAT- AN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSENTASE	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		7	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunit as	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0054	0	0	0.00 %	
		8	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidik an	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0058	14,811,841,404	10,557,940,777	71.28 %	
		9	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0060	0	0	0.00 %	
		10	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0061	0	0	0.00 %	
Numerasi											
		1	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Orang	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0039	0	0	0.00 %	

No	PROGRA M	KEG- IAT- AN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSENTASE	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Orang	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0040	467,816,250	457,719,215	97.84 %	
		3	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0048	88,290,000	0	0.00 %	
		4	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0054	0	0	0.00 %	
		5	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0050	250,000,000	0	0.00 %	
		6	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidik an	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0058	0	0	0.00 %	
		7	Perlengkapan Dasar Buku Teks	Buku	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0061	0	0	0.00 %	

No	PROGRA M	KEG- IAT- AN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSENTASE	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			dan Non Teks Peserta Didik								
		8	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0067	274,236,760	234,000,000	85.33 %	
		9	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0049	500,000,000	0	0.00 %	
		10	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0060	0	0	0.00 %	
Keamanan											
		1	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0049	0	0	0.00 %	
		2	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0060	0	0	0.00 %	

No	PROGRA M	KEG- IAT- AN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSENTASE	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidik an	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0041	14,322,445,200	9,854,400,000	68.80 %	
		4	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Keluarga	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0055	100,758,750	87,000,000	86.34 %	
Kebhinekaan											
		1	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0049	0	0	0.00 %	
		2	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0060	0	0	0.00 %	
		3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidik an	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0041	14,322,445,200	9,854,400,000	68.80 %	

No	PROGRA M	KEG- IAT- AN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSENTASE	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		4	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0055	100,758,750	87,000,000	86.34 %	
Inklusifitas											
		1	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0049	0	0	0.00 %	
		2	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0060	0	0	0.00 %	
		3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidik an	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0041	0	0	0.00 %	
		4	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan	Kegiatan	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0055	0	0	0.00 %	

No	PROGRA M	KEG- IAT- AN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSENTASE	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			perundungan, kekerasan, dan intoleransi								
	JUMLAH INDIKATOR				59,905,130 ,324	40,649,329,58 9	67.86 %				
	4	Pendidikan Kesenjangan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesenjangan K20250805052437						2,508,282,300	1,537,925,302	61.31 %	
Angka Partisipasi Sekolah											
		1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetara an	Dokume n	01.01.02	1.01.04.2.01	1.01.04.2.01.0001	1,770,518,300	890,484,394	50.30 %	
		1	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga	Laporan	01.01.02	1.01.04.2.01	1.01.04.2.01.0002	737,764,000	647,440,908	87.76 %	

No	PROGRA M	KEG- IAT- AN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSENTASE	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								
	JUMLAH INDIKATOR				2,508,282,300	1,537,925,302	61.31 %				
	5	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah K20250807081842						0	0	0.00 %	
Literasi											
		1	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota	Buku	01.01.02	1.01.06.2.01	1.01.06.2.01.0005	0	0	0.00 %	
Numerasi											
		1	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota	Buku	01.01.02	1.01.06.2.01	1.01.06.2.01.0005	0	0	0.00 %	
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00 %				

No	PROGRA M	KEG- IAT- AN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSENTASE	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	JUMLAH PROGRAM				167,767,81 7,034	116,968,512,9 29	69.72 %				
KEGIATAN LAINNYA											
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA							0	0	0%	
	1	Literasi									
		01.0 0						1,770,518,300	890,484,394	50.30 %	
		02.0 0						737,764,000	647,440,908	87.76 %	
		03.0 0						25,243,760,000	57,000,000	0.23 %	
		04.0 0						785,127,250	777,641,250	99.05 %	
		05.0 0						2,764,257,370	2,580,241,522	93.34 %	
		06.0 0						99,798,037	96,661,552	96.86 %	
		07.0 0						8,935,660,000	6,827,469,513	76.41 %	
		08.0 0						327,369,560	299,400,000	91.46 %	

No	PROGRA M	KEG- IAT- AN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSENTASE	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		09.0 0						192,031,820	135,813,443	70.72 %	
	2	Numerasi									
		01.0 0						50,896,863	48,510,000	95.31 %	
		02.0 0						180,000,000	0	0.00 %	
		03.0 0						870,378,297	0	0.00 %	
	3	Inklusifitas									
		01.0 0						2,517,706,000	937,024,217	37.22 %	
		02.0 0						513,143,108	385,128,287	75.05 %	
		03.0 0						1,093,776,667	980,672,235	89.66 %	
		04.0 0						467,816,250	457,719,215	97.84 %	
	4	Kebhinekaan									
		01.0 0						23,315,162,250	20,759,441,731	89.04 %	
		02.0 0						51,254,311,000	0	0.00 %	
		03.0 0						21,411,366,400	21,079,368,728	98.45 %	
		04.0 0						216,348,920,000	191,861,749,729	88.68 %	

No	PROGRA M	KEG- IAT- AN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSENTASE	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		05.0 0						138,892,481	81,148,835	58.43 %	
		06.0 0						12,031,408,750	10,523,367,321	87.47 %	
		07.0 0						113,676,407,042	88,270,904,066	77.65 %	
		08.0 0						135,922,000	0	0.00 %	
	5	Keamanan									
		01.0 0						100,401,755	84,532,782	84.19 %	
TIDAK ADA DATA KEGIATAN LAINYA											

Sumber: e-SPM Bidang Pendidikan, 2025.

4. 7. 2 Urusan Kesehatan

Tabel 4.95
Program, Kegiatan dan Anggaran Urusan Kesehatan

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KOTA BEKASI				5,457,185,632	4,883,263,836	89.48 %
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				5,457,185,632	4,883,263,836	89.48 %
	1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota K2023237			5,457,185,632	4,883,263,836	89.48 %
	1.02.02.2.02.0001	1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Orang	1,131,150,688	1,017,920,834	89.99 %
	1.02.02.2.02.0002	2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Orang	102,405,000	102,000,000	99.60 %
	1.02.02.2.02.0003	3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	229,800,000	229,150,000	99.72 %
	1.02.02.2.02.0004	4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Orang	171,082,600	170,000,000	99.37 %
	1.02.02.2.02.0005	5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	1,569,039,400	1,366,896,312	87.12 %
	1.02.02.2.02.0006	6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Orang	45,911,800	42,797,710	93.22 %
	1.02.02.2.02.0007	7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	761,736,944	667,589,842	87.64 %
	1.02.02.2.02.0008	8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Orang	48,760,000	47,651,038	97.73 %

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	1.02.02.2.02.0009	9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Orang	100,000,000	98,408,200	98.41 %
	1.02.02.2.02.0010	10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	437,877,000	384,821,500	87.88 %
	1.02.02.2.02.0011	11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	744,600,000	644,390,250	86.54 %
	1.02.02.2.02.0012	12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang	114,822,200	111,638,150	97.23 %
	JUMLAH INDIKATOR				5,457,185,632	4,883,263,836	89.48 %
	JUMLAH PROGRAM				5,457,185,632	4,883,263,836	89.48 %
KEGIATAN LAINNYA							
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						
TIDAK ADA DATA KEGIATAN LAINYA							

Sumber: e-SPM Bidang Kesehatan, 2025.



4.7.3 Urusan Pekerjaan Umum

Tabel 4.96
Program, Kegiatan dan Anggaran Urusan Pekerjaan Umum

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KOTA BEKASI				56,754,095,530	32,702,356,280	57.62 %
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				27,620,894,600	9,905,047,180	35.86 %
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota K2023638			27,620,894,600	9,905,047,180	35.86 %
	1.03.03.2.01.0001	1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0002	2	Supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM	Dokumen	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0003	3	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0004	4	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0005	5	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0006	6	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Liter/Detik	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	1.03.03.2.01.0007	7	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	SR	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0008	8	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0009	9	Pembinaan dan pengawasan terhadap tarif Air Minum	Penyelenggara SPAM	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0010	10	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri	Badan Usaha	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0011	11	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat	Kelompok Masyarakat	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0012	12	Fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM	Unit	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0013	13	Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM	Unit	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0014	14	Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM	Penyelenggara SPAM	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0015	15	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perkotaan	Unit	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0016	16	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perdesaan	Unit	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0017	17	Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Rumah Tangga	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0018	18	Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	-	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	1.03.03.2.01.0019	19	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	-	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0020	20	Perbaiki SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Unit	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0021	21	Perbaiki SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Unit	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0022	22	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Unit	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0023	23	Peningkatan KapasitasKelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Lembaga	93,743,600	56,768,600	60.56 %
	1.03.03.2.01.0024	24	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0025	25	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dokumen	530,700,000	420,783,437	79.29 %
	1.03.03.2.01.0026	26	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	14,095,535,000	3,899,693,504	27.67 %
	1.03.03.2.01.0027	27	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Desa	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0028	28	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	1,989,400,000	6,828,076	0.34 %
	1.03.03.2.01.0029	29	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Unit	5,347,366,000	3,090,375,214	57.79 %

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	1.03.03.2.01.0030	30	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Unit	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0031	31	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Unit	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0032	32	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	5,564,150,000	2,430,598,349	43.68 %
	1.03.03.2.01.0033	33	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Unit	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				27,620,894,600	9,905,047,180	35.86 %
	JUMLAH PROGRAM				27,620,894,600	9,905,047,180	35.86 %
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				29,133,200,930	22,797,309,100	78.25 %
	2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota K20240327112559			29,133,200,930	22,797,309,100	78.25 %
	1.03.05.2.01.0001	1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0002	2	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0003	3	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala Kota	Rumah Tangga	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
					-6	-7	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	1.03.05.2.01.0004	4	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0005	5	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Rumah Tangga	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0006	6	Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Rumah Tangga	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0007	7	Pembinaan teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0008	8	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelompok Masyarakat	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0009	9	Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0010	10	Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0011	11	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Dokumen	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0012	12	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman	Rumah Tangga	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0013	13	Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Unit	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	1.03.05.2.01.0014	14	Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Rumah Tangga	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0015	15	Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT	M ³ /Hari	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0016	16	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	M ³ /Hari	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0017	17	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	Dokumen	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0018	18	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)Terpusat Skala Kawasan Tertentu	Unit	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0019	19	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Unit	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0020	20	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M ³ /Hari	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0021	21	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	M ³ /Hari	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0022	22	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	M ³ /Hari	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0023	23	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M ³ /Hari	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	1.03.05.2.01.0024	24	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Unit	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0025	25	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	M ³ /Hari	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0026	26	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	Unit	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0027	27	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M ³ /Hari	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0028	28	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	M ³ /Hari	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0029	29	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Unit	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0030	30	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	M ³ /Hari	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0031	31	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	M ³ /Hari	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	1.03.05.2.01.0032	32	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	M ³ /Hari	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0033	33	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0034	34	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	Desa	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0035	35	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Penyelenggara	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0036	36	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	M ³ /Hari	2,100,000,000	65,401,493	3.11 %
	1.03.05.2.01.0037	37	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0038	38	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Unit	19,075,050,930	15,549,691,422	81.52 %
	1.03.05.2.01.0039	39	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Rumah Tangga	7,557,050,000	6,795,103,747	89.92 %
	1.03.05.2.01.0040	40	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0041	41	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	401,100,000	387,112,438	96.51 %
	JUMLAH INDIKATOR				29,133,200,930	22,797,309,100	78.25 %

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	JUMLAH PROGRAM				29,133,200,930	22,797,309,100	78.25 %
KEGIATAN LAINNYA							
3	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						
TIDAK ADA DATA KEGIATAN LAINYA							

Sumber: e-SPM Bidang Pekerjaan Umum, 2025.

4.7.4 Urusan Perumahan Rakyat

Tabel 4.97
Program, Kegiatan dan Anggaran Urusan Perumahan Rakyat

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KOTA BEKASI				555,000,000	110,168,400	19.85 %
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				555,000,000	110,168,400	19.85 %
	1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota K2023340			0	0	0.00 %
	1.04.02.2.01.0001	1	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.04.02.2.01.0002	2	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	0	0	0%
	1.04.02.2.01.0003	3	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen	0	0	0%
	1.04.02.2.01.0004	4	Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen	0	0	0%
	1.04.02.2.01.0005	5	Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.04.02.2.01.0006	6	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	Dokumen	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	1.04.02.2.01.0007	7	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.04.02.2.01.0008	8	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.04.02.2.01.0009	9	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.04.02.2.01.0010	10	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00 %
	2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota K2023348			555,000,000	110,168,400	19.85 %
	1.04.02.2.03.0001	1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	555,000,000	110,168,400	19.85 %
	1.04.02.2.03.0002	2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.04.02.2.03.0003	3	Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Ha	0	0	0%
	1.04.02.2.03.0004	4	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	1.04.02.2.03.0005	5	Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	1.04.02.2.03.0006	6	Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	1.04.02.2.03.0007	7	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
	1.04.02.2.03.0008	8	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
	1.04.02.2.03.0009	9	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	1.04.02.2.03.0010	10	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	1.04.02.2.03.0011	11	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	1.04.02.2.03.0012	12	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				555,000,000	110,168,400	19.85 %

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	JUMLAH PROGRAM				555,000,000	110,168,400	19.85 %
KEGIATAN LAINNYA							
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						
TIDAK ADA DATA KEGIATAN LAINYA							

Sumber: e-SPM Bidang Perumahan Rakyat, 2025.

4.7.5 Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tabel 4.98
Program, Kegiatan dan Anggaran
Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KOTA BEKASI				56,478,759,746	50,679,044,824	89.73 %
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)				23,435,729,480	19,701,210,550	84.06 %
	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota K2023444			23,023,174,480	19,297,503,850	83.82 %



No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	1.05.02.2.01.0003	1	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	70,770,000	50,995,000	72.06 %
	1.05.02.2.01.0004	2	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	20,139,960,000	17,117,169,350	84.99 %
	1.05.02.2.01.0005	3	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	534,450,000	524,644,500	98.17 %
	1.05.02.2.01.0006	4	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	599,131,300	310,095,000	51.76 %
	1.05.02.2.01.0007	5	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Unit	0	0	0%
	1.05.02.2.01.0008	6	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Dokumen	0	0	0%
	1.05.02.2.01.0009	7	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Laporan	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	1.05.02.2.01.0010	8	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Orang	0	0	0%
	1.05.02.2.01.0011	9	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Dokumen	0	0	0%
	1.05.02.2.01.0012	10	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	Orang	0	0	0%
	1.05.02.2.01.0013	11	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Orang	0	0	0%
	1.05.02.2.01.0014	12	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Orang	0	0	0%
	1.05.02.2.01.0015	13	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Kasus	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	1.05.02.2.01.0015	14	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Laporan	673,952,000	484,800,000	71.93 %
	1.05.02.2.01.0016	15	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Laporan	928,318,080	809,800,000	87.23 %
	1.05.02.2.01.0016	16	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kasus	0	0	0%
	1.05.02.2.01.0017	17	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Laporan	76,593,100	0	0%
	1.05.02.2.01.0018	18	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Unit	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				23,023,174,480	19,297,503,850	83.82 %
	2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota K2023455			412,555,000	403,706,700	97.86 %



No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	1.05.02.2.02.0001	1	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	0	0	0%
	1.05.02.2.02.0002	2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	0	0	0%
	1.05.02.2.02.0003	3	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	0	0	0%
	1.05.02.2.02.0004	4	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	0	0	0%
	1.05.02.2.02.0005	5	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dokumen	0	0	0%
	1.05.02.2.02.0006	6	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Unit	0	0	0%
	1.05.02.2.02.0007	7	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	0	0	0%
	1.05.02.2.02.0008	8	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Laporan	0	0	0%
	1.05.02.2.02.0009	9	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Dokumen	0	0	0%
	1.05.02.2.02.0010	10	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	147,370,000	142,035,600	96.38 %

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	1.05.02.2.02.0011	11	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Laporan	153,300,000	151,666,900	98.93 %
	1.05.02.2.02.0012	12	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	111,885,000	110,004,200	98.32 %
	JUMLAH INDIKATOR				412,555,000	403,706,700	97.86 %
	3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota K2023457			0	0	0.00 %
	1.05.02.2.03.0002	1	Pembentukan Sekretariat PPNS	Dokumen	0	0	0%
	1.05.02.2.03.0003	2	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Dokumen	0	0	0%
	1.05.02.2.03.0004	3	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Laporan	0	0	0%
	1.05.02.2.03.0005	4	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Laporan	0	0	0%
	1.05.02.2.03.0006	5	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00 %
	JUMLAH PROGRAM				23,435,729,480	19,701,210,550	84.06 %
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)				5.174.156.120	4.945.639.406	95.44 %
	4	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota K2023456			537,386,600	530,330,670	98.69 %

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	1.05.03.2.01.0003	1	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	220,710,600	215,356,420	97.57 %
	1.05.03.2.01.0004	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Orang	316,676,000	314,974,250	99.46 %
	JUMLAH INDIKATOR				537,386,600	530,330,670	98.69 %
	5	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana K20240401115443			8,119,301,040	7,737,015,962	95.29 %
	1.05.03.2.02.0001	1	Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	230,115,000	219,859,750	95.54 %
	1.05.03.2.02.0002	2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	Orang	221,882,000	218,938,000	98.67 %
	1.05.03.2.02.0003	3	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	3,447,067,520	3,274,850,111	95.00 %
	1.05.03.2.02.0004	4	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Unit	0	0	0%
	1.05.03.2.02.0005	5	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Kawasan	0	0	0%
	1.05.03.2.02.0006	6	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan	0	0	0%
	1.05.03.2.02.0007	7	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	-	0	0	0%
	1.05.03.2.02.0008	8	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	Orang	30,000,000	26,400,000	88.00 %

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	1.05.03.2.02.0009	9	Penyusunan rencana kontijensi	Dokumen	0	0	0%
	1.05.03.2.02.0010	10	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	0	0	0%
	1.05.03.2.02.0011	11	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Dokumen	230,115,000	219,859,750	95.54 %
	1.05.03.2.02.0012	12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	291,172,000	283,320,240	97.30 %
	1.05.03.2.02.0013	13	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan	0	0	0%
	1.05.03.2.02.0014	14	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.05.03.2.02.0015	15	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Unit	0	0	0%
	1.05.03.2.02.0016	16	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kawasan	221,882,000	218,938,000	98.67 %
	1.05.03.2.02.0017	17	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Laporan	3,447,067,520	3,274,850,111	95.00 %
	JUMLAH INDIKATOR				8,119,301,040	7,737,015,962	95.29 %
	6	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana K2023445			291,533,000	271,940,635	93.28 %
	1.05.03.2.03.0001	1	Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas	Laporan	0	0	0%
	1.05.03.2.03.0002	2	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	1.05.03.2.03.0003	3	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	26,133,000	9,625,000	36.83 %
	1.05.03.2.03.0007	4	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.05.03.2.03.0008	5	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
	1.05.03.2.03.0009	6	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	265,400,000	262,315,635	98.84 %
	1.05.03.2.03.0010	7	Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	Dokumen	0	0	0%
	1.05.03.2.03.0011	8	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				291,533,000	271,940,635	93.28 %
	7	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana K2023446			125,000,000	120,000,000	96.00 %
	1.05.03.2.04.0001	1	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.05.03.2.04.0002	2	Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.05.03.2.04.0003	3	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.05.03.2.04.0004	4	Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	1.05.03.2.04.0005	5	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Laporan	0	0	0%
	1.05.03.2.04.0006	6	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.05.03.2.04.0007	7	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
	1.05.03.2.04.0008	8	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Orang	125,000,000	120,000,000	96.00 %
	1.05.03.2.04.0009	9	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.05.03.2.04.0010	10	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.05.03.2.04.0011	11	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usahadalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Lembaga	0	0	0%
	1.05.03.2.04.0012	12	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Laporan	0	0	0%
	1.05.03.2.04.0013	13	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				125,000,000	120,000,000	96.00 %

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	JUMLAH PROGRAM				9,073,220,640	8,659,287,267	95.44 %
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)				23,969,309,626	22,318,047,007	93.11 %
	8	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota K2023449			18,635,569,626	17,646,266,933	94.69 %
	1.05.04.2.01.0001	1	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.05.04.2.01.0002	2	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	5,001,489,926	4,943,963,536	98.85 %
	1.05.04.2.01.0003	3	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Laporan	923,005,160	883,655,766	95.74 %
	1.05.04.2.01.0004	4	Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.05.04.2.01.0005	5	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	3,484,454,000	3,280,390,051	94.14 %
	1.05.04.2.01.0007	6	Pembinaan aparaturnya pemadam kebakaran	Dokumen	1,390,500,000	1,390,408,740	99.99 %
	1.05.04.2.01.0008	7	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Unit	204,200,000	203,148,169	99.48 %

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	1.05.04.2.01.0011	8	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangann Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	0	0	0%
	1.05.04.2.01.0012	9	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	Laporan	0	0	0%
	1.05.04.2.01.0013	10	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	0	0	0%
	1.05.04.2.01.0014	11	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Dokumen	0	0	0%
	1.05.04.2.01.0015	12	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen	0	0	0%
	1.05.04.2.01.0016	13	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Dokumen	0	0	0%
	1.05.04.2.01.0017	14	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	7,009,120,540	6,381,786,259	91.05 %
	1.05.04.2.01.0018	15	Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Orang	529,850,000	474,879,141	89.63 %

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	1.05.04.2.01.0019	16	Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	Dokumen	92,950,000	88,035,271	94.71 %
	JUMLAH INDIKATOR				18,635,569,626	17,646,266,933	94.69 %
	9	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran K2023450			81,615,000	80,983,500	99.23 %
	1.05.04.2.02.0001	1	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen	81,615,000	80,983,500	99.23 %
	1.05.04.2.02.0002	2	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				81,615,000	80,983,500	99.23 %
	10	Investigasi Kejadian Kebakaran K2023451			0	0	0.00 %
	1.05.04.2.03.0001	1	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00 %
	11	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran K2023459			146,508,000	123,271,025	84.14 %
	1.05.04.2.04.0001	1	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang	0	0	0%
	1.05.04.2.04.0002	2	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Desa	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	1.05.04.2.04.0003	3	Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Dokumen	146,508,000	123,271,025	84.14 %
	JUMLAH INDIKATOR				146,508,000	123,271,025	84.14 %
	12	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia K2023458			5,105,617,000	4,467,525,549	87.50 %
	1.05.04.2.05.0001	1	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	Laporan	0	0	0%
	1.05.04.2.05.0002	2	Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Dokumen	0	0	0%
	1.05.04.2.05.0004	3	Pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Laporan	517,416,000	512,668,100	99.08 %
	1.05.04.2.05.0005	4	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Unit	4,588,201,000	3,954,857,449	86.20 %
	JUMLAH INDIKATOR				5,105,617,000	4,467,525,549	87.50 %

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	JUMLAH PROGRAM				23,969,309,626	22,318,047,007	93.11 %
KEGIATAN LAINNYA							
4	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						
		01.00	pembuatan rambu		500	500	100.00 %

Sumber: e-SPM Bidang Trantibumlinmas2025.

4. 7. 8 Urusan Sosial

Tabel 4.101
Program, Kegiatan dan Anggaran Urusan Sosial

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KOTA BEKASI				8,736,503,960	6,575,055,422	75.26 %
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				6,027,034,535	5,166,326,002	85.72 %
	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial K2023152			4,645,154,625	4,005,927,311	86.24 %
	1.06.04.2.01.0001	1	Penyediaan permakanan	Orang	743,000,000	607,430,000	0%



No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	1.06.04.2.01.0002	2	Penyediaan sandang	Orang	100,000,000	98,534,022	0%
	1.06.04.2.01.0003	3	Penyediaan alat bantu	Orang	629,840,000	538,668,800	0%
	1.06.04.2.01.0004	4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	589,000,000	406,917,797	0%
	1.06.04.2.01.0005	5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	358,380,000	266,649,866	0%
	1.06.04.2.01.0006	6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang	1,380,000,000	1,306,664,516	0%
	1.06.04.2.01.0007	7	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan	Orang	32,633,625	25,965,000	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			Kartu Identitas Anak				
	1.06.04.2.01.0008	8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	50,000,000	49,476,719	0%
	1.06.04.2.01.0009	9	Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang	51,081,000	50,135,000	0%
	1.06.04.2.01.0010	10	Pemberian layanan kedaruratan	Orang	199,190,000	170,800,000	0%
	1.06.04.2.01.0011	11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	12,030,000	10,884,000	0%
	1.06.04.2.01.0012	12	Pemberian layanan rujukan	Dokumen	500,000,000	473,801,591	0%
	JUMLAH INDIKATOR				4,645,154,625	4,005,927,311	86.24 %
	2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota K2023153			1,381,879,910	1,160,398,691	83.97 %
	1.06.06.2.01.0001	1	Penyediaan makanan	Orang	588,240,000	491,669,672	83.58 %
	1.06.06.2.01.0002	2	Penyediaan sandang	Orang	250,000,000	202,960,170	81.18 %

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	1.06.06.2.01.0003	3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	241,253,910	<u>191,139,598</u>	79.23 %
	1.06.06.2.01.0004	4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	150,000,000	<u>127,939,051</u>	85.29 %
	1.06.06.2.01.0005	5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	152,386,000	<u>146,690,200</u>	96.26 %
	JUMLAH INDIKATOR				1,381,879,910	1,160,398,691	83.97 %
	JUMLAH PROGRAM				6,027,034,535	5,166,326,002	85.72 %
KEGIATAN LAINNYA							
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						
		01.00	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan		356,572,000	296,104,635	83.04 %

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			Kampung Siaga Bencana				
		02.00	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		137,792,425	122,470,005	88.88 %
		03.00	Sub kegiatan pengelolaan dana darurat dan mendesak		2,215,105,000	990,154,780	44.70 %

Sumber: e-SPM Bidang Sosial, 2025.



**LPPD
2025**

BAB V PENUTUP





BAB V PENUTUP

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan masyarakat, Pemerintah Kota Bekasi melaksanakan berbagai kebijakan melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan baik Urusan Pemerintahan Wajib (Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar), Urusan Pilihan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, serta penyelenggaraan Tugas Pembantuan. Substansi LPPD ini merupakan penjelasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan daerah yang diselenggarakan selama kurun waktu tahun 2025.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakekatnya adalah proses pembuatan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kota Bekasi bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kota Bekasi.

Berdasarkan hasil pembahasan pada BAB I sampai dengan BAB IV Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2025, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pembentukan Pemerintah Kota Bekasi ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tanggal 16 Desember 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi dan perubahan status tersebut diresmikan pada tanggal 10 Maret 1997 dengan luas wilayah Kota Bekasi seluas 213,1174 km², dengan jumlah penduduk sebanyak 2.595.927 jiwa pada akhir tahun 2025 yang tersebar di 56 Kelurahan 12 Kecamatan. Serta Aparatur Sipil Negara sebanyak 22.618 aparatur yang terdiri dari 3.151 PNS Laki-Laki dan 4.440 PNS Perempuan serta 5.993 PPPK Laki-Laki dan 5.592 PPPK Perempuan serta 2.575 PPPK Paruh Waktu dan 867 PPPK Paruh Waktu yang tersebar pada 44 Perangkat Daerah Kota Bekasi. Untuk menjalankan roda pemerintahan, Pemerintah Kota Bekasi menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 selanjutnya terakhir ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan target pendapatan Rp. 7.254.298.657.516,00 (*Tujuh Triliun Dua Ratus Lima Puluh Empat Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp.

5.603.843.190.731,00 (*Lima Triliun Enam Ratus Tiga Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*) dengan persentase realisasi 77,25 persen. Sementara Anggaran belanja ditetapkan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.555.652.396.242,00 (*Tujuh Triliun Lima Ratus Lima Puluh Lima Miliar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*) dengan realisasi belanja sebesar Rp. 6.451.429.852.145,00 (*Enam Triliun Empat Ratus Lima Puluh Satu Miliar Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah*) dengan persentase realisasi 85,39 persen

2. Capaian kinerja makro 2025 rata-rata meningkat dari tahun 2024, dengan data capaian sebagai berikut:

Tabel 5.1
Capaian Kinerja Makro Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025	Laju Kinerja (%)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	83,55	84,43	+1,05%
2.	Angka Kemiskinan	4,01	3,96	-1,25%
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,82	7,33	-6,27%
4.	Pertumbuhan Ekonomi	5,19	5,2	+3,85%
5.	Pendapatan Per Kapita	48.921.014	52.513.488	+7,34%
6.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,44	0,407	+6,44%

Sumber: Diolah, 2025.

3. Adapun Data Capaian Indikator Kinerja Kunci Pemerintah Kota Bekasi berjumlah 127 Indikator Kinerja Kunci Hasil, adapun hasil data capaian tertuang pada BAB II pada Laporan ini.
4. Dalam hal akuntabilitas kinerja, dapat dilihat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPD Kota Bekasi untuk Tahun 2024-

2026 serta Perjanjian Kinerja Kota Bekasi Tahun 2025 sebanyak 11 (sebelas) sasaran strategis dan 25 (dua puluh lima) indikator kinerja utama, yang terinci sebagai berikut:

- a. Capaian 25 indikator kinerja utama pada sasaran pembangunan daerah, secara umum penyelenggaraan pemerintahan daerah telah menunjukkan upaya peningkatan kinerja dalam berbagai sektor, meliputi tata kelola pemerintahan, pembangunan sumber daya manusia, peningkatan kualitas infrastruktur, serta pertumbuhan ekonomi daerah yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Capaian indikator tersebut menjadi gambaran kinerja pemerintah daerah dalam satu tahun penyelenggaraan pemerintahan dan menjadi dasar evaluasi untuk meningkatkan efektivitas program pembangunan, kualitas pelayanan publik, serta penguatan daya saing daerah pada periode perencanaan berikutnya.

Tabel 5.2
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2025 (sesuai RPD)

SASARAN RANCANGAN RPD	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	SATUAN
1	2		3	4
Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	85,15	Nilai
Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah	2.	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	3,53	Nilai
	3.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	73,12	Nilai

SASARAN RANCANGAN RPD	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	SATUAN
1	2		3	4
	4.	Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (opini BPK terhadap Laporan Keuangan)	WTP	Nilai
	5.	Persentase Peningkatan PAD	86,77	%
Meningkatnya Masyarakat yang Berpengetahuan Tinggi	6.	Indeks Pendidikan	77,83	Nilai
Meningkatnya akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	7.	Indeks Kesehatan	84,95	Nilai
Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga dan Pembangunan Responsif Gender	8.	Indeks Pembangunan Keluarga	52,50	%
	9.	Indeks Pembangunan Gender	93,20	%
Meningkatnya Tenaga Kerja yang Adaptif dan Kesejahteraan Masyarakat Kota	10.	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,42	%
	11.	Angka Kemiskinan	4,40	%
Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berwawasan Lingkungan	12.	Indeks Infrastruktur Ke-PU-an	47,46	%
	13.	Indeks Sarana Prasarana Perhubungan	85,80	%
	14.	Indeks Perumahan Permukiman Pertanahan Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Ekonomi Kreatif	50,17	%



SASARAN RANCANGAN RPD	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	SATUAN
1	2		3	4
	15.	Indeks Penataan Ruang	53,77	%
	16.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,10	Nilai
Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang Didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat	17.	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	1,99	%
	18.	Persentase Kerjasama Antar Kelompok SARA	100,00	%
Meningkatnya Upaya dan Kesiapsiagaan dalam Mengurangi Risiko Bencana	19.	Indeks Risiko Bencana	103	Nilai
	20.	Indeks Penanggulangan Kebakaran	83,00	Nilai
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan, Jasa, dan Industri serta Iklim Usaha Berbasis Pengalaman (Kreatif) dan Investasi	21.	Persentase Peningkatan Nilai Sektor Perdagangan dan Jasa	3,13	%
	22.	Persentase Peningkatan Nilai Sektor Industri	3,17	%
	23.	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	7	%
Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	24.	Peningkatan Pengeluaran Perkapita	1,5	%
	25.	Laju Inflasi	3,08±1	%

Sumber : RPD Kota Bekasi 2024-2026

c. Pada tahun 2025 Pemerintah Kota Bekasi melaksanakan beberapa tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat yang pelaksanaannya dilaksanakan

- oleh beberapa Perangkat Daerah sebagai berikut:
- a. Dinas Pendidikan memperoleh tugas pembantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi memperoleh tugas pembantuan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- Adapun rincian target dan realisasi tugas pembantuan yang diberikan oleh Kementerian teknis pemberi tugas pembantuan ataupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat tertuang pada BAB III pada laporan ini.
- d. Target pencapaian penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2025 belum sepenuhnya tercapai sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dimana dari 29 indikator pada 6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar, hanya sebanyak 16 indikator yang mencapai 100 persen, sementara 11 Indikator tidak mencapai 100 persen akan tetapi capaian kinerjanya di atas 80 - 90 persen, dan sisanya sebanyak 2 indikator N/A. Adapun capaian kinerja SPM Pemerintah Kota Bekasi sebagai berikut:

Tabel 5.3
Target Pencapaian Standar Pelayanan
Minimal Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2025

No	Urusan	Jenis SPM	Indikator	Target Indikator	Capaian Indikator	%
1	Pendidikan	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Kota Bekasi Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dasar (SD/MI, SMP/MTs)	380.823 orang	370.530 orang	97,30

No	Urusan	Jenis SPM	Indikator	Target Indikator	Capaian Indikator	%
		Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Kota Bekasi Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan Kesetaraan	5.919 orang	5. 919 orang	100
		Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Kota Bekasi Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	85.727 orang	77.339 orang	90,20
2	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	41.723	40.669	97,47
		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	41,723	40,449	96,95
		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir 0-28 hari yang mendapatkan layanan kesehatan	40,438	39,876	98,61
		Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita 0-59 bulan yang	150,066	144,969	96,60

No	Urusan	Jenis SPM	Indikator	Target Indikator	Capaian Indikator	%
			Mendapatkan layanan kesehatan			
		Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Kota Bekasi usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	383,845	347,764	90,60
		Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Warga Kota Bekasi usia produktif (15-59 tahun) yang mendapatkan layanan kesehatan	1,688,228	935,003	55,38
		Pelayanan Kesehatan pada usia lansia	Jumlah warga Kota Bekasi usia 60 tahun yang mendapatkan layanan kesehatan	259,100	241,641	93,26
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Kota Bekasi yang berusia 15 tahun keatas yang menderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	171,949	136,003	79,09
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes	Umlah Warga Kota Bekasi yang berusia 15 tahun	44,010	44,010	100

No	Urusan	Jenis SPM	Indikator	Target Indikator	Capaian Indikator	%
		Melitus	keatas yang menderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan			
		Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapat pelayanan kesehatan	4,440	4,321	97,32
		Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkolosis	Jumlah Warga Kota Bekasi terduga tuberkolosis (TBC) yang mendapatkan layanan kesehatan	53,886	53,886	100
		Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah Warga Kota Bekasi terduga beresiko terinfeksi virus HIV yang mendapatkan layanan kesehatan	87,622	87,622	100
3	Pekerjaan Umum	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari.	Jumlah Warga Kota Bekasi yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari	10.671 Orang	10.671 Orang	100



No	Urusan	Jenis SPM	Indikator	Target Indikator	Capaian Indikator	%
			hari			
		Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.	Jumlah Warga Kota Bekasi yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	4.863 Orang	4.863 Orang	100
4	Perumahan Rakyat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kota.	Jumlah Warga Kota Bekasi korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	N/A	N/A	N/A
		Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kota.	Jumlah Warga Kota Bekasi yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	N/A	N/A	N/A
5	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum.	Jumlah Warga Kota Bekasi yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	46 Orang	46 Orang	100



No	Urusan	Jenis SPM	Indikator	Target Indikator	Capaian Indikator	%
		Pelayanan informasi rawan bencana.	Jumlah Warga Kota Bekasi yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	14.311 Orang	14.311 Orang	100
		Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.	Jumlah Warga Kota Bekasi yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	14.311 Orang	14.311 Orang	100
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.	Jumlah Warga Kota Bekasi yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	14.311 Orang	14.311 Orang	100
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban.	Jumlah Warga Kota Bekasi yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	1.742 Orang	1.742 Orang	100
6	Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti.	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial	1.128 Orang	1.128 Orang	100



No	Urusan	Jenis SPM	Indikator	Target Indikator	Capaian Indikator	%
			di luar panti			
		Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti.	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	1.152 Orang	1.152 Orang	100
		Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar di luar panti	370 Orang	370 Orang	100
		Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	670 Orang	670 Orang	100
		Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap danpasca bencana bagi korban bencana kota.	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca	2.000 Orang	2.000 Orang	100



No	Urusan	Jenis SPM	Indikator	Target Indikator	Capaian Indikator	%
			bencana bagi korban bencana kota.			

Sumber: Diolah, 2025.





PEMERINTAH
KOTA BEKASI
2026